BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

- PERUBAHAN RPJMD -

(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 -2023



Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto

H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto

PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

World
Heritage
Convention

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto
inscribed on the World Heritage List in 2019

GEOPARK
SAWAHLUNTO

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2021

SALINAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta dengan adanya perubahan kebijakan nasional, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyesuaian dan penataan kembali terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencna Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

30 DEC 2021
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT : 6 /131 / 2021)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan di daerah selama 5 (lima) tahun, pedoman penyusunan rencana kerja tahunan serta pedoman pengendalian dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan/atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencna Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta dengan adanya perubahan kebijakan nasional, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Selain itu juga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari laporan kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai akhir periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 95

DAFTAR ISI

HALAMAN

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-2
1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1 SEJARAH KOTA SAWAHLUNTO II-1
2.2 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI II-3
2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-14
2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM II-59
2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-173
2.6 GAMBARAN COVID-19 DI KOTA SAWAHLUNTO II-200
2.7 CAPAIAN SPM KOTA SAWAHLUNTO II-203
2.8 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN II-207

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU III-5
3.2 DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH III-9
3.3 KERANGKA PENDANAAN III-53

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN IV-1
4.2 ISU STRATEGIS IV-24

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2005-2025 ..... V-1
5.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024 ..... V-1
5.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026 ..... V-3
5.4 RPJMD KABUPATEN/KOTA TETANGGA V-4
5.5 RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 ..... V-5
5.6 MISI V-6
5.7 TUJUAN DAN SASARAN V-7

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN VI-1
6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN VI-1
6.2 REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /SDG's VI-85
6.3 DUKUNGAN PROGRAM KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP PROGRAM UNGGULAN SUMATERA BARAT VI-91
6.4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN VI-92

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERIN TAHAN DAERAH VIII-1
8.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO VIII-1
8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA VIII-3
8.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-16

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 PEDOMAN TRANSISI IX-1
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN IX-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Rt, Rw, Dusun, Dan Luas Wilayah Desa Serta Kecamatan..... II-3
Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto II-5
Tabel 2. 3 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto II-6
Tabel 2. 4 Kondisi Penggunaan Lahan Di Kota Sawahlunto..... II-11
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto II-12
Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 (Jiwa/Km2) II-13
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020 ..... II-13
Tabel 2. 8 Pdrb Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 ..... II-14
Tabel 2. 9 Pdrb Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku II-16
Tabel 2. 10 Distribusi Pdrb Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku II-18
Tabel 2. 11 Pertumbuhan Pdrb Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan II-19
Tabel 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota II-21
Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Juta Rupiah) II-22
Tabel 2. 14 Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Persen)..... II-22
Tabel 2. 15 Pdrb Kota Sawahlunto Adhb Menurut Pengeluaran..... II-23
Tabel 2. 16 Pdrb Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan II-24
Tabel 2. 17 Distribusi Pdrb Adhb Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran (%) II-24
Tabel 2. 18 Perkembangan Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan Pdrb Deflator Tahun 2016 – 2020..... II-26
Tabel 2. 19 Perkembangan Pdrb Per Kapita Kota Sawahlunto Dengan Variabel Pembentuknya Tahun 2016 – 2020..... II-27
Tabel 2. 20 Pdrb Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barattahun 2018 – 2020..... II-28
Tabel 2. 21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-34
Tabel 2. 22 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)..... II-34
Tabel 2. 23 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)..... II-35
Tabel 2. 24 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)..... II-35
Tabel 2. 25 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)..... II-36
Tabel 2. 26 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita, Pdrb Per Kapita, Rasio Pengeluaran Per Kapita Terhadap Pdrb Per Kapita Kabupaten /Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2019 Dan 2020 ..... II-37
Tabel 2. 27 Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020..... II-39
Tabel 2. 28 Peringkat Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota Se Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020..... II-40
Tabel 2. 29 Peringkat Angka Harapan Hidup Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020..... II-41
Tabel 2. 30 Jumlah Kasus Gizi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020 ..... II-42
Tabel 2. 31 Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016 – 2020..... II-43
Tabel 2. 32 Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel 2. 33 Jumlah Gedung Kesenian Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel 2. 34 Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2016-2020 ..... II-45
Tabel 2. 35 Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Sawahlunto..... II-48
Tabel 2. 36 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs Yang Sudah Dilaksanakan Dan Mencapai Target Nasional Di Kota Sawahlunto..... II-49
Tabel 2. 37 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum

Mencapai Target Di Kota Sawahlunto II-50
Tabel 2. 38 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target Di Kota Sawahlunto II-51
Tabel 2. 39 Indikator Yang Sudah Dilakukan Dan Belum Mencapai Target (Sb) II-51
Tabel 2. 40 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs Yang Tidak Memiliki Data Di Kota Sawahlunto II-55
Tabel 2. 41 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Tidak Memiliki Data II-56
Tabel 2. 42 Indikator Yang Belum Memiliki Data (Na) II-56
Tabel 2. 43 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020 ..... II-59
Tabel 2. 44 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-60
Tabel 2. 45 Data Kondisi Paud Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2020 ..... II-60
Tabel 2. 46 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020 ..... II-61
Tabel 2. 47 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-61
Tabel 2. 48 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017 ..... II-62
Tabel 2. 49 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-62
Tabel 2. 50 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-63
Tabel 2. 51 Pencapaian Standar Pelayana Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019 – 2020 ..... II-64
Tabel 2. 52 Angka Partispasi Murni (Apm) Tahun 2016 – 2020 ..... II-64
Tabel 2. 53 Angka Partispasi Kasar (Apk) Tahun 2016 – 2020 ..... II-65
Tabel 2. 54 Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-65
Tabel 2. 55 Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2. 56 Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel 2. 57 Rasio Posyandu Dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020 ..... II-67
Tabel 2. 58 Persentase Kunjungan Balita Ke Posyandu Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-67
Tabel 2. 59 Rasio Puskesmas, Praktek Dokter Dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-68
Tabel 2. 60 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel 2. 61 Prosentase Kasus Stunting Balita Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-69
Tabel 2. 62 Angka Kematian Dan Kelahiran Bayi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-69
Tabel 2. 63 Angka Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2020 ..... II-70
Tabel 2. 64 Data Sanitasi Sekolah Se-Kota Sawahlunto Tahun 2020 ..... II-70
Tabel 2. 65 Jumlah Kasus Penyakit Menular Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021 ..... II-71
Tabel 2. 66 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan II-71
Tabel 2. 67 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020 ..... II-72
Tabel 2. 68 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-73
Tabel 2. 69 Persentase Jalan Yang Memliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-74
Tabel 2. 70 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020 ..... II-74
Tabel 2. 71 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2. 72 Persentase Luas Lahan Pertanian Yang Terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2. 73 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2. 74 Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Tahun 2016-2020 ..... II-76
Tabel 2. 75 Persentase Rt Yang Memenuhi Syarat II-77
Tabel 2. 76 Persentase Rt Dengan Spal Yang Memenuhi Syarat II-77
Tabel 2. 77 Data Jumlah Kk Yang Memiliki Rumah Di Kota Sawahlunto 2017 – 2020 ..... II-80
Tabel 2. 78 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 – 2020 ..... II-81
Tabel 2. 79 Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/Wako-Swl/2020

Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh II-82
Tabel 2. 80 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-83
Tabel 2. 81 Data Pelanggaran Perda Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-83
Tabel 2. 82 Jumlah Linmas Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-84
Tabel 2. 83 Angka Kriminalitas Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-85
Tabel 2. 84 Jumlah Kasus Bencana Kebakaran Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-86
Tabel 2. 85 Data Bencana Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-86
Tabel 2. 86 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Propinsi Dan Kabupaten/ Kota II-87
Tabel 2. 87 Penyandang Cacat Di Kota Sawahluntotahun 2016-2020..... II-88
Tabel 2. 88 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Kota Sawahlunto Tahun 2020 ..... II-89
Tabel 2. 89 Penyandang Disabilitas (Usia Diatas 18 Tahun) Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-89
Tabel 2. 90 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) (Usia 0 S/D 18 Tahun) Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2. 91 Jumlah Penyandang Gangguan Jiwa/ Psikotik Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-90
Tabel 2. 92 Jumlah Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-90
Tabel 2. 93 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-91
Tabel 2. 94 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-92
Tabel 2. 95 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja Di Perusahaan Dan Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-92
Tabel 2. 96 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-94
Tabel 2. 97 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-94
Tabel 2. 98 Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-95
Tabel 2. 99 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018..... II-96
Tabel 2. 100 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Dan Jenis Kelamin Di Kota Sawahlunto Tahun 2019 S.D 2020 ..... II-96
Tabel 2. 101 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-97
Tabel 2. 102 Rasio Penduduk Yang Bekerja Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020..... II-98
Tabel 2. 103 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2016-2020..... II-99
Tabel 2. 104 Jumlah Kdrt Di Kota Sawahluntotahun 2016 – 2020 ..... II-100
Tabel 2. 105 Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2tp2a Kota Arangberdasarkan Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tahun 2020 ..... II-101
Tabel 2. 106 Data Jumlah Kasus Perceraian Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-101
Tabel 2. 107 Indeks Pembanguan Gender (IPG) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2020..... II-101
Tabel 2. 108 Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-102
Tabel 2. 109 Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2016 – 2020 ..... II-102
Tabel 2. 110 Predikat Kota Layak Anak Kota Sawahluntotahun 2016- 2020 ..... II-103
Tabel 2. 111 Konsumsi, Keragaman Pangan Dan Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2018, 2019 Dan 2020..... II-104
Tabel 2. 112 Desa Mandiri Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2017-2018..... II-107
Tabel 2. 113 Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Sawahlunto II-108
Tabel 2. 114 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020 ..... II-110
Tabel 2. 115 Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2. 116 Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2016-2020..... II-111
Tabel 2. 117 Rasio Jumlah Tpss Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-112
Tabel 2. 118 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2016-2020..... II-113
Tabel 2. 119 Data Kepemilikan Ktp-Elektronik Di Kota Sawahluntotahun 2016-2020..... II-113
Tabel 2. 120 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020 ..... II-113
Tabel 2. 121 Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Kia) Tahun 2020..... II-113
Tabel 2. 122 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Dan Kelurahan Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel 2. 123 Status Desa Berdasar Profil Desa/ Kelurahan Tahun 2020..... II-114

Tabel 2. 124 Status Desa Berdasarkan Idm Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-115
Tabel 2. 125 Rata-Rata Jumlah Anak Per Rumah Tangga Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 -2020 ..... II-115
Tabel 2. 126 Rasio Akseptor Kb Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 -2020..... II-116
Tabel 2. 127 Jenis Dan Jumlah Sarana Transportasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020..... II-117
Tabel 2. 128 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto..... II-119
Tabel 2. 129 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016-2020..... II-120
Tabel 2. 130 Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Telepon/Hp Tahun 2016- 2020.... II-121
Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Komunikasi Dan Informatika Tahun 2016-2020 ..... II-121
Tabel 2. 132 Cakupan Sinyal Telekomunikasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2019..... II-122
Tabel 2. 133 Jenis Koneksi Internet Yang Dimanfaatkan Di Seluruh Desa Di Kota Sawahlunto Tahun 2019..... II-123
Tabel 2. 134 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto..... II-124
Tabel 2. 135 Perkembangan Koperasi Dan Permodalan Kota Sawahlunto..... II-124
Tabel 2. 136 Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2016 Dan 2020 (Koperasi)..... II-125
Tabel 2. 137 Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-127
Tabel 2. 138 Data Nilai Investasi Tahun 2020 ..... II-127
Tabel 2. 139 Jumlah Realisasi Investasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-128
Tabel 2. 140 Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-128
Tabel 2. 141 Jumlah Bank Dan Asuransi Tahun 2016-2020 ..... II-129
Tabel 2. 142 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Sawahlunto Tahun 2020 ..... II-130
Tabel 2. 143 Data Tentang Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020..... II-130
Tabel 2. 144 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Sawahlunto Tahun 2020 ..... II-131
Tabel 2. 145 Data Tentang Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020..... II-131
Tabel 2. 146 Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-132
Tabel 2. 147 Komunitas Budaya Yang Ada Di Kota Sawahlunto II-132
Tabel 2. 148 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-133
Tabel 2. 149 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) Di Kota Sawahlunto..... II-134
Tabel 2. 150 Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-137
Tabel 2. 151 Jumlah Gedung Kesenian Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-138
Tabel 2. 152 Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2016-2020..... II-139
Tabel 2. 153 Peningkatan Minat Baca Masyarakat Sawahlunto. Namun Pada Tahun 2020 .. II-139
Tabel 2. 154 Aset Kearsipan Yang Dimiliki Oleh Kota Sawahlunto II-140
Tabel 2. 155 Produksi Dan Konsumsi Ikan Tahun 2016 S/D 2020..... II-140
Tabel 2. 156 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Di Kota Sawahlunto 2017 - 2020..... II-140
Tabel 2. 157 Nilai Produksi Tangkap Menurut Jenis Ikan Di Kota Sawahlunto 2017 - 2020..... II-141
Tabel 2. 158 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha) II-141
Tabel 2. 159 Jumlah Pengunjung Objek Wisata Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 (Berdasarkan Tiket Masuk)..... II-143
Tabel 2. 160 Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara Dan Wisatawan Nusantara..... II-143
Tabel 2. 161 Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-145
Tabel 2. 162 Data Jenis Usaha Pariwisata Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-147
Tabel 2. 163 Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-148
Tabel 2. 164 Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2016 Sampai 2020..... II-149
Tabel 2. 165 Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap Pad Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-152
Tabel 2. 166 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Terhadap Pdrb Tahun 2016-2020 ..... II-153
Tabel 2. 167 Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Tahun 2020 ..... II-154

Tabel 2. 168 Produkfitas Padi Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2. 169 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2016-2020 ..... II-154
Tabel 2. 170 Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2016-2020 ..... II-155
Tabel 2. 171 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2016 – 2020 ..... II-156
Tabel 2. 172 Perkembangan Populasi (Ekor) Dan Produksi Daging (Kg) Dari Tahun 2016-2020 ..... II-156
Tabel 2. 173 Perkembangan Ternak Unggas Populasi Ternak (Ekor) Produksi Daging (Kg) Tahun 2016-2020 ..... II-157
Tabel 2. 174 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap Pdrb Tahun 2016-2020 ..... II-158
Tabel 2. 175 Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-159
Tabel 2. 176 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020 ..... II-159
Tabel 2. 177 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pdrb Tahun 2016-2020 ..... II-161
Tabel 2. 178 Perkembangan Potensi Industri Di Kota Sawahlunto Tahun 2015 S/D 2019 .... II-162
Tabel 2. 179 Daftar Potensi Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2020 ..... II-164
Tabel 2. 180 Jumlah Alokasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Tahun 2016-2020 ..... II-166
Tabel 2. 181 Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir II-167
Tabel 2. 182 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Sawahluntotahun 2016-2020 ..... II-167
Tabel 2. 183 Realisasi Apbd Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-168
Tabel 2. 184 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-169
Tabel 2. 185 Jumlah Pns Yang Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2016-2020 ..... II-169
Tabel 2. 186 Jumlah Inovasi Berdasarkan Inisiator II-170
Tabel 2. 187 Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 ..... II-171
Tabel 2. 188 Jumlah Auditor Di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018 ..... II-172
Tabel 2. 189 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) 5 Tahun Terakhir II-172
Tabel 2. 190 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-174
Tabel 2. 191 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-174
Tabel 2. 192 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-177
Tabel 2. 193 Produktifitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Per Sektor Tahun 2019 – 2020 .... II-178
Tabel 2. 194 Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Status Pekerjaan Utama II-179
Tabel 2. 195 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... II-181
Tabel 2. 196 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto II-182
Tabel 2. 197 Rasio Rth Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018 ..... II-183
Tabel 2. 198 Luas Wilayah Industri Tahun 2015-2019 ..... II-183
Tabel 2. 199 Jumlah Bank Dan Asuransi Tahun 2016-2020 ..... II-184
Tabel 2. 200 Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum II-185
Tabel 2. 201 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016-2020 ..... II-186
Tabel 2. 202 Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Telepon/Hp Tahun 2016- 2020 .... II-186
Tabel 2. 203 Angka Kriminalitas Di Kota Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-187
Tabel 2. 204 Realisasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020 ..... II-188
Tabel 2. 205 Jumlah Sumber Daya Manusia Dalam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dpmptspnaker Kota Sawahlunto II-189
Tabel 2. 206 Target Dan Realisasi Pdrd Kota Sawahlunto Tahun 2016 S.D 2020 ..... II-190
Tabel 2. 207 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015 ..... II-192
Tabel 2. 208 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Di Kota Sawahlunto Yang Ditetapkan Tahun 2016 – 2020 ..... II-193
Tabel 2. 209 Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... II-193
Tabel 2. 210 Hasil Analisis Shift Share (Ss) Kota Sawahlunto 2016-2020 ..... II-194
Tabel 2. 211 Hasil Analisis Location Quotient (Lq) Kota Sawahlunto 2016-2020 ..... II-196
Tabel 2. 212 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto 2016-2020 ..... II-197
Tabel 2. 213 Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, Lq Dan Tipologi Klassen Kota Sawahlunto 2016-2020 ..... II-198
Tabel 2. 214 Capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2019-2020 ..... II-204

Tabel 2. 215 Skala Nilai Dan Kriteria Penilaian Kinerja II-207
Tabel 2. 216 Skala Nilai Dan Prediket Pencapaian Kinerja II-207
Tabel 2. 217 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2018-2023 Sampai Dengan Tahun 2020..... II-209
Tabel 3. 1 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto, Tahun 2016- 2020 ..... III-7
Tabel 3. 2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kota Sawahlunto 2016 – 2020..... III-9
Tabel 3. 3 Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Ta 2016-2020 ..... III-10
Tabel 3. 4 Kinerja Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto 2016-2020 ..... III-12
Tabel 3. 5 Jumlah Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... III-16
Tabel 3. 6 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020..... III-18
Tabel 3. 7 Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 ..... III-19
Tabel 3. 8 Neraca Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... III-21
Tabel 3. 9 Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-23
Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016-2020 ..... III-39
Tabel 3. 11 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja..... III-42
Tabel 3. 12 Alokasi Dana Pendidikan Tahun 2018-2023 ..... III-43
Tabel 3. 13 Alokasi Dana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023..... III-44
Tabel 3. 14 Alokasi Dana Infrastruktur Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023..... III-44
Tabel 3. 15 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020..... III-46
Tabel 3. 16 Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... III-48
Tabel 3. 17 Belanja Wajib Dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... III-49
Tabel 3. 18 Defisit Rill Anggaran Kota Sawahlunto..... III-50
Tabel 3. 19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto..... III-51
Tabel 3. 20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Sawahlunto III-52
Tabel 3. 21 Silpa Kota Sawahlunto Ta 2016-2020..... III-52
Tabel 3. 22 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021-2023..... III-57
Tabel 3. 23 Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023..... III-58
Tabel 3. 24 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023..... III-58
Tabel 3. 25 Realisasi Dan Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023..... III-59
Tabel 3. 26 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-60
Tabel 3. 27 Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020 ..... III-61
Tabel 3. 28 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023..... III-61
Tabel 4. 1 Logical Framework Rumusan Permasalahan Berdasarkan Urusan..... IV-7
Tabel 4. 2 Rumusan Isu Strategis TPB/SDGs Berdasarkan SPM Kota Sawahlunto IV-24
Tabel 4. 3 Rencana Pola Ruang Di Kota Sawahlunto IV-33
Tabel 5. 1 Matriks Keselarasan Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Barat Dengan Visi Da Misi Pemerintah Kota Sawahlunto..... V-4
Tabel 5. 2 Tujuan Dan Sasaran Misi 1 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-7
Tabel 5. 3 Tujuan Dan Sasaran Misi 2 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-8
Tabel 5. 4 Tujuan Dan Sasaran Misi 3 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-9
Tabel 5. 5 Tujuan Dan Sasaran Misi 4 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-9
Tabel 5. 6 Tujuan Dan Sasaran Misi 5 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-10
Tabel 5. 7 Tujuan Dan Sasaran Misi 6 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-11
Tabel 5. 8 Tujuan Dan Sasaran Misi 7 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-11
Tabel 5. 9 Tujuan Dan Sasaran Misi 8 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-12
Tabel 5. 10 Tujuan Dan Sasaran Misi 9 Sebelum Dan Setelah Perubahan..... V-13
Tabel 5. 11 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Sebelum Perubahan V-14
Tabel 5. 12 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Setelah Perubahan..... V-33
Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kota Sawahlunto Sebelum Perubahan..... VI-1

Tabel 6. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Strategi Kota Sawahlunto VI-5
Tabel 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sawahlunto VI-22
Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif VI-49
Tabel 7. 1 Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 ..... VII-2
Tabel 7. 2 Kerangka Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 ..... VII-3
Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sawahlunto VII-4
Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Sebelum Perubahan VIII-3
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sebelum Perubahan VIII-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 – 2023 Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya I-7
Gambar 2. 1 Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (Wtbos) Sebagai Warisan Dunia Unesco Tanggal 6 Juli 2019 Di Baku, Azerbaijan II-2
Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kota Sawahlunto II-5
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto II-6
Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto II-7
Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto II-7
Gambar 2. 6 Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto II-8
Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Sawahlunto II-9
Gambar 2. 8 Peta Hidrologi Dan Sumber Daya Air Kota Sawahlunto II-10
Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi II-11
Gambar 2. 10 Peta Penggunaan Lahan. II-12
Gambar 2. 11 Peta Area Ocmhs Di Kota Sawahlunto II-135
Gambar 2. 12 Peta Area Situs Warisan Dunia Unesco Di Sumatera Barat II-135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2020 (Dalam %) II-16
Grafik 2. 2 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB Adhb Tahun 2020 (Dalam %)..... II-17
Grafik 2. 3 Target Dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Dalam %) II-20
Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020 ..... II-21
Grafik 2. 5 Perbandingan Struktur Perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Melalui Distribusi PDRB Adhb Tahun 2020..... II-25
Grafik 2. 6 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional..... II-26
Grafik 2. 7 Target Dan Realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Dalam Juta Rupiah) II-28
Grafik 2. 8 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020 ..... II-29
Grafik 2. 9 Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020..... II-30
Grafik 2. 10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat Dengan Kota Sawahlunto..... II-31
Grafik 2. 11perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto Dengan Propinsi Sumatera Barat II-32
Grafik 2. 12 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sumatera Barat Dengan Kota Sawahlunto..... II-32
Grafik 2. 13 Perbandingan Ipm Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Indonesia Tahun 2016 – 2020..... II-38
Grafik 2. 14 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-39
Grafik 2. 15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-40
Grafik 2. 16 Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto Pada Tahun 2016 – 2020 ..... II-41
Grafik 2. 17 Jumlah Grup Kesenian Di Kota Sawahlunto..... II-44
Grafik 2. 182 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kota Sawahlunto Berdasarkanv Pilar Pembangunan II-47
Grafik 2. 19 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional..... II-48
Grafik 2. 20 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Mencapai Target Nasional Di Kota Sawahlunto..... II-50
Grafik 2. 21 Rasio Penduduk Yang Bekerja Di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020..... II-98
Grafik 2. 22 Ketersedian Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020..... II-103
Grafik 2. 23 Perbandingan Konsumsi Dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2020..... II-105
Grafik 2. 24 Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar Dan Produk Olahan II-107
Grafik 2. 25 Perkembangan Jumlah Umkm Di Kota Sawahlunto II-126
Grafik 2. 26 Jumlah Grup Kesenian Di Kota Sawahlunto..... II-137
Grafik 2. 27 Perbandingan Konsumsi Perkapita Ikan Tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat Dan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 (Kg/Kapita/Tahun)..... II-142
Grafik 2. 28 Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2016 -2020 (Persen) II-153
Grafik 2. 29 Perkembangan Produksi Telur Ternak Unggas (Kg) Tahun 2016-2020..... II-158
Grafik 2. 30 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah) II-175
Grafik 2. 31 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 (Dalam Rp) II-176
Grafik 2. 32 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020..... II-177
Grafik 2. 33 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2016 - 2020 ..... II-180
Grafik 2. 34 Perkembangan Indeksharga Yang Dibayar Petani (Ib) Tahun 2016 - 2020 ..... II-181
Grafik 3. 1 Rata-Rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-14

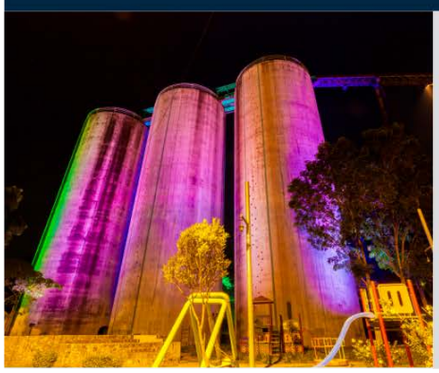
Grafik 3. 2 Rata-Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 ..... III-14
Grafik 3. 3 Dana Perimbangan Tahun 2016-2020..... III-15
Grafik 3. 4 Beberapa Peraturan Yang Diterbitkan Sebagai Penjabaran Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014..... III-53
Grafik 3. 5 Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019..... III-54

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Penyelarasan Target Indikator Makro Yang Termuat Dalam Rpjmd Kota Sawahlunto Tahun 2008-2023 Dengan Rpjmd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dan RPJMN Tahun 2020-2024

LAMPIRAN II. Penyelarasan Target Program Prioritas Yang Termuat Dalam RPJMN Kota Sawahlunto Tahun 2008-2023 Dengan Rpjmd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 Dan Rpjmn Tahun 2020-2024

LAMPIRAN III. Logical Frameworks Perumusan Permasalahan Dan Penyelesaian Masalah



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Hal ini juga sebagai pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda.

Dalam periode pelaksanaannya, RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 telah memasuki tahun ketiga yaitu tahun 2021. Dalam Pasal 342 ayat 1 Permendagri 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.”

Dalam ayat (3) disebutkan “Adapun perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional”.

Merujuk kepada Pasal 1 huruf (c) aturan yang tersebut di atas, perubahan yang menyangkut kebijakan nasional antara lain dikarenakan:

- Terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang mempengaruhi kebijakan yang berdamapak signifikan terhadap perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat, hingga ke daerah.
- Telah ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- Telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Telah ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Selain itu dinamika internal Kota Sawahlunto yang perlu dipertimbagkan antara lain:

- Perlunya penyesuaian permasalahan dan isu-isu strategis Kota Sawahlunto;
- Perlunya penyesuaian program berdasarkan kondisi umum Kota Sawahlunto dan penyesuaian pada Renstra Kementrian/Lembaga yang berlaku;
- Penyesuaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja program berdasarkan SPM kementrian/lembaga;
- Penetapan target capaian indikator kinerja program untuk periode lanjutan 2022, dan 2023 sesuai realisasi capaian indikator kinerja program 2019-2020;
- Upaya untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto dan Laporan Kinerja Pemeirntah Kota Sawahlunto.

Adapun faktor-faktor yang mendasari perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator kebijakan daerah sebagai akibat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19.
2. Penelaahan KemenPAN RB terkait SAKIP Kota Sawahlunto tahun 2019.
3. Perubahan kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan RPKD dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Kemudian juga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai pada akhir periode pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
36. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70).

1.3 HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN

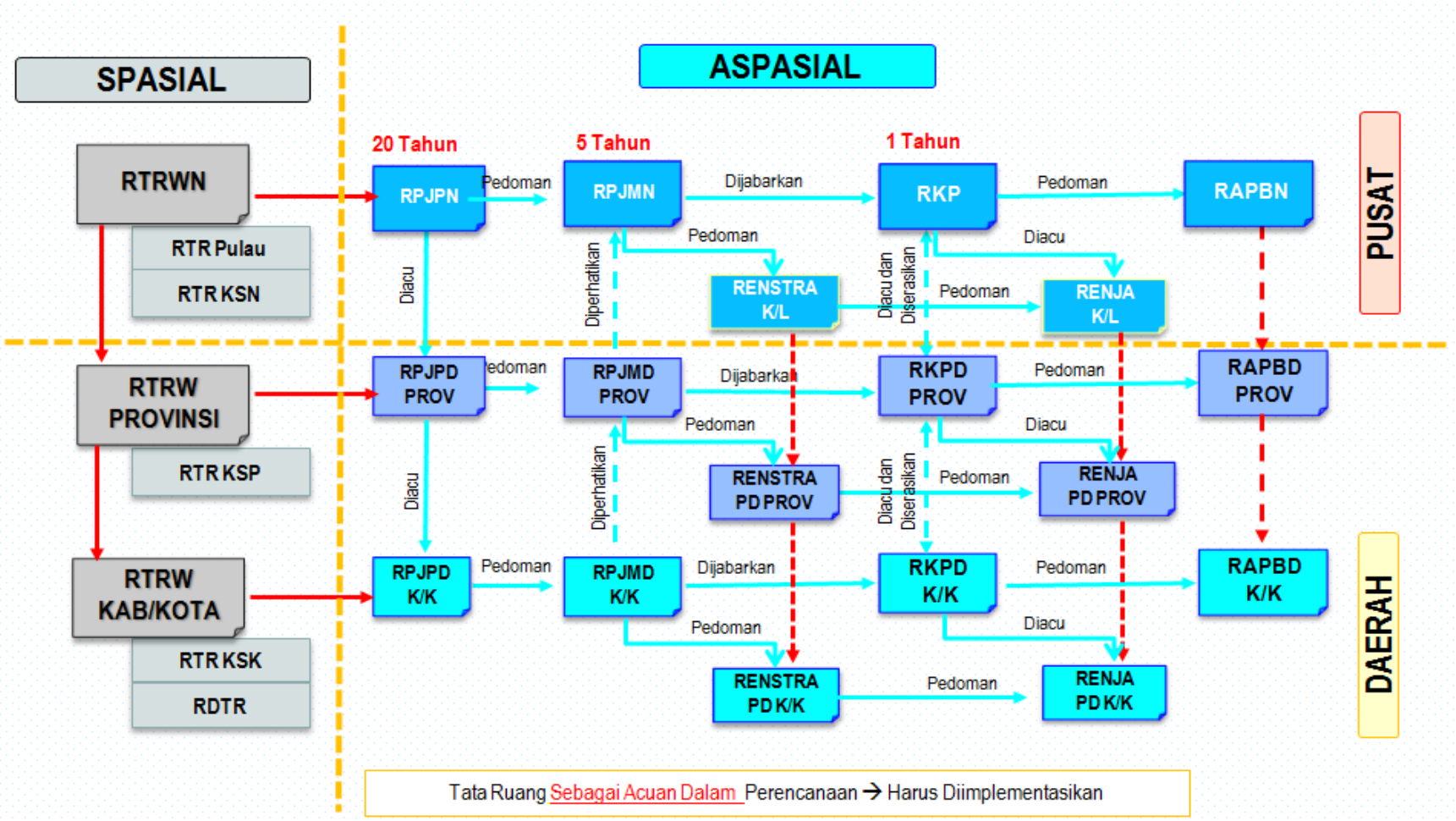
Keberadaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 yang merupakan tahap keempat dalam pelaksanaannya dengan fokus pembangunan diarahkan pada (1)) terwujudnya sumber daya manusia berkualitas (2) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur (3) terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas (4) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum dan (5) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
3. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disinkronkan dengan RPJM Nasional 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJMD Kab/Kota tetangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 159 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
4. RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 telah mengintegrasikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 dan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032.
5. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun, yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
6. Secara operasional RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1 Hubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 – 2023
Dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Dokumen Perencanaan Daerah Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

Tujuan disusunnya Perubahan RPJMD Kota sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang lebih adaptif dan responsive terhadap perubahan global, nasional dan provinsi serta memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, dan terukur sesuai dengan kewenangan.
2. Sebagai dokumen yang mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto dengan perencanaan pembangunan provinsi Sumatera Barat dan perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
5. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
6. Sebagai instrumen untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
7. Membangun kebersamaan melalui bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar Pemerintah Kota Sawahlunto, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota berbatasan maupun *stakeholders* lainnya (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat).
8. Sebagai acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Sejarah Kota Sawahlunto
2.2 Aspek Geografi dan Demografi
2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.5 Aspek Daya Saing Daerah
2.6 Gambaran Covid 19 Di Kota Sawahlunto
2.7 Capaian SPM Kota Sawahlunto
2.8 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Pemasalahan Pembangunan
4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi
5.2 Misi
5.3 Tujuan Dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran
6.2 Dukungan Program Kota Sawahlunto Terhadap Program Unggulan Sumatera Barat
6.3 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Indikator Kinerja Utama
8.2 Indikator Kinerja Daerah

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi
9.2 Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN



BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah merupakan gambaran kondisi geografi, demografi dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sawahlunto. Ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdapat indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Selanjutnya, gambaran umum kondisi daerah diharapkan dapat memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan secara series beberapa tahun terakhir sesuai dengan data yang tersedia.

Sawahlunto ditetapkan sebagai Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) adalah contoh representatif dan luar biasa dari kesatuan teknologi perintis yang direncanakan dan dibangun oleh insinyur Eropa di koloni mereka serta dirancang untuk mengekstraksi sumber daya batubara yang strategis. Properti ini tidak hanya memiliki nilai universal yang luar biasa karena menunjukkan perkembangan teknologi perintis, memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan kearifan lingkungan lokal dan praktik-praktik tradisional dalam pengorganisasian tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan dampak mendalam dan berkelanjutan dari perubahan hubungan sosial dalam konteks produksi yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di koloni mereka, dalam hal mensuplai material dan tenaga kerja guna menopang industrialisasi di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20.

2.1 SEJARAH KOTA SAWAHLUNTO

Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun

1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.

Kota ini mulai memproduksi batubara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto. Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batubara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.

Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian besar telah ditetapkan sebagai cagar budaya dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" dan terus melestarikan peninggalan hindia Belanda di Sawahlunto dan menjadikan Kota Sawahkunto sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat sejak produksi pertambangan terus menurun.

Pada tanggal 6 Juli 2019 Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Kawasan WTBOS meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota yang meliputi : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman.

Gambar 2. 1 Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) sebagai Warisan Dunia UNESCO tanggal 6 Juli 2019 di Baku, Azerbaijan



Sumber: Dinas Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, 2019

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Borobudur, Prambanan, Sangiran, dan Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini sudah dimulai sejak Tahun 2009 yang lalu, namun penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (tentative list) pada 30 Januari 2015 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua delegasi Prof. Rosa Surya Putra (Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat) serta Deri Asta (Walikota Sawahlunto)

Proses sidang dimulai dengan ICOMOS membacakan hasil misi evaluasi, tanggapan para anggota komite warisan dunia, hingga Pimpinan Sidang yang saat ini dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Republik Azerbaijan mengetok palu tanda pengakuan kekayaan budaya Ombilin Sawahlunto sebagai kekayaan budaya dunia. Tentunya penetapan ini tidak

berjalan mulus dengan berbagai kondisi baik di daerah maupun di pusat, terutama peraturan perundangan pelestarian yang masih belum secara menyeluruh dapat dijadikan panduan dalam pengelolaan situs warisan dunia maupun cagar budaya.

2.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Dalam rangka menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar upaya pembangunan yang dilakukan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan melalui proses pembangunan taat lingkungan.

2.2.1 Kondisi Geografi Daerah

2.2.1.1 Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Barat yang mana kondisi Geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100˚41”00’ - 100˚49’60” Bujur Timur dan 00˚33”40’-00˚48”33’ Lintang Selatan.

Secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijungjung

Kota Sawahlunto merupakan kota yang lebih terkenal dengan sejarah pertambangan batubara di Provinsi Sumatra Barat, dengan memiliki luas wilayah 27,345 atau 273.45 Km^2, 0,65% dari luas Provinsi Sumatra Barat Secara administrasi terdiri dari empat (4) kecamatan, 10 kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km^2 atau sebesar 12.04% sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km^{2,} atau sekitar 36.35% untuklebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan peta wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar 2.1:

Tabel 2. 1 Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM^2)
(1)	**Kecamatan Barangin**	**32**	**13**	**25**	**88,55**
01	Desa Lumindai	-	-	5	20,10
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3	12,95
03	Kel. Saringan	11	5	-	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-	1,00
05	Kel. Durian I	6	2	-	1,17
06	Kel. Durian II	8	4	-	1,25
07	Desa Talago Gunung	-	-	4	17,30
08	Desa Santur	-	-	5	8,69
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3	8,52
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5	16,76
(2)	**Kecamatan Lembah Segar**	**32**	**14**	**22**	**52,58**
01	Desa Lunto Barat	-	-	4	5,11
02	Desa Lunto Timur	-	-	4	4,89
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3	9,32
04	Desa Kubang Tangah	-	-	5	20,15
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6	11,56
06	Kel. Pasar	6	3	-	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-	0,28

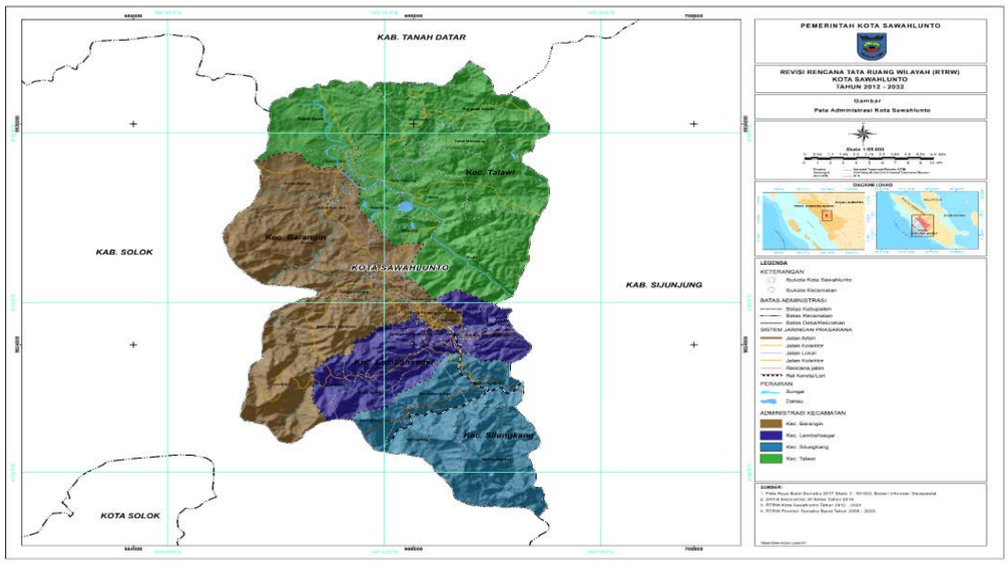
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM²)
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-	0,16
11	Kel. Air Dingin	4	2	-	0,14
(3)	**Kecamatan Silungkang**	**-**	**-**	**21**	**32,93**
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4	6,57
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3	8,43
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6	8,58
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5	5,13
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3	4,22
(4)	**Kecamatan Talawi**		**-**	**39**	**99,39**
01	Desa Sikalang	-	-	4	6,59
02	Desa Rantih	-	-	2	6,22
03	Desa Salak	-	-	3	6,60
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3	6,40
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4	10,21
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4	8,76
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3	7,74
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4	15,90
09	Desa Kumbayau	-	-	4	8,36
10	Desa Data Mansiang	-	-	2	6,29
11	Desa Tumpuak Tangah	-	-	6	16,32
Jumlah		**64**	**27**	**107**	**273,45**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2020

Dari tabel diatas diketahui, bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Untuk kategori Desa, Desa Lumindai yang terletak di Kecamatan Barangin adalah Desa yang terluas dengan Luas 20,10 KM2. Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan Silungkang dengan Luas Daerah Administratif 4,22 KM2. Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan Luas 1,25 Km2, dan Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar dengan Luas Daerah Administratif hanya 0,14 Km2.

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kota Sawahlunto



Sumber: RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032

2.2.1.2 Topografi

Secara topografi Kota Sawahlunto memiliki ketinggian wilayah yang cukup bervariatif dari mulai ketinggian 175 Mdpl sampai dengan lebih dari 975 Mdpl, Kota Sawahlunto mayoritas terletak pada ketinggian 175 – 375 Mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 Ha. Mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi, sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 Mdpl terletak pada kecamatan Barangin.

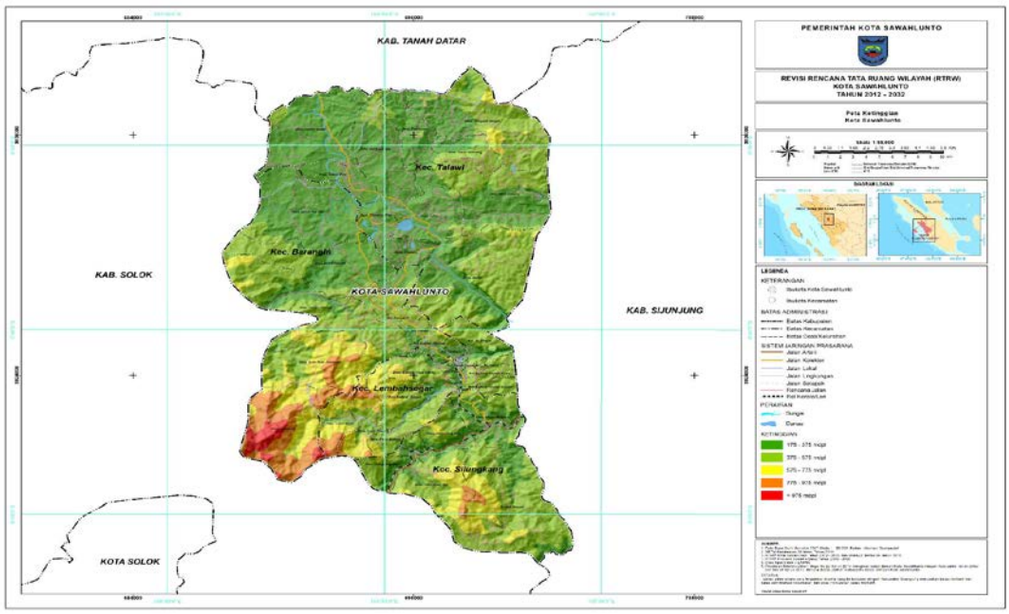
Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari Utara ke Selatan. Bagian Timur dan Selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relatif datar, temperatur udara berkisar antara 22°C - 30°C. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100-500m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal. Untuk lebih jelasnya mengenai ketinggian Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (m dpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santua
Lb. Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber: BPS Kota Sawahlunto, 2019

Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto



Sumber : RTRW Kota Sawahlunto 2012 - 2032

2.2.1.3 Kemiringan Lahan

Kota Sawahlunto memiliki kemiringan **Lahan** dan morfologi yang begitu beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentan lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%, mayoritas memiliki kelerengan 25 – 40% seluas 6.768,08 Ha, Dominasi Kemiringan lahan tersebut terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Silungkang.

Kemiringan lahan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah.

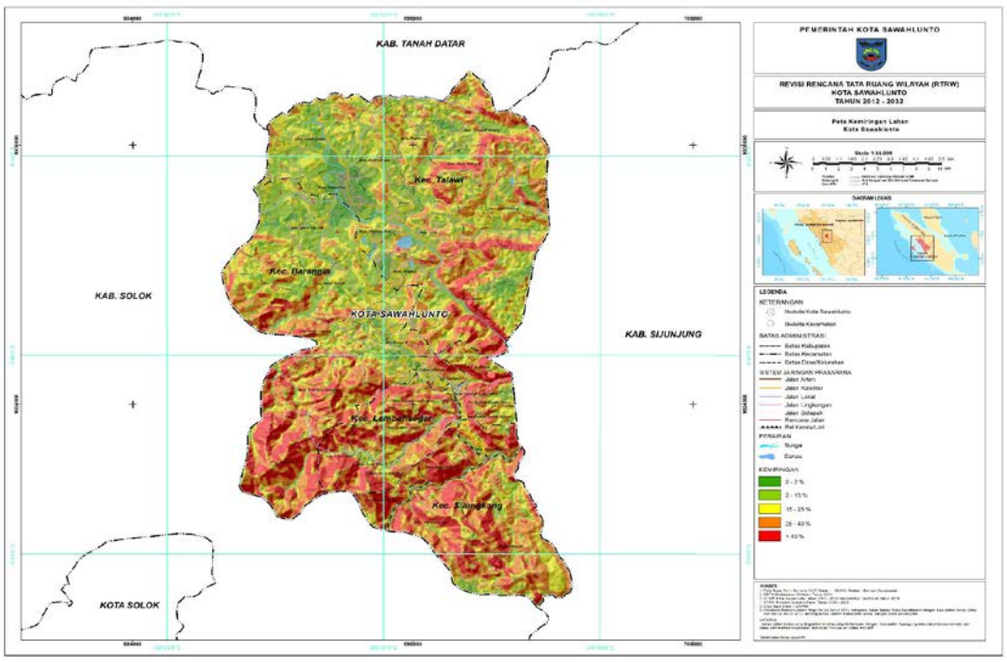
Untuk Kelas kemiringan lahan yang Tinggi 0 - 2% berada di kecamatan Silungkang seluas 29 ha dan yang cukup datar berada di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha sementara kelas kemiringan lahan besar dari 40% berada di kecamatan Silungkang. Selengkapnya Kemiringan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%	Jumlah
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	**9.939**
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	**8.855**
Lb. Segar	240	358	694	1.836	2.110	**5.258**
Silungkang	29	288	735	340	1.901	**3.293**
Jumlah	**1.603**	**3.580**	**5.541**	**8.821**	**7.800**	**27.345**

Sumber : RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012 – 2032

Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto



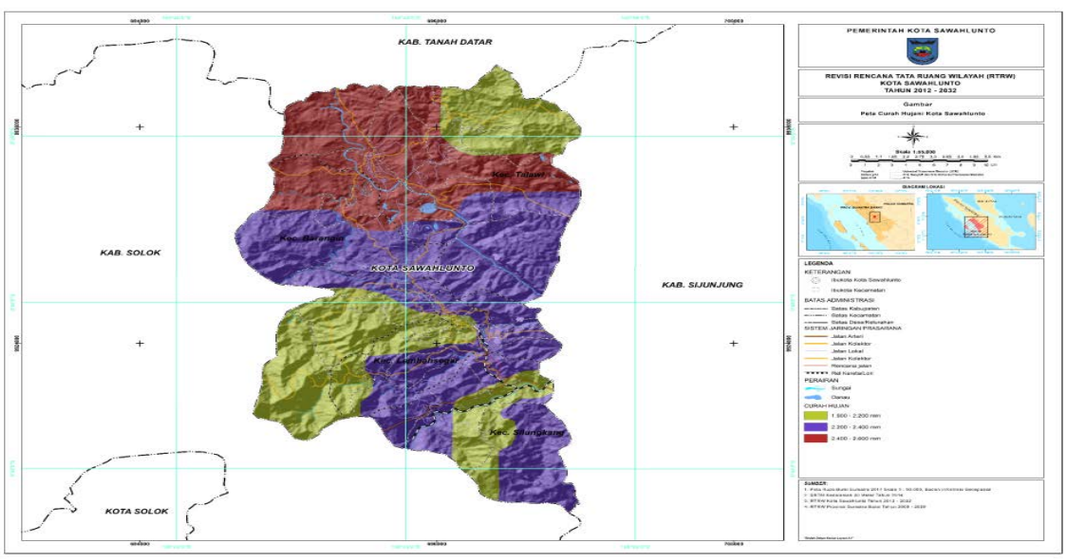
Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 - 2032

2.2.1.4 Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Sawahlunto secara umum suhu rata – rata di Sumatra Barat Tercatat antara 22^0 – 28^0 C dengan perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^0 – 7^0C dan hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22^0 – 33^0 C.

Sedangkan untuk curah hujan di Kota Sawahlunto memiliki curah hujan 1.900 mm/tahun sampai dengan 2.600 mm/tahun, sedanglan untuk mayoritas curah hujan di Kota Sawahlunto yaitu pada 2.200 mm/tahun – 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan barangin dan Lembah segar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Curah Hujan berikut ini

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto



Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 – 2032

2.2.1.5 Solum Tanah

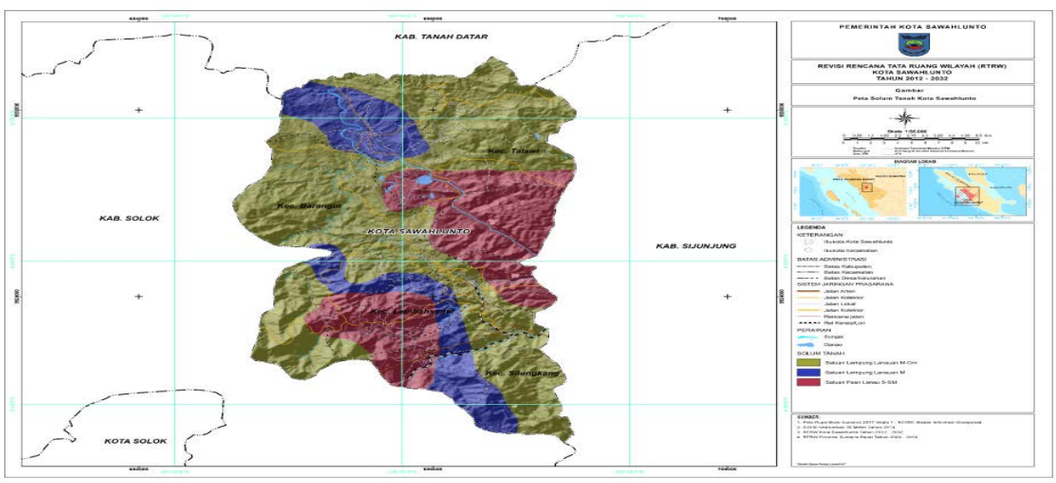
Untuk struktur rupa bumi dalam Geologi di kenal ada 3 jenis truktur tanah yang dijumpai pada batuan sebagai produk dari gaya yang bekerja pada batuan yaiyu :

1. Kekar (Fractures)
   Merupakan jenis struktur batuan yang berbentuk bidang pecah, sifat bidang ini memisahkan batuan menjadi bagian-bagian yang terpisah tetapi tidak mengalami perubahan posisinya.
2. Perlipatan (Folding)
   Batuan berlapis pada awalnya berbentuk sedimen yang diendapkan dalam lembaran Horizontal datar
3. Patahan/Sesar (Faulting)
   Fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan dimana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan masssa batuan. Meurut ilmu fisikan sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya menjadi rapuh.

Solum tanah Kota Sawahlunto ada tiga jenis solum tanah yang berada di Kota ini, diantaranya yaitu:

a. **Satuan Lempung Lanauan (S-cm),** merupakan pelapukan dari F. Sawahlunto dan F.Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengansisipan tipis pasir, dengan ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 m. Lempung lanauan, lanaulempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi,kandungan lempung 26 - 62 %, lanau 25 - 50 %, pasir 4 - 8 %, berat isi tanah asli1.301 - 1.761 gr/cm^3, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm^2, sudut geser dalam 23.44 - 28.04.
b. **Satuan Pasir Lanauan (S-sm)** merupakan pelapukan dari F.Sawah tambang yangberupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), denganketebalan berkisar antara 1 - 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat,agak lunak, kandungan pasir 59%, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli1,579 gr/cm^3, kohesi 0,067 kg/cm^2, sudut geser dalam 24.81°.
c. **Satuan Lempung Lanauan (M-cm)** merupakan pelapukan dari F. Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 -2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang -tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm^3, kohesi, 0,219 kg/cm^2, sudut geser dalam 25.46.

Gambar 2. 6 Peta Solum Tanah Kota Sawahlunto



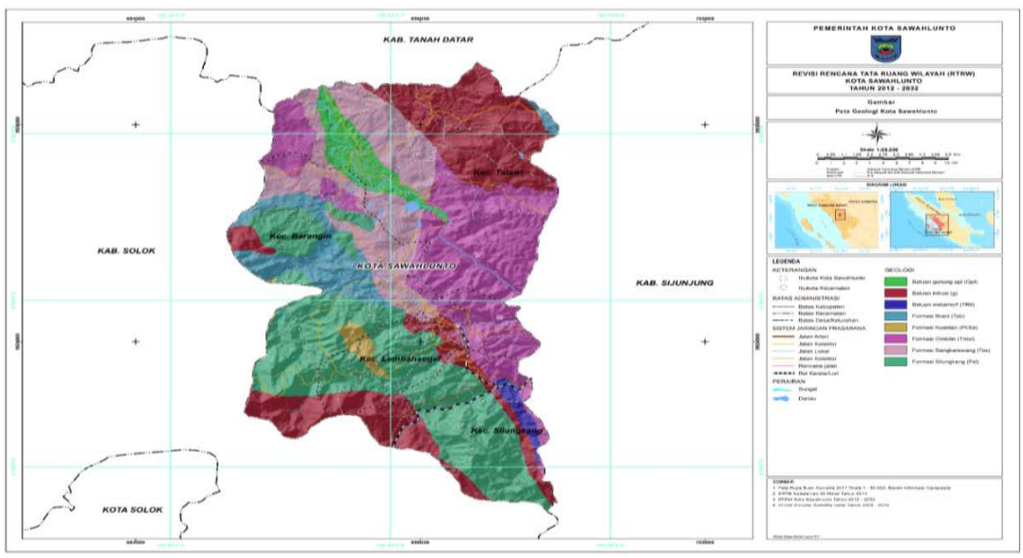
Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 - 2032

2.2.1.6 Geologi

Kondisi geologi Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 – 60 juta tahun yang lalu.

Dalam geologi Kota Sawahlunto terdapat Struktur Geologi (patahan) dimana Aktivitas sesar (patahan) di Kotya Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat laut – tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedaua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat daya jalan raya Sawahlunto – Santur. Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah Barat laut – tenggara dan timur laut – Barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu / sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Gambar 2.7 Peta Geologi Kota Sawahlunto



Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 – 2032

2.2.1.7 Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m^3/detik.

b. Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

c. Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

d. Batang Sumpahan

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

e. Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Ssungai Kuantan atau Indragiri.

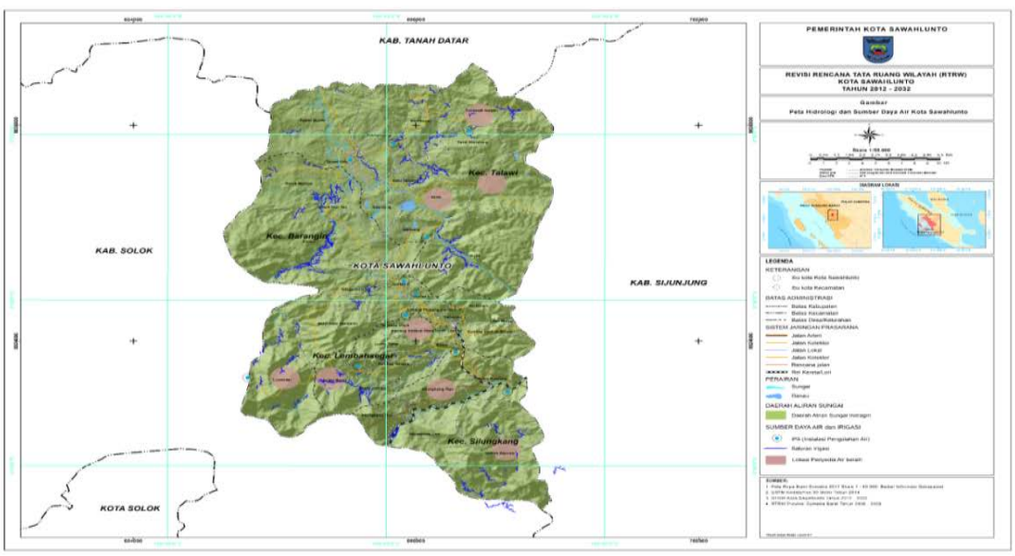
- **Air Tanah**

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.

- **Mata Air**

Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besaryaitu lebith 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

Gambar 2. 8 Peta Hidrologi dan Sumber Daya Air Kota Sawahlunto



Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 – 2032

2.2.1.8 Rawan Bencana

Bencana pada umumnya terjadi dipeengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

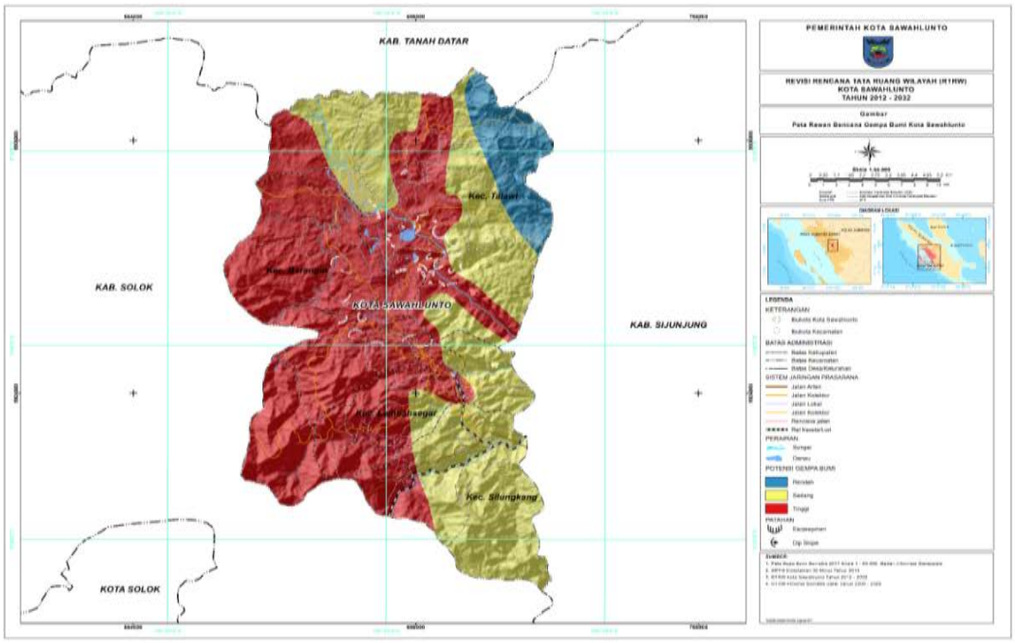
a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung

mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spatial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor
Kerawanan bencana gerakan atanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanannya rendahs, sedang dan tinggi. Kerawan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ulah manusia, vegetasi, jenis tanah dan kelerengannya. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu Sedang dengan luas 15.003,77 Ha sedangkan untuk kawasan tingkat kerawanan Sedang sebesar 5.085,38 Ha mayoritas terletak di sebelah utara Kecamatan Barangin dan Talawi.

Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 – 2032

2.2.1.9 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data hasil digitasi penyesuaian penggunaan lahan di Kota Sawahlunto. Kondisi penggunaan lahan eksisting yaitu mayoritas merupakan lahan terbuka tidak terbangunan yaitu dengan di dominasi semak nelukar seluas 6.873,14 Ha dan tanaman lahan kering seluas 6.673,76 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

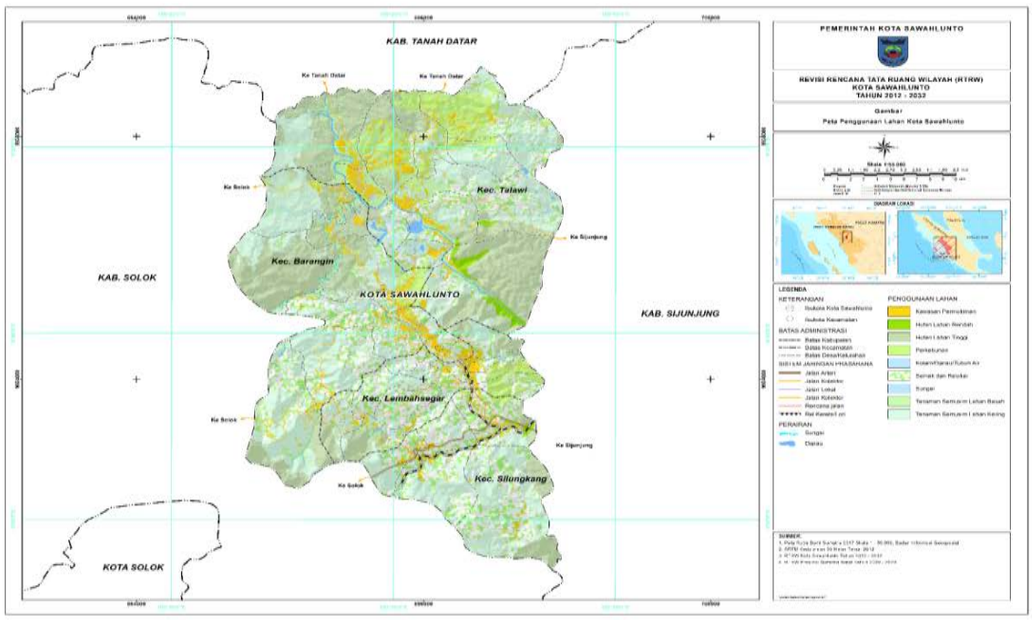
Tabel 2. 4 Kondisi Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto

No	Penggunaan Lahan	Luas
1	Hutan Lahan Tinggi	5.672,38
2	Hutan Lahan Rendah	209,70
3	Kebun Campuran	1.582,99
4	Tubuh Air	172,19
5	semak belukar	6.873,14
6	Tanaman Lahan Basah	1.461,95
7	Tanaman Lahan kering	6.673,76

No	Penggunaan Lahan	Luas
8	Permukiman	1.287,16
Jumlah		23.933,29

Sumber : Digitasi Penggunaan Lahan 2018 dan Penyesuain Dengan RBI 2017

Gambar 2. 10 Peta Penggunaan Lahan.



Sumber : Peta RTRW Kota Sawahlunto 2012 - 2032

2.2.2 Kondisi Demografi Wilayah

1. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)					Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Silungkang	11,117	11,280	11,324	11,359	11,409	1,2
Lembah Segar	12,123	12,106	12,495	13,039	13,352	0,9
Barangin	18,391	18,631	18,673	18,701	20,284	1,8
Talawi	19,147	19,381	19,406	19,425	20,093	1,3
Jumlah	**60,778**	**61,398**	**61,898**	**62,524**	**68,138**	**1.4**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan data di atas kecamatan Barangin mempunyai pertumbuhan penduduk tertinggi dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,8 persen, sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah kecamatan Lembah Segar dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,9 persen. Ini menunjukkan di Kecamatan Barangin angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya. Secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,4 persen, hal ini menunjukkan dari tahun 2016-2020 jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat 1,4 persen per tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap kepadatan penduduk suatu daerah. Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 (jiwa/Km²)

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Silungkang	337,59	342,54	343,88	344,94	346,46
Lembah Segar	230,56	230,24	237,64	247,98	253,94
Barangin	207,69	210,40	210,88	211,19	229,07
Talawi	192,65	194,99	195,25	195,44	202,16
Jumlah	**220,10**	**224,53**	**226,36**	**228,65**	**238,21**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah kecamatan Talawi paling luas dibandingkan dengan dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhank kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun seiiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Sawahlunto.

Penduduk dapat dikelompokkan menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2019-2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2019		Jumlah	Jenis Kelamin 2020		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	3.075	3.008	6.083	3.011	2.809	5.820
5 – 9	3.082	2.897	5.979	2.624	2.545	5.169
10 - 14	2.668	2.712	5.380	2.837	2.608	5.445
15 - 19	2.507	2.344	4.851	2.867	2.622	5.489
20 - 24	2.076	1.945	4.021	2.721	2.597	5.318
25 - 29	2.320	2.361	4.681	2.620	2.546	5.166
30 - 34	2.371	2.330	4.701	2.422	2.337	4.759
35 - 39	2.191	2.304	4.495	2.396	2.310	4.706
40 - 44	2.215	2.239	4.454	2.260	2.217	4.477
45 - 49	2.190	2.069	4.259	2.138	2.125	4.263
50 - 54	1.706	1.750	3.456	1.907	1.950	3.857
55 - 59	1.470	1.616	3.086	1.753	1.761	3.514
60 - 64	1.071	1.243	2.314	1.246	1.367	2.613
65 - 69	904	986	1.890	942	1.092	2.034
70 - 74	480	571	1.051	506	638	1.144
75 +	494	703	1.197	517	847	1.364
Jumlah	**30.820**	**31.078**	**61.898**	**32.767**	**32.371**	**68.138**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Berdasarkan tabel diatas di Tahun 2019 dan tahun 2020 kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan kelompok umur yang

paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Rasio ketergantungan atau perbandingan jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk usia produktif (usia 15-65) untuk Tahun 2020 adalah 47,49 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47,49 penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan ini sangat rendah, karena penduduk yang produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif.

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah, sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan PDRB menggunakan konsep mengurangi nilai PDRB ADHK tahun ke n dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1 dibagi dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diukur berdasarkan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) tahun 2010. Nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 2.760.934,37 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen atau turun sebesar 35.603,84 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2016-2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid-19, nilai PDRB ADHK Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57 persen per tahun.

Tabel 2. 8 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	203.193,18	207.654,66	211.585,43	217.981,59	219.533,32	7,95%
2	Pertambangan dan Penggalian	174.569,61	161.365,58	169.660,23	188.594,40	205.352,34	7,44%
3	Industri Pengolahan	301.299,65	318.901,57	323.282,84	313.187,26	303.849,59	11,01%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45.304,49	50.107,79	54.651,56	57.971,12	54.406,44	1,97%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.381,74	8.942,48	9.642,44	10.326,26	10.294,16	0,37%
6	Konstruksi	245.419,26	266.154,27	283.258,78	302.061,64	286.329,09	10,37%

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)					Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHK Tahun 2020 (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	370.227,29	397.072,49	420.304,73	443.168,27	440.089,10	15,94%
8	Transportasi dan Pergudangan	207.737,76	226.211,88	241.737,27	262.482,13	233.712,10	8,46%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.306,30	43.407,61	47.111,15	50.854,36	45.715,95	1,66%
10	Informasi dan Komunikasi	185.427,19	203.091,34	223.761,16	242.274,05	262.117,01	9,49%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	81.673,08	82.925,58	83.736,97	85.914,56	86.693,04	3,14%
12	Real Estat	40.093,66	41.576,63	44.662,12	47.283,00	47.346,67	1,71%
13	Jasa Perusahaan	3.067,76	3.272,14	3.438,59	3.649,43	3.534,17	0,13%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.561,74	296.518,09	313.643,29	326.390,70	324.352,15	11,75%
15	Jasa Pendidikan	63.416,89	69.651,85	74.013,47	80.700,00	84.258,65	3,05%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.163,62	27.676,73	29.463,29	31.118,42	33.066,55	1,20%
17	Jasa Lainnya	103.675,55	112.619,48	121.666,45	132.581,00	120.284,03	4,36%
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		2.380.518,78	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37	100,00%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan di Kota Sawahlunto adalah : *pertama*, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 440.089,10 juta rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Di posisi *kedua*, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 324.352,15 juta rupiah atau sebesar 11,75 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan produksi sebesar 303.849,59 juta rupiah atau 11,01 persen. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi dengan nilai produksi sebesar 286.329,09 juta rupiah atau 10,37 persen, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 262.117,01 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen dari total PDRB ADHK Kota Sawahlunto.

Grafik 2. 1Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2020 (Dalam %)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, Data Diolah 2021

Sedangkan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto tahun 2020, lima lapangan usaha yang dominan adalah : lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Konstruksi; dan lapangan usaha Industri Pengolahan; serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 2. 9 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 – 2020

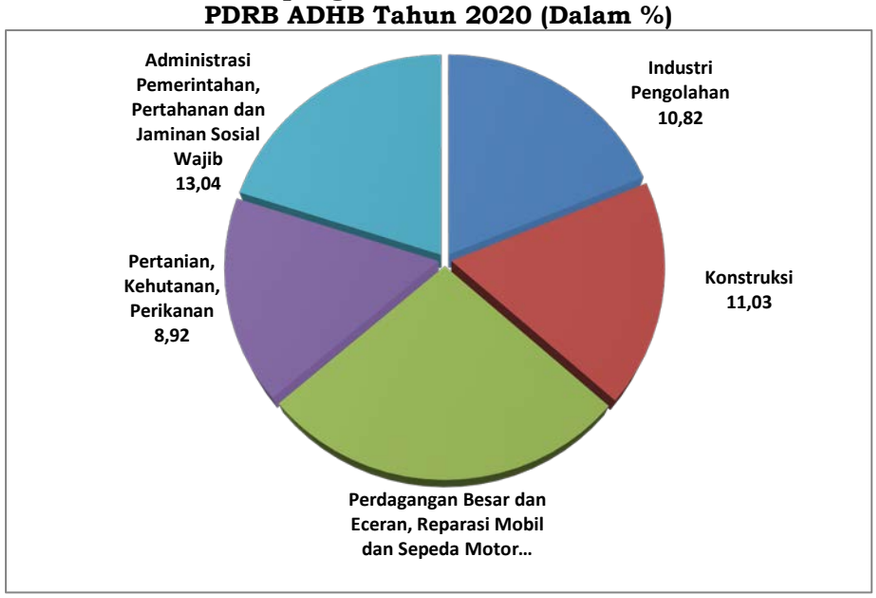
NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Dalam Milliar Rupiah)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHB Tahun 2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	292,8	303,12	312,01	325,35	326,22	8,92%
2	Pertambangan dan Penggalian	170,6	163,46	171,1	198,82	176,11	4,82%
3	Industri Pengolahan	380,77	404,96	415,87	392,31	395,49	10,82%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51,5	58,17	63,65	72,29	68,61	1,88%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,78	11,65	12,97	14,33	14,31	0,39%
6	Konstruksi	323,53	351,91	381,63	415,4	403,29	11,03%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	435,56	468,02	510,43	553,59	547,82	14,98%
8	Transportasi dan Pergudangan	243,82	268,81	295,27	326,94	300,66	8,22%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,05	67,26	73,95	82,41	75,26	2,06%
10	Informasi dan Komunikasi	191,51	213,02	241,58	274,87	295,51	8,08%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,72	111,52	115,37	121,2	124,29	3,40%
12	Real Estat	54,58	56,71	61,19	64,83	65,44	1,79%
13	Jasa Perusahaan	4,19	4,52	4,88	5,36	5,23	0,14%

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Dalam Milliar Rupiah)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Kontribusi Sektor terhadap Total PDRB ADHB Tahun 2020 (%)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342,42	377,88	404,33	443,89	476,95	13,04%
15	Jasa Pendidikan	86,44	96,3	105,34	120,75	126,74	3,47%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,45	36,13	39,26	43,37	47,2	1,29%
17	Jasa Lainnya	142,23	171,79	195,7	224,05	207,45	5,67%
PDRB ADHB Kota Sawahlunto		**2.937,95**	**3.165,21**	**3.404,52**	**3.679,76**	**3.656,59**	**100,00%**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Pada tabel di atas terlihat, nilai produksi terbesar tahun 2020 adalah lapangan usahaPerdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai sebesar 547,82 miliar rupiah atau sebesar 14,98 persen dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usahaAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai sebesar 476,95 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 13,04 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi menghasilkan produksi sebesar 403,29 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03 persen, dan lapangan usahaIndustri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,82 persen dengan nilai sebesar 395,49 miliar rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92 persen dengan besaran 326,22 miliar rupiah.

Grafik 2. 2 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2020 (Dalam %)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Tabel 2. 10 Distribusi PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)					
		2016	2017	2018	2019	Rerata 2016-2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,97	9,58	9,16	8,84	9,39	8,92
2	Pertambangan dan Penggalian	5,81	5,16	5,03	5,4	5,35	4,82
3	Industri Pengolahan	12,96	12,79	12,22	10,66	12,16	10,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	1,84	1,87	1,96	1,86	1,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,37	0,38	0,39	0,38	0,39
6	Konstruksi	11,01	11,12	11,21	11,29	11,16	11,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,83	14,79	14,99	15,04	14,91	14,98
8	Transportasi dan Pergudangan	8,3	8,49	8,67	8,88	8,59	8,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	2,13	2,17	2,24	2,18	2,06
10	Informasi dan Komunikasi	6,52	6,73	7,1	7,47	6,96	8,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,52	3,39	3,29	3,48	3,4
12	Real Estat	1,86	1,79	1,8	1,76	1,8	1,79
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,66	11,94	11,88	12,06	11,89	13,04
15	Jasa Pendidikan	2,94	3,04	3,09	3,28	3,09	3,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,14	1,15	1,18	1,15	1,29
17	Jasa Lainnya	4,84	5,43	5,75	6,09	5,53	5,67
Distribusi Sektor PDRB ADHB Kota Sawahlunto		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021; Data Diolah 2021

Berdasarkan perkembangan distribusi PDRB ADHB, struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 didominasi sektor tersier. Hal ini terlihat dari distribusi PDRB ADHB pada tahun 2020, dimana lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 14,98%, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 13,04%. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi relatif kecil, dimana lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92% dari total PDRB ADHB Kota Sawahlunto dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 4,82%. Sedangkan kontribusi sektor sekunder berfluktuasi dari tahun 2016-2020.

Secara keseluruhan, PDRB ADHB Kota Sawahlunto di tahun 2020 menyumbang sekitar 1,51 % terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat. Nilai ini merupakan kontribusi terendah kedua terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang (1,44 %). Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat disumbangkan oleh Kota Padang sebesar 25,72 %, sedangkan 74,38 % sisanya disumbang oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,44 % hingga 8,42 %.

Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2016	2017	2018	2019	Rerata 2016-2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,29	2,2	1,89	3,02	2,35	0,71
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,79	-7,56	5,14	11,16	0,24	8,89
3	Industri Pengolahan	7,78	5,84	1,37	-3,12	2,97	-2,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,57	10,6	9,07	6,07	9,08	-6,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,96	6,69	7,83	7,09	7,14	-0,31
6	Konstruksi	6,66	8,45	6,43	6,64	7,05	-5,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,43	7,25	5,85	5,44	6,24	-0,69
8	Transportasi dan Pergudangan	7,97	8,89	6,86	8,58	8,08	-10,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,17	5,09	8,53	7,95	8,44	-10,1
10	Informasi dan Komunikasi	9,87	9,53	10,18	8,27	9,46	8,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	1,53	0,98	2,6	3,25	0,91
12	Real Estat	3,9	3,7	7,42	5,87	5,22	0,13
13	Jasa Perusahaan	6,16	6,66	5,09	6,13	6,01	-3,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,1	5,69	5,78	4,06	5,16	-0,62
15	Jasa Pendidikan	8,81	9,83	6,26	9,03	8,48	4,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	9,99	6,46	5,62	7,55	6,26
17	Jasa Lainnya	10,51	8,63	8,03	8,97	9,04	-9,28
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK		***5,72***	***5,74***	***5,5***	***5,31***	***5,57***	***-1,27***

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel di atas, kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 1,27% disebabkan minusnya pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Tiga lapangan usaha utama Kota Sawahlunto tidak luput dari dampak pandemi covid-19 dan mengalami pertumbuhan minus, yakni : 1). lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2020 tumbuh minus 0,69 %,

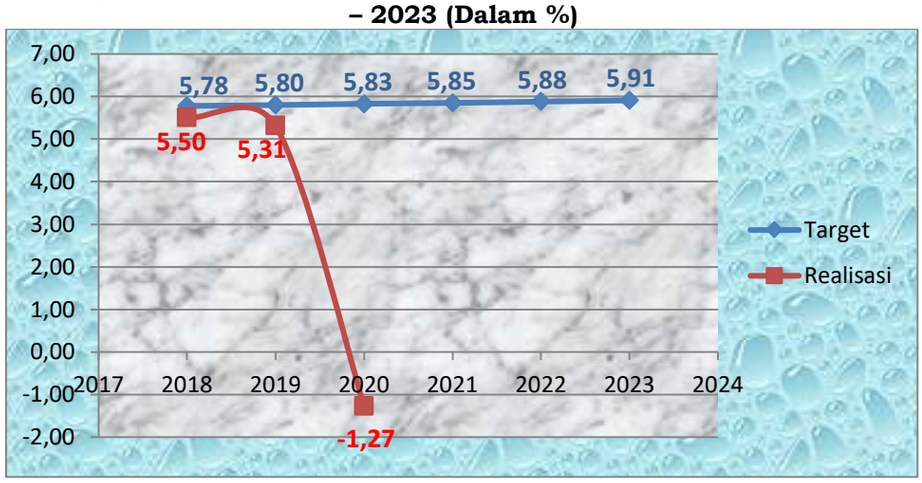
sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 6,24 % per tahun; 2). lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh minus 0,62 %, sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 5,16 % per tahun, 3). lapangan usaha Konstruksi tumbuh minus 5,21 %, sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 7,05 % per tahun.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,96 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,10 persen dan Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 9,28 persen.

Meskipun ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27, namun masih terdapat tujuh lapangan usaha yang tumbuh positif, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,71 %); Pertambangan dan Penggalian (8,89 %); Informasi dan Komunikasi (8,19%); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,91 %); Real Estat (0,13); Jasa Pendidikan (4,41); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,26).

Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 5,83-persen, maka kontraksi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebesar 1,27 persen dinilai sangat jauh dari target yang ditetapkan. Berikut perbandingan target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berdasarkan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

Grafik 2. 3 Target Dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Dalam %)

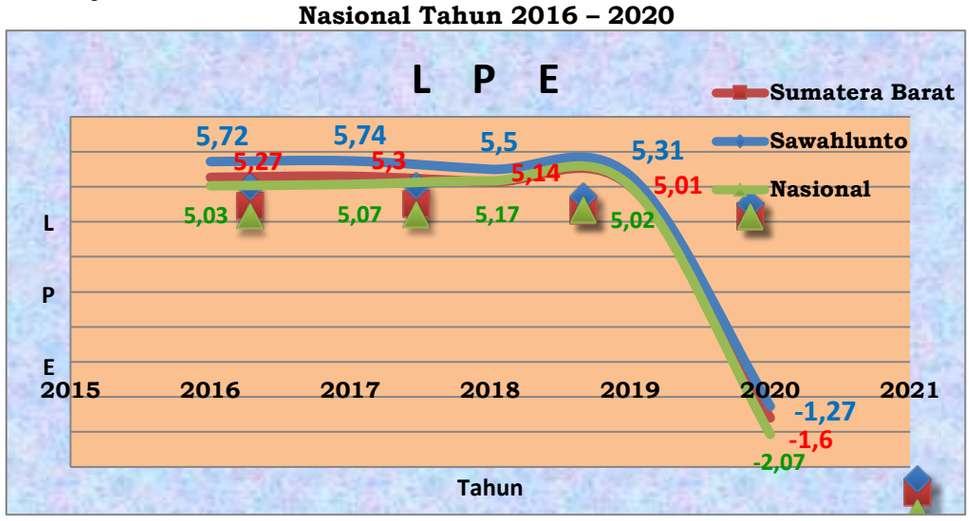


Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021, RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023

Minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahluntodikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work From Home, himbauan di rumah saja, dll mengakibatkan penurunan tingkat produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibatnya terjadi kontraksi ekonomi. Dengan demikian Pandemi covid-19 telah menciptakan masalah sosial dan ekonomi, yang menghantam hampir semua sektor dan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, transportasi, UMKM hingga perusahaan.

Ekonomi Kota Sawahlunto selama periode lima tahun terakhir (2016-2020) senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, hal ini terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021,
BPS Provinsi Sumatera Barat 2021
BPS Statistik Indonesia 2021

Berdasarkan grafik di atas, sebelum terjadi pandemi covid-19 dan saat terjadi pandemi covid-19, perekonomi Kota Sawahlunto senantiasa di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sebelum pandemi covid-19, tahun 2016- 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas angka 5,30 persen, sedangkan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh di bawah angka 5,30 persen. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 %, kondisi ini lebih baik dari ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan 1,6 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama, ekonomi Kota Sawahlunto berada pada posisi menengah.

Tabel 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera BaratTahun 2016 – 2020

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Mentawai	5,02	5,12	4,89	4,73	-1,85
Pesisir Selatan	5,33	5,41	5,32	4,78	-1,11
Solok	5,31	5,32	5,19	5,04	-1,12
Sijunjung	5,26	5,26	5,07	4,81	-1,10
Tanah Datar	5,03	5,11	5,04	4,99	-1,13
Padang Pariaman	5,52	5,58	5,44	2,40	-10,46
PariamaPariaman Agam	5,41	5,43	5,23	4,78	-1,38
Lima Puluh Kota	5,32	5,33	5,23	5,06	-1,16
Pasaman	5,07	5,08	4,97	4,80	-0,87
Solok Selatan	5,12	5,15	5,00	4,86	-1,24
Dharmasraya	5,42	5,44	5,28	4,94	-1,39
Pasaman Barat	5,33	5,34	5,21	4,45	-1,34
Kota Padang	6,22	6,23	6,06	5,65	-1,86
Kota Solok	5,76	5,76	5,65	5,49	-1,42

Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Sawahlunto	5,73	5,74	5,50	5,31	-1,27
Kota Padang Panjang	5,80	5,80	5,71	5,56	-1,44
Kota Bukit Tinggi	6,05	6,08	6,00	5,84	-1,74
Kota Payakumbuh	6,09	6,12	6,02	5,89	-1,66
Kota Pariaman	5,59	5,61	5,47	5,30	-1,32

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi tingkat kota di Provinsi Sumatera Barat saat pandemic covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020, ekonomi Kota Sawahlunto tumbuh lebih baik dengan kontraksi pertumbuhan terendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, ekonomi Kabupaten Pasaman mengalami kontraksi pertumbuhan terendah dengan laju pertumbuhan ekonomi minus 0,87% dan yang paling terpuruk perekonomiannya adalah Kabupaten Padang Pariaman dengan laju pertumbuhan ekonomi minus 10,46%.

Dilihat dari nilai PDRB ADHB, kontribusi PDRB Kota Sawahlunto terhadap Perekonomian Propinsi Sumatera Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 13 Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah)

Wilayah	Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	196.099.176,57	213.893.468,18	230.367.222,04	245.982.643,67	242.118.758,01
Kepulauan Mentawai	3.725.729,38	4.001.871,06	4.252.824,00	4.641.481,07	4.628.648,82
Pesisir Selatan	11.271.401,87	12.069.519,39	13.045.984,64	14.035.655,39	13.995.043,66
Kab.Solok	11.053.489,50	11.783.867,88	12.653.858,53	13.578.369,12	13.511.124,12
Sijunjung	7.439.227,39	7.927.672,63	8.489.458,37	9.129.618,78	9.122.730,19
Tanah Datar	10.734.514,88	11.428.081,54	12.202.819,78	13.086.687,00	13.027.340,94
Padang Pariaman	17.532.873,46	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,29	17.941.900,08
Agam	16.693.045,25	17.834.986,34	19.145.918,50	20.537.075,21	20.371.334,30
Lima Puluh Kota	12.677.544,49	13.531.194,73	14.525.483,21	15.613.495,46	15.533.057,18
Pasaman	7.335.785,21	7.801.982,13	8.318.765,11	8.902.839,00	8.891.361,50
Solok Selatan	4.598.219,45	4.893.871,25	5.214.850,48	5.571.732,28	5.528.507,31
Dharmasraya	8.437.660,72	9.054.276,65	9.697.640,71	10.344.514,24	10.242.190,77
Pasaman Barat	12.794.249,97	13.699.696,35	14.603.178,20	15.390.742,58	15.245.614,66
Padang	49.386.263,76	53.091.095,10	57.506.842,01	62.424.554,79	62.222.357,93
Kota Solok	3.241.245,94	3.469.035,58	3.728.256,36	4.047.921,37	4.041.650,72
Sawahlunto	2.937.954,38	3.165.214,99	3.404.518,84	3.679.764,93	3.656.585,65
Padang Panjang	2.774.050,10	2.974.350,89	3.198.031,98	3.474.765,68	3.473.238,63
Bukittinggi	6.783.086,09	7.453.106,84	8.011.062,02	8.695.100,58	8.627.587,69
Payakumbuh	5.203.120,37	5.639.684,44	6.134.700,30	6.824.430,16	6.823.641,86
Pariaman	4.036.741,93	4.309.010,19	4.615.745,62	5.005.432,39	4.994.102,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2. 14 Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen)

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
SUMATERA BARAT (Provinsi)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepulauan Mentawai	1,87	1,88	1,88	1,88	1,91
Pesisir Selatan	5,67	5,77	5,85	5,70	5,79
Kab.Solok	5,56	5,52	5,48	5,51	5,59
Sijunjung	3,74	3,68	3,65	3,71	3,77
Tanah Datar	5,40	5,36	5,31	5,31	5,39
Padang Pariaman	8,83	8,84	8,84	8,64	7,42
Agam	8,40	8,40	8,36	8,34	8,42
Lima Puluh Kota	6,38	6,35	6,32	6,34	6,42
Pasaman	3,69	3,69	3,65	3,62	3,68
Solok Selatan	2,31	2,30	2,27	2,26	2,29
Dharmasraya	4,25	4,28	4,25	4,20	4,23
Pasaman Barat	6,44	6,48	6,43	6,25	6,30
Padang	24,86	24,83	24,97	25,35	25,72
Kota Solok	1,63	1,64	1,64	1,64	1,67
Sawahlunto	1,48	1,48	1,48	1,49	1,51
Padang Panjang	1,40	1,40	1,40	1,41	1,44
Bukittinggi	3,41	3,43	3,46	3,53	3,57
Payakumbuh	2,62	2,65	2,72	2,77	2,82
Pariaman	2,03	2,02	2,04	2,03	2,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan, yang mana pada Tahun 2016 1,48 persen meningkat menjadi 1,51 persen pada Tahun 2020. Hal ini secara umum menggambarkan kondisi perekonomian Kota Sawahlunto mengalami peningkatan secara proporsinya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat.

Apabila dilihat dari sisi permintaan, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran selama tahun 2016 - 2020 tetap didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Kota Sawahlunto. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah PMTB, serta Konsumsi Pemerintah.

Tabel 2. 15 PDRB Kota Sawahlunto ADHB Menurut Pengeluaran (MiliarRupiah) Tahun 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.629,90	1.752,00	1.898,44	2.082,29	2.070,24
2. Konsumsi LNPRT	35,10	35,70	38,81	43,34	42,51
3. Konsumsi Pemerintah	597,61	615,49	665,45	709,78	648,89
4. PMTB	788,51	840,09	902,51	980,88	952,05
5. Perubahan Inventori	103,57	16,05	18,94	2,95	9,37
6. Net Eksport Barang dan Jaasa	(217)	(94)	(120)	(139)	(66)

PDRB	**2.937,95**	**3.165,21**	**3.404,52**	**3.679,76**	**3.656,59**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran pada semua komponen pengeluaran, kecuali komponen Perubahan Inventori. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto berkurang sebesar 12,05 miliar rupiah, dari 2.082,29 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar 2.070,24 miliar rupiah pada tahun 2020. Begitu juga dengan pengeluaran PMTB, dari 980,88 miliar rupiah menjadi 952,05 miliar rupiah dan Konsumsi Pemerintah dari 709,78 miliar rupiah menjadi 648,89 miliar rupiah.

Tabel 2. 16 PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.629,90	1.752,00	1.898,44	2.082,29	2.070,24
2. Konsumsi LNPRT	35,10	35,70	38,81	43,34	42,51
3. Konsumsi Pemerintah	597,61	615,49	665,45	709,78	648,89
4. PMTB	788,51	840,09	902,51	980,88	952,05
5. Perubahan Inventori	103,57	16,05	18,94	2,95	9,37
6. Net Eksport Barang dan Jaasa	(217)	(94)	(120)	(139)	(66)
PDRB	**2.937,95**	**3.165,21**	**3.404,52**	**3.679,76**	**3.656,59**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Kontribusi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 56,62 persen. Diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan dukungan yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Sawahlunto yaitu sebesar 26,04 persen. Lebih lanjut, pangsa pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 17,75 persen. Komposisi ini tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun yang menjadi perhatian bersama adalah kontribusi impor Kota Sawahlunto yang cenderung terus mengalami fluktuasi sejak tahun 2016.

Tabel 2. 17 Distribusi PDRB ADHB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,48	55,35	55,76	56,59	56,62
2. Konsumsi LNPRT	1,19	1,13	1,14	1,18	1,16
3. Konsumsi Pemerintah	20,34	19,45	19,55	19,29	17,75
4. PMTB	26,84	26,54	26,51	26,66	26,04
5. Perubahan Inventori	3,53	0,51	0,56	0,08	0,26
6. Net Eksport Barang dan Jaasa	(7,38)	(2,97)	(3,51)	(3,79)	(1,82)
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto

Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian Kota Sawahlunto, namun tingkat pertumbuhannya rata-rata dalam lima tahun sebesar 3,36 persen. Sementara komponen lain yang rata-rata pertumbuhannya lebih tinggi dari konsumsi rumah tangga adalah Konsumsi LNPRT sebesar 4,19 persen. Sedangkan PMTB sebesar 3,08 persen, dan Konsumsi Pemerintah sebesar -0,31 persen.

Tabel

Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,40	5,09	5,09	4,38	(2,15)	3,36
2. Konsumsi LNPRT	4,36	4,16	6,00	9,76	(3,32)	4,19
3. Konsumsi Pemerintah	0,51	(1,15)	4,32	4,38	(9,63)	-0,31
4. PMTB	5,69	4,51	3,58	5,68	(4,07)	3,08
5. Perubahan Inventori*	-	-	-	-	-	
6. Net Eksport Barang dan Jasa*	-	-	-	-	-	
PDRB	**5,72**	**5,74**	**5,50**	**5,31**	**(1,27)**	**4,2**

Sumber : BPS Kota Sawahlunto
*) Pertumbuhan tidak ditampilkan

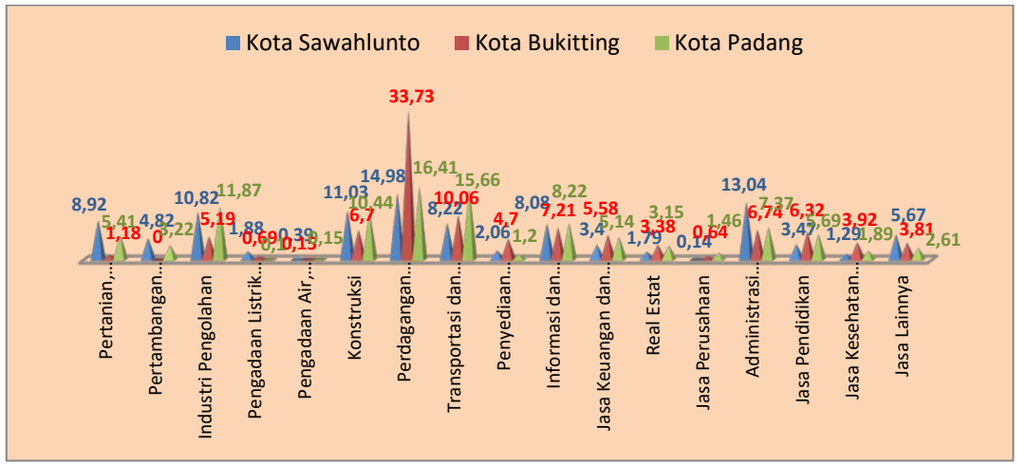
2.3.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berdampak menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat (terutama bagi yang berpenghasilan tetap) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK).

Untuk mengukur laju inlasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator. Hal ini disebabkan perhitungan inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Jika inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke salah satu dari kedua kota tersebut, dikuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut. Berikut perbedaan struktur perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi atau distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB tahun 2020 pada ketiga kota tersebut.

Berikut perbedaan struktur perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi atau distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB tahun 2020 pada ketiga kota tersebut.

Grafik 2. 5 Perbandingan Struktur Perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi Melalui Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, BPS Kota Bukittinggi 2021, BPS Kota Padang 2021

Berdasarkan distribusi PDRB ADHB Kota Sawahlunto, struktur perekonomian Kota Sawahlunto yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,98 %) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,04 %). Kota Bukittinggi didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,73 %) dan lapangan usahaTransportasi dan Pergudangan (10,06 %), sedangkan Kota Padang didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,41 %) dan lapangan usahaTransportasi dan Pergudangan (15,66 %) dan. Dengan kondisi yang demikian, jika Kota Sawahlunto merujuk inflasi ke Kota Bukittinggi, angka inflasi tersebut akan bias karena kontribusi lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Bukittinggi 33,73 % dari PDRBnya dan beda struktu ekonominya, sedangkan kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Sawahlunto hanya 14,98 %. Seandainya merujuk pada inflasi Kota Padang, struktur perekonomiannya juga berbeda dengan Kota Sawahlunto.

Berikut perkembangan inflasi Kota Sawahlunto dengan menggunakan metode PDB (PDRB) deflator :

Tabel 2. 18 Perkembangan Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator Tahun 2016 – 2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	2.715,01	2.937,95	3.165,21	3.404,52	3.679,76	3.656,59
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.251,78	2.380,52	2.517,15	2.655,62	2.796,54	2.760,93
PDRB Deflator (Df)	1,21	1,23	1,26	1,28	1,32	1,32
Deflator PDRB (n – {n-1}) / Deflator PDRB n-1		0,0236	0,0189	0,0195	0,0264	0,0065
Inflasi Kota Sawahlunto		2,36	1,89	1,95	2,64	0,65

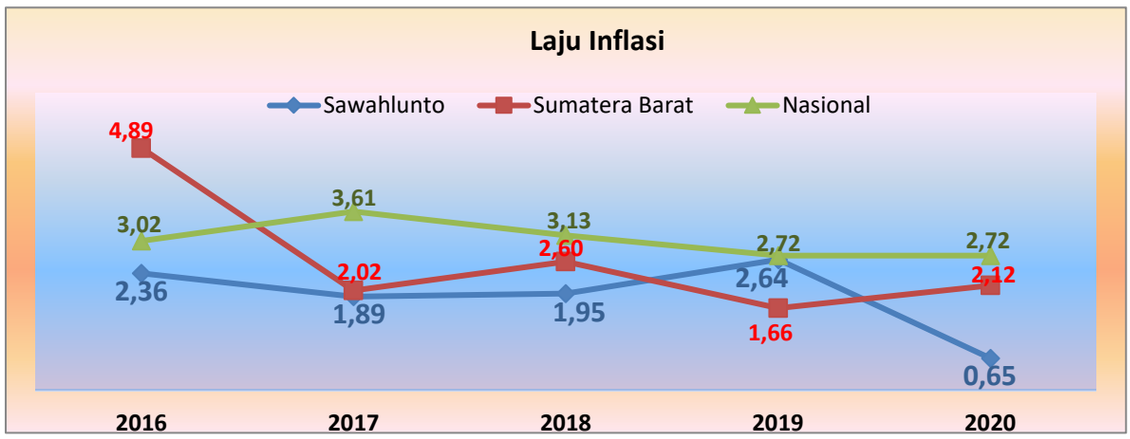
Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, Data Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2016–2020, inflasi di Kota Sawahlunto terkendali dengan kisaran angka 0,65 – 2,36 persen. Bahkan pada tahun 2020, inflasi Kota Sawahlunto sangat rendah yaitu 0,65 persen. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat inflasi 2,64.

Perkembangan inflasi di Kota Sawahlunto ini lebih baik dibandingkan dengan inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Rendahnya inflasi di Kota Sawahlunto

selama tahun 2016–2020 tentu berdampak positif pada peningkatan daya beli masyarakat, penurunan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masyarakat.

Grafik 2. 6 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Povinsi Sumatera Barat 2021

Berdasarkan grafik di atas, inflasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi selama tahun 2016-2020 dengan kecenderungan menurun. Dari grafik terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tidak selalu sejalan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan yang menggembirakan, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari laju inflasi Nasional dan inflasi Provinsi Sumatera Barat kecuali 2019, laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat namun di bawah laju inflasi Nasional.

2.3.1.3 PDRB per Kapita

PDRB Per Kapita demiskiihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep total produksi domestik regional ADHB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Dengan demikian, PDRB Per Kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian per jiwa penduduk suatu wilayah selama satu tahun, sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.

Tabel 2. 19 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Dengan Variabel Pembentuknya Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (2016-2019)	2020
PDRB ADHB (Rp. Juta)	2.937.954	3.165.215	3.404.519	3.679.765		3.656.586
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	8,21%	7,74%	7,56%	8,08%	7,9 %	-0,63%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	60.778	61.398	61.898	62.524		65.138
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,98%	1,02%	0,81%	1,01%	0,96 %	4,18%
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	48,34	52,34	55,00	58,85		58,02
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	7,2%	8,27%	5,08%	7,00%	6,89 %	-1,41%

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan tabel di atas selama kurun waktu tahun 2016 - 2019, PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju

pertumbuhan 6,89 persen per tahun. Pada tahun 2017, PDRB Per Kapita mencapai Rp. 52,34 juta/jiwa, meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 48,34 juta/jiwa. Tahun-tahun berikutnya PDRB Per Kapita terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 58,85 juta/jiwa. Angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2019 sebesar 58,85 juta rupiah per jiwa per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto mengalami penurunan sebesar 1,41 % dibandingkan tahun 2019. Meningkat atau menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan PDRB dan jumlah penduduk yang menjadi variable pembentuknya.

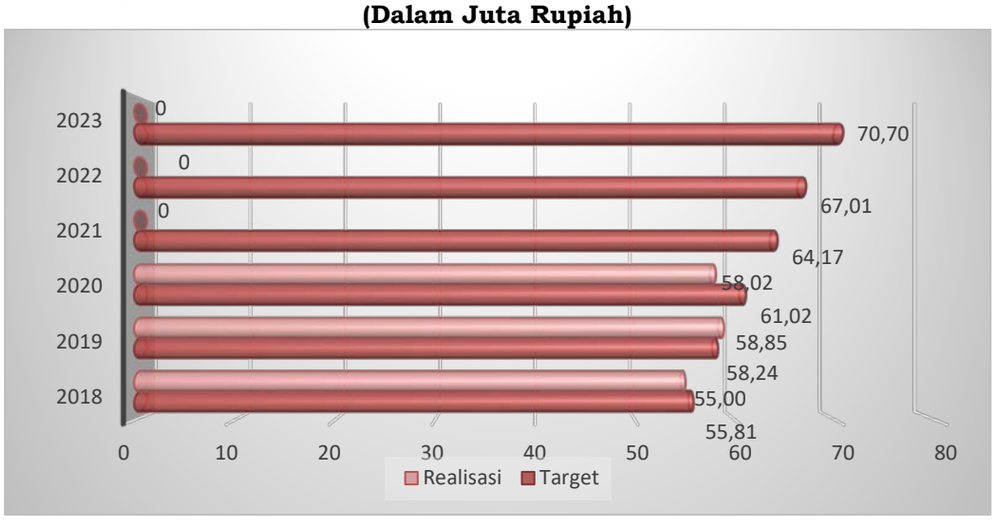
PDRB ADHB Kota Sawahlunto sebagai salah satu variabel pembentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto senantiasa meningkat setiap tahunnya selama kurun waktu 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,9 %. Sedangkan pada tahun 2020 dengan mewabahnya covid 19 PDRB ADHB Kota Sawahlunto "mengalami kontraksi pertumbuhan" sebesar 0,63%.

Sementara jumlah penduduk Kota Sawahlunto yang merupakan variabel lainnya dalam membentuk PDRB per kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 meningkat lebih dari 4 (empat) kali lipat rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun. Hal ini terlihat dari pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 yang meningkat rata-rata 0,96% per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebesar 4,18%.

Dengan menurunnya PRDB ADHB Kota Sawahlunto sebesar 0,63% dan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto sebesar 4,18% pada tahun 2020 mengakibatkan menurunnya PDRB per Kapita Kota Sawahlunto sebesar 1,41%.

Untuk melihat capaian realisasi PDRB per Kapita dengan target PDRB per kapita yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam hal ini adalah RPJMD Kota Sawahlunto dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 7 Target Dan Realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021, RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa realisasi PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebelum dilanda pandemic covid-19 (tahun 2018-2019) sudah mendekati taget yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2019 realisasi PDRB Per Kapita telah melewati taget yang telah ditetapkan. Namun dengan adanya wabah covid-19 pada tahun 2020, realisasi PDRB Per Kapita semakin menjauhi target yang telah ditetapkan.

Meskipun pandemi covid-19 telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020, namun kesejahteraan masyarakatnya masih berada

pada empat level teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 20 PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera BaratTahun 2018 – 2020

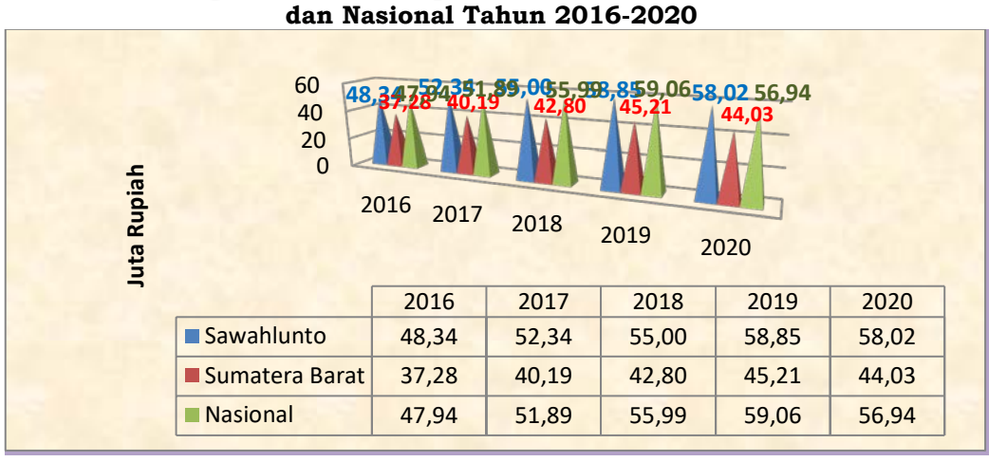
Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Mentawai	42,83	46,10	47,06	50,44	49,46
Pesisir Selatan	24,83	27,38	28,32	30,25	29,96
Solok	30,18	32,49	34,10	36,36	35,96
Sijunjung	32,87	34,67	36,31	38,46	37,87
Tanah Datar	31,05	33,52	35,13	37,58	37,34
Padang Pariaman	42,90	46,67	49,45	51,14	42,95
Agam	34,72	37,62	39,24	41,80	41,19
Lima Puluh Kota	34,02	36,65	38,27	40,79	40,24
Pasaman	26,89	29,04	29,87	31,66	31,32
Solok Selatan	28,25	30,11	30,97	32,57	31,81
Dharmasraya	36,79	39,41	40,14	41,78	40,41
Pasaman Barat	30,55	32,92	33,52	34,69	33,75
Kota Padang	53,97	58,11	61,23	65,65	64,67
Kota Solok	48,15	51,81	53,43	57,00	56,05
Kota Sawahlunto	***48,33***	***52,34***	***55,00***	***58,85***	***58,02***
Kota Padang Panjang	53,64	57,76	60,35	64,72	63,82
Kota Bukit Tinggi	54,38	58,77	62,21	66,49	65,00
Kota Payakumbuh	40,08	43,67	45,88	50,34	49,63
Kota Pariaman	47,10	50,64	52,68	56,56	55,86

Sumber : BPS Kota Sawahlunto, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada di ***posisi keempat*** setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

Untuk melihat perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2. 8 Perbandingan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Sawahlunto	48,34	52,34	55,00	58,85	58,02
Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03
Nasional	47,94	51,89	55,99	59,06	56,94

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2016-2020 berada di atas PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan PDB per Kapita Nasional, pada tahun

2016-2017 PDRB per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari PDB per Kapita Nasional, sedangkan pada tahun 2018-2019 PDRB per Kapita Kota Sawahlunto lebih rendah dari PDB per Kapita Nasional. Dan pada tahun 2020 PDRB per Kapita Kota Sawahlunto kembali lebih tinggi dari PDB Per Kapita Nasional.

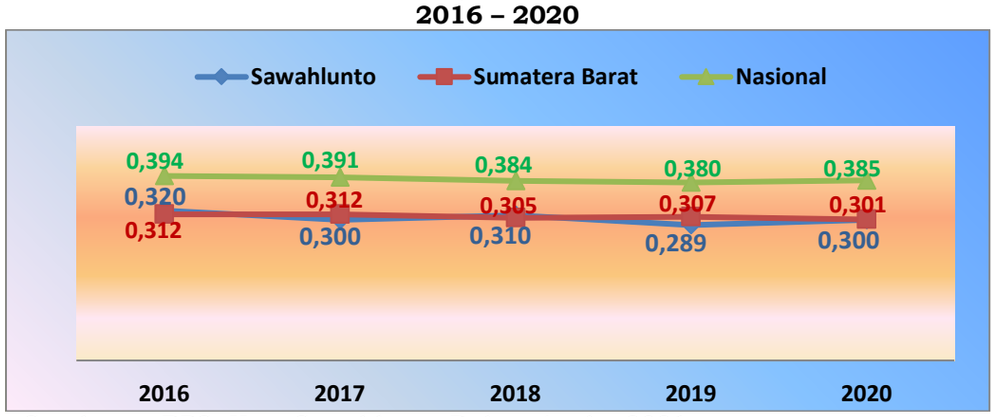
2.3.1.4 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Gini Rasio atau Indeks Gini. Rentang angka Indeks Gini adalah 1 – 0. Jika Indeks Gini mendekati angka 1, maka diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila Indeks Gini mendekati 0, maka diartikan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik. Berikut adalah klasifikasi ketimpangan pendapatan :

1. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini ≥ 0,3 dan ≤ 0,5 tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kota Sawahlunto.

Grafik 2. 9 Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Gini Kota Sawahlunto tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,289 menjadi 0,300 dan tergolong kategori “sedang”. Peningkatan rasio gini pada tahun 2020 ini merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat secara global. Kota Sawahlunto sebagaimana karateristik kota, penduduknya terdiri dari beragam profesi yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

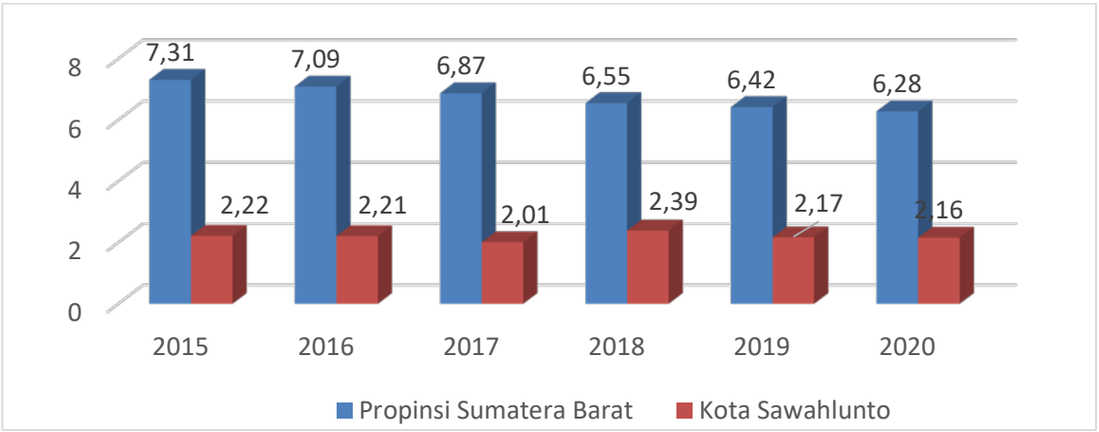
Namun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto masih berada jauh di bawah Indeks Gini Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun. Seperti terlihat pada grafik, saat Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat turun pada tahun 2018, dari 0,312 menjadi 0,305, pada saat bersamaan Indeks Gini Kota Sawahlunto justru meningkat dari 0,300 menjadi 0,310. Demikian juga pada tahun 2019, pada saat Indeks Gini

Kota Sawahlunto menurun dari 0,310 menjadi 0,289, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat justru meningkat dari 0,305 menjadi 0,307. Hal ini kembali terjadi pada tahun 2020, ketika Indeks Gini Kota Sawahlunto meningkat dari 0,289 menjadi 0,300, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat malah turun dari 0,307 menjadi 0,301.

2.3.1.5 Persentase Tingkat Kemiskinan

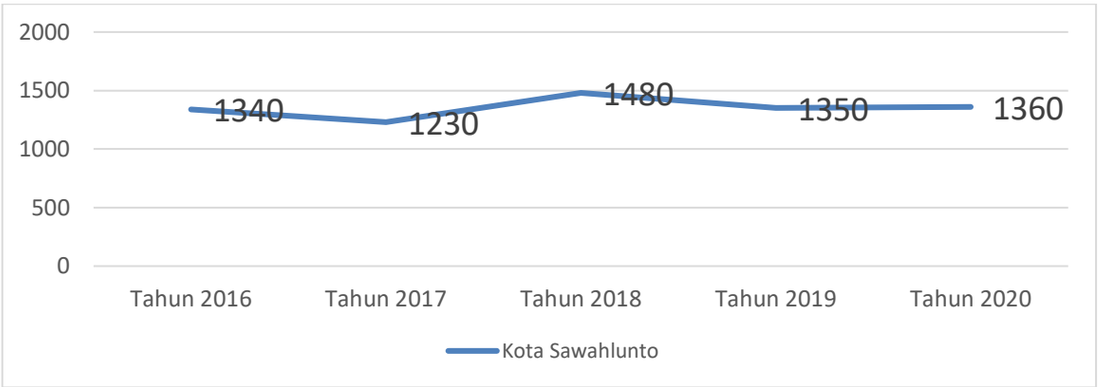
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Adapun tahun 2020 garis kemiskinan untuk kota Sawahlunto adalah Rp.399.688,-/kapita/bulan. Perkembangan persentase kemiskinan di Kota Sawahlunto fluktuatif dari tahun ke tahun, namun menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir, hingga tahun 2020 menjadi 2,16%. Untuk itu diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan. Tahun 2020 pemerintah daerah telah mengeluarkan Edaran Walikota Sawahlunto tentang pemberdayaan bagi rumah tangga miskin yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan OPD teknis terkait. Adapun penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto yang dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 10 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Propinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto' 2021

Jumlah Penduduk Miskin Kota Sawahlunto



Sumber Data: BPS Kota Sawahlunto' 2021

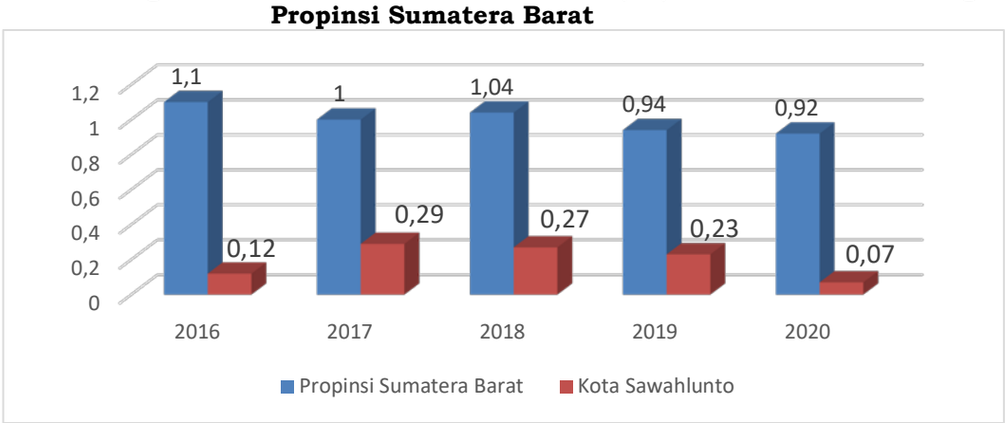
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Sawahlunto dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 mengalami peningkatan dan

penurunan yang tidak begitu signifikan, yang mana di Tahun 2020 terdapat sebanyak 1360 orang penduduk Kota Sawahlunto berada dibawah garis kemiskinan.

2.3.1.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menggambarkan seberapa jauh kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan Garis kemiskinan yang telah di tetapkan. Adapun perkembangan indeks P1 Propinsi Sumatera Barat yang disandingkan dengan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Grafik 2. 11Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto Dengan Propinsi Sumatera Barat



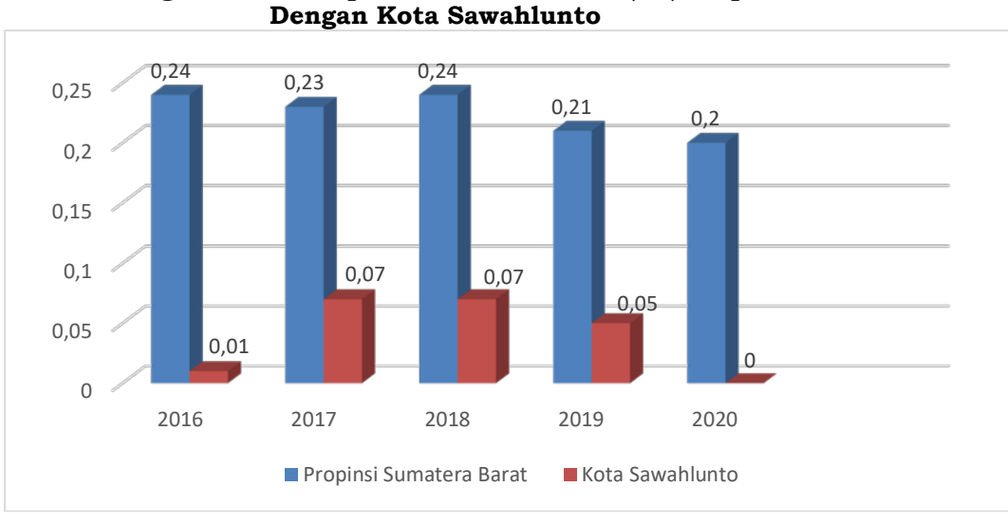
Sumber : BPS Kota Sawahlunto' 2021

Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa dari lima tahun terakhir indek kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan yang cukup signifikan, untuk tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan 0,07 ini menyatakan bahwa jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin cukup dekat, ini menguntungkan bagi Kota Sawahlunto karena nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang rendah ini berarti penduduk miskin di Kota Sawahlunto mempunyai pendapatan yang mendekati garis kemiskinan, sehingga lebih cepat proses untuk mengeluarkan dari kemiskinan. Ini membuktikan bahwa program/kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto, salah satunya dengan pemberian pelatihan-pelatihan, pemberian ternak, bibit tanaman dan lainnya sudah dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto terutam apada masa pandemic saat ini. Selain itu bantuan sosial yang berupa bantuan langsung baik dari pemerintah pusat maupun daerah baik berupa bantuan sembako dan bantuan beasiswa pendidikan sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan pada masa pandemic ini.

2.3.1.7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto

Indikator Kemiskinan dengan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara Penduduk Miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Berikut disajikan data Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 dan disandingkan dengan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat dengan tahun yang sama.

Grafik 2. 12 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sumatera Barat Dengan Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto ’2021

Dari grafik diatas, terlihat bahwa nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 0,00. Ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Sawahlunto semua sama. Ini berarti seluruh penduduk miskin di Kota Sawahlunto mendapatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara merata sehingga pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto mempunyai rata-rata hampir sama. Untuk itu perlu meningkatkan pendapatan penduduk miskin, melalui program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

2.3.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok yang dimaksud adalah sebabagi berikut :

1. Kelompok “sangat tinggi”: IPM ≥ 80

2. Kelompok “tinggi”: 70 ≤ IPM < 80
3. Kelompok “sedang”: 60 ≤ IPM < 70
4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Secara umum, pembangunan manusia Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kota Sawahlunto meningkat dari 70,67tahun 2016 menjadi 72,64tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Sawahlunto rata-rata tumbuh sebesar 0,69 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto periode 2016 hingga 2020 ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. Berikut adalah tabel perkembangan indikator dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020.

Tabel 2. 21 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata
AHH	Tahun	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	
Pertumbuhan AHH			0,09%	0,29%	0,40%	0,19%	0,24%
HLS	Tahun	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17	
Pertumbuhan HLS			0,69%	0,08%	0,08%	0,08%	0,23%
RLS	Tahun	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	
Pertumbuhan RLS			0,10%	0,10%	0,30%	2,01%	0,63%
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Ribu Rupiah	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182	
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita disesuaikan			3,2%	4,5%	4,8%	-0,5%	3,0%
IPM		**70,67**	**71,13**	**71,72**	**72,39**	**72,64**	
Pertumbuhan IPM			**0,65%**	**0,83%**	**0,93%**	**0,35%**	**0,69%**

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2016 hingga 2020, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir rata-rata sebesar 0,17 tahun per tahun atau tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,33 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 70,00 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2020 memiliki angka harapan hidup 70 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 69,87 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2. 22 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
AHH Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	
Pertumbuhan AHH Kota Sawahlunto		0,09 %	0,29 %	0,40 %	0,19 %	0,24 %

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
AHH Provinsi Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47	
Pertumbuhan AHH Provinsi Sumaera Barat		0,07 %	0,33 %	0,43 %	0,23 %	0,27 %
AHH Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	
Pertumbuhan AHH Nasional		0,23 %	0,20 %	0,20 %	0,18 %	0,20 %

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, BPS, Statistik Indonesia 2021

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah meningkat rata-rata sebesar 0,03 tahun per tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat rata-rata 0,06 tahun per tahun.

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,17 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,16 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2020, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,17 tahun atau minimal menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang Diploma. Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2. 23 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
HLS Kota Sawahlunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17	
Pertumbuhan HLS Kota Sawahlunto	0,69%	0,08%	0,08%	0,08%	0,23%	0,69%
HLS Provinsi Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	
Pertumbuhan HLS Provinsi Sumatera Barat	1,09%	0,07%	0,43%	0,07%	0,42%	1,09%
HLS Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	
Pertumbuhan HLS Nasional	1,02%	0,47%	0,31%	0,23%	0,51%	1,02%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021 BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021 BPS, Statistik Indonesia 2021

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Sawahlunto tumbuh 0,63 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,17 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas X (kelas I SLTA). Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2. 24 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
RLS Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	
Pertumbuhan RLS Kota Sawahlunto		0,10%	0,10%	0,30%	2,01%	0,63%
RLS Provinsi Sumatera Barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	
Pertumbuhan RLS Provinsi Sumatera Barat		1,51%	0,46%	1,83%	0,78%	1,15%
RLS Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	
Pertumbuhan RLS Nasional		1,89%	0,86%	2,08%	1,68%	1,63%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021. BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021. BPS, Statistik Indonesia 2021

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.10,182 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh sebesar 3,01% per tahun, kecuali tahun 2020 yang turun sebesar 56 ribu rupiah atau turun sebesar 0,55% . Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah. Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran per Kapita Nasional.

Tabel 2. 25 Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto		3,23%	4,52%	4,84%	-0,55%	3,01%
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat		1,78%	3,22%	2,70%	-1,76%	1,48%
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional		2,34%	3,70%	2,17%	-2,53%	1,42%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021. BPS, Statistik Indonesia 2021

Penggunaan pendekatan Pengeluaran per kapita disesuaikan kurang tepat untuk menggambarkan Standar hidup yang layak suatu wilayah. Standar hidup layak digambarkan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagaimana yang digunakan oleh UNDP sebagai pelopor. Namun data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak tersedia, oleh

sebab itu BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran, sehingga bias jika digunakan untuk menggambarkan standar hidup layak.

Rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat tidaklah menunjukkan perekonomian Kota Sawahlunto yang buruk, justru kondisi Ini merupakan sesuatu hal yang positif bagi Kota Sawahlunto karena menunjukkan bahwa biaya hidup layak di Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan investasi dan kegiatan lain yang tidak bersifat konsumtif, seperti untuk pendidikan, penambahan barang modal. Hal ini merujuk pada Pendapatan (PDRB) per kapita Kota Sawahlunto adalah tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukitinggi, Padang dan Padang Panjang. Dengan demikian, rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto lebih disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian besar adalah desa (73 %) dengan ciri khas pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi sendiri, dan hal ini tentu saja mengurangi pengeluaran per kapita, karena sebagian besar dari 27 komoditi kebutuhan pokok yang dihitung oleh BPS sebagai dasar perhitungan daya beli diproduksi sendiri oleh masyarakat sehingga tidak dihitung dalam pengeluaran masyarakat.

Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang memiliki rasio terendah terhadap pendapatan atau PDRB-nya jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, rasio terendah pengeluaran per kapita terhadap pendapatan atau PDRB-nya adalah Kepulauan Mentawai. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 26 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita, PDRB Per Kapita, Rasio Pengeluaran Per Kapita Terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten /Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2020

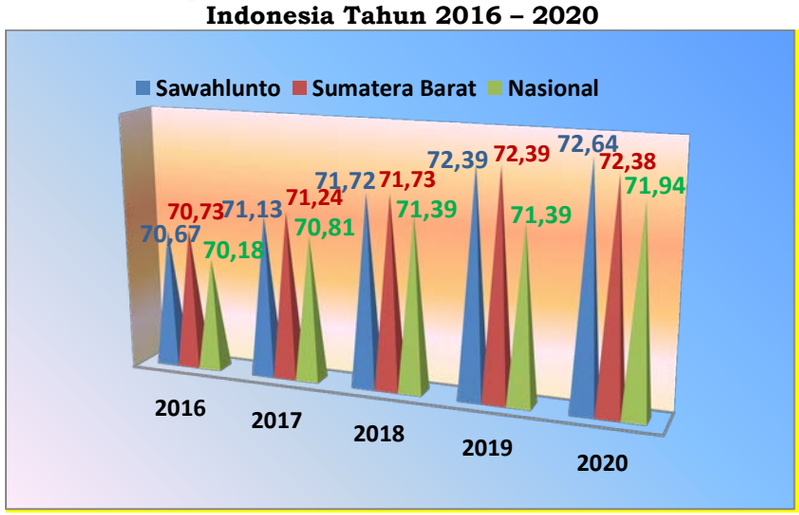
Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp./Orang)		PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang)		Rasio Pengeluaran / PDRB	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kepulauan Mentawai	6,43	6,28	50,44	49,46	13%	13%
Pesisir Selatan	9,44	9,21	30,25	29,96	31%	31%
Solok	10,31	10,17	36,36	35,96	28%	28%
Sijunjung	10,39	10,36	38,46	37,87	27%	27%
Tanah Datar	10,72	10,59	37,58	37,34	29%	28%
Padang Pariaman	11,16	10,99	51,14	42,95	22%	26%
Agam	9,78	9,65	41,8	41,19	23%	23%
Lima Puluh Kota	9,84	9,59	40,79	40,24	24%	24%
Pasaman	8,59	8,43	31,66	31,32	27%	27%
Solok Selatan	10,51	10,33	32,57	31,81	32%	32%
Dharmasraya	11,43	11,27	41,78	40,41	27%	28%
Pasaman Barat	9,18	9,05	34,69	33,75	26%	27%
Kota Padang	14,73	14,48	65,65	64,67	22%	22%
Kota Solok	12,34	12,12	57	56,05	22%	22%
Kota Sawahlunto	***10,24***	***10,18***	***58,85***	***58,02***	***17%***	***18%***

Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp./Orang)		PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang)		Rasio Pengeluaran / PDRB	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kota Padang Panjang	11,01	10,73	64,72	63,82	17%	17%
Kota Bukit Tinggi	13,59	13,28	66,49	65	20%	20%
Kota Payakumbuh	13,46	13,28	50,34	49,63	27%	27%
Kota Pariaman	12,96	12,79	56,56	55,86	23%	23%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021. BPS, ProvinsiSumatera Barat Dalam Angka 2021

IPM Kota Sawahlunto meskipun secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun 0,69 %, namun Pemerintah Kota Sawahluno masih punya tugas untuk mempersempit disparitas dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang masih lebar, karena IPM Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat adalah yang terendah. Sedangkan jika IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat disandingkan, Kota Padang memiliki IPM paling tinggi dengan angka sebesar 82,82,sementara IPM terendah dimiliki kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka sebesar 61,09.

Grafik 2. 13 Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021. BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

IPM Kota Sawahluntoselama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39 dan pada tahun 2020 sudah dapat melebihi IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,64. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk **kategori tinggi** (70 ≤ IPM < 80). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan periode tahun 2016-2020, kecuali unsur pengeluaran perkapita yang mengalami penurunan, dari 10.238.000 rupiah pada tahun 2019 menjadi 10.182.000 rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota

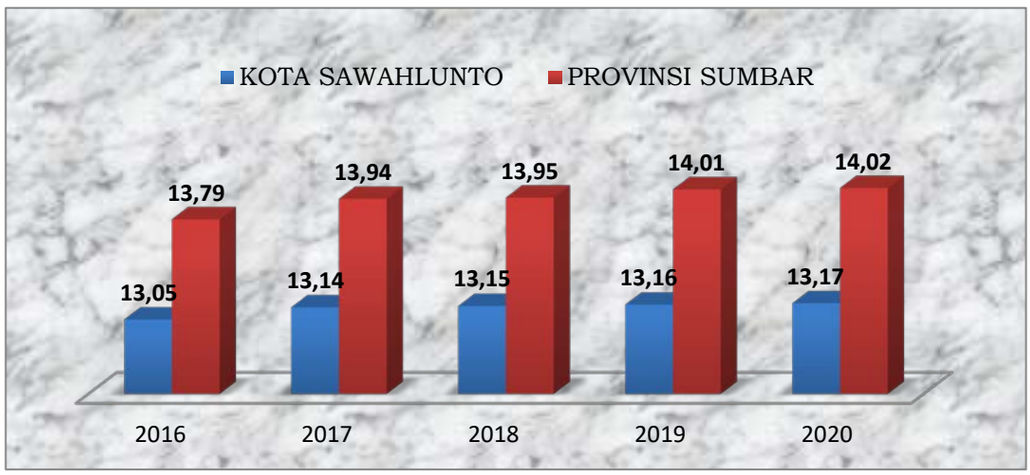
Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.3.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 2. 14 Tabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 AHLS Kota Sawahlunto sudah mencapai pada angka 13,17. Angka ini merupakan peringkat ke 13 untuk dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto menduduki AHLS terendah di antara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27 Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah
1	Kota Padang	16,52
2	Kota Padang Panjang	15,06
3	Kota Bukittinggi	14,97
4	Kota Pariaman	14,54
5	Kab. Tanah Datar	14,33
6	Kota Solok	14,32
7	Kota Payakumbuh	14,26
8	Kab. Agam	13,87

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah
9	Kab. Padang Pariaman	13,67
10	Kab. Pasaman Barat	13,61
11	Kab. Pesisir Selatan	13,32
12	Kab. Lima Puluh Kota	13,29
13	**Kota Sawahlunto**	**13,17**
14	Kab. Solok	13,04
15	Kep. Mentawai	12,82
16	Kab. Pasaman	12,8
17	Kab. Solok Selatan	12,71
18	Kab. Dharmasraya	12,43
19	Kab. Sijunjung	12,37

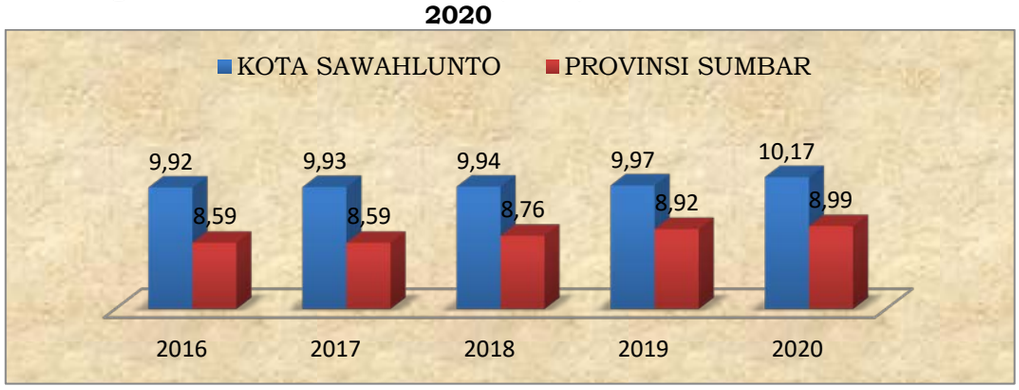
Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/ masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2.3.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. PerkembanganAngka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2015 sampai 2019 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. 15 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9.92 Tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 10,17 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas II SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan untuk tingkat Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terakhir dari kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 28 Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	KABUPATEN/KOTA	ARLS
1	Kota Padang Panjang	11.44
2	Kota Padang	11.33
3	Kota Bukittinggi	11.31
4	Kota Solok	11.01
5	Kota Payakumbuh	10.46
6	Kota Pariaman	10.36
7	**Kota Sawahlunto**	**9.97**
8	Kabupaten Agam	8.69
9	Kabupaten Tanah Datar	8.44
10	Kabupaten Dharmasraya	8.25
11	Kabupaten Solok Selatan	8.15
12	Kabupaten Pesisir Selatan	8.14
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	7.97
14	Kabupaten Pasaman Barat	7.86
15	Kabupaten Sijunjung	7.77
16	Kabupaten Solok	7.84
17	Kabupaten Pasaman	7.66
18	Kabupaten Padang Pariaman	7.50
19	Kabupaten Kep. Mentawai	6.95

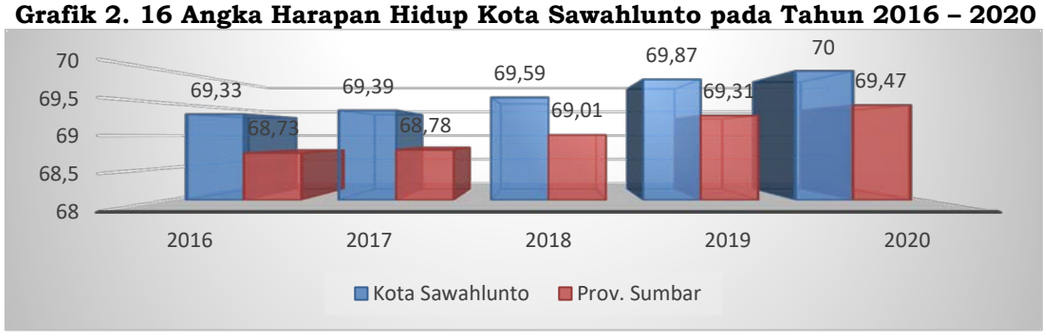
Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

2.3.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor–faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.

Grafik 2. 16 Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto pada Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2016 – 2020 selalu mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Akan tetapi jika dilihat perbandingan dengan Kab/Kota lain di Sumatera Barat, ternyata Angka Harapan hidup (AHH) Kota Sawahlunto berada pada peringkat ke-10 (Sepuluh). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 29 Peringkat Angka Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	2020	
		AHH	Peringkat
1	Kota Bukittinggi	74,38	1
2	Kota Payakumbuh	73,74	2
3	Kota Padang	73,65	3
4	Kota Solok	73,61	4
5	Kota Padang Panjang	72,82	5
6	Kabupaten Agam	72,37	6
7	Kabupaten Dharmasraya	71,33	7
8	Kabupaten Pesisir Selatan	70,86	8
9	Kota Pariaman	70,28	9
10	**Kota Sawahlunto**	**70,00**	**10**
11	Kabupaten Tanah Datar	69,94	11
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	69,79	12
13	Kabupaten Padang Pariaman	68,79	13
14	Kabupaten Solok	68,58	14
15	Kabupaten Pasaman Barat	67,82	15
16	Kabupaten Solok Selatan	67,81	16
17	Kabupaten Pasaman	67,4	17
18	Kabupaten Sijunjung	66,21	18
19	Kabupaten Kep Mentawai	64,73	19

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

2.3.2.4 Persentase balita gizi buruk

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita.Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat yangpenanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatansaja karena penyebab timbulnya masalah gizi ini adalah multifaktor, oleh karena itupendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sector terkait. Kurang gizi dipengaruhi oleh rendahnya konsumsi karbohidrat dan protein dalam makanan sehari-hari, tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang pada usia balita, adanya penyakit infeksi, rendahnya ketahanan pangan keluarga dan pola asuh anak yang tidak baik serta factor lingkungan yang jelek. Pada masyarakat dan ditingkat rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup dan ini dipengaruhi oleh factor pendidikan, dan perilaku. Oleh karena itu penanganannya harus terpadu yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan kemampuan dan ketrampilan asuhan gizi keluarga dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2. 30 Jumlah Kasus Gizi di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Pencapaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Balita gizi buruk	10	9	12	14	11
2	Balita gizi kurang	162	97	377	352	430

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Berdasarkan data diatas hasil kasus gizi buruk pada balita tahun 2020 berjumlah 11 orang dan masih rendah dari kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumbar dengan peringkat nomor 6, namun demikian kegiatan ini harus terus ditingkatkan dengan cara tetap melacak kasus kasus yang muncul dilapangan, pemberian makanan tambahan pada balita ibu hamil dan menyusui, mengadakan konseling kedokter spesialis dan monitoring evaluasi dengan melakukan pemetaan dan kunjungan rumah .

2.3.2.5 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan desa dan kelurahandimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk melaksanakan survailans, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana dan penyehatan lingkungan serta penerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Diharapkan desa/kelurahan nantinya peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya secara mandiri sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat tiap tahunnya. Sehubungan dengan table diatas pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sejak Tahun 2016 belum ada peningkatan pengembangannya sesuai yang diharapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (indikator) dan SDGs (goals 3). Dan pada tahun 2020 untuk desa siaga aktif pratama ada peningkatan menjadi 9 yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 4 desa. Pada desa siaga aktif tingkat madya sejak tahun 2019 dan 2020 ada penurunan karena disebabkan tingkat kesiapan dan kepedulian masyarakat yang menurun.

Tabel 2. 31 Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016 – 2020

No	Uraian			Pencapaian		
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa siaga aktif	37	37	37	37	37
	a. Tingkat pratama	0	0	0	4	9
	b. Tingkat madya	37	37	37	33	28
	c. Tingkat purnama	0	0	0	0	0
	d. Tingkat mandiri	0	0	0	0	0

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Jumlah Grup Kesenian

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Budaya merupakan kristalisasi nilai pola hidup yang dianut suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas dan karya-karya manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, dan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai

Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prisip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022 serta dengan masuknya Kota Sawahlunto sebagai "*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto"* (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) dalam Sidang Komite Warisan Dunia ke 43 di Baku, Azerbaijan tanggal 06 juli 2019.

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar.Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.31

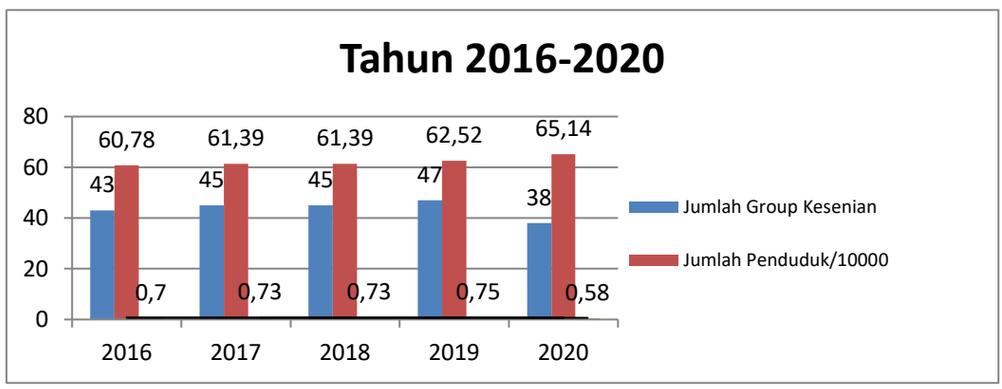
Tabel 2. 32 Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	43	45	45	47	38
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,70**	**0,73**	**0,73**	**0,75**	**0,58**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Jumlah Grup kesenian yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2016 berjumlah 43 grup kesenian, di tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 2 group sehingga menjadi 45 grup dan di tahun 2018 tidak ada penambahan tetapi tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 2 grup kesenian lagi, sehingga berjumlah sebanyak 47 grup, tetapi pada tahun 2020 terjadi pengurangan grup kesenian yang tadinya berjumlah 47 grup menjadi 38 grup, pengurangan ini disebabkan pasca pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya Refocusing Anggaran pada Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 38 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 10 group kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

Grafik 2. 17 Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto



Sumber: Hasil Olahan, 2020

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan

kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 33 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	10	10	12	20
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,19**	**0,30**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertujukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.33 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karean disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya “Mak Itam”. Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu.

Tabel 2. 34 Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Museum Goedang Ransum	22.288	18.851	14.139	15.309	5.980
2	Lubang Tambang Mbah Soero	10.905	10.653	8.151	8.492	3.957
3	Museum Kereta Api	6.423	12.220	7.977	6.503	3.250
	Jumlah	**39.616**	**41.724**	**30.267**	**30.304**	**13.187**

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2021

2.3.4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

Tujuan 1

Tanpa kemiskinan – Mengentas segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.

Tujuan 2

Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.

Tujuan 3

Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.

Tujuan 4

Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

Tujuan 5

Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Tujuan 6

Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

Tujuan 7

Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energy yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonom berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9

Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.

Tujuan 10

Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.

Tujuan 11

Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

Tujuan 12

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14

Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Tujuan 15

Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

Tujuan 17

Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

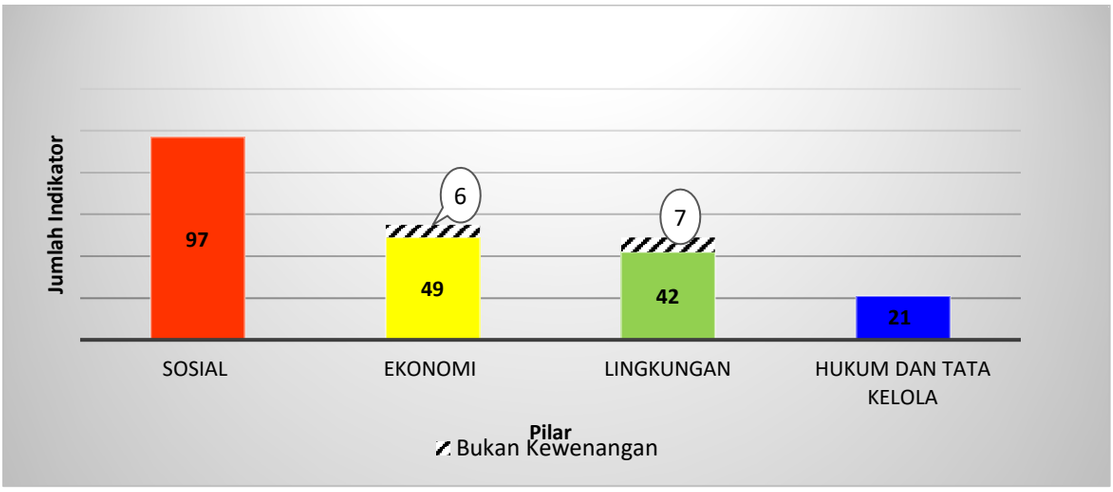
Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum dimaksudkan untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kota Sawahlunto dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kota Sawahlunto sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis, capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kota adalah 17 TPB. Jumlah indikator dari 17 TPB yang menjadi kewenangan kota adalah 222 indikator. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu: pilar sosial; pilar ekonomi; pilar lingkungan; dan pilar hukum dan tata kelola. Adapun indikator-indikator TPB/SDGs Kota Sawahlunto berdasarkan pilar pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut:

Grafik 2. 182 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kota Sawahlunto Berdasarkan Pilar Pembangunan



Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

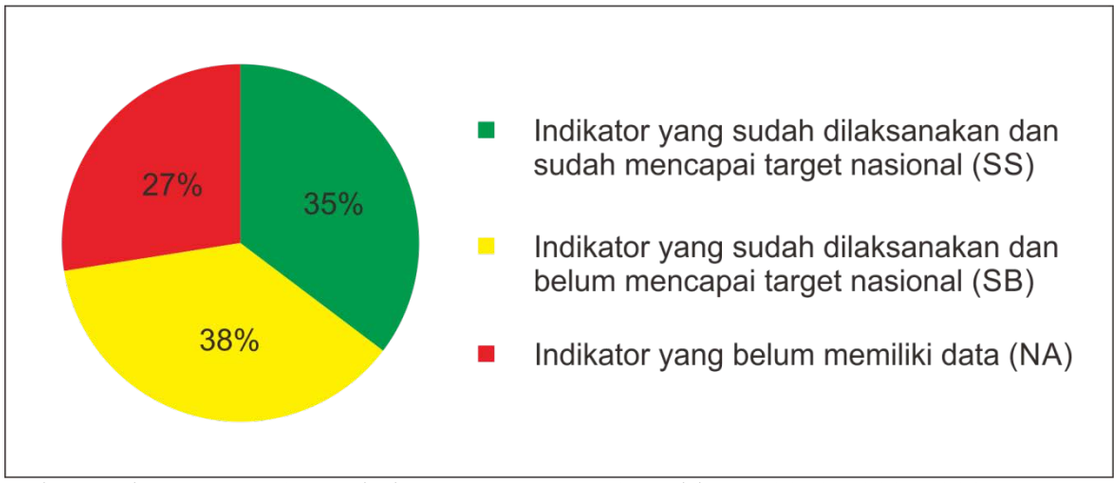
Kondisi Kota Sawahlunto dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 72 indikator (34,45%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 80 indikator (38,28%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 57 indikator (27,27%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 35 Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Sawahlunto

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	72	34,45%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	80	38,28%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	57	27,27%
TOTAL		**209**	100%

Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Grafik 2. 19 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

2.3.4.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

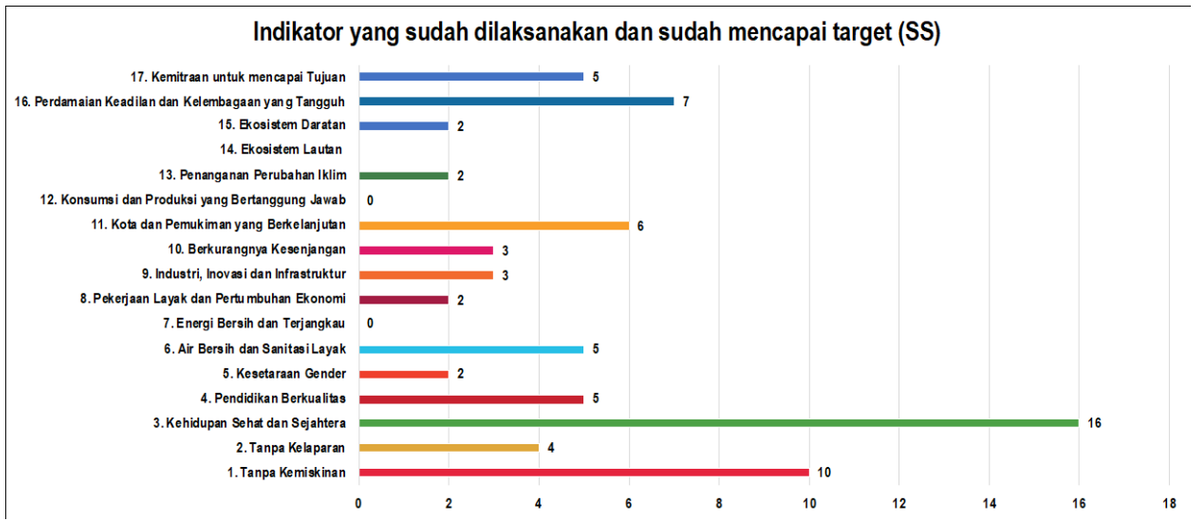
Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kota Sawahlunto adalah sebanyak 72 indikator atau dengan persentase 34,45%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2. 36 Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Sawahlunto

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	10	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	4	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	5	Sosial
5	Kesetaraan Gender	2	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	Lingkungan
14	Ekosistem Lautan	0	
15	Ekosistem Daratan	2	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	5	Ekonomi
	Jumlah	**72**	

Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Grafik 2. 20 Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kota Sawahlunto



Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

2.3.4.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

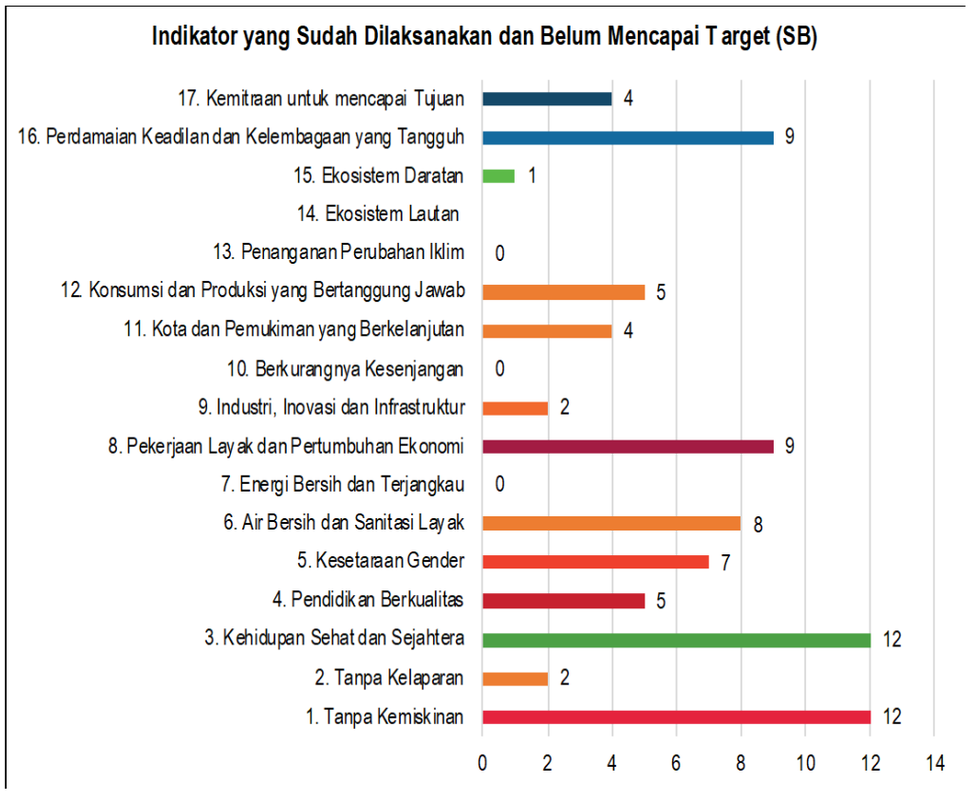
Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Sawahlunto adalah sebanyak 80 indikator atau dengan persentase 38,28%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2. 37 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kota Sawahlunto

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	12	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	2	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	12	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	5	Sosial
5	Kesetaraan Gender	7	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	8	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	9	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	0	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
14	Ekosistem Lautan	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	1	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	9	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	4	Ekonomi
	Jumlah	**80**	

Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Tabel 2. 38 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kota Sawahlunto



Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kota Sawahlunto adalah sebanyak 79 indikator atau dengan persentase 37,80%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Gambar 4.5.

Tabel 2. 39 Indikator yang Sudah Dilakukan dan Belum Mencapai Target (SB)

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
3	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas PU
4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PU
5	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Dinas PU
6	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan
7	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Capil

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
8	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DinsosPMDPPA
9	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	BPBD SPAB, Disdik BPBD melakukan sosialisasi
10	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD
11	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	DinsosPMDPPA
12	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
13	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
14	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
16	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota (Kecamatan/kelurahan/desa) yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
17	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan/desa) yang mencapai eliminasi malaria.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
18	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan/desa) yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
19	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	POLPP
20	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN
21	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
22	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
23	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
24	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan
25	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan
26	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
27	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan
28	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan
29	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DinsosPMDPPA
30	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosPMDPPA
31	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DinsosPMDPPA
32	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DinsosPMDPPA
33	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
34	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DinsosPMDPPA
35	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
36	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PU
37	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas PU
38	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
39	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
40	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
41	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan/desa) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PU
42	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PU

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
43	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/kelurahan) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	PERKIM
44	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	PERKIM
45	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Barenlitbangda
46	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DPMPTSPNaker
47	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DPMPTSPNaker
48	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DPMPTSPNaker
49	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DPMPTSPNaker
50	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas PARPORA
51	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas PARPORA
52	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas PARPORA
53	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSPNaker
54	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Koperasi UKM Perindag
55	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DPMPTSPNaker
56	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas PU
57	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Barenlitbangda
58	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
59	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Perkim
60	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Perkim
61	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Perkim
62	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DPMPTSPNaker
63	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Perkim
64	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas PU
65	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	HUKUM
66	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DinsosPMDPPA
67	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DinsosPMDPPA
68	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat
69	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
70	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Barenlitbangda
71	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DinsosPMDPPA
72	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM
73	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	CAPIL
74	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Kominfo
75	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD
76	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	TAPEM
77	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS
78	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS
79	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kota Sawahlunto 2021

2.3.4.3 Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 57 indikator atau 27,27%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut:

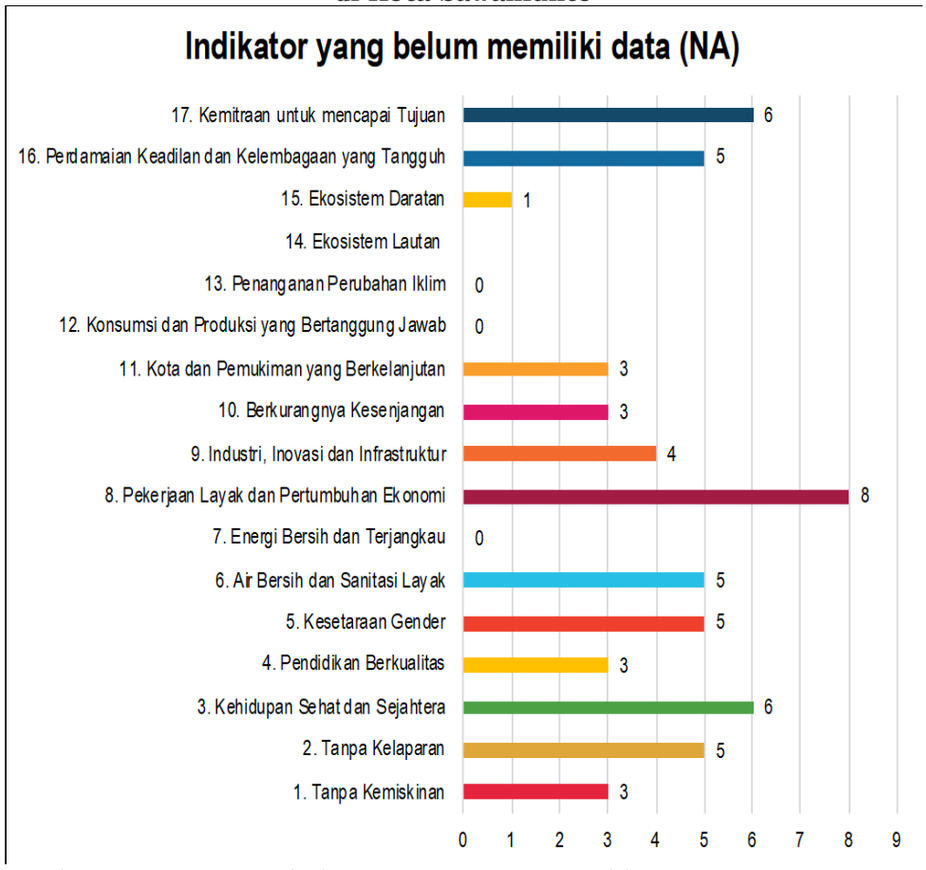
Tabel 2. 40 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kota Sawahlunto

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	3	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	5	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	6	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	3	Sosial
5	Kesetaraan Gender	5	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	5	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
14	Ekosistem Lautan	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	1	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	5	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	Ekonomi
	Jumlah	57	

Sumber: Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Tabel 2. 41 Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kota Sawahlunto



Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto 2018 - 2023, 2021

Tabel 2. 42 Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DPMPTSPNaker
3	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DinsosPMDPPA
4	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
5	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
6	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
7	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
8	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian
9	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
10	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
11	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
12	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	POLPP
13	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
14	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
15	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan
16	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Pendidikan
17	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DinsosPMDPPA
18	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DinsosPMDPPA
19	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DinsosPMDPPA
20	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
21	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DinsosPMDPPA
22	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	PERKIM
23	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	PERKIM

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
24	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas PU
25	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PU
26	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Barenlitbangda
27	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DPMPTSPNaker
28	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi UKM Perindag
29	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Pendidikan
30	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Barenlitbangda
31	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas PARPORA
32	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMPTSPNaker
33	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi UKM Perindag
34	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Koperasi UKM Perindag
35	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi UKM Perindag
36	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Barenlitbangda
37	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Kominfo
38	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Barenlitbangda
39	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPBD dan Kesbangpol
40	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DPMPTSPNaker
41	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan
42	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Barenlitbangda
43	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Barenlitbangda
44	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Perkim
45	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPBD
46	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DinsosPMDPPA
47	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	PBJ

No	NO. INDIKATOR	Indikator TPB	OPD
48	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Barenlitbangda
49	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	ORGANISASI
50	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Barenlitbangda
51	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD
52	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Kominfo
53	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Kominfo
54	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kota Sawahlunto 2021

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2016-2020:

Tabel 2. 43 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2016	101,45	67,86	84,54
2.	2017	99,56	74,13	84,54
3.	2018	100	98.90	83.02
4.	2019	99,66	97,95	81,79
5	2020	99,73	97,44	82,64

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap kelompok

umur. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada kelompuk umur 7 - 12 tahun dari 99,66 % menjadi 99,73%. Namun pada kelompok umur 13-15 tahun dari 97,95% menjadi 97,44,86 % sedikit mengalami penurunandan pada kelompok umur 16-18 dari 81,79 % menjadi 82,64 %.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2. 44 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**TK**					
1.1	Jumlah Sekolah	123	123	123	125	131
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	3.499	3.390	3.390	3.360	3404
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1:28,44	1:27,56	1:27,56	1:26,85	1:25,98
2	**SD/MI/SDLB**					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	64	64	67
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	7.305	6.977	6.994	7.222	7.122
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:123,69	1:118,61	1:109,28	1:112,84	1:106,30
3	**SMP/MTs/SMPLB**					
2.1	Jumlah Sekolah	15	15	14	14	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3809	3.562	3.506	3.532	3.602
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 : 394	1:345,36	1:399	1:252,2	1:240,13

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah disetiap tingkatan pendidikan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Sawahlunto telah memenuhi kebutuhan.

Tabel 2. 45 Data Kondisi PAUD Kota Sawahlunto Tahun 2017 – 2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK NASIONAL	34,62%	33,84 %	37,92%	36,93%	37,52%
2	APK PROPINSI	43,61%	43,61%	30,22%	35,89,%	40,04%
3	APK KOTA SAWAHLUNTO	98,04%	99,40%	60,52%	61,24%	59,35%
4	JUMLAH PENDUDUK UMUR 3-6 TAHUN KOTA SAWAHLUNTO	4680	4678	4661	4641	4618
5	JUMLAH SISWA PAUD	4586	4650	2821	2842	2741

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dari table diatas bahwa sejak tahun 2016 sampai 2020 APK PUD umur 3-6 tahun mengalami penurunan yang cukup besar , walaupun mengalami penurunan APK PUD Kota Sawahlunto masih diatas rata-rata Nasional dan Propinsi Sumatera Barat setiap Tahunnya. Tahun 2016 APK PUD mencapai 98,04% dan dengan adanya

Pendemi Covid 19 APK PUD tahun 2020 hanya 59,35% tapi cukup tinggi jika disbanding dengan Propinsi 40,04% dan Nasionl 37,52%

3. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2. 46 Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**TK**					
1.1	Jumlah Guru	186	183	172	123	400
1.2	Jumlah Murid	1556	1488	1543	1200	2913
1.3	Perbandingan Jlh Guru Terhadap Jlh Murid	1 : 8,36	1 : 8	1 : 8,97	1:9,75	1:7,28
2	**SD/MI**					
2.1	Jumlah Guru	611	605	603	428	579
2.2	Jumlah Murid	7136	6772	6691	7247	7122
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jumlah Murid	1:11,67	1:11,08	1:11.02	1:16,93	1:12,30
3	**SMP/MTs**					
3.1	Jumlah Guru	305	287	285	322	320
3.2	Jumlah Murid	2681	2667	2615	3338	3527
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jmlh Murid	1 : 8,79	1:9,29	1 : 8,27	1:10,36	1:11,02

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2021

Selama kurun waktu 2016–2020 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2020 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 7 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 8 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tingkat TK dan mengalami sedikit penurunan pada tingkat SD dan SMP. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 11 murid.

4. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersedian kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 47 Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**TK**					
1.1	Jumlah Murid	1556	1488	1543	1200	2913
1.2	Jumlah Kelas	104	109	100	99	89
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	14,96 : 1	13,65 : 1	15,43:1	12,12:1	32,73 : 1
2	**SD/MI**					
2.1	Jumlah Murid	7340	6772	6727	7247	7122
2.2	Jumlah Kelas	376	374	378	400	408
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	20,22 : 1	18,10 : 1	17,79 : 1	18,11:1	17,45:1
3	**SMP/MTs**					

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Jumlah Murid	2790	2667	2359	2930	3527
3.2	Jumlah Kelas	107	109	107	130	130
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	24,05 : 1	24,46 : 1	22,04 : 1	22,53:1	27,13:1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan TK, kecuali pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbadingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas berisi rata-rata 12 siswa, untuk tingkat SD satu kelas berisi rata-rata 17 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 27 orang siswa.

Jika dibandingkan dengan rombel yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2018, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 48 Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32
3	SMA	1 : 20 – 36
4	SMK	1 : 15 – 36

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dapat dilihat bahwa rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto telah memenuhi kondisi ideal yang telah ditetapkan. Secara kuantitas, jumlah guru telah dapat melayani jumlah murid sesuai dengan kondisi idealnya. Jenjang pendidikan SD dengan rasio satu kelas berisi 18 orang murid dan jenjang pendidikan SMP satu kelas dengan 23 orang murid telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan Permendikbud. Tetapi ada kasus di beberapa sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan kondisi ideal dan tidak memenuhi kuota untuk roombelnya. Hal ini disebabkan karena faktor tapografi Kota Sawahlunto yang menjadikan jarak rumah penduduk ke sekolah sangat jauh. Sehingganya jumlah murid di sekolah tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi untuk kondisi idealnya.

5. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2. 49 Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	0	2	4	11	0
1.2	Jumlah Murid	7.136	6.772	6.727	7.247	7.122
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0	0,03	0,06	0,03	0
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	12	12	11	5	38
2.2	Jumlah Murid	2.681	2.667	2.359	3.338	3.527

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,44	0,49	0,46	0,15	1,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

Pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2019 dari 11 orang menjadi 0 orang dan tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan sebanyak 38 orang dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga *broken home,* sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

6. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 50 Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**SD**					
	Ikut Ujian	1.093	1.179	1.217	1139	1050
	Lulus Ujian	1.093	1.179	1.217	1139	1050
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	**MI**					
	Ikut Ujian	65	51	62	69	76
	Lulus Ujian	51	62	69	80	76
	Persentase (%)	51	62	69	80	100
3.	**SMP**					
	Ikut Ujian	775	832	841	851	783
	Lulus Ujian	774	830	838	851	783
	Persentase (%)	99,87	99,75	99,69	100	100
4.	**MTs**					
	Ikut Ujian	122	141	120	192	252
	Lulus Ujian	121	141	120	192	252
	Persentase (%)	99,18	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2020 tetap 100% dan untuk tingkat MTsn tetap diangka 100%. Untuk nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Kota Sawahlunto

7. Pencapaian Standar Pelayana Minimal (SPM) Pendidikan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yaitu Bidang Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019 realisasinya 78,76 % dan tahun 2020 realisasi 98,27 % dan Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2019 realisasi capaiannya 85,99 % dan tahun 2020 realisasi capaiannya 92,09 % .Kedua bidang ini capaian realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan tahun 2020, Namun dari

bidang Pendidikan Kesetaraan Pencapaian SPM mengalami penurunan dari tahun 2019 (85,05 %) dibanding tahun 2020 (56,70%) yang disebabkan masih kurangnya kemauan anak anak yang yang putus sekolah ingin melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi melalui SKB, dan dan juga disebabkan kondisi Pandemi Covid 19 sulit untuk menemui anak-anak yang putus sekolah dan keterbatasan untuk melakukan tatap muka dalam belajar.

Tabel 2. 51 Pencapaian Standar Pelayana Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	Indikator	Capaian Tahun	
			2019	2020
A	**Pendidikan**			
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	78,76%	93,27%
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	85,99%	92,09%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	85,05%	56,70%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

8. Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang Pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SD/MI sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 APM bernilai 100%, lalu turun pada tahun 2017 menjadi 99,70% dan naik kembali pada tahun 2018 sebesar 100% dan kembali turun sampai tahun 2020 sebesar 99%. Ini berarti pada tahun 2020 menunjukkan penduduk Kota Sawahlunto pada umur 7 -12 tahun telah bersekolah SD/MI tepat waktu sebesar 99 persen. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah,kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa factor yang menjadi pendorong meningkatnya APM adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup / memadai dan kesehatan anak yang baik.

APM di Kota Sawahlunto untuk jenjang SMP/MTs sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan tahun 2016 APM mencapai 100%, sedangkan tahun 2020 APM untuk jenjang SMP/MTs hanya 81%, ini menunjukkan pada tahun 2020 penduduk Kota Sawahlunto yang berumur 13 – 15 tahun telah bersekolah SMP/MTs tepat waktu hanya sebesar 81 persen.

Tabel 2. 52 Angka Partispasi Murni (APM) Tahun 2016 – 2020

No	**Uraian**	**Tahun**				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
A	Urusan Pendidikan					
1	Angka partisipasi murni (APM)					
	SD / MI	100%	99,70%	100%	99,66%	99%
	SMP / MTs	100%	86,83%	83,73%	82,94%	81%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

9. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah

APK SD/MI di Kota Sawahlunto sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 relatif cukup stabil. Pada tahun 2016 mencapai 112,94%. Dari rentang waktu sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup drastic pada tahun 2017 yakni 105,93%. Adapun penyebab fluktuasi tersebut adalah: rendahnya minat siswa untuk bersekolah,kurangnya pemahaman guru terhadap angka partisipasi dalam Pendidikan, jarak sekolah yang jauh dari rumah, usia kurang/lebih dari usia cukup sekolah dan siswa tidak naik kelas. Beberapa factor yang menjadi pendorong meningkatnya APK adalah: Pendidikan orang tua yang memberikan pengaruh positif bagi Pendidikan anak, ekonomi keluarga yang cukup / memadai dan kesehatan anak yang baik.

APK untuk jenjang SMP/MTs di Kota Sawahlunto mengalami penurunan cukup drastic dari 108,25 % tahun 2016 menjadi 84,76% pada tahun 2020. Ini menunjukkan semakin sedikitnya anak usia sekolah yang bersekolah di kota Sawahlunto pada jenjang SMP/MTs.

Tabel 2. 53 Angka Partispasi Kasar (APK) Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Urusan Pendidikan					
	Angka partisipasi kasar (APK)					
1	PAUD	n/a	99,40%	60,52%	61,24%	59,35%
2	SD / MI	112,94%	105,93%	111,33%	108,96%	112,44%
3	SMP / MTs	108,25%	95,21%	96,68%	92,57%	84,76%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

2.4.1.2 Urusan Kesehatan

1. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2. 54 Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Nama Sarana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Polindes	5	4	4	6	6
2	Poskesdes	5	5	5	1	1
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	23	23	23	26	26
5	Puskesmas Keliling	17	17	17	17	17
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	29	29	29	48	48
8	Bidan Praktek	27	27	27	25	25
9	Klinik KB	13	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	**127**	**120**	**120**	**138**	**138**

Sumber :Profil Kota Sawahlunto Tahun 2021

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu factor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 23 Puskesmas

Pembantu, 4 Polindes dan 5 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Selain dari sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia harus cukup, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis/profesi yang dibutuhkan, disamping itu tenaga kesehatan juga harus sebanding dengan kepadatan dan persebaran penduduk didalam penempatannya sehingga derajat kesehatan yang optimal di masyarakat dapat tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 55 Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter umum	10	23	23	19	25
2	Dokter gigi	6	7	7	9	7
3	Perawat	152	214	214	127	231
4	Bidan	58	136	136	75	149
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	10	29	29	31	29
6	Ahli Gizi	17	24	24	18	20
7	Analisis Laboratorium	14	18	18	17	16
8	Perawat Gigi	10	12	12	10	10
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	12	16	16	13	15
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	23	30	30	40	49
11	Teknisi Elektromedis	1	4	4	1	1
12	Apoteker	3	10	10	9	7
13	Rekam Medis	8	22	22	7	7
14	Tenaga Keterapian Fisik	2	7	5	3	6
15	Refraksionis Optisien	1	1	0	0	0
16	Teknisi Transfusi Darah	5	5	5	5	5
	Jumlah	**332**	**558**	**555**	**384**	**577**

Sumber :Profil Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dari sisi jumlah dan jenis keahlian/profesi, dilakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak dan sukarela. Disamping itu juga dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga untuk diusulkan pada formasi kebutuhan tenaga dalam pengangkatan CPNS daerah. Dengan ketersediaan tenaga sesuai kebutuhan, diharapkan semua program dapat berjalan optimal, permasalahan kesehatan terpetakan dan terselesaikan sesuai SOP dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Upaya lainnya dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah memberikan jaminan kesehatan. Berikut disajikan data jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020.

Tabel 2. 56 Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	40.187	43.418	61.458	63.127	64.367

Sumber : BPJS Kota Sawahlunto, 2021

Meningkatnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan keseriusan Pemerintah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Pada tahun 2020 sudah 95,95 % orang dari 67.077 penduduk memiliki jaminan kesehatan.

2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayakan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahann kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan anggka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2. 57 Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	Unit	102	103	103	103	103
2.	Jumlah Balita	Anak	6.184	6.138	6.138	6.040	5.983
3.	RasioPosyandu/ Jml Balita	Per 1.000 balita	16,49	16,79	16,79	17,05	17,22

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2021

Jumlah Posyandu dari Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2020 yaitu 17,22 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2019 rata-rata melayani 59 sampai 60 orang. Hal ini memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016, angka ini sedikit mengalami peurunan diakibatkan tingginya jumlah baita di Kota Sawahlunto, dengan tanpa diringi jumlah Posyandu yang ada. Aka tetapi secara umum, rasio posyandi per satuan balita di Kota Sawahlunto tidak mengalami masalah yang berarti.

Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata diPosyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemiliki posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait.Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kot Sawahlunto.

Tabel 2. 58 Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN	6.184	6.138	6083	6040	5983
2	JumlahD/S	4.652	4.551	4596	4605	3751
3	Persentase D/S	75.2	74.1	75,6	76,2	62,7
4	JumlahN/D	4.130	4.107	2953	4605	3751
5	Persentase N/D	69,1	68,5	69,5	67,5	66,7

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto 2021

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu.Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupanpelayanan Gizipada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevelensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang diKota Sawahlunto Tahun 2017 adalah sebesar 74,1 persen dan yang naik timbangannya 68,5 persen dari jumlah

balita sasaran 6183 orang. Ini menunjukan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

3. Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat.Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2. 59 Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	29	29	29	48	48
3	Jumlah Pustu	Unit	23	23	23	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas,Praktek Dokter dan Pustu	Unit	58	58	58	80	80
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	60,778	61,398	61,898	66,853	63,027
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,95	0,94	0,95	0,119	0,126

Sumber : Profil Kota Sawahlunto 2021 dan Data Olahan Barenlitbangda

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend penurunan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang tidak diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto.

4. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 60 Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	60.788	61.398	61.898	66,853	63,027
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0165	0,0163	0,0165	0,0149	0,0015

Sumber : Profil Kota Sawahlunto 2021 dan Data Olahan Barenlitbangda

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerinntah Kota sawahlunto. Rumah sakit ini juga merupakan rumah Sakit favorit daerah retangga untuk berobat.

5. Jumlah Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Prosentasi kasus Stunting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2016 berjumlah 20,8% ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola Asuh, factor Perilaku, factor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat. Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konsling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2020 prosentasi kasus stanting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 8,0 persen.

Tabel 2. 61 Prosentase Kasus Stunting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	PUSKESMAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Talawi	20,7	20,2	18,6	6,6	8,0
2	Kolok	17,4	11,1	33,0	19,7	13,3
3	Sungai Durian	19,0	3,0	1,7	7,2	3,3
4	Kampung Teleng	21,0	8,8	20,7	3,3	4,3
5	Lunto	17,9	15,5	17,2	16,0	11,8
6	Silungkang	24,8	21,4	26,7	21,7	10,3
	KOTA	**20,8**	**14,5**	**18,5**	**11,1**	**8,0**

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2021

6. Angka Kematian dan Kelahiran Bayi

Tabel 2. 62 Angka Kematian dan Kelahiran Bayi di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Bayi (bayi)	2	13	18	22	19
2.	Jumlah Kelahiran Hidup (bayi)	1045	1013	1001	998	973

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto, 2021

Dari table diatas angka kematian Bayi di Kota Sawahlunto tahun 2017 sebanyak 13 dan ditahun 2018 sebanyak 18 dan tahun 2019 sebanyak 22 orang jika dibandingkan tahu 2017, 2018 angka kematian bayi mengalami peningkatan, begitu juga dengan angka kelahiran hidup tahun 2017 sebanyak 1013 orang tahun 2019 sebanyak 998 orang ini disebabkan masih ada ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilan ke petugas Kesehatan, sehingga jika ditemukan resuko tinggi lainnya tidak terdekteksi secara Dini namun ditahun 2021 angka kematian bayi sudah mengalami penurunan

Dari table diatas angka kelahiran Balita hidup di Kota Sawahlunto tahun 2016 sebanyak 1045 tahun 2017 sebanyak 1013 orang tahun 2019 sebanyak 998 orang dan tahun 2020 sebanyak 973, kecendrungan ada menurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjarakkan angka kelahiran dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga yang berkualitas dengan melaksanakan Program keluarga berencana

Tabel 2. 63 Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2017-2020

No	Puskesemas	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Talawi	1	0	0	2	0
2.	Kolok	0	0	0	1	1
3.	Sui Durian	0	0	0	0	0
4	Lunto	1	0	0	0	0
5	Kap Teleng	1	0	0	0	0
6	Silungkang	0	0	0	0	1
	Jumlah	3	0	0	3	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto, 2021

Dari table diatas angka kematian ibu di Kota Sawahlunto tahun 2017 dan 2018 tidak ada terjadi angka kematian ibu namun di tahun 2019 terjadi angka kematian ibu sebanyak 3 orang 2 di kecamatan Talawi 1 di Kecamatan Barangin dan ditahun 2020 angka kemastian Ibu sebanyak 2 Orang , 1 orang di Kecamatan Barangin 1 di Kecamatan Silungkang, ini di sebabkan masih ditemukan kehamilan dimasa remaja dan beberapa ibu hamil yang malu dengan keamilannya, sehingga tidak mau memeriksakan kehamilannya kepetugas Kesehatan.

7. Aksi Konvergensi /Integrasi Stunting

Upaya kovergensi Percepatan Pencegahan Stunting akan dilaksanakan melalui tahap perencaan, pelaksanaan, sehingga pemantauan dan evaluasi terhadap Progaram dan Kegiatan.

Upaya Konvergensi Stunting yang akan dilakukan melalui 8 Aksi yaitu : melakukan Analisis Situasi , Melakukan Pemetaan, Melaksanakan Rembuk Stunting, Membuat Perwako Tentang Peran Desa, Melakukan Pembinaan KPM, Membuat Sistim Manajemen Data, Melakukan Pengukuran dan Pulikasi Stunting, Melakukan Evalusi Stunting untuk memastikan :

a. Perencanaan kegiatan Pencegahan stunting dengan berbasis Data
b. Intervensi gizi yang diperioritaskan oleh Daerah yang sudah dimasukan pada perencanaan dan penganggaran
c. Melakuakan pemantauan secara terpadu sebagai sarana untuk berkoordinasi dan melakukan penyesuaian dalam program
d. Melakukan Sistim manajemen data yang baik untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan
e. Menjadikan hasil evaluasi Kinerja digunakan dasar perencanaan dan Penganggaran

8. Sanitasi Sekolah

Dalam mendukung upaya kesehatan anak sekolah, maka disediakan sarana sanitasi disekolah dengan data sebagai berikut :

Tabel 2. 64 Data Sanitasi Sekolah se-Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenjang Sekolah							Jumlah
		PAUD	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	
1	Silungkang	32	12	2	24	2	6	-	78
2	Lembah Segar	44	14	4	26	2	4	2	100
3	Barangin	52	20	8	36	2	8	2	128
4	Talawi	42	24	4	38	4	6	2	180
	Jumlah	174	70	18	124	10	24	6	426

Sumber data : Dinas Pendidikan tahun 2020

8. Penyakit Menular

Kasus penyakit menular fluktuatif dari tahun 2016-2020, dan terjadi penurunan pada tahun 2020. Pemerintah Kota telah memberikan layanan penanganan terhadap semua kasus yang diterjadi, mulai dari pendeteksian kasus dilapangan, penanganan di Puskesmas sampai perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Tabel 2. 65 Jumlah kasus Penyakit Menular Kota Sawahlunto tahun 2016-2021

No	Jenis Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
1	TBC (cakupan temuan & penanganan)	-	149,8	135,7	161,5	74,57
2	DBD	-	180	37	121	46
3	Malaria	-	3	0	1	0
4	HIV/AIDS	-	2	4	9	2

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait bidang Kesehatan, untuk tahun 2019 dan 2020 diperoleh fluktuasi capaian yang dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 66 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

B	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	64,60%	67,66%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	75,54%	76,78%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	79,49%	79,68%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	38,36%	38%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.20%	76,05%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	38.11%	46,66%
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	39.49%	16,72%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	60,34%	88,06%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	150%

B	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	27,14%	13,10%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	86,33%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto 2021

Dari tabel diatas pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yaitu bidang kesehatan dari 12 indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 7 indikator pencapaian SPM pada Dinas Kesehatan mengalami peningkatan, dan 4 indikator pencapaian SPM mengalami penurunan yaitu: indikator Pelayanan Kesehatan Balita, bidang Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB.

Adapun penyebab penurunan capaian SPM ini adalah :

1. Adanya pandemi covid 19 membuat masyarakat khawatir membawa anak balita ke posyandu atau melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke pusat-pusat layanan kesehatan.
2. Penambahan jumlah sasaran pelayanan usia produktif dari 38.446 orang menjadi 38.697 orang sehingga mempengaruhi persentase capaian indicator.
3. Penambahan jumlah sasaran pelayanan orang terduga TB dari 2.480 orang tahun 2019 menjadi 3.810 orang tahun 2020.

2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.1.3.1 Pekerjaan Umum

1. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Menurut status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) status jalan yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota. Jalan Nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Jalan dengan panjang 11,35 Km dengan ruas jalan batas Kota Sawahlunto-Muarokalaban. Jalan Provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat . Ruas jalan Provinsi yang ada dikota Sawahlunto yaitu Jalan Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga) dengan panjang 30,65 Km yang berbatasan dengan kabupaten Tanah Datar sangat strtegis untuk pengembangan integrasi wisata sejarah (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyuang). Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan Kota dengan panjang jalan 454,87 Km. Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Berikut secara lengkap persentase kualitas sarana dan prasarana jalan Kota Sawahlunto selama periode 2016-2020.

Tabel 2. 67 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	287,35	298.15	298.15	3I0.75	311,27
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Proporsi Panjang Jalan	%	63.1	65.5	65.5	68.3	

	Dalam Kondisi Baik						68,43

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksebilitas) menjadi 100 persen. Tujuan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan.

Sesuai Tabel di atas Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Proporsi jalan dalam kondisi baik terjadi peningkatan. ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mendukung pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Langkah untuk meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah pemeliaharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase . Salah satu yang membuat jalan cepat rusak adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Tahun 2020 ini terjadi peningkatan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,13 % dari tahun 2019, karena kita berada pada masa pandemi Covid 19 maka hal ini disikapi dengan memperbanyak kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dengan anggaran yang terbatas namun kondisi jalan baik tetap meningkat.

2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah merupakan jumlah panjang jalan di bagi jumlah penduduk. Indikator ini di hitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2. 68 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Jumlah Panjang Jalan (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
2	Jumlah Penduduk	Orang	60,778	61,398	61.898	62.524	65,138
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	KM/ Org	0.0075	0.0074	0.0074	0.0073	0,0070

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indicator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik - titik tertentu.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Sawahlunto sudah ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal panjang jalan 0.74 Km/100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk tahun 2020 adalah 0,0070 Km/orang atau 0,70/100 orang, nilai rasio ini terhadap standar pelayan minimal masih mendekati SPM, Menyikapi hal tersebut perlu Pembangunan atau pembukaan jalan baru lebih pertimbangkan sehingga standar pelayanan minimal panjang jalan tercapai.

3. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar di bagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100.

Tabel 2. 69 Persentase Jalan Yang Memliki Trotoar Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	Km	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	KM/ Org	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2020

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,824 % dari panjang jalan. Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan.

4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tersedianya system drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan system drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersdiaan system drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2. 70 Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	8.300	8.300	8.300	10.300	10.300
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	Persen	1.824	1.824	1.824	2.264	2.264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Drainase dalam kondisi baik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada peningkatan , hal ini dipengaruhi oleh terjadinya bencana alam yang membuat drainase tersumbat sehingga pemeliharaan dan kerusakan seimbang. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 0,44 %. Tahun 2020 persentase drainase dalam kondisi baik sama dengan tahun 2019, hal ini disebakan anggaran yang tersedia dengan panjang/jumlah kerusakan drainase tidak seimbang. Untuk meningkatkan persentase draianase dalam kondisi baik agar OPD terkait lebih memfokuskan anggaran atau kegiatan pemeliharaan drainase.

5. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irgasi keseluruhan di kali 100 persen. Irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha.

Tabel 2. 71 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	149,458	76,875	84,273	91,854	92,394
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	29,369	33,869	35,721	40,721	41,261
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	19.65	44,06	42,38	44,33	44,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi hal ini disebabkan karena adanya pembanggunan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi tersebut. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masayrakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

6. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen.Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha.

Tabel 2. 72 Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	762	762	762	762	762
2	Luas Lahan Budi Daya(Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	Persen	45,35	45,35	45,35	45,35	45,35

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto tahun 2020

Perkembangan persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki nilai kecendrungan tetap hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu kondisi jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai, adanya perubahan lahan pertanian.

7. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian.Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan

Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha.

Tabel 2. 73 Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	149,458	76,875	91,039	91,854	92,394
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3	Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,0890	0,0458	0,0542	0,0547	0,0549

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2016 – 2020 selalu berubah setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan panjang saluran irigasi. Semakin panjang saluran irigasi maka rasio jaringan irigasi akan meningkat.

8. Sanitasi dan Air Bersih

1. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahara. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 C banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksessibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	16.542	16.542	16.542	16.542	16.542
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	14.379	14.379	14.379	14.379	14.105
3	Persentase	86,92	86,92	86,92	86,92	85.26

Sumber : PANSIMAS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Untuk kondisi rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung tetap dan pada tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga program air minum tidak bisa terlaksana dengan optimal.

9. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

a. Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa factor seperti lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masaalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Tabel 2. 75 Persentase RT Yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	13.488	13.607	13,601	14,257	14,331
2	Jumlah rumah yang diperiksa	13.488	13.607	13,601	14,257	13,990
3	Jumlah rumah dengan jamban	13.073	12.702	12,714	13,352	13,378
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat	10.842	11.496	10,809	11,752	11,541
5	Persentase yang memenuhi syarat	82,93	90,50	85,00	88,00	86,00

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dalam tujuh tahun terakhir ini dikota Sawahlunto Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2017 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 90,50 %. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi penurunan hal ini disebabkan perilaku penghuni terkait jamban sehat adalah kondisi jamban atau sarana prasarana yang tidak berfungsi atau tidak tersedia air. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacingan dan lainnya.

b. Sarana Pembuangan Air Limbah

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada factor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septictank, sumur resapan, got dan lainnya.

Tabel 2. 76 Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	13.488	13.607	13,601	14,257	14,331
2	Jumlah rumah yang diperiksa	13.488	13.607	13,601	14,257	13,990
3	Jumlah rumah dengan SPAL	13.073	13.148	13,173	13,983	13,940
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	10.842	12.702	11,434	11,363	11,338
5	Persentase yang memenuhi syarat	82,938	90,50	86,80	81,00	81,00

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga rata rata sudah mencapai 81 %. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan. Tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penurunan persentase yang memenuhi syarat ini disebabkan banyak faktor salah satunya terkait perilaku penghuni rumah seperti adanya genangan air, tersumbat dan sebagainya.

2.4.1.3.2 Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru. Peninjauan kembali ini merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang, sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang ada, bukan berarti penyusunan yang baru secara totalitas.

Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032. Hasil dari kegiatan Peninjaun kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 menyatakan bahwa RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 memerlukan beberapa revisi untuk beberapa aspek perencanaan, diantaranya:

1. Kebijakan dan isu eksternal dan internal yang berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perlu diakomodir dalam rencana tata ruang Kota Sawahlunto,
2. Belum terealisasikannya rencana dan program yang telah direncanakan untuk 5 tahun pertama, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali arahan dan tahapan pelakasanaannya
3. Perlu penyesuaian rencana yang ada dengan kondisi di lapangan dan data dan peta terbaru
4. Update peta dasar Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
5. Adanya perubahan batas wilayah, sehingga peta pada dokumen rencana perlu disesuaikan.

Selain itu untuk pelaksanaan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa Pemerintah daerah dalam

penyusunan RTRW wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Proses revisi RTRW Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami penundaan dikarenakan situasi wabah Covid-19. Pada tahun ini direncakan penyusunan KLHS sebagai pelengkap revisi RTRW Kota Sawahlunto, namun kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena wabah Covid-19 yang membatasi semua aktivitas sosial dan anggaran APBD dialokasikan untuk wabah Covid-19 ini. Sehingga untuk tahun ini tidak ada progress atas kegiatan penyusunan revisi RTRW Kota Sawahlunto dan terhenti pada pembuatan penyusunan dokumen KLHS.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032 bertujuan untuk menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adayanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Adapun beberapa persoalan perkembangan pemanfaatan ruang kota yang perlu ditangani yaitu persoalan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, pengendalian bangunan, PKL serta persoalan perkotaan lainnya.

Dinamika pembangunan perkotaan perlu diantisipasi melalui penyiapan kebjiakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di Kota Sawahlunto.

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:
1. Visi dan misi pembangunan wilayah kota;
2. Karakteristik wilayah kota; dan
3. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis, Core Bussiness Kota Sawahlunto adalah ;
1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi.
2. Pertambangan
3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis
4. Kegiatan Industri kecil dan kerajinan

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah.Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial

diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Berikut ini adalah data penanganan perumahan dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu:

Tabel 2. 77 Data Jumlah KK Yang Memiliki Rumah Di Kota Sawahlunto 2017 – 2020

NO	DESA/KELURAHAN	2017	2018	2019	2020
I	**KEACAMATAN SILUNGKANG**				
1	Muara Kalaban	1059	1164	721	721
2	Silungkang Duo	247	271	194	247
3	Siulungkang Oso	308	338	271	308
4	Silungkang Tigo	438	481	207	207
5	Taratak Bancah	127	139	127	127
II	**KECAMATAN LEMBAH**				
6	Air Dingin	226	248	225	225
7	Aur Mulyo	222	244	223	222
8	Kubang Sirakuk Selatan	213	234	141	141
9	Kubang Sirakuk Utara	194	213	194	194
10	Kubang Tangah	317	348	265	317
11	Kubang Utara Sikabu	239	262	239	239
12	Lunto Barat	285	313	286	285
13	Lunto Timur	284	312	284	284
14	Pasar	293	322	293	293
15	Pasar Kubang	210	231	208	210
16	Tanah Lapang	322	354	308	321
17	Balai Batu Sandaran	165	181	165	176
II	**KECAMATAN BARANGIN**				
18	Durian I	513	564	513	513
19	Durian II	465	511	465	465
20	Kolok Mudiak	261	287	261	261
21	Kolok Nan Tuo	263	289	263	263
22	Lubang Panjang	281	309	281	281
23	Lumindai	534	587	534	534
24	Santur	752	827	752	752
25	Saringan	369	405	369	369
26	Talago Gunuang	371	408	371	371
IV	**KECAMATAN TALAWI**				
27	Batu Tanjuang	449	493	449	449
28	Bukik Gadang	282	310	282	282
29	Datar Mansiang	38	41	38	38
30	Kumbayau	358	393	358	358
31	Rantih	139	152	139	139

NO	DESA/KELURAHAN	2017	2018	2019	2020
32	Salak	248	272	248	248
33	Sijantang Koto	233	256	233	233
34	Sikalang	393	432	393	393
35	Talawi Hilia	792	871	783	783
36	Talawi Mudiak	540	594	540	540
37	Tumpuak Tangah	461	507	461	461
	Jumlah	**12.891**	**14.163**	**12.088**	**12.250**

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020

Sesuai data diatas untuk data KK yang memiliki rumah di Kota Sawahlunto tahun 2019 hingga Tahun 2020 mengalami kenaikan dari 12,088 KK menjadi 12.250 KK. Kenaikan KK yang memiliki rumah di Sawalunto merupakan salah satu upaya pemerintah kota Sawahlunto melalui program kegiatan KOTAKU dan melalui APBD kota Sawahlunto. Kedepannya sangat diharapkan program dan kegiatan untuk menunjang KK yang memiliki rumah di Sawahlunto makin meningkat.

Tabel 2. 78 Data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017 – 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Silungkang	231	151	29	9
2	Kecamatan Barangin	245	182	60	39
3	Kecamatan Talawi	154	116	110	31
4	Kecamatan Lembah	301	221	99	85
	Total	**931**	**670**	**298**	**164**

Sumber: DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017 – 2020 terjadi penurunan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamata, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2020 sebesar 164 unit rumah . Dengan penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang cukup besar merupakan bukti Pemerintah Kota Sawahlunto serius mengatasi kemiskinan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada Tahun 2020 Kota Sawahlunto telah melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni sebanyak 164 unit rumah dengan rincian sumber dana APBN sebbanyak 134 Unit. Melalui dana APBD Kota Sawahlunto sebanyak 30 unit rumah dengan rincian 25 unit dari Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni dan 5 unit dari Pembangunan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni.

Peningkatan Kualitas RTLH sebesar 17,5 juta bagi masing-masing rumah dengan rincian 15 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 2.5 juta untuk upah. Sedangkan

Pembangunan RTLH sebesar 35 Juta dengan rincian 30 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 5 juta untuk upah.

Tabel 2. 79 Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tangah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03
8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tangah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
	JUMLAH		**135,21**

Sumber: DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2021

Berdasarkan nota dinas dari Kementrian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor : 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019 seluruh Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan Kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan baseline KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019.

Pada tahun 2020 Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan KOTAKU di Desa Balai batu sandaran (BBS) sebesar 1 M dengan rincian pekerjaan:

- Pembangunan jalan beton tumbuk menujuserai wangi
- Pembangunan rumah produk turunan minyak serai wangi dan gedung aromaterapy
- Peningkatan rumah penyuilingan minyak serai wangi.

2.4.1.5 Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Urusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto.

1. Cakupan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Rasio jumlah polisi pamong praja mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2. 80 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Pol PP	84	141	141	136	140
Jumlah Penduduk	60.778	61.398	61.898	62.524	65.138
Rasio Jumlah Petugas Pol PP/10.000 Penduduk	1 :13,82	1 : 22,96	1 : 22,77	1 : 21,75	1 : 21,53

Sumber : Data OPD Satpol PP & Damkar tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah personil Satpol PP dan ditahun ke empat mengalami sedikit penurunan. Sementara jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat, rasio petugas satpol PP dengan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertambahan penduduk dengan petugas satpol PP. Dalam satu tahun terakhir saja petugas satpol PP hanya bertambah sebanyak 4 orang dan penduduk bertambah sebanyak 2.614 orang. Sehingganya tidak terpenuhi secara maksimal pelayanan terhadap masyarakat.

Petugas Satpol PP bertugas menjalankan patroli dalam rangka upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan SPM tersebut. Target capaian kinerja SPM Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan. Apabila telah tercipta kondisi ini maka kinerja minimal pelaksanaan patrol tersebut telah dianggap terpenuhi.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di Kota Sawahunto, jumlah penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP dari tahun 2016 s.d 2020 berjumlah 3 (tiga) orang.

Selain itu, Satpol PP juga rutin melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketertiban dan berkerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya penegakkan Perda di Kota Sawahlunto. Berikut data pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 81 Data Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggaran Perda (kasus)	220	230	220	155	558
Jumlah yang tertangani (kasus)	220	230	220	155	558
Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Data OPD Satpol PP & Damkar tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat variasi jumlah pelanggaran peraturan daerah (Perda) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 terdapat sebanyak 220 kasus, tahun 2017 sebanyak 230 kasus, tahun 2018

mengalami penurunan menjadi 220 sampai tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi 558 kasus. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus pelanggaran Perda yaitu pelanggaran Perda Covid-19. Dalam situasi wabah Covid-19 petugas Satpol PP menerapkan razia protokol kesehatan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Pada masa ini banyak warga Kota Sawahlunto yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga tercatat oleh Satpol PP sebagai pelanggaran Perda, dan semua kasus dapat ditangani 100% oleh Satpol PP. Penanganan atas pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto merupakan bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto dimana semua pelanggaran 100% ditangani oleh Satpol PP. Ini merupakan salah satu cakupan SPM pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan msyarakat.

2. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Setiap Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto masing-masing mempunyai petugas Linmas sebanyak 10 (sepuluh) orang. Petugas Linmas ini juga diberdayakan pada ajang pelaksanaan Pemilu.

Dalam rangka pemeliharaan tramtibmas, Linmas (Perlindungan Masyarakat) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Untuk di Kota Sawahlunto cakupan linmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 82 Jumlah Linmas di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	370	370	370	370	370
Jumlah Wilayah kerja Kabupaten/Kota (=lokasi Tempat Pemungutan Suara)	0	0	131	201	148
Jumlah Linmas di TPS	0	0	262	402	296

Sumber : KPU Kota Sawahlunto tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Linmas di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak mengalami perbedaan, yakni terdapat 370 orang jumlah Linmas se-Kota Sawahlunto dimana ada 10 orang Linmas untuk masing-masing Desa/Kelurahan.

Untuk wilayah kerja seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari tahun ke tahun terdapat perbedaan signifikan mengenai jumlah TPS di Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan keadaan politik pada tahun tersebut apakah ada melaksanakan pesta demokrasi atau tidak.

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat pelaksanaan pesta demokrasi. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terdapat 131 TPS dengan 262 Linmas penjagaan TPS. Tahun 2019 pada pemilihan Legislatif terdapat 201 TPS dengan 402 Linmas. Pada momen ini jumlah personil Linmas ditambah dengan aparat dari Desa/Kelurahan. Pada tahun 2020 terdapat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, terdapat 148 TPS dengan 296 orang Linmas penjagaan TPS. Sepanjang pelaksanaan pesta demokrasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada keributan dan kericuhan yang terjadi sehingga pesta demokrasi di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tertib, aman dan lancar.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas) juga dipengaruhi oleh Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan

Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan msyarakat, cakupan rasio jumlah Linmas dengan masyarakat di Kabupaten/Kota merupakan salah satu indikator dalam pencapaian SPM. Target capaian kinerjanya adalah 1 orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya. Rasio jumlah linmas per RT atau sebutan lainnya di Kota Sawahlunto adalah sebesar 10 per Desa/Kelurahan, dan sudah memenuhi untuk target pencapaian SPM.

Petugas Linmas juga menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dan berkonstribusi dalam menekan angka kriminalitas di Kota Sawahlunto. Berikut data kriminalitas di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 83 Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Curat (pencurian dan pemberatan)	30	17	19	21	17
Penggelapan	6	6	3	2	3
KDRT	2	4	3	3	4
Penipuan	9	8	19	3	3
Pengrusakan	2	4	3	4	2
Curanmor	19	24	23	6	8
Pembakaran	1	-	1	1	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	2	-	-	1	1
Perkosaan	6	4	4	6	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah criminal	**77**	**67**	**75**	**47**	**38**
Jumlah penduduk	**60.186**	**60.778**	**61.898**	**62.524**	**63.500**
Angka kriminalitas (%)	**0,127**	**0,110**	**0,121**	**0,075**	**0,059**

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 secara umum mengalami penurunan dari 0,127 menjadi 0,059. Kecuali pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan dari 67 kasus menjadi 75 kasus atau naik 0,011%. Selanjutnya angka kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, sebanyak 37 kasus atau 0,062%. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Sawahlunto adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Secara data, kasus penggelapan, KDRT dan curanmor mengalami penambahan kasus dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan faktor sosial. Sementara itu, kasus pencurian, pengrusakan, pembakaran dan pemerkosan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian masyarakat Kota Sawahlunto atas keadaan lingkungan yang ada. Sehingga kasus-kasus tersebut dapat ditekan jumlahnya.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

3. Penanggulangan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran juga selalu terjadi di Kota Sawahlunto. Setiap peristiwa bencana kebakaran yang terjadi menimbulkan kerugian baik materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Berikut data kebakaran yang terjadi dari tahun 2016-2020 di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 84 Jumlah kasus bencana kebakaran di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	51	20	29	16	9
	Jumlah	51	20	29	16	9

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada 3 tahun terakhir kasus bencana kebakaran telah mengalami penurunan jumlah. Hal ini tentunya tidak lepas dari kewaspadaan masyarakat Kota Sawahlunto serta kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang terjadi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu indikator dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Dalam penanganan bencana kebakaran telah ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berupa :

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota, dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Sawahlunto yang ditentukan berdasarkan pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan. Wilayah di Kota Sawahlunto telah disesuaikan dengan kebutuhan WMK.
2. Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan WMK.
   Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana prasarana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan, penyelamatan jiwa dan keselataman harta benda. Semua kasus kebakaran di Kota Sawahlunto telah ditangani sesuai dalam tingkat waktu tanggapnya.
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.
   Jumlah personil yang berkualifikasi menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam percepatan pelayanan kebakaran sesuai standar. Jumlah personil pemadam kebakaran yang bersertifikasi baru hanya sebanyak 19 orang untuk Kota Sawahlunto. Sehingga dirasa sangat minim dalam jumlah kebutuhan personi yang ada.

4. Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan longsor dan rawan bencana. Hal ini disebabkan karena tekstur wilayahnya berada di perbukitan dan pemukimannya banyak yang berada di lereng bukit. Sehingganya beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana. Berikut data bencana yang terjadi di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 85 Data Bencana di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	40	16	4	12	

2	Gunung Meletus					
3	Longsor	123	126	123	136	55
4	Gempa				1	
5	Angin puting beliung	14	27	47	63	63
6	Jumlah	177	169	174	212	118

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2017-2021

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bencana yang paling sering terjadi adalah longsor. Dari tahun 2016 sampai 2019 jumlah kejadiannya fluktuatif tinggi, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan. Selanjutnya angin puting beliung yang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Bencana yang sering terjadi tidak hanya merusak infrastruktur kota tetapi juga menimbulkan kerugian materil bagi korban yang terdampak. Sebagai upaya penyelamatan bagi korban terdampak telah dilakukan dengan evakuasi korban ke daerah yang aman. Semua korban bencana telah mendapatkan pelayanan keselamatan 100%. Sebagai upaya pencegahan pemerintah Kota Sawahlunto juga mensosialisasikan zona rawan bencana kepada masyarakat agar masyarakat dapat berhati-hati dan mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan terjadi. Upaya ini adalah sebagai bentuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dlihat pada subbab 2.7.

2.4.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara melindungi rakyatnya. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain adalah : masyarakat berkategori miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan/ pengemis terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar. Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan manusia.

Tabel 2. 86 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Propinsi dan Kabupaten/Kota

No	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti
1	Penyediaan Permakanan	Pengasuhan	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
2	Penyediaan Sandang	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
3	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Sandang	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan asrama yang mudah akses
4	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social
6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari

No	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimibingan Aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan Keterampilan dasar
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi pembuatan nomr induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran. Surat nikah dan atau kartu identitas anak
9	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses layanan Pendidikan kesehatan
10	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemulangan ke daerah asal
11	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	
12		Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Pemulasaraan	

Sumber : Permensos Nomor 9 tahun 2018

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki fasilitas 1 unit panti anak yatim piatu di Mudik Air dan 1 unit panti penyandang cacat di Waringin Lubang Panjang Pemerintah menyiapkan biaya permakanan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh.

Panti asuhan memelihara(mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar. Keberadaan panti asuhan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dalam memperoleh kasih sayang dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kebutuhan tumbuh kembang (fisik & mental) mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi Kota Sawahlunto yang cukup luas dan keterbatasan ketersediaan panti asuhan di tiap kawasan Sawahlunto, maka diharapkan peran serta seluruh pihak / lapisan masyarakat untuk dapat saling membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar lainnya yang ada dilingkungan masing-masing.

Berikut tabel data kondisi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 87 Penyandang Cacat di Kota SawahluntoTahun 2016-2020

No	Penyandang Cacat	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyandang Tuna Netra	31	31	29	21	21
2	Penyandang Tuna Rungu	22	22	23	19	19
3	Penyandang Tuna Wicara	33	33	33	30	30
4	Penyadang Tuna Daksa	28	28	25	140	140

No	Penyandang Cacat	2016	2017	2018	2019	2020
5	Penyandang Tuna Grahita	193	193	187	133	133
6	Cacat Lainnya/Mental Psikotik	86	86	86	19	44

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya tahun 2020 :

1. Penderita sakit jiwa : 127 orang
2. Penduduk miskin (berdasar DTKS) : 3666 orang
3. Bayi terlantar : - orang.
4. Anak terlantar : 15 orang
5. Lanjut usia terlantar : 635 Orang

Jumlah masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial di Sawahlunto masih cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan fasilitasi dan bantuan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

Tabel 2. 88 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2020

URAIAN	L. SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	697 ORANG	1446 ORANG	993 ORANG	530 ORANG	3666 ORANG
JUMLAH RUMAH TANGGA	129 RUMAH TANGGA	259 RUMAH TANGGA	177 RUMAH TANGGA	97 RUMAH TANGGA	662 RUMAH TANGGA
JUMLAH KEPALA KELUARGA	154 KEPALA KELUARGA	323 KEPALA KELUARGA	222 KEPALA KELUARGA	111 KEPALA KELUARGA	810 KEPALA KELUARGA

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

1. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
   Sedangkan kelompok rumah tangga pada Desil 4 (rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah / rentan miskin) tidak dimasukkan sebagai penduduk yang belum sejahtera.

Tabel 2. 89 Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang Disabilitas	403	431	375	392	387
Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbantu	19	20	28	25	24
Persen (%)	2.23	4.64	7.47	6,37	6,20

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Jumlah penerima bantuan untuk penyandang disabilitas tahun 2016-2020 masih sedikit. Kedepannya diharapkan jumlah penerima bantuan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota dan menjadi target prioritas kegiatan.

Layanan Disabilitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto :

1. Penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas
2. Penyediaan sandang bagi anak cacat
3. Penyediaan alat bantu
4. Bantuan transportasi sekolah bagi anak berkebutuhan khusus
5. Bantuan layanan kedaruratan bagi korban bencana

Tabel 2. 90 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Usia 0 s/d 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	120	114	188	161	161
Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang terbantu	55	51	43	122	67
Persen (%)	45.83	44.74	22.87	75,77	41,6

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Jumlah ABK penerima bantuan tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Penanganan ABK yang didanai dari anggaran Negara sering tidak mencukupi kebutuhan semua ABK sesuai harapan. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat agar ikut terlibat dalam memenuhi kebutuhan ABK. Fasilitasi utama yang harus dipenuhi adalah di bidang kesehatan dan pendidikan/ keterampilan. Diharapkan ABK dapat mandiri dan punya penghasilan sendiri.

Tabel 2. 91 Jumlah Penyandang Gangguan Jiwa/Psikotik di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang gangguan jiwa	88	92	97	134	127
Jumlah Penyandang gangguan jiwa/ Psikotik yang terbantu	7	5	3	2	53
Persen (%)	**7.95**	**5.43**	**3.09**	**1,49**	**41,73**

Sumber : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Berdasar data tahun 2016-2020, jumlah penduduk yang menyandang gangguan jiwa masih banyak di Sawahlunto. Penyebab terjadinya gangguan jiwa perlu dikaji. Sangat dibutuhkan upaya bersama berbagai pihak (keluarga, lingkungan, Pemerintah, tokoh masyarakat/ agama, dan lainnya) dalam mencegah faktor pemicu gangguan jiwa & penanganan yang komprehensif untuk yang sudah mengalami gangguan jiwa.

Setiap tahun harus diupayakan memberikan bantuan pada penyadang gangguan jiwa/psikotik ini secara keseluruhan sehingga bisa menekan angka masyarakat Sawahlunto yang mengalami gangguan jiwa (minimal 60 % sesuai target yang telah dicanangkan).

Tabel 2. 92 Jumlah Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	697	775	769	635	635
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terbantu	170	153	148	361	554
Persen (%)	24.39	19.74	19.25	56.85	87,24

Sumber : DinSosPMDPPA Tahun 2020

Pemberian bantuan untuk Lansia tahun 2016-2020 berfluktuasi, namun dua tahun terakhir jumlah penerima bantuan bertambah cukup signifikan. Bantuan berasal dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan bantuan Pusat (bantuan permakanan, bantuan uang sosial dan PKH). Diharapkan tiap tahun jumlah penerima dan kualitas bantuan dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, penanganan Urusan Sosial belum terlaksana secara maksimal di Kota Sawahlunto. Hal ini harus menjadi perhatian utama untuk dilaksanakan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayan Dasar.

2.4.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.4.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja (15 sampai dengan 64 tahun). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Berikut ini dijelaskan lebih rinci tentang ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto.

1. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/ jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, menandakan bahwa tenaga kerja semakin produktif. Produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 93 Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHK (juta rupiah)	2380518,78	2517150,16	2655619,77	2796538,21	2760934,37
2	Tenaga Kerja (orang)	27862	29127	30320	29117	30310
3	*Produktivitas Tenaga Kerja (per tenaga kerja/ tahun)*	*85,439*	*86,419*	*87,586*	*96,044*	*91,089*

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

Produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan Tenaga Kerja /Angkatan Kerja yang bekerja. Produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto selama tahun 2016-2019 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2016 adalah sebesar 85,439 juta per tenaga kerja per tahun dan meningkat menjadi 96,044 juta per tenaga kerja tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 91,089 juta per tenaga kerja. Penurunan ini disebabkan oleh

adanya Pandemi Covid-19 yang merambat kesegala sektor/lapangan usaha, dan hal ini memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian dan mengakibatkan produktivitas tenaga kerja tahun 2020 pun mengalami penurunan.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT Laki-laki, pada tahun 2016 yaitu sebanyak 7,18%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,19%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 5,75%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,82%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,20%. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Peningkatan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 94 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1058	1098	2156	1062	860	1922	1152	699	1742	1124	1008	2132	1538	1171	2709
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	17203	12815	30018	17830	13219	31049	18084	14087	30320	18062	13187	31249	18948	14071	33019
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**6,15**	**8,57**	**7,18**	**5,96**	**6,51**	**6,19**	**6,37**	**4,96**	**5,75**	**6,22**	**7,64**	**6,82**	**8,12**	**8,32**	**8,20**

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

3. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja adalah menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Objek perlindungan tenaga kerja antara lain meliputi perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, anak dan penyandang cacat, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Tabel 2. 95 Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan dan Indikator Perlindungan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan	84	78	86	86	80
2	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan	2.928	3.031	4.023	4.061	3.070
No	**Indikator**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**

1	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan (Peraturan Perusahaan)	-	3	3	5	7
	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (%)	0	3,85	3,49	5,81	8,75
2	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang disahkan (PKB)	2	2	2	2	2
	Persentase Perusahaan yang memiliki PKB (%)	2,38	2,56	2,33	2,33	2,50
3	Jumlah Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (Perusahaan)	-	-	1	3	4
	Persentase Perusahaan yang memiliki LKS Bipartit (%)	0	0	1,16	3,49	5,00
4	Struktur Skala Upah	-	-	-	-	-
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 (Perusahaan)	6	7	9	11	12
	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 (%)	7,14	8,97	10,47	12,79	15,00
6	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	2.140	2.331	2.877	2.927	2.679
	Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (%)	73,09	76,91	71,51	72,08	87,26

Sumber : Dinas PMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas maka persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan, PKB dan LKS Bipartit dari tahun 2016-2020 sangat rendah yaitu kurang dari 10%. Sedangkan untuk struktur skala upah belum ada, selama tahun 2016-2020 Kota Sawahlunto memakai dan berpedoman kepada Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat. Untuk persentase perusahaan yang menerapkan K3 menunjukkan tren yang meningkat yaitu 7,14% tahun 2016 naik menjadi 15% tahun 2020, tapi persentase ini juga rendah hanya 15% dari perusahaan yang ada. Untuk persentase tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebanyak 73,09%, naik menjadi 76,91% pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71,51%, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 72,08% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 87,26%.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Dalam suatu wilayah peranan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki komponen yang penting. Individu berperan dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah. Sehingga dengan membaiknya perekonomian maka akan berdampak pada membaiknya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi

diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan).

Tabel 2. 96 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
Angkatan Kerja 15 Tahun ke Atas (Jiwa)	17203	12815	30018	17830	13219	31049	18084	14087	32171	18062	13187	31249	18948	14071	33019
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas (Jiwa)	21155	21783	42938	21717	22360	44077	21796	22501	44297	22349	22808	45157	23138	23648	46786
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Jiwa)	81,32	58,83	69,91	82,10	59,12	70,44	82,97	62,61	72,63	80,82	57,82	69,20	81,89	59,50	70,57

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dengan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2016-2020, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Sawahlunto berfluktuatif dengan TPAK laki-laki lebih besar dari TPAK perempuan. Pada tahun 2016 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Sawahlunto adalah sebesar 69,91%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,44%, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 72,63%, dan pada tahun 2019 angka ini mengalami penurunan menjadi 69,20%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,57%. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang sedang bekerja.

Tabel 2. 97 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	TPAK Kota Sawahlunto	69,91	70,44	72,63	69,20	70,57	
2	TPAK Provinsi Sumatera Barat	67,08	66,29	67,26	67,51	69,01	
3	TPAK Indonesia (Nasional)	66,34	66,67	67,26	67,49	67,77	

Sumber : BPS, 2021

Apabila dilihat pada tabel di atas perbandingan TPAK Kota Sawahlunto lebih tinggi bila dibandingkan dengan TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Ini menandakan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Sawahlunto lebih banyak dibandingkan tingkat provinsi dan nasional.

5. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari Kerja adalah individu yang berada dalam masa produktif yaitu umur 15-64 tahun dimana masih mencari pekerjaan. Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang

ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1. Dari tahun 2016-2019, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderung naik dengan pencari kerja perempuan lebih banyak dari pada pencari kerja laki-laki. Pada tahun 2016 jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 6,34%, dan naik menjadi 23,75% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya sebesar 0,99%, hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto, dimana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini maka lowongan kerja minim bahkan tidak ada perusahaan yang membuka lowongan kerja.

Tabel 2. 98 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	9	12	21	3	16	19	42	67	109	44	65	109	2	2	4
2	Jumlah Pencari kerja yang mendaftar/mengurus kartu AK-1 (Orang)	140	191	331	282	265	547	402	540	942	238	221	459	181	222	403
3	**Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)**	**6,43**	**6,28**	**6,34**	**1,06**	**6,04**	**3,47**	**10,45**	**12,41**	**11,57**	**18,49**	**29,41**	**23,75**	**1,10**	**0,90**	**0,99**

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

Persentase pencari kerja yang ditempatkan ini termasuk rendah karena tidak sampai 25% tiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaaan yang tersedia, tidak adanya pencaker yang melapor/mengembalikan kartu pencari kerja (kartu AK-1) ke DPMPTSPNaker saat mereka sudah diterima bekerja. Faktor lain yang menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Persaingan dunia kerja
   Banyaknya persaingan dalam dunia kerja dapat menyulitkan pencari kerja untuk bisa mendapatkan pekerjaan impiannya.
2. Kemampuan dan pendidikan
   Kemampuan dan pendidikan seseorang juga termasuk faktor penyebab sulitnya mendapatkan pekerjaan.
3. Pengalaman
   Pengalaman juga menentukan apakah seseorang layak bekerja untuk perusahaan tersebut atau tidak. Orang yang berpengalaman adalah orang yang terbiasa dengan dunia kerja dan memahami kemampuan yang dimilikinya.
4. Minim informasi pekerjaan/networking.

6. Lapangan Usaha Penduduk yang Bekerja

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Pada tahun 2016 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbesar di lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan yaitu sebanyak 7.696 orang (laki-laki sebanyak 3.573 orang dan perempuan sebanyak 4.123 orang), disusul perdagangan besar dan eceran, rumah makan dan hotel sebanyak 6.559 orang (laki-laki sebanyak 2.729 orang dan perempuan sebanyak 3.830 orang). Pada tahun 2017 adanya perubahan yaitu jumlah penduduk yang bekerja paling banyak adalah pada lapangan usaha lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) yaitu sebanyak 7.688 orang (laki-laki sebanyak 6.864 orang dan perempuan sebanyak 824 orang), sedangkan pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 dimana penduduk yang bekerja paling banyak juga pada lapangan usaha lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi,

keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan) yaitu meningkat menjadi sebanyak 8.298 orang (laki-laki sebanyak 7.435 orang dan perempuan sebanyak 863 orang) yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 99 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2018

No	Menurut Lapangan Usaha	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Pertanian	2.792	1.835	4.627	3.212	1.677	4.889	3.179	1.812	4.991
2	Industri Pengolahan	1.239	1.228	2.467	1.193	2.360	3.553	1.139	3.088	4.227
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	2.729	3.830	6.559	2.512	3.478	5.990	2.548	3.040	5.588
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	3.573	4.123	7.696	2.987	4.020	7.007	2.631	4.585	7.216
5	Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan)	5.812	701	6.513	6.864	824	7.688	7.435	863	8.298
	Total	**16.145**	**11.717**	**27.862**	**10.678**	**12.359**	**29.127**	**16.932**	**13.388**	**30.320**

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2019

Sedangkan pada tahun 2020 terjadi perubahan penyajian data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mana lapangan usaha dibagi menjadi tiga kategori saja yaitu pertanian, manufaktur dan jasa seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 100 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Sawahlunto Tahun 2019 s.d 2020

No	Lapangan Usaha Tiga Kategori	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	2.658	1.369	4.027	3.710	1.936	5.646
2	Manufaktur	6.350	2.017	8.367	5.521	1.840	7.361
3	Jasa	7.930	8.793	16.723	8.179	9.124	17.303
Total		**16.938**	**12.179**	**29.117**	**17.410**	**12.900**	**30.310**

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 di Kota Sawahlunto penduduk yang bekerja terbanyak ada pada lapangan usaha Jasa yaitu berjumlah 16.723 orang (laki-laki sebanyak 7.930 orang dan perempuan sebanyak 8.793 orang). Dan pada tahun 2020 penduduk yang bekerja terbanyak juga ada pada lapangan usaha Jasa yaitu meningkat menjadi 17.303 orang (laki-laki sebanyak 8.179 orang dan perempuan sebanyak 9.124 orang).

7. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Jumlah pengangguran terbuka di Kota Sawahlunto tahun 2016 yang terbanyak adalah tamatan SLTA yaitu sebesar 53,90% atau sebanyak 1.162 orang, dan pada tahun 2020 jumlah pengangguran terbuka yang tamat SLTA secara persentase menurun menjadi 50,83% tapi dari segi jumlah naik menjadi sebanyak 1.377 orang. Akan tetapi pada tamatan perguruan tinggi meningkat dari 5,80% atau sebanyak 125 orang tahun 2016 naik menjadi 21,04% atau sebanyak 570 orang pada tahun 2020. Sehingga pengangguran di Kota Sawahlunto banyak dari pengangguran terdidik yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 101 Pendidikan tertinggi yang Ditamatkan di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Kegiatan Utama	2016					2017					2018					2019					2020				
		Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan					Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan				
		SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Jml	SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Jml	SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Jml	SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Jml	SD kebawah	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	Jml
1	Bekerja	8723	5088	9333	4718	27862	7734	5517	10815	5061	29127	3642	5543	9819	10961	29965	7761	5336	10325	5695	29117	8867	4841	9969	6633	30310
2	Penganggu ran Terbuka	312	557	1162	125	2156	206	287	843	586	1922	292	272	999	288	1851	488	285	840	519	2132	476	286	1377	570	2709

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

8. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di suatu wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut :

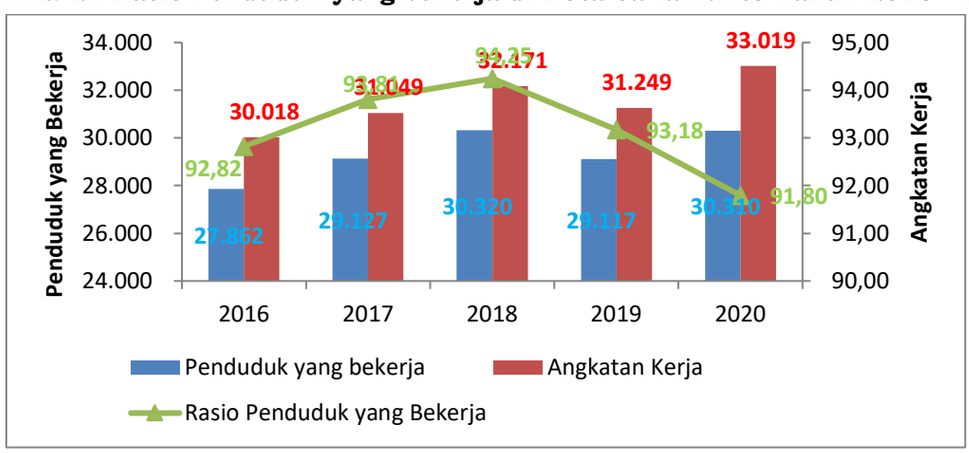
Tabel 2. 102 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Perumbuhan rata-rata per tahun (%)
1	**Penduduk yang bekerja :**	**27.862**	**29.127**	**30.320**	**29.117**	**30.310**	**2,19**
	- Laki-laki	16.145	16.768	16.932	16.938	17.410	1,91
	- Perempuan	11.717	12.359	13.388	12.179	12.900	2,67
2	**Angkatan Kerja :**	**30.018**	**31.049**	**32.171**	**31.249**	**33.019**	**2,46**
	- Laki-laki	17.203	17.830	18.084	18.062	18.948	2,46
	- Perempuan	12.815	13.219	14.087	13.187	14.071	2,51
3	**Rasio penduduk yang bekerja :**	**92,82**	**93,81**	**94.24**	**93,18**	**91,80**	**0,27**
	- Laki-laki	93,85	94,04	93,63	93,78	91,88	0,52
	- Perempuan	91,43	93,49	95,04	92,36	91,68	0,09

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

Jumlah penduduk yang bekerja, jumlah angkatan kerja, maupun rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuasi. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Sawahlunto tergolong baik, yaitu lebih dari 90 persen. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto pada periode 2016-2020 berfluktuatif dengan rasio laki-laki lebih besar dari rasio perempuan. Pada tahun 2016 rasio penduduk yang bekerja sebesar 92,82, naik menjadi 93,81 pada tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi 94,24 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 93,18 dan pada tahun 2020 rasio penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto mengalami penurunan kembali menjadi 91,80. Hal tersebut berarti 91,80 persen dari total angkatan kerja di Kota Sawahlunto telah memperoleh kesempatan untuk bekerja, sementara untuk 8,20 persen yang lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan atau menganggur. Pertumbuhan rasio penduduk bekerja di Kota Sawahlunto masih rendah yaitu sebesar 0,27%.

Grafik 2. 21 Rasio Penduduk yang bekerja di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020



Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data diolah

9. Pelatihan Tenaga Kerja

Untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Sawahlunto maka Dinas yang membidangi tenaga kerja yaitu Dinas Perindagkopnaker dari tahun 2015-2016, dan Dinas PMPTSPNaker pada tahun 2017 telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat dan berbasis kewirausahaan. Pada pertengahan tahun 2019 DPMPTSPNaker telah mendirikan/membentuk UPTD Balai Latihan Kerja (UPTD dari Dinas PMPTSPNaker), yang mana UPTD BLK ini khusus bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan keterampilan kerja berbasis kompetensi untuk mencetak tenaga kerja yang handal dan siap pakai. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu mendorong pencaker untuk bekerja atau berwirausaha, membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Pelatihan yang telah dilaksanakan di UPTD BLK antara lain adalah service hp, otomotif, menjahit, listrik, las, mebel, bangunan, ac split dan lain-lain. Untuk melatih pencaker yang ingin mengikuti pelatihan yang tidak tersedia di UPTD BLK Sawahlunto maka Pemko Sawahlunto juga mengirim peserta pelatihan ke BLK Padang dan ke BBPLK Medan, BBPLK Bekasi dan lain-lain.

Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan kerjasama dengan PT. Universal Karya Mandiri Batam dan dengan PT. Jaya Perkasa Textile Sukoharjo tentang penempatan tenaga kerja, dan dengan beberapa perusahaan lokal tentang penginformasian lowongan kerja. Selain itu Pemko Sawahlunto juga menjalin kerjasama dengan perusahaan konveksi Batam (PT. Asiaco Batamindo) dalam hal menjahit seragam kerja.

Dari tahun 2016-2020 besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, kewirausahaan, dan berbasis masyarakat tidak sampai 100%, dan pelatihan juga tidak dilaksanakan setiap tahun. Rata-rata untuk besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan yang dilaksanakan jumlah tenaga kerja yang dilatih tidak sama banyak/tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 103 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi, Kewirausahaan Dan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Kategori	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	46	51	106	166	86
2	Pendaftar Pelatihan berbasis Kompetensi	Orang	50	60	120	223	125
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi**	**Persen**	**92**	**85**	**88**	**74**	**68,80**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Tenaga Kerja yang dilatih	Orang	-	80	40	40	-
2	Pendaftar Pelatihan berbasis kewirausahaan	Orang	-	90	60	50	-
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan**	**Persen**	**-**	**89**	**67**	**80**	**-**
No	**Kategori**	**Satuan**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Tenaga kerja yang dilatih	Orang	-	-	-	-	-

No	Kategori	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2	Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	-	-	-	-
3	**Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat**	**Persen**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Dinas Perindagkopnaker Tahun 2016 dan DPMPTSPNAKER Tahun 2020

Untuk mendukung program unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif maka Kota Sawahlunto melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja dengan peserta pelatihan sebanyak 16 orang per paket untuk masing-masing jenis pelatihan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar para lulusan pelatihan bisa bekerja mandiri atau berwirausaha, dan membuka/menciptakan lapangan kerja baru.

2.4.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan sertau pemenuhan hak anak.

Gambaran umum pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran di dalam kehidupan berumah tangga. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 104 Jumlah KDRT Di Kota SawahluntoTahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KDRT	3	10	6	7	5
2.	Jumlah Rumah Tangga/ KK	15.010	14.452	19.394	19.394	20.330
3.	Rasio KDRT	0,02	0.02	0,03	0,03	0,02

Sumber : Data DinSosPMDPPA Kota Sawahlunto Tahun 2020

KDRT ibarat fenomena gunung es, dimana kasus yang terlaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data di atas rasio KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Sawahlunto harus tetap waspada. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat di antaranya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diharapkan KDRT makin dapat ditekan.

Kepedulian Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan penelantaran. Berikut data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan :

Tabel 2. 105 Data Kasus Penyelesaiannya Dibantu Oleh P2TP2A Kota ArangBerdasarkan Perempuan dan Anak sebagai Korban Tahun 2020

NO	Jenis Kasus	Tahun 2020	
		Perempuan	Anak
1	Kekerasan Fisik	0	0
2	Kekerasan Seksual	0	5
3	Kekerasan Psikis	0	0
4	Penelantaran Rumah Tangga	0	0
5	Eksploitasi	0	0
6	Trafficking	0	0
7	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	1
8	Pemenuhan Hak Anak	0	2
9	Anak Berhadapan dg Hukum	0	20
10	Kenakalan anak	0	5
Jumlah Jenis Kasus		**4**	**33**
Total 2020		**37 kasus**	

Sumber : Data DinSosPMDPPA Kota Sawahlunto Tahun 2020

Masih adanya kasus KDRT tahun 2016-2020 di Sawahlunto harus menjadi perhatian bersama semua pihak untuk dapat menghilangkannya. Dari data diatas diketahui bahwa jumlah korban anak-anak justru lebih banyak. Anak-anak adalah warga Negara yang rentan dikenai tindakan kekerasan ketika ada masalah dalam keluarga atau lingkungannya. Faktor penyebab seperti : ketimpangan ekonomi, metal & spritual orang tua yang lemah, lingkungan yang tidak kondusif dan lainnya mengakibatkan perempuan dan anak-anak sering jadi korban. Hal ini adalah PR besar bagi Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah memfasilitasi semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, bantuan hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit, outreach,* sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan lainnya.

Berkaitan dengan perempuan dan anak dalam keluarga, perlu diamati juga kasus perceraian yang terjadi di Kota sawahlunto.

Tabel 2. 106 Data jumlah kasus perceraian di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cerai Gugat	210	211	59	107	99
2	Cerai Talak	72	70	181	38	46
	Jumlah	282	281	240	145	145

Sumber : Pengadilan Agama Kota Sawahlunto, 2021

Kasus perceraian dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Namun fenomena yang terjadi dimana kasus cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak cukup mengejutkan. Terjadinya perceraian menunjukkan lemahnya ketahanan keluarga dalam menjalankan komitmen, fungsi dan tugas sebagai suami atau istri. Beberapa penyebab perceraian diantaranya adalah : masalah/ kesenjangan ekonomi, salah satu atau kedua belah pihak tidak bertanggung jawab, poligami liar dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang Pengarusutamaan Gender maka Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 107 Indeks Pembanguan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	95,50	95,68	95,51	95,48
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	65,86	65,33	66,18	-

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2020

Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah keberperanan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi Anak dalam Pembangunan dilakukan sesuai dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana tercantum pada Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: non-Diskriminasi, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan menghargai partisipasi anak. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan dalam wadah Forum Anak.

Tabel 2. 108 Jumlah Forum Anak Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Forum Anak Tk. Kota Sawahlunto	1	1	1	1	1
2	Forum Anak Tingkat Kecamatan	3	4	4	4	4
3	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	14	23	23	37	37

Sumber : Dinas SosPMDPPA 2020

Forum Anak dibina oleh Pemerintah secara berjenjang dalam rangka memnuhi hak partisipasi anak. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Tabel 2. 109 Kasus Kenakalan Remaja 5 Tahun Terakhir Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kenakalan Remaja	3 0rang	7 orang	9 orang	3 orang	5 orang
Kasus Kenakalan Remaja yang Terselesaikan	3 kasus	7 kasus	9 kasus	3 orang	5 orang
Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PMDPPA 2020

Kasus kenakalan remaja tahun 2016-2020 adalah catatan penting yang harus jadi perhatian semua pihak, karena remaja sebagai pemilik masa depan harus terhindar dari permasalahan yang akan mempengaruhi kehidupannya. Kedepan diharapkan tidak ada kasus di tahun-tahun berikutnya. Perlu peran serta

keluarga, lingkungan dan Pemerintah untuk menjaga, mengawasi dan melindungi remaja dari tindak kenakalan.

Data kenakalan remaja yang ditampilkan diatas merupakan data kenakalan remaja yang diselesaikan oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto. Kasus tersebut berdasar laporan yang di terima melalui masyarakat dan di bantu penyelesaian nya oleh P2TP2A sehingga bisa normal kembali. Dalam hal ini belum termasuk data kenakalan remaja yang terdapat pada sekolah-sekolah. Untuk kedepannya akan di upayakan kerja sama dengan Instansi terkait sehingga keseluruhan data kenakalan remaja akan bisa terpantau dan terselesaikan dengan sempurna.

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis Hak Anak dan pembangunan yang Responsif Gender. Sampai tahun 2019 sudah ada sebanyak 19 Desa/Kelurahan Ramah Anak Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 110 Predikat Kota Layak Anak Kota SawahluntoTahun 2016- 2020

2016	2017	2018	2019	2020
Tidak ada Penilaian	Madya	Nindya	Nindya	Nindya

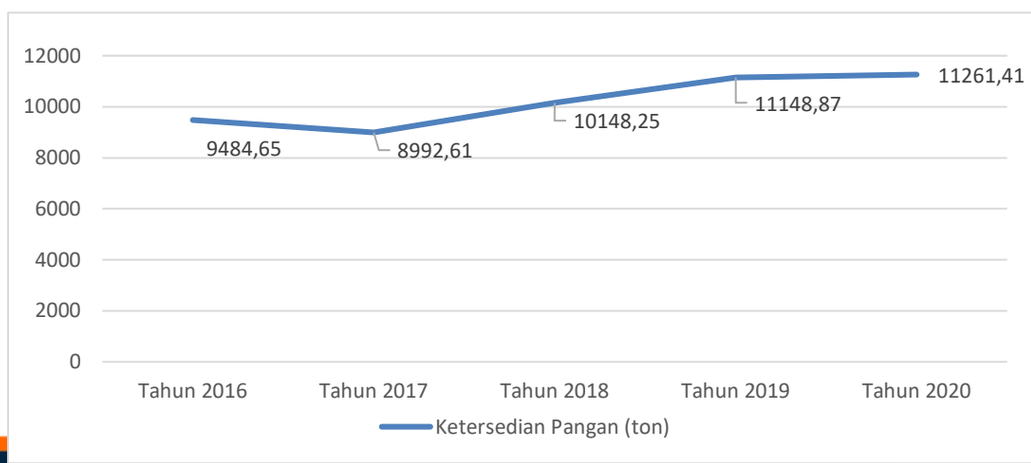
Sumber : Dinas Sosial dan PMDPPA 2020

Dalam perwujudan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara di Kota Sawahlunto diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak, maka dikembangkan Program Kota Layak Anak yang terdiri dari Kelembagaan dan 5 Klaster pemenuhan hak anak, yaitu : 1. Hak sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan, 5. Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Dalam penilaian KLA terdiri dari predikat Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Pemerintah Kota Sawahlunto akan berupaya untuk meningkatkan kriteria KLA menjadi Utama.

2.4.2.3 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu : (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketersediaan pangan untuk Kota Sawahlunto untuk pangan pokok (beras) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tergambar pada grafik dibawah ini :

Grafik 2. 22 Ketersedian pangan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto 2020

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa ketersedian pangan kota Sawahlunto khususnya beras mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Peningkatan ketersediaan pangan ini seiring dengan peningkatan produksi beras setiap tahunnya. Selain itu ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh adanya cadangan pangan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya.

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Untuk Kota Sawahlunto konsumsi, keberagaman pangan dan pola pangan harapan berdasarkan hasil survei seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 111 Konsumsi, Keragaman Pangan dan Pola Pangan Harapan Hasil Survei Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun								
		kkal/kap/hari			gr/kap/hari			skor PPH		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Padi-padian	907,7	870,2	858,4	252,0	241,8	238,3	22,7	20,2	20,4
2.	Umbi-umbian	66,2	35,9	38,6	76,4	40,6	39,3	1,7	0,8	0,9
3.	Pangan hewani	290,0	231,1	238,3	236,4	174,9	187,8	24	21,5	22,7
4.	Minyak dan Lemak	279,9	350,8	310,5	31,0	40,3	34,4	5	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	36,3	49,6	45,7	19,0	137,1	126,8	0,9	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	98,5	80,6	64,2	29,8	23,2	18,8	9,9	7,5	6,1
7.	Gula	24,1	39,4	33,2	6,6	10,8	9,1	0,6	0,9	0,8
8.	Sayur dan Buah	90,3	126,8	112,3	266,0	331,1	282,2	22,6	29,5	26,7
9.	Lain-lain	9,3	9,6	10,6	3,1	3,2	3,5	0,0	0,0	0
	Total							**87,3**	**86,5**	**83,7**

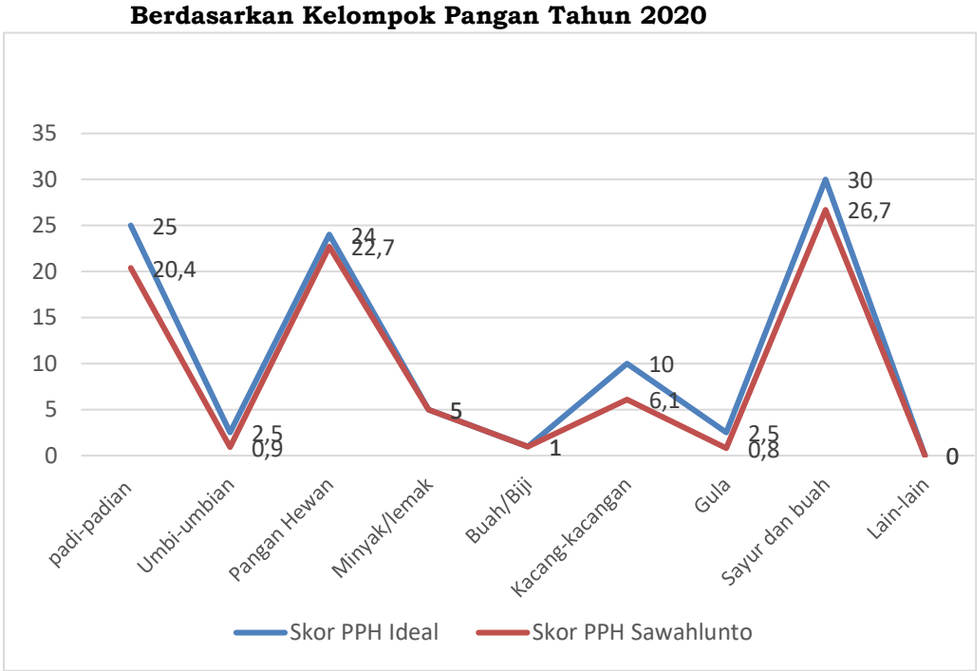
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan' 2020

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan hasil survey analisa konsumsi pangan skor PPH untuk tahun 2020 mengalami penurunan, dimana di tahun 2020 skor PPH Kota Sawahlunto 83,7. Penurunan ini terjadi pada setiap kelompok pangan kecuali pada pangan hewani. Proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sangat berpengaruh terhadap skor PPH suatu daerah, sehingga untuk mencapai skor PPH yang ideal, masyarakat harus dapat

melakukan diversifikasi konsumsi pangan, caranya dengan meningkatkan konsumsi pangan khususnya umbi-umbian sumber protein, kacang-kacangan, sayur dan biji melalui penerapan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Selain itu juga telah dilakukan pemanfaatan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) untuk pengembangan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat non beras dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman. Untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan konsumsi pangan yang beragam dan seimbang berbasis pangan lokal secara rutin telah diselenggarakan lomba cipta menu berbasis bahan pangan lokal. Lomba cipta menu kedepannya lebih diarahkan pada olahan pangan lokal bernilai komersil sehingga produksinya dapat lebih dikembangkan. Melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat merubah mindset masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang lebih beragam bergizi seimbang sesuai kebutuhan pangan dan aman.

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kg/kap/hari), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Adapun perbandingan untuk penilaian terhadap konsumsi pangan secara kuantitas Kota Sawahlunto dengan skor idealnya adalah sebagai berikut :

Grafik 2. 23 Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2020



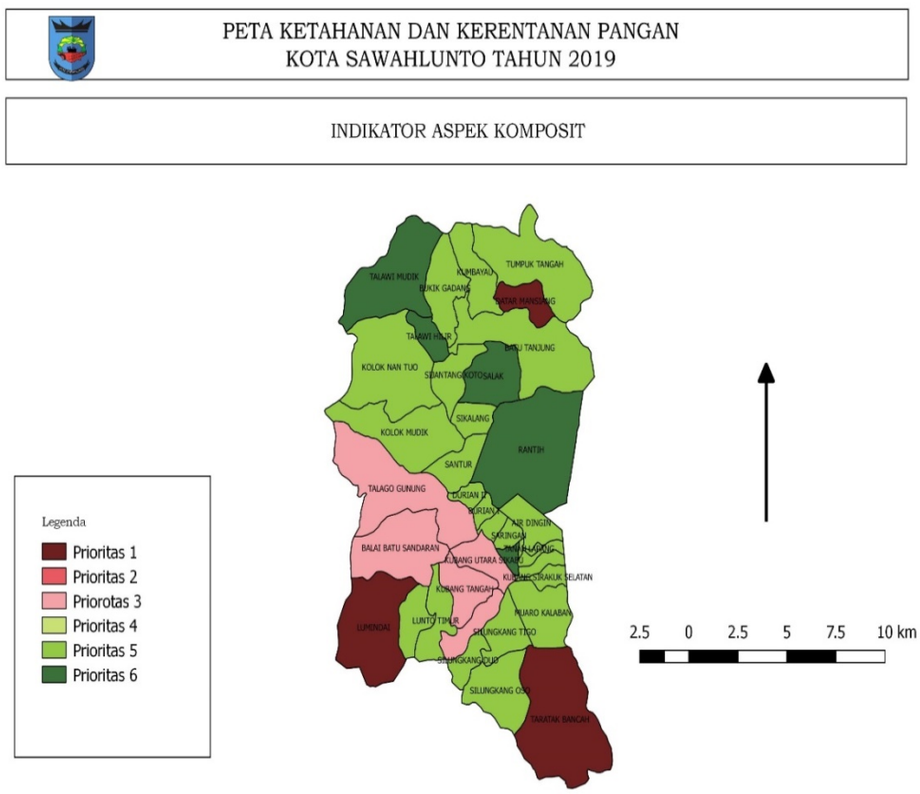
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ’2020

Dilihat dari grafik diatas untuk kelompok pangan rata-rata berada dibawah kondisi ideal, kecuali pada kelompok pangan minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Ini berarti yang menjadi permasalahan pada konsumsi pangan di Kota Sawahlunto adalah kelompok-kelompok pangan yang jauh dari skor idealnya, sehingga sangat perlu usaha-usaha melalui program/kegiatan dalam meningkatkan konsumsi masing-masing kelompok pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan tersebut adalah :

1. Besar anggota keluarga, semua program masyarakat perlu menekan pentingnya keluarga berencana dalam pembatasan penduduk, sehingga dapat menekan cukup pangan guna menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan keluarga. Bila Keluarga Berencana terwujud maka ketersedian konsumsi pangan akan terpenuhi sehingga status gizi akan lebih baik sehinggadapat ditunjukkan untuk meningkatkan skor PPH.

2. Pengetahuan Gizi
3. Tingkat Pendidikan
4. Pengeluaran pangan rumah tangga
5. Pantangan makan

Ketersedian dan konsumsi pangan yang rendah akan menjadi masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Penyusunan Dokumen FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang dilakukan pada tahun 2019 merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan di Kota Sawahlunto, seperti pada gambar berikut ini :



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dari Peta diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, daerah yang rawan pangan adalah Desa Taratak Bancah, Desa Lumindai dan Desa Data Mansiang. Adapun penentuan ini berdasarkan tiga aspek yaitu, aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan.

Untuk mengurangi daerah yang rawan pangan ini maka pemerintah daerah mengadakan program desa mandiri pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan. Di Kota Sawahlunto untuk program desa mandiri pangan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terdiri dari :

Tabel 2. 112 Desa Mandiri Pangan Kota Sawahlunto tahun 2017-2018

No	Tahun	Desa	Kelompok Tani
1.	2017	Kubang Tangah	Kelompok Ambun Pagi
		Kolok Nan Tuo	Kelompok Saiyo Sakato
2.	2018	Santur	Kelompok Usaha Cemerlang
		Muaro Kalaban	Kelompok Tunas muda

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

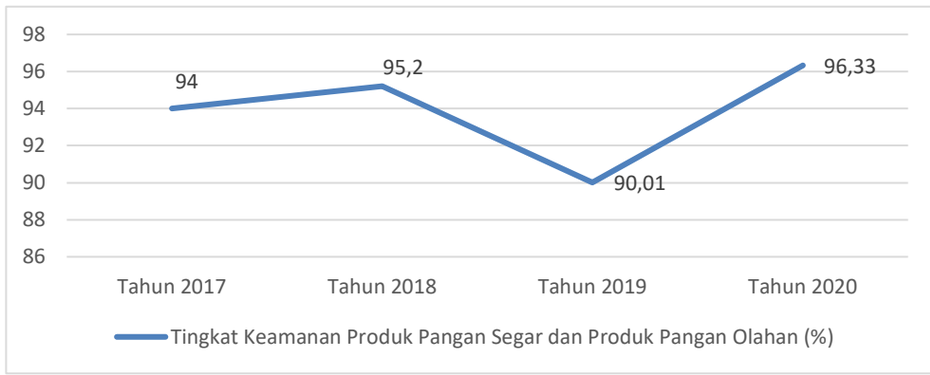
Bantuan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (stimulan) dalam mendukung program desa mandiri pangan antara lain :

- Buah manggis sebanyak 400 batang (Desa Kubang Tangah)
- Buah durian sebanyak 400 batang (Desa Kolok Nan Tuo)
- Buah pepaya sebanyak @ 300 batang (Desa KNT dan Kubang Tangah)
- Cabe rawit (Desa KNT dan Kubang Tangah)
- Bibit Ikan (Desa KNT dan Kubang Tangah), antara lain:
  (Ikan Nila, Ikan Mas/Rayo, Ikan Gurame)
- Buah Manggis sebanyak @ 150 batang (Desa Santur dan M. Kalaban)
- Buah Durian sebanyak @ 125 batang (Desa Santur dan M. Kalaban)
- Buah Manggis sebanyak @ 200 batang (Desa Santur Muaro Kalaban)

Dengan adanya bantuan dari Propinsi ini maka Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melakukan pembinaan terhadap desa yang menjadi lokus untuk mandiri pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Sawahlunto.

Dari segi keamanan pangan untuk Kota Sawahlunto dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 24 Tingkat keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Olahan



Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa tingkat keamanan pangan segar dan produk olahan pangan sudah sangat baik dan mencapai 96,33 persen di tahun 2020. Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Namun yang akan mempengaruhi tingkat keamanan pangan di Kota Sawahlunto adalah tingginya ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap beberapa produk pangan dari luar daerah Kota Sawahlunto sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pendataan lintas sektoral agar bahan pangan yang dikonsumsi aman dari pencemaran dan dalam ambang batas aman.

2.4.2.4 Urusan Pertanahan

Program Kegiatan Pertanahan yang dilaksanakan disusun sebagai upaya yang strategis pemerintah Kota Sawahlunto dalam mengendalian tata administrasi pertanahan dan tata batas wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip yang efektif dan efisien serta tetap menjaga stabilitas dan kondisi yang aman dan nyaman dalam

penguasaan status hak atas tanah dengan meminimalisir timbulnya konflik dan masalah pertanahan dan tapal batas wilayah Kota Sawahlunto.

Secara nasional isu pemberitaan bidang pertanahan terfokus pada pengelolaan hutan, alih fungsi hutan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Di Kota Sawahlunto, selain isu nasional tersebut, masih terdapat beberapa isu lainnya yang meliputi;

a. Isu adanya 25 (dua puluh lima) dari 37 (tiga puluh tujuh) Desa/Kelurahan yang berada di Kota Sawahlunto seluas ± 8.970,37 Ha lahan atau 3,62 % dari Luas Kota Sawahlunto berada dalam kawasan hutan, hal ini mendatangkan persoalan khusus yang harus dihadapi karena sebagian besar berada di pusat-pusat pemukiman dan sentra ekonomi masyarakat, hal ini dibutuhkan pemikiran dan kebijakan khusus serta program inovasi dalam penataan lahan dan untuk memperoleh kepastian hukum hak atas tanah diatasnya.
b. Isu adanya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)Tanah Ulayat Nagari dan Kaum dari 10 (Sepuluh) Nagari yang ada di Kota Sawahlunto, belum pernah dilakukan inventarisasi dan identifikasi, saat ini baru diperoleh data awal penguasaan tanah ulayat dan kaum sebanyak 1500 persil tanah dari 2 (dua) Nagari, sementara 8 (delapan) Nagari lainnya belum diketahui sampai saat ini. Hal ini perlu dilakukan inventarisasi khusus.
c. Isu penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)Tanah Pasca Tambang yang masih belum jelas penyelesaian status haknya, munculnya isu ini dipicu dengan akan berakhirnya IUP PT.BA Pertambangan Ombilin di Kota Sawahlunto pada tahun 2019 sehingga isu ini sangat berpotensi sebagai bom waktu yang sangat serius terutama adanya kepentingan-kepentingan banyak pihak, baik PT.BA, Pemerintah Daerah, Ulayat Nagari dan masyarakat banyak yang selama ini memanfaatkan dan menguasai tanah pasca tambang tersebut melalui SIPT dan sewa pakai dari PT.BA (Persero) UPO.Tbk. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan harus diantisipasi dengan melakukan dialog-dialog dan sosialisasi yang intensif, terutama dengan masyarakat adat, dan dilakukan kebijakan-kebijakan yang inovatif dengan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak PT.BA dalam pemanfaatan aset-aset pasca tambang yang saling menguntungkan semua pihak tanpa menerobos regulasi dan aturan hukum yang telah ada.
d. Isu adanya persoalan-persoalan penyerahan P3D khususnya yang menyangkut tanah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Propinsi maupin sebaliknya terkait dengan diundangkannya PP No. 44 tahun 1990 tentang perluasan wilayah derah.
e. Isu adanya persoalan-persoalan tapal batas pasca diundangkannya PP No 44 tahun 1990 Tentang Perluasan Wilayah Daerah Kota Sawahlunto pada 27 tahun yang silam tanah pemda yang sudah dibebaskan tetapi belum dimanfaatkan, adanya tanah pemda yang dipakai oleh Instansi vertikal dan masyarakat umum.
f. Isu adanya kebutuan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur daerah
g. Isu banyaknya tanah yang telah dikuasai tidak terpelihara dan termanfaat (Penatagunaan Tanah) sementara karena belum adanya kepastian hukum.

Untuk lebih jelasnya data aset tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 113 Data aset tanah milik Pemerintah Kota Sawahlunto

NO	Nama OPD	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Total Bidang Tanah
1	Dinas Pendidikan	51	30	81
2	Dinas Kesehatan Pengemdalian Penduduk dan KB	10	22	32
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	415	416

4	Dinas Sosial PMDes dan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
5	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan perikanan	5	3	8
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	2	0	2
7	Dinas Perhunbungan	0	1	1
8	Dinas Koperasi UKM perdagangan dan Perindustrian	3	4	7
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tanaga Kerja	1	0	1
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2	2
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0	3	3
12	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1
13	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia	1	0	1
14	Inspektorat	1	0	1
15	Sekretariat Daerah Kota	19	60	79
16	Sekretariat DPRD	2	0	2
17	PPKD	4	0	4
18	Badan Kesbang Politik dan PBD	1	0	1
19	Kecamatan Silungkang	2	1	3
20	Kecamatan Lembah Segar	6	8	14
21	Kecamatan Barangin	12	0	12
22	Kecamatan Talawi	1	0	1
		124	550	674

Sumber : BPKAD Sawahlunto 2020

Dari tabel diatas dilihat bahwa jumlah aset tanah yang dimiliki oleh pemerintah kota sawahlunto sebanyak 22 OPD yang bersertifikat sebanyak 124 dan yang belum bersertifikat sebanyak 550 dengan total sebanyak 674.

2.4.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

1. Perencanaan Tata Kelola Lingkungan

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Perencanaan Tata Kelola Lingkungan diperlukan untuk memetakan potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dokumen Rencana tata kelola Lingkungan Antara lain Daya Dukung daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bedasarkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang terdiri dari IKLH, Persentase RTLH, Luas Kawasan permukiman Kumuhdan Persentase RT yang memilikiakses terhadap sumber air minum layak maka dapat dilihat capaian kinerja pada tahun 2020 untuk IKLH realisasi 62,74, untuk RTLH, 11,29 %, luas Permukiman Kumuh 133,21 Hadan capaian air minum layak 87 %.

Tabel 2. 114 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja (2017	CAPAIAN KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN								
			2018			2019			2020		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,8	56,79	56,79	100	58	58,01	100	60	62,74	100
2	Persentase RTLH (%)	6,4	6,4	6,4	100	5,4	5,4	100	4,4	11,29	11,29
3	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	42,58	22,81	42,58	186,67	15	9,96	66,40	10	133,21	133,21
4	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak(%) (SDGs)	83	84	83	98,81	86	86	100	87	87	100

Sumber : DKP2LH Kota Sawahlunto 2021

2. Persentase penanganan sampah

Mobilisasi sampah dari tingkat *user interface* menuju TPA Kayu Gadang, sepenuhnya di kelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPKP2LH). Sedangkan sampah pasar Silungkang dan pasar Talawi pemungutan retribusinya dilakukan oleh KAN setempat sementara pengumpulan dan pembuangannya tetap oleh DPKP2LH. Cakupan pelayanannya adalah:

1) Sudah dilayani : 68% atau 24 desa/kelurahan
2) Belum terlayani : 32% atau 13 desa/kelurahan

Berdasarkan kemampuan operasional sarana angkutan yang ada, sampah yang terangkut ke TPA Kayu Gadang sebanyak 25-30 m^3/hari, sementara timbulansampah per harisekitar 45 m^3/hari (± 45.235. Kg/hari). Berikut adalah volume timbulan sampah dan yang dikelola di TPA, yaitu:

Tabel 2. 115 Pengelolaan Persampahan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Pengelolaan	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Timbulansampahkota (M^3/hari)	151,95	153,50	153,50	185,11	187,75
Rata-rata Timbulan (M^3/hari)	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8
Jumlah sampah terolah TPA dan TPST (M^3)	46	81	81	146	140
Persentase Sampah Terolah dengan Timbulan Sampah (%)	30,27	52,77	52,77	80,01	75,10

Sumber : DKP2LH Kota Sawahlunto 2021

Timbulan Sampah Kota Sawahlunto pada tahun 2016 sebanyak 151,95 M^3/hari, sedangkan tahun 2020 terjadi peningkatan, dengan jumlah 187,75 M^3/hari. Sedangkan yang sampah yang terolah di TPA dan TPST pada tahun 2016 meningkat dari 46 M^3/hari menjadi 140 M^3/hari tahun 2020 sehingga sampah yang tidak terangkut pada umumnya menumpuk di Tempat Penampungan Sementara yang ada baik di desa – desa maupun dipinggiran perkotaan yang belum terjangkau pelayanan. Tingkat pelayanan sampah yang terolah meningkat tahun 2017 dari 30,27 % menjadi 75,10 % di tahun 2020.

Salah satuupaya yang perludilakukan adalah dengan membentuk Kader Pengomposan Sampah desa yang mampu mengolah sampah di lokasinya sendiri. Dalam mengelola sampah tersebut sarana prasarana operasional yang sepenuhnya dikelola DKP2LH adalah berupa:

Tabel 2. 116 Sarana Dan Prasarana Persampahan Tahun 2016-2020

NO.	JENIS SARANA	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	TPA Lontiek Maloweh (Ha)	2	-	-	-	-	Tidak aktif
2	TPA Kolok Nan Tuo (Ha)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Tidak aktif
3	TPA KayuGadang (Ha)	5	9,7	9,7	9,7	9,7	Dijadikan Sanitary Landfill
4	TPST (unit)	5	5	5	5	5	
5	TPS						
6	Truck Sampah						
a	Arm Roll Truck (unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
b	Dump Sampah (unit)	4 unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
7	Container (unit)	17 unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	
8	BakSampah (buah)	14 buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	30 Buah	
9	Drum/Tong Sampah (buah)				25	25	
10	GerobakSampah (unit)	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	
12	Becak Motor (unit)	18 unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	
13	Petugas K3 (orang)	152	152	152	152	152	
14	Bulldozer	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
15	Incenerator	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	2 rusak 2

NO.	JENIS SARANA	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
							baik
16	MesinKompos	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
17	Excavator	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	

Sumber : DKP2LH Kota Sawahlunto 2020

Kondisi sarana dan prasarana persampahan di Kota Sawahlunto ini sudah perlu ditingkatkan terutama pengadaan Truck Sampah dan armroll truk karena sudah berusia tua. Saat ini TPA Kayu Gadang telah ditingkatkan metode pemusnahan sampah dari sistim control landfield menjadi sanitary landfield melalui dana APBN.

Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) yang layak secara teknis. Keberadaan TPSS selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah secara tidak beraturan.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 117 Rasio Jumlah TPSS Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah TPSS (unit)	344	344	344	344	344
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m^3)	147,92	147,92	147,92	147,92	147,92
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	63.560	63.560	63.560	62.524	67.007
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m^3/1000 jiwa)	2,32	2,32	2,32	2,36	2,21

Sumber : DKP2LH Kota Sawahlunto 2020

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2016 sebanyak 344 unit dengan daya tampung 147,92 m^3, sampai pada tahun 2020.

2.4.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada tahun 2020 semua Kepala Keluarga sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) di Sawahlunto. Untuk jumlah penduduk yang sudah memiliki e-KTP adalah sebanyak 97,55% dari 47.977 orang penduduk wajib ber-e KTP dan Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Sawahlunto terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (e KTP dan KK) sangat tinggi dan usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bekerja sama dengan seluruh Desa dan Kelurahan membuahkan hasil.

Namun, dari keberhasilan diatas masih perlu upaya maksimal bersama seluruh pihak terkait guna meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran penduduk dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah, dengan angka 59,47% untuk kepemilikan Akta Kelahiran dan 63,19% untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Komposisi penduduk berdasar jenis pekerjaan di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 didominasi oleh Pelajar/ Mahasiswa (21,99%), Wiraswasta (21,80%), belum/tidak bekerja (21,44%) dan pekerjaan lainnya (21,23%). Dan komposisi penduduk berdasar tingkat pendidikan di dominasi oleh penduduk tidak/ belum sekolah (26,69%) dan penduduk setingkat SLTA/ sederajat (22,82%).

Tabel 2. 118 Data Kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga					Jumlah penduduk memiliki kartu keluarga				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembah segar	4,022	4,019	4,208	4,222	4,312	4,022	4,019	4,208	4,222	4,312
2	Barangin	5,772	5,759	5,991	6,139	6,345	5,772	5,759	5,991	6,139	6,345
3	Silungkang	3,292	3,290	3,391	3,464	3,530	3,292	3,290	3,391	3,464	3,530
4	Talawi	5,567	5,285	5,804	5,993	6,143	5,567	5,285	5,804	5,993	6,143
	T o t a l	18,653	18,353	19,394	19,818	20,330	18,653	18,353	19,394	19,818	20,330

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto

Tabel 2. 119 Data Kepemilikan KTP-Elektronik di Kota SawahluntoTahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP					Jumlah Penduduk Memiliki KTP -El				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembah segar	9,947	9,991	10,261	10,255	10,236	9,863	9,313	9,250	9,915	9,987
2	Barangin	13,934	13,998	14,328	14,561	14,776	13,476	6,302	13,221	13,965	14,380
3	Silungkang	7,970	8,016	8,174	8,275	8,307	7,780	3,609	8,172	7,899	8,049
4	Talawi	13,616	13,857	14,291	14,563	14,678	13,210	6,386	14,198	14,086	14,408
	T o t a l	45,476	45,862	47,054	47,654	47,997	44,329	42,569	44,841	45,865	46,824

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Tabel 2. 120 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lembah segar	13,735	13,862	14,197	14,143	14,072	5,701	6,617	7,536	7,910	8,315
2	Barangin	19,554	19,849	20,250	20,474	20,700	8,433	4,956	10,928	11,942	12,824
3	Silungkang	11,524	11,620	11,782	11,820	11,780	8,364	2,744	10,574	6,163	6,676
4	Talawi	19,293	19,711	20,148	20,416	20,455	4,412	4,925	5,724	11,460	12,034
	T o t a l	64,106	65,042	66,377	66,853	67,007	26,910	31,515	34,762	37,475	39,849

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

Tabel 2. 121 Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2020

No	Kecamatan	Wajib KIA			Kepemilikan KIA			% Kepemilikan KIA		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah

1	LEMBAH SEGAR	2,116	1,959	4,075	1,255	1,250	2,505	59.31	63.81	61,56
2	BARANGIN	3,225	3,059	6,284	2,118	2,028	4,146	65.67	66.30	65,98
3	SILUNGKANG	1,907	1,780	3,687	897	967	1,864	47.04	54.33	50,68
4	TALAWI	3,247	2,914	6,161	2,162	2,077	4,239	47.04	54.33	50,68
Total		10,495	9,712	20,207	6,432	6,322	12,754	61.29	65.09	63,19

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2021

2.4.2.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan maka keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan. Masyarakat dengan berbagai latar belakang pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lainnya dapat berperan aktif melalui wadah / lembaga yang ada di Desa / Kelurahan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa / Kelurahan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 122 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan Tahun 2016-2020

No	Nama Lembaga	Jumlah (bh)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	10	19	22	23	23
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	42	42	42	42	42
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	42	42	42	42	42
4	Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum (BPSPAM)	64	64	64	64	64
5	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)	37	37	37	37	37
6	Posyandu Balita	103	103	103	103	103
7	Posyandu Lansia	55	55	55	55	55
8	Badan Permusyawarahan Desa (BPD)	27	27	27	27	27
9	Karang Taruna	37	37	37	37	37

Sumber : Data DinSosPMDPPA

Kemajuan suatu desa mempengaruhi iklim berinvestasi. Makin maju sebuah desa, maka akan makin menarik investasi untuk dapat berkembang diwilayahnya

Klasifikasi desa yang diharapkan untuk dapat menunjang iklim berinvestasi adalah dengan kategori Swasembada. Dimana pada kondisi ini daya dukung masyarakat/ Sumber Daya Manusia, potensi Sumber Daya Alam, kelembagaan, prasarana dan sarana memberikan efek positif bagi pengembangan investasi di wilayahnya.

Untuk Kota Sawahlunto, status desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 123 Status Desa berdasar Profil Desa/ Kelurahan tahun 2020

No	Status Desa	Jumlah (desa)	Persentase
1	Swasembada	5	13,51
2	Swakarya	21	56,76
3	Swadaya	11	29,73

Sumber : Data DinSosPMDPPA Tahun 2020

Desa dengan status swasembadaadalah desa : Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tangah, Balai Batu Sandaran dan Rantih.Upaya kedepan adalah meningkatkan status desa yang masih swakarya dan swadaya menuju swasembada. Dan sangat diperlukan inovasi positif dari tiap desa / kelurahan untuk dapat menarik banyak peluang investasi bagi kemajuan wilayahnya dari segala sumber.

Perkembangan kemandirian desa dipengaruhi oleh :

- Dukungan dana desa
- Pendamping desa
- Ketepatan intervensi kebijakan dalam pembangunan
- Partisipasi masyarakat

Tabel 2. 124 Status Desa berdasarkan IDM Kota Sawahlunto tahun 2016-2020

No	Klasifikasi Desa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sangat Tertinggal	1	-	-	-	-
2	Tertinggal	13	-	2	-	-
3	Berkembang	12	-	21	21	17
4	Maju	1	-	4	5	9
5	Mandiri	-	-	-	1	1
	Total Desa	27	-	27	27	27

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Sumbar, 2021

Status desa di Kota Sawahlunto mengalami kemajuan dengan tidak adanya lagi desa Sangat Tertinggal mulai tahun 2018, sedangkan pada Tahun 2017 tidak dilakukan penilaian IDM oleh Provinsi Sumatera Barat. Sejak tahun 2016 s/d 2020 status desa Kota Sawahlunto mengalami kemajuan status desa. Sejak tahun 2019 terdapat 1 desa yang sudah mencapai status Mandiri yaitu Desa Talawi Mudiak.

2.4.2.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.4.2.8.1 Rata-rata Jumlah Anak per keluarga

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian pendudukan pembangunan keluarga adalah dengan penyelenggaraan keluarga berencana. Pembangunan kependudukan dan keluarga yang berkualitas merupakan langkah yang sangat penting dalam mencapai pembanungan yang berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dalam mencapai program keluarga berencana ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB dan hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan KIE. Secara demogafi program keluarga berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2. 125 Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga di Kota Sawahlunto Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga	14,521	14,674	14,349	16.952	16,578
2.	Jumlah Penduduk	60.186	60.778	61.398	61.853	63.027
2.	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	4,19	4,18	2,75	2,32	2,31

Sumber : DinkesdaldukKB, 2021

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 20116rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga 4,19 orang. Tahun 2020 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,31 orang. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga padaa program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

2.4.2.8.2 Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencanaa dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas swekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta kematian ibu. Dalkam pola pemikiran dimasyarakat harus dirobah dari pembatasan kelahiran saja tapi juga untuk meningkatkan kualitas manusia dan mensinergisitaskan program keluarga berencana dengan sudut pandangan agama.

Tabel 2. 126 Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PUS	9.598	9.869	10.191	9.325	9.175
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	6.879	7.777	7.853	6.778	6.901
3.	Jumlah Tidak ber KB	2.383	2.092	2.339	2.547	3.068
4.	Rasio Akseptor KB	71,67	78.80	77,04	72,68	73,03

Sumber : Dinas Kesehatan PP dan KB

Rasio akseptor KB darai tahun ketahun mengalami perubahan tapi pada tahun 2020 rasio akseptor KB sebesar 73,03 dan naik dari tahunh 2019, ini berarti sudah cukup tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

2.4.2.9 Urusan Perhubungan

Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai.

Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sarana Transportasi

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi.

Untuk mendukung Visi Misi Walikota Sawahlunto dan mendukung pencapaian Misi ke 7 RPJMD 2018-2023 “Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan

Memadai", maka Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api.

Dalam pencapaiannya Dinas Perhubungan menerapkan standar pelayanan minimal bidang perhubungan seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalan Kota Sawahlunto. Selain itu juga melakukan pemeliharaan rutin terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Tabel 2. 127 Jenis dan Jumlah Sarana Transportasi di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020

No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun		Satuan
		2019	2020	
1	2	3	4	5
1	Angkutan Jalan			
	a. Kendaraan Roda Empat	3.132	4.016	Unit
	b. Kendaraan lebih dari roda empat	563	563	Unit
2	Terminal			
	a. Kelas A		-	Unit
	b. Kelas B	-	1	Unit
	c. Kelas C	1	2	Unit
	d. Shelter	-	-	Unit
	e. Halte	4	4	Unit
	f. Bus (AKAP)	-	-	
	g. Jumlah Jembatan Timbang	-	-	
	h. Stasiun Kereta Api	2	2	Unit
3	Sarana dan Prasarana Transportasi			
	1) Terminal Penumpang			
	a. Terbangun	1	1	Buah
	b. Kebutuhan	2	2	Buah
	2) Shelter			
	a. Terbangun	-	-	Unit
	b. Kebutuhan	-	-	Unit
	3) Rasio Ijin Trayek			
	a. Kondisi pada tahun x	10	-	Buah
	b. Kebutuhan	10	-	Buah
4	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum			
	a. Jumlah (angkot +AKDP)	149.474	2.338	Orang
	b. Jumlah barang	-		Unit
5	Uji KIR Angkutan Umum			Unit
	1) Jumlah Mobil Penumpang Umum			Unit
	a. Jumlah Mobil Penumpang Umum	16	16	Buah
	b. Jumlah KIR	11	-	Buah
	c. Persentase	34	0	%
	2) Mobil Bus			
	a. Jumlah Bus	60	63	Buah
	b. Jumlah KIR	43	24	Buah
	c. Persentase	78	38	%

No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun		Satuan
		2019	2020	
	3) Mobil barang			
	a. Jumlah Mobil Barang	1.407	1.441	Buah
	b. Jumlah KIR	927	332	Buah
	c. Persentase	66	23	%
6	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1 Tahun	981	382	Buah
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	8	8	Buah
8	Rasio Izin Trayek			
	a. Izin Trayek Perkotaan	4	2	Buah
	b. Izin Trayek Pedesaan	-	-	
	c. Total Jumlah Izin Trayek	4	2	
	d. Rasio Izin Trayek	100	100	%
9	Kepemilikan KIR Angkutan Umum			
	a. Jumlah Angkutan Umum Yang Memiliki KIR Pada Tahun Ini	54	24	Buah
	b. Jumlah Angkutan Umum Pada Tahun Ini	76	79	Buah
	c. Rasio	01:01,4	01:03,2	%
10	Lama Pengujian KIR	25	20	Menit
11	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum			
	a. Mobil Penumpang	51.000	51.000	RP
	b. Mobil Barang	61.000	61.000	RP
	C. Mobil Bus	61.000	61.000	RP
12	Angkutan Darat			
	a. Truck	497	568	Unit
	b. Light Truck	337	331	Unit
	c. Angkot	16	24	Unit
	d. Pick Up	573	694	Unit
	e. Mobilbus	59	51	Unit
	f. Microbus	25	67	Unit
	g. Mini bus/ST Wagon	2.031	2.708	Unit
	h. Sedan	216	-	Unit
	i. Jeep	184	264	Unit
	j. Kereta Api	-	2	Unit
	k. Travel biro	5	5	Unit
	l. Sepeda Motor (ojek)	280	350	Unit
	j. Sepeda Motor (Roda Tiga)	11.980	20.889	Unit
	m. Bus Pariwisata	7	7	Unit
	n. Bajaj	-	-	Unit
	o. Bendi/Delman	-	-	Unit
	p. Becak Motor	4	39	Unit
13	Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan			
	a. Kaca Tikungan	82	82	Unit
	b. Warningh Light	12	12	Unit
	c. Traffic Light	1	1	Unit
	d. Rambu-rambu	229	218	Unit

No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun		Satuan
		2019	2020	
	e. Guadril	147	147	Unit
	f. Diliniatur	100	100	Unit
	g. Trapikun	100	100	Unit
	h. Marka Jalan	113.885	113.885	M’
	i. Jembatan Penyebrangan	-	-	Buah
	j. Papan Penunjuk Arah	46	46	Buah
	k. Papan Informasi lalu Lintas	-	-	Buah
	l. Zebra cross	724	724	Unit
	m. Trotoar	8.300	8.300	M’
	n. RPPJ	10	10	M’

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto 2021

Untuk jumlah kendaraan roda empat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sementara untuk jumlah KIR kendaraan baik mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang mengalami penurunan kuantitas. Hal ini disebabkan karena dampak wabah Covid-19 dengan mengadakan pembatasan aktifitas perjalanan ke luar dan masuk Kota Sawahlunto, sehingga berimbas pada layanan angkutan umum yang berhenti beraktifitas. Akibatnya para pemilik kendaraan merasa berat hati mengeluarkan biaya untuk KIR sementara kendaraannya tidak beroperasi dan akhirnya berdampak pada penurunan jumlah KIR angkutan umum di Kota Sawahlunto.

Untuk sarana lalu lintas angkutan jalan dalam segi jumlah masih sama dengan tahun sebelumnya, kecuali untuk jumlah rambu-rambu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 11 buah dikarenakan kondisi yang rusak. Pada tahun 2020 alokasi anggaran Dinas Perhubungan tidak ada untuk pengadaan sarana perlengkapan jalan dikarenakan anggaran APBD direlokasikan untuk anggaran Covid.

2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Yang dimaksud dengan angkutan orang/barang umum ialah angkutan orang/barang pada umumnya. Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat izin, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Berikut data mengenai jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 128 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah orang (orang)	149.474	2.338

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2021

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan signifikan dari 149.474 menjadi hanya 2.338 orang atau hanya 1,5 %. Hal ini disebabkan karena wabah covid-19 yang membatasi pergerakan sosial sehingga tidak ada mobilitas orang terjadi untuk beberapa bulan. Pada saat ini di Kota Sawahlunto angkutan kota juga tidak beroperasi, begitu juga dengan angkutan kota dalam propinsi dan angkutan barang. Sehingga menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan orang yang terangkut di Kota Sawahlunto.

3. Reaktivasi Jalur Kereta Api

Jalur kereta api di Kota Sawahlunto sudah dimulai sejak tahun 1892. Pada saat itu pembangunan dimulai sebagai sarana pengangkutan batu bara Ombilin. Seiring waktu pengangkutan batu bara dengan kereta api semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Kereta api beroperasi sebagai kereta wisata dengan rute Sawahlunto - muaro kalaban - Padang Panjang. Namun pada saat ini kereta api memang tidak beroperasi sama sekali. Sesuai dengan adanya rencana Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.KAI yang akan mereaktivasi kembali jalur kereta api dan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok-Muaro Kalaban (Sawahlunto).

Melalui Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto telah dimulai pekerjaan pembersihan kawasan rel dengan bekerja sama dengan PT.KAI pada tahun 2021. Panjang rel kereta api yang aktif pada saat ini adalah 4,2 kilometer dari stasiun Sawahlunto ke Stasiun Muaro Kalaban dengan kondisi 2 stasiun aktif. Sawahlunto masih mempunyai 2 lokomotif dengan rincian 1 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap. Keinginan Pemerintah Kota Sawahlunto sangat kuat menjadikan kereta api sebagai salah satu moda transportasi yang pernah diandalkan seperti pada masanya.

4. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2. 129 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	15.010	15.163	15.351	15.434	16.525
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	10.212	10.619	11.128	15.076	16.210
3	Persentase Rumah Tagga yang menggunakan listrik (%)	68,03	70,03	72,49	97,68	98,09

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, apalagi dari tahun 2018 ke 2019 dengan penambahan sebanyak 25,19%. Dari data tersebut diatas terlihat bahwa masih ada 1,91% lagi rumah tangga yang tidak menggunakan listrik.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola energi listrik mempunyai program agar semua masyarakat dapat menikmati listrik yang ada. Namun karena biaya operasional pemasangan listrik dirasa cukup tinggi, maka tidak semua masyarakat dapat menyanggupinya. Sehingganya masih ada masyarakat yang rumahnya tidak dialiri listrik. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

5. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2. 130 Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP Tahun 2016- 2020

NO	Alat Komunikasi dan Informasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	HP / Telepon	67,64	83,27	84,31	84,72	86,43

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki telepon selular sudah mencapai 86,43%. Hal ini dinilai tinggi dengan artian sebagian besar masyarakat Kota Sawahlunto telah menggunakan HP sebagai sarana komunikasi. Didukung dengan jaringan komunikasi yang sudah baik sehingga memudahkan akses dan keterbukaan informasi di Kota Sawahlunto.

2.4.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya,termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan pemerintahan harus dimulai dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan telekomunikasi, multimedia dan informatika yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 131 Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Hotspot	6	8	8	18	18
2	Jumlah Aplikasi yang dikelola	15	15	16	16	18
3	Persentase OPD yang memiliki akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	0	0	0	100	100

4	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	n/a	n/a	1,87	2,45	2,88
5	Jumlah ASN Pengelola TIK	21	21	21	24	29

Sumber : Bagian Humas, Persandian dan Kominfo Setdako

Jumlah hotspot yang disediakan pemerintah Kota Sawahlunto untuk fasilitas publik dimulai dari 2016 sebanyak 6 unit, pada tahun 2017 sampai tahun 2018 menjadi 8 unit terus meningkat menjadi 18 titik hotspot yang tersebar di seluruh wilayah strategis Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 132 Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	CAKUPAN SINYAL				KETERANGAN
			2G	3G	4G	BLANKSPOT	
1	SILUNGKANG	TARATAK BANCAH	-	-	-	√	
2		MUARO KALABAN	√	√	√	-	
3		SILUNGKANG OSO	√	√	-	-	
4		SILUNGKANG DUO	√	√	√	-	
5		SILUNGKANG TIGO	√	-	-	-	
6	LEMBAH SEGAR	AIR DINGIN	√	√	√	-	
7		AUR MULYO	√	√	√	-	
8		KUBANG SIRAKUAK SELATAN	√	√	√	-	
9		KUBANG SIRAKUAK UTARA	√	√	√	-	
10		PASAR	√	√	√	-	
11		TANAH LAPANG	√	√	√	-	
12		KUBANG UTARA SIKABU	√	√	-	-	
13		KUBANG TANGAH	√	√	√	-	
14		PASAR KUBANG	√	√	√	-	
15		LUNTO BARAT	√	√	√	-	
16		LUNTO TIMUR	√	√	√	-	
17	BARANGIN	DURIAN I	√	√	√	-	
18		DURIAN II	√	√	√	-	
19		LUBANG PANJANG	√	√	√	-	
20		SARINGAN	√	√	√	-	
21		BALAI BATU SANDARAN	√	√	-	Dusun Gunung	4g di Dusun Beringin dan Air Gunung
22		LUMINDAI	√	√	√	-	Dusun Guguk bungo belum 4g
23		TALAGO GUNUANG	√			-	
24		SANTUR	√	√	√	-	
25		KOLOK MUDIAK	√	-	-	-	
26		KOLOK NAN TUO	√	-	-	-	
27	TALAWI	SIKALANG	√	√	√	-	
28		SIJANTANG KOTO	√	√	√	-	
29		RANTIH	√	√	√	-	
30		SALAK	√	√	√	-	
31		TALAWI HILIR	√	√	√	-	
32		TALAWI MUDIAK	√	√	-	-	

33		KUMBAYAU	√	√	√	-	
34		BATU TANJUNG	√	√	-	-	
35		DATAR MANSIANG	_	_	_	√	
36		TUMPUK TANGAH	√	√	_	-	
37		BUKIK GADANG	√	√	√	-	

Sumber: Bagian Kominfo, Data Diolah 2019

Dari seluruh desa/kelurahan, masih terdapat desa yang belum tersentuh layanan telekomunikasi/ internet. Kondii saat ini menuntut penggunaan media telekomunikasi dalam pelaksanaan aktivitas. Kondisi layanan internet yang sudah tersambung di seluruh kantor pemerintahan cukup beragam, namun belum tersambung 100 %.

Tabel 2. 133 Jenis koneksi internet yang dimanfaatkan di seluruh Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2019

NO	NAMA DESA	KONEKSI INTERNET YANG DIGUNAKAN SAAT INI (CONTOH PENULISAN : SPEEDY TELKOM)	BANDWIDTH/ KECEPATAN PER DETIK (CONTOH PENULISAN : 20/mbps)	KONDISI PERLATANAN UNTUK KONEKSI INTERNET SAAT INI (BAIK/TIDAK BAIK)
1	TARATAK BANCAH	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak ada
2	MUARO KALABAN	speedy telkom dan wifi bakti aksi	1/mbps dan 3.4/mbps	tidak baik
3	SILUNGKANG OSO	speedy telkom	20/mbps	baik
4	SILUNGKANG DUO	speedy telkom	20/mbps	baik
5	SILUNGKANG TIGO	speedy telkom	50/mbps	baik
6	KUBANG UTARA SIKABU	wifi bakti aksi / icon +	72/Mbps dan 72 Mbps	baik
7	KUBANG TANGAH	wifi bakti aksi	0/mbps	tidak baik
8	PASA KUBANG	wifi bakti aksi	4/mbps	baik
9	LUNTO BARAT	wifi bakti aksi	3,4/mbps	kurang baik
10	LUNTO TIMUR	icon + dan bakti aksi	72 Mbps dan 86 Mbps	baik
11	BALAI BATU SANDARAN	wifi bakti aksi	3.4/mbps	kurang baik
12	LUMINDAI	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak ada
13	TALAGO GUNUNG	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak ada
14	SANTUA	speedy telkom	20/mbps	kurang baik
15	KOLOK MUDIAK	wifi bakti aksi	3.4/mbps	tidak baik
16	KOLOK NAN TUO	wifi bakti aksi	3.4/mbps	tidak baik
17	SIKALANG	speedy telkom	150 Mbps	baik
18	SIJANTANG KOTO	speedy telkom	18/mbps	baik
19	RANTIH	speedy telkom	1 /mbps	tidak baik
20	SALAK	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak ada
21	TALAWI HILIE	speedy telkom	50/Mpbs	baik
22	TALAWI MUDIAK	indihome telkom	50/mbps	baik
23	KUMBAYAU	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak baik
24	BATU TANJUNG	speedy telkom	1 /mbps	tidak baik

25	DATA MANSIANG	speedy telkom	10/mbps	kurang baik
26	TUMPUK TANGAH	tidak ada koneksi internet	TIDAK ADA JARINGAN	tidak ada
27	BUKIT GADANG	SPEEDY TELKOM	10/mbps	kurang baik

Sumber: Bagian Kominfo, Data Diolah 2019

2.4.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Adapun perkembangan koperasi yang aktif dan tidak aktif di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 134 Persentase Koperasi Aktif Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif (unit)	66	60	60	56	53	53
2	Jumlah koperasi (unit)	81	68	68	68	68	68
3	Persentase koperasi aktif	81,48	88,24	88,24	82,4	77,9	77,9

Sumber : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

Dari Tahun 2016-2020 persentase koperasi yang aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2020 sebesar 77,9 persen. Tahun 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 karena terkait masa pandemic yang baru dimulai sehingga kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap koperasi sangat terbatas untuk dilaksanakan. Pembinaan terhadap koperasi sangat menentukan perkembangan koperasi, untuk koperasi aktif yang menjadi indikator adalah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, apabila koperasi tidak melaksanakan RAT 2 tahun berturut-turut, maka dianggap koperasi tersebut tidak aktif. Ini perlu kerja keras pemerintah daerah dalam mengaktifkan koperasi yang ada. Koperasi yang tidak RAT diupayakan pembenahan agar dapat menjalankan aktifitas usaha kembali namun apabila tidak bisa diaktifkan lagi akan dibubarkan oleh kementerian Koperasi dan UKM RI. Pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya. Secara modal dan keanggotaan koperasi dapat dlihat perkembangan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 135 Perkembangan Koperasi dan Permodalan Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi (unit)	81	68	68	68	68
2	Jumlah Koperasi Aktif	66	60	56	53	53
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	15	8	12	15	15
4	Jumlah Koperasi RAT	49	49	48	50	43
4	Jumlah Anggota orang)	10.099	9.377	9.352	8.972	8.775
5	Jumlah Tenaga Kerja	271	113	113	113	113
3	Volume Usaha (Rp))	112.571.756.401	99.820.465.300	94.078.447.603	103.589.617.000	57.792.083
4	Modal Sendiri (Rp)	35.146.505.339	39.986.291.391	43.567.601.878	46.255.521.000	48.055.094.000

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
5	Modal Luar (Rp)	38.909.707.203	36.933.732.577	32.997.713.250	33.295.190.000	33.169.494.000
6	Asset (Rp)	79.328.495.127	76.810.551.799	76.565.315.128	79.550.711.000	81.224.588.000
7	SHU (Rp)	4.393.942.021	3.314.674.427	4.137.934.098	4.510.185.000	4.427.901.000

Sumber : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan' 2020

Dilihat dari tabel diatas volume usaha pada tahun 2020 menurun drastis seiring dengan berkurangnya jumlah anggota koperasi yang mana di tahun 2020 berjumlah 8.775 orang dengan volume usaha Rp. 57.792.083,-, disebabkan adanya kebijakan Provinsi tetang cara penghitungan volume usaha. Perkembangan SHU juga tidak begitu baik di sebabkan adanya pandemi yang berdampak pada perkembangan usaha koperasi di Kota Sawahlunto. Selain permodalan yang tidak kalah penting adalah faktor sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengurus koperasi. Untuk itu fasilitasi Pemerintah Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha dinilai perlu ditempuh untuk mengoptimalkan potensi koperasi dan UKM yang telah ada. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Perkembangan koperasi sehat ini dari tahun 2016 – 202- dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Tabel 2. 136 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kota Sawahlunto Tahun 2016 dan 2020 (koperasi)

No	Kriteria Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020
1.	sehat (%)	19,75	23,53	23,53	11,76	14,71
2.	Cukup sehat (%)	33,33	41,17	42,65	39,70	32,35
3.	Kurang sehat (%)	3,70	4,41	0	4,41	10,29
4.	Belum dinilai (%)	13,58	19,12	16,17	4,41	5,88

Sumber : Profil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan' 2020

Penilaian kesehatan koperasi hanya untuk koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam sebanyak 49 koperasi dan telah melaksanakan RAT setiap tahunnya. Dari 43 koperasi yang melaksanakan RAT, 4 diantaranya tidak di nilai karena usahanya tidak bergerak dibidang simpan pinjam. Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa untuk koperasi sehat yang ada di kota Sawahlunto mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu berjumlah 10 koperasi. Kondisi koperasi secara keseluruhan yang ada di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 rata-rata masih dalam kondisi cukup sehat, ini berarti sangat perlu peningkatan pengawasan terhadap koperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi bahwa yang melaksanakan pengawasan koperasi ini adalah Walikota. Adapun sasaran dari pengawasan koperasi ini adalah:

- terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh;
- terwujudnya koperasi yang akuntabel

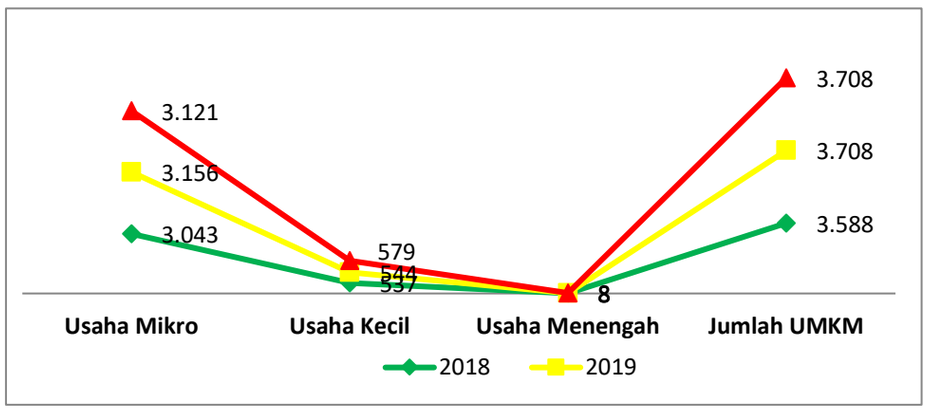
dengan ketiga sasaran dari pengawasan tersebut, maka akan tercipta koperasi yang sehat. Untuk itu sangat perlu peningkatan pengawasan untuk koperasi di Kota Sawahlunto dalam mewujudkan koperasi yang sehat.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto meningkatkan perekonomian rakyat yaitu dibentuknya UPTD Dana Bergulir yang kegiatannya menyalurkan dana bergulir untuk Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, dimana jasa pinjaman yang diberikan sangat kecil yaitu 3% per tahun.

Adapun sasaran penerima pinjaman yaitu pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan kriteria sebagai berikut: Aneka usaha produktif berupa : makanan, kerajinan tangan, perabot dll, Perdagangan, Peternakan dan perikanan, Pertanian, Usaha jasa, Koperasi simpan pinjam, koperasi produksi dan koperasi serba usaha. Total Pinjaman yang telah disalurkan kepada masyarakat sampai dengan akhir tahun 2020 sebanyak 1,5 M dg Jumlah penerima 93 orang yang mempunyai usaha di bidang Peternakan, Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Jasa dan Koperasi.

Perkembangan UMKM di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 25 Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Sawahlunto



Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ‘ 2020

Dilihat dari grafik diatas perkembangan UMKM dari usaha mikro ke usaha kecil mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ini terbukti dengan banyaknya program/kegiatan yang diarahkan untuk pembinaan dan fasilitasi terhadap Usaha Mikro yang ada. Sedangkan untuk yang memulai usaha baru juga meningkat dengan bertambahnya jumlah usaha mikro dari tahun 2018 sampai 2020. Giatnya pemerintah daerah dalam mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang berminat dalam melakukan usaha dan untuk menambah pendapatan masyarakat sehingga terciptalah usaha-usaha mikro yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2.12 Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan pembangunan bidang penanaman modal dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi di Kota Sawahlunto, melalui kebijakan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan peran kinerja dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Kota Sawahlunto. Keberhasilan tersebut dapat ditunjukkan melalui capaian realisasi investasi dibawah ini.

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Tabel 2. 137 Jumlah Perusahaan Yang Berinvestasi Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Perusahaan (PMDN/PMA) yang berinvestasi	185	168	158	19	11	

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dari data diatas dapat terlihat bahwa perkembangan jumlah perusahaan yang berusaha/berinvestasi di Kota Sawahlunto menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali. Hal ini disebabkan oleh mulai diberlakukannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) versi 1.1 pada tanggal 4 November 2019 pukul 00.00 WIB, yang menggantikan OSS versi 1.0 yang mulai aktif pada tanggal 21 Juni 2018. Yang mana perusahaan yang tidak melakukan migrasi data dari OSS versi 1.0 ke OSS versi 1.1 maka data-data perusahaannya tidak akan terbaca/tidak keluar/tidak tampil di OSS versi 1.1. Karena salah satu perbedaan mencolok antara OSS Versi 1.0 dengan OSS Versi 1.1 adalah nilai total investasi. Pada sistem OSS Versi 1.0 total investasi perusahaan dihitung per KBLI 2 digit sehingga pelaku usaha tidak mengisi nilai investasi dalam KBLI 5 digitnya. Sedangkan pada sistem OSS Versi 1.1, total investasi dihitung per KBLI 5 digit. Penggunaan KBLI 5 digit untuk menyesuaikan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) serta demi kepentingan penyusunan laporan realisasi investasi per bidang usaha KBLI 5 digit. Maka dari itu pada tahun 2019 hanya 19 perusahaan yang terbaca/melakukan migrasi data di sistem OSS versi 1.1 yang melakukan investasi di Kota Sawahlunto dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 11 perusahaan yang melakukan investasi di Kota Sawahlunto, hal ini juga disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia temasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi di Kota Sawahlunto sebagian besar adalah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan nilai investasinya dari tahun 2016 s/d 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh mulai menurunnya usaha pertambangan di Kota Sawahlunto dan kebijakan kota yang merubah perencanaan pembangunan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan peningkatan investasi pada tahun 2017 disebabkan oleh investasi pada sektor perumahan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 86,377 milyar, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 200.440 milyar, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu menjadi 28.276 milyar. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini mengakibatkan adanya pembatasan atau lockdown yang membuat aktivitas ekonomi terutama perdagangan terdampak dengan nilai kerugian yang tidak sedikit. Kegiatan ini mencakup semua aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pasokan bahan material yang berhubungan langsung dengan negara-negara episentrum Covid-19 yang salah satunya adalah RRT, baik ekspor maupun impor dan semua ini berdampak pada penurunan nilai investasi. Atau wabah Covid-19 telah memberikan dampak serius pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto. Pengaruh yang ditimbulkan tidak hanya pada satu bidang, namun hampir di seluruh aktivitas yang ada. Adanya berbagai pembatasan di suatu negara sudah tentu berimbas pada aktivitas ekonomi dan stabilitas termasuk investasi.

Tabel 2. 138 Data Nilai Investasi Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Alamat	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Tenaga Kerja

				(orang)
1	PT. Jojo Putra Prakarsa	Padang Selatan Kota Padang	1.000.000.000	2
2	Koperasi PT. PLN Sektor Ombilin	Desa Sijantang Koto Kec. Talawi	5.451.998.946	8
3	PT. Fikber Bangun Persada	Desa Kolok Nan Tuo Kec. Barangin	1.000.000.000	3
4	CV. Attha Argan	Dusun Tapian Nambar, Desa Talawi Mudik Kec. Talawi	500.000.000	2
5	PT. Zamzam Tri Pernata	Jln. Ratin Datuk Kuaso Kec. Talawi	4.000.000.000	1
6	PT. Bukit Multi Properti	Jln. Ahmad Yani Kel. Pasar Kec. L. Segar	4.000.000.000	20
7	PT. Swarna Bhumi Nusa Abadi	Jl. Yos Sudarso Lantai 2 Kel. Pasar Kec. Lembah Segar	4.000.000.000	4
8	Fanharli	Pasar Baru Durian Kel. Durian I Kec. Barangin	800.000.000	3
9	Yoga Sapratama	Desa Sijantang Koto Kec. Talawi	525.000.000	5
10	Ragef Yohendra	Parambahan Desa Salak Kec. Talawi	1.000.000.000	4
11	PT. Padang Raya Real Estate	Jl. Khatib Sulaiman Desa Santur	6.000.000.000	4
	Total		**28.276.998.946**	**45**

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Tabel 2. 139 Jumlah Realisasi Investasi di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Jenis	Tahun/Rp. Juta				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PMDN	376.648	587.975	86.377	200.440	28.276
2	PMA	-	-	-	-	-

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Target Indikator Kinerja Daerah Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tercapai karena persoalan internal dan eksternal. Kendala eksternal antara lain adalah : 1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, 2) kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang harus diproduksi, dan 3) kesulitan dana atau pembiayaan proyek. Sedangkan kendala internal diantaranya, yaitu : 1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional ataupun secara global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; dan 2) adanya peraturan yang tidak konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah, ataupun peraturan lainnya yang mendistorsi peraturan mengenai penanaman modal. Rekomendasi mendorong investasi di Kota Sawahlunto melalui pemberian insentif atau fasilitas investasi yang menarik, dan meningkatkan konsistensi peraturan tentang penanaman modal pada setiap jenjang pemerintahan perlu dilakukan.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya serap tenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Sawahlunto menunjukkan tren fluktuatif, baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupun penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing.

Di Kota Sawahlunto rasio penyerapan tenaga kerja mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun yang positif yaitu sebesar 17,76.

Tabel 2. 140 Jumlah Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata per Tahun (%)
1.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	4.577	2.928	3.841	3.673	2.638	-9,35
2.	Jumlah seluruh PMA/PMDN yang ada di Kota Sawahlunto	185	168	158	81	78	-16,89
3.	*Rasio Daya Serap Tenaga Kerja*	*25*	*17*	*24*	*45*	*34*	*17,76*

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

4. Jenis, Jumlah Bank Dan Cabang Serta Asuransi

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 141 Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2016-2020

No	Bank dan Asuransi	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1.	Jumlah Bank (unit)	8	9	9	15	15	
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	2	2	2	2	2	

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020 :
1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Sapan
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri
9. Bank BNI Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto
11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian
14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020 :
1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

2.4.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah. Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 142 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Alamat	Badan Hukum		Status	
			Ada	Belum	Aktif	Tidak
1.	HIPMI	Santur	V		V	
2.	AMPI	Ps. Remaja	V		V	
3.	Fatayat NU	Lb. Segar	V		V	
4.	Pemuda Muhammadiyah	Lb. Segar	V		V	
5.	BM PAN	Santur	V		V	
6.	Gema Kosgoro	Talawi	V		V	
7.	GM Kosgoro	Talawi	V		V	
8.	GP Anshor	Kec. Barangin	V		V	
9.	BKPRMI	Lb. Segar	V		V	
10.	Garda Keadilan	Lb. Segar	V		V	
11.	Nasyatul Assiyah	Lb. Segar	V		V	
12.	IPTI	Talawi	V		V	
13.	KNPI Sawahlunto	Kec. Barangin	V		V	
14.	KNPI Kec. Talawi	Talawi	V		V	
15.	KNPI Kec. Barangin	Kec. Barangin	V		V	
16.	KNPI Kec. Lembah Segar	Lb. Segar	V		V	
17.	KNPI Kec. Silungkang	Silungkang	V		V	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari 17 organisasi kepemudaan yang ada di Kota Sawahlunto tersebut secara keseluruhan aktif dan mempunyai badan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan.

Tabel 2. 143 Data Tentang Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Cabang/Sarana/Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cabang Olahraga	29	30	32	34	39
2.	Sarana Olahraga Standar	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Klub Olahraga	65	70	70	75	93
4.	Jumlah Gedung Olahraga	11	11	11	11	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari table diatas dapat dilihat terjadi peningkatan cabang olahraga dari 34 cabang olahraga menjadi 39 cabang olahraga, begitu juga dengan sarana olahraga standar tidak ada peningkatan dan pengurangan tetapi jumlah klub olahraga juga meningkat dari 75 menjadi 93 sedangkan jumlah gedung olahraga dari 11 buah menjadi 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga.

2.4.2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi kepemudaan dan olahraga adalah hal penting yang ada dalam suatu daerah. Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan sangat mendukung seluruh organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 144 Jumlah Organisasi Kepemudaan Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Nama Organisasi	Alamat	Badan Hukum		Status	
			Ada	Belum	Aktif	Tidak
1.	HIPMI	Santur	V		V	
2.	AMPI	Ps. Remaja	V		V	
3.	Fatayat NU	Lb. Segar	V		V	
4.	Pemuda Muhammadiyah	Lb. Segar	V		V	
5.	BM PAN	Santur	V		V	
6.	Gema Kosgoro	Talawi	V		V	
7.	GM Kosgoro	Talawi	V		V	
8.	GP Anshor	Kec. Barangin	V		V	
9.	BKPRMI	Lb. Segar	V		V	
10.	Garda Keadilan	Lb. Segar	V		V	
11.	Nasyatul Assiyah	Lb. Segar	V		V	
12.	IPTI	Talawi	V		V	
13.	KNPI Sawahlunto	Kec. Barangin	V		V	
14.	KNPI Kec. Talawi	Talawi	V		V	
15.	KNPI Kec. Barangin	Kec. Barangin	V		V	
16.	KNPI Kec. Lembah Segar	Lb. Segar	V		V	
17.	KNPI Kec. Silungkang	Silungkang	V		V	

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari 17 organisasi kepemudaan yang ada di Kota Sawahlunto tersebut secara keseluruhan aktif dan mempunyai badan hukum serta masing masing organisasi mempunyai kegiatan yang selalu mendukung untuk visi misi dan arah pembangunan Kota Sawahlunto 5 tahun kedepan.

Tabel 2. 145 Data Tentang Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020

No	Cabang/Sarana/Klub dan Gedung Olahraga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cabang Olahraga	29	30	32	34	39
2.	Sarana Olahraga Standar	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Klub Olahraga	65	70	70	75	93
4.	Jumlah Gedung Olahraga	11	11	11	11	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari table diatas dapat dilihat terjadi peningkatan cabang olahraga dari 34 cabang olahraga menjadi 39 cabang olahraga, begitu juga dengan sarana olahraga standar tidak ada peningkatan dan pengurangan tetapi jumlah klub olahraga juga meningkat dari 75 menjadi 93 sedangkan jumlah gedung olahraga dari 11 buah menjadi 0, ini disebabkan karena sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kota Sawahlunto tidak termasuk dalam kategori jenis gedung olahraga.

2.4.2.15 Urusan Statistik

Pada urusan pemerintahan bidang statistik secara umum sudah memenuhi indikator, yaitu melalui tersedianya Buku Sawahlunto Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Sawahlunto. Kedua Buku tersebut merupakan hasil kerja sama BPS dengan Pemerintah Kota Sawahlunto, hal ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dna Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dimana kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa OPD yang menangani statistik sektoral adalah sebagai walidata.

Tabel 2. 146 Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/ Bid. Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Buku Sawahlunto Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Sawahlunto	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian Statistik, Ekonomi dan Pembangunan SETDAKO

2.4.2.16 Urusan Persandian

Target dari pengamanan informasi pada urusan persandian berupa Tanda Tanga Elektronik (TTE) bagi Kepala OPD. Pada saat ini Tanda Tangan Elektronik (TTE) baru tersedia bagi OPD yang melaksanakan pelayanan publik, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk OPD lainnya di Kota Sawahlunto saat ini proses penggunaan Tanda Tangan Elaktronik (TTE) dalam penandatanganan dokumen masih dalam tahap pembentukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerjasama ini diharapkan dapat segera terbentuk sehingga kedepannya seluruh Kepala OPD dapat menggunakan Tanda Tangan Elaktronik (TTE) dalam setiap penandatangan dokumen.

2.4.2.17 Urusan Kebudayaan

1. Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Sawahlunto sebagai Kota yang memiliki keragaman seni dan budaya serta memiliki banyak seniman-seniman yang berpotensi dibidangnya. Sebagai Kota yang telah mendeklarasikan sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, Kota Sawahlunto sering menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan event-event di bidang seni dan budaya. Budaya-budaya yang ada berkembang menjadi kelompok-kelompok seni dan komunitas budaya. Komunitas budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu. Berikut ini data komunitas budaya yang ada dan berkembang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 147 Komunitas Budaya yang ada di Kota Sawahlunto

No	Nama Komunitas	Jumlah
1.	Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)	1
2.	Bundo Kandung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau	1
3.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	10
4.	Bundo Kandung Kerapat Adat nagari	10
5.	Paguyuban Jawa	1
6.	Paguyuban Batak	1

7.	Paguyuban Sunda	1
Total Komunitas Budaya		**25**

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Dari 25 komunitas budaya yang ada, 5 komunitas budaya yang telah aktif melaksanakan kegiatan, baik berupa acara adat dan tradisi maupun pagelaran seni dengan persentase sebesar 20%, sementara masih ada 20 komunitas budaya lagi yang belum aktif atau sebesar 80%, artinya masih banyak komunitas budaya yang belum mampu menggali dan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai dan seni budaya daerah yang akan menjadi karakter bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Kota Sawahlunto di samping memiliki kekayaan kesenian yang multietnis juga memiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto atau disebut WBTBOS, yang merupakan bukti dampak revolusi industri dunia Barat di wilayah Hindia Belanda. Walaupun operasi penambangan batu bara telah berhenti, namun jejak-jejak Kota tambang dengan segala tinggalannya masih terjaga dengan asri dan menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki Kota Sawahlunto.

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan lokal yang dimiliki.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah melakukan berbagai upaya agar bukti-bukti peninggalan tersebut tetap terawat dengan baik dan dilestarikan serta dengan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prisip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022. Sebagai komitmen, Pemerintah Daerah telah menetapkan Benda, Bangunan, Struktur dan Situs peninggalan tersebut sebagai Cagar Budaya. Adapun Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 148 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sarana Penyelenggaraan kesenian	Set	7	9	9	20	20
2.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Unit	68	69	69	73	83
3.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	Unit	74	119	119	130	144
4.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	Persen	91,89	57,98	57,98	56,15	57,63
5.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Unit	17	21	21	21	21
6.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	Unit	74	119	119	130	144
7.	Persentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola	Persen	22,97	17,65	17,65	16,15	14,58

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Dari 20 jumlah sarana penyelenggara kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat, dan dari 144 total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada terdapat 83 buah yang sudah dilstarikan serta dari 144 total jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada terdapat 21 buah yang sudah dikelola. Persentase jumlah benda cagar budaya, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 63,84%. Kalau dilihat dari data persentase tahun sebelumnya terjadi peningkatan, hal ini disebabkan karena jumlah benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya terjadi penambahan di tahun 2020, penambahan penetapan benda, bangunan, struktur dan situs serta kawasan cagar budaya sebanyak 14 cagar budaya, sehingga dari jumlah yang awalnya cuma 130 keseluruhan menjadi berjumlah 144.

Berdasarkan data di atas, dalam rangka pelestarian benda cagar budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata. Kota Sawahlunto tidak hanya melestarikan benda cagar budaya (tangible), tetapi juga akan melestarikan budaya tak benda (intangible). Untuk data awal, ada 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto sebagai Budaya Tak Benda (intangible). Berikut ini data warisan budaya tak benda (intangible) di Kota Sawahlunto berdasarkan Data Objek Pemajuan Kebudayaan.

Tabel 2. 149 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) di Kota Sawahlunto

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020
1.	Manuskrip	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	46	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40
4.	Ritus	12	12	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	27	19
7.	Seni	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2
	Total Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	**225**	**225**	**215**

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Dari tabel di atas, dapat di lihat total objek pemajuan kebudayaan (OPK)) yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun2018 dan 2019 berjumlah sebanyak 225 OPK sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengurangan menjadi 215 OPK yang disebabkan karena setelah dilakukan regestrasi/penelitian ulang yang dilakukan pada tahun 2020 ada beberapa kriteria yang tidak termasuk kedalam OPK, seperti Tradisi Lisan yang awalnya berjumlah 46 menjadi 43, begitu juga dengan Teknologi Tradisional yang awalnya 27 menjadi 19 sedangkan pada Ritus terjadi penambahan 1 buah, namun ada dua (2) buah warisan budaya tak benda (intangible) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) yaitu Songket Silungkang yang termasuk kedalam Pengetahuan Tradisional dan Bahasa Tangsi yang termasuk kedalam Bahasa. Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban menjaga dan mempertahankan serta melestarikannya sebagai warisan budaya tak benda agar dapat dilihat dan dirasakan oleh generasi yang akan datang.

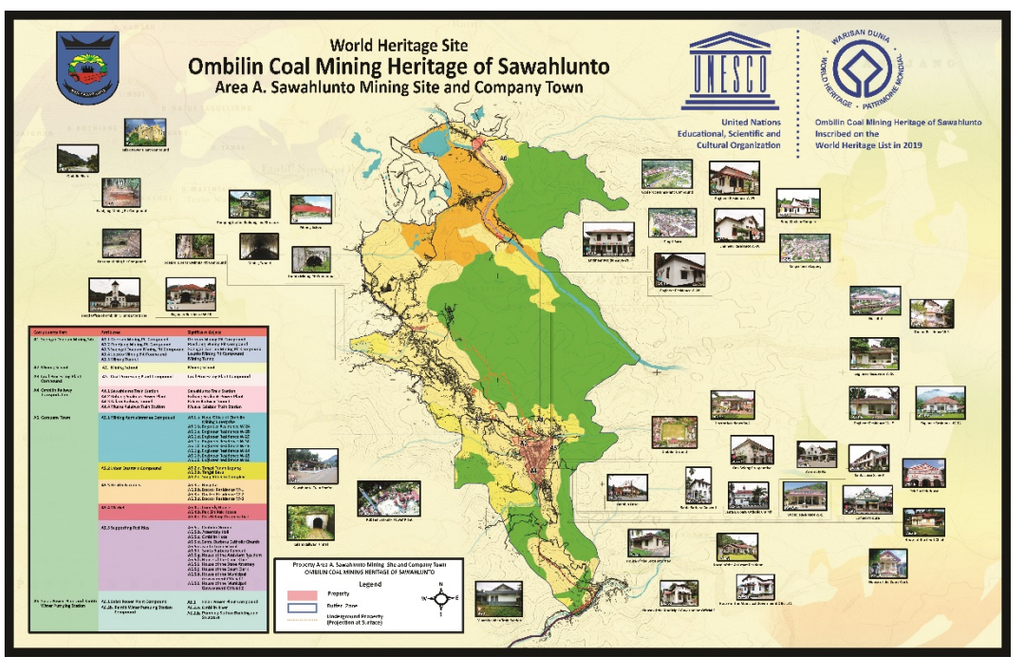
3. Penetapan Status Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) oleh UNESCO

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) adalah contoh representatif dan luar biasa dari kesatuan teknologi perintis yang direncanakan dan dibangun oleh insinyur Eropa di koloni mereka serta dirancang untuk mengekstraksi sumber daya batubara yang strategis. Properti ini tidak hanya memiliki nilai universal yang luar biasa karena menunjukkan perkembangan teknologi perintis, memadukan pengetahuan teknik Eropa dengan kearifan lingkungan lokal dan praktik-praktik tradisional dalam pengorganisasian tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan dampak mendalam dan berkelanjutan dari perubahan hubungan sosial dalam konteks produksi yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial Eropa di koloni mereka, dalam hal mensuplai material dan tenaga kerja guna menopang industrialisasi di seluruh dunia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20.

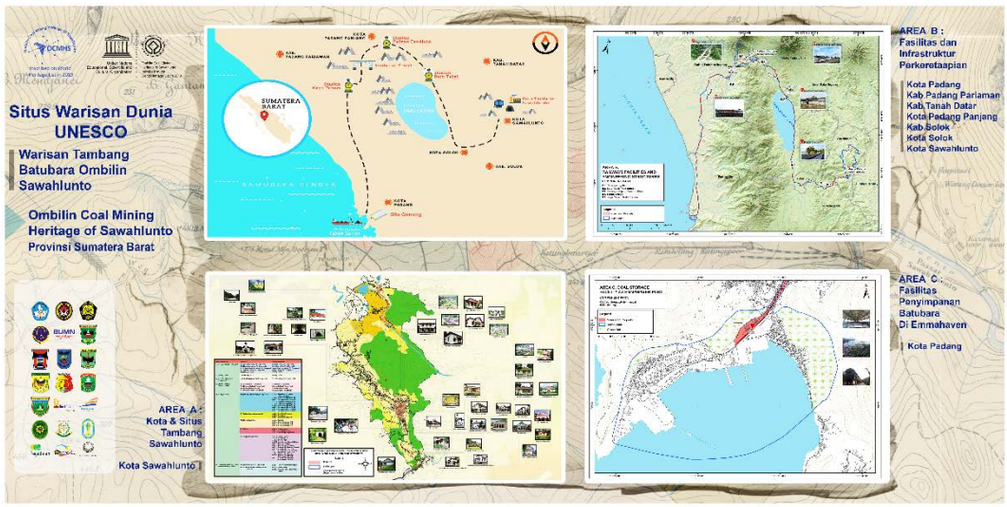
4. Pengelolaan

Merujuk pada dokumen rencana pengelolaan (management plan) situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto ini dikelola dengan 3 (tiga) tingkat, pertama tingkat kebijakan yang melibatkan 12 (dua belas) kementerian dibawah koordinasi sebagai Ketua Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Wakil Ketua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Solok, Bupati Tanah Datar, Bupati Padang Pariaman, Walikota Sawahlunto, Walikota Solok, Walikota Padang Panjang, dan Kota Padang. Kedua tingkat perencanaan dengan pengelola harian berada pada kantor pengelola situs, meskipun secara resmi belum terbentuk, dengan koordinasi dan konsultasi dengan unit pengelola teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Barat (Balai Pelestarian Cagar Budaya, dan Balai Pelestarian Nilai Budaya), pemilik aset objek signifikan, dan instansi terkait di provinsi, untuk dewan penasehat terdiri dari akademisi, ahli, dan komunitas, ketiga adalah tingkat operasional berada pada instansi teknis membidangi perencanaan, dan Kebudayaan di 7 (tujuh) kabupaten kota situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. Berikut Peta area OCMHS di Kota Sawahlunto.

Gambar 2. 11 Peta Area OCMHS di Kota Sawahlunto



Gambar 2. 12 Peta area situs Warisan dunia UNESCO di Sumatera Barat



5. Implementasi management plan dan catatan sidang komite warisan dunia

Implementasi rencana pengelolaan, rencana aksi dan melengkapi catatan sidang penetapan dilakukan secara paralel dengan kolaborasi BPCB sumatera barat dan pemerintah kota Sawahlunto serta pendampingan dari ICOMOS Indonesia. Dalam penyiapan berkas penetapan cagar budaya peringkat nasional untuk jaringan rel kereta api batubara dilakukan bersama dengan pendampingan dari kelompok kerja registrasi nasional direktorat pelindungan kebudayaan, penerapan analisa dampak cagar budaya (Heritage Impact Assesment) dan identifikasi keterawatan objek signifikan fasilitasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat didukung ahli yang berkompeten bidang pelestarian, pendokumentasian arsitektur signifikan objek bersama akademisi, penelitian, dan melakukan program pelestarian secara bertahap, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan adaptasi untuk fungsi baru. Pasca penetapan situs warisan dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto khususnya Sawahlunto memperlihatkan peningkatan jumlah kunjungan terutama wisatawan mancanegara dimana tercatat di imigrasi bandara internasional Minangkabau mencapai 500 orang sejak Juli hingga November 2019 dengan keterangan tujuan ke Sawahlunto. Kondisi ini sangat jauh berbeda sebelum status dunia ini, dimana sejak Januari hingga Juni 2019 tidak lebih dari 100 wisatawan mancanegara dengan tujuan Sawahlunto.

6. Jumlah Grup Kesenian

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Budaya merupakan kristalisasi nilai pola hidup yang dianut suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas dan karya-karya manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya

daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, dan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prisip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022 serta dengan masuknya Kota Sawahlunto sebagai "*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto"* (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) dalam Sidang Komite Warisan Dunia ke 43 di Baku, Azerbaijan tanggal 06 juli 2019.

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar.Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.28

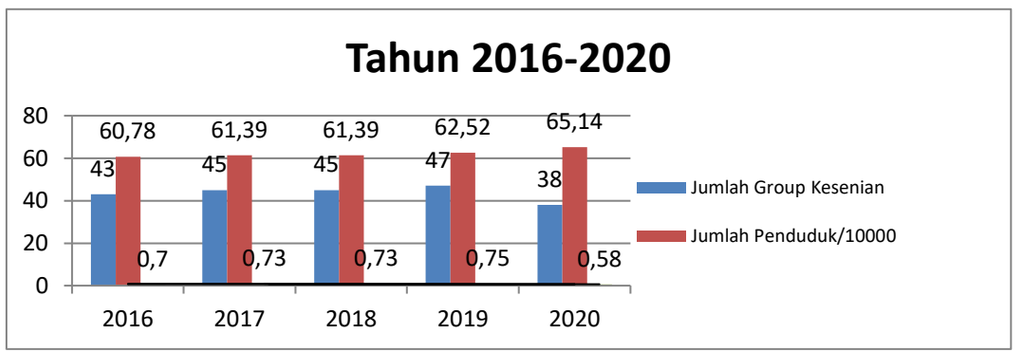
Tabel 2. 150 Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	43	45	45	47	38
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	**Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,70**	**0,73**	**0,73**	**0,75**	**0,58**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Jumlah Grup kesenian yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2016 berjumlah 43 grup kesenian, di tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 2 group sehingga menjadi 45 grup dan di tahun 2018 tidak ada penambahan tetapi tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 2 grup kesenian lagi, sehingga berjumlah sebanyak 47 grup, tetapi pada tahun 2020 terjadi pengurangan grup kesenian yang tadinya berjumlah 47 grup menjadi 38 grup, pengurangan ini disebabkan pasca pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya Refocusing Anggaran pada Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 38 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 10 group kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

Grafik 2. 26 Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto



Sumber: Hasil Olahan, 2020

7. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2. 151 Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	10	10	12	20
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	**Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk**	**Unit**	**0,16**	**0,16**	**0,16**	**0,19**	**0,30**

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat.

Namun secara kenyataanya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertujukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

8. Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karean disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya “Mak Itam”. Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu.

Tabel 2. 152 Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Museum Goedang Ransum	22.288	18.851	14.139	15.309	5.980
2	Lubang Tambang Mbah Soero	10.905	10.653	8.151	8.492	3.957
3	Museum Kereta Api	6.423	12.220	7.977	6.503	3.250
	Jumlah	**39.616**	**41.724**	**30.267**	**30.304**	**13.187**

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman, 2021

2.4.2.18 Urusan Perpustakaan

Salah satu upaya peningkatan kualitas SDM adalah melalui peningkatan wawasan ilmu pengetahuan dengan menumbuhkan minat baca ditengah masyarakat. Dari hasil pendataan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2020, Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Sawahlunto berada pada nilai 72,13. Ini artinya aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka, dan anggota perpustakaan yang ada di Sawahlunto berkategori tinggi. Serta nilai TGM (Tingkat Gemar Membaca Masyarakat) berada pada angka 50,2 dengan kategori sedang. Peningkatan koleksi judul dan jumlah buku terjadi setiap tahun dalam 5 tahun terakhir.
Beberapa indikator pada tabel dibawah menunjukkan peningkatan minat baca masyarakat Sawahlunto. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya Pandemi Covid-19, menyebabkan pembatasan aktivitas masyarakat keluar rumah dan mengurangi angka kunjungan masyarakat ke pustaka.

Tabel 2. 153 peningkatan minat baca masyarakat Sawahlunto. Namun pada tahun 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16814	17176	18832	19346	20029
2	jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	27944	28636	31549	32624	33674
3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8	8	8	11	12
4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun :					
	Pustaka : Daerah	54133	61922	61314	64500	26860
	Pustaka : SD/ MI	66294	66963	67639	68322	9627
	Pustaka : SMP / MTs	18671	18859	19049	19241	5399
	Pustaka : SMA/ SMK/ MA	16344	16509	16675	16843	7201
	Pustaka : Desa / Kelurahan	1395	1413	1433	1450	613
	Pustaka : Taman Bacaan Masyarakat	2990	3029	3064	3096	2830
5	Jumlah Pustaka : Daerah	2	2	2	2	2
6	Jumlah Pustaka : SD/ MI	68	68	68	68	68
7	Jumlah Pustaka : SMP / MTs	14	14	14	14	14
8	Jumlah Pustaka : SMA/ SMK/ MA	9	9	9	9	9

9	Jumlah Pustaka : Desa / Kelurahan	27	27	27	27	27
10	Jumlah Pustaka : Taman Bacaan Masyarakat	4	4	4	4	5

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto 2020

2.4.2.19 Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan belum secara maksimal dilaksanakan oleh setiap OPD. Hal ini disebabkan antara lain oleh :
- Belum konsistennya pelaksanaan penataan kearsipan.
- Ketersediaan ruang kearsipan yang belum kompatibel
- Minimnya jumlah SDM yang mampu mengelola kearsipan

Beberapa aset kearsipan yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 154 Aset kearsipan yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arsiparis, tenaga teknis yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	-
2	Jumlah depo arsip	1	1	1	1	1
3	Jumlah arsip Statis yang tersimpan di depo arsip	1493	1700	865	1956	4422

Sumber data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto 2020

2.4.3 URUSAN PILIHAN

2.4.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan kota Sawahlunto bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya karena kondisi geografis Kota Sawahlunto yang berada 250 – 785 meter ketinggian dari laut. Untuk produksi ikan darat dan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 155 Produksi dan Konsumsi Ikan Tahun 2016 s/d 2020

Ikan Darat	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Ikan darat (Ton)	214,70	214,98	216,05	217,26	206,27
Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	18	19,1	32,77	28,55	36,66

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan' 2020

Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ikan darat di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai 2020 untuk produksi mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak begitu signifikan. Namun tahun 2020 produksi ikan mengalami penurunan yaitu menjadi 206,27 ton. Namun dilihat dari jumlah konsumsi ikan tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tahun 2020 konsumsi ikan kota Sawahlunto adalah 36,66 kg/kapita/tahun. Adapun Nilai produksi ikan Budidaya berdasarkan jenis ikan yang ada di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 156 Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan di Kota Sawahlunto 2017 - 2020

No	Jenis Ikan	Nilai Produksi (ton)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Nila	55,56	67,60	65,22	61,33
2.	Mas	31,09	24,19	40,48	37,58
3.	Lele	80,82	87,08	50,86	48,17
4.	Gurami	2,10	3,41	7,63	10,51
5.	Patin	1,86	11,25	19,34	19,93

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan' 2020

Dilihat dari tabel diatas nilai produksi untuk perikanan budidaya untuk jenis ikan patin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ini dikarenakan adanya pasaran yang menampung untuk hasil produksi ikan patin ini dari luar daerah Kota Sawahlunto, sedangkan untuk ikan lele mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan harga lele yang murah dipasaran dan kurang mintanya masyarakat dalam melanjutkan budidaya ikan lele yang sudah ada. Selain ikan budidaya Kota Sawahlunto juga menghasilkan ikan tangkap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 157 Nilai Produksi Tangkap Menurut Jenis Ikan di Kota Sawahlunto 2017 - 2020

No	Jenis Ikan	Nilai Produksi (ton)			
		2017	2018	2019	2020
1.	Baung	4,33	2,13	3,35	3,23
2.	Nila	10,82	5,84	8,18	8,11
3.	Mas	8,65	3,29	4,19	4,06
4.	Lele	6,49	2,55	4,50	3,84
5.	Gurami	2,16	1,27	2,34	2,60
6.	Patin	4,33	1,88	3,08	2,89
7.	Ikan Lainnya	6,49	5,56	7,69	4,02

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan' 2020

Nilai produksi ikan tangkap di Kota Sawahlunto dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan pada jenis ikan Nila dan ikan gurame walaupun tidak begitu signifikan. Untuk ikan tangkap ini, dengan menyebarkan benih ikan pada sungai-sungai yang ada dan bisa untuk perkembangan ikan.

Dilihat dari kinerja produksi ikan tahun 2020 tidak begitu signifikan penurunannya. Adapun yang mempengaruhi produksi dari perikanan ini adalah kualitas dan kuantitas benih, luas lahan budidaya ikan serta kualitas dan kuantitas makanan ikan. Dalam memproduksi ikan di Kota Sawahlunto mempunyai budidaya perikanan darat kolam dan perikanan perairan umum (rawa, danau dan sungai), adapun perkembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 158 Luas Areal Budidaya Perikanan Darat (Ha)

Jenis	2016	2017	2018	2019	2020
Sungai/perairan umum	164,97	96	195,97	195,97	195,97
Kolam	58,20	52,77	62,621	62,62	39,02
Sawah	123	-	-	-	-
Total	**238,15**	**148,77**	**258,591**	**258,591**	**234,99**

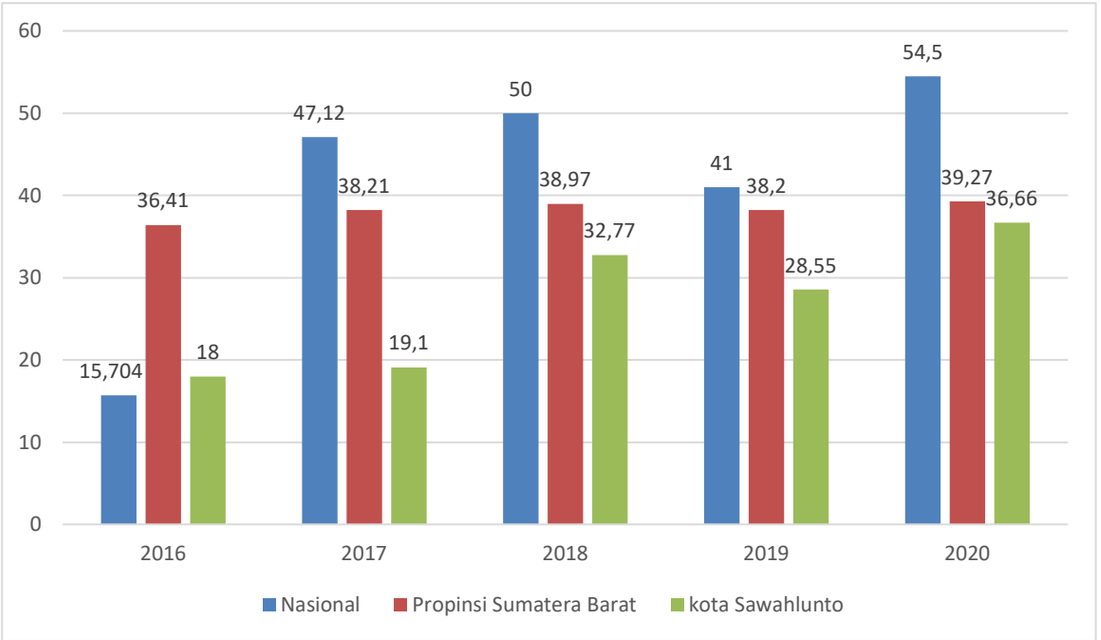
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan' 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa luas area budidaya perikanan menhgalami penurunan di tahun 2020 menjadi 234,99 hektar. Dilihat dari jenis areal budidaya perikanan yang mengalami penurunan adalah areal kolam menjadi 39,02 hektar. Menurunnya areal budidaya ini sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi ikan yang dihasilkan, untuk tahun 2020 untuk produksi ikan budidaya sungai/peraian umum adalah 28,76 ton dan untuk budidaya kolam menghasilkan

177,52 ton. Untuk itu sangat perlu di lakukan perluasan untuk budidaya perikanan di Kota Sawahlunto dalam meningkatkan produksi ikan. Upaya peningkatan luas areal budidaya perikanan darat diantaranya melalui salah satunya pelaksanaan fasilitasi pada kelompok tani untuk pembangunan kolam terpal dan permanen beserta bibit ikan yang diiringi pembinaan langsung dari penyuluh, selain itu juga memanfaatkan aliran sungai untuk budidaya ikan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mencukupi konsumsi masyarakat akan ikan.

Untuk perkembangan konsumsi ikan di Kota Sawahlunto dan perbandingan dengan propinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 27 Perbandingan konsumsi perkapita ikan tingkat Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 (Kg/kapita/tahun)



Sumber data : Data Profil Ketahanan Pangan

Dibandingkan dengan Rata-rata konsumsi ikan nasional dan rata-rata konsumsi propinsi Sumbar (termasuk ikan laut dan udang segar), rata-rata konsumsi ikan Kota Sawahlunto lebih rendah, namun untuk konsumsi ikan secara keseluruhan baik ikan darat maupun ikan laut kota Sawahlunto di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 36,66 kg/kapita/tahun. Ini berarti sosialisasi gemar makan ikan yang merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan konsumsi ikan di kota Sawahlunto sudah mambawa pengaruh terhadap konsumsi ikan di Kota Sawahlunto. Gemar makan ikan juga merupakan amanat dari kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Anak Indonesia Suka Makan Ikan, karena ikan sangat penting bagi pertumbuhan anak.

Selain itu juga perlu peningkatan untuk diversifikasi produk ikan dalam meningkatkan kemauan untuk mengkonsumsi ikan.

2.4.3.2 Urusan Urusan Bidang Pariwisata

1. Jumlah Kunjungan

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Pariwisata Kota Sawahlunto memiliki spesifik dibandingkan dengan pariwisata di kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Pariwisata Kota Sawahlunto selain memiliki wisata alam, wisata buatan dan wisata religius, juga memiliki wisata sejarah dengan icon Kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung dan bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Data kunjungan objek pariwisata di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 159 Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020 (Berdasarkan Tiket Masuk)

Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
Museum Gudang Ransum	22.287	19.619	14.143	15.309	5.959
Museum Kereta Api	6.423	12.220	7.964	6.503	3.246
Water Boom	114.003	93.446	76.274	68.709	23.024
Taman Satwa Kandi	110.289	89.927	66.166	57.715	15.894
Lubang Tambang Mbah Soero	10.965	10.653	8.663	8.492	3.932
Desa Wisata Rantih	4.513	2.171	5.619	5.599	2.822
Kelok 16	2.743	7.326	-	-	-
Puncak Cemara	101.149	65.227	52.079	44.627	21.682
Taman Buah	9.834	12.339	9.545	4.897	3.363
Camping Ground Kandi	7.300	18.555	18.578	9.611	9.627
Total	**389.506**	**331.483**	**260.214**	**235.524**	**95.995**

Sumber :
1. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung pada objek wisata berdasarkan tiket masuk pada masing-masing objek terjadi penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan bagi yang masih dibuka harus diterapkan protokol kesehatan yang ketat serta turunnya minat masyarakat untuk berkunjung ketempat wisata yang disebabkan ikut turunnya pendapatan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Camping Ground Kandi terjadi kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena adanya penambahan atraksi baru pada Camping Ground pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan akan berdampak terhadap jumlah pengunjung wisata di Kota Sawahlunto yang tentunya akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto, baik dari sisi industri pariwisata maupun kelembagaan pariwisata, adapun rincian kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 160 Jumlah Pengunjung Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

Pengunjung	2016	2017	2018	2019	2020
Wisatawan Mancanegara	-	-	360	403	7
Wisatawan Nusantara	389.506	331.483	259.854	235.121	95.988
Total	**389.506**	**331.483**	**260.214**	**235.524**	**95.995**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Kalau di lihat dari tabel di atas, jumlah pengunjung Wisatawan Mancanegara pada tahun 2018 cukup bagus sebanyak 360 orang yang berasal dari berbagai Negara, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 403 orang karena banyaknya kegiatan kegiatan yang bertaraf internasional seperti Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival dan Sawahlunto Internasional Musik Festival yang diadakan di Kota Sawahlunto, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 7 orang, penurunan ini disebabkan karena Kota Sawahlunto juga terdampak wabah covid-19 sehingga membuat objek objek tersebut ditutup dan kurangnya minat masyarakat untuk mengunjungi objek wisata yang disebabkan juga karena perekonomian masyarakat yang juga ikut terdampak karena wabah covid-19.

Ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022, Terkait dengan itu destinasi pariwisata sejak tahun 2016 s/d 2020 dapat disampaikan bahwa dari target 9 Destinasi pariwisata yang dikembangkan telah terealisasi sebanyak 3 destinasi baru, sedangkan objek wisata baru yang dibangun adalah kelok 16 dan batu runcing (geopark). Terkait keikutsertaan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan objek wisata baru terlihat dari gerakan PT.WWS yang mengelola Waterboom dan Bioskop 4 Dimensi.

Potensi objek wisata yang terdata sampai 2020 tercatat sebanyak 30 Geosite yang sudah termasuk kedalam Geopark Nasional.

Tabel 2. 161 Data Pengembangan Potensi/Destinasi Wisata (Geosite) Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Taman Satwa Kandi	Barangin	√		√	√	√	√	√
2	Camping Ground Wisata	Barangin	√		√	√	√	√	√
3	Taman Buah	Barangin	√		√	√	√	√	√
4	Batu Tanjung/Paralayang	Talawi	√		√	√	√	√	√
5	Hutan Kota	Talawi	√		√	√	√	√	√
6	Desa Wisata Rantih	Talawi	√		√	√	√	√	√
7	Makam M.Yamin	Talawi	√		√	√	√	√	√
8	Makam Syeh Kolok	Talawi	√		√	√	√	√	√
9	Kuburan Keramat	Talawi		√					
10	Waterboom	Silungkang	√		√	√	√	√	√
11	Goa Lakuak Kuali	Silungkang		√			√	√	√
12	Kawasan Tenun Silungkang	Silungkang	√		√	√	√	√	√
13	Kawasan Kota Lama	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
14	Museum Gudang Ransum	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
15	Lubang Tambang Mbah Soero	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
16	Museum Kereta Api	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
17	Kelok 16	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
18	Puncak Polan	Lembah Segar	√		√	√	√	√	√
19	Puncak Cemara	Barangin	√		√	√	√	√	√
20	Panorama Bukik Gadang	Talawi		√					
21	Panorama Guguk Bungo	Barangin		√					
22	Goa Slamet	Barangin		√					
23	Goa Bunian	Talawi		√					

No	Destinasi	Alamat/ Lokasi	Potensi Wisata		Objek Wisata Unggulan				
			Sudah Dikembangkan	Belum Dikembangkan	2016	2017	2018	2019	2020
24	Panorama Sundak Langik	Talawi		√					
25	Kawasan Kebun Serai Wangi	Barangin	√						
26	Wisata Batu Runcing	Silungkang		Rencana Pengembangan					
27	Wisata Batu Hitam	Lumindai		Rencana Pengembangan					
28	Danau Biru	Talawi		Rencana Pengembangan					
29	Goa Janjian	Talago gunuang						√	√
30	Puncak Sati	Saringan						√	√
	JUMLAH				**14**	**17**	**17**	**20**	**20**

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah objek wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 20 objek, dan 7 objek wisata yang belum dikembangkan dan 3 objek wisata dalam tahap rencana pengembangan. Untuk objek wisata yang sudah dikembangkan ada peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2. 162 Data Jenis Usaha Pariwisata di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Hotel					
	-Bintang 1	1	1	1	1	1
	-Bintang 2	1	1	1	1	1
	-Non Bintang/Melati	9	9	9	9	9
2	Usaha Perjalanan Wisata					
	-Agen Perjalanan Wisata	4	4	4	8	8
3	Jasa Transportasi (termasuk penyewaan kendaraan)	1	1	3	3	3
4	Usaha Pondok Wisata	50	50	50	50	50
5	Usaha Cafe	5	5	10	10	12
6	Rumah Makan	50	50	50	58	56
7	Toilet Umum Berfungsi dan Bersih	4	4	6	6	6
8	Usaha Karaoke	4	4	4	4	4
9	Usaha Kawasan Pariwisata	4	4	7	7	7
10	Usaha Jasa Informasi Pariwisata	1	1	1	1	1
11	Usaha Taman Rekreasi	2	2	3	3	3
12	Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif dan Pameran/Fasilitas Meeting (termasuk dalam hotel)	4	4	4	4	4
13	Usaha Pentas Pertunjukan Seni Terbuka	1	1	2	2	2
14	Usaha Lapangan Tenis	4	4	4	4	4
15	Usaha Sanggar Seni	42	42	43	43	43
16	Usaha Bumi Perkemahan	1	1	2	2	2
17	Usaha Pusat Penjualan Makan/Cinderamata	4	4	6	6	6

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa jenis usaha pariwisata dari tahun 2016-2020 tidak berkembang, hanya ada beberapa jenis usaha yang ada peningkatan namun tidak signifikan. Tapi Hal ini disebabkan karena terjadi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di samping itu Kota Sawahlunto merupakan kota wisata minat khusus, karena objek-objek wisata yang berada di kawasan kota lama merupakan bangunan tua peninggalan zaman kolonial Belanda, sehingga pengunjung umumnya memiliki minat khusus untuk melihat objek-objek bekas tambang tersebut.

Sementara itu, agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara objek-objek wisata yang berada di lokasi tempat tinggalnya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendorong pemberdayaan masyarakat, sehingga muncul berbagai lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada masing-masing objek wisata yang berkembang. Adapun data kelembagaan pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 163 Jumlah Kelembagaan Pariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Nama Pokdarwis/Lembaga Desa/Asosiasi Homestay	Tahun					Ket.
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Objek Wisata Muaro Kalaban	V					Aktif
2.	Meranti	V					Aktif
3.	Muaro Kalaban	V					Aktif
4.	Bukik Batu		V				Aktif
5.	Desa Silungkang Tigo		V				Aktif
6.	Kampung Hijau dan Seni		V				Aktif
7.	Batu Ponjong Dusun Sionsek			V			Aktif
8.	Objek Wisata Batu Runcing			V			Aktif
9.	Lembah Sajonang				V		Aktif
10.	Silungkang Oso					V	Aktif
11.	Puncak Sati						Aktif
12.	Lunto Barat						Aktif
13.	Gudang Ransum						Aktif
14.	Lunto Timur						Aktif
15.	Lembaga Desa Wisata Rantih						Aktif
16.	Desa Kolok Nan Tuo						Aktif
17.	Asosiasi Homestay		V				Aktif

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari tahun 2014 sampai tahun 2015, jumlah kelembagaan yang ada dan berkembang di Kota Sawahlunto hanya 2 (dua) lembaga yang aktif, namun tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan jumlah kelembagaan pariwisata atau kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di masing-masing desa, karena masyarakat mengakui dengan adanya objek wisata yang berada di lokasi desanya, yang dikembangkan menjadi objek wisata yang nantinya akan mendatangkan wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut, tentu akan berdampak terhadap pendapatan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Sehingga banyak bermunculan penginapan penginapan rumahan seperti Homestay dan juga ada beberapa hotel dan wisma yang telah terlebih dahulu berdiri seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 164 Daftar Kunjungan Hotel, Wisma, Homestay Dari Tahun 2016 Sampai 2020

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2016		2017		2018		2019		2020		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
1.	HOTEL OMBILIN	1000	12	1757	31	1700	25	0	0	0	0	
2.	WISMA W 39	700	0	750	2	725	3	222	0	0	0	
3.	WISMA MUTIARA	800	0	850	4	800	7	254	0	0	0	
4.	WISMA CAHAYA	700	0	750	5	51	5	53	0	0	0	
5.	HOTEL PARAI	1000	21	2572	22	4915	47	4.292	119	0	0	
6.	WISMA ANUGRAH	800	2	1000	1	250	0	110	0	0	0	
7.	WISMA AGRA II	600	4	900	0	661	0	216	0	0	0	
8.	HOTEL LAURA	500	8	400	0	0	0	0	0	0	0	
9.	WISMA BDBT	500	3	700	0	740	0	421	0	0	0	
10.	HOMESTAY OMA	1002	50	1069	45	1163	28	1.539	26	366	0	
11.	HOMESTAY BUNGA	143	0	12	0	166	0	265	0	0	0	
12.	DARA KEMBAR	121	0	23	0	6	0	9	1	10	0	
13.	HOMESTAY AILA	123	0	21	0	239	0	290	0	13	0	
14.	HOMESTAY BALQIS	153	0	13	0	422	6	430	0	0	0	
15.	HOMESTAY KATE	125	0	34	0	41	0	70	3	0	0	
16.	HILLSIDE HOMESTAY	214	0	12	0	85	0	112	0	0	0	
17.	CENDANA HOMESTAY	243	23	45	23	236	3	355	0	0	0	
18.	TERATAI HOMESTAY	124	0	31	0	133	0	154	0	0	0	
19.	ALIYAR HOMESTAY	153	0	23	0	42	0	22	0	0	0	
20.	IKHSAN HOMESTAY	173	0	12	0	34	0	43	0	0	0	
21.	AYAH SAKI HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	
22.	KASIH IBU	135	0	43	0	73	0	81	0	56	0	
23.	BUNDA HOMESTAY	127	0	2	0	0	0	25	0	0	0	
24.	VYRA HOMESTAY	163	0	5	0	53	0	84	0	0	0	
25.	UKHTY HOMESTAY	131	0	8	0	32	0	56	0	3	0	
26.	HARISHA HOMESTAAY	163	0	5	0	60	0	64	0	130	0	
27.	MAIMUN HOMESTAY	136	0	7	0	10	0	15	0	0	0	
28.	MEUTYA HOMESTAY	434	0	23	0	332	2	501	0	39	0	
29.	DWI TANIYA HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0	

No	Nama Hotel/Wisma/Homestay	Tahun										Ket.
		2016		2017		2018		2019		2020		
		D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	
30.	ALIMAR HOMESTAY	215	0	7	0	2	0	8	0	0	0	
31.	PAUSIL HOMESTAY	135	0	4	0	0	0	32	0	19	0	
32.	J- CHI HOMESTAY	124	0	3	0	0	0	15	0	0	0	
33.	TAPIAN TITI HOMESTAY	163	0	10	0	35	0	20	0	0	0	
34.	ELVI SUMANTI HOMESTAY	174	0	4	4	2	0	55	0	36	0	
35.	ASMILDA HOMESTAY	152	0	8	2	2	0	34	0	0	0	
36.	GUSPRIADI HOMESTAY	163	0	0	0	0	0	135	0	11	0	
37.	IDA LENI HOMESTAY	135	0	0	0	0	0	55	0	30	0	
38.	SANUSI RASYID HOMESTAY	156	0	11	6	0	0	71	0	13	0	
39.	KITO HOMESTAY	141	0	8	0	0	0	28	2	0	0	
40.	ERWATI SAID HOMESTAY	135	0	5	0	0	0	87	0	0	0	
41.	SURAU LAKUAK HOMESTAY	17	0	7	0	0	0	8	0	0	0	
42.	RAMLI HOMESTAY	194	0	4	1	0	0	56	0	39	0	
43.	ERITA HOMESTAY	174	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
44.	YUNIWARI HOMESTAY	174	0	0	5	2	0	35	0	0	0	
45.	HASNIL MISBAH HOMESTAY	133	0	0	0	0	0	23	0	0	0	
46.	TIBARAU HOMESTAY	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47.	KAJATAN	111	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
48.	SAWAH PULAU HOMESTAY	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49.	ARITA HOMESTAY	0	0	0	0	32	0	39	0	28	0	
50.	IDA MANCA HOMESTAY	0	0	0	0	0	0	37	0	38	0	
JUMLAH		**13125**	**123**	**11138**	**152**	**13044**	**126**	**10461**	**151**	**840**	**0**	
TOTAL		**13248**		**11290**		**13170**		**10612**		**840**		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, 2020

Dari 50 penginapan yang ada di Kota Sawahlunto tersebut secara keseluruhan aktif dan mempunyai tingkat kunjungan yang bagus tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat tinggi, ini diakibatkan oleh rendahnya minat wisatawan karena dampak wabah covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat menjadi melemah. Dan pembatasan pembatasan masyarakat yang membuat pergerakan masyarakat menjadi tidak leluasa seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat masyarakat lebih cenderung tidak keluar rumah.

2. PAD Sektor Pariwisata

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata selama ini ditinjau dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan bagian laba hotel parai. Dari Tahun 2016-2020 PAD sektor pariwisata mengalami fluktuasi, dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 165 Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	NAMA PENDAPATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pajak Hotel	135.881.333	142.353.702	164.733.362	94.965.756	47.335.931
2	Pajak Restoran	524.826.887	640.309.687	638.615.093	532.945.719	477.464.758
3	Pajak Hiburan	422.777.300	462.892.300	394.309.900	109.485.500	1.650.000
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	186.125.000	227.593.000	411.150.000	682.737.000	516.801.000
5	PT.WWS	0	0	0	0	0
6	Bagian Laba Hotel Parai	12.206.267	0	0	0	0
	PAD Sektor Pariwisata	1.281.816.787	1.473.148.689	1.608.808.355	1.420.133.975	1.043.251.689
	Total PAD	52.268.500.528,19	53.399.735.599,54	62.406.850.149,37	57.171.093.865,09	59.537.385.897,66
	Persentase PAD Sektor Pariwisata	**2,452**	**2,759**	**2,578**	**2,484**	**1,752**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto, 2020

2.4.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan pertanian meliputi Tanaman pangan, Tanaman hortikultura, Tanaman perkebunan, Peternakan dan Jasa pertanian. Salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu wilayah terhadap sektor pertanian dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. PDRB sektor pertanian ini menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menc iptakan nilai tambah untuk lapangan usaha pertanian. Adapun perkembangan PDRB sektor pertanian dan kontribusinya terhadap PDRB Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 166 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

KONTRIBUSI	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar)	292,80	303,12	312,07	325,56	326,224
Total PDRB (Milyar)	2.937,95	3.165,21	3.404,518	3.679,764	3.656,585
Kontribusi (%)	**9,97**	**9,58**	**9,16**	**8,84**	**8,92**

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2021

Dilihat dari tabel diatas Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cendrung mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir namun tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan, namun secara nilai PDRB sektor pertanian di tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya, ini berarti tetap terjadi penambahan nilai di sektor pertanian walaupun pengaruh terhadap PDRB kota menurun, dimana sektor pertanian menjadi urutan ke-5 dalam kontribusi terhadap PDRB kota. Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menurun jauh dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2. 28 Pertumbuhan sektor pertanian Tahun 2016 -2020 (persen)



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021

Dari grafik diatas tergambar bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan sektor pertanian jauh menurun tetapi masih berada diatas nol, ini dikarenakan pengaruh dari masa pandemic ini sehingga beberapa kegiatan-kegiatan yang mendukung sektor pertanian tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mendukung nilai tambah ekonomi Kota Sawahlunto. Ini terlihat pada realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan ada yang melampaui target yang direncanakan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 167 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	target	realisasi
1.	Produktifitas panen padi (ton/ha)	4,80	5,16
2.	Produktifitas panen karet (ton/ha)	1,265	1,27
3.	Produktifitas panen kakao (ton/ha)	1,08	1,14
4.	Persentase Daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) (%)	100	100
5.	Produktifitas Kolam Budidaya (kg/m2)	0,33	0,53
6.	Index Penanaman (IP)	2,25	2,07
7.	Petani dan Petugas yang berprestasi	7	10
8.	Score Aktual Pola Pangan Harapan (PPH)	86,4	83,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dari tabel diatas ada beberapa yang perlu menjadi perhatian untuk kedepannya seperti PPH, indeks penanaman dan perkebunan. Untuk itu perlu peningkatan pelaksanaan program/kegiatan kedepannya untuk peningkatan PPH dan indeks penanaman atau bahkan menambah program/kegiatan yang sangat mendukung untuk peningkatan indikaor kinerja tersebut.

Untuk tanaman pangan ini diwakilkan pada perkembangan tanaman padi yang merupakan bahan pangan utama di Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 168 Produkfitas Padi Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman padi GKG (Ton)	15.055	14.274	16.108	17.926	17.874,45
Luas panen (ha)	2.985,9	2.650,2	3.433,46	3.476	3.461,84
Produktifitas (ton/ha)	5,04	5,38	4,69	5,16	5,16

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan '2021

Dilihat dari tabel di atas perkembangan produksi dan produktifitas tanaman padi di Kota Sawahlunto pada tahun 2016-2019 rata-rata mengalami peningkatan, namun tahun 2020 sedikit terjadi penurunan dikarenakan menurunnya luas panen, namun tidak mempengaruhi produktifitasnya. Selain luas panen, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman padi adalah kuantitas dan kualitas benih, pemeliharaan (pupuk, pengendalian hama, dan lainnya), alsintan, sarana dan prasarana produksi. Untuk pengolahan lahan dengan sampai tahun 2020 rasio perbandingan handtraktor dan lahan adalah 1:15,1 ini berarti 1 handtraktor dapat menyelesaikan 15,1 ha lahan sawah untuk jumlah lahan yang dialiri jaringan irigasi tersier 99,83 ha masih sama dengan tahun 2019 karena recofusing untuk dana covid 19 ini, tahun 2020 anggaran untuk pembangunan jaringan irigasi ditiadakan. Adapun perkembangan luas sawah menurut jenis pengairan dari tahun 2016 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 169 Luas Sawah Menurut Jenis Pengairan Tahun 2016-2020

No	Jenis Pengairan	tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Irigasi sederhana (ha)	0	762	762	762	738,5
2.	Sawah Tadah Hujan (ha)	918	918	918	918	941,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan '2021

Dari tabel diatas Tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap sawah tadah hujan dan penurunan terhadap jumlah sawah yang beririgasi sederhana, ini disebabkan karena tahun 2019 dimulai penghitungan secara detail

mengenai luas sawah yang ada di Kota Sawahlunto dalam dokumen LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sehingga didapat data untuk tahun 2020 sepertoi diatas, selain itu juga recofusing anggaran untuk covid ini menyebabkan pengurangan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi sederhana di Kota Sawahlunto.

Sedangkan dari segi kapasitas petani juga masih sama dengan tahun 2019 terdapat 19 kelompok tani yang naik kelas dan kelompok tani yang meningkat pengetahuannya 263 kelompok tani dengan alasan yang sama. Dengan keadaan tahun 2020 beberapa kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi padi tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi produksi padi yang dihasilkan tahun 2020. Untuk itu diharapkan tahun ke depannya kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejanhteraan masyarakat lebih diutamakan dari kegiatan lainnya, apalagi masa pandemic ini yang bisa berakibat terhadap kehidupan masyarakat terutama petani.

Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan. Tanaman perkebunan yang dominan di Kota Sawahlunto adalah tanaman karet dan kakao. Perkebunan karet dan kakao menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kota Sawahlunto terutama pada daerah yang tidak mempunyai lahan persawahan.

1. Perkebunan karet

Karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk itu Perkembangan perkebunan karet di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 170 Produktivitas Tanaman Perkebunan Karet Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas areal tanam (ha)	2.471,52	2.457,11	2.451.86	2.446,23	2.420,23
Produksi (ton)	960,502	1.240,85	1.262,63	1.540,16	2.012,87
Produktivitas (ton/ha)	1,03	1,25	1,26	1,28	1,28

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka '2021

Dapat dilihat perkembangan perkebunan karet dari Tahun 2016-2020 relatif mengalami peningkatan baik produksi maupun produktifitas. Namun pada tahun 2020 produksi 2.012,87 ton dari luas tanaman yang menghasilkan 1.575,26 ha. Secara keseluruhan luas areal tanam mengalami penurunan yang tidak begitu signifikan yang mana berbanding terbalik dengan jumlah produksi setiap tahunnya. Dari luas areal tanam karet yang ada, perlu revitalisasi terhadap tanaman karet dalam menambah luas area tanam untuk karet. Tahun 2020 di dapat 670,48 ha tanaman yang belum menghasilkan, sehingga perlu perhatian lebih dimulai dari pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit. Pada pemeliharaan ini sangat diperlukan perhatian dari penyuluh pertanian dalam membimbing petani dalam rangka meningkatkan produksi tanaman karet. Selain itu secara teknis yang mempengaruhi produktivitas karet adalah mutu bahan tanam (benih), pemeliharaan tanaman, proses panen.

2. Perkebunan Kakao

Selain tanaman karet, tanaman kakao juga merupakan salah satu tanaman perkebunan yang utama di Kota Sawahlunto. Perkebunan kakao yang ada masih perkebunan rakyat, adapun perkembangan perkebunan kakao dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 171 Produktivitas Tanaman Perkebunan Kakao Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas areal tanam (ha)	601,40	596,35	597,52	596,22	550,46
Produksi (ton)	468,626	519,74	542,01	565,73	566,11
Produktivitas (ton/ha)	0,95	1,02	1,02	1,08	1,14

Sumber : SDA Kota Sawahlunto '2021

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan tanaman kakao dari Tahun 2016-2020, dari luas areal tanam untuk perkebunan kakao di Kota Sawahlunto cenderung mengalami penurunan, namun untuk produksi dan produktifitas tanaman kakao terus mengalami peningkatan. Program revitalisasi tanaman kakao dengan melakukan sambung pucuk dan sambung samping serta memberikan bantuan pupuk kepada petani kakao dengan total 6183 kg pupuk untuk 12.366 batang kakao. Revitalisasi dan optimalisasi terhadapan tanaman kakao sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi kakao, selain itu gerakan Masyarakat (Germas) untuk pemangkasan dan pemupukan dilaksanakan di empat kecamatan dalam mendukung produksi tanaman kakao. Untuk memberi kemudahan kepada petani dalam masa pandemic ini maka di launchinglah toko tani online yang dapat membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan dalam bertani. Upaya peningkatan produksi dan produktifitas masih perlu dilakukan, karena idealnya produktivitas kakao antara 1,5 – 2 ton/ha, meskipun secara target sudah melebihi target yang ditetapkan. Ini berarti produktivitas kakao Sawahlunto masih jauh dari standar, untuk itu sangat perlu perhatian pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kakao ini.

Pembangunan sub sektor peternakan menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan nilai tambah bagi pendapatan petani ternak di Kota Sawahlunto. Adapun yang menjadi target dari sektor peternakan adalah produksi daging dan produksi telur. Adapun perkembangan produksi daging seperti pada grafik di bawah ini :

Tabel 2. 172 Perkembangan populasi (ekor) dan produksi daging (kg) dari Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kambing					
	Populasi (ekor)	3.132	2.941	2.943	3.137	2.091
	Produksi Daging (kg)	5.358	13.706	13.205,5	11.700	12.500
2.	Sapi					
	Populasi (ekor)	5.629	6.049	6.464	6.705	5.679
	Produksi Daging (kg)	391.182,15	332.695,35	350.686,88	336.987	334.530
3.	Kerbau					
	Populasi (ekor)	1.184	1.261	1.363	1.420	1.033
	Produksi Daging (kg)	1.773,36	1.693,04	1.015,67	17.136,68	13.015,2

Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka'2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari ternak kerbau dan sapi mengalami penurunan dilihat dari populasi dan produksi daging yang dihasilkan di tahun 2020 kecuali pada ternak kambing yang mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Meningkatkan populasi ternak kambing

karena Pemerintah daerah tahun 2019 dan 2020 sudah merealisasikan pemberian bantuan ternak kambing yang mana tahun 2019 terealisasi untuk 20 Kepala Keluarga (KK) dan tahun 2020 terealisasi untuk 80 KK yang mana masing-masing KK mendapat 3 ekor kambing. Namun dalam pelaksanaannya sangat diperlukan bimbingan dan binaan dari OPD teknis yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan melalui penyuluh pertanian yang ada di Desa/Kelurahan setempat. Pada ternak sapi untuk meningkatkan populasi telah dilaksanakan kegiatan pengembangan Inseminasi Buatan (IB) yang mana pada tahun 2020 dengan realisasi jumlah kelahiran sapi dari IB 315 ekor yang tersebar di empat kecamatan di Kota Sawahlunto. Dilihat dari tingkat keberhasilan IB ini sangat perlu perhatian lebih dalam penanganan IB di Kota Sawahlunto untuk mendukung peningkatan populasi ternak sapi di Kota Sawahlunto.

Selain ternak sapi, kerbau dan kambing di Kota Sawahlunto juga ada produksi daging dan telur unggas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Kota Sawahlunto. Adapun perkembangan populasi dan produksi daging ternak dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 2. 173 Perkembangan ternak unggas populasi ternak (ekor) produksi daging (kg) Tahun 2016-2020

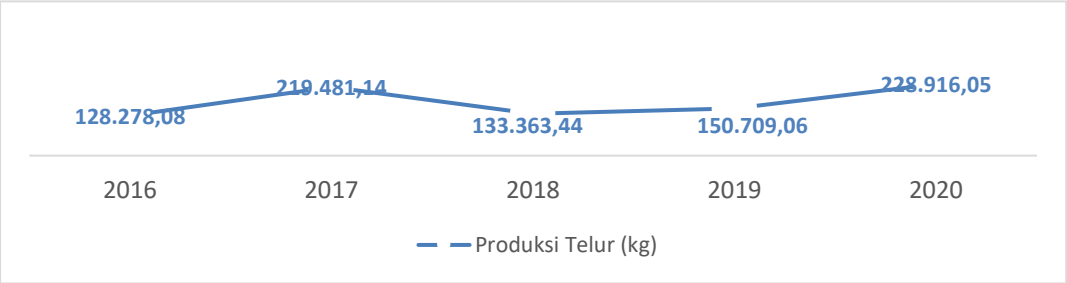
No	Jenis Ternak	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ayam Buras					
	Populasi (ekor)	37.654	34.429	39.176	46.033	47.065
	Produksi Daging (kg)	40.383,91	39.174,2	41.801,76	45.227,87	50.789
2.	Ayam Ras Pedaging					
S	Populasi (ekor)	1.445.000	1.053.894	1.059.600	177.200	155.386
u	Produksi Daging (kg)	6.938.167,5	5.060.272,04	847.944,9	849.589,42	825.370
m	Daging Ayam Ras					
b	Populasi (ekor)	13.679	21.065	15.794	17.869	23.048
e	Produksi Daging (kg)	5.640,94	8.689,31	6.515,03	6.848,12	9,410
r	Itik					
d	Populasi (ekor)	5.590	4.170	3.628	7.440	18.654
a	Produksi Daging (kg)	2.305,87	1.718,48	1.496,55	2.479.75	5.780
t						
a						
.						
S						
u						
m						
b						

sumber : Sawahlunto Dalam Angka'2021

Dilihat dari tabel diatas perkembangan ternak unggas di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020, untuk ayam buras dan itik tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah populasi maupun produksi daging, ini disebabkan karena adanya program dari pemerintah daerah bantuan ternak ayam dan itik untuk keluarga yang kurang mampu melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, yang mana tahun 2019 ternak ayam untuk 40 Kepala Keluarga (KK) yang mana satu KK mendapat 20 ekor ayam, sedangkan itik dibagikan untuk 60 KK yang mana satu KK mendapat 20 ekor itik. Tahun 2020 dibagikan bantuan ayam 800 ekor untuk 40 KK dan itik sebanyak 1200 ekor untuk 60KK. ayang mana satu KK mendapat 20 ekor ayam, sedangkan itik dibagikan untuk 60 KK yang mana satu KK mendapat 20 ekor itik. Ternak yang dibagikan disertai dengan makanan ternak. Dalam pemeliharaan masyarakat mendapat bimbingan dari penyuluh peternakan

yang ada di desa/kelurahan. Karena besarnya peranan peyuluh, maka Dinas sudah menyediakan kegiatan untuk peningkatan SDM penyuluh melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Selain produksi daging, unggas juga menghasilkan telur, adapun perkembangan produksi telur di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 2. 29 Perkembangan produksi telur ternak unggas (kg) Tahun 2016-2020



Sumber data : Sawahlunto Dalam Angka' 2021

Dari tahun 2016-2020 untuk produksi telur unggas rata-rata mengalami peningkatan yang tidak begitu signifikan. Telur merupakan salah satu bahan pangan yang mengandung protein hewani yang cukup tinggi yaitu sebesar 13 – 14 persen sehingga kebutuhan akan telur cukup tinggi dimasyarakat, sehingga telur merupakan suatu komoditas yang penting untuk dikembangkan. Adapun populasi peternak telur di Kota Sawahlunto rata-rata berasal dari pelaku usaha komanditer dan hanya sebagian kecil yang merupakan usaha peternakan peseorangan/mandiri. Tahun 2020 produksi telur unggas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, untuk itu sangat perlu pendampingan dari dinas teknis dalam pemeliharaan unggas petelur ini, dan mendorong masyarakat untuk berusaha telur unggas, karena usaha telur ini sangat menjanjikan untuk menambah pendapatan masyarakat. Sosialisasi dan pendampingan budidaya telur unggas sangat penting dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan masyarakat untuk menjadi petani telur unggas.

2.4.3.4 Urusan Bidang Perdaganggan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat berpengaruh terhadap, aktivitas perekonomian di Kota Sawahlunto. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Sawahlunto sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal dan mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB sektor perdagangan, besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB di Kota Sawahlunto sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. 174 Kontribusi Sektor Perdagangan, Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

KONTRIBUSI	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah)	435,56	468,02	510,54	553,97	547,822
Total PDRB (Milyar Rupiah)	2937,95	3165,21	3405,16	3679,76	3656,585
Kontribusi (%)	14,83	14,79	14,99	15,05	14,98

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka '2021

Pandemi covid yang terjadi selama tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi khususnya sektor perdagangan, karena PDRB sektor perdagangan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha

perdagangan dalam suatu wilayah. Pengaruh pandemic ini terlihat pada penurunan nilai PDRB secara umum dan nilai PDRB sektor perdagangan khususnya. Dari Tahun 2016-2020 kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB kota Sawahlunto. Untuk tahun 2020 kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 15,98 persen dengan nilai rupiahnya Rp. 547,822 milyar. Menurunnya sektor perdagangan ini seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat kota Sawahlunto yang mana pada tahun 2020 adalah 10,183 juta rupiah. Salah satu penyebab dari turunnya daya beli masyarakat ini karena pengaruh masa pandemic covid ini, dimana masyarakat terbatas untuk keluar rumah sehingga mempengaruhi jual beli di pasar-pasar yang ada, selain itu juga pada masa pandemic ini pengaruh pasar online juga menjadi salah satu alternatif yang sangat disukai konsumen dalam transaksi jula beli. Daya beli di pasar-pasar tradisional di Kota Sawahlunto ini didukung oleh penataan (delapan) pasar tradisional dan pembangunan pasar songket Silungkang yang dapat meningkatkan pangsa pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang mana pasar merupakan tempat aktivitas perekonomian di kota Sawahlunto. Selain itu Kota Sawahlunto juga mempunyai 12 mini market dan 1.523 toko/warung/kios yang juga mempengaruhi proses perdagangan di Kota Sawahlunto. Untuk itu dapat dilihat perkembangan jumlah pedagang pasar yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel 2. 175 Jumlah Pedagang Pasar Tetap Di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Nama Pasar	Pedagang Yang Menempati Kedai (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasar Sawahlunto	779	779	779	779	779
2.	Pasar Silungkang	72	72	72	72	72
3.	Pasar Talawi	140	140	140	140	140
4.	Pasar Sapan	50	50	50	50	50
5.	Pasar Tak Bancah	3	3	3	3	3
6.	Pasar Tumpuak Tangah	0	0	0	0	0
7.	Pasar Lumindai	30	30	30	30	30
8.	Pasar Kolok Mudik	10	10	10	10	10
9.	Pasar Songket		75	75	0	0

Sumber : Dinas Koperindag Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas jumlah pedagang tetap yang ada di setiap pasar yang ada di Kota Sawahlunto tidak mengalami pertambahan kecuali di Pasar Sawahlunto dan Pasar sapan yang mana pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penambahan, ini seiring dengan peningkatan penataan pasar yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017. Dengan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan usaha perdagangan di Kota Sawahlunto. Selain pedagang tetap, yang berpengaruh terhadap jual beli di pasar adalah pedagang kaki lima, untuk itu dapat dilihat perkembangan pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebagai berikut :

Tabel 2. 176 Jumlah Pedagang Kaki lima di Kota Sawahlunto Tahun 2015-2020

No	Nama Pasar	Pedagang kaki lima											
		Asli Sawahlunto						Luar Sawahlunto					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasar Sawahlunto	135	139	145	154	160	160	189	189	200	213	213	213
2.	Pasar Silungkang	98	101	101	102	105	105	30	30	29	32	32	32
3.	Pasar Talawi	94	95	95	96	98	98	211	213	213	221	221	221
4.	Pasar Sapan	27	36	36	38	41	41	8	8	11	18	18	18
5.	Pasar Tak Bancah	10	10	10	10	10	10	3	3	3	3	3	3
6.	Psr Tumpuak Tangah	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1
7.	Pasar Lumindai	11	12	12	12	12	12	4	5	5	5	5	5

No	Nama Pasar	Pedagang kaki lima											
		Asli Sawahlunto						Luar Sawahlunto					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Pasar Kolok Mudik	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2
9.	Pasar Songket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	383	401	407	420	434	434	448	451	464	495	495	495

Sumber : Dinas Koperindag Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas secara keseluruhan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah pedagang kaki lima yang berasal dari luar Sawahlunto, terutama di Pasar Talawi dan Pasar Sawahlunto. Kedua pasar tersebut mudah untuk diakses, transportasi lancar dan mempunyai konsumen yang banyak dari pasar lainnya, terutama pasar Sawahlunto yang merupakan pusat dari seluruh pasar yang ada di Kota Sawahlunto.Kedua pasar diatas berjalan 2 kali dalam seminggu, namun untuk kebutuhan pokok masih tetap ada setiap harinya. Pedagang yang berasal dari luar Sawahlunto ini pada umunya menjual sayur sayuran, ikan dan bahan lainnya yang mana produksi dari Kota Sawahlunto sendiri tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Sawahlunto seperti, ikan air tawar masih ada pedagang dari tanah datar begitu juga dengan pedaganga cabe merah, sayuran, daun bawang dan lainnya juga masih ada yang berasal luar sawahlunto, seperti tanah datar dan solok. Adanya pedagang luar ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan akan sayuran, ikan dan lainnya di Kota Sawahlunto. Sebenarnya apabila pedagang kaki lima ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadi kekuatan ekonomi rakyat jika semakin banyaknya jumlah pedagang kaki lima dari luar Kota akan berpengaruh terhadap lapangan usaha bagi masyarakat kota, untuk itu perlu adanya peran pemerintah daerah dalam mengorganisir pedagang kaki lima dalam kota sehingga menjadi sumber daya baru bagi peningkatan ekonomi kota, sebagai katub pengaman dari pengangguran dan sarana pemenuhan kebutuhan konsumen dari golongan ekonomi lemah.

Untuk melindungi konsumen di pasar maka diwajibkan untuk setiap pasar untuk melaksanakan tera ulang. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah, kegiatan Tera Ulang UTTP ini merupakan kewenangan daerah, dimana tahun tahun sebelumnya daerah hanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini dan yang melakukan tera ulang di datangkan dari propinsi. Dengan telah diberlakukanya UU ini pada tahun 2017,2018 dan 2019 Dinas Koperindag tidak melakukan kegiatan Tera Ulang UTTP Karena sarana dan prasarana serta tenaga tera ulang di Kota Sawahlunto belum ada. Pada akhir tahun 2019 Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk kegiatan Tera Ulang UTTP berupa sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tera Ulang UTTP, sehingga tahun 2020 tera ulang bisa dilaksanakan dengan 80 persen timbangan yang ditera.

Secara teoritis yang diharapkan dari pasar ini adalah bagaimana berfungsinya pasar bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk itu salah satunya dapat kita lihat dari jumlah pendapatan/omset suatu pasar dalam menjalankan fungsinya tersebut. Rendah tingginya pendapatan/omset pasar inilah yang bisa menjadi salah satu yang mempengaruhi kemajuan suatu pasar. Kenyamanan dan keamanan konsumen juga sangat diperlukan dalam meningkatkan jual beli di pasar. Tahun 2020 omset pasar-pasar Sawahlunto totalnya Rp. 24.106,79 juta, dimana ini masih dibawah target RPJMD, untuk itu pemerintah daerah telah melaksanakan kegiatan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen sehingga menarik masyarakat untuk berbelanja di pasar. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap pasar terutama dalam pendapatan pasar perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan pasar dalam menjalankan fungsinya.

PERMASALAHAN :

1. Besarnya pengaruh pasar online terhadap jual beli di pasar pada masa pandemic
2. Menurunya nilai PDRB sektor perdagangan

2.4.3.5 Urusan Bidang Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Kota Sawahlunto merupakan salah satu sektor yang sangat dipertimbangkan dalam kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota. Besarnya nilai kontribusi sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing. Pembangunan industri ini diarahkan untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih kuat dan seimbang, adapun perkembangan kontribusi sektor industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 177 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2016-2020

KONTRIBUSI	2016	2017	2018	2019	2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar rupiah)	380,77	404,96	415,94	392,43	395,49
Total PDRB (Milyar Rupiah)	2937,95	3165,21	3405,16	3679,76	3656,585
Kontribusi (%)	12,96	12,79	12,12	10,66	10,82

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka '2021

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan walaupun naik secara melambat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan seiring dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi dan Nasional. Tahun 2020 kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri pengolahan mulai mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan, namun pada masa pandemic ini merupakan suatu prestasi untuk industry pengolahan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,82 persen dengan nilai rupiah Rp. 395,49 milyar. Perkembangan industri dilihat dari PDRB sektor industri dari tahun 2016-2020 tidak mengalami peningkatan yang signifikan hanya rata-rata meningkat secara konstan, karena itu sangat perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah dalam mendorong industri pengolahan untuk meningkatkan produksinya. Dengan meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga Kota Sawahlunto, karena industri kecil dan industri rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan. Meningkatkan peranan industri kecil dan industri rumah tangga dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja. Seperti melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga. Perkembangan potensi industri kecil, menengah dan rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 178 Perkembangan Potensi Industri di Kota Sawahlunto Tahun 2015 s/d 2019

NO	JENIS USAHA	JUMLAH USAHA					JUMLAH TENAGA KERJA					NILAI PRODUKSI (Rp)					BAHAN BAKU (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertenunan / Songket	786	796	877	914	920	786	796	877	914	950	Rp 11.584.440.000	Rp 19.909.440.000	Rp24.024.960.000	Rp 25.506.582.000	Rp 26.103.245.000	Rp 6.175.206.000	Rp 8.006.904.000	Rp 9.091.824.000	Rp 9.546.4000.000	Rp 9.821.835.000
2	Kerupuk Ubi	158	148	138	160	169	415	353	350	350	349	Rp 2.745.420.000	Rp 2.924.556.000	Rp2.924.556.000	Rp 3.114.652.000	Rp 2.924.556.000	Rp 1.368.420.000	Rp 1.396.200.000	Rp 1.408.510.000	Rp 1.493.200.000	Rp 1.388.510.000
3	Tahu Tempe	35	35	37	38	52	70	70	69	69	69	Rp 1.922.395.000	Rp 1.922.350.000	Rp1.921.630.000	Rp 2.075.361.000	Rp 1.964.630.000	Rp 1.145.385.000	Rp 1.145.276.000	Rp 1.144.107.000	Rp 1.201.300.000	Rp 1.144.107.000
4	Kue dan Makanan Ringan	56	56	54	56	70	195	191	156	156	137	Rp 5.498.584.000	Rp 5.658.000.000	Rp5.815.800.000	Rp 6.164.748.000	Rp 6.272.700.000	Rp 3.079.750.000	Rp 2.948.260.000	Rp 3.429.230.000	Rp 3.630.980.000	Rp 3.921.250.000
5	Batu Bata	59	36	35	35	42	87	92	92	92	105	Rp 4.429.500.000	Rp 4.579.200.000	Rp4.579.200.000	Rp 4.716.576.000	Rp 4.854.200.000	Rp 1.105.000.000	Rp1.183.000.000	Rp 1.201.000.000	Rp 1.261.100.000	Rp 1.320.000.000
6	Perabot	25	25	28	36	36	46	39	59	59	59	Rp 1.908.696.000	Rp 1.969.746.000	Rp2.521.796.000	Rp 2.647.886.000	Rp 2.421.799.000	Rp 1.073.573.000	Rp 1.082.169.000	Rp 1.146.185.000	Rp 1.214.970.000	Rp 1.146.185.000
7	Anyaman Bambu	7	28	30	20	22	28	28	38	38	38	Rp 44.000.000	Rp 51.200.000	Rp 54.840.000	Rp 59.227.000	Rp 75.540.000	Rp 23.000.000	Rp 28.750.000	Rp 38.850.000	Rp 45.000.000	Rp 42.500.000
8	Minyak Kelapa	7	7	5	5	5	8	8	6	6	6	Rp 368.400.000	Rp 399.200.000	Rp 296.400.000	Rp 326.040.000	Rp 350.000.000	Rp 132.200.000	Rp 174.800.000	Rp 110.930.000	Rp 115.367.000	Rp 135.000.000
9	Bubuk Kopi	3	3	3	3	3	16	16	16	16	16	Rp 1.092.000.000	Rp 1.092.000.000	Rp1.092.000.000	Rp 1.146.600.000	Rp 1.354.200.000	Rp 628.000.000	Rp 628.000.000	Rp 628.000.000	Rp 671.960.000	Rp 705.240.000
10	Minyak Atsiri	2	2	2	2	2	22	22	22	22	22	Rp 33.600.000	Rp 33.600.000	Rp 33.600.000	Rp 46.368.000	Rp 50.450.000	Rp 29.829.000	Rp 29.829.000	Rp 29.829.000	Rp 32.500.000	Rp 33.650.000
11	Rendo	11	10	10	10	18	11	11	11	11	18	Rp 103.680.000	Rp 103.680.000	Rp 103.680.000	Rp 112.129.000	Rp 150.375.000	Rp 98.074.000	Rp 98.074.000	Rp 98.074.000	Rp 102.978.000	Rp 109.850.000
12	Sapu Ijuk	7	7	8	8	8	7	13	13	13	13	Rp 35.450.000	Rp 36.100.000	Rp 40.200.000	Rp 43.416.000	Rp 45.650.000	Rp 22.500.000	Rp 24.200.000	Rp 28.140.000	Rp 31.250.000	Rp 32.650.000
13	Apar Besi	2	2	3	3	3	6	2	3	3	3	Rp 39.500.000	Rp 27.100.000	Rp 14.940.000	Rp 15.890.000	Rp 16.750.000	Rp 17.100.000	Rp 13.550.000	Rp 4.980.000	Rp 5.200.000	Rp 5.466.000
14	Batako	6	6	4	4	4	10	10	10	10	10	Rp 807.160.000	Rp 809.460.000	Rp 816.360.000	Rp 881.668.000	Rp 1.054.520.000	Rp 458.600.000	Rp 459.750.000	Rp 414.700.000	Rp 435.436.000	Rp 540.650.000

NO	JENIS USAHA	JUMLAH USAHA					JUMLAH TENAGA KERJA					NILAI PRODUKSI (Rp)					BAHAN BAKU (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
15	Batu Aji	9	9	2	2	2	2	12	2	2	2	Rp 13.500.000	Rp 20.175.000	Rp 31.000.000	Rp 42.000.000	Rp 45.000.000	Rp 4.010.000	Rp 5.043.000	Rp 7.750.000	Rp 8.550.000	Rp 9.000.000
16	Kerajinan dan Batubara	4	4	6	6	6	5	6	6	6	6	Rp 1.428.000	Rp 187.100.000	Rp 307.800.000	Rp 329.346.000	Rp 350.875.000	Rp 455.000	Rp 46.775.000	Rp 76.950.000	Rp 85.400.000	Rp 88.650.000
17	Bengkel	8	8	7	7	7	15	18	18	18	18	Rp 22.676.000	Rp 334.600.000	Rp 744.650.000	Rp 781.882.000	Rp 800.950.000	Rp 8.393.000	Rp 111.876.000	Rp 248.625.000	Rp 261.058.000	Rp 287.500.000
18	Payung Kertas	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	Rp 15.080.000	Rp 15.205.000	Rp 15.625.000	Rp 21.800.000	Rp 23.250.000	Rp 9.375.000	Rp 9.375.000	Rp 9.375.000	Rp 12.000.000	Rp 13.500.000
19	Konveksi	1	3	3	3	5	12	14	14	14	25	Rp 384.375.000	Rp 398.775.000	Rp 398.775.000	Rp 418.714.000	Rp 646.520.000	Rp 192.200.000	Rp 203.732.000	Rp 203.732.000	Rp 217.900.000	Rp 347.850.000
20	Keramik	1	1			1	1	1	1	1	1	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Rp 17.500.000	Rp 18.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 7.000.000	Rp 8.500.000	Rp 8.750.000
21	Pengecoran Logam	1	1				1	1				Rp 225.500.000	Rp 225.500.000	-	-	-	Rp 112.000.000	Rp 112.000.000	-	-	-
22	Percetakan	2	2	1	1	1	2	8	8	8	8	Rp 1.245.000.000	Rp 1.245.000.000	Rp1.840.000.000	Rp 1.932.000.000	Rp 2.050.000.000	Rp 525.000.000	Rp 525.000.000	Rp 1.135.000.000	Rp 1.214.500.000	Rp 1.540.000.000
23	Sepatu	1					1					Rp 432.000.000	-	-	-	-	Rp 168.000.000	-	-	-	-
24	Depot Air Minum					55					165	-	-	-	-	Rp 7.920.600.000	-	-	-	-	Rp 120.000.000
JUMLAH		1192	1190	1254	1314	1432	1748	1713	1773	1810	2022	Rp 32.972.384.000	Rp 41.954.518.000	Rp 47.592.812.000	Rp 50.480.385.000	Rp 59.493.210.000	Rp 16.382.070.000	Rp 18.238.563.000	Rp 20.462.791.000	Rp 21.595.549.000	Rp22.762.143.000

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto

Tabel 2. 179 DAFTAR POTENSI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020

KOTA **KOTA SAWAHLUNTO**
PROPINSI **SUMATERA BARAT**

NO	KBLI		JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI	KAPASITAS PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	NILAI BB/BP
1	2		3	4	5	6	7	8
1	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA	967	1009	7.146.000.000	1.762.960	6.492.884.000	3.156.385.200
2	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA	275	475	2.540.060.000	1.997.527	6.565.171.500	2.509.719.900
3	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL	57	58	1.515.000.000	363.600	1.950.000.000	924.000.000
4	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	44	113	1.102.000.000	7.339.200	4.309.200.000	943.440.000
5	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN	34	35	61.300.000	4.264	303.660.000	143.328.000
6	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	31	64	1.610.000.000	1.042	680.350.019	312.013.250
7	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	27	44	28.484.000	423.057	405.511.000	339.531.600
8	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	25	77	592.600.000	154.382	2.457.480.000	1.058.867.000
9	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	25	43	115.160.000	141.056	1.600.000.000	703.006.000
10	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI	19	56	73.620.000	5.440.393	1.832.116.000	1.516.002.000
11	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	13	22	215.000.000	6.756	884.760.000	408.384.000
12	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	10	17	385.330.000	820	816.500.000	290.450.000
13	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	8	13	40.000.000	2.130	42.600.000	25.560.000
14	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	7	45	39.000.000	7.820	81.240.000	28.434.000
15	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	7	34	607.000.000	6.471	1.526.325.000	898.900.000
16	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL	6	12	105.000.000	4.150	226.200.000	100.286.000
17	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	5	7	20.500.000	2.310	684.500.000	481.845.000
18	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	4	10	122.000.000	5.827	166.700.000	72.625.000

NO	KBLI		JUMLAH PERUSAHAAN	TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI	KAPASITAS PRODUKSI	NILAI PRODUKSI	NILAI BB/BP
19	18120	KEGIATAN JASA PENUNJANG PENCETAKAN	3	8	900.000.000	2.160	540.000.000	28.800.000
20	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN	3	3	15.000.000	296	67.235.000	23.318.000
21	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	3	3	15.000.000	2.160	86.400.000	31.500.000
22	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	3	5	43.500.000	1.020	20.400.000	7.746.000
23	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN	2	5	43.500.000	78.600	67.200.000	30.240.000
24	20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI	2	22	450.000.000	294	119.280.000	25.500.000
25	10616	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	2	2	28.000.000	720	10.080.000	3.528.000
26	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL	1	2	1.000.000	2.400	26.250.000	9.188.000
27	10722	INDUSTRI GULA MERAH	1	10	10.000.000	10.080	253.280.000	108.000.000
			1.584	**2.194**	**17.824.054.000**	**17.761.495**	**32.215.322.519**	**14.180.596.950**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan industri di Kota Sawahlunto sejak tahun 2015-2019 mempunyai kecendrungan konstan sehingga nilai PDRB sektor industri pun terlihat konstan dan cendrung tidak ada peningkatan, malahan di tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 24 jenis usaha yang ada di Kota Sawahlunto dilihat dari aspek jumlah usaha, jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan bahan baku yang menunjukkan peningkatan hanya di usaha pertenunan/songket dan usaha konveksi, sedangkan yang lainnya hanya berjalan seperti biasa tidak ada peningkatan. Tingginya daya saing produk saat ini dipasaran peru adanya perbaikan strategi pemasaran untuk produk-produk dari Kota Sawahlunto. Pada era sekarang ini produk-produk dengan fungsi yang sama memiliki varietas yang sangat beragam, sehingga dengan kondisi kualitas produk hasil industry Kota Sawahlunto saat ini sangat jauh untuk akan bersaing dengan produk-produk yang ada dipasaran, selain itu pada zaman pandemic ini pemasaran secara online terhadap produk-produk hasil industry Kota Sawahlunto sangat kurang dan tidak terintegrasi sehingga ini juga mempengaruhi jual beli produk-produk industry sawahlunto saat ini. Kemajuan-kemajuan teknologi tidak dapat diabaikan oleh usaha-usaha industry di Kota Sawahlunto karena ini langkah untuk bersaing dengan dunia luar. Peningkatan SDM pelaku industry yang berkualitas sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan ini.

Dari segi permodalan, untuk usaha-usaha yang ada di Kota Sawahlunto masih rendah, karena usaha yang banyak adalah usaha mikro dan rumah tangga sehingga modal yang ada hanya untuk menghasilkan produk saja tanpa memikirkan untuk peningkatan kualitas produk maupun varietas produk.

Tahun 2020 lapangan usaha diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), di kota Sawahlunto terdapat 27 jenis lapangan usaha berdasarkan KLBI, yang menjadi usaha dominan di Kota Sawahlunto adalah industri pertenunan yang mana mempunyai 967 usaha dengan 1009 tenaga kerja yang bertambah jumlahnya dari tahun kemaren.

Dari permasalahan yang ada, Pemerintah Kota harus bekerja keras dalam percepatan perkembangan industri-industri yang ada melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Perindagkopnaker, mulai dari fasilitasi kemasan produk, pengembangan industri kerajinan, pelatihan dan workshop untuk industri kecil dan rumah tangga dan sebagainya. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri perlu ditingkatkan dengan pembinaan yang didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Pengembangan industri juga didukung dengan mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana sehingga tercipta kondisi yang baik dalam pengembangan kegiatan industri.

2.4.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

2.4.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

Pada urusan Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan, tersedianya data jumlah alokasi penyiapan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.

Tabel 2. 180 Jumlah Alokasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Alokasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako

Indikator selanjutnya adalah predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), sepanjang tahun 2016-2020 Kota Sawahlunto memperoleh predikat Sangat Baik (SB).

Predikat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Predikat LPPD	SB	SB	SB	SB	SB

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako

2.4.4.2 Urusan Sekretariat Dewan

Pada program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan yang diukur adalah PERDA APBD dan APBD Perubahan. Untuk penetapan APBD dilakukan tepat waktu, sedangkan APBD Perubahan penetapannya tidak pada waktu.

Tabel 2. 181 Penetapan Perda Tepat Waktu 5 Tahun Terakhir

No	Jenis Perda	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perda APBD	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Perda APBD Perubahan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber : Bagian Hukum SETDAKO

2.4.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.4.5.1 Unsur Perencanaan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun serta Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka 20 (dua puluh) tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 182 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota SawahluntoTahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen RPJPD yang telahDitetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Dokumen RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Dokumen RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Dokumen RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Jika dilihat dari aspek ketersediaan maka dokumen perencanaan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian terkait dengan

dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlihatnya permasalahan dan isu strategis yang konkrit sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus sesuai permasalahan dan isu strategis yang ada. Sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan belum memperlihatkan perbaikan terhadap indikator pembangunan secara signifikan. Oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan yang telah dijalankan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat maka kegiatan pembangunan harus fokus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Jika dilihat dari indikator ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan tidak ada permasalahan karena terpenuhi setiap tahunnya, namun dilihat dari kualitas dokumen perencanaan belum terlihat analisa yang dalam terhadap data dan permasalahan yang ada sehingga program dan kegiatan yang muncul belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan SDM perencana, baik dari kualitas perencana tersebut maupun pelatihan yang kurang terhadap SDM Perencana.

2.4.5.2 Unsur Keuangan

Di dalam Undang-undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Realisasi keuangan Kota Sawahlunto yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 183 Realisasi APBD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.968.762.338,56
Belanja	542.642.593.634,12	522.380.939.161,19	518.069.931.532,61	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79
Pembiayaan	29.045.393.752,93	8.394.077.299,69	779.342.925,21	-2.184.587.830,61	11.474.898.868,81
SILPA	15.645.399.684,35	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto 2020

2.4.5.3 Unsur Kepegawaian

Pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto melibatkan banyak pihak. Salah satu tenaga penggerak utama adalah Pegawai Negeri Sipil. Sampai tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pegawai di Kota Sawahlunto. Hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun, pindah keluar daerah dan meninggal. Sementara penambahan jumlah CPNS tidak seimbang dengan pengurangan yang terjadi.
Berikut adalah jumlah komposisi Pegawai negeri Sipil Kota sawahlunto tahun 2016-2020.

Tabel 2. 184 Komposisi Pegawai negeri Sipil Kota sawahlunto tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PNS					
	PNS Pemda	2 303	2 242	2 119	2 112	2052
	PNS Instansi Vertikal	259	247	260	252	111
	TNI/POLRI	285	294	312	304	285
2	Jumlah PNS Pemko Sawahlunto per Golongan					
	I	29	27	21	15	11
	II	469	436	289	367	350
	III	1392	1349	1338	1332	1303
	IV	444	169	411	398	388
3	Jumlah PNS Pemko Sawahlunto per Pendidikan yang ditamatkan					
	SD	16	16	13	12	10
	SMP	30	28	22	20	18
	SMA	449	406	345	325	305
	Diploma	428	404	348	382	365
	S1	1212	1207	1192	1179	1354
	S2	137	122	62	123	
	Profesi	65	59	128	52	

Sumber data : BPS Kota Sawahlunto 2021

2.4.5.4 Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, maka dilaksanakanlah pendidikan dan pelatihan. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan PNS kepada masyarakat.

Tabel 2. 185 Jumlah PNS yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Urusan Kepegawaian					
1	Jumlah PNS yang telah mengikuti pengembangan kompetisi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

2	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar	-	2.50	5.60	5.60	5.70
4	Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	-	11.48	24.10	20.40	20.70

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto

2.4.5.5 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan diharapkan tersedianya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan daya saing daerah, Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Sawahlunto antara lain :

1. Penciptaan manajemen admnistrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Sawahlunto.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.

Sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto sebelum tahun 2021 sebagai berikut :

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

Tabel 2. 186 Jumlah Inovasi berdasarkan Inisiator

No	Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Daerah	0	0
2	Anggota DPRD	0	0
3	ASN	0	0
4	Perangkat Daerah	45	100

5	Anggota Masyarakat	0	0
	Total	45	100

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2021

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

Tabel 2. 187 Jumlah Usulan Inovasi Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto tahun 2020

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	8	17,78
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6,67
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4,44
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1	2,22
5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	1	2,22
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4,44
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	17,78
8	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	4,44
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	6,67
10	Sekretariat Daerah	1	2,22
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	6,67
12	Rumah Sakit Umum Daerah	1	2,22
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	2,22
14	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	2,22
15	Inspektorat	1	2,22
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2,22
17	Dinas Perhubungan	1	2,22
18	Kecamatan Silungkang	1	2,22
19	Kecamatan Lembah Segar	1	2,22
20	Kecamatan Talawi	1	2,22
21	Kecamatan Barangin	2	4,44
Total		45	100

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2021

Semua kegiatan inovasi diatas sampai tahun 2021 ini masih tetap diterapkan untuk memberikan dampak yang lebih baik selalu dilakukan pembaharuan-pembaharuan yang bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto.

2.4.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Kota

Sawahlunto dimana unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya.

Dalam penerapan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan dilakukan secara internal dan eksternal. Untuk internal yang dilakukan oleh Inspektorat, dan untuk eksternal dilaksanakan oleh BPKP.

Tabel 2. 188 Jumlah Auditor di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

No	Uraian Jabatan Fungsional	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	**Auditor**	**8**	**8**	**8**	**10**	**10**	
	Utama		-	-	-	-	
	Madya	3	3	3	4	7	
	Muda	2	3	3	4	1	
	Pertama	2	1	1	1	1	
	Pelaksana	-	-	-	-	-	
	Pelaksana Lanjutan	1	1	1	1	-	
	Penyelia	-	-	-	-	1	
2	**P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Perangkat Daerah)**	**5**	**4**	**4**	**9**	**10**	
	Madya	3	2	2	3	3	
	Muda	2	2	2	3	3	
	Utama	-	-	-	-	-	
	Pertama	-	-	-	3	4	
3	**Auditor Kepegawaian**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Total	**13**	**13**	**13**	**19**	**20**	

Sumber : Inspektorat Kota Sawahlunto

Dari data di atas kita lihat jumlah pejabat fungsional di Inspektorat Kota Sawahlunto jumlahnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 s/d 2018 jumlah pejabat fungsional adalah 13 orang meningkat pada tahun 2019 menjadi 19 orang, dan tahun 2020 meningkat menjadi 20 orang akan tetapi auditor kepegawaian di Kota Sawahlunto belum ada.

Tabel 2. 189 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 5 Tahun Terakhir

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat	C	CC	B	B	B
Nilai	42,77	50,11	60,22	60,06	61,03

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Sawahlunto

Nilai pencapaian SAKIP/ LAKIP yang juga menjadi IKU Kota Sawahlunto pada RPJMD tahun 2014 – 2018 tidak mencapai target, dari yang ditargetkan mendapat nilai B pada tahun 2016. Pencapaian nilai SAKIP/ LAKIP pada tahun 2016 adalah C.

2.4.7 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan

oleh instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan umum meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di Kota Sawahlunto urusan pemerintahan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah atau infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia.

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan salah satu dari enam komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran (*demand side*). Komponen lainnya adalah Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan. Konsumsi Rumah Tangga mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis barang dan jasa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1) Makanan, Minuman, dan Rokok; 2) Pakaian dan Alas Kaki; 3) Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; 4) Kesehatan dan Pendidikan; 5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya; 6) Hotel dan Restoran, dan 7) Lainnya.

PDRB ADHB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran selama tahun 2016-2020 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. Tahun 2020, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto sebesar 2.070,24 miliar rupiah atau sebesar 56,62 persen dari total pengeluaran. Proporsi pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ini berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB sebesar

55,35 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 55,48 persen. Pada tahun 2018 proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat lagi menjadi 55,76 persen, dan turun kembali pada tahun 2019 menjadi 56,59 dan meningkat lagi tahun 2020 menjadi 56,62 persen.

Tabel 2. 190 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi RT ADHB Kota Sawahlunto (Miliar Rupiah)	1.629,90	1.752,00	1.898,44	2.082,29	2.070,24
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa)	60.778	61.398	61.898	62.524	63.027
Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Kota Sawahlunto (Juta Rupiah)	***26,82***	***28,54***	***30,67***	***33,30***	***32,85***
Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (%)	55,48%	55,35%	55,76%	56,59%	56,62%

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016-2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 33,30 juta rupiah per jiwa menjadi 32,85 juta rupiah per jiwa. Menurunnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tahun 2020 dari tahun sebelumnya disebabkan pandemi Covid-19. Sebelum mewabahnya Covid-19, yakni periode 2016-2019, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 33,30 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 8,58 persen dari tahun sebelumnya dan terendah pada tahun 2016 sebesar 26,82 juta rupiah.

Dominannya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB ADHB juga terjadi pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat terhadap total PDRB ADHB per tahun berkisar antara 52,69 – 53,95 persen. Sedangkan untuk tingkat nasional, proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap total PDRB ADHB per tahun berkisar antara 55,76 – 57,66 persen.

Tabel 2. 191 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016 – 2020

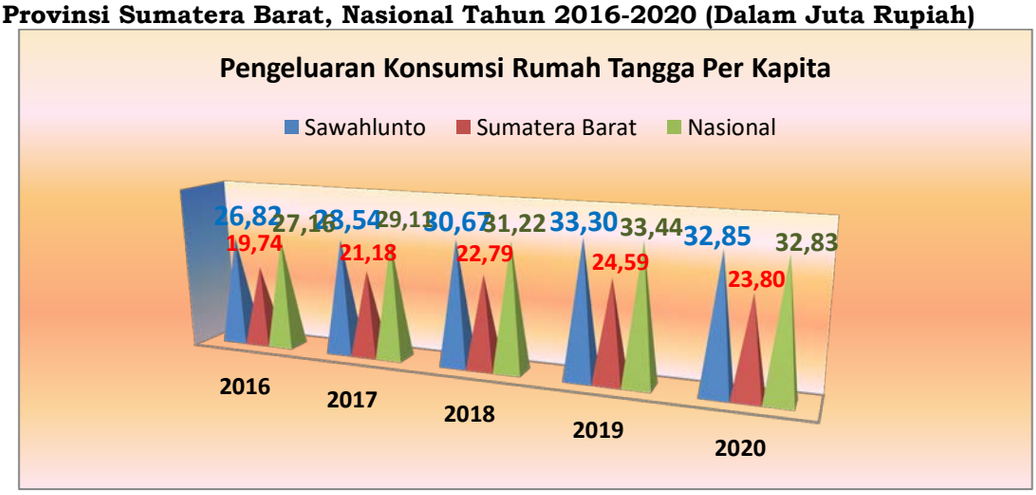
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah)	19,74	21,18	22,79	24,59	23,80
Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat (%)	52,96	52,69	53,23	54,40	54,06
Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita Provinsi Sumatera Barat (Juta Rupiah)	27,16	29,11	31,22	33,44	32,83
Proporsi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB ADHB Nasional (%)	56,66	56,09	55,76	56,63	57,66

Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016-2020, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, Statistik Indonesia 2021

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita yang menurun juga terjadi pada tingkat Provinsi Sumatera Barat dan tingkat nasional. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 turun dari 24,59 juta rupiah per jiwa pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 23,80 juta rupiah per jiwa, sementara Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional tahun 2020 turun dari 33,44 juta rupiah per jiwa pada tahun sebelumnya menjadi sebesar 32,83 juta rupiah per jiwa.

Jika Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto dibandingkan dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional, terlihat bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional, kecuali tahun 2020 dimana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Nasional. Hal ini ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 30 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS, PDRB Kota Sawahlunto Menurut Pengeluaran 2016-2020, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, Statistik Indonesia 2021

2. Pengeluaran Konsumsi Non Makanan Per Kapita

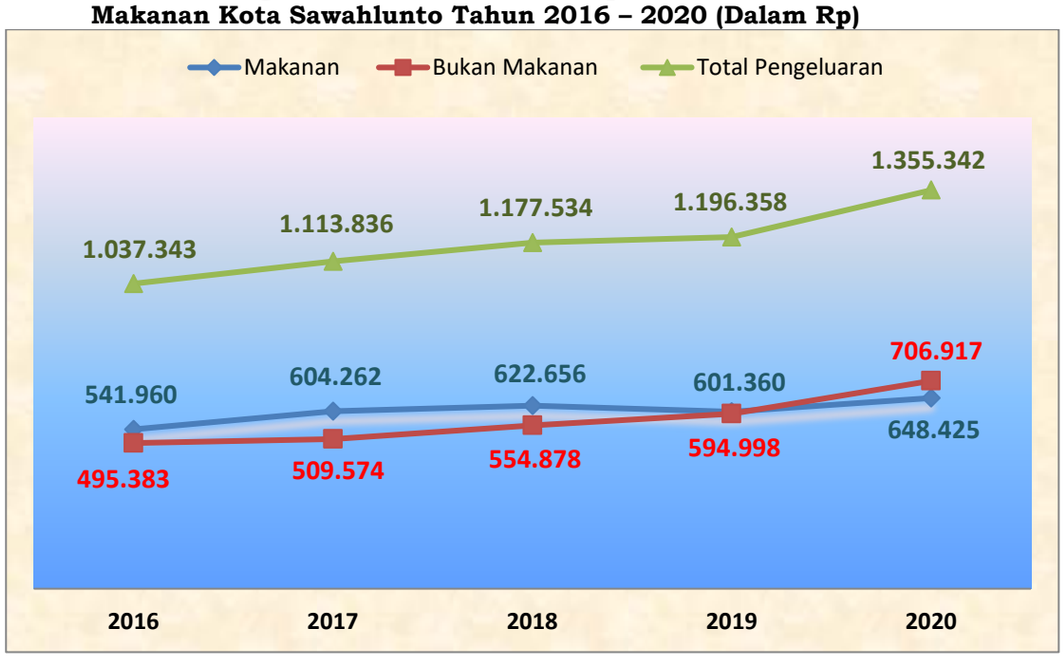
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggaberkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga, semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, dan hal ini mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggadikelompokkan dalam : Pengeluaran Konsumsi untuk Makanan dan Pengeluaran Konsumsi Non Makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini. Selama rentang waktu tahun 2016-2020, kelompok pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2020, kelompok pengeluaran konsumsi non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi makanan.

Pada Tahun 2020, pengeluaran perkapita per bulan Kota Sawahlunto peringkat ke 13 se Sumatera Barat dengan jumlah Rp.1.355.342,-.. untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 648.425 atau 47,84%. Sedangkan untuk konsumsi non makanan, pengeluaran konsumsi per kapita per

bulan di Kota Sawahlunto adalah Rp. 706.917 atau 52,16%. Dengan demikian pada tahun 2020, distribusi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk non makanan di Kota Sawahlunto lebih besar dari pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk makanan (52,16 % >47,84 %).

Grafik 2. 31 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 (Dalam Rp)



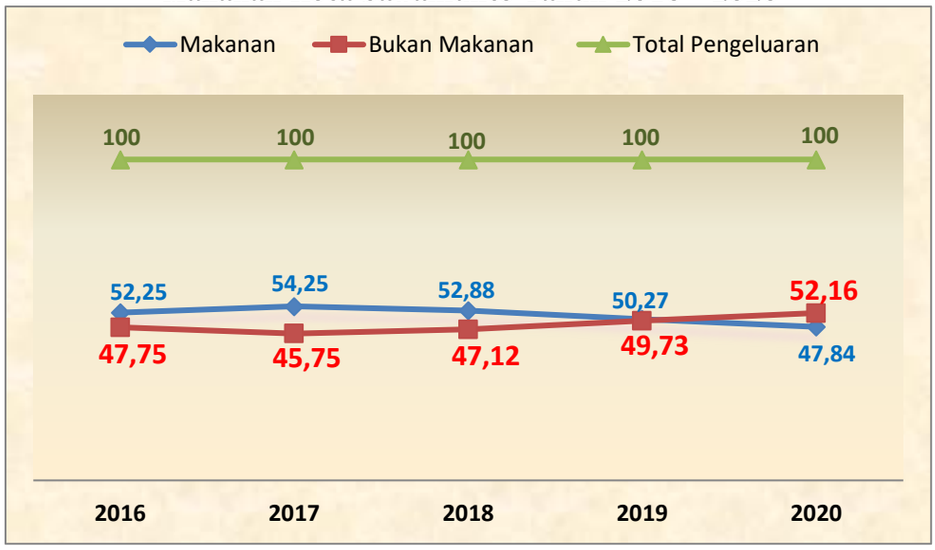
Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2016-2018, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2020

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi tahun 2019, dimana konsumsi per kapita per bulan untuk kebutuhan non makanan Kota Sawahlunto adalah Rp. 594.998 atau 49,73 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi per kapita perbulan untuk kebutuhan makanan di Kota Sawahlunto sebesar Rp. 601.360 atau 50,27 persen. Dengan demikian pada tahun 2019, proporsi pengeluaran konsumsi per kapita per bulan non makanan lebih kecil dari pengeluaran konsumsi untuk makanan (49,73 % < 50,27 %).

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun sebelumnya. Karena proporsi pengeluaran konsumsi non makanan lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini sejalan dengan teori dari ekonomi modern / maju menurut Walt Whitman Rostow, salah satu ciri perekonomian yang paling modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Dengan demikian semakin tinggi perekonomi masyarakat, maka konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi.

Penyebab kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto pada tahun 2020 lebih baik atau lebih sejahtera dari pada tahun-tahun adalah karena turunnya laju inflasi/penurunan harga pada kelompok bahan makanan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun.

Grafik 2. 32 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2021

3. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah merupakan indikator daya saing daerah yang dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan total tenaga kerja. Produktivitas Total Daerah menggambarkan efektifitas tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja. Perkembangan Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 192 Produktivitas Total Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHK (Rp. Juta)	2.380.518,78	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	Data Tidak tersedia	29.127	30.320	29.117	30.310
Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/ tahun)	n/a	86,42	87,59	96,04	91,09

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerjaKota Sawahlunto tahun 2017-2019 atau sebelum adanya pandemi covid-19 meningkat dari tahun ke tahun, dari 86,42 juta rupiah/jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 87,59 juta rupiah/jiwa pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi 96,04 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019. Sementara ketika terjadi pandemi covid-19 pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerjaturun 91,09 juta rupiah/jiwa.

Produktivitas total daerah juga dapat dihitung menurut lapangan usaha dengan tujuan untuk mengindentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total daerah menurut lapangan usaha diperoleh dari jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha utama tersebut. Pada tahun 2016-2018, kelompok lapangan usaha di Kota Sawahlunto terdiri dari lima sektor besar, yaitu : Pertanian; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan Lainnya. Sektor *lainnya* terdiri dari Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air; Kontruksi; Angkutan; Pergudangan; Komunikasi; Keuangan; Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan.

Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 kelompok lapangan usaha terdiri dari tiga sektor besar, yaitu : Pertanian; Manufaktur; dan Jasa. Sektor *Pertanian*terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *Manufaktur* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *Jasa* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan Makan Minum; Pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Dengan adanya perubahan kelompok lapangan usaha tersebut, maka data yang disajikan hanya selama 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 193 Produktifitas Tenaga kerja Kota Sawahlunto Per Sektor Tahun 2019 – 2020

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)		
Sektor	**2019**	**2020**
Pertanian	217,98	219,53
Manufaktur	872,14	860,23
Jasa	1.706,4	1.681,17
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja (Jiwa)		
Sektor	**2019**	**2020**
Pertanian	4.027	5.646
Manufaktur	8.367	7.361
Jasa	16.723	17.303
Produktivitas Total Daerah (Jutaan Rupiah / Jiwa)		
Sektor	**2019**	**2020**
Pertanian	54,13	38,88
Manufaktur	104,24	116,86
Jasa	102,04	97,16

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa lapangan usaha yang ***paling produktif di Kota Sawahlunto pada tahun 2020***adalah ***sektor Manufaktur*** yang menghasilkan produktivitas sebesar 116,86 juta rupiah/jiwa, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 7.361 orang menghasilkan PDRB sebesar 860,23 milyar rupiah. Sedangkan ***sektor yang paling banyak menyerap jumlah tenaga kerja*** adalah ***sektor Jasa***, yakni sebanyak 17.303 orang dan menghasilkan PDRB sebesar 1.681,17 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor jasa merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto, akan tetapi apabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor Manufaktur. Sedangkan***sektor yang paling rendah produktivitasnya*** adalah ***sektor pertanian***.

Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi jumlah tenaga kerja, hal ini terlihat dari tabel di atas, dimana dengan adanya kebijakan PSBB dan *Work From House* pada tahun 2020, jumlahtenaga kerja ***sektor manufaktur berkurang sebanyak 1.006 orang*** dari 8.367 orang pada tahun 2019 menjadi 7.361 orang pada tahun 2020, sementara ***sektor pertanian bertambah 1.619 orang***, dari 4.027 orang pada tahun 2019 menjadi 5.646 orang pada tahun 2020 dan ***sektor jasa bertambah 580 orang***, dari 16.723 orang pada tahun 2019 menjadi 17.303 pada tahun 2020.

Berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja Kota Sawahlunto ada yang bekerja sebagai pegawai/karyawan, petani, buruh, dan lain-lain. Berikut status pekerjaan utama tenaga kerja di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 194 Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Tenaga Kerja
Berusaha Sendiri	4732	3110	7842	25,87%
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	1769	1890	3659	12,07%
Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	481	77	558	1,84%
Karyawan/Pegawai/Buruh	7556	5250	12806	42,25%
Pekerja Bebas di Pertanian	398	265	663	2,19%
Pekerja Bebas di Non Pertanian	1580	230	1810	5,97%
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	894	2078	2972	9,81%
Jumlah Tenaga Kerja	**17410**	**12900**	**30310**	**100,00%**

Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data Diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tenaga kerja Kota Sawahlunto sebagian besar adalah karyawan/Pegawai/Buruh (42,25%), kemudian tenaga kerja yang berusaha sendiri (25,87 %), Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap (12,07 %), dst.

4. Nilai tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah *rasio antara* indeks harga yang diterima petani *(IT)* dengan indeks harga yang dibayar petani *(IB)* yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan hanya menghitung Nilai Tukar Petani sampai tingkat Provinsi. Dengan demikian Nilai Tukar Petani Kota Sawahlunto merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat.

*Indeks harga yang diterima petani (IT)*adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. IT ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budidaya).

*Indeks harga yang dibayar petani(IB)*adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari

IB ini dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang/jasa non makanan.

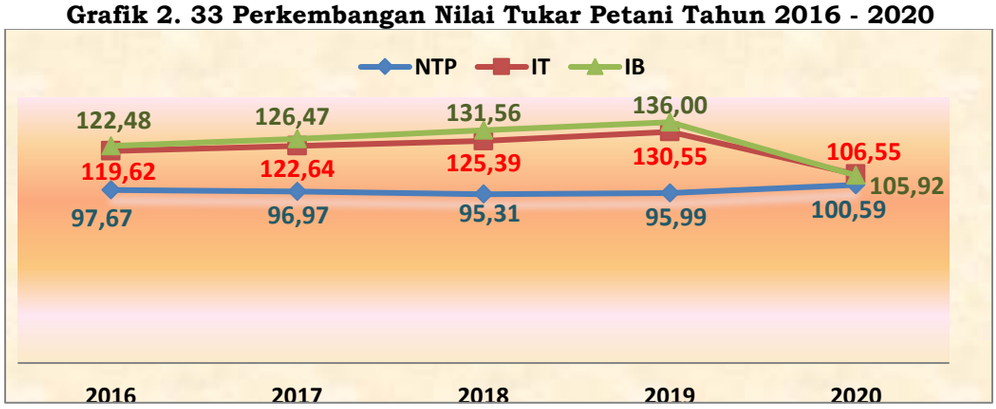
Secara umum Nilai tukar petani (NTP) menunjukkan tiga kondisi :

1. NTP > 100 atau IT > IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus.*
2. NTP = 100 atau IT = IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *sama besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *titik impas.*
3. NTP < 100 atau IT < IB
   Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih kecil* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *defisit.*

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani dari tahun 2016 hingga tahun 2018 cenderung terus menurun, dan mulai merangkak naik kembali pada tahun 2019, akhirnya pada tahun 2020 Nilai Tukar Petani atau NTP sudah lebih dari 100 (NTP >100). Hal Ini berarti nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani (IT) *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani (IB) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi. Dengan kata lain petani mengalami *surplus*. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi periode tahun 2016-2019, dimana petani terus menerus mengalami *defisit.* Berikut ini disajikan perkembangan Nilai Tukar Petani Periode Januari Tahun 2016 – 2020.

Dari grafik di bawah ini terlihat bahwa Indeks harga yang diterima petani (IT) atau pendapatan petani dari tahun 2016 sampai dengan 2019 terus menerus mengalami peningkatan. Namun peningkatanpendapatan petani tersebut diiring juga oleh peningkatan Indeks harga yang dibayar petani (IB) dengan indeks yang lebih tinggi. Akibatnya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi lebih kecil dari 100 (NTP < 100) atau defisit. Namun kondisi ini mulai membaik pada tahun 2020, dimana Nilai Tukar Petani (NTP) lebih besar dari 100 (NTP > 100) atau surplus.

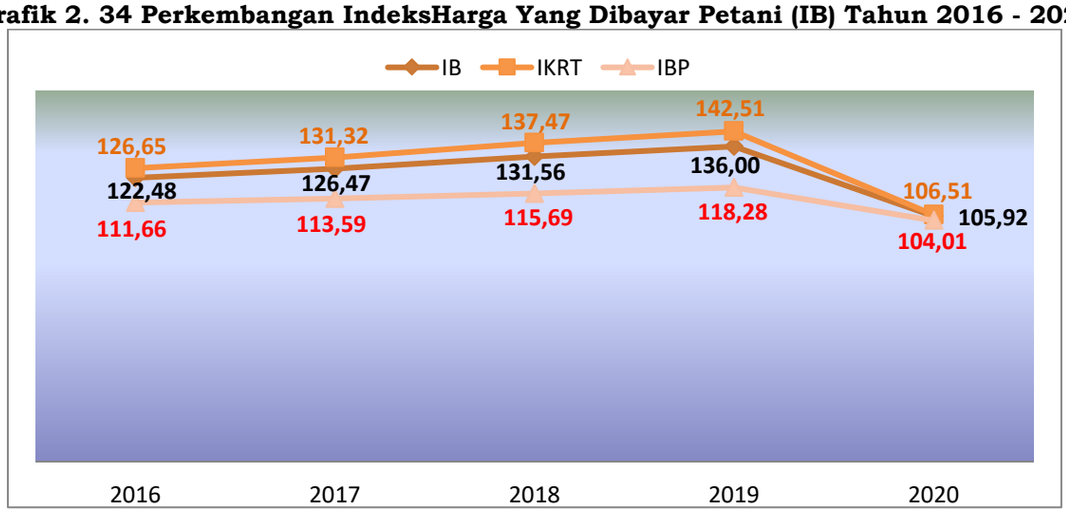
Grafik 2. 33 Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Indeksharga yang dibayar petani (IB) meliputi indeks harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga (Indeks Konsumsi Rumah Tangga/IKRT) maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian (Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP). Pada periode 2016-2019, Indeks Konsumsi Rumah Tangga***lebih dominan*** dari pada Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP. Artinya para petani belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara ***layak***. Namun pada tahun 2020 kondisi ini mulai membaik, dimana Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal/IBP ***lebih dominan*** dari pada Indeks Konsumsi Rumah TanggaBerikut disajikan perkembangan Indeksharga yang dibayar petani (IB) periode 2016 – 2020.

Grafik 2. 34 Perkembangan IndeksHarga Yang Dibayar Petani (IB) Tahun 2016 - 2020



Sumber : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) lebih tinggi dari Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBP). Ini berarti para petani sudah dapat menutupi biaya produksi dan penambahan barang modal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu perlu campur pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pelatihan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui pengendalian harga hasil pertanian, dimana pengalaman selama ini menunjukkan bahwa harga barang-barang pertanian cenderung rendah dan petani adalah sebagai ***price taker*** (penerima harga).

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah merupakan jumlah panjang jalan di bagi jumlah penduduk. Indikator ini di hitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2. 195 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Jumlah Panjang Jalan (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
2	Jumlah Penduduk	Orang	60,778	61,398	61.898	62.524	65,138
3	Rasio Panjang Jalan	KM/ Org	0.0075	0.0074	0.0074	0.0073	0,0070

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
	Dengan Jumlah Penduduk						

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik - titik tertentu.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Sawahlunto sudah ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal panjang jalan 0.74 Km/100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk tahun 2020 adalah 0,0070 Km/orang atau 0,70/100 orang, nilai rasio ini terhadap standar pelayan minimal masih mendekati SPM, Menyikapi hal tersebut perlu Pembangunan atau pembukaan jalan baru lebih pertimbangkan sehingga standar pelayanan minimal panjang jalan tercapai.

2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Yang dimaksud dengan angkutan orang/barang umum ialah angkutan orang/barang pada umumnya. Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat izin, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Berikut data mengenai jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 196 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah orang (orang)	149.474	2.338

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2021

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan signifikan dari 149.474 menjadi hanya 2.338 orang atau hanya 1,5 %. Hal ini disebabkan karena wabah covid-19 yang membatasi pergerakan sosial sehingga tidak ada mobilitas orang terjadi untuk beberapa bulan. Pada saat ini di Kota Sawahlunto angkutan kota juga tidak beroperasi, begitu juga dengan angkutan kota dalam propinsi dan angkutan barang. Sehingga menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan orang yang terangkut di Kota Sawahlunto.

3. Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan amanat UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kebutuhan luas RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH direncanakan seluas 8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha Perkembangan RTH Kota Sawahlunto sejak 2014-2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 197 Rasio RTH Per Satuan Luas Di Kota Sawahlunto Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	3.501	4.327	4.327	4.338	4.338
2	Luas Wilayah (ha)	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
3	Persentase (%)	12.80	15.82	15.82	15.86	15.86

Sumber : Profil Daerah

Luas RTH diKota Sawahlunto tahun dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 3.501 ha atau sebesar 12.80 dari luas wilayah kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi seluas keseluruhan 4.327 ha atau sebesar 15.82 %, namun pada tahun 2016 ini penambahan RTH tidak ada, sehingga masih membutuhkan tambahan RTH minimal seluas 14,18% dari luas wilayah kota yang diupayakan melalui berbagai program pembangunan seperti pembuatan taman kota, hutan kota, penghijauan lahan kritis dan reklamasi lahan bekas tambang. Namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali dengan Luas Ruang Terbuka Hijau seluas 4.338 Ha atau sebesar 15,86 dari luas wilayah kota.

Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk menuju RTH 30%, diantaranya:

a. **Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.**
b. **Membangun lahan hijau (hub) baru,**
c. **Mengembangkan koridor ruang hijau kota.**
d. **Mengakuisisi RTH privat, menjadikanbagian RTH kota.**
e. **Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.**
f. **Menghijaukan bangunan (green roof /green wall).**
g. **Menyusun kebijakan hijau.**
h. **Memberdayakan komunitas hijau.**

4. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di kota Sawahlunto sejak tahun 2012 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2016 pada kisaran 15.330. Hal ini dipengaruhi oleh topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, dimana wilayah produktif hanya ± 18% dari luas wilayah kota atau seluas 4.922,10 Ha.

5. Luas wilayah industry

Luas wilayah industri di kota Sawahlunto sejak tahun 2015 tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2019 pada kisaran 70 Ha, seperti tabel berikut:

Tabel 2. 198 Luas Wilayah Industri Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Wilayah Industri (ha)
2015	39.84
2016	39.84
2017	39.84
2018	39.84
2019	39.84

Sumber : Profil Daerah Kota Sawahlunto 2019

6. Luas wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi kebanjiran di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi sampai ke muara. Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo,

sepanjang aliran batang Malakutan kenagarian Kolok, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang, dengan tinggi genangan antara 0,10-050 m yang berlangsung selama 1-3 jam

7. Luas wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang (Silungkang Oso), Kecamatan Barangin (Talago Gunung) serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan di Kecamatan Talawi seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tangah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

8. Luas wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi.

9. Jenis dan jumlah bank dan cabang

Bank dan asuransi merupakan lembaga intermediasi keuangan untuk menampung surplus pendapatan rumah tangga setelah konsumsi. Lembaga ini (terutama Bank) berperan dalam penciptaan modal yang akan digunakan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja pihak swasta dan pada gilirannya akan ikut membantu proses pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Berikut adalah data jumlah bank dan asuransi yang ada di Kota Sawahlunto :

Tabel 2. 199 Jumlah Bank dan Asuransi Tahun 2016-2020

No	Bank dan Asuransi	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1.	Jumlah Bank (unit)	8	9	9	15	15	
2.	Jumlah Perusahaan Asuransi (unit)	2	2	2	2	2	

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Daftar nama Bank yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020 :

1. Bank BRI KCP Unit Sawahlunto
2. Bank BRI KCP Unit Talawi
3. Bank BRI KCP Unit Sapan
4. Bank BRI KCP Unit Silungkang
5. Bank Nagari Cabang Sawahlunto
6. Bank Nagari KCP Pembantu Talawi
7. Bank Mandiri Sawahlunto
8. Bank Syariah Mandiri
9. Bank BNI Sawahlunto
10. Bank BTPN KCP Sawahlunto
11. Bank BTN Kantor Kas Sawahlunto
12. BPR LPN Talawi Sakato
13. BPR LPN Pasar Baru Durian

14. BPR LPN Kubang
15. BPR Gajahtongga Kotopiliang

Daftar nama Asuransi yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2020 :

1. BPJS Kesehatan
2. BPJS Ketenagakerjaan

10. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum menurut departemen kesehatan syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh oleh manusia terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri atau zat-zat yang berbahara. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 C banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksessibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 200 Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Tahun 2016- 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga	16.542	16.542	16.542	16.542	16.542
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	14.379	14.379	14.379	14.889	14,930
3	Persentase	86.92	86.92	86.92	90.00	90,26

Sumber : PANSIMAS Kota Sawahlunto Tahun 2020

Untuk kondisi rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tetap dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih sehingga diharapkan Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan sumber air bersih demi meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Sawahlunto.

Permasalahan dari urusan persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih adalah jumlah rumah tangga dari tahun 2016 s/d 2020 tidak bertambah.

11. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Indikator yang digunakan untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik adalah jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali seratus persen. Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut :

Tabel 2. 201 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	15.010	15.163	15.351	15.434	16.525
2	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	10.212	10.619	11.128	15.076	16.210
3	Persentase Rumah Tagga yang menggunakan listrik (%)	68,03	70,03	72,49	97,68	98,09

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata untuk semua jenis pelanggan listrik mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dikarenakan kebutuhan dasar akan pemenuhan daya listrik. Jika dilihat dari pelanggan rumah tangga, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan, apalagi dari tahun 2018 ke 2019 dengan penambahan sebanyak 25,19%. Dari data tersebut diatas terlihat bahwa masih ada 1,91% lagi rumah tangga yang tidak menggunakan listrik.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola energi listrik mempunyai program agar semua masyarakat dapat menikmati listrik yang ada. Namun karena biaya operasional pemasangan listrik dirasa cukup tinggi, maka tidak semua masyarakat dapat menyanggupinya. Sehingganya masih ada masyarakat yang rumahnya tidak dialiri listrik. Ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Kota Sawahlunto bagaimana agar semua masyarakat Kota Sawahlunto dapat terlayani dan menikmati energi listrik yang ada.

12. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon

Perkembangan zaman menuntut masyarakat menjadi pintar dalam teknologi. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Banyak media yang memberikan akses teknologi dan informasi kepada masyarakat, seperti telepon selular/Handpone (HP) dan komputer/laptop. Telepon selular/Handpone (HP) adalah salah satu produk dari perkembangan teknologi modern yang paling banyak digemari. Handpone menjadi barang wajib bagi setiap orang saat ini.

Tabel 2. 202 Persentase Masyarakat yang Menggunakan Telepon/HP Tahun 2016- 2020

NO	Alat Komunikasi dan Informasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	HP / Telepon	67,64	83,27	84,31	84,72	86,43

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga di Kota Sawahlunto yang memiliki telepon selular sudah mencapai 86,43%. Hal ini dinilai tinggi dengan artian sebagian besar masyarakat Kota Sawahlunto telah menggunakan HP sebagai sarana komunikasi. Didukung dengan jaringan

komunikasi yang sudah baik sehingga memudahkan akses dan keterbukaan informasi di Kota Sawahlunto.

2.5.3 FOKUS IKLIM INVESTASI

1. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat mewujudkan rasa aman bagi masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Tabel 2. 203 Angka Kriminalitas di Kota Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Tindak Kejahatan *Crime*	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Curat (Pencurian dengan Pemberatan	30	17	19	21	17
2	Penggelapan	6	6	3	2	3
3	KDRT	2	4	3	3	4
4	Penipuan	9	8	19	3	3
5	Pengrusakan	2	4	3	4	2
6	Pencurian Kendaraan Bermotor	19	24	23	6	8
7	Pembakaran	1	-	1	1	-
8	Anirat (Penganiayaan dengan Pemberatan)	2	-	-	1	1
9	Perkosaan	6	4	4	6	-
10	Pembunuhan	-	-	-	-	-

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Angka kriminalitas mempengaruhi keinginan investor untuk berinvestasi. Investor dalam menghasilkan barang dan jasa, akan dirugikan jika terganggu oleh kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum (perijinan). Untuk mengurangi angka kriminalitas, demonstrasi dan ketidakpastian hukum, perlu kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan petugas keamanan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban, sehingga investor tidak ragu dan merasa nyaman untuk berinvestasi. Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan; pengembangan sistem pengamanan rahasia; pengembangan sumber daya manusia (SDM) kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan secara keseluruhan. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Kota Sawahlunto.

2. Jumlah Demonstrasi

Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang

dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demonstrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya dan lain-lain. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

Di Kota Sawahlunto dalam periode waktu tahun 2016-2020 tidak ada terjadi aksi demonstarsi alias nihil (*sumber data : DPMPTSPNaker*).

3. Lama Proses Perijinan

Prosedur perijinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perijinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Selain prosedur perijinan yang mudah, ketersediaan informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada sudah dipermudah dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah.

Proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker). Penerbitan dokumen izin dan non izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi. Lamanya proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Perwako No. 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Perwako Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Perwako Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto terdapat 138 jenis perizinan dan non perizinan.

Realisasi pelayanan perizinan dan non perizinan Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 204 Realisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah Izin dan non izin yang diterbitkan	Ket
1	2016	842	
2	2017	1093	
3	2018	1901	
4	2019	1567	
5	2020	952	

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah izin dan non izin yang diterbitkan berfluktuatif setiap tahunnya. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2016 adalah 842, pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.093, tahun 2018 meningkat kembali menjadi 1.901, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.567, dan tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 952. Penurunan ini terjadi karena dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Kota Sawahlunto. Yang mana dengan adanya pembatasan sosial (social distancing) akibat

Covid-19 maka masyarakat banyak yang menunda pengajuan perizinannya untuk permohonan perizinan yang tidak terlalu urgent.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan yang dilaksanakan dapat secara maksimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 205 Jumlah Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto

No	OPD	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dinas PMPTSPNaker	6 orang	6 orang	10 orang	9 orang	9 orang
2	Dinas Teknis	10 orang	11 orang	29 orang	35 orang	43 orang
	Jumlah	**16 orang**	**17 orang**	**39 orang**	**44 orang**	**52 orang**

Sumber : DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2020

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas bahwa tenaga yang terlibat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Sawahlunto sebagian besar tenaganya adalah pegawai yang berada diluar DPMPTSPNaker, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung kepada Dinas Teknis.

4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi KTP dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/penguburan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 206 Target dan Realisasi PDRD Kota Sawahlunto Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Pajak Daerah	4.886.500.000	4.686.268.341	5.222.500.000	5.337.144.416	5.527.610.850	5.546.092.124	5.973.337.400	5.502.589.718	5.666.500.000	5.602.920.091.75
1	Pajak Hotel	150.000.000	142.353.702	165.000.000	164.733.362	160.000.000	132.597.836	105.000.000	94.965.756	22.500.000	47.335.931
2	Pajak Restoran	608.000.000	640.309.687	685.800.000	638.615.093	514.223.450	529.988.908	514.000.000	532.945.719	399.700.000	477.464.758.75
3	Pajak Hiburan	706.000.000	462.942.300	506.500.000	394.309.900	394.687.400	283.599.800	400.137.400	109.385.500	5.300.000	1.650.000
4	Pajak Reklame	45.000.000	47.909.354	32.200.000	34.597.079	34.200.000	47.786.507	34.200.000	47.810.243	38.000.000	48.692.318
5	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000	2.109.997.610	2.500.000.000	2.857.339.658	3.100.000.000	3.189.233.765	3.500.000.000	3.339.015.131	3.500.000.000	3.344.827.881
6	Pajak Mineral Bukan Logam	5.000.000	7.865.600	25.000.000	17.905.600	15.000.000	16.382.400	15.000.000	12.979.400	1.000.000	769.600
7	Pajak Parkir	2.000.000	-	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-	-
8	PBB-P2	1.050.000.000	934.942.738	1.055.000.000	975.816.873	1.055.000.000	937.788.713	1.055.000.000	958.272.261	1.100.000.000	963.603.643
9	BPHTB	320.000.000	339.997.350	250.000.000	250.826.851	250.000.000	404.214.195	350.000.000	407.215.708	600.000.000	718.575.960
II	Retribusi Daerah	3.394.068.800	2.701.515.584	4.079.675.450	3.828.111.382	3.889.736.594	3.533.959.570	4.093.327.838	3.625.062.865	3.108.095.850	2.787.376.593
A.	Retribusi Jasa Umum										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.852.800	437.105.000	1.102.326.750	1.375.996.000	686.913.300	919.339.000	511.926.030	518.014.000	582.406.850	483.055.400
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	69.556.000	66.850.000	78.556.000	56.371.000	78.556.000	62.770.000	78.556.000	85.986.000	92.000.000	114.030.000
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.800.000	103.900.000	154.400.000	135.400.000	151.150.000	146.020.000	166.750.000	166.750.000	78.200.000	78.200.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.263.260.000	516.786.000	745.348.000	475.960.000	795.348.000	446.051.000	765.348.000	494.482.500	419.034.000	428.224.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	90.000.000	114.552.750	100.000.000	107.959.199	100.000.000	124.817.160	100.000.000	119.509.740	32.000.000	33.630.580
6	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	38.900.000	54.390.000	54.600.000	45.365.000	53.700.000	54.550.000	53.700.000	32.150.000	28.700.000	29.900.000
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Retribusi Jasa Usaha										
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.150.600.000	1.061.368.394	1.306.100.000	1.051.482.405	1.296.269.294	1.022.463.010	1.443.747.808	1.359.739.525	1.039.855.000	966.718.013
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200.000	-
3	Retribusi Terminal	12.000.000	11.513.000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.250.000	41.352.500	53.300.000	46.040.000	54.200.000	57.255.000	54.200.000	59.927.500	53.500.000	60.745.000
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	196.250.000	227.093.000	415.200.000	411.150.000	543.200.000	557.373.000	788.700.000	683.052.000	698.800.000	516.801.000
C	Retribusi Perizinan Tertentu										
1	Retribusi IMB	56.000.000	43.273.700	62.000.000	114.823.078	130.000.000	143.201.400	130.000.000	105.131.600	70.000.000	75.992.600
2	Retribusi Izin Gangguan	25.000.000	22.891.240	7.244.700	7.244.700	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Izin Trayek	600.000	440.000	600.000	320.000	400.000	120.000	400.000	320.000	400.000	80.000
	JUMLAH TOTAL	8.280.568.800	7.387.783.925	9.302.175.450	9.165.255.798	9.417.347.444	9.080.051.694	10.066.665.238	9.127.652.583	8.774.595.850	8.390.296.684.75

Sumber : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2020

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2016 target sebesar Rp. 8.280.568.800 dan terealisasi sebesar Rp. 7.387.783.925, tahun 2017 mengalami kenaikan dengan target sebesar Rp. 9.302.175.450 dan terealisasi sebesar Rp. 9.165.255.798, tahun 2018 mengalami kenaikan kembali dengan target sebesar Rp. 9.417.347.444 dan terealisasi sebesar Rp. 9.080.051.694, sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan target sebesar Rp. 10.066.665.238 dan terealisasi sebesar Rp. 9.127.652.583, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan target sebesar 8.774.595.850 dan terealisasi sebesar Rp. 8.390.296.684.75. Penurunan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19.

Target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2016-2019 selalu menunjukkan trend positif, yaitu meningkat dengan target dari Rp. 4.886.500.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 5.973.337.400 pada tahun 2019 dengan realisasi Rp. 4.101.043.541 pada tahun 2016 menjadi Rp. 5.502.689.718 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 target pajak daerah turun menjadi Rp. 5.666.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.602.920.000,75. Pada tahun 2016 pajak daerah yang realisasinya melebihi target paling besar adalah pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 109.997.610, disusul oleh pajak restoran yaitu sebesar Rp. 32.309.687, tahun 2017 pajak daerah yang realisasinya melebihi target yang paling besar adalah juga pajak penerangan jalan yaitu sebesar Rp. 357.339.658, kemudian disusul oleh pajak reklame yaitu sebesar Rp. 2.397.079, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2020 pajak daerah yang realisasinya melebihi target paling besar adalah BPHTB yaitu berturut-turut sebesar Rp. 154.214.195, Rp. 57.215.708, Rp. 118.575.960. Pajak daerah yang menjadi kontributor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto yang terbesar adalah pajak penerangan jalan, disusul oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), sedangkan pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah pajak parkir, bahkan pada tahun 2016, 2019 dan 2020 pajak parkir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Pajak parkir ini mulai tahun 2019 tidak lagi dikelola oleh Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tapi dikelola oleh Pemda/diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga tidak termasuk objek pajak.

Target dan realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2016-2020 menunjukkan trend fluktuatif, yaitu menurun dengan target dari Rp. 3.394.068.800 pada tahun 2016 menjadi Rp. 3.108.095.850 pada tahun 2020 dengan realisasi Rp. 2.701.515.584 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 2.787.376.593 pada tahun 2020. Retribusi jasa umum pada tahun 2016 s.d 2018 yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pelayanan kesehatan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 136.252.200, Rp. 273.669.250, dan Rp. 232.425.700, sedangkan pada tahun 2019 s.d 2020 retribusi jasa umum yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 7.430.000 dan Rp. 22.030.000. Retribusi jasa usaha pada tahun 2016 s.d 2018 yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu berturut-turut sebesar Rp. 30.843.000, Rp. 4.050.000, dan Rp. 14.173.000, sedangkan pada tahun 2019 s.d 2020 retribusi jasa usaha yang realisasinya melebihi target paling besar adalah retribusi rumah potong hewan yaitu berturut-turut sebesar Rp. 5.727.500 dan Rp. 7.245.000. Dan retribusi perizinan tertentu yang realisasinya melebihi target yang paling besar adalah retribusi IMB.

Pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah dari tahun 2016-2020 berfluktuatif. Retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling besar untuk PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pelayanan kesehatan, sedangkan retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD adalah retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang mana dalam periode 5 tahun terakhir retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Hal ini disebabkan oleh retribusi penggantian biaya cetak peta sudah tidak ada lagi di perda. Retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sedangkan retribusi jasa usaha yang memberikan kontribusi paling rendah terhadap

PAD adalah retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir, bahkan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir retribusi terminal tidak ada memberikan kontribusi sama sekali terhadap PAD, sedangkan retribusi tempat khusus parkir selama 5 tahun terakhir tidak ada memberikan kontribusi sama sekali alias nihil. Hal ini disebabkan oleh retribusi terminal sudah menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan retribusi tempat khusus parkir tahun 2020 tidak bisa terealisasi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Untuk retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD Kota Sawahlunto adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan retribusi perizinan tertentu yang memberikan kontribusi paling rendah terhada PAD adalah retribusi izin trayek.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Sawahlunto dilakukan hanya pada tahun 2015, bekerjasama dengan STIA LPPN Padang, tahun anggaran lainnya/selanjutanya sampai dengan tahun 2020 hanya dilakukan pembinaan saja. Pengukuran dilakukan pada sepuluh (10) OPD unit pelayanan publik di lingkungan Pemko Sawahlunto dengan nilai indeks nya sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 207 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2015

No	NAMA OPD	NILAI	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	73,25	B	BAIK
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	74,25	B	BAIK
3	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	74,25	B	BAIK
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71,50	B	BAIK
5	KANTOR PERHUBUNGAN/ KOMUNIKASI DAN INFORMASI	71	B	BAIK
6	KANTOR PENINGGALAN SEJARAN DAN PERMUSEUMAN	75	B	BAIK
7	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	68,25	B	BAIK
8	DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL	73,50	B	BAIK
9	DINAS PERTAMBANGAN, PERDAGANANGAN KOPERASI DAN TENAGA KERJA	73,50	B	BAIK
10	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL	64,50	B	BAIK

Sumber : Laporan Hasil Survey IKM Tahun 2015

6. Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Perda. Dengan adanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyaraat melakukan investasi. Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2. 208 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Sawahlunto yang Ditetapkan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha yang Ditetapkan	Buah	10	9	1	-	-

Sumber : Bagian Hukum Setdako, 2020

Dari data di atas dapat dilihat jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah perda yang mendukung iklim usaha yang ditetapkan adalah 10 perda sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada satu perda pun yang dikeluarkan/ditetapkan. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung iklim usaha di Kota Sawahlunto. Dengan adanya perda maka dapat meningkatkan usaha di Kota Sawahlunto yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

Dalam memajukan iklim investasi, Pemda dan masyarakat harus berkomitmen, dengan memberi rasa aman bagi investor, kemudahan dalam mengurus administrasi perizinan, serta daya dukung anggaran pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi mutakhir. Majunya iklim investasi akan berdampak positif tehadap kemajuan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila hal ini bisa terlaksana dengan baik maka iklim investasi akan terus berkembang dan angka pengangguran akan berkurang, karena terbukanya lapangan kerja baru.

Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan terus memberikan pelayanan terbaik, serta masyarakat terus menjaga keamanan yang kondusif demi mendukung perkembangan iklim investasi demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu berupaya mengevaluasi seluruh bidang pembangunan di Kota Sawahlunto yang dapat dijadikan peluang bagi investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto. Sehingga, dapat diketahui bidang mana yang memerlukan investasi yang lebih baik di Kota Sawahlunto.

2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan untuk Kota Sawahlunto cukup fluktuatif. Namun ditahun 2020 mengalami penurunan yang diharapkan akan dapat terus berkurang nilainya setiap tahun. Rasio ketergantungan ini menujukkan bahwa setiap 100 orang penduduk Kota Sawahlunto usia produktif (umur 15-64 tahun) mempunyai tanggungan 48-45 orang penduduk usia tidak produktif (umur < 15 tahun & > 64 tahun). Hal ini menunjukkan keadaan ekonomi Kota Sawahlunto yang tergolong kategori berkembang. Yaitu masih tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif.

Tabel 2. 209 Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 th	17.400	17.437	17.442	17.471	16.434
2	Jumlah penduduk usia > 64 th	3.861	3.992	4.138	4.316	4.542
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	21.261	21.429	21.580	21.787	20.976
4	Jumlah penduduk usia 15- 64 th	43.781	43.613	44797	45..066	46.031
5	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	48,56	49,13	48,17	48,34	45,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021

2.5.5 Analisis Potensi Lapangan Usaha Unggulan

Dalam menentukan potensi lapangan usaha unggulan di Kota Sawahlunto, dapat dikaji dari beberapa metode analisa. Potensi pengembangan ekonomi wilayah di Kota Sawwhlunto dapat dielaborasi pada penjelasan dibawah ini.

1. Metode Shift Share

Metode ini digunakan untuk membandingkan peerbedaan laju pertumbuhan lapangan usaha/sektor/industry di wilayah yang sempit disebut daerah dengan wilayah yang lebih luas disebut nasional (Tarigan, 2005). Dengan kata lain metode shift share menganalisis pergeseran struktur perekonomian daerah (kecamatan/kabupaten/kota/provinsi) terkait dengan peningkatan perekonomian daerah di atasnya (kabupaten/kota/provinsi/nasional).

Pada analisis ini akan dilihat pertumbuhan lapangan usaha di Kota Sawahlunto dengan lapangan usaha yang sama pada tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Shift Share untuk mengetahui kondisi lapangan usaha di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2. 210 Hasil Analisis Shift Share (SS) Kota Sawahlunto 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KOMPONEN				KATEGORI
		Provinsi (Rip)	SWL (Rij)	NSij	DSij	PSij	SSij	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.03	0.02	7.34	-1.70	-1.49	4.15	Sektor Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.03	0.04	6.23	-0.91	2.61	7.93	Sektor Basis/Potensial
3	Industri Pengolahan	0.00	0.00	10.80	-11.46	1.52	0.87	Sektor Basis/Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.05	1.82	-1.09	1.84	2.57	Sektor Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.05	0.33	-0.07	0.24	0.51	Sektor Basis/Potensial
6	Konstruksi	0.05	0.04	9.58	4.10	-2.40	11.28	Sektor Basis/Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.05	0.04	14.34	6.00	-1.86	18.48	Sektor Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.03	8.11	-6.79	6.51	7.84	Sektor Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.02	0.03	1.58	-0.54	0.26	1.31	Sektor Basis/Potensial

10	Informasi dan Komunikasi	0.09	0.09	7.73	12.23	0.23	20.19	Sektor Basis/Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.02	0.02	2.91	-1.50	-0.15	1.27	Sektor Basis/Potensial
12	Real Estat	0.04	0.04	1.53	0.25	0.11	1.89	Sektor Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.03	0.04	0.12	-0.01	0.02	0.12	Sektor Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.04	0.04	10.67	2.23	-1.41	11.49	Sektor Basis/Potensial
15	Jasa Pendidikan	0.08	0.07	2.58	3.02	-0.10	5.49	Sektor Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.08	0.07	1.01	1.35	-0.29	2.07	Sektor Non Basis
17	Jasa Lainnya	0.03	0.04	4.09	-0.19	0.93	4.83	Sektor Basis/Potensial

Sumber: Hasil Analisis Barenlitbangda, 2021

Berdasarkan hasil Analisis Shift Share Kota Sawahlunto 2016-2020 pada tabel di atas, lapangan usaha yang memiliki *National Share* (NSij) terbesar adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sedangkan yang terkecil adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan.

Dari tabel di atas juga diketahui angka *Proportional Shift* (PSij) yang positif (+) atau tingkat pertumbuhan lapangan usaha di Kota Sawahlunto lebih cepat dibandingkan dengan provinsi terdapat pada tujuh (10) lapangan usaha, yaitu : 1). Pertambangan dan Penggalian; 2). Industri Pengolahan; 3). Pengadaan Listrik dan Gas; 4). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5). Transportasi dan Pergudangan; 6). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7). Informasi dan Komunikasi; 8). Real Estate; 9). Jasa Perusahaan; 10). Jasa Lainnya.

Sedangkan dari angka *Differential Shift* (PSij) yang positif (+) atau lapangan usaha menguntungkan dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sawahlunto secara internal terdapat pada tujuh (7) lapangan usaha, yaitu : 1). Konstruksi; 2). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3). Informasi dan Komunikas; 4). Real Estate; 5). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 6). Jasa Pendidikan; 7). Jasa Kesehatan da Kegiatan Sosial

2. Metode Location Quotient

Metode Location Quotient adalah perbandingan peran sector/lapangan usaha suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/lapangan usaha tersebut secara nasional (Tarigan, 2014). Nilai dari Location Quotient (LQ) adalah :

1. LQ > 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih besar di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan dimungkinkan ekspor pada lapangan usaha/sektor tersebut (sektor basis/potensial).
2. LQ < 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut lebih kecil di daerah dari pada nasional, yang mengindikasikan perlunya dilakukan impor pada lapangan usaha/sektor tersebut karena belum mampu memenuhi kebutuhan daerah tersebut (sektor non basis)

3. LQ = 1, artinya peranan lapangan usaha/sektor tersebut di daerah sama dengan nasional.

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Location Quotient untuk mengetahui sektor-sektor unggulan di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 pada tabel berikut :

Tabel 2. 211 Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Sawahlunto 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					LQ	KATEGORI
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	**0.36**	Sektor Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1.73	1.58	1.56	1.63	1.79	**1.66**	Sektor Basis/Potensial
3	Industri Pengolahan	1.16	1.19	1.21	1.20	1.16	**1.19**	Sektor Basis/Potensial
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.44	18.46	19.28	19.57	19.64	**18.88**	Sektor Basis/Potensial
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.46	3.54	3.72	3.74	3.76	**3.64**	Sektor Basis/Potensial
6	Konstruksi	1.16	1.17	1.16	1.14	1.11	**1.15**	Sektor Basis/Potensial
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.01	1.01	1.00	0.98	0.98	**0.99**	Sektor Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0.74	0.75	0.75	0.77	0.82	**0.76**	Sektor Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.65	1.59	1.59	1.58	1.68	**1.62**	Sektor Basis/Potensial
10	Informasi dan Komunikasi	1.16	1.17	1.18	1.17	1.15	**1.17**	Sektor Basis/Potensial
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10	**1.11**	Sektor Basis/Potensial
12	Real Estat	0.86	0.85	0.87	0.86	0.86	**0.86**	Sektor Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	**0.29**	Sektor Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.11	2.12	2.11	2.05	2.04	**2.09**	Sektor Basis/Potensial

15	Jasa Pendidikan	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	**0.72**	Sektor Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.79	0.80	0.79	0.77	0.75	**0.78**	Sektor Non Basis
17	Jasa Lainnya	2.61	2.61	2.61	2.63	2.65	**2.62**	Sektor Basis/Potensial

Sumber: Hasil Analisis Barenlitbangda, 2021

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient Kota Sawahlunto 2016-2020, terdapat sepuluh (10) Lapangan Usaha yang Potensial/Basis selama lima tahun terakhir, yakni : 1). Pertambangan dan Penggalian**;** 2)**.** Industri Pengolahan; 3). Pengadaan Listrik dan Gas; 4). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5). Konstruksi; 6). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 7). Informasi dan Komunikasi; 8). Jasa Keuangan dan Asuransi; 9). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 10). Jasa Lainnya.

3. Metode Tipologi Klassen

Metode Tipologi Klassen merupakan salah satu instrument analisa ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengindentifikasi kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto. Metode ini akan menghasilkan empat klasifikasi lapangan usaha dengan karakteristik yang berbeda (Sjafrizal, 2008), yaitu :

1. Lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan cepat (warna biru)
2. Lapangan usaha yang maju tapi tertekan (orange)
3. Lapangan usaha yang potensial atau masih dapat berkembang (hijau)
4. Lapangan usaha yang relative tertinggal (kuning)

Berikut disajikan hasil perhitungan Metode Tipologi Klassen untuk mengetahui kondisi lapangan usaha yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 pada tabel berikut:

Tabel 2. 212 Hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN		KONTRIBUSI		KATEGORI
		S	Si	Sk	Ski	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.03	0.02	0.22	0.08	Relatif Tertinggal
2	Pertambangan dan Penggalian	0.03	0.04	0.04	0.07	Maju & Tumbuh Pesat
3	Industri Pengolahan	0.00	0.00	0.10	0.12	Maju & Tumbuh Pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.01	0.05	0.00	0.02	Maju & Tumbuh Pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.05	0.00	0.00	Maju & Tumbuh Pesat
6	Konstruksi	0.05	0.04	0.09	0.11	Maju tapi Tertekan
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.05	0.04	0.16	0.16	Relatif Tertinggal
8	Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.03	0.12	0.09	Potensial / masih dapat Berkembang

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.02	0.03	0.01	0.02	Maju & Tumbuh Pesat
10	Informasi dan Komunikasi	0.09	0.09	0.07	0.08	Maju & Tumbuh Pesat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.02	0.02	0.03	0.03	Maju tapi Tertekan
12	Real Estat	0.04	0.04	0.02	0.02	Potensial / masih dapat Berkembang
13	Jasa Perusahaan	0.03	0.04	0.00	0.00	Potensial / masih dapat Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.04	0.04	0.06	0.12	Maju tapi Tertekan
15	Jasa Pendidikan	0.08	0.07	0.04	0.03	Relatif Tertinggal
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.08	0.07	0.01	0.01	Relatif Tertinggal
17	Jasa Lainnya	0.03	0.04	0.02	0.05	Maju & Tumbuh Pesat

Sumber: Hasil Analisis Barenlitbangda, 2021

Berdasarkan hasil Analisis Tipologi Klassen Kota Sawahlunto 2016-2020, terdapat tujuh (7) Lapangan Usaha yang maju dan tumbuh pesat selama lima tahun terakhir, yakni : 1). Pertambangan dan Penggalian**;** 2)**.** Industri Pengolahan; 3). Pengadaan Listrik dan Gas, 4). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6). Informasi dan Komunikasi; 7). Jasa Lainnya

Dan lapangan Usaha yang potensial dan masih dapat berkembang sebanyak tiga (3) lapangan Usaha, yaitu : 1). Transportasi dan Pergudangan; 2). Real Estat; dan 3). Jasa Perusahaan

Sedangkan lapangan Usaha yang maju tapi tertekan juga sebanyak tiga (3) lapangan Usaha, yaitu : 1). Konstruksi; 2). Jasa Keuangan dan Asuransi; 3). Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Dan terdapat empat (4) lapangan usaha yang relatif tertinggal, yaitu : 1). Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3). Jasa Pendidikan; dan 4). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Dalam upaya untuk melihat lapangan usaha mana yang benar-benar unggul secara ekonomi di Kota Sawahlunto, dilakukan perbandingan hasil analisis ketiga metode dimaksud sebagai berikut.

Tabel 2. 213 Perbandingan Hasil Analisis Shift Share, LQ dan Tipologi Klassen Kota Sawahlunto 2016-2020

NO	LAPANGAN USAHA	KATEGORI		
		SS (PSij)	LQ	Klassen
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Non Basis	Sektor Relatif Tertinggal
2	Pertambangan dan Penggalian	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat

3	Industri Pengolahan	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat
6	Konstruksi	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju tapi Tertekan
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Non Basis	Sektor Relatif Tertinggal
8	Transportasi dan Pergudangan	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Non Basis	Sektor Potensial / masih dapat Berkembang
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat
10	Informasi dan Komunikasi	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju tapi Tertekan
12	Real Estat	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Non Basis	Sektor Potensial / masih dapat Berkembang
13	Jasa Perusahaan	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Non Basis	Sektor Potensial / masih dapat Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju tapi Tertekan
15	Jasa Pendidikan	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Non Basis	Sektor Relatif Tertinggal
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Pertumbuhan daerah lebih **lambat** dari Provinsi	Sektor Non Basis	Sektor Relatif Tertinggal
17	Jasa Lainnya	Pertumbuhan daerah lebih **cepat** dari rovinsi	Sektor Basis/Potensial	Sektor Maju & Tumbuh Pesat

Sumber: Hasil Analisis Barenlitbangda, 2021

Berdasarkan hasil analisis ketiga metode (Shift Share, Location Quotient dan Tipologi Klassen) yang digunakan untuk melihat sektor unggulan yang ada di Kota Sawahlunto terdapat tujuh (7) Lapangan Usaha Unggulan yang beririsan/bersesuaian dengan ketiga metode tersebut, yakni : 1). Pertambangan dan Penggalian; 2). Industri Pengolahan; 3). Pengadaan Listrik dan Gas; 4). Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 5). Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6). Informasi dan Komunikasi; dan 7). Jasa Lainnya.

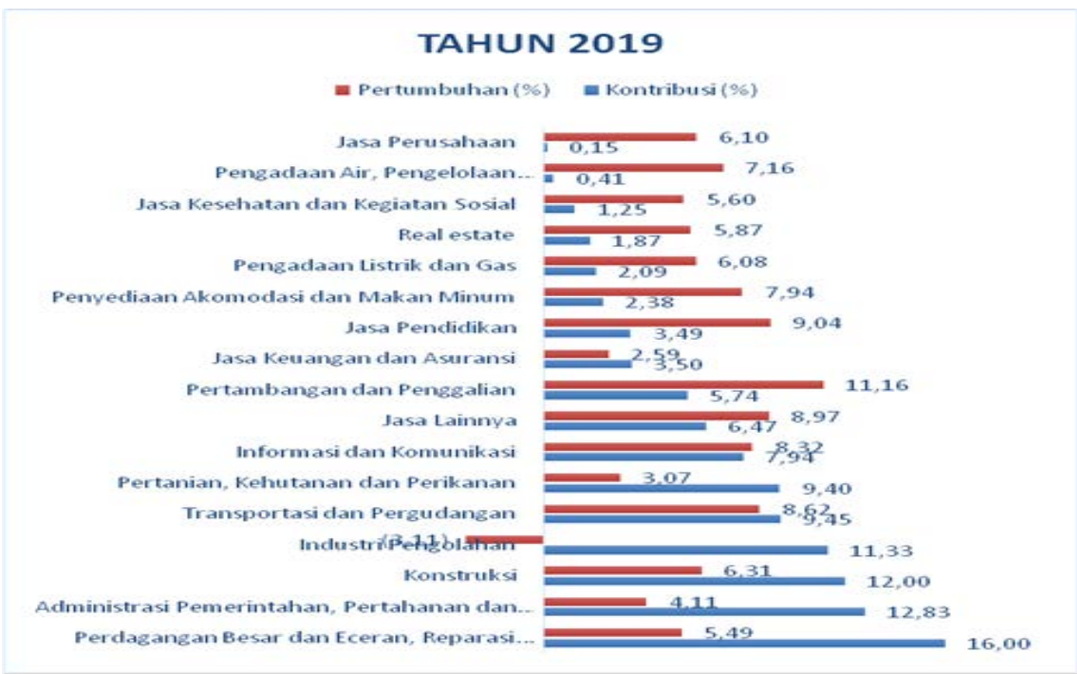
2.6 GAMBARAN COVID 19 DI KOTA SAWAHLUNTO

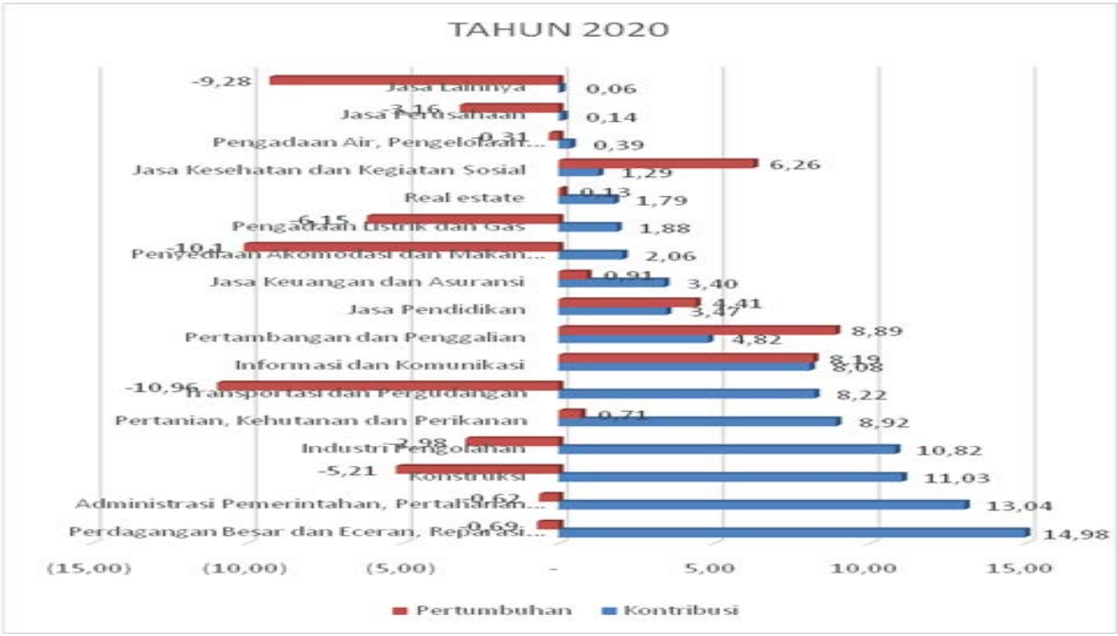
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Sawahlunto secara keseluruhan. Sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan bahkan pertumbuhan yang negatif selama tahun 2020 dan diprediksi masih akan berpengaruh di tahun 2021. Untuk mengantisipasi dampak lanjutannya diperlukan upaya-upaya strategik dalam merangsang pemulihan, dengan memberikan stimulus atau perlakuan yang khas terhadap masing-masing sektor.

2.6.1 Dampak Pandemi terhadap perekonomian Kota Sawahlunto

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kota Sawahlunto yang berlangsung sejak triwulan I tahun 2020 sangat terasa. Kondisi ini langsung terbukti dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 menjadi -1,27 %, dari 5,34 % tahun 2019. Angka ini sedikit lebih baik dibanding dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar - 1,60 % dan Nasional sebesar - 2,07 % ditahun yang sama. Penurunan perekonomian yang cukup ekstrim ini sangat jauh dari target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 demikian juga target yang ditetapkan untuk tahun-tahun selajutnya. Jatuhnya ekonomi secara nasional hingga ke tingkat daerah perlu menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan target-target capaian pada tahun selanjutnya agar kinerja pemerintah kota dapat tercapai dengan baik.

Berikut kondisi perekonomian Kota Sawahluntop tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sektor.





Pada grafik diatas, terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap perekonomian daerah Kota Sawahlunto, mengalami penurunan nilai tambah produksi pada tahun 2020. Dengan adanya wabah Covid 19 ini, beberapa kebijakan daerah dan pusat seperti pembatasan pergerakan orang dan barang, pengurangan alokasi dana transfer, sampai ke pemberhentian karyawan di beberapa perusahaan, terbukti berpengaruh yang signifikan terhadap sektor-sektor perekonomian daerah. Beberapa sektor perekonomian yang terdampak langsung adalah

- **Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor**
  Sektor perdagangan bresar dan eceran merupakan sektor pertama yang terdampak. Pembatasan pergerakan orang dan barang, tentunya akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran barang, terutama di pasar. Dilihat dari kontribusinya sebesar 16 % tahun 2019 serta mempunyai pertumbuhan sebesar 5,49 %, melemahnya sektor ini langsung menurunkan perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini terlihat secara nyata pada tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan sebesar -0,69 % dengan kontribusi masih tertinggi, sebesar 14,98 %. Perlu kebijakan-kebijakan ekstrem untuk menjaga sektor ini mampu bertahan ditengah wabah Covid 19 ini. Tahun 2021, diprediksi sektor ini akan sedikit mengalami pertumbuhan, dengan mulai bergairahnya aktivitas perdagangan masyarakat, walaupun tetap memperhikan protokol kesehatan

- **Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial.**
  Sektor ini merupakan gambaran tingginya ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap aliran dana transfer pusat. Pada tahun 2019, kontribusi sektor ini adalah 12,83 %. Kebijakan Pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2020, refocusing anggaran, serta pergeseran anggaran, berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto. Tahun 2020, sektor ini mengalami perlambatan sebesar -0,62 %, sedangkan untuk tahun 2021, jika dana transfer dari pusat telah pulih, diproyeksikan akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.

- **Sektor Konstruksi.**
  Sesuai definisi, konstruksi yang dimaksud disini adalah seluruh aktivitas konstruksi, baik dari pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Sawahlunto. Melihat dari perkembangan pembangunan di Kota Sawahlunto yang sangat didominasi oleh pembangunan Fisik Konstruksi oleh Pemerintah, kebijakan pengurangan anggaran dari Pemerintah pusat, langsung berdampak pada aktivitas konstruksi di Kota Sawahlunto. Untuk sektor swasta, juga mengalami penurunan yang signifikan di Kota Sawahlunto. Sehingga,sektor Konstruksi yang merupakan

salah satu sektor yang mempunyai Kontribusi yang besar tahun 2019 sebesar 12,00 % terhadap ekonomi daerah, mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar – 5,21 % pada tahun 2020. Tahun 2021, jika dana trnsfer dari pusat telah pulih, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.

- **Sektor Industri Pengolahan**
  Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mengalami penurunan ekonomi tahun 2020, yaitu sebesar - 2,98 %. Dengan kontribusinya yang tinggi sebesar 11,03 %, maka, penurunan ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ditengah pandemi Covid 19 ini, tentunya akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, yang berimplikasi terhadap penurunan permintaan terhadap sektor industri. Industri unggulan yang akan terdampak langsung adalah Tenun Silungkang. Sedangkan industri Kerupuk kubang, dan Sereh wangi, juga akan mengalami sedikit penurunan permintaan. Tahun 2021, jika daya beli masyarakat sudah pulih, akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.

- **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**
  Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan salah satu sektor yuang mengalami pertumbuhan ekonomi sektoral pada tahun 2020. Hal ini memberikan penjelasan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini, tindak terpengaruh kondisi pademi Covid 19, terkhusus di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2020, dengan kontribusi sebesar 8,92 %, sektor ini mampu tumbuh sebesar 0,71 % dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021, dengan kebijakan-kebijakan daerah yang terfokus ke sektor Pertanian, diproyeksikan sektor ini menjadi andalan terhadap pemulihan ekonomi daerah

- **Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum**
  Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum juga merupakan sektor yang akan terdampak langsung covid 19 ini. Untuk penyediaan akomodasi, melemahnya sektor pariwisata tahun 2020 tentu berdampak pada jumlah hunian pada hotel dan homestay di Kota Sawahlunto. Untuk sektor makan minum, secara umum sektor ini masih bergantung pada pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah Kota Sawahlunto. Dengan adanya pembatasan kegiatan rapat-rapat koordinasi, tentunya juga berdampak pada penyediaan makan minum. Akan tetapi, penurunan sektor ini hanya sedikit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, karena kontribusinya yang masih rendah terhadap pembentukan ekonomi daerah. Tahun 2019, kontribusi sektor ini hanya 2,06 % dengan penurunan pertumbuhan mencapai -10,1 % terendah dibanding seluruh sektor.

2.6.2 Dampak Covid terhadap Perkembangan Kesehatan di Sawahlunto

Pada tahun 2020 permasalahan kesehatan di Kota Sawahlunto bertambah dengan adanya pandemi COVID 19 ini. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 302 kasus terkonfirmasi positif, 269 orang sembuh, 6 orang meninggal dengan tingkat kesembuhan 89,1%. Kota Sawahlunto berstatus Zona Hijau semenjak bulan Maret s.d Juni 2021, meningkat menjadi Kuning pada bulan Juli dan Agustus, serta Oranye pada bulan September s.d Desember 2021. Peningkatan ini seiring dengan pemberlakuan status Zona Darurat Covid setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menjadi indikator utama dalam penetapan kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat.

Permasalahan kesehatan masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Sawahlunto ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan khusus di setiap level pemerintahan. Kebijakan yang diambil pada tahun 2020 dan 2021 menuntut adanya Refocussing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Tidak kurang dari 23 Milyar APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 dialokasikan untuk Biaya Tidak Terduga untuk penanganan Covid 19. Banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2020 serta peningkatan kasus yang berfluktuasi sepanjang tahun 2021 membuat Kota Sawahlunto relatif masih tinggi dalam kasus penyebaran Covid 19. Efek kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat setelah terjadinya peningkatan kasus secara umum di nasional maupun di lingkup Sumatera Barat harus diikuti

oleh Pemerintah Daerah dalam menekan kasus penyebaran Covid 19 di Kota Sawahlunto. Belum optimalnya pelaksanaan pembatasan sosial masyarakat serta pemberlakuan protokol kesehatan yang belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran ditengarai dari aktifitas sosial masyarakat yang sulit untuk dibatasi secara penuh, seperti aktifitas perdagangan, kegiatan perkantoran, mobilitas transportasi dari dan ke luar daerah, acara resepsi/hajatan, kegiatan sekolah, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus Covid 19 di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dari semula Zona Hijau menjadi Zona kuning dan Oranye secara bertahap) hingga tahun 2021 mencapai status Zona Merah (bulan Juni s.d Juli 2021).

Beberapa tindakan lain yang dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani pasien teridentifikasi positif diantaranya adalah penyediaan sarana isolasi di Wisma BDTBT dan Wisma PT. BA, pemeriksaan PCR/SWAB bagi terduga, tracking terhadap kerabat atau orang yang diduga kontak erat dengan pasien terindikasi, desinfeksi massal serta penyaluran vaksinasi Covid yang dilakukan secara bertahap kepada seluruh lapisan masyarakat.

2.6.3 Dampak Covid terhadap Aktivitas Masyarakat di Sawahlunto

Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menghentikan laju Covid-19 juga mengeluarkan kebijakan berupa Work From Home (WFH) bagi ASN, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ daring) bagi siswa dan pelajar, penerapan protoko kesehatan dan social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sebagainya, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain dari sisi kesehatan yang terdampak, diprediksi ada beberapa sektor yang mengalami penurunan akibat virus ini, diantaranya pariwisata, perdagangan, transportasi, konstruksi, pendidikan, keuangan, dan sektor lainnya.

Pembatasan social menyebabkan menurunnya mobilitas barang maupun orang yang masuk maupun keluar Sawahlunto, pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini sangat berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat juga laju perputaran uang. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini.

Simultan dengan kebijakan nasional dalam mengatasi dampak Pandemi, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19. Hal-hal tersebutlah yang secara signifikan perlu mendapat prioritas dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan yang disesuaikan dalam perubahan RPJMD. Pemerintah pusat hingga ke daerah diharapkan menekankan focus pembangunan pasca Pandemi Covid-19 untuk Pemulihan ekonomi (*Recovery economy).*

2.7 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

Setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian SPM selama 2 tahun terakhir, masih terdapat urusan wajib pelayanan dasar yang belum 100%, sehingga dirasa perlu melakukan revisi RPJMD Kota Sawahlunto agar seluruh indikator capaian SPM Kota Sawahlunto mencapai 100 %. Selain itu Kegiatan pendukung capaian SPM, masih ada yang belum optimal dalam pencapaian target RPJMD.

Adanya perbedaan indikator capaian pada tahun 2019 dengan 2020 dikarenakan pada tahun 2019 belum menerapkan penyusunan SPM sesuai dengan permendagri nomor 100 Tahun 2018. Karena masih dalam tahap sosialisasi.

Sehingga pada tahun 2020 baru mulai disesuaikan capaian indikator sesuai dengan permendagri no.100 tahun 2018.

Berdasarkan Capaian Kinerja SPM Kota Sawahlunto Pada tahun 2019 sampai 2020, dapat dlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 214 Capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2019-2020

No	Uraian	Indikator	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
A	**PENDIDIKAN**					
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	78,76%	100%	93,27%
2	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	85,99%	100%	92,09%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	85,05%	100%	56,70%
B	**KESEHATAN**					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100%	64,60%	100%	67,66%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	100%	75,54%	100%	76,78%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 -28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100%	79,49%	100%	79,68%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	38,36%	100%	38%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	86.20%	100%	76,05%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%	38.11%	100%	46,66%
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	39.49%	100%	16,72%

No	Uraian	Indikator	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	60,34%	100%	88,06%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	100%	100%	150%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100%	27,14%	100%	13,10%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	86,33%	100%	100%
C	**PEKERJAAN UMUM**					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Penyediaan Air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100%	84%	100%	85,26%
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penataan bangunan dan lingkungan dengan indikator persentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	100%	60%	-	-
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan air limbah domestik yang memadai	-	-	100%	99,86%
D	**PERUMAHAN RAKYAT**					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau	100%	82	-	-
2	Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase lingkungan yang sehat dan aman	100%	60	-	-
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah Warga negara terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	100%	0%
E	**KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					

No	Uraian	Indikator	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
		Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Rasio Petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%
2	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	-	-	100%	100%
		Tingkat waktu tanggap (response Time Rate) Daerah Layanan WMK	-	-	100%	100%
		Persentase Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	-	-	100%	100%
3	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	25%	100%	100%
4	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	-	-
F	**SOSIAL**					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang penyandang disabilitas terlantar luar panti	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar pantI	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Indikator	2019		2020	
			Target	Capaian	Target	Capaian
	Kabupaten					

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdako, 2020

2.8 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.8.1 Metodologi Pengukuran dan Penilaian Kinerja

Evaluasi terhadap hasil RPJMD merupakan amanat Pasal 299 dan 300 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Evaluasi terhadap hasil RPJMD dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota

Untuk mengetahui keberhasilan pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pada pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2018 – 2023 digunakan 2 (dua) skala pengukuran sebagai berikut :

1. Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

Untuk menyimpulkan hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran dan program dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 2. 215 Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

2. Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

Kriteria ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap tahun pencapaian target indikator kinerja RPJMD sudah terlaksana 20%. Sehingga pada pelaksanaan tahun kedua RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Tahun 2020, keberhasilan pencapaian target kinerja minimal sudah terlaksana 40 %.

Tabel 2. 216 Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
1	≥ 100 %	Telah Tercapai

2	**40,51 % - 99,99 %**	**Akan Tercapai**
3	**≤ 40 %**	**Sulit Tercapai/ Perlu Upaya Keras**

2.8.2 Evaluasi Terhadap Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan pengukuran capaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 pada tahun 2020 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 82,34 % dengan kriteria "tinggi" dan prediket pencapaian "akan tercapai". Sedangkan pcapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 sampai dengan tahun 2020 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 70,86 % dengan kriteria "sedang" dan prediket pencapaian "akan tercapai". Berikut capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023 sampai dengan tahun 2020.

Berdasarkan Skala Nilai dan Kriteria Penilaian Kinerja pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, hasil pengukuran kinerja dan pencapaian 62 indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2020, ditentukan **Kriteria Penilaian Kinerja** sebagai berikut :

a. Sebanyak 22 indikator atau **35,48 %,** dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**
   Sebanyak 15 indikator atau **24,19 %,** dengan kriteria capaian **Tinggi**
b. Sebanyak 3 indikator atau **4,84 %** dengan kriteria capaian **Sedang**
c. Sebanyak 5 indikator atau **8,06 %** dengan kriteria capaian **Rendah**
d. Sebanyak 17 indikator atau **27,42 %** dengan kriteria capaian **Sangat Rendah**

Sedangkan berdasarkan Skala Nilai dan Prediket Pencapaian Kinerja, hasil Pengukuran Kinerja 62 indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2020, ditentukan **Prediket Pencapaian Kinerja** sebagai berikut :

a. Sebanyak 12 indikator kinerja atau **19,35%** dengan prediket **telah tercapai**
b. Sebanyak 33 indikator kinerja atau **53,23 %** dengan prediket diperkirakan **akan tercapai**
c. Sebanyak 17 indikator kinerja atau **27,42 %** dengan prediket diperkirakan **sulit tercapai** atau perlu upaya keras untuk mencapainya

Tabel 2. 217 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik														
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	65	97	75	83	80.18	62.93	-	-	62.93	-		
a	Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	65	97	75	83	80.18	62.93	106.91%	75.82%	62.93	**64.88%**	**Rendah**	**Akan Tercapai**
		Persentase Rumah Ibadah agama lain yang aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
b	Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	Persentase sarana peribadatan yang memadai (%)	75	97	80	85	75.2	76.29	94.00%	89.75%	76.29	**78.65%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	15	40	20	25	16	20	80.00%	80.00%	20	**50.00%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
2	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	52	88	60	68	62.5	52.38	-	-	52.38	-		
a	Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	52	88	60	68	62.5	52.38	104.17%	77.03%	52.38	**59.52%**	**Rendah**	**Akan Tercapai**
b	meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari	Persentase budaya benda yang lestari	59.66	68.06	61.34	63.02	61.34	63.85	100.00%	101.32%	63.85	**93.81%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase budaya tak benda yang lestari	10.7	31.1	13.3	17.8	12.09	6.05	90.90%	33.99%	6.05	**19.45%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK														
1	Meningkatkan kualitas perekonomian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	5.32	5.91	5.8	5.83	5.31	-1.27	91.55%	-21.78%	-1.27	**-21.49%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	55.01	70.7	58.24	61.02	58.85	58.02	101.05%	95.08%	58.02	**82.07%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Tingkat Kemiskinan (SDGs)	2.39	2.023	2.27	2.21	2.17	2.16	104.41%	102.26%	2.16	**93.23%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
a	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Produktivitas tenaga kerja (Juta Rupiah/Jiwa)	87.605	96.54	89.68	91.35	96.04	91.09	107.09%	99.72%	91.09	**94.35%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (SDGs)	6.15	4.53	6.03	5.65	6.82	8.20	86.90%	54.87%	8.20	**18.98%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
b	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jMiliar rupiah)	466.26	754.33	513.35	565.19	392.31	395.49	76.42%	69.97%	395.49	**52.43%**	**Rendah**	**Sulit Tercapai**
c	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	9,522.39	11,024.59	9,746.16	10,008.33	10,238	10,182	105.05%	101.74%	10,182	**92.36%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	23,635	26,016	23,947	24,107	23,900	22,885	99.81%	94.93%	22,885	**87.97%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
d	Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	321,300	417,852	335,758.78	350,867.92	325,354.30	326,224.79	96.90%	92.98%	326,224.79	**78.07%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)														
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.3	80.67	73.71	75.33	72.39	72.64	98.21%	96.43%	72.64	**90.05%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
a	Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	13.36	14.96	13.62	13.92	13.16	13.17	96.62%	94.61%	13.17	**88.03%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	10.09	11.3	10.29	10.52	9.97	10.17	96.89%	96.67%	10.17	**90.00%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP Kota Sawahlunto	54.9	55.6	55	55.1	54.90	UN tidak dilaksanakan berdasarkan Edaran Mendikbud (Covid 19)	99.82%	n/a	54.90	**98.74%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Kasus Kenakalan Remaja menurun	9	2	8	7	6.9	5	113.75%	128.57%	5	**40.00%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	4	50	10	20	10.38	Kegiatan tidak dilaksanakan karena PSBB	103.80%	0.00%	10.38	**20.76%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif														
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	57.64	86.49	63.41	69.18	52.61	52.77	82.97%	76.28%	52.77	**61.01%**	**Rendah**	**Akan Tercapai**
a	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peringkat Nilai LPPD tingkat Provinsi	3	1	2	1	11	7	18.18%	14.29%	7	**14.29%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
b	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	100.00%	WTP	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
c	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	B	BB	B	B	B	B	100.00%	100.00%	B	**50.00%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Nilai Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%	100.00%	Level 3	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	80	95	85	90	83.33	26.31	98.04%	29.23%	26.31	**27.69%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
e	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	B	A	B	B	B	B	100.00%	100.00%	B	**50.00%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	17	35	20	23	34.91	46.24	174.55%	201.04%	46.24	**132.11%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
2.	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	100	100	100	100	100	100	-	-	100	-		
a	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat														
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.3	80.67	73.71	75.33	72.39	72.64	-	-	72.64	-		
a	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	69.49	72.4	69.83	70.47	69.87	70	100.06%	99.33%	70	**96.69%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase Keluarga Sehat	27	37	29	31	24.6	24	84.83%	77.42%	24	**64.86%**	**Rendah**	**Akan Tercapai**
b	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	95	99	95	96	97.10	96.07	102.21%	100.07%	96.07	**97.04%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	94.46	95.46	94.66	94.86	81.49	80.6	86.09%	84.97%	80.6	**84.43%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	≤ 2,51	≤ 2,20	≤ 2,40	≤ 2,35	2.38	3.37	100.83%	56.60%	3.37	**46.82%**	**Sangat Rendah**	**Akan Tercapai**
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan														
1	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	PDRB sektor Pariwisata-SDGs (Miliar Rupiah)	73.95	102.39	77.37	83.63	82.41	75.26	106.51%	89.99%	75.26	**73.50%**	**Sedang**	**Akan Tercapai**
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	2.76	3.87	2.95	3.16	1.42	1.00	48.14%	31.65%	1.00	**25.84%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
a	Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	n/a	90	65	70	65.12	Survei tidak dilaksanakan karena ada kebijakan PSBB	100.18%	-	65.12	**72.36%**	**Sedang**	**Akan Tercapai**
		Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	32.35	61.76	38.24	44.12	42.86	-	112.08%	-	42.86	**69.40%**	**Sedang**	**Akan Tercapai**
b	Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	60.55	66.85	61.76	63	61,76	-	61,76	-	63	**69.40%**	**Sedang**	**Akan Tercapai**
c	Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Jumlah Wisatawan (orang)	354,610	1,300,000	379,350	405,816	237,490	101,649	62.60%	25.05%	101,649	**7.82%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
d	tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	% persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	13.22	16.87	13.88	14.58	18.87	-	135.95%	-	18.87	**111.86%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai														

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	75.94	84.67	77.33	79	74.83	80.82	96.77%	102.30%	80.82	**95.45%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
a	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	54.96	80.22	72.66	74.35	62.43	65.91	85.92%	88.65%	65.91	**82.16%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	45.35	50.35	46.35	47.35	46.96	45.36	101.32%	95.80%	45.36	**90.09%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
b	Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah	0.47	0.57	0.49	0.51	0.47	0.44	95.92%	86.27%	0.44	**77.19%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
c	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56.79	70	58	60	66.67	80	114.95%	133.33%	80	**114.29%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
		Persentase Ketaatan terhadap tataruang	86	91	87	88	87.5	87.5	100.57%	99.43%	87.5	**96.15%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
c	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	6.4	1	5.4	4.4	33.79	48.36	15.98%	9.10%	48.36	**2.07%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	22.81	4	15	10	15	135.21	100.00%	7.40%	135.21	**2.96%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	84	91	86	87	31.71	93.85	36.87%	107.87%	93.85	**103.13%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya														

Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)	Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke- (%)		Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi	Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada Tahun Evaluasi (%)	Kriteria Penilaian Kinerja	Prediket Pencapaian Kinerja
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi	13.17	100	59.76	84.89	63.6	84.89	106.43%	100.00%	84.89	**84.89%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
a	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia yang terfasilitasi	19.25	100	19.25	100	56.85	87.24	295.32%	87.24%	87.24	**87.24%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Persentase ABK yang terfasilitasi	22.87	100	100	100	64.02	100	64.02%	100.00%	100	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
		Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi	7.47	100	19.79	39.57	13.95	15.02	70.49%	37.96%	15.02	**15.02%**	**Sangat Rendah**	**Sulit Tercapai**
		Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	3.09	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100	**100.00%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
b	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65.6	65.65	65.61	65.62	65.33	66.18	99.57%	100.85%	66.18	**100.81%**	**Sangat Tinggi**	**Telah tercapai**
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.53	95.58	95.54	95.55	95.51	95.54	99.97%	99.99%	95.54	**99.96%**	**Sangat Tinggi**	**Akan Tercapai**
		Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Utama	Nindya	Utama	Nindya	Penilaian tidak dilaksanakan karena ada kebijakan PSBB	100.00%	-	Nindya	**50.00%**	**Sangat Rendah**	**Akan Tercapai**
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor														
1	Tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	n/a	260	26	26	200.00	28.28	769.23%	108.77%	228.28	**87.80%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**
a	Meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.3	3.8	2.7	3	2.45	2.88	90.74%	96.00%	2.88	**75.79%**	**Tinggi**	**Akan Tercapai**



BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pola dan proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Sawahlunto pada tahun awal periode RPJMD 2018-2023 yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004, telah ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Namun untuk mengakomodir konsistensi kewenangan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diterbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya regulasi ini, untuk tahun 2021 dan 2022 program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, tidak lagi digunakan. Hal ini sejalan dengan keluarnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a) Informasi Pembangunan Daerah; dan b) Informasi Keuangan Daerah. Informasi Pemerintahan Daerah tersebut dikelola dalam SIPD.

Kemudian untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto dimana prioritas pembangunan daerah telah disinergikan dengan prioritas pembangunan Nasional, yakni :

1. PN I : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. PN 3 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. PN 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. PN 7 : Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1: Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Prioritas 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah;
3. Prioritas 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Prioritas 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;

5. Prioritas 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
6. Prioritas 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Prioritas 7: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Peningkatan nilai-nilai agama;
2. Prioritas 2 : Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WTBOS sebagai Warisan Dunia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
4. Prioritas 4 : Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan;
6. Prioritas 6 : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
7. Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing Wisata dan optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto;
8. Prioritas 8 : Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas;
9. Prioritas 9 : Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana;
10. Prioritas 10 : Peningkatan Perlindungan Sosial;
11. Prioritas 11 : Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi.

Arah Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto untuk sisa waktu RPJMD disesuaikan dengan arah pembangunan Nasinal dan Provinsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/ pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA OPD oleh masing-masing OPD. RKA OPD kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus

pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumtah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada OPD atau unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di OPD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari Penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggararan dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan Kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

1. **Transparansi dan Akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja langsung akan dipublikasikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan secara terbuka berarti pihak ketiga/swasta dan warga masyarakat mudah mendapatkan informasinya serta tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja langsung. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja langsung tidak hanya dari aspek administrasi keuangan tetapi berkaitan dengan proses perencaan, pelaksanaan dan manfaat dari kegiatan dan program.

2. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepentingan warga masyarakat.

3. **Optimalisasi Belanja Langsung**

Belanja Langsung mendukung tujuan pembangunan secara efisien dan efektif yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata warga masyarakat. Optimalisasi Belanja Langsung untuk membangun infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Prioritas**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dan program dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja guna mnedukung ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

5. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**

Belanja Daerah pada setiap kegiatan dan program disertai dengan tolok ukut dan target kinerja yang meliputi masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, Pertanggungjawaban , dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran

kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, dijabarkan sebagai berikut.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya yang dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

I. Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah Lainnya.

Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016–2020 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 JUMLAH DAN PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, TAHUN 2016- 2020

NO	URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
	PENDAPATAN	**588.738.442.431,54**	**584.882.133.253,37**	**586.463.778.018,45**	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**-0,29**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**53.388.553.982,54**	**62.459.787.921,37**	**47.227.132.335,45**	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**4,45**
a	Pajak Daerah	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	**4,71**
b	Retribusi Daerah	2.701.515.584,00	3.828.111.382,00	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	2.788.116.593,00	**3,38**
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.095.311.774,00	10.290.929.176,00	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	**4,62**
d	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.905.458.283,54	43.003.602.947,37	28.163.280.186,45	37.211.040.083,09	39.119.886.393,91	**5,63**
2	**Pendapatan Transfer**	**532.746.888.449,00**	**522.257.503.732,00**	**532.012.325.683,00**	**571.997.269.623,00**	**497.369.022.340,00**	**-1,41**
a	**Transfer Pemerintah Pusat**						
1	**Dana Perimbangan**						
a	**Dana Transfer Umum**						
1	Dana bagi Hasil	12.562.336.783,00	16.164.696.046,00	19.143.752.466,00	25.713.090.626,00	14.815.556.253,00	**9,76**
2	Dana Alokasi Umum	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	**-2,17**
b	Dana Transfer Khusus						
1	DAK Fisik	58.099.884.291,60	45.516.817.969,80	38.664.176.844,00	47.626.733.644,20	49.948.863.041,40	**-2,16**
2	DAK Non Fisis	38.733.256.194,40	30.344.545.313,20	25.776.117.896,00	31.751.155.762,80	33.299.242.027,60	**-2,16**
2	Dana Insentif Daerah	-	7.500.000.000,00	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00		**105,78**

3	Dana Otonomi Khusus						
4	Dana Keistimewaan						
5	Dana Desa	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00		28.211.222.000,00	28.631.236.000,00	**-17,47**
b	Transfer antar daerah						
1	Pendapatan Bagi hasil	20.681.044.180,00	22.184.455.403,00	22.538.372.578,00	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	**3,46**
2	Bantuan Keuangan	2.435.248.000,00	1.750.000.000,00				**-32,03**
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.603.000.000,00**	**164.841.600,00**	**7.224.320.000,00**	**8.858.200.000,00**	**19.951.455.793,90**	**1084,19**
a	Hibah	2.589.000.000,00	-		8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	**-27,00**
b	Dana darurat					11.503.247.000,00	**0,00**
c	Lain-lian pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**14.000.000,00**	164.841.600,00	7.224.320.000,00		300.147.100,90	**1315,01**

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 di atas, dimana jumlah penerimaan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah -0,29%. Walaupun penerimaan PAD telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah pendapatan transfer mengalami pengurangan dari Pemerintah Pusat sehingga memberikan dampak negatif terhadap trend pertumbuhan pendapatan. Ditambah pada tahun anggaran 2020 sebagai akibat dari Covid 19 yang telah meluluhlantahkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

Tabel 3. 2 DERAJAT OTONOMI FISKAL DAERAH (DOFD) KOTA SAWAHLUNTO 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66
2	APBD	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	587.598.325.124,00
3	DOFD	8,88	10,16	8,05	8,96	10,13
kriteria DOFD		**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**	**Sangat Kurang**

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

Apabila melihat dari persentase masing-masing akun pendapatan terhadap realisasi pendapatan, maka dapat terlihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3 Presentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto TA 2016-2020

NO	URAIAN	TA 2016	%	TA 2017	%	TA 2018	%	TA 2019	%	TA 2020	%
	PENDAPATAN	**588.738.442.431,54**		**584.882.133.253,37**		**586.463.778.018,45**		**638.026.463.488,09**		**576.857.864.031,56**	
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**53.388.553.982,54**	9,07	**62.459.787.921,37**	10,68	**47.227.132.335,45**	8,05	**57.170.993.865,09**	8,96	**59.537.385.897,66**	10,32
a	Pajak Daerah	4.686.268.341,00	0,80	5.337.144.416,00	0,91	5.546.092.124,00	0,95	5.502.589.718,00	0,86	5.602.920.091,75	0,97
b	Retribusi Daerah	2.701.515.584,00	0,46	3.828.111.382,00	0,65	3.533.959.570,00	0,60	3.624.747.865,00	0,57	2.788.116.593,00	0,48
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.095.311.774,00	1,71	10.290.929.176,00	1,76	9.983.800.455,00	1,70	10.832.616.199,00	1,70	12.026.462.819,00	2,08
d	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.905.458.283,54	6,10	43.003.602.947,37	7,35	28.163.280.186,45	4,80	37.211.040.083,09	5,83	39.119.886.393,91	6,78
2	**Pendapatan Transfer**	**532.746.888.449,00**	90,49	**522.257.503.732,00**	89,29	**532.012.325.683,00**	90,72	**571.997.269.623,00**	89,65	**497.369.022.340,00**	86,22
a	**Transfer Pemerintah Pusat**										
1	**Dana Perimbangan**										
a	**Dana Transfer Umum**										
1	Dana bagi Hasil	12.562.336.783,00	2,13	16.164.696.046,00	2,76	19.143.752.466,00	3,26	25.713.090.626,00	4,03	14.815.556.253,00	2,57
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.869.358.497,00	0,49	8.151.307.239,00	1,39	9.950.258.859,00	1,70	17.783.593.665,00	2,79	6.705.943.539,00	1,16
2	Dana Alokasi Umum	381.838.808.000,00	64,86	375.131.128.000,00	64,14	374.920.211.899,00	63,93	390.050.861.000,00	61,13	347.498.276.000,00	60,24
b	Dana Transfer Khusus										
1	DAK Fisik	58.099.884.291,60	9,87	45.516.817.969,80	7,78	38.664.176.844,00	6,59	47.626.733.644,20	7,46	49.948.863.041,40	8,66
2	DAK Non Fisis	38.733.256.194,40	6,58	30.344.545.313,20	5,19	25.776.117.896,00	4,40	31.751.155.762,80	4,98	33.299.242.027,60	5,77
3	Dana Alokasi Khusus	96.833.140.486,00	16,45	75.861.363.283,00	12,97	64.440.294.740,00	10,99	79.377.889.407,00	12,44	83.248.105.069,00	14,43
2	Dana Insentif Daerah	-		7.500.000.000,00		50.969.694.000,00		22.193.148.000,00			
3	Dana Otonomi Khusus										
4	Dana Keistimewaan										

5	Dana Desa	18.396.311.000,00	3,12	23.665.861.000,00	4,05		0,00	28.211.222.000,00	4,42	28.631.236.000,00	4,96
b	Transfer antar daerah										
1	Pendapatan Bagi hasil	20.681.044.180,00	3,51	22.184.455.403,00	3,79	22.538.372.578,00	3,84	26.451.058.590,00	4,15	23.175.849.018,00	4,02
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	20.681.044.180,00	3,51	22.184.455.403,00	3,79	22.538.372.578,00	3,84	26.451.058.590,00	4,15	23.175.849.018,00	4,02
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	-		-							
2	Bantuan Keuangan	2.435.248.000,00	0,41	1.750.000.000,00	0,30		0,00		0,00		0,00
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2.603.000.000,00**	0,44	**164.841.600,00**	0,03	**7.224.320.000,00**	1,23	**8.858.200.000,00**	1,39	**19.951.455.793,90**	3,46
a	Hibah	2.589.000.000,00	0,44	-	0,00		0,00	8.858.200.000,00	1,39	8.148.061.693,00	1,41
b	Dana darurat									11.503.247.000,00	
c	Lain-lian pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	**14.000.000,00**	0,00	164.841.600,00	0,03	7.224.320.000,00	1,23		0,00	300.147.100,90	0,05

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

Dari tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat yakni pada dana transfer berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Desa serta Dana Penyesuaian. Dimana rasionya mencapai 87 – 90 % dari total pendapatan daerah Kota Sawahlunto. Sehingga nilai pendapatan asli daerah hanya berkisar 9-10 %. Penerimaan pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah, dimana persentasenya hanya berkisar 1% dari jumlah pendapatan total. Sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari dividen penyertaan modal pada Bank Nagari dan BPR. Dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan BLUD, BOS dan kapitasi JKN.

Sedangkan apabila diperbandingkan antara anggaran dengan jumlah realisasi selama 5 (lima) tahun terakhir, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Kinerja Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto 2016-2020

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket	%	Ket
	PENDAPATAN	97,89	UT	96,06	UT	94,36	UT	94,98	UT	98,17	UT
1	**Pendapatan Asli Daerah**	89,93	UT	83,93	UT	79,28	UT	**95,67**	UT	**103,50**	OT
a	Pajak Daerah	95,90	UT	102,20	OT	100,33	OT	**92,12**	UT	**98,88**	UT
b	Retribusi Daerah	79,60	UT	93,83	UT	90,85	UT	**88,55**	UT	**89,70**	UT
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	99,33	UT	81,43	UT	99,14	UT	99,82	UT	99,99	UT
d	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	87,74	UT	81,94	UT	70,26	UT	95,81	UT	106,53	OT
2	**Pendapatan Transfer**	98,84	UT	97,76	UT	96,11	UT	96,47	UT	97,28	UT
a	**Transfer Pemerintah Pusat**										
1	**Dana Perimbangan**										
a	Dana Transfer Umum										
1	Dana Bagi Hasil	124,44	OT	124,75	OT	93,18	UT	86,38	UT	64,79	UT
2	Dana Alokasi Umum	100,00	E	100,00	E	99,94	UT	100,00	E	99,51	E
b	Dana Tranfer Khusus										
1	DAK Fisisk	2,37	UT	50,78	UT	47,13	UT	50,09	UT	56,98	UT
2	Dak Non Fisik	1,58	UT	33,86	UT	31,42	UT	33,39	UT	37,99	UT
2	Dana Insentif Daerah	-	UT	100,00	E	99,98	UT	65,86	UT	-	UT
3	Dana Otonomi Khusus										

4	Dana Keistimewaan										
5	Dana Desa	100,00	E	100,00	E			100,00	E	100,00	E
b	Transfer antar daerah										
1	Pendapatan Bagi Hasil	99,42	UT	104,82	OT	93,30	UT	105,11	OT	104,30	OT
2	Bantuan Keuangan	95,30	UT	100,00	E						
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**										
1	Hibah	86,30	UT	-		85,93	UT	85,73	UT	111,91	OT
2	Dana darurat			-						100,00	E
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	41,18	UT	82,90	UT	85,93	UT			-	

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

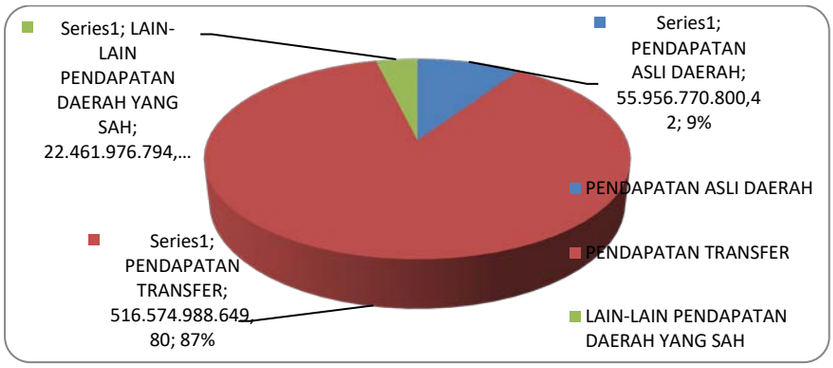
Keterangan :

OT (Over Target) = Pelampauan Target Pendapatan
UT (Under Target) = Tidak Mencapat target yang ditetapkan
E (Equal) = Sesuai dengan target yang ditetapkan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa umumnya penerimaan pendapatan Kota Sawahlunto baik itu dari segi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk 5 tahun terakhir berada pada posisi Under Target, dimana realisasi pendapatan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun untuk beberapa akun yang over target, dan hal ini perlu diperhatikan. Apakah memang kinerja dari pemungutan pendapatan tersebut telah optimal atau kesalahan dalam penganggaran yakni meletakkan target yang lebih rendah dari potensi yang seharusnya. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target dan upaya apa yang seharusnya diambil guna mengatasi permasalahan tersebut.

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020.

Grafik 3. 1 Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020



Sumber : Diolah dari LRA Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

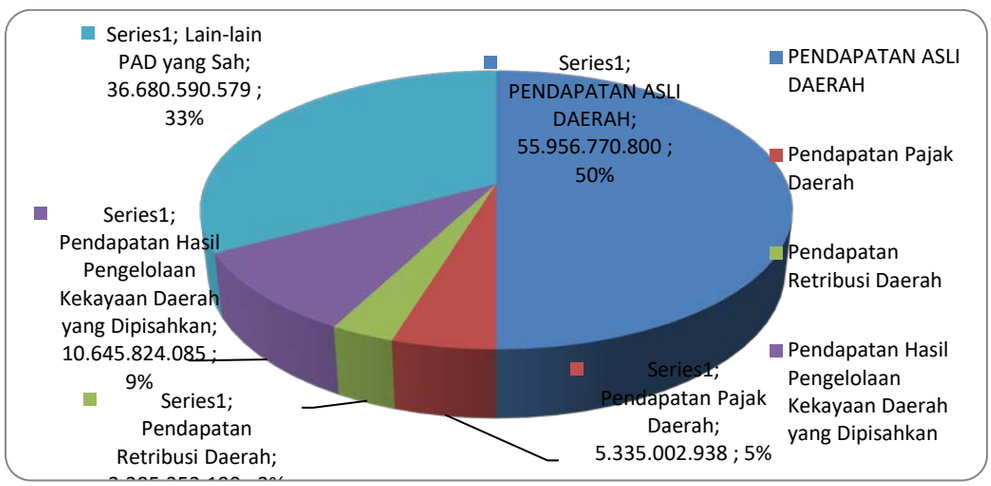
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah berasal dari Dana Perimbangan sebesar 86,82%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,40 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3,78%.

Rincian dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 65,09 %, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 19,00 %. Kemudiaan diikuti oleh penerimaan pajak daerah sebesar 9,58 %, retribusi daerah sebesar 5,38 %.

Grafik 3. 2 Rata-rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

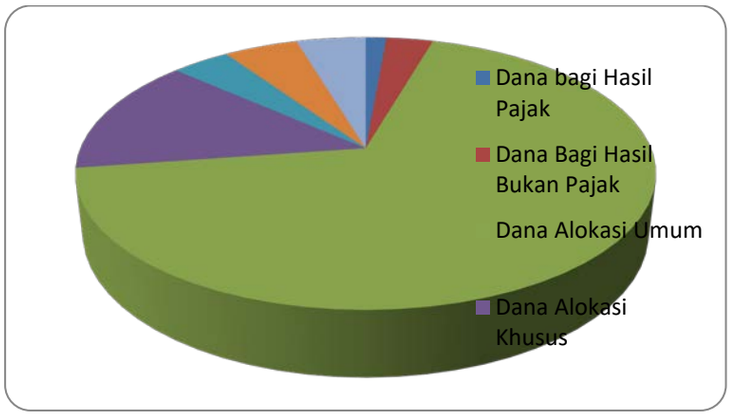


Sumber : Diolah dari LRA Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

b. Dana Perimbangan

Komposisi Dana Perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 68,19%, Dana Alokasi Khusus 13,88%, Dana Alokasi Desa 4,93%, Bagi Hasil Pajak Propinsi 4,62%, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar 4,50% dan sisanya dari Dana Penyesuaian.

Grafik 3. 3 Dana Perimbangan tahun 2016-2020



Sumber : Diolah dari LRA Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah berasal dari dana hibah dan pendapatan lainnya.

II. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah.
Secara umum komponen belanja terdiri dari:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 5 JUMLAH DAN PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 – 2020

URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
BELANJA	**542.642.593.634,12**	**522.380.939.161,19**	**518.069.931.532,61**	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	-2,91
Belanja Operasi	**409.601.445.208,82**	**398.224.838.063,86**	**440.209.799.134,61**	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	-0,36
Belanja Pegawai	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	6,95
Belanja Barang dan Jasa	182.738.691.416,05	196.437.479.686,67	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	-7,38
Belanja Bunga	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	-5,24
Belanja Hibah	9.908.257.933,00	7.271.241.900,00	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	2,54
Belanja Bantuan Sosial	-	527.038.160,00	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	
Belanja Modal	**132.832.856.170,30**	**123.743.149.829,33**	**77.527.748.798,00**	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	-13,74
Belanja Modal Tanah	188.925.750,00	863.778.100,00		577.625.000,00	800.006.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	9,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.233.926.620,30	41.737.766.804,28	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	8,77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.253.108.416,00	62.330.023.466,05	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	-26,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.439.590.725,00	2.033.512.375,00	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00	-21,07
Belanja Modal Dana BOS				0	0	
Belanja Modal Dana BLUD				0	0	
BeLanja Tak Terduga	**208.292.255,00**	**412.951.268,00**	**332.383.600,00**	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	
BeLanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00	
TRANSFER	**59.495.842.866,00**	**64.081.187.000,00**	**64.324.769.075,00**	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	3,32
TRANSFER BAGI HASIL	**59.495.842.866,00**	**863.196.000,00**	**941.735.998,00**	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	-23,85

URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)
PENDAPATAN						
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	953.480.100,00	863.196.000,00	552.761.999,00	597.333.800,00	566.650.000,00	-10,63
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	58542362766		388.973.999,00	409.332.800,00	-	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya					310.810.000,00	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	**63.217.991.000,00**	**63.383.033.077,00**	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			62.855.994.917,00	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	63.217.991.000,00	527.038.160,00	551.048.943,00	584.664.124,00	

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020 diolah

Gambaran belanja selama tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89 %. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun anggaran 2020 sehingga berdampak pada rata-rata pertumbuhan belanja. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana pandemi Covid-19 sehingga banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan tidak terlaksana. Ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan atas dana transfer ke daerah. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan Kota Sawahlunto dalam membiayai program dan kegiatannya, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3. 6 Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66
2	Dana Bagi Hasil	12.562.336.783,00	16.164.696.046,00	19.143.752.466,00	25.713.090.626,00	14.815.556.253,00
3	Dana Alokasi Umum	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00
	Jumlah A	**447.789.698.765,54**	**453.755.611.967,37**	**441.291.096.700,45**	**472.934.945.491,09**	**421.851.218.150,66**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Pegawai	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00
	Jumlah B	**215.514.779.305,00**	**192.528.893.245,00**	**226.004.496.283,00**	**232.810.851.029,00**	**274.835.588.932,00**
	Kemampuan Keuangan Daerah	**232.274.919.460,54**	**261.226.718.722,37**	**215.286.600.417,45**	**240.124.094.462,09**	**147.015.629.218,66**

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto berada pada posisi kemampuan keuangan sangat rendah.

III. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;

2) pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan

3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel di bawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/ kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu selama 5 tahun terakhir,

Tabel 3. 7 Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Tingkat Pertumbuhan
	Realisasi					
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN DAERAH	**47.587.060.419,26**	**15.830.743.966,35**	**6.946.009.591,87**	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	-8,27
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	47.340.719.381,26	15.638.881.901,35	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	5,87
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah				8.008.445.961,06		-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		191.862.065,00	131.925.200,00	80.560.500,00	24.513.000,00	-
Penerimaan Piutang Daerah	246.341.038,00					
Jumlah	**47.587.060.419,26**	**15.830.743.966,35**	**6.946.009.591,87**	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	
PENGELUARAN DAERAH						
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.375.000.000,00	6.270.000.000,00	5.000.000.000,00	5.946.902.000,00	752.000.000,00	-38,15
Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,33	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	149,79
Pemberian Pinjaman Daerah						
Jumlah	**18.541.666.666,33**	**7.436.666.666,66**	**6.166.666.666,66**	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	
Pembiayaan Neto	**29.045.393.752,93**	**8.394.077.299,69**	**779.342.925,21**	**- 2.184.587.830,61**	**11.474.898.868,81**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**47.587.060.419,26**	**15.830.743.966,35**	**6.946.009.591,87**	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan netto mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan makin sedikitnya jumlah SILPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan dari sisi pengeluaran daerah mengalami peningkatan yakni untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang. Untuk tahun 2020 pembiayaan daerah mengalami perubahan yang cukup besar dimana jumlah penyertaan modal hanya ditargetkan untuk pemberian pinjaman lunak ke pada masyarakat. Ini merupakan salah satu program unggulan dari kepala daerah terpilih dan ini juga akibat makin banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 disampimg karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sehingga berdampak pada kemampuan keuangan daerah sehingga untuk penyertaan modal pada Bank Nagari pada tahun ini tidak bisa direalisasikan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 8 Neraca Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

URAIAN ASET	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
Aset Lancar	26.168.276.290,63	20.387.407.618,56	18.433.789.335,90	37.219.485.368,40	52.748.532.582,88	27,99
Investasi Jangka Panjang	99.393.513.746,25	102.215.265.811,26	104.537.898.751,32	101.115.725.996,06	101.867.725.996,06	0,65
Aset Tetap	483.009.419.214,20	689.756.998.630,18	725.089.573.083,69	610.763.954.775,30	802.873.919.535,36	15,9
Dana Cadangan						
Aset Lainnya	37.403.356.457,60	8.426.365.988,54	21.093.479.260,55	20.607.403.558,45	20.294.034.832,45	17,26
JUMLAH ASET	**645.974.565.708,68**	**820.786.038.048,54**	**869.154.740.431,46**	**769.706.569.698,21**	**977.784.212.946,75**	12,14
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	6.990.968.953,39	16.732.577.268,89	5.686.488.882,05	9.600.519.502,67	6.525.554.960,71	27,53
Kewajiban Jangka Panjang	24.700.093.894,75	22.164.197.950,82	19.335.135.758,55	19.424.375.712,52	17.105.192.770,14	-8,63
JUMLAH KEWAJIBAN	**31.691.062.848,14**	**38.896.775.219,71**	**25.021.624.640,60**	**29.024.895.215,19**	**23.630.747.730,85**	-3,88
EKUITAS						
SILPA	-					
Pendapatan yang ditangguhkan	-					
Cadangan Piutang	-	-				-
Cadangan Persediaan	-					
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	-					
EDL Bukan Silpa	-					
Ekuitas Dana Investasi	-					

URAIAN ASET	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
JUMLAH EKUITAS	**614.283.502.860,54**	**781.889.262.828,83**	**844.133.115.790,86**	**740.681.674.483,02**	**954.153.465.215,90**	12,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**645.974.565.708,68**	**820.786.038.048,50**	**869.154.740.431,46**	**769.706.569.698,21**	**977.784.212.946,75**	12,14

Sumber : LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020

a) Aset
Aset Pemerintah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2016 - 2020 secara total mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Terdapat penambahan pada aset lancar dan aset tetap dan aset lainnya dengan nilai yang cukup signifikan, sedangkan untuk investasi jangka panjang tidak mengalami penambahan yang berarti.

b) Kewajiban
Kewajiban pemerintah daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami fluktuasi antar waktu, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar -8,88 %. Kewajiban ini berasal dari kewajiban jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,58 %. Kewajiban jangka pendek ini merupakan pinjaman RSUD selaku BLUD ke pihak perbankan dan kewajiban jangka panjang mengalami pengurangan akibat telah dilakukan kewajiban pembayaran atas tagihan pokok Bank Dunia atas pembangunan pasar Kota Sawahlunto.

c) Ekuitas
Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dijelaskan di atas, maka dilakukan perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Adapun rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dari tahun ke tahun pada periode 2016 sampai 2020 disajikan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3. 9 Rasio Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar (current ratio)	3,74	1,22	3,24	3,88	8,08
2	Rasio quick (quick ratio)	2,94	0,89	2,33	3,06	7
3	Debt to aset ratio	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02
4	Debt to equity ratio	0,05	0,05	0,03	0,04	0,02

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto 2016-2020 diolah

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan sebagai berikut.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Pemerintah Kota yaitu:

1. Rasio lancar (current ratio)
   Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio cepat (quick ratio)
   Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset
   Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal
   Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara umum merupakan kebijakan pengelolaan APBD yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah diharapkan memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerah yang digunakan unruk mendanai belanja daerah dengan efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto. Kebijakan pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan pendapatan

Dengan adanya pandemi Covid 19, maka Keputusan Bersama Menteri Daam Negeri Dan Menteri Keunagan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional telah mengamanatkan penyesuaian target Pendapatan Daerah dalam APBD melalui :

a. Penyesuaian rincian alokasi pendapatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

b. Penyesuaian PAD (pajak dan retribusi daerah) dengen memperhatikan perkiraan asumsi makro (pertumbuhan rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi,inflasi) sebagai akibat penurunan kegiatan perekonomian.

Sedangkan untuk PAD, dengan adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan aktivitas yang melibatkan orang banyak, sehingga banyak kegiatan pelayanan publik, aktivitas ekonomi masayrakat yang menjadi sumber PAD baik dari pajak maupun retribusi mengalami penurunan secara sugnifikan. Oleh karena itu dengan melihat kondisi sktual kinerja ekonomi daerah, memperhatikan realisasi APBD Kota Sawahlunto sampai dengan semester 1 Tahun Anggaran 2021 serta mengingat besarnya penurunan pendapatan yang bersumber dari dana transfer dari pusat dan Provinsi Sumatera Barat, serta penurunan potensi pendapatan dari PAD, maka Kebijakan Pendapatan Daerah pada Kota Sawahlunto diarahkan pada :

1. Penyesuian dan optimalisasi target pendapatan asli daerah baik dari melalui Pajak Daerah maupun Terribusi Daerah secara terencana, dengan perkiraan yang terukur secara nasional dan memperhatkan realisasi pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada serta usaha untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi;

2. Penyesuian kebijakan dana perimbangan, dana bagi hasil dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Barat;

3. Memperluas suber-sumber pendapatan daerah anata lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;

4. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayan pajak daerah dan retribusi daerah dan kompone pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/ memnfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) untuk meminimalisir tatap muka yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19 serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;

5. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

6. Meningkatkan koordinasi antar OPD yang melakukan pengelolaan/ Pemungutan/ sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sawahlunto;

7. Meningkatkan kinerja pengelolaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja BUMD yang memungkinkan BUMD dioptimalkan;

8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya, serta pihak-pihak tekait lainnya dengan peningkatan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto, khususnya yang berasal dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

9. Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sektor swasta yang ada di Kota Sawalunto.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan berupa perluasan objek pendapatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan perlu dijamin agar pungutan tersebut tetap memungkinkan terpeliharanya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan kepentingan publik lainnya. Secara intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ada.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum dalam perencanaan pendapatan asli daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Target pendapatan asli daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap jenis penerimaan, objek penerimaan serta rincian objek penerimaan;
b. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

Upaya riil yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto adalah melalui :

- Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi dengan memberikan pengertian tentang pentingnya pajak dan retribusi bagi pembangunan daerah.
- Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/ retribusi sehingga mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak.
- Mengoptimalkan nilai manfaat uang yang ada pada kas daerah melalui penyertaan modal pada lembaga keuangan serta didepositokan untuk jangka waktu tertentu. Upaya tersebut dilakukan sepanjang tidak mengganggu likuiditas kas daerah.
- Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi oleh OPD terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target.
- Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.

2. Dana Perimbangan

Kebijakan umum dalam perencanaan dana perimbangan didasarkan pada pagu definitif dana perimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan umum dalam perencanaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dana darurat yang diterima dari pemerintah dan bantuan uang dan barang dari badan/lembaga tertentu untuk penanggulangan bencana alam yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah;
b. Hibah yang diterima, baik berupa uang maupun barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah;
c. Penerimaan hibah yang berupa barang mempertimbangkan nilai manfaatnya sehingga dapat memberi manfaat yang optimal dan tidak membebani belanja daerah dikemudian hari;
d. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekwensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah;
e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Belanja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran *(fixed cost)*, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal Kota Sawahlunto menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) tahapan kebijakan penanganan wabah Covid-19 yang terdiri dari :

a. Tahap I : Penguatan fasilitas kesehatan peningkatan perilaku sehat dan social distancing, pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat tes dan sarana lab), penanganan pasien (APD, alkes, sarana dan prasarana kesehatan).

b. Tahap 2 : Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha Perluasan bantuan sosial, listrik gratis, krtu prakerja, dll, keringanan pajak untuk dunia usaha dan pekerja, dan keringanan kredit untuk dinia usaha, program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM.

c. Tahap 3 : Mengurangi tekanan sektor keuangan Stimulus moneter dan keuangan, Bantuan likuiditas terhadap sektor keuangan, penurunn suku bunga. Secara spesifik terkait kondisi perekonomian nasional, wabah covid-19 berpeluang besar membawa resesi global pada tahun 2020.

Untuk itu Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Kebijakan ini merupakan tindaklanjut dari amanat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk menjalankan program pemulihan ekonomi nasional sebagai upaya melakukan

Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Adapun ruang lingkup program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN) ini meliputi :

1. PMN (Penyertaan Modal Negara)

Dilakukan melalui PMN kepada BUMN dan/ atau melalui BUMN yang ditunjuk yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19 dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.

2. Penempatan Dana

Ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja. Penempatan dana dimaksud ditujukan bagi bank peserta dan berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas bagi Bank Pelaksana yang membutuhkan dana penyangga likuiditas. Sedangkan Bank Pelaksana memberikan dukungan restukrurisasi kredit/ pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi.

3. Investasi Pemerintah

4. Penjaminan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan mengikat.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antra pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Dengan merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

a. Belanja Wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 bidang yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permahan rakyat, ketentaraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial). belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayana dasar masyarakat antara lain, pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja

untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM bidang Pendidikan
Dialokasikan anggarannya untuk dapat menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- Standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- Standar peserta didik yakni perlengkapan dasar Peserta Didik dengan Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester, yang hanya diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- Pembiayaan Pendidikan.
- Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
- Kualitas Kepala Sekolah paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, pada setiap Satuan Pendidikan.
- Kualitas tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Pengalokasian anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini;
2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.
4) 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan
Alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

- Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA.
- Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat.
- Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
  (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
  (2) Standar kualias yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes Laboratorium, Tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
  (3) Menjamin ketersediaan Formulir partograf, Tablet tambah darah, Alat deteksi risiko ibu hamil, Kartu ibu/rekam medis ibu, dan Buku KIA.
  (4) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis kebidanan atau Bidan atau Perawat.
  (5) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- Menjamin ketersediaan Vaksin Hepatitis B0, Vitamin K1 Injeksi, Salep/tetes mata antibiotic, Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, dan Buku KIA.
- Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter/ dokter spesialis anak atau Bidan atau Perawat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
  (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal.
  (2) Standar kualitas yakni Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam), dan Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).
- Menjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA, Vitamin A Biru, Vitamin A Merah, Vaksin imunisasi dasar, Vaksin imunisasi lanjutan, Jarum suntik dan BHP, dan Peralatan anafilaktik.
- Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi Dokter, atau Bidan, atau Perawat dan Gizi dan Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti Guru PAUD dan Kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
  (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi.
  (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- Menjamin ketersediaan Buku Rapor Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
- Menjamin ketersediaan tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter gigi, atau Bidan, atau Perawat, Gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan

terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni Guru, Kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah, meliputi :
  - Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera.
  - Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan
- Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
  (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
  (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
  (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- Menjamin ketersediaan Strip uji pemeriksaan (Gula darah dan Kolesterol), Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT), dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G), dan Buku Kesehatan Lansia
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi :
  (1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
  (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular ang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Pemeriksaan gangguan mental, Pemeriksaan gangguan kognitif, Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan Anamnesa perilaku berisiko:
  (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- Menjamin ketersediaan Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE, Tensimeter, dan Formulir pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
  (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

- Menjamin ketersediaan Glukometer, Strip tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet, Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM dan Pedoman dan media KIE.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

  (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

  (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi

  (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru, Kit berisi 2 Alat Fiksasi, Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, dan Media KIE.
- Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi:

  (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni Pemeriksaan status mental dan Wawancara;

  (2) Edukasi:

  (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan

  (4) Edukasi kepatuhan minum obat

  (5) Melakukan rujukan jika diperlukan
- Menjamin ketersediaan Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), Reagen Zn TB, Masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, Catridge Tes cepat Molekuler, Formulir pencatatan dan pelaporan, Pedoman/ standar operasional prosedur.
- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), Penata Rontgen, Tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :

  (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.

  (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.

  (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan

  (4) Melakukan rujukan jika diperlukan
- Menjamin ketersediaan Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, Tes Cepat HIV (RDT) pertama), Bahan medis habis pakai, Alat tulis, Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

- Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau Perawat, Bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain Pendamping dan Penjangkauan.
- Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
  (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
  (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
  (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan;
2) 100% Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan
3) 100% Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan
4) 100% Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan
5) 100% Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan
6) 100% Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan
7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan
8) 100% Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan
9) 100% Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan
10) 100% Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
11) 100% Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan
12) 100% Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota harus diprioritaskan kepada sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air terlayani melalui sistem penyediaan air minum.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/kota, yang terdiri dari :

1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dialokasikan anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani,
- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota melalui tahapan Pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, dan Pelaksanaan rehabilitasi rumah.
- Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana, dan Pembangunan Rumah.
- Pembangunan Baru/Relokasi Korban Bencana melalui tahapan Pengadaan Lahan, Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni, Pembangunan Rumah Khusus + PSU.
- Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;

2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk menjamin terlaksananya penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana untuk terlaksananya respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk menjamin terlaksananya layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- Investigasi Kejadian Kebakaran untuk menjamin terlaksananya layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran untuk menjamin terlaksananya layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota guna menjamin terlaksananya Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

1) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada;
2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, yakni:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang dapat menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa:

  a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

  b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

  c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

  d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan Kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi social dan rujukan

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang dapat menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa:

  a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial

  b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kabupaten/ kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;

2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;

3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;

4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti;

5) 100% Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada :

a. Pergeseran anggaran antar Perangkat daerah (pengurangan anggaran), antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan natar rincian obyek yang disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang bersifat mendesak akibat Pandemi Covid-19;

b. Penambahan program dan kegiatan baru khususnya diarahkan pada kebutuhan mendesak untuk penanganan Covid-19 pada lingkup penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi, serta kebutuhan untuk program dan kegiatan yang bersumber dari dana khusus yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;

c. Realokasi Anggaran Honorarium, Bantuan Sosial dan Hibah kepada kelompok Masyarakat/ Ormas/ Lembaga Sosial Masyarakat dialihkan menjadi Anggaran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin/ Kurang Mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat pendemi Covid-19 dengan memperhatikan usaha untuk menghindari tumpang tindih sasaran bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat;

d. Penyesuaian kegiatan yang mengundang orang banyak dari Tatap Muka Langsung menjadi :

(1) pengunaan video conference/ teleconference untuk kegiatan rapat, sosialisasi, workshop, FGD, serta

(2) metode e-learning untuk kegiatan pelatihan, bimtek.

e. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/ rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat yatu pembayan gaji dan tunjangan PNS, serta belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif, serta pengehematan belanja barang non operasional (perjalanan dinas, paket meeting, rapat, dan honorarium), dimana dilakukan juga pengurangan belanja honorraium kegiatan, honorarium pengelola Dana BOS, serta uang lembur (hanya yang bersifat mendesak) pengurangan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal yang bersifat mendesak;

f. Pelaksanaan Belanja Modal untuk pembangunan/ perbiakan infrastruktur menerapkan pola padat karya (cash for work);

g. Pembiayaan kegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan yang diarahkan dengan pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek di internal perangkat daerah dengan sisa anggaran hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dengan penurunan dana transfer dari pusat dan provinsi serta PAD.

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan pembiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Kebutuhan anggaran untuk melaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan serta program kegiatan pembangunan ternyata belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan

pendapatan sehingga mengakibatkan perbedaan yang signifikan antara rencana pendapatan dengan rencana belanja, dalam hal ini rencana belanja lebih besar dari rencana pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. Untuk menutupi defisit tersebut, maka diusahakan penerimaan pembiayaan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah.

c. Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

e. Penerimaan piutang daerah
Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

f. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (*Investasi*) Daerah
Penerimaan kembali penyertaan modal (*investasi*) daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari penyertaan modal yang diterima kembali.

Pengeluaran Pembiayan :

a. Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
   1) Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD atau BUMN dalam setiap tahun anggaran;

2) Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan;
3) Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

c. Pembayaran Pokok Utang
Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan, atas pinjaman-pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Sawahlunto pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan kedepan.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Pemerintah Kota Sawahlunto. Rata-rata selama 5 tahun terakhir, serapan realisasi terhadap anggaran belanja adalah 89,90 persen

Tabel 3. 10 Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016-2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	**601.416.292.738,00**	**588.738.442.431,54**	**608.862.187.995,00**	**584.882.133.253,37**	**621.509.738.839,00**	**586.463.778.018,45**	**671.749.080.316,00**	**638.026.463.488,09**	**587.598.325.124,00**	**576.857.864.031,56**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**59.365.674.458,00**	**53.388.553.982,54**	**74.422.971.261,00**	**62.459.787.921,37**	**59.573.117.340,00**	**47.227.132.335,45**	**59.758.667.807,00**	**57.170.993.865,09**	**57.525.368.782,00**	**59.537.385.897,66**
Pendapatan Pajak Daerah	4.886.500.000,00	4.686.268.341,00	5.222.500.000,00	5.337.144.416,00	5.527.610.850,00	5.546.092.124,00	5.973.337.400,00	5.502.589.718,00	5.666.500.000,00	5.602.920.091,75
Pendapatan Retribusi Daerah	3.394.068.800,00	2.701.515.584,00	4.079.675.450,00	3.828.111.382,00	3.889.736.594,00	3.533.959.570,00	4.093.327.838,00	3.625.062.865,00	3.108.095.850,00	2.788.116.593,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.163.356.258,00	10.095.311.774,00	12.637.608.741,00	10.290.929.176,00	10.070.154.996,00	9.983.800.455,00	10.852.616.199,00	10.832.616.199,00	12.027.566.102,00	12.026.462.819,00
Lain-lain PAD yang Sah	40.921.749.400,00	35.905.458.283,54	52.483.187.070,00	43.003.602.947,37	40.085.614.900,00	28.163.280.186,45	38.839.386.370,00	37.210.725.083,09	36.723.206.830,00	39.119.886.393,91
PENDAPATAN TRANSFER	**539.016.618.280,00**	**532.746.888.449,00**	**534.240.375.134,00**	**522.257.503.732,00**	**553.529.621.499,00**	**458.504.259.105,00**	**601.357.412.509,00**	**571.997.269.623,00**	**511.288.709.342,00**	**497.369.022.340,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**497.263.221.700,00**	**491.234.285.269,00**	**480.159.225.134,00**	**467.157.187.329,00**	**478.395.215.499,00**	**458.504.259.105,00**	**514.284.787.173,00**	**495.141.841.033,00**	**460.437.498.175,00**	**445.561.937.322,00**
Bagi Hasil Pajak	11.257.326.850,00	9.692.978.286,00	10.735.742.009,00	8.013.388.807,00	12.314.147.293,00	9.193.493.607,00	9.825.722.000,00	7.929.496.961,00	14.461.830.941,00	8.109.612.714,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.762.708.000,00	2.869.358.497,00	4.662.004.125,00	8.151.307.239,00	8.908.939.206,00	9.950.258.859,00	19.316.409.173,00	17.783.593.665,00	9.125.477.484,00	6.705.943.539,00
Dana Alokasi Umum	381.838.808.000	############	375.131.128.000,00	375.131.128.000,00	375.131.128.000,00	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	390.050.861.000,00	349.197.280.000,00	347.498.276.000,00
Dana Alokasi Khusus	102.404.378.850	96.833.140.486,00	89.630.351.000,00	75.861.363.283,00	82.041.001.000,00	64.440.294.740,00	91.145.220.000,00	76.333.533.741,00	87.652.909.750,00	83.248.105.069,00
Dana Penugasan							3.946.575.000,00	3.044.355.666,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**18.396.311.000,00**	**18.396.311.000,00**	**31.165.861.000,00**	**31.165.861.000,00**	**50.977.792.000,00**	**0,00**	**61.907.617.000,00**	**50.404.370.000,00**	**28.631.236.000,00**	**28.631.236.000,00**
Dana Penyesuaian	-		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	50.977.792.000,00	0,00	33.696.395.000,00	22.193.148.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Desa	18.396.311.000	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00	23.665.861.000,00			28.211.222.000,00	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00	28.631.236.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**23.357.085.580,00**	**23.116.292.180,00**	**22.915.289.000,00**	**23.934.455.403,00**	**24.156.614.000,00**	**0,00**	**25.165.008.336,00**	**26.451.058.590,00**	**22.219.975.167,00**	**23.175.849.018,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.357.085.580,00	23.116.292.180,00	22.915.289.000,00	23.934.455.403,00	24.156.614.000,00	0,00	25.165.008.336,00	26.451.058.590,00	22.219.975.167,00	23.175.849.018,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**3.034.000.000,00**	**2.603.000.000,00**	**198.841.600,00**	**164.841.600,00**	**8.407.000.000,00**	**80.732.386.578,00**	**10.633.000.000,00**	**8.858.200.000,00**	**18.784.247.000,00**	**19.951.455.793,90**
Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	2.589.000.000,00				7224320000	10.333.000.000,00	8.858.200.000,00	7.281.000.000,00	8.148.061.693,00
Pendapatan Lainnya	34.000.000,00	14.000.000,00	198.841.600,00	164.841.600,00	8.407.000.000,00	73.508.066.578,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.147.100,90
Dana Darurat									11.503.247.000,00	11.503.247.000,00

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA	**600.084.082.082,00**	**542.642.593.634,12**	**585.566.389.555,98**	**522.380.939.161,19**	**575.628.387.348,98**	**518.069.931.532,61**	**627.701.487.157,00**	**551.743.879.687,01**	**540.228.136.333,65**	**476.891.824.080,79**
Belanja Operasi	**447.020.103.474,00**	**409.601.445.208,82**	**440.985.851.116,98**	**398.224.838.063,86**	**480.546.264.411,98**	**440.209.799.134,61**	**498.572.264.780,00**	**457.292.466.687,51**	**432.041.894.181,65**	**397.517.138.143,22**
Belanja Pegawai	############	############	211.980.429.223,00	192.528.893.245,00	236.084.907.464,00	226.004.496.283,00	243.078.075.868,00	232.810.851.029,00	293.207.606.196,65	274.835.588.932,00
Belanja Barang dan Jasa	############	############	219.021.110.733,98	196.437.479.686,67	223.919.082.108,98	195.048.782.209,00	244.007.903.912,00	214.487.904.967,00	130.789.187.985,00	115.269.632.648,50
Belanja Bunga	1.500.000.000,00	1.439.716.554,77	1.500.000.000,00	1.460.185.072,19	1.564.262.563,00	1.438.215.088,61	1.500.000.000,00	1.251.297.942,51	1.500.000.000,00	1.152.516.275,72
Belanja Hibah	10.367.803.040,00	9.908.257.933,00	7.957.273.000,00	7.271.241.900,00	18.978.012.276,00	17.718.305.554,00	6.139.785.000,00	5.185.275.249,00	3.428.100.000,00	3.309.250.287,00
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	-	527.038.160,00	527.038.160,00		0	3.846.500.000,00	3.557.137.500,00	3.117.000.000,00	2.950.150.000,00
Belanja Modal	**152.395.846.988,00**	**132.832.856.170,30**	**143.830.538.439,00**	**123.743.149.829,33**	**94.332.122.937,00**	**77.527.748.798,00**	**128.379.222.377,00**	**94.384.258.018,50**	**80.646.242.152,00**	**63.699.147.392,57**
Belanja Modal Tanah	196.386.000,00	188.925.750,00	897.419.000,00	863.778.100,00			600.000.000,00	577.625.000,00	836.891.880,00	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.974.449.548,00	23.717.304.659,00	20.885.424.866,00	16.778.069.084,00	18.849.647.647,00	17.107.565.569,00	33.860.834.043,00	27.959.464.883,50	31.333.925.305,00	29.000.506.074,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.765.669.280,00	34.233.926.620,30	41.617.710.645,00	41.737.766.804,28	20.722.125.630,00	16.568.199.763,00	21.817.539.061,00	12.886.728.863,00	26.433.260.880,00	25.216.284.417,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.501.625.560,00	72.253.108.416,00	70.916.663.200,00	62.330.023.466,05	53.062.517.500,00	42.267.197.546,00	71.321.049.173,00	52.411.798.670,00	21.380.864.087,00	8.025.081.127,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.957.716.600,00	2.439.590.725,00	9.513.320.728,00	2.033.512.375,00	1.697.832.160,00	1.584.785.920,00	779.800.100,00	548.640.602,00	661.300.000,00	657.269.773,00
Belanja Modal Dana BOS							0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Dana BLUD							0,00	0,00	0,00	0,00
BeLanja Tak Terduga	**668.131.620,00**	**208.292.255,00**	**750.000.000,00**	**412.951.268,00**	**750.000.000,00**	**332.383.600,00**	**750.000.000,00**	**67.154.981,00**	**27.540.000.000,00**	**15.675.538.545,00**
BeLanja Tak Terduga	668.131.620,00	208.292.255,00	750.000.000,00	412.951.268,00	750.000.000,00	332.383.600,00	750.000.000,00	67.154.981,00	27.540.000.000,00	15.675.538.545,00
TRANSFER	**59.600.581.840,00**	**59.495.842.866,00**	**64.148.211.000,00**	**64.081.187.000,00**	**64.732.012.160,00**	**64.324.769.075,00**	**71.390.231.383,00**	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**67.371.834.124,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**59.600.581.840,00**	**59.495.842.866,00**	**930.220.000,00**	**863.196.000,00**	**941.736.000,00**	**941.735.998,00**	**1.006.666.600,00**	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**877.460.000,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	953.480.100,00	953.480.100,00	930.220.000,00	863.196.000,00	552.762.000,00	552.761.999,00	597.333.800,00	597.333.800,00	566.650.000,00	566.650.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	58647101740	58542362766			388.974.000,00	388.973.999,00	409.332.800,00	409.332.800,00	-	-
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya									310.810.000,00	310.810.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	**63.217.991.000,00**	**63.217.991.000,00**	**63.790.276.160,00**	**63.383.033.077,00**	**70.383.564.783,00**	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.494.374.124,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa					63.790.276.160,00	############	69.832.515.800,00	############	65.909.710.000,00	############
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	63.217.991.000,00	63.217.991.000,00		527.038.160,00	551.048.983,00	551.048.943,00	584.664.124,00	584.664.124,00
Surplus/defisit	**-58.268.371.184,00**	**-13.399.994.068,58**	**-40.852.412.560,98**	**-1.579.992.907,82**	**-18.850.660.669,98**	**4.069.077.410,84**	**-27.342.638.224,00**	**15.553.640.366,08**	**-20.001.645.333,65**	**32.594.205.826,77**

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PEMBIAYAAN										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**78.721.037.850,66**	**47.587.060.419,26**	**48.289.079.227,64**	**15.830.743.966,35**	**25.017.327.336,64**	**6.946.009.591,87**	**46.295.009.978,66**	**12.937.426.797,11**	**22.418.312.000,31**	**13.393.565.535,47**
Penggunaan SILPA	47.340.719.381,26	47.340.719.381,26	15.645.399.684,35	15.638.881.901,35	6.814.084.391,87	6.814.084.391,870	4.848.420.336,05	4.848.420.336,05	11.518.993.036,72	13.369.052.535,47
Pinjaman Dalam Negeri							10.264.803.088,00	8.008.445.961,06	-	-
Penerimaan Kembali Piutang	############	246.341.038,00	32.643.679.543,29	191.862.065,00	18.203.242.944,77	131.925.200,00	31.181.786.554,61	80.560.500,00	10.899.318.963,59	24.513.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**20.452.666.666,66**	**18.541.666.666,33**	**7.436.666.666,66**	**7.436.666.666,66**	**6.166.666.666,66**	**6.166.666.666,66**	**18.952.371.754,66**	**15.122.014.627,72**	**2.416.666.666,66**	**1.918.666.666,66**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	19.286.000.000,00	17.375.000.000,00	6.270.000.000,00	6.270.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	7.520.902.000,00	5.946.902.000,00	1.250.000.000,00	752.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.166.666.666,66	1.166.666.666,33	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	11.431.469.754,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66
Pembiayaan Netto	**58.268.371.184,00**	**29.045.393.752,93**	**40.852.412.560,98**	**8.394.077.299,69**	**18.850.660.669,98**	**779.342.925,21**	**27.342.638.224,00**	**-2.184.587.830,61**	**20.001.645.333,65**	**11.474.898.868,81**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**15.645.399.684,35**	**0,00**	**6.814.084.391,87**	**0,00**	**4.848.420.336,05**	**0,00**	**13.369.052.535,47**	**0,00**	**44.069.104.695,58**

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 206-2020

Tabel 3. 11 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sawahunto Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%
	BELANJA					
A	**Belanja Operasi**					
1	Belanja Pegawai	94,61	90,82	95,73	95,78	93,73
2	Belanja Barang dan Jasa	88,17	89,69	87,11	87,9	88,13
3	Belanja Bunga	95,98	97,35	91,94	83,42	76,83
4	Belanja Hibah	97,75	91,78	93,36	84,45	96,53
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	92,48	94,65
6	Belanja Bantuan Keuangan			99,36	0	0
B	**Belanja Modal**					
1	Belanja Modal Tanah	96,2	96,25	0	96,27	95,59
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94,97	80,33	90,76	82,57	92,55
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,65	100,29	79,95	59,07	95,4
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	83,53	87,89	79,66	73,49	37,53
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82,48	21,38	93,34	70,36	99,39
6	Belanja Modal Dana BOS					
7	Belanja Modal Dana BLUD					
C	**BeLanja Tak Terduga**					
1	BeLanja Tak Terduga	31,18	55,06	44,32	8,95	56,92
D	**TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN**					
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	100	92,79	100	100	100
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	99,82	0	100	100	100
3	Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0
E	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**					
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	100	0	99,05	100
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia periode Tahun 2016 – 2020 rata-rata 90 persen dan untuk nilai yang paling tinggi terletak pada Belanja Pegawai.

Sesuai dengan peraturan perundangan untuk pengaturan mandatory spending diatur sebagai berikut :

a. Anggaran fungsi Pendidikan minimal 20%
   Dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan, Pemerintah Daerah secra konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Anggaran Kesehatan minimal 10%
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan paling sedikit 10% dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Anggaran Infrastruktur pelayanan publik minimal 40%
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja infratsruktur pelayanan publik minimal 40% dari belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 3. 12 Alokasi Dana Pendidikan Tahun 2018-2023

NO	ALOKASI ANGGARAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja langsung bidang pendidikan						
	Belanja Pegawai	93.708.500.306,00	94.631.888.444,00	94.526.677.854,00	85.672.460.354,00		
	Belanja Barang dan Jasa	20.405.793.517,00	22.439.687.115,00	12.477.503.277,00	15.992.126.064,00		
	Belanja Modal	10.478.835.560,00	11.916.088.698,00	11.255.336.398,00	10.103.072.530,00	11.679.098.658,00	13.583.353.448,91
	Belanja dluar dinas Pendidikan yang menghasilkan output menunjang pendidikan						
	Belanja Operasi					117.046.513.700,00	122.250.181.040,17
	Urusan Kepustakaan	3.199.272.604,00	4.228.593.919,00	2.856.696.405,81	5.663.049.404,00	131.586.680,00	339.583.836,22
	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3.552.851.300,00	2.172.291.000,00	273.795.500,00	2.598.825.760,00	3.864.315.700,00	3.395.838.362,23
	Urusan Bidang Kebudayaan					3.281.585.376,00	4.075.006.034,67
	Urusan Pemerintahan					5.754.000.000,00	1.358.335.344,89
2	Belanja Tidak Langsung Bidang Pendidikan						
	Bantuan Keuangan Kepada Pemda lainnya dan Pemerintahan Desa yang menunjang bidang pendidikan						
	Hbah untuk penddikan	1.932.811.750,00	2.541.200.000,00	2.054.700.000,00	10.390.500.000,00		
	Bantuan Sosial Untuk Pendidikan		250.000.000,00	100.000.000,00	144.950.000,00		
	Jumlah alokasi Dana Pendidikan	133.278.065.037,00	138.179.749.176,00	123.544.709.434,81	130.564.984.112,00	141.757.100.114,00	145.002.298.067,09
	Jumlah APBD	646.527.066.175,64	718.044.090.294,66	610.016.637.124,31	655.204.914.993,00	674.328.573.307,00	679.167.672.445,38
	%	20,61	19,24	20,25	19,93	21,02	21,35

Sumber: BPKAD, 2021

Tabel 3. 13 ALOKASI DANA KESEHATAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

NO.	ALOKASI DANA KESEHATAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Langsung Bidang Kesehatan						
	a. Belanja Pegawai	40.738.672.229,00	47.284.482.984,00	72.893.261.999,86	61.552.324.245,00		
	b. Belanja Barang Jasa	63.345.569.136,98	57.617.900.062,00	36.156.377.816,00	61.932.111.226,00		
	c. Belanja Modal	14.052.826.600,00	24.489.897.882,00	37.354.882.774,00	12.351.923.787,00	6.766.306.957,00	6.791.676.724,45
	D Belanja diluar Dinas Kesehatan yang Menghasilkan Output Menunjang Kesehatan						
	E Belanja Operasi					109.473.141.213,00	112.062.665.953,49
2	Belanja Tidak Langsung Bidang Kesehatan						
	a. Bantuan keuangan Kepada Pemda Lainnya dan Pemerintahan Desa yang menunjang bidang kesehatan						
	b. Hibah untuk Kesehatan						
	c. Bantuan Sosial Untuk Kesehatan						
	Jumlah alokasi Dana Kesehatan	118.137.067.965,98	129.392.280.928,00	146.404.522.589,86	135.836.359.258,00	116.239.448.170,00	118.854.342.677,94
	Jumlah APBD	646.527.066.175,64	718.044.090.295	610.016.637.124	655.204.914.993,00	674.328.573.307,00	679.167.672.445,38
	%	18,27	18,02	24,00	20,73	17,24	17,50

Sumber: BPKAD, 2021

Tabel 3. 14 ALOKASI DANA INFRASTRUKTUR KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

No		ALOKASI DANA INFRASTRUKTUR	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.		Dana Transfer Umum Yang Diperhitungkan						
	a.	Penerimaan Dana Transfer Umum						
		DAU	375.131.128.000,00	383.541.396.000,00	343.838.276.000,00	341.393.550.000,00	341.393.550.000,00	341.393.550.000,00
		DBH	21.223.086.499,00	29.142.131.173,00	23.587.308.425,00	17.743.485.795,00	19.310.829.498,00	19.310.829.498,00
		DAU Tambahan		6.509.465.000,00	5.359.004.000,00			
		DBH yang bersifat earmarked						
		ADD	39.635.446.000,00	41.621.293.800,00	37.278.474.000,00	35.913.729.000,00	36.070.437.949,80	36.070.437.949,80
2.		Belanja Insfrastruktur Daerah						
	a.	Belanja Langsung (Belanja Modal)						
		Tanah		600.000.000,00	836.891.880,00	500.000.000,00	-	-
		Peralatan dan Mesin	18.849.647.647,00	33.860.834.043,00	31.333.925.305,00	26.258.767.296,00	-	20.375.030.173,36
		Bangunan dan Gedung	20.068.675.630,00	19.262.917.511,00	26.433.260.880,00	18.565.313.564,00	40.653.289.912,00	33.958.383.622,27
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.715.967.500,00	73.875.670.723,00	21.380.864.087,00	52.702.977.421,00	67.588.359.679,00	67.916.767.244,54
		Aset Tetap Lainnya	1.697.832.160,00	779.800.100,00	661.300.000,00	258.669.600,00		

	b.	Belanja Tidak Langsung						
		Belanja Pemeliharaan'	23.682.577.332,00	21.216.426.001,00	8.495.526.251,00	17.927.618.279,00	10.046.876.644,00	13.583.353.448,91
		Belanja Hibah						
		Belanja Bantuan Sosial						
		Belanja Bantuan Keuangan						
		Jumlah alokasi Dana Infrastruktur	554.004.360.768,00	610.409.934.351,00	499.204.830.828,00	511.264.110.955,00	515.063.343.682,80	532.608.351.936,88
		Jumlah APBD	646.527.066.175,64	718.044.090.294,66	610.016.637.124,31	655.204.914.993,00	674.328.573.307,00	679.167.672.445,38
		%	85,69	85,01	81,83	78,03	76,38	78,42

Sumber: BPKAD, 2021

Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kota Sawahlunto ditampilkan pada tabel di bawah. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 15 REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016– 2020

No	Uraian	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**215.504.779.305,00**	**192.528.893.245,00**	**226.004.496.283,00**	**232.810.851.029,00**	**208.697.708.143,00**
1	Belanja gaji dan tunjangan	157.897.158.157,00	136.967.562.445,00	132.746.984.175,00	137.033.482.750,00	130.390.591.367,00
2	Belanja tambahan penghasilan	54.249.219.868,00	52.090.495.404,00	85.968.423.996,00	87.962.530.425,00	70.901.646.348,00
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	1.403.800.000,00	1.982.000.000,00	4.621.800.000,00	4.406.800.000,00	5.619.355.084,00
4	Belanja pemungutan pajak daerah	44.491.450,00	-	-	-	-
5	Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah	311.900.190,00	255.694.132,00	335.254.026,00	349.683.311,00	349.056.090,00
6	Uang Lembur	-	751.507.250,00	-	1.884.157.250,00	603.516.000,00
7	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.608.209.640,00	481.989.014,00	2.332.034.086,00	1.174.197.293,00	833.543.254,00
B	**Belanja Langsung**	**66.915.179.356,00**	**60.118.600.319,00**	**54.385.228.458,00**	**65.696.756.945,00**	**108.287.509.784,70**
1	Belanja pegawai	-	-	-	-	44.434.409.803,00
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	115.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3	Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.789.225.119,00	6.030.692.718,00	4.315.694.405,00	5.811.951.767,00	1.643.340.470,00
4	Belanja premi asuransi kesehatan	2.149.294.604,00	2.927.034.800,00	3.984.151.576,00	10.982.757.400,00	10.853.606.292,00

No	Uraian	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
5	Belanja makanan dan minuman pegawai	8.664.130.078,00	7.565.491.250,00	7.090.622.609,00	7.178.309.044,00	4.683.978.668,00
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3.005.657.285,00	2.225.919.645,00	2.076.775.950,00	2.254.637.675,00	790.625.100,00
7	Belanja perjalanan dinas	22.156.066.611,00	24.511.391.822,00	25.837.531.213,00	28.323.431.379,00	16.841.043.377,00
8	Belanja perjalanan pindahtugas	-	-	-		
9	Belanja pemulangan pegawai	318.500.000,00	-	-		
10	Belanja modal (Kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	11.040.452.705,00	11.105.669.680,00	29.000.506.074,70
11	**Total**	**282.419.958.661,00**	**252.647.493.564,00**	**280.389.724.741,00**	**298.507.607.974,00**	**316.985.217.927,70**

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 PROPORSI REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
1	Tahun anggaran 2016	282.419.958.661,00	561.184.260.300,45	50,33
2	Tahun anggaran 2017	252.647.493.564,00	529.817.605.827,85	47,69
3	Tahun Anggaran 2018	280.389.724.741,00	524.236.598.199,27	53,49
4	Tahun Anggaran 2019	298.507.607.974,00	566.865.894.314,73	52,66
5	Tahun Anggaran 2020	316.985.217.927,70	478.810.490.747,45	66,2

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif fluktuatif antar tahun pada periode Tahun 2016–2020. Dari tabel di atas dapat diketahui lebih besar belanja untuk kebutuhan aparatur dibandingkan dengan belanja pembangunan.

b. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Wajib**	**274.485.737.445,77**	**256.581.429.921,19**	**225.717.159.257,61**	**301.383.054.552,51**	**275.438.945.198,72**
1	Belanja gaji dan tunjangan	212.146.378.025,00	189.058.057.849,00	218.715.408.171,00	224.996.013.175,00	203.207.239.715,00
2	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH	1.403.800.000,00	1.982.000.000,00	4.621.800.000,00	4.406.800.000,00	3.707.355.084,00
3	Belanja bunga	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72
4	Belanja bagi hasil	59.495.842.866,00	64.081.187.000,00	941.735.998,00	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00
B	**Belanja Mengikat**	**17.036.303.063,33**	**16.785.669.040,66**	**17.806.998.884,66**	**25.476.129.986,72**	**12.560.861.584,66**
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis			-	-	-
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	115.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, telepon, air dan sejenisnya)	14.846.384.313,00	14.785.728.102,00	15.264.842.536,00	15.738.702.376,00	10.818.851.033,00
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	908.252.084,00	753.274.272,00	1.335.489.682,00	522.314.983,00	535.343.885,00
5	Pembentukan dana cadangan			-		
6	Pembayaran pokok hutang	1.166.666.666,33	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66
	A + B	**291.522.040.509,00**	**273.367.098.962,00**	**243.524.158.142,27**	**326.859.184.539,23**	**287.999.806.783,38**

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan defisit rill anggaran periode 2018 sampai 2020 serta penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2018 sampai 2020.

Tabel 3. 18 Defisit Rill anggaran Kota Sawahlunto

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56
	Dikurangi realisasi :			
2.	Belanja Daerah	518.069.931.532,61	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.166.666.666,66	15.122.014.627,72	1.918.666.666,66
	Defisit rill	62.227.179.819,18	71.160.569.173,36	98.047.373.284,11

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020

Tabel 3. 19 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto

No	Uraian	Proporsi dari total defisit ril					Rata - Rata (100%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	**Surplus (Defisit) Riil**	**-13.399.994.068,58**	**-9.016.659.574,48**	**4.069.077.410,84**	**17.038.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**99,20**
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35	6.946.009.591,87		13.393.565.535,47	**-57,13**
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	47.340.719.381,26	15.638.881.901,35	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	**-77,26**
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-				
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-				
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-			24.513.000,00	**25,00**
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	246.341.038,00	191.862.065,00	131.925.200,00	80.560.500,00	0,00	**-34,40**
9	Pinjaman Dalam Negeri						
10	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		8.008.445.961,06	-	**25,00**
B	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35	6.946.009.591,87	12.937.426.797,11	13.393.565.535,47	**-69,70**

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
Data Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Sawahlunto

No	Uraian	2018		2019		2020	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	4.848.420.336,05		13.369.052.535,47		44.069.104.695,58	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-12.345.985.004,55	-254,64	-2.587.673.941,91	-19,36	2.012.017.115,66	4,57
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-95.025.362.394,00	-1.959,92	-29.360.142.886,00	-219,61	-13.919.687.002,00	-31,59
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	72.325.386.578,00	1.491,73	-1.774.800.000,00	-13,28	1.167.208.793,90	2,65
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	57.558.455.816,37	1.187,16	75.957.607.469,99	568,16	63.336.312.252,86	143,72
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020

Data Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif.

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 21 SILPA KOTA SAWAHLUNTO TA 2016-2020

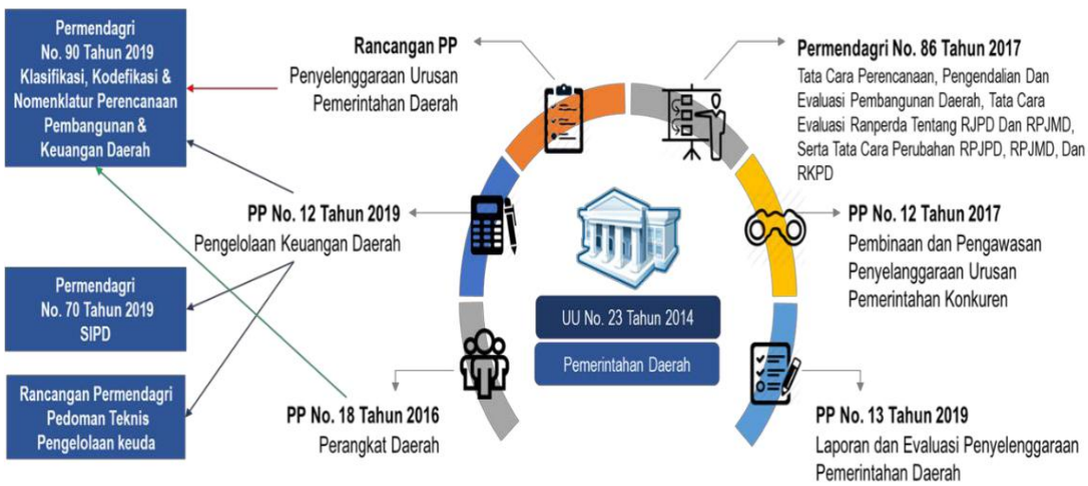
No	Uraian	SILPA
1	Tahun anggaran 2016	15.645.399.684,35
2	Tahun anggaran 2017	6.814.084.391,87
3	Tahun Anggaran 2018	4.848.420.336,05
4	Tahun Anggaran 2019	13.369.052.535,47
5	Tahun Anggaran 2020	44.069.104.695,58

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Pada akhir Tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru didalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun anggaran 2021.

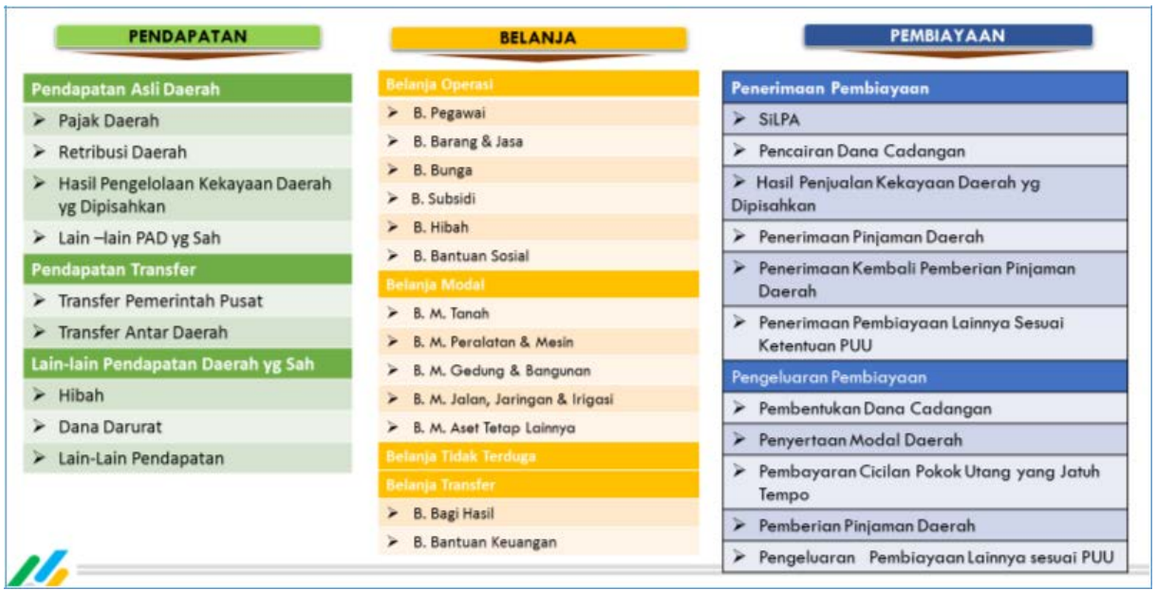
Grafik 3. 4 Beberapa Peraturan yang diterbitkan sebagai Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Sumber : **Peraturan Pemerintah Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Pemerintah Kota Sawahlunto untuk perencanaan Tahun 2021 didalam penyusunan APBD harus sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Grafik 3. 5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



Sumber : **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019**

Selain adanya peraturan baru yang terbit diakhir Tahun 2019, ada peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yaitu kasus berjangkitnya pandemi COVID-19 dengan penyebarannya sangat cepat, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berdampak terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada Triwulan I dan II Tahun 2020 dan tentu akan mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018- 2023. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan Pemerintah Kota Sawahlunto. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri dirumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial dikehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2020 diasumsikan akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh terhadap proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang diasumsikan juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2020. Begitu juga dengan Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pada awalnya proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sawahlunto pada kurun waktu Tahun 2016 – 2020 masih sangat rendah, begitu juga dengan penerimaan retribusi daerah. Maka untuk tahun-tahun yang akan datang perlu upaya pengkajian potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Pemerintah Kota Sawahlunto akan terus berupaya melakukan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tetapi dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di Tahun 2021. Setidaknya ada empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Sawahlunto.

Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

a. Ekstensifikasi penerimaan
   Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

b. Menata proses pemungutan
   Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah.

c. Meningkatkan pengawasan
   Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Penyederhaan Mekanisme Penyetoran
   Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

e. Harmonisasi SKPD yang Berwenang
   Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk percepatan penerapan e retribusi yang bekerjasama dengan Bank Nagari sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi khususnya dan PAD pada umumnya. Hal ini didukung dengan fleksibilitas metode pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan).
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk objek pendapatan sesuai wewenang provinsi.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan.
   b. Melaksanakan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
   c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
   d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi didalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telematika di bidang pendapatan.
   e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik diseluruh kantor bersama/samsat dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008.
   f. Menyebarluaskan informasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
   g. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya yaitu mengelola BUMD secara profesional, meningkatkan sarana dan prasarana, memberikan kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik.
   h. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
   i. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil.

2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
   a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
   b. Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
   c. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
   d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

3. Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan yang Sah yang optimal ditempuh melalui:
   a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
   b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.
   c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Sawahlunto, sebagai berikut:

a. Dialaksikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

b. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah.
Hal ini sesuai dengan amnat pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 6573), yang menyatakan bahwa Penyelenggara pemerintah Dearah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahn wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lebih rinci mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah ini

Tabel 3. 22 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2021-2023

NO	URAIAN	2021	2022	2023
		Rp	Rp	Rp
	PENDAPATAN	**614.979.281.796,00**	**646.668.330.330,00**	**680.186.386.139,60**
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**63.491.008.460,00**	**66.153.231.821,03**	**69.096.655.737,20**
1	Pajak Daerah	6.341.500.000,00	6.898.283.700,00	7.503.953.008,86
2	Retribusi Daerah	4.980.176.630,00	5.778.996.961,45	6.705.948.074,07
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.120.000.000,00	15.331.496.000,00	16.646.938.356,80
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38.049.331.830,00	38.144.455.159,58	38.239.816.297,47
B	**Pendapatan Transfer**	**544.357.273.336,00**	**573.384.098.508,98**	**603.958.730.402,40**
1	Pendapatan Trf Pemerintah Pusat	519.192.265.000,00	546.865.212.724,50	576.013.128.562,72
2	Pendapatan Trf Antar Daerah	25.165.008.336,00	26.518.885.784,48	27.945.601.839,68
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**7.131.000.000,00**	**7.131.000.000,00**	**7.131.000.000,00**
1	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto diolah

Tabel 3. 23 Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
Belanja	**647.207.571.477,00**	**612.458.577.059,27**	**596.894.435.858,76**
Belanja Operasi	**463.644.774.713,00**	**463.386.150.552,25**	**465.402.488.898,72**
Belanja Pegawai	258.129.273.627,00	259.471.545.849,86	260.820.797.888,28
Belnaja Barang dan Jasa	192.974.312.757,00	188.111.360.075,52	183.370.953.801,62
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.500.000,00	1.251.000.000,00
Belanja Hibah	8.983.838.329,00	13.065.196.081,86	19.000.714.661,86
Belanja Bnatuan Sosial	2.307.350.000,00	1.487.548.545,00	959.022.546,96
Belanja Modal	**110.251.176.098,00**	**109.821.196.511,22**	**109.392.893.844,82**
Belanja Tidak Terduga Terduga	**3.000.000.000,00**	**3.008.100.000,00**	**3.016.221.870,00**
Belanja Transfer	**68.644.954.000,00**	**34.576.463.329,80**	**17.416.164.579,22**
Pengeluaran Pembiayaan	**1.666.666.666,00**	**1.666.666.666,00**	**1.666.666.666,00**

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto diolah

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SILPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3. 24 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH	19.532.400.646,00	8.295.410.554,36	8.295.410.554,36
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	19.532.400.646,00	8.295.410.554,36	8.295.410.554,36

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto diolah

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi Tahun 2018 sampai dengan 2020 menggunakan data realisasi Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Berdasarkan data tersebut nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah.

Tabel 3. 25 Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Uraian	Realisasi		Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi	Proyeksi
	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Belanja Wajb dan Mengikat	**300.481.439.921,00**	**279.011.983.013,00**	**0,07**	**260.193.253.918,73**	**243.830.050.738,07**	**229.791.580.953,16**
Belanja Gaji dan Tunjangan	137.033.482.750,00	130.390.591.367,00	(0,05)	124.069.723.514,61	118.055.268.647,91	112.332.372.965,18
Tambahan Penghasilan PNS	87.962.530.425,00	75.281.146.348,00	(0,14)	64.428.012.337,61	55.139.553.196,84	47.190.192.843,69
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	216.867.030,00	225.252.250,00	0,04	233.961.686,71	243.007.876,05	252.403.838,64
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	132.816.281,00	123.803.840,00	(0,07)	115.402.951,23	107.572.116,93	100.272.655,22
Gaji dan Tunjangan DPRD / KDH / WKDH	4.406.800.000,00	5.619.355.084,00	0,28	7.165.551.320,70	9.137.191.895,18	11.651.340.140,16
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	70.177.894.492,00	66.787.170.000,00	(0,05)	63.560.272.203,91	60.489.285.631,29	57.566.677.254,70
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	551.048.943,00	584.664.124,00	0,06	620.329.903,97	658.171.373,89	698.321.255,57
Pengeluaran Pembiayaan	**7.431.902.000,00**	**752.000.000,00**	**(0,90)**	**76.091.423,16**	**7.699.341,33**	**779.060,96**
Penyertaan Modal	7.431.902.000,00	752.000.000,00	(0,90)	76.091.423,16	7.699.341,33	779.060,96
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	**307.913.341.921,00**	**279.763.983.013,00**	**(0,83)**	**260.269.345.341,90**	**243.837.750.079,40**	**229.792.360.014,12**

Sumber : Data LKPD diolah

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2021 sampai 2023 memiliki nilai yang lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengertian belanja wajib dan belanja mengikat yang berbeda pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Rincian komponen belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat disajikan pada tabel di bawah.

c. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) serta belanja dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2018- 2020 untuk mendanai pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Tabel 3. 26 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

NO	Proyeksi PENDAPATAN	TA 2021	TA 2022	TA 2023
1	**Pendapatan**	**614.979.281.796,00**	**634.289.631.244,39**	**654.206.325.665,47**
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	12.695.889.035,00	12.188.053.473,60	11.700.531.334,66
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	19.532.400.646,00	10.367.798.262,90	5.503.227.317,95
	Total Penerimaan	647.207.571.477,00	656.845.482.980,89	671.410.084.318,07
	Dikurangi			
4	**Total Belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib melekat**	**647.207.571.477,00**	**660.734.209.720,87**	**674.543.554.704,04**
5	Kapasitas Riil Kemampuan keuangan daerah	0	-3.888.726.739,98	-3.133.470.385,97

Sumber : Data LKPD Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa diproyeksikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan jika jumlah pendapatan tidak dilakukan upaya peningkatan dari proyeksi , maka akan terjadi defisit. Dan jika pendapatan tidak bisa ditingkatkan, maka adalah dengan melakukan efisiensi belanja.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah.

Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja Tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow programme) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 23. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas

pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.[
Adapun prioritas anggaran untuk pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
c. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3. 27 Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020

NO	Proyeksi	TA 2018	TA 2019	TA 2020
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah			
1	**Prioritas I**	**356.380.264.349,00**	**307.913.341.921,00**	**266.037.813.025,78**
2	**Prioritas II**	272.576.531.007,00	308.872.162.985,00	350.000.833.580,87

Sumber : Data LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah Tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana penggunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga pernyataan prioritas masih sama dengan Tahun 2019 dan 2020, tetapi pengertian/lingkup belanja wajib dan mengikat pada prioritas I dan belanja pada prioritas II dan III berbeda untuk Tahun 2021 sampai dengan 2023. Alokasi kapasitas keuangan daerah Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mendanai pembangunan Tahun 2021 sampai 2023, sebagai berikut:

a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
c. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3. 28 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023

NO	Proyeksi	TA 2021	TA 2022	TA 2023
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah			
1	**Prioritas I**	**229.857.262.819,42**	**198.597.186.880,79**	**171.588.411.665,49**
2	**Prioritas II**	396.606.098.534,22	449.417.207.911,27	509.260.516.954,29
3	**Prioritas II**			

Sumber : Data LKPD diolah



BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang diharapkan "gap expectation". Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Sawahlunto Tahun 2013-2018). Dalam gambaran umum pembangunan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II, identifikasi permasalahan dapat dikelompokan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yang dijabarkan berikut ini.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

4.1.1.1 Masih Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Kota Sawahlunto dan Dampak Pembatasan Kegiatan Belajar Mengajar secara Tatap Muka

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui Kualitas pendidikan dilihat dari rata-rata nilai Ujian nasional Siswa SMP/MTs di Kota Sawahlunto. Namun dengan terjadinya pandemi Covid 19 pada tahun 2020, Ujian Nasional ditiadakan untuk seluruh tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP maupun SMA, dan diganti menjadi Ujian Sekolah, sebagai bentuk lain pengukuran kualitas pendidikan. Kebijakan Nasional ini juga berlaku untuk tahun 2021. Nilai rata-rata Ujian Sekolah yang dijadikan indikator penilaian untuk tahun 2020 adalah 78,0. Angka ini jika dilihat dari pencapaian KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 75,0 masih dapat dikatakan belum optimal.

Faktor-faktor pembanding lainnya dapat diukur dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2016 s.d tahun 2020 yang mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, dengan nilai 9.92, dan pada tahun 2020 menjadi 10,17 dengan rata-rata pertumbuhan 0,63% setiap tahunnya. Meskipun begitu, Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto berada pada posisi ketujuh diantara 19 (sembilan belas) kab/kota lain se-Sumatera Barat, atau posisi terendah jika dibandingkan dengan 7 (tujuh) kota lain di Sumatera Barat.

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto tahun 2020 mengalami tren positif kenaikan dari tahun 2016 sebesar 13,05 hingga tahun 2020 sebesar 13,07 atau mengalami rata-rata kenaikan sebesar 0,69%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas ekonomi masyarakat, akses terhadap sarana pendidikan,dan fasilitas pendukung terlaksananya proses pendidikan.

Dilihat dari data yang ada, secara umum kondisi bangunan sekolah di Kota Sawahlunto sudah dalam kondisi baik. Akan tetapi karena jumlah penduduk yang sedikit dan daerah yang cukup luas (kepadatan Rendah), menyebabkan siswa yang tinggal di daerah terpencil mempunyai jarak tempuh ke sekolah yang jauh. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah murid di Sekolah tersebut. Selain itu sarana pendudukung pendidikan seperti laptop guru, laboratorium komputer, infocus, dan bahkan fasilitas internet pun belum dimiliki sebagian besar sekolah di Kota Sawahlunto.

Kualitas dan kompetensi guru di Kota Sawahlunto juga akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota sawahlunto. Selain itu, pemerataan guru yang berkualitas juga harus diperhatikan. Dari pengamatan langsung dilapangan, masih terdapat kecenderungan guru berkualitras dan berprestasi berada pada sekolah-sekolah pusat Kota dan favorit. Hal ini akan menyebabkan terjadinya favoritisasi beberapa sekolah dan sulitnya pemeratan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto. Aplikasi pendidikan berkarakter juga harus lebih ditingkatkan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 berdampak sangat signifikan kepada proses pembelajaran di setiap tingkat pendidikan. Proses belajar secara tatap muka tidak terlaksana secara optimal sepanjang tahun 2020 sehingga kebijakan pembelajaran secara daring diambil untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid dari aktifitas pertemuan dalam sekolah. Akibat yang dirasakan sangat besar adalah terhadap efektifitas belajar daring yang mengalami banyak hambatan, mulai dari sarana atau gawai elektronik yang tidak merata, jaringan internet yang tidak tersedia, media pembelajaran yang kurang beragam, kurangnya kreatifitas guru dalam penyampaian pelajaran serta kurangnya peran aktif orang tua dalam mendampingi anak dalam belajar di rumah. Pandemi Covid yang mengharuskan semua orang untuk membatasi pertemuan atau kerumunan secara langsung memberikan dampak terhadap aktifitas pendidikan. Kondisi ini ke depan menuntut inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam bidang pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Dan juga dengan memaksimalkan media-media elektronik/sosial, perangkat/gawai dalam segala tingkat pendidikan dan wilayah di Sawahlunto.

4.1.1.2 Belum optimalnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Kota Sawahlunto dan Dampak Pandemi Covid-19

Indikator pendukung Indeks Pembangunan Manusia dari sektor kesehatan jika dilihat dari Angka Harapan hidup Kota Sawahlunto mengalami kenaikan dari tahun 2016 s.d tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 0,24% setiap tahunnya. Pada tahun 2016, AHH sebesar 69,33 meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020 menjadi 70,00 tahun. Namun jika dibandingan dengan kabupaten dan Kota lain se Sumatera Barat, angka harapan hidup di Kota Sawahlunto menduduki posisi tertinggi ke 10 (sepuluh). Beberapa faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, baik ditingkat dasar maupun dilayanan rujukan.

Untuk pelayanan kesehatan, secara sarana Puskesmas, Pustu dan Praktek dokter, dimasing-masing Kecamatan dan desa sudah cukup tersedia. Akan tetapi, perlunya penyediaan kelengkapan alat yang sesuai standar kebutuhannya masih perlu ditingkatkan. Jumlah tenaga kesehatan dimasing-masing Puskesmas, Pustu dan Pratek Dokter tersebut tersedia. Dalam kurun waktu 2016-2020, rasio Puskesmas, Praktek Dokter, dan Pustu per satuan penduduk memperlihatkan trend penurunan. Jika memperhatikan jumlah dokter spesialis di Kota Sawahlunto khususnya pada satu-satunya Rumah Sakit Umum Daerah yang dipunyai Kota Sawalunto masih kurang. Hal ini berdampak pada jenis layanan

pengobatan, tindakan dan pemenuhan alat kesehatan yang menyesuaikan dengan ketersediaan dokter yang akan menggunakannya. Hal ini sangat berdampak kepada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor kesehatan. Selain itu kualitas pelayanan kesehatan pun perlu terus ditingkatkan mengingat tipe RSUD Kota Sawahlunto masih Tipe C, dan terdapat Rumah Sakit serupa di Kab. Dharmasraya dan RSUD Sijunjung yang menjadi destinasi pengobatan rujukan bagi masyarakat di Sawahlunto dan sekitarnya.

Pada tahun 2020 permasalahan kesehatan di Kota Sawahlunto bertambah dengan adanya pandemi COVID 19 ini. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 302 kasus terkonfirmasi positif, 269 orang sembuh, 6 orang meninggal dengan tingkat kesembuhan 89,1%. Kota Sawahlunto berstatus Zona Hijau semenjak bulan Maret s.d Juni 2021, meningkat menjadi Kuning pada bulan Juli dan Agustus, serta Oranye pada bulan September s.d Desember 2020. Peningkatan ini seiring dengan pemberlakuan status Zona Darurat Covid setiap kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menjadi indikator utama dalam penetapan kebijakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat.

Permasalahan kesehatan masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Sawahlunto ditambah dengan pandemi Covid-19 yang membutuhkan penanganan khusus di setiap level pemerintahan. Kebijakan yang diambil pada tahun 2020 dan 2021 menuntut adanya Refocussing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Tidak kurang dari 23 Milyar APBD Kota Sawahlunto tahun 2020 dialokasikan untuk Biaya Tidak Terduga untuk penanganan Covid 19. Banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2020 serta peningkatan kasus yang berfluktuasi sepanjang tahun 2021 membuat Kota Sawahlunto relatif masih tinggi dalam kasus penyebaran Covid 19. Efek kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat setelah terjadinya peningkatan kasus secara umum di nasional maupun di lingkup Sumatera Barat harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dalam menekan kasus penyebaran Covid 19 di Kota Sawahlunto. Belum optimalnya pelaksanaan pembatasan sosial masyarakat serta pemberlakuan protokol kesehatan yang belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran ditengarai dari aktifitas sosial masyarakat yang sulit untuk dibatasi secara penuh, seperti aktifitas perdagangan, kegiatan perkantoran, mobilitas transportasi dari dan ke luar daerah, acara resepsi/hajatan, kegiatan sekolah, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus Covid 19 di Kota Sawahlunto pada tahun 2020 dari semula Zona Hijau menjadi Zona kuning dan Oranye secara bertahap) hingga tahun 2021 mencapai status Zona Merah (bulan Juni s.d Juli 2021).

Beberapa tindakan lain yang dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menangani pasien teridentifikasi positif diantaranya adalah penyediaan sarana isolasi di Wisma BDTBT dan Wisma PT.

4.1.1.3 Tingginya Pembiayaan Infrastruktur Akibat Topografi Daerah Yang Berbukit, Kondisi Tanah Yang Labil Akibat Penambangan Di Beberapa Titik Sentral Kota Sawahlunto

Permasalahan utama pembangunan infrastruktur perkotaan adalah tingginya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan akibat topografi daerah yang berbukit dan kondisi tanah yang labil di beberapa titik sentral di Kota Sawahlunto. Masalah lainnya adalah rendahnya potensi pendapatan asli daerah yang berimbas kepada rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada.

Dalam kurun tahun 2016 s.d 2020, panjang jalan di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan panjang jalan, dari 287,35 km pada tahun 2016 meningkat secara linier hingga mencapai 311,27 km pada tahun 2020. Untuk proporsi jalan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sejumlah 63,1 % meningkat hingga menjadi 68,43 % pada tahun 2020.

Berbeda dengan drainase perkotaan, yang secara umum tidak mengalami peningkatan dalam pemeliharaannya. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya bencana alam dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan dan perbaikan sistem drainase yang ada.

Untuk penyediaan sumber-sumber air, terutama untuk air bersih dan sumber irigasi, dibutuhkan inovasi dan kejelian pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Kondisi daerah yang terletak di kawasan-kawasan perbukitan mengakibatkan rendahnya ketersediaan sumber-sumber air baku, dan menyulitkan distribusi air bersih yang ada bagi masyarakat. Walaupun secara target kinerja/sasaran terhadap rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum telah terpenuhi, namun debit air yang tersedia relatif kecil. Sehingga untuk mengoptimalkan pendistribusian air khususnya melalui layanan PDAM pada beberapa kawasan, dilakukan bergiliran. Pada kawasan yang tidak dilayani jaringan PDAM telah diupayakan mencari sumber air baku lain melalui Program Pamsimas dan dana hibah lainnya. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan digiatkan lagi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Selain itu, penyediaan air bagi lahan pertanian dan irigasi juga perlu ditingkatkan. Pembangunan embung dan sarana irigasi teknis perlu terus dibangun dan ditambah jumlahnya. Permasalahan yang harus menjadi perhatian adalah sumber air untuk irigasi tersebut.

Dalam urusan penataan ruang, kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga rendah. Masih adanya masyarakat yang membangun tanpa mengurus IMB, dan tidak mempedomani tata ruang dan zonasi yang telah ditetapkan. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah penagakan hukum terhadap pelanggaran RTRW ini. Dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari pihak Aparat Hukum dan Pemerintah dalam menindaklanjutinya.

Dengan struktur geografis dan kondisi tanah di Sawahlunto, perbaikan dan peningkatan infrasturktur membutuhkan upaya dan penanganan khusus serta koordinasi dengan berbagai pihak, mengingat akses jalan utama Kota Sawahlunto mayoritas merupakan jalan provinsi dan jalan nasional.

4.1.1.4 Menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan nyaman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Penilaian terhadap kawasan kumuh di perkotaan, dilakukan berdasarkan 7 indikator :

1. keteraturan bangunan hunian;
2. ketersediaan sarana proteksi kebakaran;
3. Jalan lingkungan perumahan;
4. Sistem drainase lingkungan,;
5. Air bersih;
6. Pengelolaan persampahan dan
7. sarana pengelolaan air limbah.

Berdasarkan pemutakhiran data kawasan kumuh Kota Sawahlunto yang dilakukan pada akhir tahun 2019, luas kawasan kumuh di Kota Sawahlunto sebesar 135,21 Ha pada tahun 2020. Keterbatasan penganggaran menjadikan target penuntasan Kawasan kumuh ini menjadi cukup berat di tahun-tahun mendatang.

Usaha dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman juga mengalami kendala pada permasalahan sosial dan status lahan, serta biaya tinggi yang ditimbulkan. Sulitnya memperoleh tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI. Selain itu, penguasaan tanah adalah tanah ulayat yang menyulitkan pihak swasta berinvestasi di sektor perumahan. Dibutuhkan kerjasama dan penyamaan persepsi tentang pengelolaan lahan di Kota Sawahlunto.

4.1.1.5 Tingginya Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,18%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6,19%, tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 5,75%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,82%, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 8,20%. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak dari wabah pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan tidak terkecuali Kota Sawahlunto. Dengan adanya wabah pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang mengurangi aktivitasnya dan bahkan menghentikan semua operasionalnya seperti sektor yang besar terdampak adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa dan akomodasi. Peningkatan pengangguran ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya ditengah kondisi pandemi. Selain kebijakan PHK, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave.

Untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto telah memformulasi kebijakan dan berkomitmen penuh bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan kunci utama bagi pengentasan persoalan pengangguran yang perlu terus ditangani melalui perbaikan kualitas pendidikan. Selain itu peningkatan kapasitas, kualitas, produktifitas dan daya saing Angkatan kerja perlu terus dipacu agar menghasilkan tenagakerja yang handal, terlatih dan siap bersaing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu Pemerintah Kota Sawahlunto juga mengarahkan pengembangan UMKM dengan konsep one village one product sesuai dengan potensi desa/kelurahan masing-masing. Hal ini diharapkan juga dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang ada di desa dan kelurahan.

4.1.1.6 Sarana dan insfrastruktur telekomunikasi yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah Sawahlunto

Sebagai daerah dengan luas wilayah yang cukup luas serta kepadatan penduduk yang rendah, menyebabkan rendahnya minat provider untuk membangun tower telekomunikasi di beberapa tempat di Kota Sawahlunto. Hal ini berakibat Masih terdapatnya beberapa kawasan yang blankspot/terisolir sarana dan prasarana komunikasi dan informasi dikarenakan minimnya infrastruktur komunikasi. hal ini akan mendaji hambatan dalam upaya daerah mewujudkan Kota Sawahlunto SMART City. Data tahun 2020, Desa Taratak Bancah dan Datar Mansiang masih belum tercakupi layanan internet, disamping itu beberapa desa/kelurahan yang sudah tercakupi layanan internet masih dengan kualitas rendah (2G/3G) seperti Desa Silungkang Tigo, Silungkang Oso, Kubang

Utara Sikabu, Balai Batu Sandaran, Talago Gunung, Batu Tanjuang dan Tumpuk Tangah. Selanjutnya, untuk kantor desa yang sudah memanfaatkan internet dalam menunjang aktivitas perkantoran, dari 27 desa, sebanyak 10 desa sudah tersambung dengan layanan internet dengan kualitas baik (37%), 5 desa dengan kualitas internet kurang baik (18,5%), 7 desa dengan kualitas internet tidak baik (27,9%) dan 5 desa tidak ada sambungan internet (18,5%). Hal ini dirasakan sangat mempengaruhi kecepatan arus informasi dan kualitas kinerja aparat pemerintahan desa yang saat ini sudah menggunakan sistem informasi berbasis elektronik dalam pengelolaan desa. Dari sisi lain, dengan belum terbentuknya OPD teknis yang membidangi urusan komunikasi dan informasi juga menjadi hambatan untuk memberikan pelayanan yang berbasis IT kepada masyarakat dengan batasan lingkup kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Bagian komunikasi dan informatika masih berada di bawah Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Bagian Persandian Humas dan Kominfo. Selain itu SDM yang memiliki skill dan kompetensi dibidang komunikasi dan informatika masih terbatas dalam sisi jumlah maupun kualitas. Kendala tersebut menjadi hambatan yang cukup besar dalam mewujudkan Kota Sawahunto menuju Smart City.

Dampak pembatasan kegiatan masyarakat di masa Pandemi menuntut penggunaan media sosial, telekomunikasi yang lebih optimal dalam melaksanakan aktivitas masyarakat, seperti kegiatan perkantoran, pelayanan publik, proses belajar mengajar, sehingga sangat dibutuhkan tersedianya infrastruktur yang menunjang kelancaran aktivitas tersebut. Masyarakat dituntut untuk adaptif dengan perubahan dan melek teknologi untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada.

4.1.1.7 Masih rendahnya kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian daerah

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yang fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2019 persentase PAD sektor pariwisata 2,48 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,75 persen. Kontribusi sektor Pariwisata Kota Sawahlunto masih relatif rendah terhadap PDRB serta PAD. Permasalahan ini belum optimal sehingga kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto belum memberikan multiplier efek yang besar terhadap ekonomi daerah. Kunjungan ke objek wisata, belum mengupayakan pengunjung untuk menginap di Kota Sawahlunto, ini disebabkan karena fasilitas penginapan di Kota Sawahlunto belum memadai bagi pengunjung. Potensi ini terjawab jika persoalan pariwisata di Kota Sawahlunto mampu mengdepankan potensi objek wisata dan menyediakan fasilitas – fasilitas pengunjung serta menyediakan penginapan yang memadai sehingga pengunjung bukan mengunjungi objek wisata saja melainkan menginap di Kota Sawahlunto sehingga perekonomian Kota Sawahlunto meningkat. Akan tetapi permasalahan ini belum terintegrasikan dengan konsep Wisata. Selain itu, dari sisi pemasaran juga Belum optimalnya pemasaran wisata baik secara integral melalui koordinasi dengan pusat maupun promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan yang masih didominasi oleh pengunjung lokal, atau setidaknya hanya daerah tetangga terdekat. Sawahlunto belum dijadikan destinasi utama karena potensi wisata yang belum diketahui oleh konsumen. Selain itu, Terbatasnya akses transportasi ke Kota Sawahlunto yang mendukung Sawahlunto menjadi tujuan kota wisata, dimana saat ini hanya ada 2 jalur utama, yaitu dari arah selatan yang menghubungkan jalan negara dengan Kawasan Kota Lama, dan dari arah utara yang merupakan akses dari arah Batusangkar, dengan kondisi kedua jalur tersebut masih sempit dan tidak nyaman untuk dilalui oleh bis pariwisata ukuran besar. Dan juga akses menuju beberapa objek wisata juga masih menjadi masalah dalam pengelolaan pariwisata. Peningkatan SDM Pelaku pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini.

Dampak Pandemi Covid 19 pada pertengahan tahun 2020 sangat memukul sektor ekonomi secara umum dan khususnya pariwisata. Menurunnya tingkat kunjungan ke objek wisata menurunkan pendapatan masyarakat yang mengandalkan aktivitas pariwisata.

4.1.1.8 Masih Rendahnya Pendapatan Petani

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 PDRB sektor pertanian Kota Sawahlunto mengalami penurunan 3656,585 rupiah, namun untuk kontribusi terhadap PDRB kota hanya meningkat 14.98 persen. Ini berarti pertumbuhan sektor pertanian lebih lambat dari pada sektor lainnya dan ini juga membuktikan bahwa pendapatan petani Kota Sawahlunto masih rendah. Selain itu, masih rendahnya nilai Tukar Petani di Kota Sawahlunto mengambarkan masih rendahnya tingat pendapatan petani di Kota Sawahlunto. Untuk itu perlu peningkatan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan sektor pertanian seperti, peningkatan pendapatan petani yang dipengaruhi oleh produksi pertanian, Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan sarana prasarana yang mendukung sektor pertanian. Beberapa permasalah yang mendasari pendapatan petani ini adalah masih rendahnya produksi pertanian di Kota sawahlunto. Kota Sawahlunto yang mempunyai karakteristik daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, sedikit berbeda dengan konsep kota-kota lain yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Permasalahan alih fungsi lahan juga terjadi di Kota sawahlunto. Saat ini sedang disusun Revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sawahlunto yang telah mengakomodir penetapan kawasan lahan pertanian, sehingga permasalah alih fungsi lahan diharapkan dapat teratasi. Permasalahan lain yang terjadi adalah peningkatan sarana dan prasana pertanian seperti Irigasi, alat Produksi pertanian serta jalan sentra produksi kelahan-lahan potensial juga selalu ditingkatkan. Selain itu, transformasi komoditas pertanian menjadi bahan baku industri juga akan ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan pembangunan di tingkat provinsi Sumatera Barat.

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Menjabarkan pokok- pokok permasalahan sebagaimana yang dirumuskan pada subbab sebelumnya, berikut disajikan kerangka logis permasalahan yang meliputi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah masing-,asing urusan pada tabel berikut. Kesinambungan antar permasalhan dengan rumusan arah stragei dan kebijakan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran III.

Tabel 4. 1 *Logical Framework* Rumusan Permasalahan Berdasarkan Urusan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
	Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto	Penyediaan sarana dan Prasarana pendidikan yang belum merata dan sesuai standar	1. Masih rendahnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Pendidikan 2. Masih rendahnya Kualitas Pendidikan Usia Dini 3. Kemampuan orang tua dalam menyediakan sarana dan perlengkapan sekolah bagi anakanya masih terbatas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1. SDM tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata 2. Belum Optimalanya Pelaksanaan Pelatihan untuk peningkatan SDM guru 3. Terbatasnya kemapuan guru dalam penggunaan IT
		Belum Optimalanya Pengembangan Kurikulum berbasis Kopetensi siswa dan Karakter	1. Masih rendahnya SDM guru dalam pengembangan Kurikulum berbasis Karakter 2. Pelaksanaan Penididikan yang berkarakter yang belum Optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan luar sekolah	1. Masih rendahnya Kualiatas pendidikan luar sekolah 2. Belum Optimalnya fungsi SKB dalam mendukung pendidikan Luar sekolah 3. Belum Tersedianya Perguruan Tinggi dan Universitas di Kota Sawahluntountuk mempermudah Akses bagi anak-anak Sawahlunto yamg tamatan SMA dan SMK
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
	Masih rendahnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	1. Belum terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan yang memenuhi standar
		Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	1. Masih terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat 2. Belum optimalnya standar *guideline* Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya 3. Masih kurangnya pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan 4. Belum tercapainya jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak 5. Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan 6. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
		Masih rendahnya kesadaraan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	1. Masih Kuranganya kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik 2. Masih rendahnya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 3. Masih kurangnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 4. Masih kurangnya sarana dan Prasarana penanganan pasien Covid-19 5. Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
		Masih Rendahnya Konvergensi terhadap penanganan stunting	1. Masih rendahnya konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan 2. Masih Kuranganya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Masih rendahnya kualitas infrastruktur kota	1. Topografi yang curam di Kota Sawahlunto. 2. Tingginya Pembiayaan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil 3. Status lahan yang sebagian masih dikuasai oleh PT. KAI, PT.BA dan Tanah Ulayat 4. SDM yang masih terbatas {tenaga terampil atau tenaga Ahli) 5. Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat 6. Banyaknya daerah yang rawan bencana di kota sawahlunto 7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum 8. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan terutama pembukaan jalan baru dan pelebaran jalan
		Belum tercapinya Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	1. Kurangnya sumber air bersih yang ada dikota Sawahlunto 2. Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak 3. Topografi yang curam di Kota Sawahlunto 4. Tingginya Pembiayaan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang yang masih rendah	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata 2. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang 3. Belum terwujudnya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Pencapaian Universal Akses 100-0-100	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman 2. Kualitas permukiman pada kawasan kumuh yang ada masih rendah 3. Masih banyaknya kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
	Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana	1. Belum optimalnya kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 2. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana 4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 5. Belum optimalnya Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana 7. Belum optimalnya penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana 8. Belum optimalnya pelayanan dasar perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 9. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 10. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
	Belum terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya belum maksimal.	1. Adanya lansia, penyandang disabilitas, penyandang gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya dengan kondisi ekonomi terbatas. 2. Masih terbatasnya tingkat pendidikan dan keahlian lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya 3. Masih minimnya bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya 4. Terbatasnya penyediakan sarana prasarana dan infrastruktur yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya 5. Belum semua masyarakat penyadang masalah sosial terdata dalam DTKS 6. Keterbatasan ketersediaan anggaran dalam penanganan masalah sosial
	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Belum maksimalnya pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	1. Belum semua OPD/ lembaga dan masyarakat memahami konsep Pengarusutamaan Gender 2. Belum semua perempuan memiliki kesempatan & pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan & informasi 3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan 4. Masih adanya pernikahan anak/ usia dini
		Belum optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak 2. Kurang waspadanya orang tua mengawasi pergaulan anak & dalam pemanfaatan teknologi 3. Masih adanya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan 4. Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		
	Tingginya angka	Kualitas angkatan kerja	1. Tersedianya lembaga pelatihan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pengangguran terbuka	yang masih rendah	yang belum sesuai standar 2. Kurangnya Instruktur yang bersertifikasi 3. Masih mininnya sarana dan prasarana untuk pelatihan dan belum sesuai standar
		Perluasan kesempatan kerja masih rendah	1. Lowongan kerja dan perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto terbatas. 2. Kurangnya minat dan motivasi para pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah 3. Ketidak sesuaian antara kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
		Ketersediaan informasi dan bursa Tenaga kerja masih kurang	1. Belum tersedianya data dan informasi yang update terkait bursa tenaga kerja 2. Belum tersedianya aparatur BKOL 3. Masih minimnya sarana dan prasarana BKOL 4. Belum adanya fungsional pengantar kerja
		Pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal	1. Masih minimnya perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama 2. Masih minimnya perusahaan yang mempunyai LKS bipartit, tripartit 3. Monitoring dan evaluasi tenaga kerja belum optimal
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Belum maksimalnya pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	1. Belum semua OPD/ lembaga dan masyarakat memahami konsep Pengarusutamaan Gender 2. Belum semua perempuan memiliki kesempatan & pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan & informasi 3. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan 4. Masih adanya pernikahan anak/ usia dini
		Belum optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak 2. Kurang waspadanya orang tua mengawasi pergaulan anak & dalam pemanfaatan teknologi 3. Masih adanya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		
	Kemandirian daerah dalam memenuhi ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih kurang	Ketersedian pangan yang belum merata	1. Produksi beberapa bahan pangan tidak merata 2. Fluktuasi harga pangan yang menyebabkan aksesbilitas masyarakat terganggu 3. Masih adanya daerah yang rawan pangan 4. rendahnya kemauan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang aman dan bebas bahan kimia
		Penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal	1. Masih bergantungnya masyarakat pada beras (nasi) 2. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang B2SA (Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman) 3. Belum keseluruhan masyarakat tersosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal alternatif non beras
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Lambatnya kejelasan status hukum kepemilikan tanah	1. Belum jelasnya status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto 2. Masih rendahnya kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah 3. Belum terselesaikannya kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto 4. Kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan belum maksimal
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**		
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	1. Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah 2. Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai 3. Minimnya Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Belum berjalannya sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup 5. Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan masihb rendah 6. Kurangnya partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup 7. Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan 8. Kurangnya pengendalian pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 9. Belum optimalnya pemulihan lahan bekas tambang
		Rendahnya kualitas pengelolaan persampahan	1. Belum optimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah
			2. Kualitas pengelolaan persampahan belum optimal
			3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah
			4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
	Belum terlaksananya secara maksimal kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik	1. Belum semua masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan
			2. Belum semua PD memanfaatkan data kependudukan dalam proses perencanaan / pelaksanaan kegiatan
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya 2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya 3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan 5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6. Belum terlaksananya penerapan standar pelayanan
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
	Masih rendahnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Masi rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	1. Masih Rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga 2. Belum adanya grand design pembangunan kependudukan (GDPK) 3. Kurangnya Sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat 4. Belum adanya regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat 5. Kurangnya akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran 6. Masih Kuranganya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		
	Belum tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota	1. Masih rendahnya pelayanan moda transpotasi Kota 2. Belum terpenuhinya pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api 3. Masih minimnya Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata 4. Masih rendahnya Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum 5. Belum optimalnya pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor 6. Masih minimnya penyediaan perlengkapan jalan kota
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi	1. Belum adanya regulasi tentang tata kelola smart city 2. Belum terintegrasinya teknologi informasi dan komunikasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		informasi	pemerintah
			3. Belum tersedianya Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
			4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
		Belum Optimalnya Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	Belum Optimalnya kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
	Masih rendahnya kualitas koperasi	Masih rendahnya kualitas pengurus koperasi	1. Terbatasnya kegiatan pelatihan berbasis kopetensi dan bersertifikat 2. Pengangtian pengurus koperasi yang tidak memperhatikan kualifikasi penggantinya
		Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi	1. Belum optimalnya tugas dan fungsi pengurus dalam kelembangaan koperasi 2. Masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 3. Kurang optimanya pengawasan terhadap koperasi
		Menurunnya Volume usaha koperasi	Tidak berkembangnya Usaha koperasi selain simpan pinjam
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
	Rendahnya realisasi investasi	Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi	1. Belum tersedianya peta potensi investasi 2. Belum tersedianya dokumen informasi dan dokumen perencananaa pendukung investasi (Masterplan, FS, DED, BUSINESS PLAN) 3. Belum optimalnya perumusan Desain promosi strategis potensi dan peluang investasi daerah
		Iklim Investasi yang belum kondusif	1. Belum optimalnya proses perizinan penanaman modal
			2. Kebijakan terhadap pemberian insentif penanaman modal belum ada
			3. Permasalah kepemilikan lahan/ tanah ulayat
			4. masih minimnya kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal
			5. masih rendahnya kualitas Sarana dan prasaran perizinan
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		
	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan olahraga di Kota	Masih rendahnya daya saing kepemudaan	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Sawahlunto		
		Masih rendahnya daya saing olahraga	Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga yang berkualitas Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara propinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan
			1. 2. 3. 4. 5.
			1. 2.
			1. 2. 3. 4.
			1. 2. 3. 4.
			1. 2. 3. 4.
			1. 2.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3.
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**		
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Belum terintegrasinya ketersediaan informasi data statistik daerah
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**		
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya informasi pemerintah daerah berbasis teknologi
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		
	Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum terpelihara dan dilestarikan degan baik	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya dunia yang perlu ditingkatkan 2. Tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya 3. Sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yag terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh perusahan tambang/pihak ketiga sehingga dalam pengelolaan mengalami masalah 4. Masih rendahnya kualitas SDM situs warisan dunia 5. Belum di tetapkannya badan pengelola WTBOS 6. Sebagian besar situs/cagar budaya belum dilestarikan dengan baik
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi budaya lokal	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan 2. kurang optimalnya kelembagaan budaya
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		
		Belum maksimalnya Kualitas Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	1. Masih kurangnya Sarana Prasarana Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan 2. Masih terbatasnya Kualitas SDM Pengelola perpustakaan dan kearsipan 3. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		
		Belum maksimalnya Kualitas Pengelolaan	1. Masih kurangnya Sarana Prasarana Pengelolaan perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perpustakaan	2. Masih terbatasnya Kualitas SDM Pengelola perpustakaan 3. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat
URUSAN PILIHAN			
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
	Masih Rendahnya Konsumsi Ikan	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan	1. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan 2. Kurangnya promosi tentang produk olahan-olahan ikan
		Sarana prasarana produksi dan pemasaran/distribusi masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas	1. Belum memadainya sarana dan prasarana produksi ikan 2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya
		Belum optimalnya pengelolaan budidaya ikan	1. Ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu 2. Kualitas dan keterampilan SDM peternak dan pembudidaya ikan masih rendah
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**		
	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhdap perekonomian Kota Sawahlunto	Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota sawahlunto	1. Beberapa objek wisata strategis belum mempunyai dokumen perencanaan 2. Kualitas sarana pendukung objek wisata belum memadai 3. Kurang optimalnya pemeliharaan objek wisata 4. Akses dan konektivitas menuju destinasi wisata belum memadai 5. kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata
		Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata	1. Sarana dan prasarana atraksi tidak memadai 2. SDM pelaku atraksi belum mendukung
		Kualitas Promosi masih rendah	1. SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung 2. Kemitraan / kerjasama biro perjalanan belum aktif 3. Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai 4. Promosi pariwisata dilakukan secara manual
		Industri Pariwisata belum berkembang	1. Kurangnya sarana dan presarana penginapan dan Akomodasi yang representatif 2. Belum tersedianya rumah makan yang representatif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Sarana dan prasarana transportasi belum memadai 4. Belum tersedianya Biro perjalanan yang propesional
		Kelembagaan Pariwisata yang belum profesional	1. Belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan 2. Belum meratanya penguatan organisasi kelompok sadar wisata yang ada 3. Kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah 4. Kurangnya SDM dari pokdarwis
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif	1. SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai 2. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi kratif belum ada 3. Akses pelaku ekonomi kreaatif terhadap sumber pendanaan belum luas
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		
	Rendahnya pertumbuhan PDRB lapangan usaha bidang pertanian	Masih rendahnya pertumbuhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	1. Lahan terbatas dan alih fungsi lahan pertanian 2. Topografi wilayah dan volume air kurang mencukupi untuk pertanian utama padi. 3. Serangan hama dan penyebaran penyakit terhadap tanaman pertanian yang relatif tinggi. 4. Rendahnya kemauan petani untuk meningkatkan produktifitas pertaniannya. 5. Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan pertanian masih terbatas 6. Belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi 7. Kualitas pembinaan dari Penyuluh yang perlu ditingkatkan
		Pengembangan potensi pertanian dan peternakan pasca panen belum optimal	1. Belum berkembangnya kelembagaan petani dan usaha tani pada sektor pertanian 2. Belum optimalnya sanitasi dan higiene pada unit usaha produsen/ distributor produk asal hewan 3. Belum optimalnya mutu dan kesehatan produk asal hewan 4. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk berusaha disektor pertanian
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**		
	Menurunnya PDRB	Rendahnya produktivitas,	1. Banyaknya UKM yang tidak berkembang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	sektor perdagangan	daya saing pangsa pasar	2. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha. 3. Masih rendahnya kemampuan UMKM untuk menggunakan teknologi informasi dalam berusaha 4. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah
		Belum optimalnya fungsi pasar	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pasar serta ketertiban dan kebersihan pasar
			2. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap perlindungan konsumen melalui tertib ukur.
			3. PKL dilingkungan pasar dapat mengakibatkan gangguan terhadap pasar dan para pedagang didalamnya
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
	Rendahnya pertumbuhan PDRB untuk sektor industri pengolahan	Masih rendahnya daya saing produk industri	1. Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal
			2. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil
			3. Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha indistri kecil dan menengah
			4. Minimnya standarisasi produk industri
			5. Masih lemahnya SDM pelaku industri
			6. Belum optimalnya fasilitas yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitas kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
30	**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**		
	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas rumah Tahfidz dan Taman Bacaan Alquran	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
	Belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya ketersediaan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, veritikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri	Masih terbatasnya informasi dan jejaring kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain
	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur	Belum optimalnya kualitas ASN yang bersih dan inovatif
32	**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**		
	Belum optimalnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Belum optimalnya sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan	Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD
33	**UNSUR PERENCANAAN**		
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan	1. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan
			2. Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan
			3. Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan
34	**UNSUR KEUANGAN**		
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Terbatasnya potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah	1. Terbatasnya potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah
			2. Kesadaran dan Tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak, membayar pajak dan retribusi daerah relatif masih rendah
			3. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu peningkatan
35	**UNSUR KEPEGAWAIAN**		
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	1. Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya
			2. Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
			3. Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN
			4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
			5. Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6. Belum terlaksananya penerapan standar pelayanan
36	**UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan ASN
			Pelaksanaan diklat belum terorganisir antar PD
37	**UNSUR PENELITRIAN DAN PENGEMBANGAN**		
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam pembangunan	1. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik
			2. Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
			3. Inovasi yang sudah terbentukmenjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal
			4. Implementasi terhadap hasil kajian belum dilaksanakan untuk mengambil kebijakan
38	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
	Belum optimalnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
39	**UNSUR KEWILAYAHAN**		
	Masih Rendahnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1. belum optimalnya regulasi tentang tata kelola smart city
			2. belum tersedianya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
			3. masih rendahnya Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
			4. masih rendahnya kan keamanan informasi pemerintah daerah
			5. belum optimlanya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
		Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik yang belum memadai	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
38	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Masih minimnya Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Masih kurangnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
			Masih minimnya ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
			Masih minimnya pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			masyarakat
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
			Masih adanya gejala dan konflik sosial di masyarakat
			Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan
			Masih kurangnya pelaksanaan patroli dalam upaya Penegakan Perda
			Masih kurangnya kapasitas dan SDM PPNS

4.2 ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana pembangunan daerah 5 tahun, dimana identifikasi dan klasifikasi isu–isu didasarkan kepada asumsi pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, luas dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit yang signifikan dengan memperhatikan pada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Perumusan isu strategis yang berangkat dari permasalahan Pemerintah Kota Sawahlunto, akan menjadi dasar yang tepat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang strategis.

4.2.1 Kajian Kebijakan dan Agenda Pembangunan Sektoral, Regional, Nasional dan Global

A. *Sustainable Development Goals*/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/ TPB)

Rumusan isu strategis berdasarkan TPB/SDGs diidentifikasi melalui analisis capaian indikator TPB/SDGs berdasarkan indikator yang merupakan standar pelayanan minimal (SPM). Isu strategis hasil capaian dilihat dari indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (indikator kategori SB) yakni sebanyak 79 indikator dan indikator-indikator yang belum memiliki data (indikator kategori NA) yakni sebanyak 56 indikator. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, yang merupakan SPM untuk indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (indikator kategori SB) yakni sebanyak 25 indikator dan indikator-indikator yang belum memiliki data (indicator kategori NA) yakni sebanyak 6 indikator. Pada tabel berikut, dapat dilihat isu strategis TPB/SDGs berdasarkan SPM.

Tabel 4. 2 Rumusan Isu Strategis TPB/SDGs Berdasarkan SPM Kota Sawahlunto

NO	SPM	ISU STRATEGIS TPB/SDGs
1	Kesehatan	a. Masih rendahnya Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. b. Masih belum tercapianya target Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. c. Masih berfluktuasinya Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. d. Masih belum tercapianya target Persentase perempuan pernah

NO	SPM	ISU STRATEGIS TPB/SDGs
		kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. e. Masih berfluktuasinya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. f. Masih belum tercapainya target persentase kabupaten/kota (Kecamatan/Kelurahan/Desa) yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. g. Belum tercapainya target angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. h. Belum terpilahnya data Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. i. Belum tersedianya data Prevalensi tekanan darah tinggi. j. Belum tersedianya data Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
2	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	a. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. b. Masih tingginya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Sawahlunto c. Belum adanya kota (Kecamatan/kelurahan/desa) Tangguh bencana yang terbentuk
3	Pekerjaan Umum	a. Belum tercapainya target Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. b. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. c. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. d. Belum tercapainya target proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. e. Belum tercapainya target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. f. Belum optimalnya jumlah Kecamatan/nagari yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
4	Pendidikan	a. Masih fluktuatifnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. b. Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) c. Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. d. Terjadi penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. e. Masih fluktuatifnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). f. Belum terlihat peningkatan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. g. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)

NO	SPM	ISU STRATEGIS TPB/SDGs
		fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). h. Belum adanya peningkatan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. i. Belum tersedianya data terpilah Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
5	Perumahan Rakyat	Belum tercapainya target proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
6	Sosial	Belum adanya kegiatan pendampingan psikososial korban bencana sosial.

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD Kota Sawahlunto, 2021

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Seiring dengan dilaksanakannnya Pemilihan Presiden Tahun 2019, serta ditetapkannya RPJMN tahun 2019-2024, untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 untuk tahun 2018-2020 telah disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan dijabarkan dalam RPJMD awal. Sedangkan untuk tahun 2021-2023 disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut; Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu *Indonesia Maju*. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi focus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

C. Isu Strategis RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Selain mensinkronkan dengan Pembangunan Nasional, perubahan RPJMD Kota sawahlunto tahun 2018-2023, khususnya arah pembangunan tahun 2021-2023 juga akan mengacu kepada visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka Visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah Bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan Bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"** Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Isu Strategis pembangunan di Kota Sawahlunto pada Perubahan RPJMD ini tidak terlepas dari Isue Strategis Pembangunan pada Pemerintah Provinsi yang di tuangkan kedalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Adapun keselarasan isue strategis Kota Sawahlunto dan Provisni Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut.

Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Kota Sawahlunto
Pembangunan Manusia	Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata serta Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas serta keluarga sehat
	Penanganan Isu Stunting
	Kesetaraan Pembangunan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat
Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda	
Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Optimalisasi Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO dan Geopark Nasional dalam Pengembangan Sektor Pariwisata
Infrastruktur yang handal dan Berkualitas	Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Pasca Tambang Oleh PT BA, PT KAI, Perusahaan Tambang Lainnya Dan Masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan

D. Isu Regional Provinsi Sumatera Barat

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat isu regional terkait Kota Sawahlunto, yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Sawahlunto, yaitu:

1. Peningkatan Jalan dan jembatan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino, Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa) untuk pengembangan integrasi wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung).
2. Pengembangan kawasan wisata geopark juga dapat diintegrasikan antara Geopark Sawahlunto dengan Kawasan Geopark Silokek (Kab. Sijunjung).

3. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).

E. Isu Strategis Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 4, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 jenis yaitu terdiri atas:

1. SPM Pendidikan;
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum
4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial.

PP Nomor 2 Tahun 2018 ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur lebih rinci dalam penerapan SPM oleh Pemerintah daerah. Dalam Pasal 3 Perarturan Menteri Dalam Negeri ini keenam jenis SPM dirinci lagi kepada bentuk-bentuk pelayanan yang diprioritaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan

Isu strategis untuk pencapaian SPM di Bidang Pendidikan :

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan motivasi menambah ilmu pengetahuan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait termasuk warga sekolah,komite dan pihak swasta serta pembenahan kurikulum yang diberikan di tingkat satuan pendidikan.

2. Kesehatan

Isu strategis untuk pencapaian SPM di bidang Kesehatan adalah:

1. Peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular serta penguatan health security untuk penanganan pandemi
2. penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
3. pencegahan stunting
4. penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
5. peningkatan sistem kesehatan daerah
6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu strategis pencapaian SPM:

1. Peningkatan kapasitas pengolahan air baku dan pemeliharaan jaringan air bersih.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan edukasi masyarakat untuk berperan serta dalam pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan.

4. Perumahan Rakyat

Isu strategis :

1. Penyediaan lahan bagi pengembangan kawasan perumahan
2. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
3. Penambahan dan peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan
4. Peningkatan sumber daya manusia

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Isu strategis terkait urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

1. Penguatan penegakan perda
2. Penurunan pelanggaran terhadap K3
3. Tingkat waktu tanggap terhadap bencana kebakaran
4. Optimalisasi penanganan pelayanan korban bencana
5. Penguatan kelembagaan kebencanaan daerah

Jenis pelayanan minimum dasar yang diberikan terkait dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; untuk
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Penerima layanan dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
2. Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana;
3. Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran

6. Sosial

Isu strategis untuk pencapaian SPM di bidang Sosial adalah:

1. Pengurangan Kesenjangan sosial ditengah masyarakat
2. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
3. Mengurangi dampak kenakalan remaja dan pengaruh negatif dari penggunaan internet & narkoba.
4. Peningkatan kualitas keluarga dalam mengurangi KDRT

F. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto 2005-2025

Visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah ***"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, yaitu: 1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan

pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

Arah pembangunan mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu :

1. Bidang Agama dan budaya dengan fokus pada pengamalan keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif, serta Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
3. Bidang ekonomi dengan fokus pada memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selain itu juga mendorong isu regional antar Kabupaten/Kota pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat antara lain, Peningkatan Jalan dan jembatan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga), Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino, Baso-Batas Batusangkar (Balai Selasa) untuk pengembangan integrasi wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto) dengan wisata budaya (Istana Pagaruyung) dan Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)- Solok- Muara Kalaban (Sawahlunto).
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

G. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru. Peninjauan kembali ini merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang, sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang ada, bukan berarti penyusunan yang baru secara totalitas.

Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032. Hasil dari kegiatan Peninjaun kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 menyatakan bahwa RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 memerlukan beberapa revisi untuk beberapa aspek perencanaan, diantaranya:

1. Kebijakan dan isu eksternal dan internal yang berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perlu diakomodir dalam rencana tata ruang Kota Sawahlunto,
2. Belum terealisasikannya rencana dan program yang telah direncanakan untuk 5 tahun pertama, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali arahan dan tahapan pelakasanaannya
3. Perlu penyesuaian rencana yang ada dengan kondisi di lapangan dan data dan peta terbaru
4. Update peta dasar Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku

5. Adanya perubahan batas wilayah, sehingga peta pada dokumen rencana perlu disesuaikan.

Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang wilayah berisi program utama yang berkaitan dengan perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana.

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Perwujudan sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

1) Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
   a. Kelurahan Aur Mulyo; dan
   b. Kelurahan Talawi Mudik.
2) Sub Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
   a. Kelurahan Kolok Nan Tuo, dan
   b. Desa Muaro Kalaban.
3) Pusat Lingkungan, yaitu terdiri atas:
   a. Taratak Bancah
   b. Silungkang Oso
   c. Silungkang Tigo
   d. Silungkang Duo
   e. Pasar Kubang
   f. Pasar
   g. Air Dingin
   h. Kubang Tengah
   i. Kubang Utara Sikabu
   j. Kubang Sirakuk Selatan
   k. Kubang Sirakuk Utara
   l. Tanah Lapang
   m. Saringan
   n. Durian I
   o. Durian II
   p. Lumindai
   q. Balai Batu Sandaran
   r. Lubang Panjang Durian
   s. Santur
   t. Talago Gunung
   u. Sikalang
   v. Kolok Mudiak
   w. Salak
   x. Rantih
   y. Kumbayau
   z. Datar Mansiang
   aa. Sijantang
   bb. Batu Tanjung
   cc. Talawi Mudik
   dd. Bukit Gadang

Tabel 4. 3 Rencana Pola Ruang Di Kota Sawahlunto

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi
KAWASAN LINDUNG			
1	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**		
	a. Hutan Lindung	245,55	Kecamatan Silungkang, Desa Silungkang Tigo. Kecamatan Lembah Segar, Desa Pasar kubang, Desa Lunto Barat. Kecamatan Barangin, Desa Lumindai.
	b. Kawasan Resapan Air	579,87	Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin.
2	**Kawasan Perlindungan Setempat**		
	a. Sempadan Sungai	458,82	a. Sungai Ombilin : Kecamatan Barangin: Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo, Kecamatan Talawi: Sikalang, Ratih, Sijantang, Salak, Talawi Hilir, Batu Tanjung, Bukit gadang, Talawi Mudik. b. Sungai Lasi Kecamatan Silungkang: Taratak Bancah, Silungkang Tigo, Muaro Kalaban, Silungkang Oso. c. Sungai Lunto: Kecamatan Silungkang: Silungkang Duo, Muaro Kalaban Kecamatan Lembah Segar: Pasar Kubang, Lunto Barat, Kubang Sirakuk Selatan, Pasar, Tanah Lapang, Aur Mulyo, Air Dingin Kecamatan Barangin: Lumindai. d. Sungai Malakutan Kecamtan Barangin: Talago Gunung, Santur, Kolok Mudiak, Kolok Nantuo
	b. Sempadan Danau	44,17	Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
	c. Sempadan Rel Kereta Api	43,31	Sepanjang Jalur Kereta api di Kecamatan Silungkang dan Lembah Segar.
	d. Sempadan SUTT	46,12.	Sepanjang jaringan SUTT di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
3	**Kawasan Lindung Geologi**		
	Kawasan Keunikan Proses Geologi		
	a. Kawasan Keunikan Geologi Batu Runciang	12,73	Kecamatan Silungkang
	b. Kawasan Keunikan Geologi Batu Hitam	21,69	Kecamatan Barangin
4	**Kawasan Rawan Bencana**		
	a. Rawan Bencana Gerakan Tanah	841,78	Tersebar disemua Kecamatan di Kota Sawahlunto

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi
	b. Rawan Bencana Sempadan Patahan Aktif	396,02	Kecamtan Barangin dan Kecamatan Talawi
5	**Kawasan Cagar Budaya**		
	Kawasan Cagar Budaya	101,88	Kecamatan Silungkang, Desa Muaro Kalaban 1,06 Ha. Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Aur Mulyo, Tanah Lapang, Air Dingin, dan Keluarahan Pasar 32,85 Ha. Kecamatan Barangin, Kelurahan Saringan, Lubang Panjang, Durian I danDesa Santur 45,22 Ha. Kecamatan Talawi, Desa Rantih dan Desa Salak 18,16 Ha.
6	**Ruang Terbuka Hijau Taman**		
	a. Hutan Kota	3.802,24	Tersebar diseluruh kecamatan di Kota Sawahlunto.
	b. Ruang Terbuka Hijau Taman	22,09	Tersebar Di Kecamatan lembah Segar dan Kecamatan Talawi
	c. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman	2,83	Kecamatan lembah Segar dan Kecamatan Barangin

Sumber : Hasil Rencana Revisi RTRW Tahun 2018

Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Kawasan-kawasan Strategis Kota

Kawasan Strategis Kota (KSK) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Dengan demikian program utama perwujudan Kawasan Strategis Kota (KSK) adalah diawali dengan penyusunan rencana rinci atau rencana detail tata ruang kawasannya. Atas dasar rencana rinci atau rencana detail kawasan, maka prioritas program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang di dalamnya akan mencakup: pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan, peningkatan, pendayagunaan, dan/atau revitalisasi pada KSK tersebut.

1. **Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi**
   a. Kawasan Pusat Kota di Talawi Hilir
   b. Kawasan Sub Pusat Kota di Muaro Kalaban
2. **Kawasan Strategis Sosial Budaya**
   a. Kawasan Kota Pusaka/ Kota lama di Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar Budaya
   b. Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.
3. **Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**
   a. Kegiatan wisata alam menikmati pemandangan danau buatan, kebun binatang, motocross, dll.
   b. Kawasan Rencana pengembangan Bottanical Garden / hutan kota

H. Kebijakan terkait Penetapan Status Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) oleh UNESCO

Beberapa permasalahan berkaitan dengan status sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO baik secara kelembagaan, sumber daya, sarana dan prasarana, regulasi dan lainnya guna melakukan strategi dan rencana di masa datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan Sumber Daya Manusia pengelola sehingga dapat menenuhi standar pengelola area situs warisan dunia UNESCO.

2. Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak PT. BA, PT. KAI dan masyarakat terhadap kejelasan Kepemilikan dan penguasaan warisan budaya yang sebagian besar adalah milik perusahaan umum milik negara, dan masyarakat masyarakat atau privat sebagai penghuni/pengelola sehingga menyebabkan kegiatan pelestarian tidak sepenuhnya dilakukan karena pemahaman pemilik maupun pengelola serta masyarakat terhadap pentingnya pelestarian peninggalan bersejarah ini, yang belum merata.
3. Meningkatkan kualitas inventarisir/identifikasi dan dokumentasi terhadap warisan budaya dalam data base nilai sejarah dan nilai budaya Kota Sawahlunto.
4. Meningkatakn kualitas pengelolaan Program dan kegiatan penelitian dan penggalian pengembangan peninggalan bersejarah dan permuseuman sebagai objek warisan dunia sehingga mampu berkontribusi secara materi kepada kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan pemahaman lembaga pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya nilai peninggalan sejarah dan budaya.
6. Meningkatkan peran dan keberadaan Museum sebagai pusat edukasi pelestarian warisan budaya, bukan hanya sebatas tempat penyajian benda bersejarah sehingga baru berperan sebagai objek kunjungan wisatawan.
7. Penguatan karakter dan jati diri kebangsaan melalui warisan sejarah sosial-budaya melalui pembelajaran ditingkat Sekolah dan masyarakat.

4.2.2 Rumusan Isu Strategis Kota Sawahlunto

Berdasarkan pengkajian dan penelaahan terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan-kebijakan diatas baik sectoral, regional, nasional maupun internasional, maka isu-isu strategis perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas dan Merata serta Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter

Pelaksanaan pendidikan berkarakter tetap menjadi isue yang harus diperhatikan dalam pembangunan sektor pendidikan tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan isu pembangunan pendidikan ditingkat provinsi dan Nasional. Konsep pendidikan berkarakter yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus betul-betul diaplikasikan oleh sekolah dan guru. Perbaikan sikap mental anak, pengamalan ajaran agama, sikap kekeluargaan dan gotong royong serta karakter budaya dan adat istiadat yang mulai ditinggalkan generasi muda menjadi fokus perbaikan dalam mengembangkan pendidikan karakter ini. Perlunya pengawasan dan evaluasi secara rutin dari dinas pendidikan selaku leading Sektor pelaksanaan pendidikan di Kota Sawahlunto. Pendidikan berkarakter ini menjadi sangat penting sekarang ini sebagai proteksi akhlak anak dalam terhadap dampak negatif perkembangan informasi dan teknologi yang mudah untuk diakses generasi muda dan penduduk usia sekolah.

Kecenderungan orangtua siswa menyekolahkan anaknya di Sekolah-sekolah tertentu menyebabkan pemerataan pendidikan menjadi isu yang penting untuk dikedepankan. Hal ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Zonasi sekolah. Akan tetapi beberapa sekolah yang sudah terlanjut dicap sebagai sekolah favorit, tetap menerima calon siswa baru jika nilai mereka diatas rata-rata. Hal ini dapat menghambat pemerataan pendidikan di Kota Sawahlunto.

Kebijakan di bidang pendidikan dalam mengantisipasi pembatasan sosial kegiatan masyarakat perlu menjadi perhatian khusus mengingat kualitas pendidikan tetap harus ditingkatkan meskipun dihadapkan dengan tantangan keterbatasan dalam proses pembelajaran. Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah-langkah inovatif dan mengembangkan pola pengajaran yang kreatif yang melibatkan semua pihak baik pihak sekolah, guru, orang tua dan murid.

Kebijakan Merdeka Belajar dan Pembelajaran Adaptif Pandemic di Kota Sawahlunto belum dituangkan ke dalam surat edaran resmi oleh Dinas Pendidikan . Namun semua Satuan Pendiidkan perlu melakukan evaluasi pembelajaran masing-masing. Jka selama ini ada ujian standar kota, dimana soal ujiannya sama untuk setiap tingkat pada setiap jenjang pendidikan, maka sekarang sudah diberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk merancang dan melaksanakan evaluasi bagi siswanya. Antara satu sekolah dengan sekolah lain tidak ada kesamaan soal yang diujikan lagi.

Dengan melaksanakan beberapa kebijakan pemerintah, merdeka belajar dengan sendirinya terlaksana di jenjang pendidikan. Sekolah telah mengetahui merdeka belajar melalui Webinar sehingga merdeka belajar sudah terosialisasikan ke sekolah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tanggal 5 Agustus 2020 Perihal pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Masa Kondisi Khusus, pada masa pandemi satuan pendidikan pada daerah dalam kondisi khusus melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi Peserta Didik. Pada tahun pelajaran 2021/2022 kurikulum khusus masih digunakan karena belum diterbitkannya keputusan menteri tentang penggunaan kurikulum. Kota Sawahlunto khusus Dinas Pendidikan belum menerbitkan edaran terbaru terkait pemakaian kurikulum karena kurikulum yang digunakan masih kurikulum darurat.

UN/USBN merupakan ujian yang diselenggarakan oleh pusat, naskah soal dan pemeriksaan jawaban bukan dilakukan di sekolah. Penghapusan UN diedarkan sejak tahun 2020. Menurut edaran, bentuk ujian diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, mulai dari penyusunan soal, pemeriksaan, dan pemberian nilai. Ujian yang diselenggarakan bernama ujian sekolah. Ujian sekolah adalah ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Ujian Sekolah berbentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen lainnya. Sementara penentuan kelulusan adalah nilai rapor selama lima semester. Sementara, asesmen adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Sasarannya adalah siswa kelas 5 dan 8 pada pendidikan dasar. Mata ujian berupa AKM (literasi dan numerasi) dan survey karakter, guru melaksanakan survey lingkungan, hasil asesmen adalah pemetaan sekolah terhadap peralatan, mutu, dan karakter siswa.

Asesmen Nasional merupakan instrumen bagi pusat untuk menentukan mutu pendidikan eluruh Indonesia, sehingga natinya akan ada tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam pemerataan mutu pendidik di seluruh Indonesia. Baik dari sisi sarana dan prasarana, kompetensi guru, Kompetesni siswa dan mutu sekolahnya.

Sedangkan UN/USBN adalah penentuan kelulusan siswa. Asesmen tidak memiliki KKM atau target, UN/USBN memiliki target. Jadi asesmen bukan penganti UN/USBN, asesmen salah satu bentuk penilaian terhadap sekolah bukan penentuan nilai seorang siswa. Untuk penganti UN/USBN pada RPJMD adalah Ujian Sekolah (US). US dapat ditetapkan target yang akan dicapai. Nilai US diperuntukkan kepada masing-masing siswa untuk semua mata pelajaran.

2. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas serta keluarga sehat

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan karena dari tubuh yang sehat, memungkinkan manusia untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dengan menciptakan lingkungan sehat dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Pada pemenuhan layanan dasar urusan kesehatan, kota Sawahlunto memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan. Kapasitas tampung rumah sakit diidentifikasi belum seimbang dengan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mencakup penduduk Kota Sawahlunto sendiri dan sebagian penduduk dari kabupaten Sijunjung dan Kab. Tanah Datar. Kapasitas tampung juga terkait dengan jumlah dan kualitas tenaga medis yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu juga teridentifikasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih. Hal ini merupakan catatan tersendiri bagi peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Peran tenaga medis diharapkan makin meningkat dalam hal pencegahan timbulnya penyakit melalui upaya edukatif terhadap masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Seiring dengan program nasional, perilaku hidup bersih dan sehat ini akan dilanjutkan dengan program keluarga sehat dengan ukuran keberhasilan indeks keluarga sehat.

Penegakan protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat sangat vital di masa Pandemi ini. Kesadaran menerapkan 3 M dan membatasi kegiatan di luar rumah belum terlaksana secara maksimal sehingga peningkatan kasus Covid dan kematian akibat Covid masih terus terjadi di Sawahlunto. Perlu kesadaran dan pengawasan yang ketat dari seluruh elemen untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai Covid 19 di Sawahlunto.

Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat perlu untuk dikedepankan mengingat sumberdaya manusia yang baik merupakan modal utama pembangunan.

3. Penanganan Isu Stunting

Stunting menjadi isu yang masih menjadi perhatian di tingkat nasional hingga daerah. Upaya perbaikan gizi balita ditunjukkan dengan penurunan kasus stunting di Kota Sawahlunto dalam beberapa tahun terakhir. Namun, adanya Pandemi dan efek sosial ekonomi yang berdampak kepada masyarakat dikuatirkan dapat menjadi ancaman terhadap peningkatan kasus balita dengan gizi buruk di tahun mendatang.

Program perbaikan kualitas gizi untuk penanganan stunting d tingkat kota hingga ke pelayanan kesehatan terendah di masyarakat masih perlu untuk digiatkan seiring dengan isu PHBS dan penerapan protocol kesehatan yang menjadi jargon dalam pemutusan rantai penyebaran Covid.

4. Peningkatan peran lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan bermasyarakat

Perbaikan karakter dan mental masyarakat tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta lembaga agama dan adat itu sendiri. Sesuai dengan falsafah Adat Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah”, terlihat karakter masyarakat minangkabau pada umumnya, dan Sawahlunto khususnya, terbentuk dari kebiasaan adat istiadatnya yang didasari oleh agama islam. Hal ini juga dijadikan salah satu misi dalam pembangunan Provisni

Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal ini pulalah yang harus dijadikan kekuatan dalam pembangunan karakter masyarakat di Kota Sawahlunto lima tahun kedepan.Seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga dibutuhkan peran lembaga keagamaan dan adat dalam memfilter dan mengantisipasi dampak negatifnya. Jika hal ini tidak diperhatikan, nilai-nilai keagamaan dan budaya akan hilang dengan sendirinya. Semangat kekeluargaan, gotong royong, hormat-menghormati dan saling menghargai harus selalu menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kembali ke Surau yang juga merupakan aplikasi dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, perlu diterapkan lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, peran ninik mamak dan alim ulama yang telah mengakar dalam karakter masyarakat Kota Sawahlunto sebagai panutan ditengah masyarakat harus mendapatkan porsi yang lebih dalam pembangunan Kota ke depan. Falsafah “Kanakan Sapanuruikan Parintah Mamak” menjadi kekuatan yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah.

5. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Untuk mendukung Visi Kota menjadi Kota Wisata tambang yang berbudaya, harus disiapkan produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing sebagai suatu kemasan dengan pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata tdak akan dapat dinikmati langsng ole masyarakat, jika tidak diimbangi dengan kejelian mengoptimalkan multiplier efek dari kunjungan wisatawan tersebut. Masyarakat kota sawahlunto harus mampu menyediakan produk-produk unggulan dari yang akan dijual kepada wisatawan. Inilah yang akan menjadi titik temu permasalahan peningkatan perekonomian masyarakat akibat aktivitas pariwisata. Peningkatan daya saing ini dimulai dari bahan baku yang bekualitas, proses pengolahan yang baik, pengemasan yang menarik dan sesuai standar serta promosi yang tepat sasaran. Produk unggulan yang baik merupakan hasil olahan yang menjadi ciri khas Kota Sawahlunto. beberapa produk yang bisa ditingkatkan kualitas dan daya saingnya seperti Songket Silungkang, Kerajinan Tangan Daeri Batu Bara, Penganan Khas Kota Sawahlunto (Kerupuk Kubang), Konveksi Baju, Makanan Soto, dan lainnya. Selain itu usaha pendukung pariwisata seperti Homestay degan cirikhas suasana rumahan pun dapat dijadikan Ikon Kota sebagai Kota dengan Karakter Wisata.

Selain itu, inovasi dalam pengembangan wisata di Kota Sawahlunto juga sangat diperlukan. Adanya gab antara permintaan konsumen pariwisata dengan konsep pariwisata tambang yang ditawarkan, mengharuskan Pemerintah Kota sawahlunto untuk dapat mengkolaborasikan atau mengintegrasikan antara Objek Wisata Modern/rekreasi dengan wisata Tambang atau wisata alam lainnya. Wisata Tambang yang dapat didefinisikan sebagai wisata minat khusus, membutuhkan inovasi dan ide kreatif untuk dirpomosikan. Akan tetapi, objek ini akan bertahan lama karena merupakan cirikhas daerah yang tigdak dimiliki daerah lain. Disisi lain, objek wisata modern seperti Wisata Selfie dan Wisata Rekreasi, merupakan objek wisata yang booming tetapi bersifat sementara dan dapat diduplikasi oleh daerah lain.

6. Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan

Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur perlu menjadi perhatian lebih dalam pembangunan Kota Sawahlunto kedepan. Perubahan paradigma aparatur agar lebih mampu memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, harus didukung oleh kualitas apartur itu sendiri. Selalin itu juga harus didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Seiring perkembangan Ilmu

pengetahuan dan teknologi, aparatur pemerintah di Kota Sawahlunto juga harus mampu memanfaatkannya dalam efisiensi pengelolaan dan birokrasi pemerintahan

7. Kesetaraan Pembangunan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas, gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal, Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perlindungan Perempuan dan Anak.

Selama ini, kampanye untuk keadilan bagi Lansia terlantar, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok marginal lainnya selalu digelorakan. Akan tetapi, khusus untuk Kota Sawahlunto, kampanye bagi kelompok-kelompok ini seakan hany jadi alat politik semata. Kelompok ini seakan memang termarginalkan dalam pembangunan. Konsep pengarus utamaan Gender ini harus diaktualisasikan secara nyata dalam pembangunan. Kelompok-kelompok ini harugs menjadi perhatian seriugs dalam pembangunan Kota Sawhlunto lima tahun kedepan. Karena, selain menyangkut hati nurani, urusan Sosial ini merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemeritah Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Salin itu, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi juga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam pebangunan, sebagai upaya mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai Kota Layak Anak.

8. Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Pasca Tambang Oleh PT BA, PT KAI, Perusahaan Tambang Lainnya Dan Masyarakat

Status kepemilikan lahan di Kota Sawahlunto merupakan issue yang perlu dikedepankan dalam pembangunan Kota. Status Kota sebagai daerah bekas penambangan Batu Bara, bahkan beberapa Perusahaan masih mlakukan penambangan di Kota Sawahlunto, dapat menjadi kendala yang serius dalam membangun Kota. Objek Wisata Danau Biru merupakan contoh terdekat terkait kepemilikan lahan tambang yang dapat digunakan untuk Objek Wisata. Letak Danau Biru yang berada dalam Wilayah Kuasa Penambangan suatu Perusahaan Swasta, membatasi ruang gerak pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan objek wisata tersebut.

Kepemilikan Aset PT.BA dan PT.KAI yang dapat dijadikan sebagai objek wisata tambang juga harus diselesaikan dengan baik. Konsep wisata tambang mengharuskan Kota Sawahlunto menjual ikon-ikon bekas penambang sebagai bukti sejarah keberadaan Tambang Batu bara tertua diindonesia berada di Kota sawahlunto. status World Heritage dari UNESCO juga akan menuntut Kota Sawahlunto untuk selalu melestarikan bukti peninggalan-peninggalan bersejarah yang sebagaina kepemilikannya ada pada PT.BA dan PT.KAI. Masalah kepemilikan ini akan menjadi dasar proses pelestarian kedepannnya.

9. Optimalisasi Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO dan Geopark Nasional dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Penetapan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan dunia tersebut Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.Warisan Budaya Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto merupakan warisan budaya yang benar-benar signifikan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.Penetapan status warisan dunia bukanlah tujuan utama dari diplomasi budaya.Selain perlindungan dan edukasi, status warisan dunia sudah seyogyanya juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendatangkan manfaat ekonomi dan meningkatkan harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Sebagai situs warisan dunia, Kota Sawahlunto akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan pariwisata Dampaknya tentu sangat besar. Ini akan jadikan sebagai destinasi baru bagi wisata dan pemerintah dan masyrakat sama-sama berkomitmen untuk menjaga warisan budaya dunia ini, karena tentu akan mendatangkan kebaikan, pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan di tetapkan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto menjadi destinasi wisata baru di Sumbar, dan tentunya keberadaanya sebagai warisan budaya dunia perlu kita jaga bersama untuk mendorong kemajuan ekonomi berupa akses, infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik, sebagai bentuk upaya peningkatan pengalaman kunjungan yang lebih baik dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu penobatan status Geopark Nasional pada beberapa situs geologi yang tersebar di seluruh wilayah Sawahlunto turut menjadi keunggulan komparatif bagi perkembangan kepariwisataan di Sawahlunto. Hal ini menjadi daya tarik potensi investasi, sekaligus mendorong inovasi maupun kreatifitas ekonomi, baik di sektor barang dan jasa. Dari aspek pengetahuan, dapat meningkatkan profil dan daya saing perekonomian ke tingkat nasional maupun internasional.



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2018-2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah ***"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi: **1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat**; **2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum**; **3) Mengembangkan objek wisata tambang**; **4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata**.

Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahlunto pada tahap ke-4 tahun 2018-2023, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang agama dan budaya dengan fokus pada pengamalan keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan inovatif, serta pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.
3. Bidang ekonomi dengan fokus memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing.
4. Bidang sarana dan prasarana perkotaan dengan fokus pembangunan jaringan infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
5. Pembangunan lingkungan hidup dengan fokus pengelolaaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada RPJPD Kota Sawahlunto tahap ke-4 tahun 2018-2023, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap ketiga dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

5.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Pada awal penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023, gambaran visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam **RPJMN Tahun 2015-2019,** yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Sawahlunto adalah Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat,**

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa dan berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Seiring dengan dilaksanakannnya pemilihan presiden tahun 2019, serta ditetapkannya RPJMN tahun 2019-2024, untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 untuk periode tahun 2018-2020 telah disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan dijabarkan dalam RPJMD awal. Sedangkan untuk tahun 2021-2023 disinkronkan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan itu, perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta arahan utama yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Adapun gambaran ringkas visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut; visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu *Indonesia Maju*. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045 ditetapkan 5 (lima) arahan utama presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Selanjutnya visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

5.3 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026

Selain mensinkronkan dengan pembangunan nasional, perubahan RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023, khususnya arah pembangunan tahun 2021-2023 juga akan mengacu kepada visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi Provinsi Sumatera Barat untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026. Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026. Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah : **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan".** Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani
Masyarakat madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul
Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Visi diatas akan diwujudkan melalui misi:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Matrik keselarasan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Matriks keselarasan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat dengan Visi da Misi Pemerintah Kota Sawahlunto

PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026		KOTA SAWAHLUNTO 2018-2023	
VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN		**VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**	
MISI 1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengalaman, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	MISI 3
		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	MISI 5
MISI 2	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	MISI 1
MISI 3	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK	MISI 2
MISI 4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital		
MISI 5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan	MISI 6
MISI 6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai	MISI 7
MISI 7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	MISI 4
		Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor	MISI 9

5.4 RPJMD KABUPATEN/KOTA TETANGGA

Kota Sawahlunto dalam dalam melaksanakan pembangunan tidak dapat berdiri sendiri dan perlu memperhatikan keselarasan pembangunan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah datar yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Sawahlunto. Guna menjamin keselarasan tersebut perlu memperhatikan visi dan misi keempat daerah tetangga tersebut:

1. RPJMD Kabupaten Sijunjung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, dengan Visi "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan berbudaya menuju Masyarakat madani", dengan Misi 1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang efektif, efisien dan Responsif Berbasis Reformasi Birokrasi, 2) Meningkatkan daya Saing ekonomi Daerah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata, 3) Meningkatkan Kualitas SDM yang Cerdas, Sehat, Produktif berbasis Teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabkullah(ABS-SBK), 4) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana dasar serta Pemanfaatan Sumber Daya alam berwawasan Lingkungan.

2. **RPJMD Kabupaten Solok**

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, dengan Visi "Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat", dengan Misi 1) Pengelolaan Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat, 2) Meningkatan Infrastruktur yang Berkeadilan, 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata, 4) Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, 5) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, 6) Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK),

3. **RPJMD Kabupaten Tanah Datar**

   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, dengan Visi **"**Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan**",** dengan Misi 1) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan social budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah, budaya, 2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas Pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga. 3). Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya, 4. Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dan kesejahteraan social, 5). Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui : (a). Pengembangan Kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sector unggulan. (b). Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 6) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 7) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan pembangunan Sawahlunto sudah sejalan dan selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan tiga kabupaten tetangga. Dalam implementasinya program pembangunan yang dilakukan terutama pada daerah perbatasan perlu saling mendukung dan melengkapi di dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi di masing-masing daerah yang secara umum diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup ketiga Kabupaten perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan langsung dengan Kota Sawahlunto

5.5 RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023

Meskipun terjadi perubahan visi dan misi nasional dan provinsi, visi dan misi, pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tidak mengalami perubahan. Untuk visi pemerintah daerah yaitu:

"DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBERSAMAAN dalam visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun kota disegala bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, pemerintah, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

KOTA WISATA adalah mewujudkan visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu " SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA " serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

KREATIF maksudnya pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

INOVATIF maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk Sawahlunto, baik itu penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

UNGGUL maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, agama, adat istiadat, infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan.

BERMARTABAT maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

BERKEADILAN maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidak adilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

SEJAHTERA maksudnya; masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

5.5.1 MISI

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai

8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor

5.5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik

Misi ini merupakan upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera secara batin dan kembali ke tata kehidupan masyarakat Minangkabau sesuai falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Konsep meramaikan kembali rumah ibadah sebagai sarana dakwah dan sosial kemasyarakatan, diharapkan akan terwujud melalui misi ini. Peningkatan kualitas rumah ibadah, serta penyediaan guru agama, guru mengaji, dan imam masjid yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan misi ini. Selain itu, peningkatan peran ninik mamak, dan alim ulama serta tokoh masyarakat dalam pembentukan akhlak dan karakter masyarakat juga akan dilaksanakana dalam misi ini. Jika misi ini dapat terlaksana, diharapkan karakter Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya akan semakin kuat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada misi ini terjadi perubahan tujuan, dengan tujuan sebelum perubahan yaitu Tujuan 1 “*Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis*” dan Tujuan 2 “*Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota*” berubah menjadi Tujuan 1 “Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya” setelah perubahan. Sasaran pembangunan Misi 1 ini sebelum perubahan dan setelah perubahan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. 2 Tujuan dan Sasaran Misi 1 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
1.1 Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	1.1 Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1.1.1 Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	1.1.1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
		1.1.2 Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	
1.2 Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota		1.2.1 Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	1.1.2 Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota
		1.2.2 Meningkatnya budaya asli Sawahlunto yang lestari	

Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Misi ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto yang semakin baik, berkualitas dan produktif. Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi ini dititikberatkan pada pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Sektor pertanian sebagai sektor utama dalam pembentukan perekonomian daerah di Kota Sawahlunto akan dijadikan perhatian utama dalam pengembangan ekonomi pada periode 2018-2023 ini. Selain itu, sektor industri pengolahan seperti Songket Silungkang, Kerupuk Kubang, Minyak Atsiri dan produk unggulan UMKM lainnya, juga akan diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi lima tahun kedepan. Sebagai dasar utama peningkatan kualitas ekonomi ini akan dimulai dari peningkatan keterampilan dan kualitas calon pencari kerja. Beberapa kegiatan strategis nantinya yang akan dilakasanakan seperti pendirian bangunan untuk Balai Latihan Kerja, kerjasama dengan perusahaan lain dalam penyerapan tenaga kerja, dan fasilitas magang ke luar negeri. Diharapkan, jika secara ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sudah baik, maka kesejahteraan masyarakat secara ekonomi akan terwujud.

Dengan adanya pandemi Covid-19, fokus pembangunan Kota Sawahlunto 3 tahun kedepan adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat, dengan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang ada. Tujuan pembangunan pada misi ini sebelum perubahan adalah "Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan" sedangkan setelah perubahan juga masih tetap, dengan memperhatikan potensi yang ada. Untuk sasaran pembangunaan sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 3 Tujuan dan Sasaran Misi 2 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	2.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	2.1.1 Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	2.1.1 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		2.1.2 Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	2.1.2 Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
		2.1.3 Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat	2.1.3 Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat
		2.1.4 Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan	2.1.4 Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan
			2.1.5 Tersedianya iklim investasi yang kondusif

Misi 3: Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi pendidikan. Penekanan misi ini adalah pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mewujudkan manusia yang unggul dalam pendidikan, kreatif mengambil tindakan dan mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dimasa

yang akan datang. Selain peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik, pada misi ini juga akan diperhatikan aplikasi dari pendidikan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta pengamalanya oleh generasi muda pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Sawahlunto akan memberikan jaminan pendidikan kepada seluruh masyarakat, melalui beasiswa dan reward kepada siswa berprestasi.

Dengan adanya pandemi Covid-19, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dalam memperoleh ilmu dan pembelajaran. Pembelajaran secara daring, membuat siswa harus menyesuaikan diri. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pendidikan. Tujuan pembangunan pada misi ini tidak mengalami perubahan sebelum dan setelah perubahan. Sedangkan untuk sasaran pembangunan, terjadi perubahan sebelum dan setelah perubahan, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Misi 3 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	3.1.1 Tersedianya pelayanan pendidikan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan
		3.1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	

Misi 4: Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

Melalui misi ini diharapkan adanya upaya untuk menghadirkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat, bersih dalam pengelolaan tata pemerintahan dan mampu berinovasi dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif ini akan terwujud jika aparatur sipil negara (ASN) pada pemerintahan Kota Sawahlunto ini mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja dan mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan.

Pada misi ini tidak terjadi perubahan tujuan dan sasaran secara signifikan. Untuk tujuan, tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk sasaran pada misi 4 ini, untuk sasaran "Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat" diarahkan kepada konsep pelayanan secara online dan memanfaatkan teknologi. Sehingga untuk memfokuskan tujuan dari misi ini, maka sasaran ini di pindahkan kepada misi 9. Adapun perubahan sasaran pembangunan sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 5 Tujuan dan Sasaran Misi 4 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	4.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	4.1.1 Tersedianya perencanaan pembangunan yang berkualitas	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
		4.1.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	4.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
		4.1.3 Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan yang baik	
		4.1.4 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	
		4.1.5 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	
4.2 Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	4.2 Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	4.2.1 Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	4.2.1 Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto

Misi 5: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk seluruh Masyarakat

Melalui misi ini, juga akan diupayakan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Sawahluno, khususnya dari segi kesehatan. Penekanan misi ini adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat ditingkat pelayanan dasar dan rujukan, untuk mewujudkan manusia yang sehat secara jasmani, dan mempunyai kepercayaan diri dalam jaminan pelayanan kesehatannya. Hal ini akan diwujudkan melalui pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Selalin itu, pada misi ini juga akan diperhatikan perilaku hidup sehat masyarakat, yang dimulai dari diri, keluarga dan lingkungannya.

Adanya pandemi Covid-19 ini, menyebabkan masyarakat harus lebih mampu menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. Sebagai akibatnya terhadap pembangunan daerah, upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta pelayanan masyarakat harus lebih optimal dilaksanakan. Tujuan pembangunan pada misi ini tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk sasaran pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diturunkan kepada sasaran OPD sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 6 Tujuan dan Sasaran Misi 5 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
5.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	5.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	5.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	5.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		5.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	5.1.2 Menurunnya prevalensi stunting

Misi 6: Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk melanjutkan komitmen daerah dalam mencapai Kota Wisata Tambang yang berbudaya. Pengembangan pariwisata di Kota Sawahlunto ini perlu inovasi, keseriusan, terkonsep secara jelas dan berkelanjutan. Melalui misi ini diharapkan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto betul-betul mampu menjadi mesin penggerak utama dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Yang menjadi perhatian utama pada misi ini adalah peningkatan kualitas destinasi wisata, pembinaan atraksi wisata sesuai potensi daerah, peningkatan kualitas promosi wisata agar lebih tepat sasaran dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan mendukung berkembanganya sektor pariwisata ini. Pariwisata diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* yang positif dalam meningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

Wabah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata ini. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai bentuk respon daerah terhadap peningkatan pariwisata. Tujuan pembangunan pada misi ini mengalami perubahan, dari sebelumnya meningkatan kunjungan pariwisata, menjadi meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan. Seiring dengan itu, terjadi perubahan yang signifikan terhadap sasaran pembangunan daerah, dengan fokus perubahannya adalah sasaran yang lalu diturunkan menjadi sasaran perangkat daerah. Adapun penyajiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 7 Tujuan dan Sasaran Misi 6 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
6.1 Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	6.1 Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	6.1.1 Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata
		6.1.2 Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	
		6.1.3 Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	
		6.1.4 Tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	

Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Melalui misi ini, diharapkan ketersediaan jalan dan jembatan sebagai aksesibilitas seluruh sektor berada dalam kondisi baik, ketersediaan lingkungan yang bersih dan berkualitas, ketersediaan air bersih masyarakat yang layak, ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman yang lebih baik, serta pembangunan yang sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Pada misi ini, juga akan memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, penanggulanan dan penanganan bencana.

Pada perubahan RPJMD ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk sasaran pembangunan " Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana" diturunkan menjadi sasaran perangkat daerah sedangkan sasaran yang baru adalah "*meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang*". Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 8 Tujuan dan Sasaran Misi 7 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
7.1 Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	7.1 Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	7.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	7.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai
		7.1.2 Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	7.1.2 Meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
		7.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	7.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		7.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	7.1.4 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman 7.1.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal lainnya

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan pembangunan yang berkeadilan bagi kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya di Kota Sawahlunto. Misi ini merupakan pengejawantahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan kehidupan yang layak bagi kelompok marginal tersebut. Pemerintah harus memberikan keadilan dan kesetaraan pembangunan pada lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan kesetaraan dan keberdayaan gender dalam pembangunan lima tahun kedepan.

Pada perubahan RPJMD ini, untuk misi ini terjadi perubahan tujuan pembangunan, dari sebelumnya “Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya” menjadi Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Sedangkan untuk sasaran pembangunan tidak mengalami perubahan yang signifikan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. 9 Tujuan dan Sasaran Misi 8 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
8.1 Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	8.1 Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan gender	8.1.1 Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	8.1.1 Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

		8.1.2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	8.1.2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Misi 9: Mewujudkan Kota Berbasis *Smart City* dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Misi ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien yang berbasiskan informasi dan teknologi. Melalui misi ini, diharapkan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Sawahlunto akan cepat, efektif dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan. Jika hal ini terwujud, secara langsung akan mempermudah pelayanan investasi ke Kota Sawahlunto melalui kemudahan birokrasinya. Akses terhadap informasi potensi daerah juga akan mudah diketahui oleh masyarakat.

Pada perubahan ini, terjadi perubahan yang signifikan terhadap tujuan pembangunan misi ini. Sebelumnya, tujuan pembangunan misi ini adalah Tersedianya iklim investasi yang kondusif. Akan tetapi, setelah dilakukan penajaman, maka fokus tujuan pembangunan misi ini sama dengan misi 4 yaitu "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif*" sedangkan untuk sasaran pembangunan dari "*meningkatnya kualitas smart city dalam menarik investor*" sebelum perubahan menjadi "*meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi* " dan "*meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat*". Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 10 Tujuan dan Sasaran Misi 9 Sebelum dan Setelah Perubahan

Tujuan Sebelum Perubahan	Tujuan Setelah Perubahan	Sasaran Sebelum Perubahan	Sasaran Setelah Perubahan
9.1 Tersedianya iklim investasi yang kondusif	9.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	9.1.1 Meningkatnya kualitas *smartcity* dalam menarik investor	9.1.1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi
			9.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebelum dan setelah perubahan yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.11 dan Tabel 5.12 sebagai berikut:

Tabel 5. 11 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 SEBELUM PERUBAHAN

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 1 : Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis		Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah Masjid dan mUshola 2017 adalah 221	65	65	65	100	75	80,18	106,91	83	62,93	75,82
		1. Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah Masjid dan mUshola 2017 adalah 221	65	65	65	100	75	80,18	106,91	83	62,93	75,82
			Persentase Rumah Ibadah agama lain yang aktif (%)	(Jumlah rumah ibadah agama lain yang aktif / total rumah ibadah agama lain) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2. Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	75	75	100	80	75,2	94,00	85	76,29	89,75
			Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10	15	15	100	20	16	80,00	25	20	80,00
	2. Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota		Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	52	100	60	62,5	104,17	68	52,38	77,03

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1 Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	52	100	60	62,5	104,17	68	52,38	77,03
		2 meningkatnya budaya asli Sawahlunto yang lestari	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %	57,98	59,66	59,66	100	61,34	63,02	102,74	63,02	63,85	101,32
			Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan) x 100 %	n/a	10,7	10,7	100	13,3	17,8	133,83	17,8	6,05	33,99
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis	1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,75	5,78	5,5	95,156	5,8	5,31	91,55	5,83	-1,27	-21,78

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK			PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7	55,81	55,00	98,55	58,24	58,85	101,05	61,02	58,02	95,08
			Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk x 100%	2,01	2,39	2,39	100	2,27	2,17	95,59	2,21	2,16	97,74
		1. Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Produktivitas tenaga kerja	PDRB ADHB /Tenaga Kerja(Juta/jiwa/tahun)	86,44	88,05	87,59	99,48	89,68	96,04	107,09	91,35	91,09	99,72
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,19	6,15	5,75	93,50	6,03	6,82	113,10	5,65	8,2	145,13
		2. Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	423.483,33	466.255,15	41.587,00	8,92	513.346,92	392.312,53	76,42	565.194,95	395.495,23	69,98

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9.343	9.522,39	9.765,00	102,55	9.746,16	10.348,00	106,18	10.008,33	10.182,00	101,74
			Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22.767	23.635,41	23.635,41	100	23.946,52	23.900,00	99,81	25.106,79	22.885,00	91,15
		4. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309.537,83	321.300,27	321.300,00	100	335.758,78	325.354,30	96,90	350.867,92	326.224,79	92,98

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,30	71,72	99,20	73,71	72,39	98,21	75,33	72,64	96,43
		1. Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,14	13,36	13,15	98,46	13,62	13,16	96,65	13,92	13,17	94,64
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9,93	10,09	9,94	98,49	10,29	9,97	96,89	10,52	10,17	96,71

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2 Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Rata-rata nilai UN SMP Kota Sawahlunto	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	53,9	54,9	54,9	100	55	54,9	99,82	55,1	78	141,56
			Kasus Kenakalan Remaja menurun	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	7	9	9	100	8	6,9	86,25	7	5	71,43
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan) x 100 %	n/a	4	4	100	10	10,38	103,80	20	10,94	54,70

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	57,64	52,22	90,60	63,41	52,61	82,97	69,18	52,77	76,28
		1. Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peringkat Nilai LPPD tingkat Provinsi	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	5	3	7	20	2	11	11,1	1	7	16,7
		2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
			Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	-	-	-	-	-	-	4,04	4,19	4,45	12,68
		3. Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	B	B	100	B	B	100	B	B	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Pengendalian Internal Pemerintah oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	100	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
		4. Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	n/a	80	80	100	85	83,33	98,04	90	26,31	29,23
		5. meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	B	100	B	B	100	B	B	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	n/a	17	19,25	113,24	20	34,91	174,55	23	46,24	201,04
	2. Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto		Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,30	71,72	99,20	73,71	72,39	98,21	75,33	72,64	96,43

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,39	69,49	69,59	100,14	69,83	69,87	100,06	70,47	70,00	99,33
			Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan Indeks > 0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga dikali seratur persen	25	27	24	88,89	29	24,6	84,83	31	24	77,42
		2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68,01	95	95	100	95	97,1	102,21	96	96,07	100,07
			Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	94,26	94,46	81,5	86,28	94,66	81,5	86,10	94,86	80,60	84,97

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	1,91	≤ 2,51	2,40	95,62	≤ 2,40	2,38	99,17	≤ 2,35	3,37	143,40
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan	1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto		PDRB sektor Pariwisata -SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09	71.119,37	73.951,36	103,98	77.373,30	82.406,43	106,50	83.627,23	75.255,420	89,99
			Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,58	2,76	1,15	41,67	2,95	1,42	48,14	3,16	1,00	31,65
		1. Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Persentase pengunjung yang menganggap puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	n/a	-	-	-	65	65	100	70	-	-
			Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek	32,35	32,35	32,35	100	38,24	32,25	84,34	44,12	44,12	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				wisata yang ada) x 100 %										
		2. berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	60,55	60,55	60,55	100	61,76	61,76	100	63,00	63,00	100
		3. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331.483	354.610	461.960	130,27	379.350	237.490	62,60	405.816	101.649	25,05
		4. tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	% persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	13,22	13,22	13,22	100	13,88	13,88	100	14,58	14,58	100
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan	1. Menyediakan infrastruktur kota berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum,	74,83	75,94	74,83	98,53	77,33	74,83	96,76	79,00	80,82	102,30

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
memadai	dan berwawasan lingkungan			sanitasi) dalam kondisi baik/tiga										
		1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53,93	54,96	54,96	100	72,66	59,45	81,82	74,35	62,34	83,85
			Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45,35	45,35	45,35	100	46,35	46,72	100,80	47,35	46,72	98,67
		2. meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indek Ketahanan Daerah		n/a	0,47	0,47	100	0,49	0,49	100	0,51	0,44	86,27
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan	56,79	56,79	55,5	97,73	58	58,01	114,95	60	62,74	133,33

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)										
			Persentase Ketaatan terhadap tataruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan RTRW	86	86	86	100	87	87,5	100,57	88	87,50	99,43
		4. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6,4	6,4	16,57	258,91	5,4	33,79	625,74	4,4	48,36	1099,09
			Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42,58	22,81	42,58	186,67	15	9,96	66,40	10	133,21	1332,10
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83	84	83	98,81	86	86	100	87	87	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	1. Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya		Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18,64	13,17	13,17	100	59,76	63,60	106,43	84,89	84,89	100
		1. Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia yang terfasilitasi	(Jumlah lansia yang terfasilitasi / Total Jumlah lansia kurang mampu) dikali 100 %	19,74	19,25	19,25	100	19,25	56,85	295,32	100	87,24	87,24
			Persentase ABK yang terfasilitasi	(Jumlah ABK yang terfasilitasi / Total Jumlah ABK) dikali 100 %	44,74	22,87	22,87	100	100	64,02	64,02	100	100	100
			Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitas	(Jumlah penyandang disabilitas yang terfasilitasi / Total Jumlah	4,64	7,47	7,47	100	19,79	13,95	70,49	39,57	15,02	37,96

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			i	penyandang disabilitas) dikali 100 %										
			Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	(Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar yang terfasilitasi / Total Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar) dikali 100 %	5,43	3,09	3,09	100	100	100	100	100	100	100
		2. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,59	65,6	65,86	100,40	65,61	65,33	99,57	65,62	66,18	100,85
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,52	95,53	95,68	100,16	95,54	95,51	99,97	95,55	95,54	99,99

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Predikat Kota Layak Anak	Predikat bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Nindya	Nindya	Nindya	100	Nindya	Nindya	100	Utama	Nindya	50
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City	1. tersedianya iklim investasi yang		Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan	-	-	86,377	70,90	26	200,44	769,23	26	28,28	108,77

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
						T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	kondusif			Asing										
		1. meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,02	2,3	1,87	81,30	2,7	2,45	90,74	3	2,88	96,00

Sumber: Barenlitbangda, hasil analisa 2021

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan, terhadap capaian indikator tujuan, sasaran dari target yang ditetapkan seperti yang terlihat pada rincian table di atas selanjutnya dilakukan enyesuaian sasaran dan indikator dilakukan berdasarkan kewenangan dan lingkup tugas kepala daerah. Untuk sasaran dan indikator yang dipandang terlalu sempit/ mikro, maka sasaran dan indikator tersebut diturunkan ke Perangkat Daerah. Sementara untuk target disesuaikan berdasarkan evaluasi hasil capaian serta penyelarasan proyeksi target indikator oleh pemerintah provinsi sebagaimana Tabel 5.12 dibawah ini.

Tabel 5. 12 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018-2023 SETELAH PERUBAHAN

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik																
1	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya			Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	-	-	-	-	0,037	-	-0,002	1,23	1,43	1,77	1,77
		1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota Sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	-	-	-	-	0,036	-	-0,002	1,23	1,43	1,77	1,77
		2.	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	52	60	62,5	68	52,38	76	84	88	88
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK																

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,75	5,78	5,52	5,8	5,31	5,83	-1,27	2,9	3,24	4,53	4,53
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7	55,81	55,01	58,24	58,88	61,02	58,02	59,99	62,93	66,03	66,03
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,39	2,39	2,27	2,17	2,21	2,16	2,10	2,05	2,01	2,01
				Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,300	-	0,310	-	0,270	-	0,286	0,281	0,280	0,278	0,278
		1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,19	6,15	5,75	6,03	6,82	5,65	8,2	7,55	6,81	6,43	6,43
		2	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	404.956,76	466.255,15	415.867,46	513.346,92	392.312,53	565.194,95	395.495,23	401.862,74	409.417,45	418.106,23	418.106,23

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
		3	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9.343	9.522,39	9.765,00	9.746,16	10.348,00	10.008,33	10.183,00	10.307,58	10.632,26	11.024,59	11.024,59
				PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	468.021,05	-	510.433,17	-	553.593,38	-	547.822,20	556.832,20	582.684,76	615.823,20	615.823,20
		4	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309.537,83	321.300,27	312.007,01	335.758,78	325.354,30	350.867,92	326.224,79	329.730,34	336.849,19	344.355,30	344.355,30
				Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	n/a	-	64,17	-	65,89	-	67,36	68,91	70,56	72,33	72,33
		5	tersedianya iklim investasi yang kondusif	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	n/a	-	86,377	26	200,44	26	28,276	36	36	41	41
Misi 3: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)																

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,30	71,72	73,71	72,39	75,33	72,64	73,17	73,63	74,09	74,09
		1.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,14	13,36	13,15	13,62	13,16	13,92	13,17	13,18	13,19	13,20	13,20
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9,93	10,09	9,94	10,29	9,97	10,52	10,17	10,75	11,01	11,30	11,30
				Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	n/a	4	4	10	7,34	20	10,94	20	25	30	30
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif																
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	57,64	52,22	63,41	52,61	69,18	52,77	52,93 (CC)	60,05 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
		1.	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	B	B	B	B	B	B (61,03)	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	BB (72,83)
				Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	4,04	4,19	4,45	12,68
		2.	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	-	-	-	-	-	-	61	66	70	75	75
2.	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentramandan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto			Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	0,044	0,046	0,049	0,139
		1.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	-	-	-	-	-	-	-	0,044	0,046	0,049	0,139

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023		
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target		Target Capaian Kinerja
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat																	
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,30	71,72	73,71	72,39	75,33	72,64	73,17	73,63	74,09	74,09	
		1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	69,39	69,49	69,59	69,83	69,87	70,47	70,00	70,14	70,28	70,42	70,42	
		2	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	-	-	18,5	-	11,1	-	8,00	6,10	6,0	5,90	5,90	
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan																	
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,75	5,78	5,52	5,8	5,31	5,83	-1,27	2,9	3,24	4,53	4,53	

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,7	55,81	55,01	58,24	58,88	61,02	58,02	59,99	62,93	66,03	66,03
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01	2,39	2,39	2,27	2,17	2,21	2,16	2,1	2,05	2,01	2,01
				Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,300	-	0,310	-	0,270	-	0,286	0,281	0,280	0,278	0,278
		1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09	71.119,37	73.951,36	77.373,30	82.406,43	83.627,23	75.255,42	80.359,32	87.536,71	95.714,10	95.714,10
				Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,58	2,76	2,58	2,95	2,48	3,16	1,75	1,86	1,98	2,13	2,13
Misi 7: Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai																
1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan			Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	74,83	75,94	74,83	77,33	74,33	79,00	78,30	79,69	81,71	83,57	83,57

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
		1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53,93	54,96	54,96	72,66	59,45	74,35	62,34	63,42	65,07	66,73	66,73
				Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45.35	45.35	45,35	46.35	46,72	47.35	46,72	47,72	49,22	51,22	51,22
		2	Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	-	0.47	0,47	0,49	0,49	0,51	0,44	0,53	0,55	0,57	0,57
				Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45.35	45.35	45,35	46.35	46,72	47.35	46,72	47,72	49,22	51,22	51,22
		3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56,79	56,79	56,79	58	58,01	60	62,74	-	-	-	-

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
					Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)	-	-	-	-	-	-	-	65,18	65,70	66,22	66,22
		4	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	86	86	86	87	87,5	88	84,15	88	89	90	90
		5	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6,4	6,4	6,4	5,4	5,4	4,4	11,29	10,08	8,9	7,5	7,5
				Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42,58	22,81	42,58	15	9,96	10	133,21	83,54	72,93	19,08	19,08
				Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83	84	83	86	86	87	87	88,01	89,05	90,1	90,1
Misi 8: Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya																
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	95,53	95,68	95,54	95,51	95,55	95,48	95,50	95,51	95,52	95,52

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
	Gender	1.	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	18,64	13,17	13,17	59,76	63,6	84,89	-	89,84	94,78	100	100
		2.	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	95,53	95,68	95,54	95,51	95,55	95,48	95,50	95,51	95,52	95,52
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor																
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif			Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	-	57,64	52,22	63,41	52,61	69,18	52,77	52,93 (CC)	60,05 (B)	61,54 (B)	61,54 (B)
		1.	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	-	2,3	1,87	2,7	2,45	3	2,88	2,92	2,96	3,10	3,10

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus Perhitungan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
							2018		2019		2020		2021	2022	2023	
						R	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target Capaian Kinerja
				Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	B	B	B	B	80 (B)	83,34 (B)	86,55 (B)	89,87 (A)	89,87 (A)



BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto sesuai visi **DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun mulai 2018 sampai dengan 2023. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Dengan dilakukannya perubahan terhadap beberapa tujuan dan sasaran pembangunan, juga dilakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakn yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan sebelum perubahan RPJMD Kota Sawahlunto ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KOTA SAWAHLUNTO SEBELUM PERUBAHAN

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik				
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis	1.	Terwujudnya aktivitas kehidupan masyarakat yang religius	Peningkatan kenyamanan tempat Ibadah dengan konsep wisata religi yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di tempat ibadah
		2.	Tersedianya sarana peribadatan dan pendidikan agama yang berkualitas	

Tujuan		Sasaran		Strategi
Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
2.	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	1	Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto	Pemajuan pokok-pokok pikiran kebudayaan
		2	meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari	
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK				
1.	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1.	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja
		2.	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	Peningkatan kualitas produk unggulan daerah
		3.	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Peningkatan kemampuan daya beli dan kemauan untuk berbelanja di Kota Sawahlunto bagi masyarakat
		4.	Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian dan Perkebunan
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)				
1.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1.	Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas	Penyediaan Pelayanan, sarana dan Prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang berkualitas, terjangkau dan merata
		2.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1.	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan
		2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
		3.	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik	Perbaikan sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan
		4.	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah	
		5.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan kualitas dan moral Sumber Daya Aparatur dengan konsep pemerintah yang melayani bukan dilayani

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**
2.	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	1.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat				
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1.	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesadaraan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan
		2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan serta Peningkatan kualitas Sarana, Prasarana dan pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Rujukan
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan				
1.	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto	1.	Tersedianya destinasi wisata yang nyaman untuk dikunjungi	Peningkatan kualitas dan Daya Tarik Destinasi Wisata
		2.	Berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing	Peningkatan kualitas SDM Pelaku industri dan kelembagaan Pariwisata
		3.	Tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas	Peningkatan kualitas Promosi pariwisata yang tepat sasaran
		4.	Tersedianya kelembagaan kepariwisataan yang profesional	Peningkatan kualitas kelembagaan kepariwisataan
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai				
1.	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota
		2.	meningkatnya kesiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana
		3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan
		4.	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Pencapaian Universal Akses 100-0-100

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**
Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya				
1.	Mewujudkan keadilan sosial bagi disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	1.	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap mayarakat yang lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
		2.	Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan
Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor				
1.	Tersedianya iklim investasi yang kondusif	1.	meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi

Dalam tabel berikut, disajikan rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Sawahlunto setelah perubahan.

Tabel 6. 2 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KOTA SAWAHLUNTO SETELAH PERUBAHAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik			
1	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	1 Peningkatan kenyamanan tempat Ibadah dengan konsep wisata religi yang dapat meningkatkan aktivitas masyarakat di tempat ibadah	1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan
				2 Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat
				3 Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
				4 Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid
			2 Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah Tahfidz dan Taman Bacaan Alquran	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
				2 Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan
		2 Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	1 Mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter daerah	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto
				2 Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
				3 Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
				4 Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
	Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK			
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1 Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
			2 Peningkatan kerjasama dengan perusahaan dan daerah lain untuk perluasan kesempatan kerja	1 Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
				2 Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
				3 Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
				4 Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa
			3 Peningkatan akses tenaga kerja terhadap informasi dan bursa kerja	1 Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi
				2 Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online
				3 meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
			4 Peningkatan koordinasi dengan pengawas tenaga kerja untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja	1 Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
		2 Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	1 Peningkatan kualitas produk unggulan daerah	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
				2 Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan
				3 Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri
				4 Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0
				5 Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas
				6 Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
				7 Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				8 Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
				9 Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
		3 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pengurus koperasi	1 Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
				2 Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi
				3 Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi
				4 Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi
			2 Peningkata daya saing usaha koperasi	1 Meningkatkan daya saing usaha koperasi
			3 Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	1 Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
				2 Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan
				3 Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto
				4 Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
				5 Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan
				6 Mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam penggunaan Teknologi dalam pemasaran dan peningkatan usaha
				7 Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah
				8 Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat
			4 Peningkatan kualitas dan fungsi pasar dalam aktivitas ekonomi masyarakat	1 Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dan ekonomi kreatif
				2 Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur
				3 Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto
				4 Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
		4 Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	1 Peningkatan produksi pangan berbasis lokal	1 Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
				2 Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan
			2 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman pangan	1 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan
				2 Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat
			3 Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian dan Perkebunan	1 Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
				2 Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
				3 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
				4 Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
				5 Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman
				6 Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian
			4 Mendorong Hilirisasi Industri hasil Pertanian, Peternakan dan perikanan	1 Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
				2 Memberikan jaminan kesehatan hewan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				peliharaan masyarakat
				3 Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial
				4 Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
			5 Peningkatan kualitas budidaya peternakan dan perikanan	1 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
				2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan
				3 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat
				4 Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan
		5 tersedianya iklim investasi yang kondusif	1 Peningkatan kualitas promosi dan informasi investasi	1 Meningkatkan kualitas promosi investasi
				2 Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal (P)
			2 Penjaminan iklim investasi yang kondusif	1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
				2 Memberikan kemudahan bagi investor
				3 Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto
				4 Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto
	Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)			
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	1 Penyediaan Pelayanan, sarana dan Prasarana pendidikan yang merata dan terjangkau disetiap jenjang pendidikan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan
				2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini
				3 Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi
				4 Meningkatkan kualitas sarana dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata
				5 Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP
			2 Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	1 Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
				2 Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan
				3 Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding
			3 Pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi siswa dan karakter	1 Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Penididkan
				2 Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI
			4 Optimalisasi Pendidikan Luar Sekolah dan kerjasama dengan lembaga pendidkan lainnya	1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB
				2 Meningkatkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi/Universitas Favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan Pendidikan termasuk Pendirian Kampus Dikota sawahlunto
				3 Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan
			5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	1 Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
				2 Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
				3 Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				sumber belajar masyarakat
	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	1 Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa
				2 Pengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
				3 Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
				4 Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan
				5 Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian
				6 Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian
			2 Penerapan standar akuntansi akuntasi pemerintah berbasis accrual	1 Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
				2 Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
				3 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT
			3 Perbaikan sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan	1 Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
				2 Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
				3 Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD
				4 Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				swasta baik di dalam maupun luar negeri
			4 Peningkatan tata kelola administrasi kependudukan	1 Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
				2 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
				3 Menciptakan layanan kependudukan yang terintegrasi
		2 Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	1 Peningkatan kualitas SDM aparatur	1 Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
				2 Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
				3 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
				4 Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
				5 Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
				6 meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	1 Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	1 Peningkatan Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari	1 Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
				2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
				3 Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
				4 Meningkatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat
				5 Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya
				6 Mengatasi gejala dan konflik sosial di masyarakat
				7 Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan
				8 Melaksanakan patroli keamanan sebagai upaya dalam penegakan perda
				9 Meningkatkan kapasitas SDM PPNS

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat			
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1 Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	1 Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan
				2 Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehataan dalam melayani Masyarakat
				3 Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto
				4 Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan
			2 Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	1 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
				2 Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya
				3 Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan
				4 Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
				5 Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan
				6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
			3 Peningkatan kesadaraan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular,	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	
				2 Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
				3 Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
				4 menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)
				5 Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
				6 Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat
				7 Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
				8 meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga
				9 Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19
				10 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
		2 Menurunnya prevalensi stunting	1 Konvergensi penanganan stunting	1 Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
				2 Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
				3 Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
	Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan			
1	Meningkatkan kualitas	1 Meningkatnya Kualitas	1 Peningkatan kualitas dan Daya	1 Menyusun perencanaan teknis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Pengelolaan Pariwisata	Tarik Destinasi Wisata	pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA
				2 Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah
				3 Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark
				4 Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya di objek wisata
				5 Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus
				6 Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto
			2 Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	1 Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional
				2 Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung
			3 Peningkatan kualitas promosi wisata yang tepat sasaran	1 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran
				2 Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas
				3 Meningkatan kualitas SDM promosi Pariwisata
			4 Pembinaan terhadap pelaku industri pariwisata	1 Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata
				2 Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata
			5 Penguatan kelembagaan pengelola pariwisata di tingkat desa	1 Meningkatkan Kualitas serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata
				2 Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lebaga pariwisata
			6 Peningkatan kualitas dan	1 Menyediakan prasarana ruang kreatif

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kuantitas pelaku ekonomi kreatif	bagi insan kreatif Kota Sawahlunto
				2 Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi kratif
			7 Meningkatkan daya saing pemuda dan keolahragaan	1 Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan
				2 Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan
				3 Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan
			8 Peningkatan perlindungan,pengembangan, pemanfaatan cagar budaya	1 Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
				2 Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
				3 Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS
				4 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka
				5 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat
				6 Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
				7 Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
				8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum
	Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai			
1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	1 Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota	1 Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				2 Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto
				3 Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
				4 Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				5 Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota
				6 Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial
				7 Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan tata ruang kota
				8 Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas
				9 Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya
				10 Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban
				11 Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
				12 Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
				13 Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas
				14 Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum
				15 Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota
				16 Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api
				17 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
				18 Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
				19 Mengoptimalkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor
				20 Meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan kota
			2 Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi	1 Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Masyarakat	bersih dan sanitasi masyarakat
				2 Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
			3 Percepatan kejelasan status hukum kepemilikan tanah	1 Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto
				2 Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah
				3 Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto
				4 Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan
		2 Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	1 Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	1 Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
				2 meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
				3 Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana
				4 Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
				5 Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
				6 Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				7 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
				8 Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana
				9 Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
				10 Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
				11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
		3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	1 Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah
				2 Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
				3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
				4 Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
				5 Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan
				6 Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup
				7 Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
				8 Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
				9 Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,
			2 Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	1 Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah
				2 Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
				3 Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
		4 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	1 Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	1 meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
				2 Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
				3 mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
		5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1 Pencapaian Universal Akses 100-0-100	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				permukiman
				2 Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh
				3 Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh
	Misi 8 : Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya			
1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	1 Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	1 Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap mayarakat yang lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	1 Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
				2 Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
				3 Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota
				4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal
				5 Melaksanakan pemeliharaan TMP
				6 Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
		2 Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
				2 Meningkatkan kualitas keluarga
				3 Menerapkan anggaran berbasis gender
			2 Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	1 Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan
				2 Meningkatkan perlindungan terhadap anak
				3 Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
	Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1 meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	1 Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	1 Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2 Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
				3 Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
				4 Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
				5 Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi
				6 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
			2 Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	1 Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik

Untuk melaksanakan strategi tersebut, disusunlah arah kebijakan untuk lima tahun periode 2018-2023, seperti pada tabel 6.3 berikut :

Tabel 6. 3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik					
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan	Meningkatkan kapasitas dan kualitas, pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan
2	Menyediakan Penyuluhan Hukum Keluarga Islami kepada Masyarakat terkait pernikahan, keluarga dan kehidupan bermasyarakat	Menyediakan Penyuluhan Hukum Keluarga Islami kepada Masyarakat terkait pernikahan, keluarga dan kehidupan bermasyarakat	-	-	-
3	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat	Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
5	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan	Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan
6	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
7	-	Menyediakan dan meningkatkan kualitas imam di masjid-masjid yang berkualitas setara Lc	-	-	-
8	Membangun Islamic Center	Membangun Islamic Center	-	-	-
9	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah	Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
10	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	budaya	budaya	budaya	budaya	budaya
11	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya, kreativitas, dan produktivitas	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas	Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
12	Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum	Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum	-	-	-
13	Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya	Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya	-	-	-
14	Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat	Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat	-	-	-
15	Mendorong peningkatan kunjungan wisata religi	Mendorong peningkatan kunjungan wisata religi	-	-	-
16	Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan	Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan	-	-	-
17	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	-	-	-
18	Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan	Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan	-	-	-
19	-	-	Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid	Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid	Memfasilitasi peningkatan kualitas imam di masjid-masjid
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK					
1	Menyiapkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar	Menyiapkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga	-	-	-

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	dengan instruktur yang handal dan profesional,	kerja dengan instruktur yang handal dan profesional,			
3	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi	Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
4	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri	Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
5	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.	-	-	-
6	melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan	melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan	-	-	-
7	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional,	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional,	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
8	Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri	Menyediakan sarana dan prasarana teknologi industri	Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri	Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri	Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri
9	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri	Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
10	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial	Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto	bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto	potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto	bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto	bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto
11	Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah	Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah	Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah	Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah	Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah
12	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
13	Pembentukan dan Pengembangan BLUD Dana bergulir	Pembentukan dan Pengembangan BLUD Dana bergulir	Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir	Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir	Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
14	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan	Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan
15	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif
16	-	-	Menjadikan muaro kalaban sebagai terminal barang dan pasar grosir silungkang	Menjadikan muaro kalaban sebagai terminal barang dan pasar grosir silungkang	Menjadikan muaro kalaban sebagai terminal barang dan pasar grosir silungkang
17	Melakukan validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan	Melakukan validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan	Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan
18	Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan peningkatan jumlah,	Melakukan Revitalisasi tanaman coklat dan	-	-	-

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak	peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak			
19	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak	Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
20	Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat	Memfasilitasi bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan bibit ikan kepada masyarakat	-	-	-
21	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana dan teknologi pertanian dan perikanan serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
22	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan	Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
23	Penguatan peran pendidikan dalam menanamkan persepsi positif bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.	Penguatan peran pendidikan dalam menanamkan persepsi positif bahwa profesi petani yang awalnya dianggap profesi yang “rendah” menjadi profesi yang terhormat dan bergengsi.	-	-	-
24	Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif.	Pembukaan akses lahan-lahan terlantar untuk petani atau calon petani sehingga dapat produktif.	-	-	-
25	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial	Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
26	Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan	Meningkatkan Ketersediaan dan keamanan pangan	-	-	-
27	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
28	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
29	Memberikan kemudahan bagi investor	Memberikan kemudahan bagi investor	Memberikan kemudahan bagi investor	Memberikan kemudahan bagi investor	Memberikan kemudahan bagi investor
30	-	-	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
31	-	-	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi
32	-	-	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa	Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa
33	-	-	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
34	-	-	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
35	-	-	Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas	Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas	Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas
36	-	-	Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online	Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online	Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	2019	2020	2021	2022	2023
37	-	-	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0	Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.0
38	-	-	Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan	Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan
39	-	-	Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update	Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update	Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update
40	-	-	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
41	-	-	Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi	Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi
42	-	-	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
43	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi
44	-	-	Meningkatkan daya saing usaha koperasi	Meningkatkan daya saing usaha koperasi	Meningkatkan daya saing usaha koperasi
45	-	-	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi
46	-	-	Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur	Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur	Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur
47	-	-	Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto	Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto	Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto
48	-	-	Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah	Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah	Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah
49	-	-	Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat	Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat	Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	2019	2020	2021	2022	2023
50	-	-	Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19	Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19	Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
51	-	-	Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19	Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19	Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
52	-	-	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
53	-	-	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
54	-	-	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
55	-	-	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan
56	-	-	Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan	Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan	Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan
57	-	-	Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat	Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat	Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat
58	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat
59	-	-	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
60	-	-	Meningkatkan kualitas sarana	Meningkatkan kualitas sarana	Meningkatkan kualitas sarana

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
			dan prasarana perikanan	dan prasarana perikanan	dan prasarana perikanan
61	-	-	Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan	Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan	Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan
62	-	-	Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat	Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat	Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat
63	-	-	Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman	Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman	Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman
64	-	-	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian	Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian
65	-	-	Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal	Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal	Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal
66	-	-	Meningkatkan kualitas promosi investasi	Meningkatkan kualitas promosi investasi	Meningkatkan kualitas promosi investasi
67	-	-	Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto	Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto	Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto
68	-	-	Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto	Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto	Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto
69	-	-	meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online	meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online	meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
	Misi 3 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)				
1	Peningkatan kualitas guru sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik	Peningkatan kualitas guru sebagai role model dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik	Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan
2	Melakukan kerjasama dengan guru di daerah lain dalam bentuk magang guru dan studi banding	Melakukan kerjasama dengan guru di daerah lain dalam bentuk magang guru dan studi banding	-	-	-
3	Pemerataan guru di setiap satuan pendidikan	Pemerataan guru di setiap satuan pendidikan	-	-	-
4	-	Menyediakan jaminan pendidikan gratis 9 tahun melalui Kartu Sawahlunto	-	-	-

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		Pintar atau sejenis			
5	Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan mengoptimalkan fungsi SKB	Meningkatkan kualitas pendidikan luar sekolah dan mengoptimalkan fungsi SKB	Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB	Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB	Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB
6	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata
7	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini	Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini	-	-	-
8	-	Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto	Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto	Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto	Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Universitas favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan pendidikan termasuk pendirian kampus di Kota Sawahlunto
9	Menyiapkan regulasi tentang pemberian penghargaan dan reward terhadap siswa dan mahasiswa berprestasi	Menyiapkan regulasi tentang pemberian penghargaan dan reward terhadap siswa dan mahasiswa berprestasi	-	-	-
10	menyediakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu serta siswa dan mahasiswa berprestasi	menyediakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu serta siswa dan mahasiswa berprestasi	-	-	-
11	Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
12	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat	Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
13	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang	Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI	diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI	diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI	pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI	pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI
14	-	-	Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan
15	-	-	Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
16	-	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini
17	-	-	Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi	Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi	Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi
18	-	-	Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding	Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding	Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding
19	-	-	Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan	Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan	Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan
20	-	-	Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP	Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP	Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP
	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
1	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	-	-	-
2	Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan	Peningkatan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
3	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
4	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa
5	Pengembangkan sistem	Pengembangkan sistem	Pengembangkan sistem	Pengembangkan sistem	Pengembangkan sistem

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
6	Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
7	Memperbaiki sistem dan manajemen informasi keuangan daerah	Memperbaiki sistem dan manajemen informasi keuangan daerah	-	-	-
8	Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi	Membangun mengembangkan sistem pengukuran kinerja aparatur yang dapat dinilai dan diawasi secara mudah dan aktual berbasis teknologi informasi
9	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
10	Menempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya	Menempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya	Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya	Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya	Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
11	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD
12	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
13	Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan	Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan	Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan	Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan	Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
14	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
15	Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD	Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD	Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD	Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD	Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
16	-	-	Mewujudkan sinkronisasi	Mewujudkan sinkronisasi	Mewujudkan sinkronisasi

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
			perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan	perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan	perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan
17	-	-	Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian	Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian	Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian
18	-	-	Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian	Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian	Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian
19	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT
20	-	-	Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen informasi barang milik daerah	Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen informasi barang milik daerah	Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen informasi barang milik daerah
21	-	-	Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
22	-	-	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
23	-	-	Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri	Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri	Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri
24	-	-	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
25	-	-	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi
26	-	-	Menciptakan layanan kependudukan yang terintegrasi	Menciptakan layanan kependudukan yang terintegrasi	Menciptakan layanan kependudukan yang terintegrasi
	Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat				
1	Mengembangkan Sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan	Mengembangkan Sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan	Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan	Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan	Pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dalam upaya pengendalian dan

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	pengawasan tenaga kesehatan	pengawasan tenaga kesehatan	pengawasan tenaga kesehatan	pengawasan tenaga kesehatan	pengawasan tenaga kesehatan
2	-	memperkuat kerjasama dengan daerah/negara lain sebagai upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan dalam melayani masyarakat	Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehataan dalam melayani Masyarakat	Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehataan dalam melayani Masyarakat	Memperkuat Kerja Sama dengan daerah/ Negara lain sebagai Upaya Peningkatan SDM Kesehataan dalam melayani Masyarakat
3	memberikan fasilitas dan insentif khusus bagi dokter spesialis untuk menjamin kenyamanannya dalam bekerja di Sawahlunto	memberikan fasilitas dan insentif khusus bagi dokter spesialis untuk menjamin kenyamanannya dalam bekerja di Sawahlunto	Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto	Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto	Memberikan Fasilitas dan insentif bagi dokter Spesialis untuk menjamin kenyamanan bekerja di Kota Sawahlunto
4	melakukan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk mengembangkan sistem karir dan perjenjangan serta insentif finansial dan non-finansial untuk pemenuhan tenaga kesehatan	melakukan perekrutan dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk mengembangkan sistem karir dan perjenjangan serta insentif finansial dan non-finansial untuk pemenuhan tenaga kesehatan	Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan	Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan	Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan
5	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	-	-	-
6	Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya	Menyusun, menetapkan dan melaksanakan berbagai standard guideline pelayanan kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya	Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya	Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya	Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya
7	-	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan
8	Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	Menjamin kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak	Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
9	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
10	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
11	Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
12	Menyusun regulasi yang mendukung pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat	Menyusun regulasi yang mendukung pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat	Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat	Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat	Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat
13	Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi	Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi	-	-	-
14	-	menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)
15	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
16	-	-	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
17	-	-	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan	Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan
18	-	-	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
			) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran	yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran	yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
19	-	-	meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga	meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga	meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga
20	-	-	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
21	-	-	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
22	-	-	Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19	Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19	Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19
23	-	-	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19
24	-	-	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui	Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
25	-	-	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
	Misi 6 Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan				
1	Menyusun Perencanaan Teknis Pengembangan Pariwisata Sesuai RIPARDA	Menyusun Perencanaan Teknis Pengembangan Pariwisata Sesuai RIPARDA	Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA	Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA	Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA
2	-	menumbuhkembangkan destinasi dan atraksi wisata sesuai potensi daerah	-	-	-
3	Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat	Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat	Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat	Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat	Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	khusus	khusus	khusus	khusus	khusus
4	Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas	Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas	-	-	-
5	Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus	Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus	-	-	-
6	Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkembangkan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan
7	Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto	Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto	Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto	Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto	Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto
8	Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark	Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark	Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark	Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark	Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark
9	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata
10	Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya	Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya	Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya	Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya	Mewujudkan kawasaan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya
11	Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional	Mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif yang profesional	-	-	-
12	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran
13	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas
14	Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan	Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan	Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan	Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan	Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	kelompok marginal lainnya	kelompok marginal lainnya	kelompok marginal lainnya di objek wisata	kelompok marginal lainnya di objek wisata	kelompok marginal lainnya di objek wisata
15	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah
16	-	-	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata
17	-	-	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintahan terdepan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintahan terdepan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata	Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintahan terdepan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata
18	-	-	Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto	Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto	Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto
19	-	-	Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional	Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional	Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional
20	-	-	Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung	Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung	Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung
21	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas	Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan
22	Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya	Menyediakan fasilitas wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya	Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan
23	-	-	Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan
24	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum
25	-	-	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas	Meningkatkan kualitas

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
			pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS	pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS	pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS
26	-	-	Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
27	-	-	Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum	Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum	Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
28	-	-	Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya	Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya	Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
29	-	-	Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat	Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat	Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat
30	-	-	Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
31	-	-	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka	Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka
32	-	-	Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata	Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata	Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata
33	-	-	Meningkatan kualitas SDM promosi Pariwisata	Meningkatan kualitas SDM promosi Pariwisata	Meningkatan kualitas SDM promosi Pariwisata
1	-	-	Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lebaga pariwisata	Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lebaga pariwisata	Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lebaga pariwisata
	Misi 7 Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai				
1	Menyediakan infrastruktur jalan dan Jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah	Menyediakan infrastruktur jalan dan Jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomian daerah	Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan perekonomi an daerah
2	melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan Kabupaten tetangga (Simpang Napar-Padang Sibusuk) ;	melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan Kabupaten tetangga (Simpang Napar-Padang Sibusuk) ;	-	-	-

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	(Perumnas Kolok-Sulit Air)	(Perumnas Kolok-Sulit Air)			
3	-	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban	Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban
4	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto
5	-	Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana Rest Area Muaro Kalaban agar lebih representatif	-	-	-
6	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
7	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
8	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota
9	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api	Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api
10	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan	Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
11	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperjelas status hukum kepemilikan	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperjelas status hukum kepemilikan	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto	Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	tanah di Kota Sawahlunto	tanah di Kota Sawahlunto			
12	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana	Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
13	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial
14	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota	Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
15	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya	Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya
16	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas	Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas
17	meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya air	meningkatkan pengelolaan terhadap sumber daya air	-	-	-
18	menjaga ekosistem hutan sebagai kawasan DAS	menjaga ekosistem hutan sebagai kawasan DAS	-	-	-
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman
20	Melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat	Melakukan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat	-	-	-
21	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat
22	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
23	Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana	Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana	Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana	Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana	Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana
24	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	2019	2020	2021	2022	2023
25	Meningkatkan penanganan lahan kritis dibeberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sector	Meningkatkan penanganan lahan kritis dibeberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sector	-	-	-
26	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana	Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
27	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	menyediakan Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana	menyediakan Informasi Tentang Daerah Rawan Bencana	-	-	-
29	meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana	meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
30	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
31	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan	Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
32	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah
33	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
34	Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	dalam pengelolaan Lingkungan	dalam pengelolaan Lingkungan	dalam pengelolaan Lingkungan	dalam pengelolaan Lingkungan	dalam pengelolaan Lingkungan
35	meningkatkan kesadaran masyarakat pemanfaatan ruang	meningkatkan kesadaran masyarakat pemanfaatan ruang	-	-	-
36	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
37	Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota	mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
38	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata	meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata	meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata	meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
39	Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
40	Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,	Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,	Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,	Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,	Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,
41	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
42	-	-	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
43	-	-	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah
44	-	-	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota
45	-	-	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
46	-	-	Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup	Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup	Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup
47	-	-	Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di	Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di	Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	2019	2020	2021	2022	2023
			Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto	Kota Sawahlunto
48	-	-	Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah	Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah	Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah
49	-	-	Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan	Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan	Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan
50	-	-	Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
51	-	-	Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh
52	-	-	Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh
53	-	-	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
54	-	-	Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
55	-	-	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana
56	-	-	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
57			Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas	Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas	Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas
58			Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum	Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum	Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum
59			Mengoptimalkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	Mengoptimalkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	Mengoptimalkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor
60			Meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan kota	Meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan kota	Meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan kota

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
61			Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
62			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
63			Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
64			Meningkatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat	Meningkatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat	Meningkatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat
65			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi social dan budaya
66			Mengatasi gejala dan konflik sosial di masyarakat	Mengatasi gejala dan konflik sosial di masyarakat	Mengatasi gejala dan konflik sosial di masyarakat
67			Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan
68			Melaksanakan patroli keamanan sebagai upaya dalam penegakan perda	Melaksanakan patroli keamanan sebagai upaya dalam penegakan perda	Melaksanakan patroli keamanan sebagai upaya dalam penegakan perda
69			Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	Meningkatkan kapasitas SDM PPNS	Meningkatkan kapasitas SDM PPNS
	Misi 8 Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				
1	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Kota	Melakukan Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan Kota	-	-	-
2	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
3	Penyempurnaan dan validasi data PMKS Kota Sawahlunto	Penyempurnaan dan validasi data PMKS Kota Sawahlunto	Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota	Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota	Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota
4	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
		marginal lainnya	marginal lainnya		
5	Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya	Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
6	Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya	Membangun tempat wisata dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya	-	-	-
7	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	-	-	-
8	melakukan pemilahan data berdasarkan gender	melakukan pemilahan data berdasarkan gender	-	-	-
9	Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender	Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender	Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender	Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender	Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
10	Menerapkan anggaran berbasis gender	Menerapkan anggaran berbasis gender	Menerapkan anggaran berbasis gender	Menerapkan anggaran berbasis gender	Menerapkan anggaran berbasis gender
11	Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan	Pemenuhan hak anak dalam setiap aspek pembangunan	Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan	Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan	Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan
12	-	-	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal
13	-	-	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana
14	-	-	Melaksanakan pemeliharaan TMP	Melaksanakan pemeliharaan TMP	Melaksanakan pemeliharaan TMP
15	-	-	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
1	-	-	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN			ARAH KEBIJAKAN SESUDAH PERUBAHAN		
No	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
2	-	-	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Meningkatkan perlindungan terhadap anak
	Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor				
1	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city
2	-	menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi	Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi	Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi	Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
3	Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi	Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi	Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi	Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi	Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
4	meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
5	Meningkatkan Koordinasi sampai kerjasama dengan perantau dalam membangun kota dan peningkatan ekonomi kota	Meningkatkan Koordinasi sampai kerjasama dengan perantau dalam membangun kota dan peningkatan ekonomi kota	-	-	-
6	-	-	Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi	Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi	Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi
7	-	-	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
8	-	-	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
9			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi tersebut diatas, maka disusunlah program Pembangunan daerah yang strategis untuk pencapaian visi, misi tujuan dan sarasan sesuai strategi sebagai berikut:

Tabel 6.4
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF

Visi : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Misi 1 : Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik																						
	Tujuan 1.1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	**Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto**	**((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)**	-	**517,53**	-	-	**5.392,76**	-	**0,04**	**8.261,24**	-	**(0,00)**	**4.858,94**	**1,23**	**10.113,42**	**1,43**	**12.224,92**	**1,77**	**12.687,80**	**4,43**	**53.539,09**	
	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	**Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto**	**((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)**	-	**265,00**	-	-	**4.888,04**	-	**0,04**	**6.742,91**	-	**(0,00)**	**4.635,23**	**1,23**	**8.480,35**	**1,43**	**10.274,92**	**1,77**	**10.507,80**	**4,43**	**45.529,26**	
	Program Pembinaan Keagamaan (PD)	*Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)*	*jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %*	-		*20*	*0*		*25*	*0*		*28*	*29,49*		-	-	-	-	-	-	-	*15.477,58*	
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas (%)	*(Jumlah Imam tetap dimasjid yang berjazah Lc atau setara/Jumlah Imam Tetap Masjid) x 100 %*	-		-	-	*4451,28*	*0*	-	*6.536,51*	*10*	*10*	*4.489,79*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	*Tersedianya Laporan Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Kepala Daerah*	*3*	*265*	*5*	*3*	*393,95*	*3*	*3*	*140,66*	*3*	*3*	*119,54*	-	-	-	-	-	-	-	*654,15*	
	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	*Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya*	*Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daera, Pihak Ketiga dan Lainnya*	-	-	*3*	*3*		*3*	*11*	*25,00*	*3*	*17*	*25,00*	-	-	-	-	-	-	-	*50,00*	
	Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%)*	*Jumlah kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan monev*	-	-	*41*	*41*	*42,81*	*41*	*22*	*40,74*	*41*	*0*	*0,90*	-	-	-	-	-	-	-	*84,45*	
1	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun (persen)**	**jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**		**40**		**50**		**50**		**SEKRETERIAT DAERAH**
		Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	**Jumlah pondok tahfidz tahun n-1 - jumlah pondok tahfiz tahun n**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**36**	**8.480,35**	**50**	**10.274,92**	**60**	**10.507,80**	**60**	**29.263,08**	
		Persentase imam masjid yang mengikuti pelatihan (persen)	**(Jumlah imam yang mengikuti pelatihan/ jumlah imam mesjidx 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Sasaran 1.1.2. Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	**Persentase Komunitas Budaya yang aktif**	**(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %**	**n/a**	**252,53**	-	**n/a**	**504,72**	-	**0,04**	**1.518,33**	-	**(0,00)**	**223,71**	**1,23**	**1.633,07**	**1,43**	**1.950,00**	**1,77**	**2.180,00**	**1,77**	**8.009,83**	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD	*Persentase budaya tak benda yang lestari*	*(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah objek pemajuan kebuadayaan) X100%*		*60,45*			*328,45*	*13,3*	*6,2*	*1.268,06*	*17,8*	*6,05*	*15,70*	-	-	-	-	-	-	-	*1.612,21*	**GGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN**
		Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	*(Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah)*	*14*		*14*	*14*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)**	**(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah objek pemajuan kebuadayaan) X100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22,2**	**874,50**	**26,7**	**800,00**	**31,1**	**880,00**	**31,1**	**2.554,50**	
	Program Pengembangan Nilai Budaya (PD)	*Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)*	*Jumlah Kelompok Seni yang mandiri/ Jumlah Kelompok seni yang ada (%)*	*0,25*		*4,4*	*45*		*8,9*	*8,9*		*13,3*	*7,9*		-	-	-	-	-	-	*7,9*		
		Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	*Jumlah Kelompok Budaya yang mandiri/ Jumlah Kelompok Budaya yang ada (%)*	*40*		*40*	*40*		*56*	*52,2*		*64*	*20*		-	-	-	-	-	-	*20*		
		Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	*Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)*	*43*	*192,08*	*45*	*45*	*176,27*	-	-	*250,28*	-	-	*208,01*	-	-	-	-	-	-	-	*634,56*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	*Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)*	*43*		*44*	*44*		-	-		-	-		-		-		-		-		DINAS KEBUDAYAAN, PENTA
		Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	*Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)*	*18*		*19*	*19*		-	-		-	-		-		-		-		-		
3	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)**	**(Jumlah kelompok seni yang mandiri/Jumlah kelompok seni yang ada) X 100%**												13.3	617,93	13.3	650,00	13.3	750,00	13.3	2.017,93	
4	**Program Pembinaan Sejarah**	**Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)**	**(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah lokal/Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%**												39	140,64	50	500,00	60	550,00	60	1.190,64	
	Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK																						
	Tujuan 2.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**5,75**		**5,78**	**5,52**		**5,80**	**5,31**		**5,83**	**(1,27)**		**2,90**		**3,24**		**4,53**		**4,53**		
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**52,70**		**55,81**	**55,01**		**58,24**	**58,88**		**61,02**	**58,02**		**59,99**		**62,93**		**66,03**		**66,03**		
		Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,01**	**8.197,43**	**2,39**	**2,39**	**8.797,21**	**2,27**	**2,17**	**17.408,76**	**2,21**	**2,16**	**9.520,00**	**2,10**	**16.311,93**	**2,05**	**10.865,60**	**2,01**	**14.237,20**	**2,01**	**78.334,09**	
		Gini Ratio	**Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS**	**0,30**		-	**0,31**		-	**0,27**		-	**0,29**		**0,28**		**0,28**		**0,28**		**0,28**		
	Sasaran 2.1.1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)**	**Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%**	**6,19**	**502,96**	**6,15**	**5,75**	**299,03**	**6,03**	**6,82**	**655,92**	**5,65**	**8,20**	**795,10**	**7,55**	**1.261,15**	**6,81**	**6,43**	**6,43**	**1.050,11**	**134,95**	**5.261,14**	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PD)	*Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)*	*(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / jumlah peserta pelatihan) x 100%*	-	*283,68*	-	-	*70,46*	*0*	*42,95*	*440,63*	*60*	*41,25*	*664,15*	-	-	-	-	-	-	-	*1.175,24*	DISNAKER
5	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)**	**(Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersedia / Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja) x 100 %**												100	46,18	100	80,00	100	90,00	100	216,18	
6	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)**	**(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / jumlah peserta pelatihan) x 100%**												50	859,10	60	1.035,11	70	870,11	70	2.764,32	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)*	*(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%*	*70,44*	*77,85*	*71,24*	*72,63*	*146,57*	*72,04*	*69,2*	*153,28*	*72,86*	*70,57*	*41,66*	-	-	-	-	-	-	-	*341,50*	
7	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**	**(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%**												73.68	307,93	74,51	36,77	75,35	40,00	75,35	384,70	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)*	*Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)*	*0*	*141,43*	*1*	*1*	*82,00*	*5*	*3*	*62,01*	*5*	*4*	*89,29*	-	-	-	-	-	-	-	*233,31*	
8	**Program Hubungan Industrial**	**Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)**												6	47,94	8	47,94	10	50,00	10	145,88	
	Sasaran 2.1.2.Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	**PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)**	**Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri**	**404.956,76**	**1.161,60**	**466.255,15**	**415.867,46**	**2.266,22**	**513.346,92**	**392.312,53**	**4.284,41**	**565.194,95**	**395.495,23**	**3.185,09**	**401.862,74**	**2.707,64**	**409.417,45**	**2.231,97**	**418.106,23**	**1.789,90**	**418.106,23**	**16.465,22**	
	Program Pengembangan Keusahaan dan Keunggulan Kompetitif	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	-	*68*	*94*		*71*	*81*	*371,92*	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	usaha kecil menengah	*Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)*	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%*	-		-	-	25,45	41	-	364,36	44	-		-		-		-		-		
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	33	60,64	33	29		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	*Persentase Koperasi sehat (%)*	*Jumlah Koperasi yang sehat/Jumlah koperasi x 100%*	-	205,85	-	-	160,08	74	74	81,40	77	23	32,53	-	-	-	-	-	-	-	-	274,00
		Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai (unit)	*Jumlah koperasi yang berkualitas yang dinilai (unit)*	24		54	30		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		bertambahnya koperasi yang aktif (koperasi)	*bertambahnya koperasi yang aktif (koperasi)*	2		2	0		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		berkurangnya kredit macet (%)	*berkurangnya kredit macet (%)*	5		5	5		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.**	**Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	94,00	23,53	375,00	26,47	284,90	26,47	753,90	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	*Persentase Koperasi sehat (%)*	*Jumlah Koperasi yang sehat/Jumlah koperasi x 100%*	-	205,85	-	-	160,08	74	74	81,40	77	23	32,53	-	-	-	-	-	-	-	-	274,00
		Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai (unit)	*Jumlah koperasi yang berkualitas yang dinilai (unit)*	24		54	30		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		bertambahnya koperasi yang aktif (koperasi)	*bertambahnya koperasi yang aktif (koperasi)*	2		2	0		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		berkurangnya kredit macet (%)	*berkurangnya kredit macet (%)*	5		5	5		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
10	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase Koperasi sehat (%)**	**Jumlah Koperasi sehat / jumlah koperasi x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	122,72	24	303,00	26	295,00	26	720,72	
	Program Pengembangan Keusrausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	30,58	-	-	-	68	94	364,36	71	81	371,92	-	-	-	-	-	-	-	-	761,72
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%*	-		-	-	25,45	41	0		44	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	33	60,64	33	29		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
11	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)**	**jumlah koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%/jumlah koperasi x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	145,42	45	-	60	150,00	60	295,42	
	Program Pengembangan Keusrausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	30,58	-	-	-	68	94	364,36	71	81	371,92	-	-	-	-	-	-	-	-	761,72
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%*	-	-	-	-	25,45	41	0		44	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	33	60,64	33	29		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	*Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)*	*Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)*	-	221,04	75	-	138,15	50	50	86,95	50	35	143,18	-	-	-	-	-	-	-	-	368,28
		Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	*Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)*	-		-	-		5	5		5	5		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)	*Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)*	1		3	0		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)	*Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)*	250		1.330	290		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	*Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)*	50		285	85		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
12	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)**	**Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha / jumlah UMkM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**47**	**338,00**	**50**	**262,97**	**53**	**270,00**	**53**	**870,97**	PD yang menyelenggarakan Urusan Koperasi, , UKM, Perdagangan dan Insustri
	Program Pengembangan Keusahawanan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	-	*68*	*94*	*371,92*	*71*	*81*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%*	-	-	-	-	*25,45*	*41*	*0*	*364,36*	*44*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	*33*	*60,64*	*33*	*29*		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)**	**jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ / jumiah UMKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,8**	**89,80**	**0,9**	**-**	**1,5**	**200,00**	**1,5**	**289,80**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-		-	-		*50*	*50*		*50*	*50*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-		-	-		*1*	*1*		*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*		*56*	*56*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*		*1*	*1*	*497,65*	-	-	*836,56*	-	-	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah peterun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah peterun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*		*912*	*912*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*		*35*	*35*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*		*12*	*12*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*		*12*	*12*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	*Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 pengrajin (sentra industri)*	*Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 pengrajin (sentra industri)*	-	*164,00*	-	-	*213,19*	*1*	*1*	*22,74*	*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-	*235,93*	
		Jumlah sentra industri potensial (sentra)	*Jumlah sentra industri potensial (sentra)*	*14*		*14*	*14*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah pengrajin cendera mata dan souvenir (IKM)	*Jumlah pengrajin cendera mata dan souvenir (IKM)*	*19*		*24*	*24*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penataan Struktur Industri	*Jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)*	*jumlah produk hasil IKM yang memenuhi standar*	*35*		*38*			*40*	*38*	*67,57*	*42*	*3*	*4,99*	-	-	-	-	-	-	-	*72,55*	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	-		-			*10*			*45*	*64*	*141,70*	-	-	-	-	-	-	-	*141,70*	
14	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)**	**jumlah IKM yang meningkat skala usaha nya / jumlah IKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,8**	**1.400,54**	**1,9**	**1.059,00**	**2**	**470,00**	**2**	**2.929,54**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-		-	-		*50*	*50*		*50*	*50*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-		-	-		*1*	*1*		*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*		*56*	*56*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*		*1*	*1*	*497,65*	-	-	*836,56*	-	-	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah peterun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah peterun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*		*912*	*912*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*		*35*	*35*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*		*12*	*12*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*		*12*	*12*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	-		-	-	-	*10*	-	-	*45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)**	**jumlah industri kecil menengah yang mempunyai izin / jumlah industri kecil dan menengah x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**457,16**	**15**	**142,00**	**30**	**100,00**	**30**	**699,16**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-		-	-		*50*	*50*		*50*	*50*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-		-	-		*1*	*1*		*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*		*56*	*56*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*		*1*	*1*	*497,65*	-	-	*836,56*	-	-	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah penenun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah penenun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*		*912*	*912*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*		*35*	*35*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*		*12*	*12*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*		*12*	*12*		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
16	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase IKM yang terpublis (%)**	**jumlah IKM yang terpublish / jumlah IKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**60,00**	**90**	**90,00**	**100**	**20,00**	**100**	**170,00**	
	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	**Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)**	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**9.343,00**	**1.323,76**	**9.522,39**	**9.765,00**	**2.819,31**	**9.746,16**	**10.348,00**	**5.579,64**	**10.008,33**	**10.183,00**	**2.416,98**	**10.307,58**	**1.946,85**	**10.632,26**	**1.006,91**	**11.024,59**	**790,00**	**11.024,59**	**14.559,69**	
		PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	468.021,05		-	510.433,17		-	553.593,38		-	547.822,20		556.832,20		582.684,76		615.823,20		615.823,20		
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (Juta)*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun*	*22.767*	*1.235,00*	*23.635,41*	*23.635,41*	*479,27*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*1.807,03*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*		*49*	*7*								-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan asongan	*Jumlah Pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)*	*Jumlah Pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)*	*300*	*34,00*	*322*	-	*17,66*	*342*	-	-	*362*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*17,66*	
		Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam menempati tempat berjualan (%)	*Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam menempati tempat berjualan (%)*	*100*		*95*	*95*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
17	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)**	**jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / jumlah pasar rakyat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14**	**1.024,33**	**50**	**28,21**	**50**	**150,00**	**50**	**1.202,54**	
		Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	**Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**382**		**402**		**422**		**422**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur (pasar)*	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur dari timbangan, harga, dan kualitas produk*			-	-		*1*	*1*		*2*	*1*		-	-	-	-	-	-		
		Ketersediaan sembako di pasar (%)	*Ketersediaan sembako di pasar (%)*	*100*	*54,76*	*95*	*95*	*106,17*	-	-	*1.972,62*	-	-	*34,06*	-	-	-	-	-	-	-	*2.112,85*
		Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)	*Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)*	*0*		*750*	*0*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pasar terkelola (buah)	*Jumlah Pasar terkelola (buah)*	*9*		*9*	*9*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
18	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto**	**jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.837,33**	**189,26**	**26.785,71**	**220,00**	**27.015,91**	**150,00**	**27.015,91**	**559,26**	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun (Milyar)*	*22.767*		*23.635,41*		*1.630,76*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*2.958,52*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*		*49*																	
19	**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase produk unggulan yang diekspor (%)**	**Jumlah produk unggulanyang diekspor / jumlah produk unggulan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**310,00**	**55**	**337,50**	**60**	**250,00**	**60**	**897,50**	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur (pasar)*	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur dari timbangan, harga, dan kualitas produk*						*1*	*1*		*2*	*1*		-	-	-	-	-	-			
		Ketersediaan sembako di pasar (%)	*Ketersediaan sembako di pasar (%)*	*100*		*95*		*106,17*			*1.972,62*			*34,06*	-	-	-	-	-	-	-	*2.112,85*	
		Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)	*Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)*	*0*		*750*									-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pasar terkelola (buah)	*Jumlah Pasar terkelola (buah)*	*9*		*9*									-	-	-	-	-	-	-		
20	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**persentase pasar tradisional tertib ukur (%)**	**Jumlah pasar tradisional yang tertib ukur / jumlah pasar tradisional x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30,00**	**169,56**	**30,00**	**171,20**	**30,00**	**120,00**	**30,00**	**460,76**	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun (Milyar)*	*22.767*	-	*23.635,41*	*23.635,41*	*479,27*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*1.807,03*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*		*49*	*7*								-	-	-	-	-	-			
21	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)**	**Nilai produk lokal yang terjual (juta rupiah)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**253,70**	**100,00**	**250,00**	**125,00**	**120,00**	**300,00**	**623,70**	
	Sasaran 2.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	**PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)**	**Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan**	**309.537,83**	**4.810,19**	**321.300,27**	**312.007,01**	**3.038,50**	**335.758,78**	**325.354,30**	**6.537,58**	**350.867,92**	**326.224,79**	**2.911,28**	**329.730,34**	**9.566,11**	**336.849,19**	**7.018,54**	**344.355,30**	**9.874,43**	**344.355,30**	**38.946,44**	
		Indeks Ketahanan Pangan	**Rata-rata skor ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan**	**n/a**		-	**64,17**		-	**65,89**		-	**67,36**		**68,91**		**70,56**		**72,33**		**72,33**		
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	*Tingkat Keamanan Produk pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/berbahaya dan residu pestisida (%)*	*Perbandingan Produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan*	-		-	-		*95,5*	*90,01*		*96*	*96,33*		-	-	-	-	-	-	-		
		Tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)	*Tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)*	*94*	*531,00*	*95,2*	*95,2*	*97,23*			*310,65*			*67,92*	-	-	-	-	-	-	-	*475,80*	
		konsumsi bahan pangan pokok perkapita per tahun (kg)	*konsumsi bahan pangan pokok perkapita per tahun (kg)*	*91,98*		*91,6*	*91,6*								-	-	-	-	-	-	-		
22	**Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)**	**Jumlah kecukupan kebutuhan pangan pokok dari bahan pangan lokal/jumlah kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,00**	**32,25**	**73,00**	**86,00**	**75,00**	**115,00**	**75,00**	**233,25**	

PD yang menyelenggarakan Urusan Koperasi, Perdagangan, UMKM dan In

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Skor PPH**	**Survei indeks rata-rata konsumsi pengan masyarakat terhadap 9 kelompok pangan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84,00**	**348,67**	**85,00**	**340,90**	**86,00**	**440,60**	**86,00**	**1.130,17**	
24	**Program Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan**	**(Jumlah penurunan penduduk rawan pangan/jumlah penduduk)x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**	**10,28**	**6**	**10,00**	**6**	**21,00**	**16,00**	**41,28**	
25	**Program Pengawasan Keamanan pangan**	**Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)**	**Perbandingan produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,14**	**45,00**	**90,3**	**45,00**	**91**	**76,50**	**91,00**	**166,50**	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	*Jumlah Produksi Ikan (ton)*	*Jumlah produksi perairan umum dan budidaya*	*214,98*	*124,00*	*216,05*	-	-	*216*	*217,24*	-	*216,5*	*206,28*	*84,33*	-	-	-	-	-	-	-	*84,33*	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	*Jumlah Produksi Ikan (ton)*	*Jumlah produksi perairan umum dan budidaya*	*214,98*	*124,00*	*216,05*	*216,05*	*247,06*	*216*	*217,24*	*126,28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*373,34*	
26	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Ikan (ton)**	**Jumlah produksi perairan umum dan budidaya**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**217**	**487,46**	**217,50**	**470,00**	**218,00**	**460,00**	**652,50**	**1.417,46**	
27	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)**	**jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun dalam bantuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33,2**	**50,00**	**36,00**	**60,00**	**36,67**	**90,00**	**36,67**	**200,00**	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Jumlah Produksi Padi (ton GKG)*	*Produktivitas x luas panen*									*14.600,00*	*17.874,46*	*929,46*	-	-	-	-	-	-	-	*929,46*	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	*Jumlah Produksi karet (ton)*	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*									*1.255,00*	*2.012,86*	*162,55*	-	-	-	-	-	-	-	*162,55*	
		Jumlah Produksi kakao (ton)	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*									*535,00*	*566,12*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	*Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)*	*(pemotongan tercatat + 5 % (Pemotongan tercatat) x 173,5*						*351,68*	*336,99*		*352,68*	*334,53*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	*Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6 kg*						*133,86*	*139,17*		*134,36*	*228,92*		-	-	-	-	-	-	-	*1.498,93*	
			Telur Btk 60% x populasi x 7,6 kg												-	-	-	-	-	-	-		
			telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg								*957,23*			*541,70*	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	*Daging Ayam Buras :*						*897,06*	*901,62*		*897,86*	*885,6*		-	-	-	-	-	-	-		
			(150% x populasi) x 0,715 kg												-	-	-	-	-	-	-		
			Daging Ayam Ras Pedaging												-	-	-	-	-	-	-		
			(60% x 97% x populasi) x 0,825 kg												-	-	-	-	-	-	-		
			Daging Ayam Petelur :												-	-	-	-	-	-	-		
			(50% x populasi) x 0,825 kg												-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi ternak sapi (ekor)	*Jumlah Populasi ternak sapi(ekor)*	*6.051*		*6.464*	*6.464*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)*	*1.261*		*1.363*	*1.363*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)*	*2.941*	*208,31*	*2.943*	*2.943*	*48,69*	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	*48,69*	
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (ekor)*	*175.649*		*176.600*	*176.600*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (ekor)*	*54.154*		*54.770*	*54.770*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	*Persentase penambahan sawah berigasi (%)*	*Penambahan sawah berigasi / sawah berirgasi data awal*	-		-	-	-	-	-	-	*15*	*0*	*42,97*	-	-	-	-	-	-	-	*42,97*	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	*Jumlah produksi padi (GKG) (ton/luas panen)*	*Jumlah produksi Padi saat panen*	*14.274,00*		*16.108,00*	*4,69*		*14.500,00*	*17.926,78*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah luas penanaman palawija (Ha)	*Jumlah luas penanaman palawija (Ha)*	*175,75*		*194,80*	*194,8*		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Luas penanaman sayuran (Ha)	*Jumlah Luas penanaman sayuran (Ha)*	*140,00*		*199,19*	*199,19*		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan (batang)	*Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan (batang)*	*370,08*	*2.181,38*	*385,27*	*385,27*	*1.723,09*	-	-	*3.609,06*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5.332,15*	
		Produktivitas Karet Kering (Kg/Ha)		*1.248,23*		*1.250,23*	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Produktivitas Kakao Kering (Kg/Ha)		*1.024,68*		*1.055,56*	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi karet (ton)		-		-	-		*1.250,00*	*1.540,17*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**Urusan Pangan, Pertanian, Perikanan**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah Produksi kakao (ton)		-		-	-		*530,00*	*565,73*		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkanan (PD)	*Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian*	*Perbandingan luas sawah dengan handtraktor*	-	-	-	-	-	*01:18*	*01:16*	*336,83*	*01:16*	*01:15,1*	*640,66*	-	-	-	-	-	-	-	*977,49*	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	*Dipromosikan nya produk pertanian Sawahlunto ditingkat Kota Provinsi dan Nasional (kali/Tahun)*	*Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (kali/Tahun)*	*4*	*81,11*	*5*	*5*	*130,21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*130,21*	
	Program Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang	*Tersedianya kawasan Agrouisata (lokasi)*	*Tersedianya kawasan agrouisata (lokasi)*	*1*	*637,28*	*1*	*3,1*	*341,83*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*341,83*	
28	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian**	**(Perbandingan luas sawah dengan handtraktor)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1:14**	**3.659,08**	**1:12**	**2.624,64**	**1:10**	**3.730,60**	**1:10**	**10.014,32**	
		Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	**Produktivitas x luas panen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.700**		**15.593**		**15.747**		**46.040**		
		Jumlah Produksi Karet (ton)	**Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.260**		**1.729**		**1.730**		**4.719**		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	**Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**540**		**568**		**569**		**1.677**		
		Jumlah Produksi :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	**pemotongan tercatat + 5%(pemotongan tercatat) x 173,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**353,68**		**354,68**		**355,68**		**1.064**		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	***Daging Ayam Buras :***	-	-	-	-	-	*897,06*	*901,62*	-	*897,86*	*885,6*	-	*898,66*		*899,46*		*900,26*		*2698,38*		
			(150% x populasi) x 0,715 kg	-	-	-	-	-			-			-									
			Daging Ayam Ras Pedaging	-	-	-	-	-			-			-									
			(60% x 97% x populasi) x 0,825 kg	-	-	-	-	-			-			-									
			Daging Ayam Petelur :	-	-	-	-	-			-			-									
			(50% x populasi) x 0,825 kg	-	-	-	-	-			-			-									
		Jumlah Produksi Telur (ton)	***Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6 kg***	-	-	-	-	-	*133,86*	*139,17*	-	*134,36*	*228,92*	-	*134,86*		*135,36*		*135,86*		*406,08*		
			Telur itik 60% x populasi x 7,6 kg	-	-	-	-	-			-			-									
			telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg	-	-	-	-	-			-			-									
	Program Penyedian Sarana dan Prasarana Pertanian	*Persentase penambahan sawah berigasi (%)*	*Penambahan sawah berigasi / sawah berirgasi data awal*	-	-	-	-	-	-	-	-	*15*	*0*	*42,97*	-	-	-	-	-	-	-	*42,97*	
29	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Penambahan Sawah Berirgasi (%)**	**Penambahan sawah berirgasi / sawah berigasi data awal**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**3.739,17**	**5**	**2.453,00**	**2,5**	**3.370,00**	**12,5**	**9.562,17**	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	*Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan zoonosis (%)*	*(Ternak yang tidak terserang penyakit / total ternak dilayani) x 100%*	-	*399,38*	-	-	*182,64*	*90*	*89,72*	*876,13*	*91*	*100*	*157,74*	-	-	-	-	-	-	-	*1.216,50*	
		Penanggulangan Penyakit ternak / hewan (jenis layanan pertahun	*Penanggulangan Penyakit ternak/hewan (jenis layanan pertahun)*	*7*		*7*	*7*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
30	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)**	**(jumlah kejadian penyakit tahun lalu-jumlah kejadian penyakit tahun ini/jumlah kejadian penyakit tahun lalu)x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**	**425,26**	**20**	**429,00**	**10**	**544,93**	**10**	**1.399,19**	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	*Jumlah Produksi karet (ton)*	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*	-		-	-		-	-		*1.255*	*2.012,86*	*162,55*	-	-	-	-	-	-	-	*162,55*	
		Jumlah Produksi kakao (ton)	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*	-		-	-		-	-		*535*	*566,12*		-	-	-	-	-	-	-		
31	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)**	**(Luas serangan OPT/luas tanam) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10**	**186,30**	**10**	**105,00**	**10**	**370,80**	**10**	**662,10**	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	*Jumlah Kelompok tani yang naik skor sesuai Permentan (kelompok/Wilayah Binaan)*	*Hasil Penilaian Kelompok Tani sesuai Kriteria Permentan*		*138,73*			*115,18*	*5*	*5*	*155,95*	*5*	*5*	*51,53*	-	-	-	-	-	-		*322,65*	

PD yang menyelenggarakan

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang studi banding (orang/ tahun)	*Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (orang / tahun)*	*956*		*362*	*362*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	*Persentase Penyuluh yang naik jenjang jabatan (%)*	*(Penyuluh naik jenjang Jabatan/Total Penyuluh) x 100 %*	-		-	-		*5,55*	*16,67*		*5,55*	*5,55*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten dibidangnya	*Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten dibidangnya*	*571,00*	*385,00*	*176*	*176*	*152,58*	-	-	*165,46*	-	-	*26,89*	-	-	-	-	-	-	-	-	*344,93*	
32	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)**	**(Penyuluh naik jenjang jabatan / Total penyuluh) X 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,55**	**582,65**	**5,55**	**395,00**	**5,55**	**655,00**	**16,65**	**1.632,65**	
		Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	**Hasil penilaian kelompok tani sesuai kriteria Permentan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**		**5**		**5**		**15**		
	Sasaran 2.1.5. Tersedianya iklim investasi yang kondusif	**Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)**	**Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing**	**n/a**	**398,92**	**n/a**	**n/a**	**374,15**	**26,00**	**200,44**	**351,21**	**26,00**	**28,28**	**211,54**	**36,00**	**830,19**	**36,00**	**601,76**	**41,00**	**732,76**	**41,00**	**3.101,61**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**
	Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan (PD)	*Jumlah Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)*	*Jumlah Perizinan yang Diterbitkan*	*1.093*	*205,66*	*1.232*	*1.901*	*228,60*	*509*	*1.567*	*167,06*	*560*	*272*	*105,60*	-	-	-	-	-	-	-	*501,26*	
		Jumlah Non Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)	*Jumlah Non Perizinan yang Diterbitkan*	*0*		*0*	*0*		*491*			*540*	*680*		-	-	-	-	-	-	-		
33	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**511,29**	**B**	**188,96**	**B**	**218,96**	**B**	**919,22**	
34	**Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP**	**Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**243,93**	**B**	**267,93**	**B**	**511,87**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (PD)	*Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)*	*Jumlah Investasi PMDN Lokal*						*20*	*200,44*		*20*	*28,28*		-	-	-	-	-	-	-		
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	*Jumlah Investasi PMDN Nasional*				*86,38*	-	*5*	*0*	*31,78*	*5*	*0*	*99,46*	-	-	-	-	-	-	-	*131,25*	
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	*Jumlah Investasi PMA*				*0*		*1*	*0*		*1*	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-	
35	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)**	**(Nilai Investasi Tahun N - Nilai Investasi (N-1)) x 100% / Nilai Investasi N-1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**	**110,62**	**20**	**110,66**	**25**	**121,66**	**25**	**342,95**	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (PD)	*Jumlah Investor yang Berinvestasi (Perusahaan)*	*Jumlah Investor yang Berinvestasi (Perusahaan)*	\	*193,26*	*4*	*158*	*145,55*	*8*	*19*	*152,36*	*12*	*11*	*6,48*	-	-	-	-	-	-	-	*304,40*	
36	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)**	**Jumlah Investasi PMDN Lokal**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25**		**25**		**30**		**80**		
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	**Jumlah Investasi PMDN Nasional**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10**	**162,63**	**10**	**58,20**	**10**	**64,20**	**30**	**285,02**	
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	**Jumlah Investasi PMA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**		**1**		**1**		**3**		
37	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)**	**(Jumlah Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal / Jumlah Total Perusahaan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**45,65**	**100**	**-**	**100**	**60,00**	**100**	**105,65**	
	Misi 3 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)																						
	Tujuan 3.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**71,13**	**23.660,21**	**72,30**	**71,72**	**18.794,48**	**73,71**	**72,39**	**25.061,14**	**75,33**	**72,64**	**25.554,55**	**73,17**	**39.999,13**	**73,63**	**29.923,36**	**74,09**	**26.889,55**	**74,09**	**153.219,43**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	**Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)**	**lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.**	**13,14**		**13,36**	**13,15**		**13,62**	**13,16**		**13,92**	**13,17**		**13,18**		**13,19**		**13,20**		**13,20**		
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	**Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)**	**9,93**	**23.660,21**	**10,09**	**9,94**	**18.794,48**	**10,29**	**9,97**	**25.061,14**	**10,52**	**10,17**	**25.554,55**	**10,75**	**39.999,13**	**11,01**	**29.923,36**	**11,30**	**26.889,55**	**11,30**	**153.219,43**	
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	**(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %**	**n/a**		**4,00**	**4,00**		**10,00**	**7,34**		**20,00**	**10,94**		**20,00**		**25,00**		**30,00**		**30,00**		
	Program Pendidikan anak usia Dini (PD)	*APK TK*	*(Jumlah Siswa TK/Jumlah seluruh ana*	*99,4*	*589,11*	*99,5*		*1.107,80*	*99,5*	*98,10*	*775,50*	*99,7*		*775,50*	-							*2.658,80*	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD	*Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesusi Standar (%)*	*(Jumlah SD yang memiliki Sarana Prasarana sesusi standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*70*	*17.323,29*	*75*	*90*	*6.719,37*	*78*	*73*	*7.657,49*	*83*		*7.657,49*	-	-	-	-	-	-	-	*22.034,35*	
		Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesusi Standar (%)	*(Jumlah SMP yang memiliki Sarana Prasarana sesusi standar / Jumlah seluruh SMP di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*75*	-	*80*	-	-	*82*	*95*	*1.758,98*	*85*		*1.910,78*	-	-	-	-	-	-	-	*3.669,76*	
		APM SD	*Angka Partisipasi Murni SD*	*96,23*		*96,5*	*100*	-	*96,6*	*96,86*	-	*96,7*	*92*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		APM SMP	*Angka Partisipasi Murni SMP*	*78,49*		*78,79*	*83,73*	-	*79,09*	*79,3*	-	*79,39*	*77,12*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase siswa baru dari keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah	*Persentase siswa baru dari keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah*			*0*	-	-	*100*	*94*	-	*100*			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pendidikan Non Formal (PD)	*Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal*	*Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal*	*81*	*486,32*	*85*	-	*371,93*	*85*	*82*	*1.321,37*	*89*	*67,41*	*1.321,37*	-	-	-	-	-	-	-	*3.014,67*	
	Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD)	*Angka Partisipasi Kasar SD (%)*	*(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*109,19*	-	*109,35*	*111,33*	-	*109,5*	*108,96*	-	*109,65*	*107,13*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	*(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*104,08*	-	*104,25*	*96,98*	-	*104,4*	*92,57*	-	*104,6*	*91,47*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD)	*persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A*	*sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan*	*56*	*2.093,61*	*56*	*53*	*8.191,26*	*59,2*	*60,27*	*9.830,90*	*60,56*	*46*	*9.830,90*	-	-	-	-	-	-	-	*27.853,06*	
	Program Pendidikan berkarakter (PD)	*Kasus Kenakalan Remaja*	*Kasus Kenakalan Remaja*	*7*	*125,00*	*9*	*125*	-	*8*	*6*	*120,98*	*7*	-	*120,97*	-	-	-	-	-	-	-	*241,95*	
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	*(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100 %*	*0*	-	*4*		-	*10*	*10,38*	-	*20*	*10,38*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	*(Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter/Jumlah Sekolah) x 100 %*	*0*	-	*75*	*85*		*80*	*89*	*120,98*	*85*	*91,89*	*11,60*	-	-	-	-	-	-	-	*132,58*	
	Program Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa (PD)	*Jumlah Siswa yang menerima Reward*	*Jumlah Siswa yang menerima Reward*	*302*	*1.112,41*	*352*	*0*	*690,87*	*382*	*232*	*443,50*	*482*	*0*	*1.788,30*	-	-	-	-	-	-	-	*2.922,67*	
		Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	*Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward*	*0*	-	*200*	*107*	*107,00*	*540*	*865*	*865,00*	*550*	*1789*	*2.000,50*	-	-	-	-	-	-	-	*2.972,50*	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD)	*Persentase guru yang bersertifikat pendidik*	*(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik / Jumlah Total Guru) x 100 %*	*74,81*	*1.669,36*	*78,95*	*78,95*	*1.414,65*	*80,5*	*50,8*	*800,07*	*84,2*	*58,61*	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.214,72*	
		Persentase guru yang berkualifikasi min S1	*(Jumlah Guru yang Kualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %*	*88,97*		*91,27*	-		*93,11*	*71,09*		*94,95*	*79,04*		-	-	-	-	-	-	-	-	
38	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APM SD**	**Angka Partisipasi Murni SD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**27.063,31**	**100,2**	**18.775,76**	**101,3**	**14.920,16**	**101,3**	**60.759,23**	
		APM SMP	**Angka Partisipasi Murni SD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**92,5**	**6.113,80**	**93**	**6.725,18**	**93,5**	**7.397,70**	**93,5**	**7.397,70**	

DINAS PENDIDIKAN

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	**(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**	**78,00**	**25**	**85,80**	**30**	**94,38**	**30**	**94,38**	
39	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guru yang bersertifikat pendidik**	**(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik dan berkualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87,3**	**6.253,02**	**88,5**	**3.951,62**	**90,3**	**3.756,81**	**90,3**	**13.961,45**	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	*Angka kunjungan forangi*	*jumlah orang yang berkunjung ke pustaka daerah*	*61922*	*189,87*	*61000*	*61314*	*114,12*	*63000*	*64500*	*1.284,33*	*65000*	*26860*	*97,44*	-	-	-	-	-	-	-	*1.495,89*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
40	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan pustaka**												**12**	**481,00**	**12**	**377,00**	**12**	**709,50**	**12**	**1.567,50**	
41	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Naskah kuno milik daerah kabupaten/kota yang dilestarikan (naskah)**	**Jumlah naskah kuno yang dilestarikan**												**4**	**10,00**	**4**	**8,00**	**4**	**11,00**	**12**	**29,00**	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	*Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%)*	*(OPD yang mengelola arsip secara baku / jumlah OPD) x 100 %*	*27*	*15,11*	*30*	*40*	*14,50*	*40*	*45*	*13,06*	*45*	*50*	*13,25*	-	-	-	-	-	-	-	*40,81*	
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	*Persentase pengelola kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (%)*	*(jumlah pengelola kearsipan dan perpustakaan yang memperoleh sertifikat / jumlah pengelola yang ada) x 100 %*	*30*	*56,13*	*40*	*45*	*62,98*	*45*	*50*	*68,98*	*50*	*60*	*26,46*	-	-	-	-	-	-	-	*158,41*	
	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif																						
	Tujuan 4.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**n/a**	**73.675,58**	**57,64**	**52,22**	**92.625,37**	**63,41**	**52,61**	**111.448,69**	**69,18**	**52,77**	**92.076,34**	**52,93**	**461.556,22**	**60,05**	**521.436,59**	**61,54**	**545.795,60**	**61,54 (B)**	**1.835.378,48**	
	Sasaran 4.1.1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	**Nilai Sakip**	**Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah**	**CC**	**71.893,23**	**B**	**B**	**91.187,97**	**B**	**B**	**110.217,79**	**B**	**B (61,03)**	**91.253,06**	**B (64,57)**	**458.566,11**	**B (68,22)**	**519.723,74**	**BB (72,83)**	**543.377,55**	**BB (72,83)**	**1.824.765,90**	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	**Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**	**WTP**	**4.822,48**	**WTP**	**WTP**	**2.708,60**	**WTP**	**WTP**	**2.894,21**	**WTP**	**WTP**	**2.235,64**	**WTP**	**2.520,77**	**WTP**	**75.171,89**	**WTP**	**82.803,53**	**WTP**	**168.334,63**	
		Persentase peningkatan PAD (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,04**		**4,19**		**4,45**		**4,45**		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	*Persentase Konsistensi Program*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*	*0*	*1.051,17*	*0*	*100*	*1.321,14*	*100*	*100*	*912,81*	*100*	*100*	*321,84*	-	-	-	-	-	-	-	*2.555,80*	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang te*	*5*		*7*	*7*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
42	**Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)**	**(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.163,00**	**100**	**960,00**	**100**	**1.135,00**	**100**	**3.258,00**	
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*		*26,30*			*40,73*	*100*	*100*	*75,70*	*100*	*100*	*18,98*	-	-	-	-	-	-	-	*135,42*	
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)*	*3*		*4*	*4*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*		*100,00*			*303,00*	*100*	*100*	*201,13*	*100*	*100*	*39,91*	-	-	-	-	-	-	-	*544,04*	
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)*	*2*		*2*	*2*								-	-	-	-	-	-	-		
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana	*Persentase Konsistensi Program*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nom*	*100*	*500,00*	*100*	*100*		*100*	*100*	*9,31*	*100*	*100*	*49,43*	-	-	-	-	-	-	-	*58,73*	
		Kesesuaian Rencana Pembangu	*Kesesuaian Perencanaan Lokasi pada*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Perencanaan Peng	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengem*	*8*	*212,62*	*8*	*3*	*177,51*	*3*	*2*	*592,78*	*3*	*1*		-	-	-	-	-	-	-	*770,28*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
43	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)**	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100		BAPPENLITBANGDA
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.152,83	100	1.050,15	100	1.155,74	100	3.358,72	
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100		100		100		100		
	Program perencanaan Tata	*Persentase ketersediaan dokum*	*Persentase ketersediaan dokumen dan*	-	-	-	-	-	*80*		*105,90*	*5*	*5*		-	-	-	-	-	-	-	-	*105,90*	
	Program Pengendalian Pem	*Persentase kesesuaian pemanf*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah B*	*61.28*	-	*61.56*	*86,5*	*420,16*	*62*	*61,58*	-	*63*	*84,15*	*33,29*	-	-	-	-	-	-	-	-	*453,45*	
	Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	*Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)*	*Ketersediaan data Statistik daerah dan OPD (termasuk kerjasama BPS)*	*85*	*282,00*	*85*	*85*	-	*86*	*86*	*187,74*	*87*	*87*	*78,57*	-	-	-	-	-	-	-	-	*266,31*	
		Persentase Data PNS yang diperbaharui dan Diverifikasi (%)	*(Jumlah data PNS yang diperbaharui dan di verifikasi/Jumlah seluruh data PNS) x 100 %*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Da	*Persentase Ketersediaan Informasi Data Profil Daerah (%)*	*Ketersediaan Data Profil Daerah dan OPD*	*28*	*500,00*	*28*	*28*	*48,87*	*28*	*28*	-	*28*	*28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*48,87*	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	*Jumlah Dokumen yang Disusun (Dok)*	*Jumlah Dokumen yang Disusun (Dok)*	*0*	-	*0*	*0*	-	*1*	*1*	*88,81*	*1*	*1*	*18,64*	-	-	-	-	-	-	-	-	*107,46*	
	Program Penelitian, Pengembangan dan Kajian Daerah	*Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi (Kegiatan)*	*Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi*	-	-	-	-	-	*16*	*0*	-	*16*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)**	**Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan dalam Perencanaan/ Pembangunan (Proposal)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	199,00	35	235,00	40	390,00	40	824,00	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PD)	*Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*	*Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*				*WTP*		*WTP*	*WTP*		*WTP*	*WTP*		-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	*Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)*	*100*		*100*	*98*								-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi Belanja Daerah (%)	*Realisasi Belanja Daerah thd APBD*	*94*		*94*	*87,48*								-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi Penerimaan Daerah (%)	*Realisasi Penerimaan Daerah terhadap Target*	*100*		*100*	*94,36*								-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi PAD (%)	*Realisasi PAD terhadap Target*	*100*	*1.893,46*	*100*	*81,48*	*716,53*			*1.420,69*			*770,04*	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.907,26*	
		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	*Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)*	*95*		*95*	*95*								-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	*Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)*	*30*		*30*	*30*								-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	*Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)*	*100*		*100*	*98*								-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	*Penetapan APBD*	*Kesesuaian Tanggal Penetapan APBD dengan Aturan Permendagri*						*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*		*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*		-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	*Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)*	*Tepat Waktu*	*1.365,91*	*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*	*1.461,16*			*1.466,31*			*1.465,60*	-	-	-	-	-	-	-	-	*4.393,06*	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik (%)*	*Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik / Jumlah Desa x 100%*	-	-	-	-	-	*20*	*20*	*7,21*	*40*	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,21*	BPKAD
	Program Pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan	*Penerimaan PBB (Rupiah Juta)*	*Penerimaan PBB (Rupiah Juta)*	*975.82*	*585,61*	*937.39*	*937,789*	*219,84*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*219,84*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	*Penerimaan PAD (Rupiah Milliyar)*	*Penerimaan PAD (Rupiah Milliyar)*	*20.72*	*977,50*	*19.8*	*54,454*	*311,07*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			*311,07*	
45	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WTP**	**79.126,48**	**WTP**	**73.664,39**	**WTP**	**75.805,20**	**WTP**	**228.596,07**	
		Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	**(Jumlah Realisasi Belanja / APBD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**		**90**		**90**		**90**		
		Maksimal Defisit APBD (%)	**Jumlah Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah pada tahun yang sama**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,1**		**4,1**		**4,1**		**4,1**		
46	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)**	**(Jumlah OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel / Jumlah Total OPD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**93**	**594,62**	**94**	**960,50**	**95**	**1.025,50**	**95**	**2.580,62**	
47	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)**	**(Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Target Pendapatan Asli Daerah) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.002,38**	**100**	**547,00**	**100**	**601,70**	**100**	**2.151,08**	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	*Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan (Dok)*	*Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan*	-	-	-	*1*	*344,2*	*1*	*1*	*269,77*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*613,97*	SEKRETARIAT DAERAH
	Program Pengembangan SDM Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa*	*Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa*	-	-	-	-	-	*175*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa*	*Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa*	-	-	-	-	-	-	-	-	*250*	*103*	*7,45*	-	-	-	-	-	-	-	*7,45*	
	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik*	*Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik*	-	-	-	-	-	-	-	-	*350*	*103*	*70,25*	-	-	-	-	-	-	-	*70,25*	
	Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa*	*Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa*									*175*	*32*	*4,7*	-	-	-	-	-	-	-	*4,70*	
48	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	***Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)***	***Jumlah bulan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan***												**12**	**803,27**	**12**	**988,39**	**12**	**1.134,83**	**36**	**2.926,49**	
49	**Program Pengelolaan Arsip**	**Terkelolanya arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota (bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan arsip**												**12**	**114,83**	**12**	**275,00**	**12**	**385,48**	**36**	**775,30**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program penyelamatan dan pelestarian dokume¹-nsip daerah	*Jumlah arsip Statis yang terselamatkan (Lembar)*	*Jumlah arsip Statis yang tersimpan di depo arsip*	*1700*	*123,44*	*1725*	*865*	*27,08*	*2500*	*1956*	*46,03*	*4000*	*4422*	*44,91*	-	-	-	-	-	-	-	*118,02*	
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	*Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%)*	*(Jumlah sarana dan prasana sesuai standar / jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %*	*20*	-	*20*	*0*	-	*20*	*0*	-	*30*	*40*	*15,88*	-	-	-	-	-	-	-	*15,88*	
50	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Terlaksanasnya perlindungan & penyelamatan arsip (bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan perlindungan & penyelamatan arsip**												**12**	**70,00**	**12**	**160,00**	**12**	**235,00**	**12**	**465,00**	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Persentase Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya*	*Jumlah Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya / Jumlah Aparatur Desa x 100%*	*80*	-	*85*	*85*	-	*90*	*88*	-	*92*	*92,59*	*136,00*	-	-	-	-	-	-	-	*136,00*	
	Program peningkatan kapasitas pemerintahan terdepan	*Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan terdepan*	*Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap layanan*	*85*	*242,76*	*90*	*88*	*5,27*	*95*	*90*	*495,36*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*500,63*	
	Program peningkatan SDM aparatur terdepan	*Indeks kepuasan layanan*	*Persentase aparatur desa terhadap peningkatan SDM*	*75*	*417,47*	*78,94*	*80*	*244,29*	*80*	*80*	-	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*244,29*	
51	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase administrasi desa yang dibina**	**Jumlah administrasi desa yang dibina/ jumlah desa x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**1.302,22**	**95**	**611,14**	**100**	**950,75**	**100**	**2.864,11**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
52	**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang ditata**	**Jumlah desa yang ditata/ jumlah total desax 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**329,79**					**100**	**329,79**	DINSOSPMDHPA
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa/ kel	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/ Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada x 100%*	*80*	*346,30*	*85*	*85*	*193,12*	*85*	*85*	*157,64*	*87*	*87*	*25,50*	-	-	-	-	-	-	-	*376,26*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kel	*Persentase masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa/kel*	*Jumlah masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa-kel / jumlah masyarakat yang hadir x 100%*	*80*	*608,42*	*85*	*85*	*695,60*	*90*	*90*	*652,25*	*87*	*87*	*8,20*	-	-	-	-	-	-	-	*1.356,05*	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/kel	*Persentase PKK yang aktif*	*Jumlah PKK yang aktif / jumlah kelompok PKK x 100%*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	*143,40*	-	-	-	-	-	-	-	*143,40*	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	*Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif*	*Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif / jumlahLembaga Ekonomi Desa x 100%*	*75*	-	*80*	*80*	-	*85*	*85*	-	*90*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina/ jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**642,11**	**95**	**763,55**	**100**	**895,50**	**100**	**2.301,16**	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/jumlah temuan (100 %)	100	794,33	100	100	319,22	100	100	585,61	100	100	409,59	-	-	-	-	-	-	100	1.314,42	INSPEKTORAT
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Nilai SAKIP	Penilaian terhadap SAKIP Kota Sawahlunto	-	-	CC	CC	108,95	B	B	41,53	Tidak digunakan			-	-	-	-	-	-	BB	150,48	
54	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)**	**Persentase tindaklanjut LHP (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**654,15**	**100**	**685,41**	**100**	**826,79**	**100**	**2.166,34**	
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PD)	Nilai APIP	Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)	Level 2	22,64	Level 2	Level 2	5,81	Level 3	Level 3	212,00	Level 3	Level 3	333,20	-	-	-	-	-	-	Level 3	551,01	
55	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai APIP (Level)**	**Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Level 3**	**345,50**	**level 3**	**345,35**	**level 4**	**415,12**	**level 4**	**1.105,97**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*5.089,97*	*12*	*12*	*7.703,86*	*12*	*12*	*7.093,35*	*12*	*12*	*8.030,78*	-	-	-	-	-	-	-	*22.827,99*	DINAS PENDIDIKAN
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*3.277,87*	*12*	*12*	*480,40*	*12*	*12*	*2.582,57*	*12*	*12*	*3.248,18*	-	-	-	-	-	-	-	*6.311,15*	DINAS KESEHATAN
		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran(Bulan)	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran(Bulan)*			*12*	*12*	*2.191,22*	*12*	*12*	*5.952,41*	*12*	*12*	*5.935,98*	-	-	-	-	-	-	-	*14.079,62*	PUPR
		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*			*12*	*12*		*12*	*12*	*4.594,15*	*12*	*12*	*5.667,52*	-	-	-	-	-	-	-	*10.261,67*	DKP2LH
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*12*	*908,59*	*12*	*12*	*1412,83*	*12*	*12*	*1352,34*	*12*	*12*	*1211,58*	-	-	-	-	-	-	-	*3.976,75*	Kesbang
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*12*	*2323,27*	*12*	*12*	*2251,42*	*12*	*12*	*2470,42*	*12*	*12*	*2408,71*	-	-	-	-	-	-	-	*7.130,55*	Satpol PP
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*700,67*	*12*	*12*	*1.149,85*	*12*	*12*	*1.108,46*	*12*	*12*	*1.219,21*	-	-	-	-	-	-	-	*3.477,52*	DINAS SOSIAL
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*			*12*	*12*	*360,62*	*12*	*12*	*752,58*	*12*	*12*	*825,91*	-	-	-	-	-	-	-	*1.939,11*	PTSP
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	-	-	*12*	*12*	*1.888,29*	*12*	*12*	*1.417,07*	*12*	*12*	*1.610,25*	-	-	-	-	-	-	-	*4.915,61*	DKP3
		Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*			*12*	*12*		*12*	*12*	*4.594,15*	*12*	*12*	*5.667,52*	-	-	-	-	-	-	-	*10.261,67*	DKP2LH
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.990,48*	*12*	*12*	*2.687,03*	*12*	*12*	*3.292,07*	*12*	*12*	*1.195,76*	-	-	-	-	-	-	-	*7.174,86*	DISDUKCAPIL

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12	780,71	12	12	1054,07	12	12	1028,56	12	12	1020,41	-	-	-	-	-	-		3.103,04	DINAS PERHUBUNGAN
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran		-	12	12	1.870,83	12	12	1.744,04	12	12	1.521,36	-	-	-	-	-	-		5.136,23	KOPERINDAG
		Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)				12	12	1.437,37	12	12	1.389,78	12	12	1.456,21	-	-	-	-	-	-		4.283,37	DINAS KEBUDAYAAN
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	487,33	12	12	653,35	12	12	714,56	12	12	546,45	-	-	-	-	-	-		1.914,37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Tersedianya pelayanan ADM perkanoran (buah)		-	-	12	12	1.433,65	12	12	1.428,95	12	12	1.459,52	-	-	-	-	-	-		4.322,12	DISPARPORA
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	12	7909,66	12	12	8.902,95	12	12	6.642,84	-	-	-	-	-	-		23.455,45	SETDAKO
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	terpenuhinya pelayanan administrasi peekantoran (bulan)	12	3.663,55	12	12	2.186,84	12	12	2.442,85	12	12	3.055,30	-	-	-	-	-	-		7.684,99	SET DPRD
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	-	-	12	12	700,90	12	12	789,31	12	12	774,74	-	-	-	-	-	-		2.264,95	BARENLITBANGDA
		Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	-	-	12	12	1.608,11	12	12	1.557,46	12	12	1.536,39	-	-	-	-	-	-		4.701,96	BPKAD
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	1.719,09	12	12	1.735,74	12	12	2.018,72	12	12	2.265,94	-	-	-	-	-	-		6.020,40	BKPSDM
		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)	administrasi perkantoran yang terpenuhi (Bulan)	12	353,06	12	12	419,58	12	12	484,49	12 Bulan	12 Bulan	350,19	-	-	-	-	-	-	12	1.254,26	INSPEKTORAT
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur (Bulan)	12	195,11	12	12	203,77	12	12	237,99	12 Bulan	12 Bulan	171,53	-	-	-	-	-	-	12	613,29	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi (orang)	12	156,21	12	12	188,42	12	12	174,74	12 Bulan	12 Bulan	109,96	-	-	-	-	-	-	12	473,12	INSPEKTORAT
		Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran		12	461,85	-	12	552,54	-	12	494,46	-	12	487,40	-	-	-	-	-	-		1.534,40	Barangin
				12	320,48	-	12	375,69	-	12	329,66	-	12	351,84	-	-	-	-	-	-		1.057,19	L. Segar
				12	430,65	-	12	497,49	-	12	412,36	-	12	363,85	-	-	-	-	-	-		1.273,70	Silungkang
				12	420,50	-	12	499,19	-	12	452,00	-	12	403,70	-	-	-	-	-	-		1.354,89	Talawi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	1.398,12	12	12	2.036,98	12	12	1.223,24	12	12	224,89	-	-	-	-	-	-		3.485,11	DINAS PENDIDIKAN
		Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	1.094,17	12	12	144,26	12	12	1.454,26	12	12	879,46	-	-	-	-	-	-		2.477,98	DINAS KESEHATAN
		Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	-	-	12	12	395,24	12	12	691,79	12	12	347,64	-	-	-	-	-	-		1.434,67	PUPR
		Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	-	-	12	12	-	12	12	734,37	12	12	577,90	-	-	-	-	-	-		1.312,27	DKP2LH
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12	328,10	12	12	311,58	12	12	337,07	12	12	276,13	-	-	-	-	-	-		924,79	Kesbang
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12	717,136	12	12	670,90	12	12	796,70	12	12	483,81	-	-	-	-	-	-		1.951,41	Satpol PP
		Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	173,95	12	12	240,89	12	12	204,42	12	12	144,21	-	-	-	-	-	-		589,52	DINAS SOSIAL
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)	-	-	12	12	262,25	-	-	183,69	-	-	259,52	-	-	-	-	-	-		705,45	PTSP
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-	12	12	414,10	12	12	458,02	12	12	240,76	-	-	-	-	-	-		1.112,88	DKP3
		Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)	-	-	12	12		12	12	734,37	12	12	577,90	-	-	-	-	-	-		1.312,27	DKP2LH
		Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	Jumlah bulan pelaksanaan program	12	1.810,43	12	12	1.481,88	12	12	1.629,77	12	12	386,71	-	-	-	-	-	-		3.498,36	DISDUKCAPIL

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	12	180,02	12	12	409,62	12	12	266,54	12	12	126,09	-	-	-	-	-			802,25	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	-	-	12	12	201,85	12	12	142,87	12	12	231,59	-	-	-	-	-			576,32	KOPERINDAG
		Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)			-	12	12	299,74	12	12	231,37	12	12	109,17	-	-	-	-	-			640,28	DINAS KEBUDAYAAN
		Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	12	255,21	12	12	273,98	12	12	205,78	12	12	298,62	-	-	-	-	-			778,37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah sarana prasaran yang disediakan (buah)		-	-	12	12	292,41	12	12	169,39	12	12	104,08	-	-	-	-	-			565,88	DISPARPORA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	-	-	-	12	4920,02	12	12	3.405,99	12	12	3.361,65	-	-	-	-	-			11.687,66	SETDAKO
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	*Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (bulan)*	12	4.451,17	12	12	1.271,67	12	12	1.815,83	12	12	2.467,96	-	-	-	-	-			5.555,46	SET DPRD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*	-	-	12	12	151,63	12	12	669,29	12	12	168,70	-	-	-	-	-			989,62	BARENLITBANGDA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*	-	-	12	12	1.292,71	12	12	477,19	12	12	763,82	-	-	-	-	-			2.533,72	BPKAD
		Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	12	271,48	12	12	218,39	12	12	156,07	12	12	97,07	-	-	-	-	-			471,54	BKPSDM
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		60	130,07	-	65	138,33	-	70	139,52	-	75	53,50	-	-	-	-	-			461,42	Barangin
				100	183,59	-	100	138,31	-	12	89,35	-	12	60,39	-	-	-	-	-			471,64	L. Segar
				100	88,32	-	100	93,44	-	12	81,59	-	12	54,71	-	-	-	-	-			318,05	Silungkang
				100	207,00	-	75	116,96	-	100	52,50	-	100	56,20	-	-	-	-	-			432,66	Talawi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	100	199,62	100	155	198,34	100	141	319,96	100	10	49,80	-	-	-	-	-			568,10	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	100	34,67	100	100	7,20	100	100	62,77	-	-	-	-	-	-	-	-			69,97	DINAS KESEHATAN
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	-	-	12	12	39,22	12	12	142,38	12	12	19,81	-	-	-	-	-			201,41	PUPR
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	-	-	12	12	-	12	12	61,65	12	12	75,00	-	-	-	-	-			136,65	DKP2LH
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah aparatur) x 100%*	12	177,11	12	12	107,38	12	12	119,55	12	12	37,09	-	-	-	-	-			264,01	Kesbang
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah aparatur) x 100%*	12	48,72	12	12	52,44	12	12	90,74	12	12	10,49	-	-	-	-	-			153,67	Satpol PP
		Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)	*(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %*	-	-	-	-	87,13	-	-	119,95	-	-	97,89	-	-	-	-	-			304,98	PTSP
		Persentase Aparatur yang meningkat SDMnya	*(jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ jumlah aparatur) x 100%*	-	-	23	23	96,80	12	12	123,51	34	34	4,00	-	-	-	-	-			224,30	DKP3
		Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	-	-	12	12	-	12	12	61,65	12	12	75,00	-	-	-	-	-			136,65	DKP2LH
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	100	319,52	100	155	359,71	100	141	380,83	100	10	42,99	-	-	-	-	-			783,54	DISDUKCAPIL
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah aparatur) x 100%*	12	118,97	12	12	86,99	12	12	140,87	12	12	49,90	-	-	-	-	-			277,76	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Aparatur yang meningkat SDMnya	*(jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ jumlah aparatur) x 100%*	-	-	12	12	96,04	12	12	198,65	12	12	61,57	-	-	-	-	-			356,26	KOPERINDAG
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	*(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah Aparatur) x 100 %*	22	5.821,00	26	22	250,37	30	28	305,10	34	19	84,02	-	-	-	-	-			639,49	SETDAKO
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)		-	-	12	12	97,60	12	12	138,36	12	12	29,75	-	-	-	-	-			265,71	DINAS KEBUDAYAAN

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %	100	81,93	100	100	74,16	100	100	129,83	100	100	50,57	-	-	-	-	-	-	-	254,56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas (orang)			-	12	12	80,99	12	12	86,85	12	12	22,10	-	-	-	-	-	-	-	189,94	DISPARPORA
		Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	persentase aparatur yang meningkat sdmnya	100	3.292,66	100	100	1.611,40	100	24	1.745,28	24	8	51,38	-	-	-	-	-	-	-	3.408,06	SET DPRD
		Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)	(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %	-	-	-	-	135,80	-	-	170,08	-	-	100,24	-	-	-	-	-	-	-	406,12	BARENLITBANGDA
		Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)	(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %	-	-	-	-	457,11	-	-	167,15	-	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	714,26	BPKAD
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %	100	1.050,92	100	100	1.138,29	100	100	384,49	100	100	2,40	-	-	-	-	-	-	-	1.525,18	BKPSDM
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah Aparatur) x 100 %	60	32,24	-	65	71,40	-	70	53,96	-	75	17,90	-	-	-	-	-	-	-	143,26	Kec Barangin
				100	54,88	-	10.00	29,45	-	97,8	44,01	-	94,72	11,84	-	-	-	-	-	-	-	85,30	L. Segar
				39	46,40	-	14,29	25,74	-	25	33,28	-			-	-	-	-	-	-	-	59,02	Silungkang
				100	46,00	-	100	43,10	-	100	7,50	-	100	7,50	-	-	-	-	-	-	-	58,10	Talawi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	12	9,90	12	12	9,90	12	12	9,85	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	19,75	Kesbang
		Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	12	123,48	12	12	197,21	12	12	185,56	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	382,76	Satpol PP
		Persentase Tersedianya pakaian dinas untuk Aparatur Sipil	Jumlah tersedianya pakaian dinas / jumlah aparatur X 100 %	0	-	34	-	-	34	32	9,90	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,90	DINAS SOSIAL
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	(Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap/jumlah ASN) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP3
		Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)	12	66,49	12	12	93,66	12	12	103,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,72	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	(Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap/jumlah ASN) x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	-	-	-	0	127,92	100	0	179,86	100	0	117,49	-	-	-	-	-	-	-	425,27	SETDAKO
		Meningkatnya disiplian aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)	100	249,53	100	26	19,80	34	40	490,00	24	24	149,58	-	-	-	-	-	-	-	659,38	SET DPRD
		Persentase Tersedianya pakaian dinas untuk Aparatur Sipil	Jumlah tersedianya pakaian dinas / jumlah aparatur X 100 %	100	8,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		BKPSDM
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	100	1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	Barangin
				100	3,21	-	-	-	-	100	2,46	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46	L. Segar
						-	-	-	-			-	3,57	2,93	-	-	-	-	-	-	-	2,93	Silungkang
										100	2,30	-	100	2,30	-	-	-	-	-	-	-	4,60	Talawi
	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Tersedianya data statistik	Jumlah bulan ketersediaan data (bulan)	12	32,67	12	12	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93	DINAS KESEHATAN
	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi OPD (dokumen/bulan)	Jumlah data tersedia di OPD	12	7,26	12	12	5,12	12	12	5,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,23	Kesbang
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%	-	-	-	-	5,80	-	-	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,14	PTSP
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	(jumlah program di RKPDdengan nomenklatur dan indikator yang asama/jumlah program di RPJMD) x 100%	-	151,17	100	100	10,54	100	100	7,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,52	DKP3

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen)	*(jumlah DokumenPerencanaan yang tersusun)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKP3
		Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	*(jumlah program di RKPDdengan nomenklatur dan indikator yang sasama/jumlah program di RPJMD) x 100%*	-	*151,17*	*100*	*100*	*5,27*	*100*	*100*	*3,61*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*8,88*	KOPERINDAG
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen)	*(jumlah DokumenPerencanaan yang tersusun)*	-	-	*1*	*1*	-	*1*	*1*	-	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas (orang)*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARPORA
	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	*Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum*	*Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN yang difasilitasi*	*24*	*24,16*	*24*	*24*	*24,00*	*24*	*24*	*24,00*	-	-	*1,00*	-	-	-	-	-	-	-	*48,00*	BKPSDM
56	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (Bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**100.702,83**	**12**	**79.091,47**	**12**	**79.174,47**	**36**	**258.968,77**	**DINAS PENDIDIKAN**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**85.354,40**	**12**	**88.163,17**	**12**	**88.163,17**	**36**	**261.680,74**	**DINAS KESEHATAN**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**14.182,27**	**12**	**9.793,22**	**12**	**11.397,00**	**36**	**35.342,49**	**PUPR**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**8.507,93**	**12**	**8.884,89**	**12**	**9.780,55**	**36**	**27.173,37**	**DKP2LH**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**3.655,33**	**12**	**4.385,39**	**12**	**6.074,95**	**36**	**14.115,67**	**Kesbang**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**6754,57**	**12**	**8408,70**	**12**	**8829,13**	**36**	**23.992,41**	**Satpol PP**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**5.111,34**	**12**	**5.408,78**	**12**	**5.640,71**	**36**	**16.160,84**	**DINAS SOSIAL**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**6.748,38**	**12**	**6.072,08**	**12**	**5.772,08**	**36**	**18.592,54**	**PTSP**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**12.311,90**	**12**	**13.459,62**	**12**	**14.396,02**	**36**	**40.167,55**	**DKP3**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**3.678,74**	**12**	**4.414,39**	**12**	**5.171,50**	**36**	**13.264,64**	**DISDUKCAPIL**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**1719,87**	**12**	**8208,86**	**12**	**9850,63**	**36**	**19779,36**	**DINAS PERHUBUNGAN**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**4.872,80**	**12**	**6.166,24**	**12**	**7.007,00**	**36**	**18.046,04**	**KOPERINDAG**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**4.538,58**	**12**	**5.886,23**	**12**	**6.474,85**	**36**	**16.899,66**	**DINAS KEBUDAYAAN**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**3.016,65**	**12**	**3.288,36**	**12**	**3.683,00**	**36**	**9.988,01**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**22889,85**	**12**	**27732,00**	**12**	**29.592,60**	**36**	**80.214,44**	**SETDAKO**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**13.507,58**	**12**	**14.720,74**	**12**	**16.159,35**	**36**	**44.387,67**	**SET DPRD**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**5.494,36**	**12**	**4.609,60**	**12**	**5.079,50**	**36**	**15.183,46**	**BARENLITBANGDA**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**8.295,95**	**12**	**8.791,19**	**12**	**9.683,04**	**36**	**26.770,18**	**BPKAD**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**9.178,04**	**12**	**6.965,59**	**12**	**6.000,00**	**36**	**22.143,63**	**BKPSDM**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**5.237,49**	**12**	**5.932,97**	**12**	**1.996,69**	**36**	**4.681,40**	**INSPEKTORAT**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**6.273,00**	**12**	**6.377,00**	**12**	**6.377,00**	**36**	**19.027,00**	**L. Segar**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.394,00	12	2.513,00	12	3.004,00	36	7.911,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.496,00	12	2.970,00	12	2.898,10	36	8.364,10	talawi
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.761,00	12	4.833,00	12	5.665,00	36	15.259,00	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.640,15	12	6.480,85	12	7.317,00	36	18.438,00	PARPORA
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	*Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu*	*(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,00	12,14	-	-	-	-	-	-	-	12,14	*Barangin*
				-	-								100,00	14,44	-	-	-	-	-	-	-	14,44	*L.Segar*
				-	-					100,00	13,20		40,00	22,00	-	-	-	-	-	-	-	35,20	*Talawi*
57	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)**	**(Luas wilayah dalam kondisi aman dan tertib/total luas wilayah)x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	117,46	100	59,71	100	25,00	100	202,17	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	16,71	100	19,00	100	19,00	100	54,71	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,00	100	8,00	100	8,80	100	24,80	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	56,00	100	15,00	100	17,50	100	88,50	Talawi
		Persentase fasilitasi penanganan kasus covid	**Operasional penanganan kasus Covid**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	455,12					100	455,12	Kesbanggpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)*	*Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan*	*100*	*9,80*		*100*	*10,85*		*100*	*17,85*				-	-	-	-	-	-	-	*28,70*	*Kec. Barangin*
				98,53	*23,97*		*97,57*	*23,91*		*100*	*22,92*		*100*	*19,65*	-	-	-	-	-	-	-	*66,48*	*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-	-	-	*Silungkang*
				100	*199,00*		*100*	*210,93*							-	-	-	-	-	-	-	*210,93*	*Talawi*
58	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)**	**(jumlah kegiatan terselenggara/total jumlah kegiatanjx100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100,00	134,55	100,00	30,00	100,00	164,55	Kec. Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	100,00	25,00	-	0	100,00	25,00	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00	48,00	100,00	108,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7,10	100,00	2,40	100,00	34,00	100,00	43,50	Talawi
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*		*100*	*179,16*		*100*	*151,42*		*100*	*75,18*	-	-	-	-	-	-	-	*405,76*	*Barangin*
				100	*265,57*		*100*	*193,80*		*100*	*216,88*		*100*	*37,69*	-	-	-	-	-	-	-	*448,37*	*L. Segar*
				100	*232,47*		*100*	*143,97*		*100*	*98,92*		*100*	*58,68*	-	-	-	-	-	-	-	*301,57*	*Silungkang*
				100	*181,98*		*100*	*148,30*		*100*	*81,69*		*100*	*22,50*	-	-	-	-	-	-	-	*252,49*	*Talawi*
	Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD)	*Indek Pemberdayaan Gender (IDG)*	*Indeks Peran Perempuan dalam Ekonomi dan politik*												-	-	-	-	-	-	-		*Kec. Barangin*
															-	-	-	-	-	-	-		*Silungkang*
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kel	*Presentase PKK yang aktif (%)*	*(Jumlah Kelompok PKK Desa/Kel yang aktif/ Jumlah Kelompok PKK) x 100 %*	*100*	*22,28*		*65,38*	*20,17*		*100*	*14,69*		*100*	*13,29*	-	-	-	-	-	-	-	*48,15*	*L. Segar*
				100	*26,29*		*100*	*24,32*		*100*	*29,24*		*100*	*31,88*	-	-	-	-	-	-	-	*85,44*	*Silungkang*
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kel	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)*	*(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %*	*100*	*171,46*		*85*	*301,12*		*85*	*822,09*		*87*	*8,66*	-	-	-	-	-	-	-	*1.131,87*	*Kec. Barangin*
				100	*100,00*		*71,16*	*264,11*		*100*	*579,98*		*100*	*8,11*	-	-	-	-	-	-	-	*852,20*	*L. Segar*
				100	*8,00*		*100*	*8,16*		*100*	-		*100*	*15,87*	-	-	-	-	-	-	-	*24,04*	*Silungkang*
				100	*7,90*		*95*	*11,00*		*100*	*31,40*		*85*	*7,40*	-	-	-	-	-	-	-	*49,80*	*Talawi*
	Program pembangunan infrastruktur Kelurahan	*Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara*	*Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara*	*4*	*800,00*		*4*	*1.497,13*		*4*	*1.141,98*		*4*	*1.451,79*	-	-	-	-	-	-	-	*4.090,90*	*Barangin*
				6	*1.185,27*		*6*	*1.656,20*		*6*	*1.490,75*		*6*	*2.065,47*	-	-	-	-	-	-	-	*5.212,42*	*L. Segar*
59	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)**	**(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.313,00	100	1.601,00	100	103,08	100	4.017,08	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	110,00	100	100,00	100	114,00	100	324,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.570,00	100	894,00	100	910,00	100	3.374,00	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	97,00	100	250,00	100	105,00	100	452,00	Talawi
	Program Penataan Administrasi Kependudukan (PD)	*Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)*	*(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %*												-	-	-	-	-	-	-		*Kec. Barangin*
															-	-	-	-	-	-	-		*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-	-		*Silungkang*
															-	-	-	-	-	-	-		*Talawi*
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dilaksankan (%)		*100*	*9,47*		*100*	*6,89*		*100*					-	-	-	-	-	-	-	*6,89*	*Kec. Barangin*
				100	*5,94*		*100*	*1,55*		*100*	*3,40*				-	-	-	-	-	-	-	*4,95*	*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-	-	-	*Silungkang*

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
				100	*6,30*		*96*	*5,00*		*100*	*2,60*		*100*	*2,50*	-	-	-	-	-	-		-	*Talawi*
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan*	*(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun)*												-	-	-	-	-	-		-	*L. Segar*
				100	*14,50*		*100*	*14,97*		*100*	*14,96*		*100*	*14,90*	-	-	-	-	-	-		*44,83*	*Talawi*
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)	*Persentase tindak lanjut temuan*	*(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/jumlah temuan) x 100 %*												-	-	-	-	-	-		-	*Inspektorat dan Kecamatan*
				100	*892,24*		*100*	*1.149,58*		*100*	*1.193,29*		*100*	*2.085,68*	-	-	-	-	-	-		*4.427,95*	*ec. Barangin*
				100	*1.527,26*		*100*	*1.195,71*		*100*	*1.719,78*		*100*	*2.609,34*	-	-	-	-	-	-		*5.524,83*	*L. Segar*
	Program Pembinaan Agama dan Adat	*Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)*		*100*	*256,67*		*100*	*226,38*		*100*	*234,39*				-	-	-	-	-	-		*460,77*	*Kec. Barangin*
				100	*242,29*		*100*	*152,94*		*100*	*180,48*				-	-	-	-	-	-		*333,42*	*L. Segar*
				100	*206,30*		*100*	*637,10*		*100*	*218,82*				-	-	-	-	-	-		*855,92*	*Silungkang*
				100	*151,00*		*100*	*189,00*		*100*	*99,40*				-	-	-	-	-	-		*288,40*	*Talawi*
	Program Pembinaan Keagamaan (PD)	*Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)*											*100*	*2,32*	-	-	-	-	-	-		*2,32*	*Kec. Barangin*
				100	*242,29*		*100*	*152,94*		*100*	*180,48*		*100*	*15,17*	-	-	-	-	-	-		*348,59*	*L. Segar*
				0			*0*			*0*	-		*0*	-	-	-	-	-	-	-		-	*Silungkang*
				100	*17,90*		*100*	*128,80*		*100*	*75,90*				-	-	-	-	-	-		*204,70*	*Talawi*
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*		*100*	*179,16*		*100*	*151,42*		*100*	*75,18*	-	-	-	-	-	-		*405,76*	*Barangin*
				100	*265,57*		*100*	*193,80*		*100*	*216,88*		*100*	*37,69*	-	-	-	-	-	-		*448,37*	*L. Segar*
				100	*232,47*		*100*	*143,97*		*100*	*98,92*		*100*	*58,68*	-	-	-	-	-	-		*301,57*	*Silungkang*
				100	*181,98*		*97*	*148,30*		*95*	*81,69*		*95*	*22,50*	-	-	-	-	-	-		*252,49*	*Talawi*
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	*Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*(Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan/jumlah yang diusulkan) x 100 %*	*100*	*81,45*	*100*	*100*	*27,31*	*100*	*100*	*42,40*	*100*	*100*	*14,77*	-	-	-	-	-	-		*84,48*	*Barangin*
				100	*71,77*							*100*	*100*	*18,65*	-	-	-	-	-	-		*18,65*	*L. Segar*
				100	*63,49*		*100*	*10,49*		*0*	-		*100*	*5,00*	-	-	-	-	-	-		*15,49*	*Silungkang*
				87	*99,30*		*91*	*19,90*					*100*	*19,10*	-	-	-	-	-	-		*39,00*	*Talawi*
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	*Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%)*	*(Jumlah jaringan Informasi Publik yang dioptimalisasi/jumlah jaringan informasi di Kecamatan) x 100 %*						*50,00*	*50,00*	*19,45*				-	-	-	-	-	-		*19,45*	*Barangin*
															-	-	-	-	-	-			*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-			*Silungkang*
															-	-	-	-	-	-			*Talawi*
	Program Pengembangan Data dan Informasi	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah*	*Ketersediaan data profil daerah dan OPD*												-	-	-	-	-	-			*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-			*Talawi*
60	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)**	**(Jumlah pelayanan publik yang terlayani/total pelayanan) x 100 %**												**100,00**	**2.781,00**	**100,00**	**2.626,00**	**100,00**	**2.661,00**	**100,00**	**8.068,00**	**Barangin**
															100,00	**168,28**	**100,00**	**185,10**	**100,00**	**203,62**	**100,00**	**557,00**	**L. Segar**
															100,00	**168,00**	**100,00**	**176,00**	**100,00**	**332,00**	**100,00**	**676,00**	**Silungkang**
															100,00	**597,19**	**100,00**	**172,50**	**100,00**	**220,00**	**100,00**	**989,69**	**Talawi**
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*		*100*	*179,16*		*100*	*151,42*		*100*	*75,18*	-	-	-	-	-	-		*405,76*	*Barangin*
				100	*265,57*		*100*	*193,80*		*100*	*216,88*		*100*	*37,69*	-	-	-	-	-	-		*448,37*	*L. Segar*
				100	*232,47*		*100*	*143,97*		*100*	*98,92*		*100*	*58,68*	-	-	-	-	-	-		*301,57*	*Silungkang*
				100	*181,98*		*100*	*148,30*		*100*	*81,69*		*100*	*22,50*	-	-	-	-	-	-		*252,49*	*Talawi*
61	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)**	**Jumlah Desa yang dibina/total jumlah desa x 100%**												**100**	**151,55**	**100**	**162,80**	**100**	**20,00**	**100**	**334,35**	**Barangin**
															100	**13,25**	**100**	**14,00**	**100**	**15,00**	**100**	**42,25**	**L. Segar**
															100	**42,00**	**100**	**42,00**	**100**	**46,20**	**100**	**130,20**	**Silungkang**
															100	**46,00**	**100**	**23,70**	**100**	**25,00**	**100**	**94,70**	**talawi**
	Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%)*	*Jumlah kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan monev*												-	-	-	-	-	-			*Sekretariat Daerah dan Kecamatan*
															-	-	-	-	-	-			*Barangin*
															-	-	-	-	-	-			*L. Segar*
															-	-	-	-	-	-			*Silungkang*
															-	-	-	-	-	-			*talawi*
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	*Persentase jumlah perda diteta*	*(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %*		*66,00*	*50*	*50*	*8.818,31*	*75*	*75*	*7.065,00*	*80*	*80*	*4.250,70*	-	-	-	-	-	-		*20.134,01*	**SET DPRD**

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
62	**Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)**	***(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu /jumlah propemperda) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100%**	**11.485,86**	**100%**	**10.646,25**	**100%**	**11.697,92**	**100%**	**33.830,03**	**SET DPRD**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan*	*Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%*	*98,26*	*701,60*	*98,44*	*99,50*	*815,76*	*100*	*99,14*	*867,94*	*100*	*98,77*	*551,08*	-	-	-	-	-	-	-	*2.234,78*	DISDUKCAPIL
		Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)	*(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %*									*97,5*	*97,5*		-	-	-	-	-	-		
	Program Penguatan Kelembagaan	*Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001:2015*	*Jumlah Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015*		-	*1*	*1*	*52,21*	*1*	*1*	*492,00*	*1*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*544,21*	
63	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase validasi data kependudukan (%)**	**Jumlah data penduduk yang telah melakukan validasi (update data) / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97,00**	**118,96**	**100**	**90,27**	**100**	**136,68**	**100**	**345,91**	
	Program pelayanan pencatatan sipil	*Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun & penerbitan akte kematian*	*Persentase realisasi kepemilikan akte kelahiran & akte kematian x bobot*	*97,37*	*54,73*	*85,00*	*85*	*123,48*	*85,00*	*93*	*101,51*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*224,99*	
64	**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil**	**Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**239,95**	**97,5**	**213,02**	**100**	**346,00**	**100**	**798,97**	
65	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97,00**	**64,00**	**100**	**520,57**	**100**	**712,28**	**100**	**1.296,85**	
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya**		**2000**			**25,8**			**2134**	**61**		**2132,7**	**66,00**	**0**	**70**	**0**	**75**	**0**	**75**	**9.174,72**	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2000	945,43	2000	Tidak digunakan		2000	2111	8,55	2020	2111	41,74	-	-	-	-	-	-	-	*50,29*	BKPSDM
	Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP	Predikat hasil penilaian SAKIP oleh KEMENPAN RB	-	-	-	-	-	B	B	7,01	B	B	9,87	-	-	-	-	-	-	-	*16,88*	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	*Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar*	*(JumlahASN yang diberi Ijin dan Tugas Belajar / Jumlah ASN) x 100%*	*2.50*	*768,62*	*5.60*	*1,5*	*754,45*	*5.60*	*2,5*	*1.702,17*	*5.70*	*3,8*	*717,44*	-	-	-	-	-	-	-	*3.174,06*	
		Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	*(Jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat / Jumlah ASN) x 100%*	*11.48*		*24.10*	*24,3*		*20.40*	*20,5*		*20.70*	*17,9*		-	-	-	-	-	-	-	-	
66	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan (%)**	**(Jumlah ASN yang terlayani / Jumlah seluruh ASN yang mengajukan permohonan pelayananj) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.595,72**	**100**	**1.737,76**	**100**	**2.000,00**	**100**	**5.333,49**	
67	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Terlaksanasnya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	**600,00**	**2**	***600,00***	
	Tujuan 4.2. Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %		1.782,36			1.437,40			1.230,90			823,28	0,04	2.990,11	0,05	1.712,85	0,05	2.418,05	0,14	10.612,58	
	Sasaran 4.2.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %		1.782,36			1.437,40			1.230,90			823,28	0,04	2.990,11	0,05	1.712,85	0,05	2.418,05	0,14	10.612,58	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	*Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu*	*(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)*	*100,00*	*754,70*	*100,00*	*100,00*	*958,72*	*100,00*	*100,00*	*766,47*	*100,00*	*100,00*	*723,58*	-	-	-	-	-	-	-	*2.448,77*	
					220,76	*100,00*	*100,00*	*46,98*	*100,00*	*100,00*	*28,69*	*100,00*	*100,00*	*29,39*	-	-	-	-	-	-	-	*105,05*	*Kec. Barangin*
															-	-	-	-	-	-	-		*L.Segar*

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
															-	-	-	-	-	-	-		*Silungkang*
															-	-	-	-	-	-	-		*Talawi*
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Mayarakat	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*		*0*		*490,00*	*43,69*	*250,00*	*250,00*	*26,12*	*250,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*69,81*	
		Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	*Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)*		*98,58*	*85,00*	*67,00*	*9,02*	*85,00*	-	-	*75,00*	*50,00*	*4,57*	-	-	-	-	-	-	-	-	*13,59*	
68	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalu Forum Strategis (%)**	**(Jumlah laporan Pembinaan yang di tindaklanjuti / jumlah laporan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65**	**1.232,06**	**100**	**450,00**	**100**	**680,50**	**100**	**2.362,56**	
69	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%)**	**(Jumlahrekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi rapat) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**100**	**75,00**	**100**	**346,50**	**100**	**421,50**	
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD)	*Persentase penegakan perda (%)*	*(jumlah penyelesaian penegakan Perda/ jumlah pelanggaran Perda) x 100%*		*577,23*		*100*	*149,81*		*100*	*123,63*		*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*273,44*	
70	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penegakan perda (%)**	***(jumlah penyelesaian penegakan Perda/ jumlah pelanggaran Perda) x 100%***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.446,94**	**100**	**468,62**	**100**	**491,05**	**100**	**2.406,61**	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang*	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang*		*131,09*	*69,00*	*51,79*	*131,09*	*610,00*		*141,30*	*610,00*			-	-	-	-	-	-	-	*272,39*	
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	*Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)*						*4,00*			*4,00*			-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Forum-forum strategis daerah	*Jumlah Forum-forum strategis daerah*						*3,00*			*4,00*			-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)													-	-	-	-	-	-	-		
71	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Penurunan Angka Krimilatitas (%)**	**(Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) - Jumlah Angka Kriminalitas Tahun N) / Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**311,11**	**10**	**134,57**	**15**	**275,00**	**15**	**720,68**	
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	*Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)*			-		*3*	*68,07*		*3*	*86,20*		*3*	*65,73*	-	-	-	-	-	-	-	*220,00*	
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	*Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik*			-			*30,03*		*100*	*58,50*		*0*		-	-	-	-	-	-	-	*88,52*	
		Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol													-	-	-	-	-	-	-		
72	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)**	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**82,56**	-	**85**	-	**85**	-	
		Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**78,62**	**584,66**	**80**	**600,00**	**80**	**1.184,66**	
		Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**												**0**		**54,27**		**65**		**65**		
73	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%)**	**Jumlah organisasi masyarakat yang diawasi/jumlah organisasi kemasyarakatan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**100**	**25,00**	**100**	**25,00**	
	Misi 5 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat																						

KESIAHAN(KO)

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Tujuan 5.1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**71,13**	**30.716,33**	**72,30**	**71,72**	**10.684,75**	**73,71**	**72,39**	**16.480,28**	**75,33**	**72,64**	**40.076,64**	**73,17**	**67.990,96**	**73,63**	**21.468,67**	**74,09**	**19.986,07**	**74,09**	**176.802,37**	
	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	**Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)**	**Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur**	**69,39**	**30.295,46**	**69,49**	**69,59**	**9.134,08**	**69,83**	**69,87**	**15.441,12**	**70,47**	**70,00**	**38.702,27**	**70,14**	**65.828,36**	**70,28**	**21.196,17**	**70,42**	**19.530,91**	**70,42**	**169.947,90**	
	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	*Angka kematian balita per 1.000*	*Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu*	*2,77*	*299,09*	*2,51*	*24*	*247,71*	*2,35*	*27,1*	*394,30*	*2,17*	*22,6*	*52,91*	-	-	-	-	-	-	-	*694,92*	
		Jumlah kematian ibu	*Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun*	*0*		*0*			*0*	*3*		*0*	*2*										
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD)	*Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan*	*Jumlah balita gizi buruk mendapatperawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dikali seratus persen*	*100*	*50,33*	*100*	*100*	*1,98*	*100*	*111*	*4.671,75*	*100*	*100*	*19,15*	-	-	-	-	-	-	-	*4.692,88*	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD)	*Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar*	*Jumlah penderita TBC yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita TBC dikali seratus persen*	*100*	*231,66*	*100*		*153,99*	*100*	*100*	*230,35*	*100*	*100*	*125,29*								*509,63*	
		Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar	*Jumlah penderita DBD yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita DBD dikali seratus persen*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*	*230,35*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	*230,35*	
		Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar	*Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai Standar*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*	-	*100*	*100*	-								-	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PD)	*Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar*	*Jumlah penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita Diabetes dikali seratus persen*	*100*	*16,56*	*100*	*100*	*12,67*	*100*	*100*	*45,87*	*100*	*88*	*29,00*	-	-	-	-	-	-	-	*87,54*	
		Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	*Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat dikali seratus persen*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*150*	-									
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	*Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita hipertensi dikali seratus persen*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*16,72*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata (PD)	*Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar*	*Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia / sarana prasarana RS yang sesuai standar) x 100 %*	*67,8*	*5.424,00*	*72,8*		*5,49*	*77,8*	*56*	*7,95*	*79*	*58*	*9.715,00*								*9.728,43*	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (PD)	*Akreditasi Rumah Sakit*	*Penilaian terhadap standar pelayanan rumah sakit yang dikeluarkan oleh komite akreditasi rumah sakit*	-	*462,30*	*utama*		*1.181,48*	*utama*		*719,47*	*utama*		*736,18*	-	-	-	-	-	-	-	*2.637,13*	
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	*jumlah puskesmas terakreditasi/jumlah puskesmas x 100%*	*66,6*		*100*	*33*		*100*	*100*		*100*	*100*										
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	*Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar*	*(Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita yang menjadi Target Pelayanan) x 100 %*	-	*203,00*	*70*	*213,73*	*213,73*	*74*	*48*	*167,17*	*76*	*31*	*9,00*	-	-	-	-	-	-	-	*389,90*	
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD)	*Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar*	*Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu sesuai standar*	*69*	*10.378,18*	*71*	*6*	*5.209,00*	*73*	*71,63*	*5.358,42*	*75*	*0*	*8.369,00*								*18.936,42*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD)	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68,01	11.438,95	95	95	26,55	95	97,88	37,60	96	96,07	14.765,33	-	-	-	-	-	-		14.829,48	DINKESDALDUKKB
		Persentase rujukan pasien yang terlaksana	(Jumlah rujukan terlaksana/jumlah pasien dirujuk) x 100 %	100		0	100		0	100		100	100										
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%)	(Jumlah Obat dan Vaksin Indikator yang terdedia / Jumlah Kebutuhan Obat dan Vaksin Indikator) x 100 %	98,1	411,44	98,7	98,7	197,48	88	100	230,60	90	90,5	128,66	-	-	-	-	-	-		556,74	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%)	(Jumlah sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar / Jumlah Sarana Obat, Makanan dan Alkes yang tersedia) x 100 %	-	42,75	75	92	20,20	77	0	33,08	78	0	84,00								137,28	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	(Jumlah Lansia terlantar / JumlahLansia yang dapat pelayanan) x 100 %	-	82,00	70	70	17,00	70	38,1	16,22	75	0	21,15	-	-	-	-	-	-		54,37	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian balita per 1000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu			2,51	24	495,41	2,35	27,1	65,05	-	22,6	52,91								613,37	
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun	0	-	0	0			3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%)	(Jumlah sarana prasarana yang dipelihara /jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %		-	-	-	-	-	-	80,00	-	-	3.195,00								3.275,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas			-	-	100,00	100	100	1.034,70	100	-	1.066,00	-	-	-	-	-	-		2.200,70	
	Program Upaya Kesehatan Kerja	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	Jumlah kelompok kerja informal yang difasilitasi	-	4,08	-	4		4	100	10,13	-	0	-								10,13	
	Program Upaya Kesehatan Olahraga	Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas	Jumlah kelompok olah raga yang difasilitasi	-	2,56	-	4	-	1	100	4,32	-	0	-	-	-	-	-	-	-		4,32	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)	12	28,14	12	-	24,21	12	-	29,00	12	-	31,65								84,87	
74	**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan**	**Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %**												95	64.893,75	96	20.841,17	97	18.936,64	100	104.671,56	
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	**(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2**												80		81		82				
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	**(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %**												≤ 4,50		≤ 4,25		≤ 4,00				
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD)	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %	93	88,61	93	-	30,63	94	0	112,00	93	92,6	115,00	-	-	-	-	-	-		257,63	
	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	Angka kematian balita per 1.000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu	2,77	299,09	2,51	24	247,71	2,35	27,1	394,30	2,17	22,6	52,91	-	-	-	-	-	-		694,92	
		Jumlah kematian ibu	Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun	0			0		0	3		0	2		-	-	-	-	-	-		-	
	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	Persentase UKBM yang aktif	Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar	72	589,58	75	75	329,45	78	100	311,31	81	85	32,50	-	-	-	-	-	-		673,26	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian balita per 1000	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu			2,51		2,35	766,8		562,20				-	-	-	-	-	-		564,55	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
75	**Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	**Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar**	**(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**165,87**	**91**	**80,00**	**92**	**137,50**	**92**	**383,37**	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	*Keluarga Sehat (%)*	*Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga*	25	42,75	75	92	20,20	77	0	33,08	78	0	84,00	-	-	-	-	-	-	-	*137,28*	
	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	*Persentase UKBM yang aktif*	*Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar*	72	589,58	75		323,17	78		367,58	81			-	-	-	-	-	-	-	-	*690,75*	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	*Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar*	*(Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita yang menjadi Target Pelayanan) x 100 %*	-	203,00	70	75,5	213,73	74,00	48	167,17	76	31	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	*389,90*	
76	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Keluarga Sehat (%)**	**Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33**	**583,49**	**35**	**195,00**	**37**	**349,52**	**37**	**1.128,01**	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	*Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan*	*(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang diperiksa) x 100 %*	-	*15,73*	*90*	*94,44*	*8,08*	*90*	*100*	*7,46*	*91*	*88,1*	*8,70*	-	-	-	-	-	-	-	*24,24*	
	Program Peningkatan Kualitas Air	*Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)*	*(Jumlah sarana air minum yang diawasi/jumlah sarana air minum yang ada) x 100 %*	89	122,16	70	88	51,86	72	100	119,69	74	99	114,92	-	-	-	-	-	-	-	*286,47*	
77	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan**	**(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang diperiksa) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76**	**185,25**	**77**	**80,00**	**78**	**107,25**	**78**	**372,50**	
	Sasaran 5.1.2 Menurunnya prevalensi stunting	**Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**	**Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu**		**420,87**		**18,5**	**1.550,68**		**11,1**	**1.039,16**		**8,00**	**1.374,37**	**6,10**	**2.162,60**	**6,00**	**272,50**	**5,90**	**455,16**	**5,90**	**6.854,47**	
	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	*Pasangan Usia Subur Yang Terputus/ Terhenti Menggunakan Kontrasepsi*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	85	185,74	64	70	262,93	65		407,52	67		248,12	-	-	-	-	-	-	-	*918,57*	
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	*Persentase Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%)*	*(Jumlah Balita yang terpantau tumbuh kembangnya / Jumlah Balita yang menjadi target) x 100 %*	9385,11		63	-	250,96	64		86,58	83	90	-	-	-	-	-	-	-	-	*337,54*	
	Program peningkatan pelayanan KB	*Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi*	*Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi*	85	86,55	62	62	785,49	71,29	10,02	313,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1.098,66*	
	Program Pelayanan Kontrasepsi	*Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)*	*(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/jumlah pasangan usia Subur) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	66	63,3	1.019,57	-	-	-	-	-	-	-	*1.019,57*	
78	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)**	**(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/Jumlah pasangan usia Subur) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67,78**	**1.788,63**	**68,55**	**62,50**	**69,21**	**129,41**	**69,21**	**1.980,54**	**DINKESDALDUKKB**
	Program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	96	63,47	32	0	95,10	30,4	30,4	145,31	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	*240,41*	
	Program kesehatan reproduksi remaja	*Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun*	*Jumlah perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun / Jumlah Ibu melahirkan*	0	-				0	0		29,73	2,3	24,73	-	-	-	-	-	-	-	*24,73*	
	program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	93	85,11	63	95,8	156,20	64	64	86,58	65	0	81,95	-	-	-	-	-	-	-	*324,73*	
79	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif**	**Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**235**	**280,50**	**235**	**97,00**	**235**	**177,25**	**705**	**554,75**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
80	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase pengendalian penduduk**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,29**	**93,47**	**2,25**	**113,00**	**2,22**	**148,50**	**6,76**	**354,97**	
	Misi 6 Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan																						
	Tujuan 6.1. Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,75		5,78	5,52		5,80	5,31		5,83	(1,27)		2,90		3,24		4,53		4,53		
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	52,70	344.593,35	55,81	55,01	13.158,29	58,24	58,88	11.720,94	61,02	58,02	13.125,65	59,99	19.693,87	62,93	16.460,98	66,03	24.430,84	66,03	98.590,57	
		Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,01		2,39	2,39		2,27	2,17		2,21	2,16		2,10		2,05		2,01		2,01		
		Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,30		#REF!	0,31		#REF!	0,27		#REF!	0,29		0,28		0,28		0,28		0,28		
	Sasaran 6.1.1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09	344.593,35	71.119,37	73.951,36	13.158,29	77.373,30	82.406,43	11.720,94	83.627,23	75.255,42	13.125,65	80.359,32	19.693,87	87.536,71	16.460,98	95.714,10	24.430,84	95.714,10	98.590,57	
		Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,58		2,76	2,58		2,95	2,48		3,16	1,75		1,86		1,98		2,13		2,13		
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	*Persentase Objek Wisata Unggulan (%)*	*(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %*						*32,35*			*38,24*			-		-		-		-		
		Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	*Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)*	*8*	*4.491,60*	*6*		*3.706,70*			*3.211,82*			*3.943,94*	-		-		-		-		*10.862,46*	
		Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	*Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)*	*2*		*2*									-		-		-		-		
81	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)**	**(Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata)**												**75**	**9.457,00**	**80**	**4.804,68**	**90**	**12.000,00**	**90**	**26.261,68**	
		Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	**(Jumlah objek wisata unggulan tipe A/Total jumlah objek wisata yang ada) X100%**												***50***		***55,88***		***61,76***		***61,76***		
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	*Jumlah Wisatawan (orang)*	*Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)*	*331.484*	*2.523,00*	*354.611*	*858.335*	*2.322,90*	*379.351*	*245.396*	*1.736,09*	*405.817*	*95.995*	*1.736,09*	-		-		-		-		*5.795,07*	
82	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah Wisatawan (orang)**	**(Jumlah pengunjung objek wisata(tiket masuk)**		**331.483,00**	**354.609,57**			**379.349,62**	**236.776,00**		**405.815,71**			**434.128**	**1.407,24**	**1.000.000**	**1.866,61**	**1.300.000**	**4.110,29**	**1.300.000**	**7.384,13**	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD)	*Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)*	*(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri/.Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif) x 100 %*						*15*			*17*			-		-		-		-		
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	*Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)*	-	-	*21*		*35,05*			*268,34*			*272,61*	-		-		-		-		*576,00*	
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	*Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)*			*16*									-		-		-		-		
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	*Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)*	*Jumlah MoU Kemitraan aktif dibagi dengan jumlah MoU Kemitraan dikali seratus persen*	-		*33*			*50*			*70*			-		-		-		-		
		Jumlah Rumah Makan (buah)	*Jumlah Rumah Makan (buah)*	*46*	*76,10*	*46*		*42,90*			*1.023,46*			*405,00*	-		-		-		-		*1.471,36*	
		Jumlah Home Stay (Buah)	*Jumlah Home Stay (Buah)*	*45*		*37*									-		-		-		-		
		Jumlah Pramuwisata (orang)	*Jumlah Pramuwisata (orang)*	*19*		*10*									-		-		-		-		
83	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)**	**(Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri/Jumlah pelaku ekonomi kreatif) X100%**												**18**	**1.109,20**	**19**	**253,61**	**20**	**696,19**	**20**	**2.059,01**	
		persentase MoU kemitraan aktif (%)	**(Jumlah MOU kemitraan aktif/jumlah MOU kemitraan) X 100%**												***75***		***80***		***90***		***90***		
84	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	**Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)**	**(Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HAKI/Jumlah produk ekonomi kreatif) X 100%**												**0,50**	**144,93**	**0,50**	**68,82**	**0,50**	**80,00**	**0,50**	**293,75**	

DISPORAPAR

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	*Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)*	*organisasi yang memiliki kepengunusan dan program serta kegiatan yang jelas*	*12*	*1.548,70*	*12*		*573,96*	*13*		*908,10*	*15*		*1.121,03*	-	-	-	-	-	-		*2.603,09*	
85	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)**	**Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15**	**1.468,37**	**15**	**933,10**	**15**	**1.644,06**	**45**	**4.045,53**	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	*Jumlah organisasi olahraga yang aktif (organisasi)*	*Organisasi yang memiliki kepengunusan dan program serta kegiatan yang jelas*	-	*2.031,80*			*812,10*				*15*		*120,00*	-	-	-	-	-	-		*932,10*	
		Jumlah Cabang olah raga masal yang berkembang di masyarakat (cabang)	*Jumlah Cabang olah raga masal yang berkembang di masyarakat (cabang)*	*12*		*14*									-	-	-	-	-	-			
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	*Jumlah atlet berprestasi (atlet)*	*Atlet beprestasi tingkat Provinsi/Regional/ Nasional/Internasional*						*135*		*1.479,00*	*143*		*1.668,40*	-	-	-	-	-	-	-	*3.147,40*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah)*	*Sarana dan prasarana yang memiliki fasilitas sesuai dgn peraturan*	*2*	*48,90*	*2*		*1.172,00*				*3*		*1.900,00*	-	-	-	-	-	-	-	*3.072,00*	
86	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional (atlit)**	**Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**148**	**2.003,28**	**153**	**5.414,16**	**160**	**2.045,21**	**160**	**9.462,64**	
87	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)**	**Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75**	**490,00**	**75**	**500,00**	**75**	**1.055,09**	**75**	**2.045,09**	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD)	*Persentase budaya benda yang lestari*	*(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %*						*61,34*	*56,16*		*63,02*	*53,81*		-		-		-		-		
		Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan	*Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan*												-		-		-		-		
		- Buku (Buah)	*- Buku (Buah)*	*2*		*1*	*1*								-		-		-		-		
		- Film (Buah)	*- Film (Buah)*	*0*		*0*	*0*								-		-		-		-		
		Jumlah Museum dikelola (buah)	*Jumlah Museum dikelola (buah)*	*6*		*6*	*6*								-		-		-		-		
		Angka Kunjungan Museum (buah)	*Angka Kunjungan Museum (buah)*	*31.839*		*31.062*	*31.062*								-		-		-		-		
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	*Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)*	*1*	*2.390,25*	*4*	*4*	*4.492,68*			*2.316,89*			*1.958,58*	-	-	-	-	-	-	-	*8.768,15*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)	*Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)*	*4*		*4*	*4*								-		-		-				
		Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	*Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)*	*2*		*20*	*20*								-		-		-				
		Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)	*Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)*	*10.653*		*8.549*	*8.459*								-		-		-				
		Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)	*Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)*	-		*1.878*	*1.878*								-		-		-				
		Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	*Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)*	*3*		*4*	*4*								-		-		-				
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	*Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif*	*Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif*						*10*	*11*	*777,24*				-	-	-	-	-	-	-	*777,24*	
88	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Presentase budaya benda yang lestari (%)**	**(Jumlah cagar budaya yang lestari/Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**57,18**	**1.589,68**	**60,55**	**1.600,00**	**63,92**	**1.700,00**	**63,92**	**4.889,68**	**DINAS KEBUDAYAAN**
89	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Jumlah kunjungan museum (orang)**	**(Jumlah kunjungan museum (tiket terjual)(orang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**31.000**	**2.024,18**	**32.000**	**1.020,00**	**33.000**	**1.100,00**	**33.000**	**4.144,18**	
	Misi 7 Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai																						
	Tujuan 7.1. Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	74,83	14.303,48	75,94	74,83	60578,77212	77,33	74,33	69891,42381	79,00	78,30	217862,7905	79,69	108360,3554	81,71	110412,2919	83,57	100642,7164	83,57	666726,9144	
	Sasaran 7.1.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53,93	4.688,04	54,96	54,96	57.427,60	72,66	59,45	55.052,24	74,35	62,34	210.921,30	63,42	74.952,66	65,07	97.412,67	66,73	86.001,79	66,73	581.768,25	
		Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45,35		45,35	45,35		46,35	46,72		47,35	46,72		47,72		49,22		51,22		51,22		
	Program Pemeliharaan /rehabilitasi jalan dan jembatan (PD)	*Persentase Jalan dalam kondisi mantap*	*(Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan) x 100 %*	*65.98*	*2.777,32*	*66.98*	*66,82*	*4.356,90*	*67*	*66,38*	*9.553,42*	*68*	*66,50*	*17.684,25*								*31.594,57*	
		Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	*(Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang Jembatan) x 100 %*	*76*	*1.579,60*	*78*	*78*	*1.238,84*	*80*	*77,03*	*1.166,21*	*82*	*78,00*	*321,79*								*2.726,84*	
	Program Pembangunan/Peningkatan jalan dan jembatan	*Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)*	*Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)*			*911,09*	*11,59*	*23.181,53*	*11,987*	*11,00*	*19.291,17*	*9,318*	*4,55*	*2.545,53*	-	-	-	-	-	-	-	*45.018,24*	
90	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)**	**(Panjang Jalan yang ditingkatkan +panjang jalan yang terpelihara)/total panjang jalan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**68,8**	**37.306,58**	**70,01**	**47.458,56**	**72,21**	**43.400,00**	**72,21**	**128.165,13**	
		Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)	**(Panjang jembatan yang ditingkatkan +panjang jembatan yang terpelihara)/total panjang jembatan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**78**		**78,5**		**79**		**79**		
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD)	*Persentase Drainase dalam Kondisi Baik*	*panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %*	*51,98*	-	*51,98*	*56,00*	*1.213,67*	*71,19*	*43,96*	*3.223,54*	*72,78*	*43,98*	*181.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	*185.437,21*	
91	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)**	**panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46,75**	**1.990,00**	**50,37**	**3.670,00**	**52,34**	**2.050,00**	**52,34**	**7.710,00**	DPUPR, TRDP, DPUPR
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD)	*Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik*	*Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen*	*75.7*	-	*77.85*	*40,51*	*2.135,96*	*80*	*42,38*	*3.847,97*	*82*	*44,6*	*2.453,20*	-	-	-	-	-	-	-	*8.437,13*	
92	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)**	**(Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik / panjang saluran irigasi) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**48,35**	**6.910,93**	**49,35**	**9.386,97**	**50,35**	**6.550,00**	**50,35**	**22.847,89**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target								Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023							
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)			Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)		
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)												
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*			*22*	*23*	*24*
	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD)	*Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik*	*(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar : jumlah bangunan pemerintah yang ada) x 100%*	52	-	60	68	3.400,60	65,12	84,69	3.302,96	66,98	86,16	2.780,39	-	-	-	-	-	-			-	*9.483,95*	
	Program Pengembangan Perumahan	*persentase luas permukiman yang tertata*	*(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %*	83	2,04	84	95,02	15.303,89	86	90,77	10.452,93	87	76,48	474,52	-	-	-	-						*26.231,34*	
93	**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase luas permukiman yang tertata (%)**	**(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77,34**	**7.737,90**	**78,34**	**13.466,89**	**79,34**	**7.500,00**			**79,34**	**28.704,79**	
94	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)**	**(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar/ jumlah bangunan pemerintah yang ada) x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87**	**9.745,91**	**88**	**15.506,74**	**89**	**15.695,29**			**89**	**40.947,94**	
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	**(jumlah bangunan yang direkomendasi / jumlah bangunan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**64**		**65**		**66**				**66**		

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program lingkungan sehat perumahan (PD)	*Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)*	*(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak / Jumlah RT) x 100 %*	83	2,04	84	84	2.009,37	86	86	2.267,13	87	87	2.122,14	-	-	-	-	-	-	-	6.398,64	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	*(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak / Jumlah RT) x 100 %*	76		77	77		78	78		81	81		-	-	-	-	-	-	-	-	
95	**Program pengembangan dan Pengelolaaan Sistem Air Limbah**	**Persentase Air limbah yang ditangani (%)**	**(Jumlah RT yang terlayani Sanitasi / Jumlah RT) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89**	**1.526,43**	**90**	**800,00**	**88**	**2.000,00**	**88**	**4.326,43**	PUPR
96	**Program pengembangan dan pengelolaaan sistem penyediaaan air minum**	**Persentase sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik (%)**	**(Jumlah sarana dan prasarana air minum dalam kondisi baik/ jumlah sarana dan prasarana air minum yang terpasang) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89**	**4.376,77**	**91**	**4.030,00**	**91**	**6.050,00**	**91**	**14.456,77**	
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	*Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)*	*Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)*	-	-	*600*	*0*	*4.407,12*	*600*	*97,1*	*1.370,64*	*650*	*590*	*599,55*	-	-	-	-	-	-	-	*6.377,31*	DINAS PERHUBUNGAN
		Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)	*Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)*	-	-	*2.736*	*0*		*2861*			*3011*	*2972*		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	*Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (dokumen)*	*(Jumlah sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia / Jumlah Sarana yang dibutuhkan) x 100 %*	-	-	-	*0*	-	-	*0*	-	*100*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	*Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)*	*(Jumlah sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik/ Jumlah Sarana prasarana perhubungan yang ada) x 100 %*	-	*37,69*	*80*	*80*	*14,97*	*80*	*60*	*124,62*	*80*	*60*	*99,03*	-	-	-	-	-	-	-	*238,62*	
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	*Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)*	*angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan x 100 %*	-	*212,79*	*1*	*1*	*42,55*	*1*	*0*	*96,84*	*1*	*1*	*22,30*	-	-	-	-	-	-	-	*161,69*	
	Program peningkatan pelayanan angkutan	*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%)*	*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum*	-	*4,70*	*30*	*30*	*6,49*	*30*	*25*	*8,10*	*35*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*14,59*	
		Persentase tingkat pelayanan angkutan umum (%)	*Persentase tingkat pelayanan angkutan umum*	-		*30*	*30*		*30*	*30*			*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor	*persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)*	*(Jumlah Kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor/jumlah kendaraan bermotor) x 100%*	-	*71,87*	*80*	*80*	*115,70*	*80*	*80*	*346,70*	*80*	*36*	*818,61*	-	-	-	-	-	-	-	*1.281,01*	
97	**Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)**	**Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun (n-1) - jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n/ jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-1 x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35**	**5.158,15**	**40**	**2.948,51**	**45**	**2.591,50**	**45**	**10.698,16**	
98	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**persentase sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia (%)**	**(jumlah sarana dan prasarana perkeretaapian yang tersedia/jumlah sarana prasarana perkeretaapian yang dibutuhkan) x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**200,00**	**45**	**145,00**	**65**	**165,00**	**65**	**510,00**	
	7.1.2. Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	n/a	7.481,94	0.47	0,47	1.207,40	0,49	0,49	2.133,00	0,51	0,44	1.175,47	0,53	15.510,71	0,55	1.796,53	0,57	2.728,43	0,57	23.530,09	
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD)	*Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun*	*Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun*	*3*	*3,00*	*3*			*3*	*0*	-	*3*	*3*	*44,22*	-	-	-	-				*44,22*	
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD)	*Persentase bencana yang tertangani sesuai standar*	*(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %*	-	-	*50*	*50*	*420,06*	*65*	*65,0*	*374,16*	*70*	*70*	*299,19*	-	-	-	-				*299,19*	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD)	*Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar*	*(Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar / Jumlah Sarana Prasarana) x 100 %*	-	-	*35*	*35*	*45,00*	*45*	*45,0*	*8,60*	*50*	*50*	*171,24*	-	-	-	-				*171,24*	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB	*Persentase ketersediaan aparatur kesiagaan Bencana*	*(Jumlah ketersediaan aparatur Kesiapsiagaan Bencana/Jumlah Aparatur kesiapsiagaan bencana) x 100 %*	-	-	*23*	-	-	*50*	-		*48*	*0*		-	-	-	-				-	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya	*(Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya (sertifikat)/Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana) x 100 %*	-	-	-	-	-	*10*	-	-	*12*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*KESBANGPOL*
	Program Penanganan tanggap Darurat	*Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani*	*(Jumlah kejadian Tanggap Darurat Tertangani/jumlah kejadian) x 100 %*								-		*0*	*0*	-	-	-	-					
	Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana	*Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana*	*(Jumlah perencanaan rehabilitasi yang terlaksana Jumlah Perencanaan Rehabilitasi) x 100 %*	-	*6.135,54*	*30*	-	-	*30*	*25,0*	*6,75*	*35*	*35*	*38,63*	-	-	-	-			-	*38,63*	
	Program Rekonstruksi Pasca Bencana	*Persentase Infrastruktur, Paskes, Pasos dan Pasum Pasca Bencana yang tertangani*	*Persentase Infrastruktur, Paskes, Pasos dan Pasum Pasca Bencana yang tertangani*	-	-	-	-	*56,47*	-	-	*115,61*	-	*30*	*481,23*	-	-	-	-			-	*481,23*	
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	*Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani*		-	-	-	-	*56,48*	-	-	-	-	-	*38,63*	-	-	-	-			-	*56,48*	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	*Jumlah keluarga terdampak*		-	*1.129,06*	-	-	-	-	*2,0*	*1.569,87*	-	-	-	-	-	-	-			-	*2.162,01*	
99	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase bencana yang tertangani sesuai standar**	***(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**14604,4498**	**100**	**1668,025**	**100**	**2.593,50**	**100**	**18.865,97**	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	*Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 %*	*Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 %*		*214,34*	*100*	*100*	*16,85*	*100*	*100*	*14,18*	*100*	*100*	*102,32*	-	-	-	-			-	*95,28*	
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	*Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)*	*Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)*			*100*	*100*	*20,41*	*100*	*100*	*43,83*	*100*	*100*	-	*100*	-	-	-	-	-	-	*146,15*	
100	**Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**Persentase penanganan kebakaran (%)**	***Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**906,26**	**100**	**128,50**	**100**	**134,93**	**100**	**1.169,69**	
		Persentase kerjasama penanganan pencegahan kebakaran (%)	***Jumlah kasus pencegahankebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kasus yang dilaporkan x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Sasaran 7.1.3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56,79	1.081,25	56,79	56,79	1.655,76	58,00	58,01	2.886,48	60,00	62,74	2.947,99		7.315,54		4.542,34		3.102,00		22.450,11	
			Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKL)												65,18		65,70		66,22		66,22		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD)	*Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)*	*(Jumlah Luas yang direklamasi / Luas Kewajiban Reklamasi) x 100 %*	*30*	-	*32*	*32*	*1,00*	*35*	*35*	*683,02*	*37*	*37*	*248,18*	-	-	-	-			-	*932,20*	
101	**Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)**	**Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**100,35**	**100**	**90,00**	**100**	**95,00**	**100**	**285,35**	
102	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh**	**Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**100,00**	**1**	**50,00**	**1**	**55,00**	**3**	**205,00**	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %	66,9	2.361,57	73,00	100,00	1.180,46	80,00	68,26	1.031,66	75,00	100,00	1.148,65	-	-	-	-	-	-	-	3.360,77	
		Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %	17,00		18,00	18,00		20,00	20,00		22,00	22,00		-	-	-	-	-	-	-		
103	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)**	**(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,10**	**4.830,89**	**76,00**	**2.767,76**	**77,00**	**825,00**	**77,00**	**8.423,66**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	**(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,00**		**21,00**		**22,00**		**22,00**		
	Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD)	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	65,00	220.43	70,00	81,25	110,28	72,00	81,36	304,52	75,00	82,61	802,78	-		-		-		-	*1.217,57*	
104	**Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan**	**(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**472,55**	**75,00**	**410,00**	**75,00**	**493,50**	**75,00**	**1.376,05**	DPMPTSP
105	**Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	**Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)**	**jumlah Kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan Usahax 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**16,00**	-	-	**75,00**	**33,00**	**75,00**	**49,00**	
106	**Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**	**jumlah usaha yang taat lingkungan/seluruh usaha yang berizin x 100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**128,78**	**75,00**	**40,00**	**75,00**	**44,00**	**75,00**	**212,78**	
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	*persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup*	*persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup*	*30,00*	*29,00*	*50,00*	*50,00*	*29,88*	*60,00*	*60,00*	*201,02*	*62,00*	*62,00*	*393,62*	-		-		-		-	*624,52*	
	Program Peningkatan pengendalian polusi	*Indeks Kualitas Air*	*Indeks Kualitas Air*	*56,25*		*56,25*			*56,25*	-	-	*56,40*	-	-	-		-		-		-		
		Indeks Kualitas Udara	*Indeks Kualitas Udara*	*84,56*		*84,56*			*84,56*	-	-	*84,56*	-	-	-		-		-		-		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	*Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	*36,85*		*36,85*	-	-	*36,85*	-	-	*36,95*	-	-	-		-		-		-		
	Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	*Persentase masyarakat yang perduli terhadap lingkungan*	*(Jumlah masyarakat yang peduli lingkungan / jumlah masyarakat kota) x 100 %*	*25,00*	*219.99*	*25,00*	*25,00*	*89,43*	*28,00*	*27,00*	*421,56*	*29,00*	-	-	-		-		-		-	*510,99*	
	Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD)	*Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota*	*(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %*	*15.86*	*1.052,25*	*16,00*	*16,00*	*244,71*	*17,00*	*17,00*	*244,71*	*18,00*	*18,00*	*354,76*	-		-		-		-	*844,17*	
107	**Program pengelolaaan Kenanekaragaman hayati (KEHATI)**	**Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)**	**(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**1.586,98**	**100,00**	**1.184,58**	**100,00**	**1.193,50**	**100,00**	**3.965,05**	
108	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)**	**Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup / Jumlah Dokumen Perencanaan yangmembutuhkan kajian lingkungan hidup x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**80,00**	-	-	**100,00**	**330,00**	**100,00**	**410,00**	
109	**Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)**	**Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**33,00**	**100,00**	**33,00**	
	Sasaran 7.1.4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	86,00	1.052,25	86,00	86,00	167,07	87,00	87,50	1.427,13	88,00	84,15	554,62	88,00	1.296,30	89,00	2.042,66	90,00	2.575,50	90,00	8.063,27	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)(PD)	*Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota*	*(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %*	*15,86*	*1.052,25*	*16*	*1*	*1,00*	*17*	*17*	*244,71*	*18*	*18*	*361,56*	-		-		-		-	*607,27*	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD)	*Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*	*61,28*		*61,56*	*61,56*	*130,47*	*62*	*61,88*	*449,16*	*63*	*62,12*	*47,58*	-		-		-		-	*627,21*	
	Program perencanaan Tata Ruang	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang*	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang*						*80*	-	-	*5*	-	-	-		-		-		-		
	Program pemanfaatan ruang	*Persentase bangunan ber IMB*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*			*61,56*	*61,56*	*28,29*	*62*	*61,87*	*415,93*	*63*	-	-	-		-		-		-	*444,22*	
110	**Program Penyelenggaraan penataan Ruang**	**Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang**	**(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan penataan ruang) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11,15**	**818,02**	**22,22**	**1.803,01**	**22,22**	**2.335,00**	**55,59**	**4.956,03**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	*Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)*	*Jumlah Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum dibagi dengan tanah budidaya x 100%*						*2*	*2*	*307,50*	*2*	*2*	*63,27*	-	-	-	-	-	-	-	*370,77*	DPKPPTR, DPUPR
111	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)**	**(Jumlah rekomendasi izin membuka tanah yang diterbitkan/ jumlah permohonan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**200,00**	**100**	**15,00**	**100**	**16,00**	**100**	**231,00**	
112	**Program Pendatagunaan Tanah**	**Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)**	**(Luas Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum / luas tanah budidaya) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**	**90,00**	**75**	**11,00**	**80**	**12,50**	**80**	**113,50**	
113	**Program pengelolaan izin lokasi**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan (%)**	**(Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan/ jumlah permohonan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**25,00**	-	-	**85**	**25,00**	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	*Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)*	*Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%*			*80*	*70*	*7,32*	*80*	*72,88*	*9,83*	*100*	*100*	*17,43*	-	-	-	-	-	-	-	*34,58*	
114	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)**	**Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi/dengan jumlah kasus pertanahan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**21,00**	**100**	**50,00**	**100**	**56,50**	**100**	**127,50**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	*Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilakukan (%)*							*80*	-	-	*80*	*56,25*	*64,78*	-	-	-	-	-	-	-	*64,78*	
115	**Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)**	**(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**117,28**	**100**	**115,98**	**100**	**130,50**	**100**	**363,75**	
116	**Program Penetapan Tanah Ulayat**	**Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)**	**Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan dibagi jumlah tanah ulayat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**50,00**	**100**	**22,67**	**100**	**25,00**	**100**	**97,67**	
	Sasaran 7.1.5 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6,40		6,40	6,40		5,40	5,40		4,40	11,29		10,08		8,90		7,50		7,50		
		Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42,58	140.98	22,81	42,58	120,94	15,00	9,96	8.392,58	10,00	133,21	2.263,41	83,54	9.285,15	72,93	4.618,10	19,08	6.235,00	19,08	30.915,18	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83,00		84,00	83,00		86,00	86,00		87,00	87,00		88,01		89,05		90,10		90,10		
	Program Pengembangan Perumahan (PD)	*persentase luas permukiman yang tertata*	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	56	-	60	-	-	65	65	7.687,70	70	82,21	1.541,75	-	-	-	-	-	-	-	9.229,46	
117	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)**	**Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**83,54**	**1.837,50**	**72,93**	**140,00**	**19,08**	**155,00**	**80**	**2.132,50**	
118	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)**	**(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75**	**602,50**	**80**	**1.900,00**	**85**	**830,00**	**85**	**3.332,50**	
119	**Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase PSU yang tertata (%)**	**Jumlah PSU yang tertata/ jumlah PSU x 100%**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75**	**5.659,70**	**80**	**1.630,00**	**85**	**5.000,00**	**85**	**12.289,70**	DPKPPTR
	Program Pemeliharaan Rum	*Persentase Tingkat Keterhunian*	*(Jumlah Kamar di di Rusunawa yang d*	*88*	*140.98*	*85*	*85*	*120,94*	*96*	*77,31*	*554,88*	*97*	*89,71*	*527,00*	-	-	-	-	-	-	-	*1.202,81*	
	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	*Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)*	*Jumlah Rumah yang direhabilitasi / Jumlah yang terkena bencana)*						100	100	150,00	100	100	194,66	-	-	-	-	-	-	-	*344,66*	
120	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)**	**Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/ Jumlah rumah yang terkena bencana) x 100%**	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**1.185,45**	**85,00**	**948,10**	**90,00**	**250,00**	**90,00**	**2.383,55**	
	Misi 8 Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya																						

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Tujuan 8.1. Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	95,52	2.498,60	95,53	95,68	2.603,16	95,54	95,51	2.811,09	95,55	95,48	1.000,81	95,50	2.938,38	95,51	1.620,16	95,52	2.249,48	95,52	13.223,08	
	Sasaran 8.1.1. Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	18,64	1.744,15	13,17	13,17	1.901,25	59,76	63,60	1.776,84	84,89	#REF!	659,28	89,84	1.645,56	94,78	1.276,16	100,00	1.404,50	100,00	8.663,59	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	*Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi*	*Jumlah masyarakat miskin yang terfasilitasi /jumlah total masyarakat miskin x 100%*	*60*	*517,53*	*64*	*63*	*731,49*	*69*	*65*	*416,68*	*74*	*70*	*185,08*	-	-	-	-	-	-	-	1.333,24	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	*Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi*	*Jumlah penyandang sosial yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang sosial x 100%*	*15*	*75,34*	*20*	*10*	*51,49*	*25*	*15*	*33,77*	*25*	*5*	*2,02*	-	-	-	-	-	-	-	87,29	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Para Penyandang Cacat dan Trauma	*Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi*	*Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) x 100%*	*18,64*	*78,16*	*13,7*	*7,9*	*60,37*	*59,76*	*24,1*	*563,77*	*84,89*	*12,24*	*114,99*	-	-	-	-	-	-	-	739,12	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dibina*	*Jumlah anak terlantar yang dibina/ jumlah anak terlantar x 100%*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi**	**Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89,84**	**1.220,69**	**100**	**620,64**	**100**	**702,50**	**100**	**2.543,83**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	*Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi*	*Jumlah masyarakat miskin yang terfasilitasi /jumlah total masyarakat miskin x 100%*	*60*	*517,53*	*64*	*63*	*731,49*	*69*	*65*	*416,68*	*74*	*70*	*185,08*	-	-	-	-	-	-	-	1.333,24	DINSOSPMDPPA
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Panti Asuhan/ Panti Jompo	*Persentase panti asuhan/ jompo yang terfasilitasi*	*Jumlah panti asuhan- jompo yang terfasilitasi / jumlah total panti asuhan-jompo x 100%*	*100*	*314,50*	*100*	*100*	*185,42*	*100*	*100*	*144,50*	*100*	*100*	*98,51*	-	-	-	-	-	-	-	428,43	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dibina*	*Jumlah anak terlantar yang dibina/ jumlah anak terlantar x 100%*	*0*	-	*0*	*0*	-	*0*	*0*	-	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)**	**Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial /jumlah total PMKS x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**33,89**	**100**	**50,00**	**100**	**72,50**	**100**	**156,39**	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	*Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif*	*Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif / jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ada x 100%*	*75*	*241,09*	*80*	*0*	*140,99*	*85*	*0*	*201,44*	*87*	*0*	*73,61*	-	-	-	-	-	-	-	416,04	
123	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan**	**Jumlah PSM & TKSK yang diberdayakan /jumlah total PSM & TKSK x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**307,12**	**100**	**534,37**	**100**	**437,50**	**100**	**1.278,99**	
124	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)**	**Jumlah penanganan bencana alam yang terfasilitasi/ jumlah bencana alam x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**-**	**100**	**39,96**	**100**	**64,00**	**100**	**103,96**	
125	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi**	**Jumlah TMP yang terfasilitasi / jumlah TMP x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**83,86**	**100**	**31,19**	**100**	**128,00**	**100**	**243,05**	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Sasaran 8.1.2. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,52	754,45	95,53	95,68	701,91	95,54	95,51	1.034,25	95,55	95,48	341,53	95,50	1.292,82	95,51	344,00	95,52	844,98	95,52	4.559,49	
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	*Indek Pemberdayaan Gender (IDG)*	*Nilai indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik*	*65,86*	*579,42*	*65,6*	*65,33*	*485,22*	*65,61*	*66,18*	-	*65,62*	*65,86*	*159,55*	-	-	-	-	-	-	-	-	*644,77*	DINSOSPMDPPA
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	*Anugerah Parahita Ekapraya (APE)*	*Anugerah bagi daerah yang sukses melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan dari segi gender dari KemenPPPA*	-	*175,04*	*0*	-	*216,69*	*0*	*0*	-	*pratama*	*pratama*	*181,98*	-	-	-	-	-	-	-	*398,67*	
126	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	***Indek Pemberdayaan Gender (IDG)***	***Nilai indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65,63**	**400,01**	**66**	**71,67**	**65,65**	**346,00**	**100**	**817,68**	
	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	*Persentase kasus perempuan yang tertangani*	*Kasus pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan atau tidak*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	*801,57*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	*801,57*	
127	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)**	**(Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani/jumlah kasus kekerasan perempuan)x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**145,07**	**100**	**160,80**	**100**	**170,20**	**100**	**476,07**	
128	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)**	**Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**523,98**	**100**	**88,59**	**100**	**236,50**	**100**	**849,07**	
	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	*Tingkat capaian Kota layak Anak*	*Anugerah yang diberikan kepada daerah yang berhasil dalam pembinaan layak anak*	*Nindya*	-	*Nindya*	*Nindya*	-	*Nindya*	*Nindya*	*232,69*	*Utama*	*Nindya*	-	-	-	-	-	-	-	-	*232,69*	
129	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak anak (%)**	**Pencapaian hasil penilaian Kota Layak Anak**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Nindya**	**101,56**	**utama**	**14,09**	**utama**	**82,78**	**utama**	**198,43**	
130	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase perlindungan khusus bagi anak (%)**	**Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus/jumlah kasus pada anak x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**122,21**	**100**	**8,85**	**100**	**9,50**	**100**	**140,56**	
	Misi 9 : Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor																						
	Tujuan 9.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	4.604,00	57,64	52,22	3.305,43	63,41	52,61	4.708,96	69,18	52,77	5.472,39	52,93	3.120,71	60,05	4.138,72	61,54	2.900,00	61,54 (B)	23.646,21	
	Sasaran 9.1.1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	n/a	4.604,00	2,30	1,87	3.305,43	2,70	2,45	4.708,96	3,00	2,88	5.472,39	2,92	3.120,71	2,96	4.138,72	3,10	2.900,00	3,10	23.646,21	
	Program kerjasama informasi dengan media massa	*Jumlah media massa yang bek*	*Jumlah media massa yang bekerjasam*	*12*	*111,00*	*12*	*12*	*250,00*	*12*	*11*	*642,86*	*11*	*11*	*663,48*	-	-	-	-	-	-	-	*1.556,34*	
	Program pengembangan komunikasi, informasi dengan media massa	*Persentase OPD yang menggun*	*(Jumlah OPD yang sudah meggunakan*	*10*	*1.800,00*	*15*	*15*	*1.500,00*	*30*	*30*	*1.600,00*	*50*	*50*	*1.650,00*	-	-	-	-	-	-	-	*4.750,00*	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD)	*Persentase OPD yang menggunakan Sistem informasi Pemerintahan yang berbasis TIK*	*(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %*	10	1.800,00	15	10	1007,28	30	10	1.072,96	45	26	902,14	-	-	-	-	-	-	-	*2.982,38*	
		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	*(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %*	-		10	0		30	0		60	0		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	*Jumlah media massa yang bekerjasama*	*Jumlah media massa yang bekerjasama*	12	111,00	12	11	511,81	11	11	554,65	11	20	331,46	-	-	-	-	-	-	-	*1.397,92*	
	Program Peningkatan Konektifitas Intra dan Antar SKPD	*Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain*	*Terwujudnya jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi*						26	13	691,79	26	26	1.902,22	-	-	-	-	-	-	-	*2.594,01*	

No	Misi/Tujuan/ Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional/ Rumus Penghitungan	Kondisi Awal 2017		Realisasi									Target						Kondisi Akhir		PD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Realisasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (juta)	
							Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)		Kinerja	Anggaran Rp. (juta)									
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
131	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)**	**(Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	559,87	85	450,00	95	500,00	95	1.509,87	SETDAKO, Setwan
		Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	**Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	377,94	-	-	-	-	3	377,94	
132	**Program Aplikasi Informatika**	**Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)**	**(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	2.043,86	85	3155,68	95	2.200,00	95	7.399,54	
	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	*Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)*	*Ketersediaan data Statistik daerah dan OPD (termasuk kerjasama BPS)*	*85*	*282*	*85*	*85*	*13,99*	*86*	*86*	*125,29*	*87*	*87*	*8,99*	-	-	-	-	-	-	-	*148,27*	
	Program Pengembangan Data dan Informasi	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)*	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)*	*28*	*500*	*28*	*Tidak digunakan*		*28*	*0*	*0*	*28*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	
133	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	75,50	88	469,50	90	125,00	90	670,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	*Terwujudnya pengamanan informasi pemerintah daerah*		-	-	*12*	*12*	*22,35*	*12*	*12*	*21,41*	*12*	*12*	*14,1*	-	-	-	-	-	-	-	*57,86*	
134	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)**	**Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	63,55	12	63,55	12	75,00	36	202,09	
					522.380,94			**518.069,93**			**551.743,88**			**576.857,86**		**647.207,57**		**612.458,58**		**596.894,44**			

6.2. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SDG's

Berdasarkan Dokuemn Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto, direkomendasikan beberapa arah kebijakan dan program yang relevan dengan merujuk kepada hasil ketidaktercapaian indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kota Sawahlunto, yakni untuk indikator yang belum mencapai target (capaian SB) dan indikator yang belum memiliki data (NA). Maka berdasarkan TPB strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rekomendasi Arah Kebijakan Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDG's

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
1	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat	**Program** Pembinaan Keluarga Berencana
3	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia 2. Menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK) 3. Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat **Kegiatan** Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat)
4	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1. Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui 2. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
6	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	1. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat 2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran 3. Menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	**Program** Pembinaan Keluarga Berencana
8	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1. Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan 2. Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui 3. Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik	**Program** Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1. Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat 2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran	**Program** Pembinaan Keluarga Berencana

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
11	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana	**Program** Penanganan Bencana
12	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana 2. Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	1. Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 2. meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana 3. Meningkatkan kesadaran masayarakat dalam mengantisipasi bencana 4. Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana 5. Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana 6. Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 3. Program Pengembangan Permukiman 4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Lingkungan Hidup 6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
		8. Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana 9. Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	
14	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
15	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
16	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum **Kegiatan** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
17	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
18	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik 2. Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
		3. Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak	
19	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan /desa) yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah	**Program** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
20	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utama dan penunjang pendidikan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik 3. Optimalisasi koordinasi lintas sektor terkait 4. Fasilitasi pemberian beasiswa dengan para pihak	**Program** Pengelolaan Pendidikan
21	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/Madrasah Aman Bencana)	Meningkatkan koordinasi dalam menyediakan pendidikan layanan khusus	
22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utama dan penunjang pendidikan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik 3. Optimalisasi koordinasi lintas sector terkait 4. Fasilitasi pemberian beasiswa dengan para pihak	**Program** Pengelolaan Pendidikan
23	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utama dan penunjang pendidikan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik 3. Optimalisasi koordinasi lintas sector terkait 4. Fasilitasi pemberian beasiswa dengan para pihak	**Program** Pengelolaan Pendidikan
24	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini	**Program** Pengelolaan Pendidikan

No	Indikator TPB	REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90/2019
		2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidik PAUD	
25	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana utama dan penunjang pendidikan 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya pendidik 3. Optimalisasi koordinasi lintas sector terkait 4. Fasilitasi pemberian beasiswa dengan para pihak	**Program** Pengelolaan Pendidikan
26	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	1. Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 2. Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan	**Program** Pendidik dan Tenaga Kependidikan
27	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan	**Program** Pengelolaan Pendidikan
28	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman 2. Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh 3. Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh	**Program** Pengembangan Perumahan
29	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	1. Menyediakan pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 2. Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial	**Program** Penanganan Bencana

6.3 DUKUNGAN PROGRAM KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP PROGRAM UNGGULAN SUMATERA BARAT

Pada bab sebelumnya disandingkan penyelarasan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto. Dengan adanya keselarasan antara visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto dengan Provinsi Sumatera Barat, secara tidak langsung beberapa program prmbangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto dapat mendukung Program-program unggulan di Provinsi Sumatera Barat. Berikut pemaparan program-program unggulan Kota Sawahlunto yang selaras dengan Progul Provinsi Sumatera Barat.

1. Sumbar Sehat dan Cerdas

Adapun dukungan program Kota Sawahlunto yang selars adalah sebagai berikut:

1. Reward bagi Mahasiswa yang lulus di Perguruan Tinggi dengan akreditasi A dan B Negeri dan Swasta
2. Reward Nilai IP bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan akreditasi A dan B Negeri dan Swasta
3. Program bantuan sarana prasarana sekolah bagi siswa baru kelas 1 SD dan SMP

2. Sumbar Religius dan Berbudaya

Adapun bentuk program Kota Sawahlunto yang selaras adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan bagi Siswa berprestasi yang Lulus pengujian Tahfidz SD dan SMP
2. Peningkatan Kompetensi guru Tahfidz
3. Pemberian Honorarium Bagi Imam Masjid, Muadzin, Garim, Guru TPQ, Guru Tahfizdz, Penyelenggaraan Jenazah seluruh Masjid dan Mushola Kota sawahlunto
4. Penataan Kawasan dan Lingkungan/Penataan Lingkungan dan Fasilitas Penunjang Pelestarian Situs Warisan Dunia UNESCO

3. Sumbar Sejahtera

Adapun dukungan program Kota Sawahlunto yang selaras adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sarana prasarana Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2. Revitalisasi Tanaman Kakao
3. Bantuan Ternak Kambing, ayam dan Itik kepada Masyarakat
4. Pengembangan Kawasan/Nagari/ Desa/Kel Mandiri Pangan
5. Pembinaan kelembagaan dan penguatan sarana dan prasarana sentra IKM
6. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pelaku IKM dan UMKM
7. Pengembangan BLK serta Pelatihan Berbasis Kompetensi
8. Fasilitasi Permodalan melalui BLUD Dana Bergulir
9. Perencanaan Kawasan strategis Pariwisata Kota Sawahlunto untuk kelengkapan Pengusulan UGG
10. Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan strategis dan Geopark Sawahlunto
11. Peningkatan Kualitas Pelaku ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto

4. Sumbar Berkeadilan

Pembangunan di berbagai bidang mensyaratkan daya dukung infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat pergerakan orang dan barang untuk pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Adapun dukungan program Kota Sawahlunto yang selaras adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Jalan Aksesibilitas Kota Sawahlunto ke Daerah Tetangga seperti Jalan Provinsi Ruas Guguk Cino - Sawahlunto via Padang Ganting dan Jalan Ruas Kolok Nan Tuo - Sulit Air
2. Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo
3. Bantuan sarana prasarana pengangkutan dan Pengelolaan sampah
4. Percepatan Reaktivasi Kereta Api Padang-Padangpanjang-Muarokalaban-Sawahlunto

6.4 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

6.4.1 Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian

Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pertanian yang memiliki prospek dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sangat diperlukan dalam pembangunan daerah. Propinsi Sumatera Barat pengembangan kawasan sentra produksi pertanian diarahkan untuk mengoptimalkan sumberdaya pembangunan berdasarkan keunggulan wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil pertanian agar dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk Kota Sawahlunto pengembangan kawasan sentra produksi pertanian dibagi menjadi :

1. Kawasan tanaman pangan dan hortikultura
2. Kawasan perkebunan
3. Kawasan Peternakan
4. Kawasan Agrowisata

Adapun pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura di Kota Sawahlunto seperti tabel dibawah ini :

Tabel.6.4 Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Padi	Talawi Mudik, Talawi Hilir, Bukik Gadang, Kumbayau, Tumpuak Tangah, Datar Mansiang, Batu Tanjung, Sijantang Koto, Salak, Rantih
		Kolok Nan Tuo, Kolok Mudik, Santur, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Lumindai
		Lunto Barat, Lunto Timur, Kubang Tangah
		Silungkang Oso, Silungkang Duo, Muaro Kalaban, Taratak Bancah
2.	Jagung	Talawi Mudik, Batu Tanjung, Tumpuak Tangah

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
		Kolok Mudik
3.	Jeruk	Kolok Nan Tuo, Kolok Mudik, Santur, Talawi Mudik, Talawi Hilir, Bukik Gadang, Batu Tanjung, Kumbayau, Tumpuk Tangah
4.	Pisang	Bukik Gadang
5.	Manggis	Lumindai, Balai Batu Sandaran, Lunto Timur, Lunto Barat, Kubang Tangah, Kubang Utara Sikabu, Pasar Kubang
6.	Sayuran	Talawi Mudik, Tumpuk Tangah, Kumbayau
		Kolok Nan Tuo
		Kubang Tangah, Kubang Utara Sikabu
		Silungkang Duo, Silungkang Oso
7.	Bawang Merah	Kubang Tangah
		Talago Gunung, Kolok Mudik, BBS
		Silungkang Oso, Muaro Kalaban
8.	Cabe	Talawi Mudik, Tumpuk Tangah, Talawi Hilir, Kumbayau
		Kolok Nan Tuo, Santur, Lumindai
		Kubang Tangah
		Taratak Bancah, Muaro Kalaban, Silungkang Oso
9.	Durian	Kubang Tangah, Kubang Utara Sikabu, Pasar Kubang
10.	Jahe	Bukik Gadang dan Aur Mulyo

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Kawasan budi daya hortikultura meliputi tanaman buah dan tanaman sayuran di Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Silungkang, dan Kecamatan Talawi. Selanjutnya Kawasan pengembangan sentra produksi perkebunan di Kota Sawahlunto diarahkan pada Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar, Kecamatan Silungkang, dan Kecamatan Talawi, dengan uraian lokasi desa/kelurahan seperti tabel dibawah ini :

Tabel. 6.5

Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Karet	Tumpuk Tangah, Kolok Nan Tuo, Kubang Sirakuk Selatan
2.	Kelapa Dalam	Tumpuak Tangah, Kumbayau

3.	Kakao	Kubang Tangah, Pasar kubang, Kubang Utara Sikabu
4.	Kopi (Robusta)	Muaro Kalaban
5.	Kopi (Arabika)	Lumindai
6.	Enau	Lumindai
7.	Pala	Lunto Barat
8.	Cengkeh	Lumindai
9.	Sereh Wangi	Balai Batu Sandaran
10.	Kemiri	Taratak Bancah
11.	Tembakau	Lumindai
12.	Pinang	Saringan

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel diatas untuk komoditi karet dan kakao lebih banyak penyebaran di Kota Sawahlunto dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya, sehingga untuk pengembangan sentra produksi perkebunan di arahkan pada komoditi karet dan kakao. Adapun untuk sub sektor peternakan kawasan pengembangan sentra produksi peternakan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6.6

Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Peternakan

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Sapi	Talawi, Lumindai, Talago Gunung
2.	Kerbau	Talawi, Kolok Mudik, Kolok Nantuo, Lunto Timur/Barat
3.	Unggas	Santur, Kolok Mudik, Kolok Nantuo, Talawi, Talago Gunung
4.	Kambing	Santur, Kolok Mudik, Kolok Nantuo, Durian I, Durian II, Saringan, Lubang Panjang, Kubang Utara Sikabu

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Untuk pengembangan kawasan sentra produksi peternakan diarahkan pada kambing dan unggas dengan lokasi pengembangan pada Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Talawi.

b. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Perikanan

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga budidaya laut, budidaya

tambak dan budidaya air tawar. Kriteria untuk kawasan pengembangan budidaya air tawar dan tambak adalah sebagai berikut :

- Kelerengan lahan < 8 %
- Persedian air cukup
- Jauh dari sumber pencemaran, baik pencemaran domestik maupun industri
- Kualitas air baik (memenuhi kriteria kualitas air untuk budidaya perikanan)

Untuk Kota Sawahlunto kawasan untuk pengembangan sentra produksi perikanan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.7

Kawasan Pengembangan Sentra Produksi Perikanan

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Ikan Nila	Desa Talawi Hilir, Desa Talawi Mudik, Desa Kumbayau, Desa Bukik Gadang, Desa Datar Mansiang, Desa Tumpuak Tangah, Desa Batu Tanjung, Desa Sikalang, Desa Salak, Desa Rantih dan Desa Sijantang Koto Kecamatan Talawi, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Lumindai, Desa Talago Gunung, Desa Santur, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Kolok Mudik, Kelurahan Durian I, Kelurahan Durian II, Kelurahan Lubang Panjang, Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin, Desa Lunto, Desa Pasa Kubang, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar.
2.	Ikan Mas	
3.	Ikan Lele	
4.	Ikan Gurami	

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pengembangan sentra produksi perikanan di Kota Sawahlunto berada pada kawasan Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar dengan komoditi ikan Nila, IKan Mas, Ikan Lele dan Ikan Gurame. Lima Tahun terakhir produksi ikan yang paling banyak yaitu untuk ikan nila dan ikan lele yang tersebar di empat kecamatan yang ada.

c. Kawasan Pengembangan Lingkungan Agrowisata

Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kota Sawahlunto mempunyai kawasan agrowisata dengan komoditi tanaman hortikultura yang akan dilakukan pengembangannya, seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.8

Kawasan Pengembangan Lingkungan Agrowisata

NO	KOMODITI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Tanaman Hortikultura	Kebun Buah Kandi, Desa Salak Kecamatan Talawi

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Kawasan pengembangan lingkungan agrowisata di Kota Sawahlunto terdapat pada kawasan kecamatan talawi tepatnya di Desa Salak yang berupa kebun buah dengan berbagai jenis buah yang ditanam dengan konsep wisata, dimana pengunjung ikut terlibat secara langsung dalam proses budidaya tanaman hortikultura sampai pasca panennya. Untuk saat ini pengembangan kawasan agrowisata di Kota Sawahlunto hanya difokuskan pada tanaman hortikultura.

d. Kawasan Sentra Industri

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Rencana pengembangan kawasan dan sentra industri Provinsi Sumatera Barat untuk lokasi Kota Sawahlunto diarahkan pada industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan minyak atsiri dan industri pengolahan tekstil dan produk tekstil. Dengan rencana pengembangan dari Provinsi tersebut maka Kota Sawahlunto mengarahkan pengembangan kawasan sentra industri seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.9

Kawasan Pengembangan Sentra Industri

NO	SENTRA INDUSTRI	LOKASI KAWASAN (DESA/KELURAHAN)
1.	Industri Pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	Kecamatan se Kota Sawahlunto
2.	Industri Kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	Kecamatan Lembah Segar
3.	Industri Air Minum dan Air Mineral	Kecamatan se Kota Sawahlunto
4.	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Desa Batu Tanjung, Desa Talawi Hilir Kecamatan Talawi
5.	Industri Kain Rajutan	Desa Talago Gunung, Desa Santur Kecamatan Barangin
6.	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Kecamatan se Kota Sawahlunto
7.	Industri Tempe Kedelai	Desa Sikalang, Kecamatan Talawi
8.	Industri Produk Roti dan Kue	Kecamatan se Kota Sawahlunto
9.	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Kecamatan se Kota Sawahlunto
10.	Industri Tahu Kedelai	Kecamatan Barangin, Kecamatan Lembah Segar
11.	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan	Kecamatan Barangin
12.	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Kecamatan Talawi
13.	Industri Pengolahan lainnya YTDL	Desa Lunto Barat dan Desa Lunto Timur Kecamatan Lembah Segar

14.	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi
15.	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Silungkang
16.	Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya YTDL	Kelurahan Tanah Lapang, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar
17.	Industri Minyak Goreng Kelapa	Desa Talawi Mudik Kecamatan Talawi
18.	Industri Produk Obat Tradisional	Kecamatan Talawi
19.	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk	Kecamatan Lembah Segar
20.	Industri Pengolahan Kopi	Kecamatan Silungkang
21.	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	Kecamatan Barangin
22.	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin
23.	Industri Minyak Atsiri	Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin
24.	Industri Minuman Ringan	Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang
25.	Industri Tepung Terigu	Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang
26.	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Kecamatan Talawi
27.	Industri Gula Merah	Desa Luimindai Kecamatan Barangin
28.	Industri Madu	Desa Santur Kecamatan Barangin

Sumber Data : Dinas Koperasi IKM Perindustrian dan Perdagangan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk kawasan pengembangan sentra industri Kota Sawahlunto diarahkan pada empat kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto dengan 28 jenis industri. Untuk itu kebijakan untuk industri diarahkan pada lokasi kawa

6.4.2 Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kota

Kota Sawahklunto termasuk salah satu Kawasan Pengembangan destinasi pariwisata pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Upaya pengembangan destinasi untuk menuju destinasi berstandar nasional, ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	DAYA TARIK WISATA UNGGULAN	PERWILAYAHAN
1.	Kota Bukittinggi	Kawasan Ngarai Sianok	KSPP Bukittinggi dskt.
2.	Kota Padang	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	KPPP Pantai Padang Kota Tua dskt.
3.	Kota Sawahlunto	Kawasan OCMH (Wisata Kandih)	KSPP Sawahlunto dskt.
4.	Kota Padang Panjang	Kawasan PDIKM	KPPP Istano Basa Pagaruyuang – Nagari Tuo Pariangan - PDIKM dskt.
5.	Kota Payakumbuh	Kawasan Wisata Kuliner Dan Kota Randang	Gastrowisata Payakumbuh dskt.
6.	Kota Solok	Kawasan Pulau Belibis	KPPP Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dskt.
7.	Kota Pariaman	Kawasan Pulau Angso Duo	KPPP Pantai Gandoriah – Tiram – dskt.
8.	Kab. Agam	Kawasan Wisata Danau Maninjau	KSPP Maninjau dskt.
9.	Kab. Pesisir Selatan	Kawasan Kesultanan Indrapura	KSPP Mandeh dskt.
10.	Kab. Lima puluh Kota	Kawasan Geopark Harau	KPPP Harau – Kelok Sembilan – Ngalau Indah dskt.
11.	Kab. Solok	Kawasan Geopark Singkarak (Geosite Gunung Talang)	KSPP Danau Kembar dskt.
12.	Kab. Padang Pariaman	Kawasan Wisata Lubuk Nyarai	KPPP Malibo Anai – Nyarai dskt.
13.	Kab. Sijunjung	Kawasan Geopark Silokek	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
14.	Kab. Tanah Datar	Kawasan Geopark Singkarak (Istano Basa Pagaruyuang)	KSPP Singkarak dskt
15.	Kab. Solok Selatan	Kawasan Saribu Rumah Gadang	KPPP Saribu Rumah Gadang – Goa Batu Kapal – TNKS dskt.
16.	Kab. Dharmasraya	Kawasan Wisata Sehiliran batang hari	KPPP Silokek – Kampung Padang Ranah – Cando Padang Roco dskt.
17.	Kab. Pasaman	Kawasan Wisata Equator Bonjol	KPPP Taman Equator – Rimbo Panti dskt.
18.	Kab. Pasaman Barat	Kawasan Gunung Talamau	KPPP Pantai Sasak – Talamau dskt.
19.	Kab. Mentawai	Kawasan wisata 3M1K	KSPP Siberut dskt.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto juga telah menetapkan Kawasan strategis Pariwisata Kota (KSP) sesuai Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Riparda). Pada RIPARDA tersebut dijelaskan bahwa Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kriteria penetapan KSP Kota yaitu:

1) Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata.
2) Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarikwisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
3) Komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan.
4) Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah.
5) Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.

6) Memiliki potensi pasar, baik skala daerah, regional, nasional dan internasional serta potensi tren produk wisata masa depan.
7) Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional.
8) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
9) Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya.
10) Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
11) Memiliki kekhususan dari wilayah.
12) Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional.

Berdasarkan kriteria di atas maka Kota Sawahlunto di tetapkan 3 (tiga) kawasan strategis pariwisata yang tersebar di seluruh destinasi Pariwisata Kota Sawahlunto, yaitu:

1. **Kawasan Strategis Pariwisata Kota Lama (Living Culture dan Heritage)** yang selanjutnya ditetapkan sebagai Area A penetapan Omciln Coal Minning Heritage of Sawahlunto (OCMHS)

   Kawasan ini yang terletak pada kawasan pusat Kota Sawahlunto yang berjarak ± 95 km dari Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat merupakan kota tua yang memiliki nilai sejarah pemandangan alam dan bangunan tua yang menjadi daya tarik wisata berbeda di Provinsi Sumatera Barat.

   Kawasan Kota Lama ini terintegrasi dengan berbagai kawasan peninggalan bersejarah sebagai Kota Tambang pada zaman kolonial Belanda seperti Lubang Tambang Mbah Soero, Kawasan Museum Gudang Ransoem, Museum Kereta Api dan kawasan lainnya.

   Berbagai aktivitas wisata menarik dapat dilihat pada kawasan Kota Lama ini dari mengunjungi bangunan tua, menyusuri lubang tambang sampai menyaksikan keindahan alam Kota Sawahlunto.

   Pada kawasan kota lama ini juga terdapat objek wisata sejarah yang sedikit menyimpan suasana mistik. Objek wisata yang merupakan lubang bekas galian tambang ini merupakan nama seorang mandor dari Jawa yang diperkerjakan oleh Belanda yaitu mbah Soerono yang lebih akrab dipangil Mbah Soero. Lubang ini merupakan salah satu bukti kekejaman tentara Belanda yang menjelajah Indonesia pada waktu itu.

   Selain menikmati kawasan Kota Tua kawasan Kota Tua ini juga terdapat wisata pendidikan/ilmu pengetahuan sejarah berupa Museum Kereta Api dimana Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia menjadikan Stasiun Kerta Api Sawahlunto sebagai Museum Kereta Api kedua di Indonesia setelah Ambarawa. Memiliki koleksi rangkaian gerbong kereta dari berbagai zaman dan miniatur lokomotif uap.

2. **Kawasan Strategis Kandi,** yang juga ditetapkan sebagai Daya tarik Wisata Unggulan Kota Sawahjlunto ditingkat Provinsi sumatera Barat. Kawasan taman rekreasi ini yang memiliki luas ± 5 ha ini merupakan salah satu kawasan wisata buatan (*artificial tourism objects*) yang memiliki nilai wisata jual yang sangat tinggi.

   Berada satu kawasan dengan kawasan camping ground Kandi, kawasan kandi ini juga terdapat koleksi satwa mencapai 108 ekor seperti Gajah Sumatera, Beruang, Burung-Burung langka dan satwa lainnya.

   Pengembangan danau buatan sebagai kawasan rekreasi air ini adalah dalam rangka peningkatan ruang terbuka hijau, pengendalian banjir, peningkatan resapan air kota, dan sebagai Cadangan Air di Musim Kemarau. Pengembangan danau buatan ditetapkan untuk menunjang pengembangan taman rekreasi kota dan pendidikan *Aqua Culture*.

   Pengembangan Hutan kota berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tangkapan air,juga berfungsi untuk memperbaiki kualitas udara dan keindahan atau landscape

kota. Hutan kota dikembangkan juga sebagai obyek wisata dan pendidikan, sehingga hutan kota dapat dikembangkan sebagai "*Botanical Garden*". Hutan kota ditanami dengan tanaman keras/ tahunan yang dapat menunjang estetika kota dan pelestarian/pengembangan tanaman durian kubang.

3. Kawasan Strategis Waterboom,

Kawasan waterboom yang merupakan salah satu kawasan wisata buatan (*artificial tourism objects*) ini terletak di Desa Muara kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan jarak ±100 km dari Kota Padang dan 40 Km dari Kota Solok.

Kawasan wisata ini merupakan salah satu kawasan wisata *favorite* yang terletak di ruas jalan lintas sumatera, dengan berbagai wahana air yang tersedia.

4. Kawasan Strategis Kampung Tenun

Kampung tenun songket ini terletak di Kecamatan Silungkang sebagai pusat industri kain songket dan ikon dari daerah Silungkang sebagai konteks desa wisata. Perkampungan tenun songket yang memiliki motif yang khas dari songket ikad, songket batabua dll.

Kawasan desa wisata/kampung tenun menjadi bagian daya tarik Kota Sawahlunto, pengembangan pariwisata di kawasan ini bukan saja terbatas pada pengembangan tenun songket tetapi juga ataraksi lainnya, sehingga bukan semata *something to see* dan *something buy* tetapi ada *something to do* bagi siapapun yang datang ke Kawasan Kampung Tenun Silungkang, termasuk kegiatan *tracking* dan kuliner.

Dalam hal penetapan kawasan strategis pariwisata ini menjadi lebih terfokus, juga ditetapakn Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Destinasi Pariwisata Kota (DPK) berskala Kecamatan yaitu sebagai berikut:

1. Destinasi Pariwisata Kota (DPK) 1, meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) :
   a. Kawasan Pasar Remaja;
   b. Kawasan Pasar Sawahlunto;
   c. Kawasan Sungai Batang Lunto;
   d. Kawasan Museum Kereta Api ;
   e. Kawasan Mesjid Agung;
   f. Kawasan Lubang Tambang Mbah Suro;
   g. Kawasan Museum Gudang Ransum;
   h. Kawasan Iptek center;
   i. Kawasan Panorama Kelok 16;
   j. Kawasan Lubang Kalam Sawahlunto;
   k. Kawasan Panorama Puncak Polan;
   l. Kawasan Panorama Puncak Nan Tigo/Teletubies;
   m. Kawasan Makam Keramat Syeh Tumpok;
   n. Kawasan Kampung Tenun Lunto; dan
   o. Kawasan Panorama bukik ancoliang.

   Dengan pusat pelayanan Kawasan Lembah Segar

2. Destinasi Pariwisata Kota (DPK) II, meliputi Kawasan Pengemangan Pariwisata (KPP) :
   a. Waterboom;
   b. Panorama Puncak Sawter;
   c. Kampung Tenun Durian Godang;
   d. Kampung Tenun Batu Manounggau;
   e. Kampung Tenun Tanah Sirah;
   f. Kampung Tenun polak kiyambi;
   g. Panorama Batu runciang; dan
   h. Kuliner Cinto Moni.

   Dengan pusat pelayanan kawasan Muara Kalaban

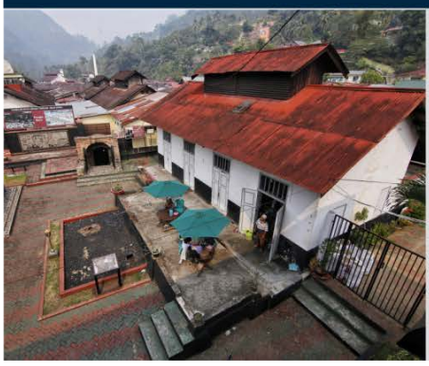
3. Destinasi Pariwisata Kota (DPK) III, meliputi Kawasan Pengemangan Pariwisata (KPP) :

a. Panorama Agrowisata Atsiri;
b. Situs Batu Sandaran;
c. Puncak Turoguong;
d. Goa Batu Kudo;
e. Goa Lakuak Kuali;
f. Goa Janjian/Slamet;
g. Panorama Batu Hitam;
h. Panorama Guguak Bungo;
i. Situs Lasuang Manangih;
j. Goa Ngalau Bunian;
k. Bukit teletubies Singkarewang;
l. Air terjun tigo tingkat;
m. Puncak bukit jonti;
n. Taman Satwa Kandi;
o. Camping Ground;
p. Roadrace Sirkuit;
q. Taman Hutan Kota;
r. Islamic Center;
s. Panorama Puncak Cemara;
t. Museum Tambang;
u. Museum Lukisan dan Etno Kayu;
v. Museum Alat Musik;
w. Museum tari;
x. Museum orang rantai;
y. Lubang tambang batu bara II;
z. Taman Kota Lapangan Segi Tiga
aa. Taman silo; dan
bb. Kuburan belanda.

Dengan pusat pelayanan kawasan Barangin.

4. Destinasi Pariwisata Kota (DPK) 1, meliputi Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) :
   a. Air terjun sungai bikan;
   b. Air terjun landu;
   c. Air terjun lurah loba;
   d. Air terjun tinogan;
   e. Air terjun tibarau;
   f. Rumah pohon;
   g. Lubang sawah lewuang;
   h. Makam Muhammad Yamin;
   i. Panorama sundak langik;
   j. Kebun buah;
   k. Makam keramat syeh kolok;
   l. Panorama bukik gadang;
   m. Gelanggang pacu kuda;
   n. Taman Hutan Kota;
   o. Dream Land;
   p. Penangkaran buaya;
   q. Panorama danau buatan;
   r. Taman manasik haji;
   s. Arena Paralayang Batu Tanjung; dan
   t. Panorama Danau Biru

   Dengan pusat pelayanan kawasan Talawi.



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama Perangkat Daerah dan kemudian disepakati dengan DPRD. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta OPD penanggungjawab. Namun demikian pendanaan program dan kegiatan setiap tahunnya mengacu kepada pagu indikatif yang ditetapkan pada tahun berjalan.

Dalam Bab III telah diuraikan kondisi keuangan dan proyeksi pendanaan pembangunan. Bab ini akan mengolaborasikan proyeksi dukungan pendanaan dengan target-target program pembangunan secara rinci yang diuraikan dengan prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Berikut disajikan kondisi realisasi keuangan tahun 2016-2020 yang dilanjutkan dengan Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Sawahlunto tahun 2021-2023 pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2 serta Indikasi Program Prioritas yang Disertai dengan Kebutuhan Pendanaan pada Tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.1
REALISASI BELANJA DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016- 2020

Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA	542.642.593.634,12	522.380.939.161,19	518.069.931.532,61	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79
Belanja Operasi	409.601.445.208,82	398.224.838.063,86	440.209.799.134,61	457.292.466.687,51	397.517.138.143,22
Belanja Pegawai	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00
Belanja Barang dan Jasa	182.738.691.416,05	196.437.479.686,67	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50
Belanja Bunga	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72
Belanja Hibah	9.908.257.933,00	7.271.241.900,00	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00
Belanja Bantuan Sosial	-	527.038.160,00	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00
Belanja Modal	132.832.856.170,30	123.743.149.829,33	77.527.748.798,00	94.384.258.018,50	63.699.147.392,57
Belanja Modal Tanah	188.925.750,00	863.778.100,00		577.625.000,00	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.233.926.620,30	41.737.766.804,28	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.253.108.416,00	62.330.023.466,05	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.439.590.725,00	2.033.512.375,00	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00
Belanja Modal Dana BOS				0,00	0,00
Belanja Modal Dana BLUD				0,00	0,00
BeLanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00
BeLanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00

Sumber : LRA Kota Sawahlunto diolah, 2021

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023

Uraian	REALISASI			PROYEKSI		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	**588.561.367.274,27**	**637.594.837.749,73**	**546.182.324.871,45**	**732.619.999.599,00**	**651.617.241.611,00**	**679.167.672.445,38**
Belanja Operasi	**440.209.799.134,61**	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**549.057.202.835,00**	**502.544.815.103,98**	**547.675.725.485,34**
Belanja Pegawai	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	258.129.273.627,00	259.471.545.849,86	260.820.797.888,28
Belnaja Barang dan Jasa	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	278.386.740.879,00	227.270.024.627,26	265.644.190.388,24
Belanja Bunga	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	1.250.000.000,00	1.250.500.000,00	1.251.000.000,00
Belanja Hibah	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	8.983.838.329,00	13.065.196.081,86	19.000.714.661,86
Belanja Bnatuan Sosial	0,00	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.307.350.000,00	1.487.548.545,00	959.022.546,96
Belanja Modal	**77.527.748.798,00**	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**110.251.176.098,00**	**109.821.196.511,22**	**109.392.893.844,82**
Belanja Tidak Terduga Terduga	**332.383.600,00**	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**3.000.000.000,00**	**3.008.100.000,00**	**3.016.221.870,00**
Belanja Transfer	**64.324.769.075,00**	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**68.644.954.000,00**	**34.576.463.329,80**	**17.416.164.579,22**
Pengeluaran Pembiayaan	**6.166.666.666,66**	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**1.666.666.666,00**	**1.666.666.666,00**	**1.666.666.666,00**

Sumber : LRA Kota Sawahlunto diolah, 2021

TABEL 7.3
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA SAWAHLUNTO

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																					**435.777,78**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*5.089,97*	*12*	*12*	*7.703,86*	*12*	*12*	*7.093,35*	*12*	*12*	*8.030,78*	-	-	-	-	-	-	-	*22.827,99*	DINAS PENDIDIKAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.398,12*	*12*	*12*	*2.036,98*	*12*	*12*	*1.223,24*	*12*	*12*	*224,89*	-	-	-	-	-	-	-	*3.485,11*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*199,62*	*100*	*155*	*198,34*	*100*	*141*	*319,96*	*100*	*10*	*49,80*	-	-	-	-	-	-	-	*568,10*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**100.702,83**	**100**	**79.091,46**	**100**	**79.174,47**	**100**	**258.968,76**	
	Program Pendidikan anak usia Dini (PD)	*APK TK*	*(Jumlah Siswa TK/ Jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*99,4*	*589,11*	*99.5*		*1.107,80*	*99.5*	*98,10*	*775,50*	*99.7*		*775,50*	-	-	-	-	-	-	-	*2.658,80*	
	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD	*Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)*	*(Jumlah SD yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SD di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*70*	*17.323,29*	*75*	*90*	*6.719,37*	*78*	*73*	*7.657,49*	*83*		*7.657,49*	-	-	-	-	-	-	-	*22.034,35*	
		Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	*(Jumlah SMP yang memiliki Sarana Prasarana sesuai standar / Jumlah seluruh SMP di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*75*	-	*80*	-	-	*82*	*95*	*1.758,98*	*85*		*1.910,78*	-	-	-	-	-	-	-	*3.669,76*	
		APM SD	*Angka Partisipasi Murni SD*	*96,23*		*96.5*	*100*		*96.6*	*96,86*		*96.7*	*92*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		APM SMP	*Angka Partisipasi Murni SMP*	*78,49*		*78.79*	*83,73*		*79.09*	*79,3*		*79.39*	*77,12*		-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase siswa baru dari keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah	*Persentase siswa baru dari keluarga kurang mampu yang diberikan perlengkapan sekolah*			*0*			*100*	*94*		*100*			-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pendidikan Non Formal (PD)	*Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal*	*Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal*	*81*	*486,32*	*85*		*371,93*	*85*	*82*	*1.321,37*	*89*	*67,41*	*1.321,37*	-	-	-	-	-	-	-	*3.014,67*	
	Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD)	*Angka Partisipasi Kasar SD (%)*	*(Jumlah Siswa SD / Jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*109,19*		*109.35*	*111,33*		*109.5*	*108,96*		*109.65*	*107,13*		-	-	-	-	-	-	-		
		Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	*(Jumlah Siswa SMP / Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %*	*104,08*		*104.25*	*96,98*		*104.4*	*92,57*		*104.6*	*91,47*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD)	*persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A*	*sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan*	*56*	*2.093,61*	*56*	*53*	*8.191,26*	*59.2*	*60,27*	*9.830,90*	*60.56*	*46*	*9.830,90*	-	-	-	-	-	-	-	*27.853,06*	
	Program Pendidikan berkarakter (PD)	*Kasus Kenakalan Remaja*	*Kasus Kenakalan Remaja*	*7*	*125,00*	*9*	*125*		*8*	*6*	*120,98*	*7*		*120,97*	-	-	-	-	-	-	-	*241,95*	
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	*(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100 %*	*0*	-	*4*			*10*	*10,38*	-	*20*	*10,38*		-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	*(Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter/ Jumlah Sekolah) x 100 %*	*0*		*75*	*85*		*80*	*89*	*120,98*	*85*	*91,89*	*11,60*	-	-	-	-	-	-	-	*132,58*	
	Program Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatiivitas Siswa (PD)	*Jumlah Siswa yang menerima Reward*	*Jumlah Siswa yang menerima Reward*	*302*	*1.112,41*	*352*	*0*	*690,87*	*382*	*232*	*443,50*	*482*	*0*	*1.788,30*	-	-	-	-	-	-	-	*2.922,67*	
		Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	*Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward*	*0*	-	*200*	*107*	*107,00*	*540*	*865*	*865,00*	*550*	*1789*	*2.000,50*	-	-	-	-	-	-	-	*2.972,50*	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD)	*Persentase guru yang bersertifikat pendidik*	*(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik / Jumlah Total Guru) x 100 %*	*74,81*	*1.669,36*	*78.95*	*78.95*	*1.414,65*	*80.5*	*50,8*	*800,07*	*84.2*	*58,61*		-	-	-	-	-	-	-	*2.214,72*	
		Persentase guru yang berkualifikasi min S1	*(Jumlah Guru yang Kualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %*	*88,97*		*91,27*			*93,11*	*71,09*		*94,95*	*79,04*		-	-	-	-	-	-	-		
2	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guru yang bersertifikat pendidik**	**(Jumlah Guru yang bersertifikat Pendidik dan berkualifikasi Min S1 / Jumlah Total Guru) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87,3**	**6.253,02**	**88,5**	**3.951,62**	**90,3**	**3.756,81**	**90,3**	**13.961,45**	
3	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**APM SD**	**Angka Partisipasi Murni SD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**27.063,31**	**100,2**	**18.775,76**	**101,3**	**14.920,16**	**101,3**	**60.759,23**	
		APM SMP	***Angka Partisipasi Murni SD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**92,5**	**6.113,80**	**93**	**6.725,18**	**93,5**	**7.397,70**	**93,5**	**7.397,70**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	***(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 /total jumlah lulusan) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	78,00	25	85,80	30	94,38	30	94,38	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																					**440.491,67**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*3.277,87*	*12*	*12*	*480,40*	*12*	*12*	*2.582,57*	*12*	*12*	*3.248,18*	-	-	-	-	-	-	-	*6.311,15*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*34,67*	*100*	*100*	*7,20*	*100*	*100*	*62,77*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*69,97*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.094,17*	*12*	*12*	*144,26*	*12*	*12*	*1.454,26*	*12*	*12*	*879,46*	-	-	-	-	-	-	-	*2.477,98*	
	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	*Tersedianya data statistik*	*Jumlah bulan ketersediaan data (bulan)*	*12*	*32,67*	*12*	*12*	*3,93*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*3,93*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**85.354,40**	**100**	**88.163,17**	**100**	**88.163,17**	**100**	**261.680,74**	
	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	*Angka kematian balita per 1.000*	*Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu*	*2,77*	*299,09*	*2,51*	*24*	*247,71*	*2,35*	*27,1*	*394,30*	*2,17*	*22,6*	*52,91*	-	-	-	-	-	-	-	*694,92*	
		Jumlah kematian ibu	*Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun*	*0*		*0*			*0*	*3*		*0*	*2*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD)	*Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan*	*Jumlah balita gizi buruk mendapatperawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan dikali seratus persen*	*100*	*50,33*	*100*	*100*	*1,98*	*100*	*111*	*4.671,75*	*100*	*100*	*19,15*	-	-	-	-	-	-	-	*4.692,88*	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD)	*Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar*	*Jumlah penderita TBC yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita TBC dikali seratus persen*	*100*	*231,66*	*100*		*153,99*	*100*	*100*	*230,35*	*100*	*100*	*125,29*	-	-	-	-	-	-	-	*509,63*	
		Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar	*Jumlah penderita DBD yang tertangani dibagi dengan jumlah penderita DBD dikali seratus persen*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*	*230,35*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	*230,35*	
		Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar	*Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai Standar*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PD)	*Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar*	*Jumlah penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita Diabetes dikali seratus persen*	*100*	*16,56*	*100*	*100*	*12,67*	*100*	*100*	*45,87*	*100*	*88*	*29,00*	-	-	-	-	-	-	-	*87,54*	
		Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	*Jumlah pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita gangguan jiwa (ODGJ) berat dikali seratus persen*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*150*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	*Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah penderita hipertensi dikali seratus persen*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*16,72*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Mata (PD)	*Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar*	*Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang tersedia / sarana prasarana RS yang sesuai standar) x 100 %*	*67,8*	*5.424,00*	*72,8*	-	*5,49*	*77,8*	*56*	*7,95*	*79*	*58*	*9.715,00*	-	-	-	-	-	-	-	*9.728,43*	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (PD)	*Akreditasi Rumah Sakit*	*Penilaian terhadap standar pelayanan rumah sakit yang dikeluarkan oleh komite akreditasi rumah sakit*	-	*462,30*	*utama*	-	*1.181,48*	*utama*	-	*719,47*	*utama*	-	*736,18*	-	-	-	-	-	-	-	*2.637,13*	
		Persentase puskesmas yang terakreditasi	*jumlah puskesmas terakreditasi/ jumlah puskesmas x 100%*	*66,6*		*100*	*33*		*100*	*100*		*100*	*100*		-	-	-	-	-	-	-		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	*Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar*	*(Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita yang menjadi Target Pelayanan) x 100 %*	-	*203,00*	*70*	*213,73*	*213,73*	*74*	*48*	*167,17*	*76*	*31*	*9,00*	-	-	-	-	-	-	-	*389,90*	DINAS KESEHATAN
	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD)	*Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar*	*Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas, puskesmas pembantu sesuai standar*	*69*	*10.378,18*	*71*	*6*	*5.209,00*	*73*	*71,63*	*5.358,42*	*75*	*0*	*8.369,00*	-	-	-	-	-	-	-	*18.936,42*	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD)	*% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan*	*Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %*	*68.01*	*11.438,95*	*95*	*95*	*26,55*	*95*	*97,88*	*37,60*	*96*	*96,07*	*14.765,33*	-	-	-	-	-	-	-	*14.829,48*	
		Persentase rujukan pasien yang terlaksana	*(Jumlah rujukan terlaksana/ jumlah pasien dirujuk) x 100 %*	*100*		*0*	*100*		*0*	*100*		*100*	*100*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	*Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%)*	*(Jumlah Obat dan Vaksin Indikator yang terdedia / Jumlah Kebutuhan Obat dan Vaksin Indikator) x 100 %*	*98,1*	*411,44*	*98,7*	*98,7*	*197,48*	*88*	*100*	*230,60*	*90*	*90,5*	*128,66*	-	-	-	-	-	-	-	*556,74*	
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	*Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%)*	*(Jumlah sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar / Jumlah Sarana Obat, Makanan dan Alkes yang tersedia) x 100 %*	-	*42,75*	*75*	*92*	*20,20*	*77*	*0*	*33,08*	*78*	*0*	*84,00*	-	-	-	-	-	-	-	*137,28*	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	*Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)*	*(Jumlah Lansia terlantar / JumlahLansia yang dapat pelayanan) x 100 %*	-	*82,00*	*70*	*70*	*17,00*	*70*	*38,1*	*16,22*	*75*	*0*	*21,15*	-	-	-	-	-	-	-	*54,37*	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	*Angka kematian balita per 1000*	*Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu*			*2,51*	*24*	*495,41*	*2,35*	*27,1*	*65,05*		*22,6*	*52,91*	-	-	-	-	-	-	-	*613,37*	
		Jumlah kematian ibu	*Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun*	*0*		*0*	*0*			*3*	-		*2*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	*Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%)*	*(Jumlah sarana prasarana yang dipelihara / jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %*				-	*0*	-	-	*80,00*	-	-	*3.195,00*	-	-	-	-	-	-	-	*3.275,00*	
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	*Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas*	*Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas*					*100,00*	*100*	*100*	*1.034,70*	*100*	-	*1.066,00*	-	-	-	-	-	-	-	*2.200,70*	
	Program Upaya Kesehatan Kerja	*Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas*	*Jumlah kelompok kerja informal yang difasilitasi*	-	*4,08*		*4*	-	*4*	*100*	*10,13*	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*10,13*	
	Program Upaya Kesehatan Olahraga	*Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas*	*Jumlah kelompok olah raga yang difasilitasi*	-	*2,56*		*4*	-	*1*	*100*	*4,32*	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*4,32*	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	*Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)*	*Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)*	*12*	*28,14*	*12*	-	*24,21*	*12*	-	*29,00*	*12*	-	*31,65*	-	-	-	-	-	-	-	*84,87*	
2	**Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat**	**% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan**	**Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**95**		**96**		**97**		**100**		
		Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	***(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**64.893,75**	**81**	**20.841,17**	**82**	**18.936,64**	-	**104.671,56**	
		Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	***(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**≤ 4,50**		**≤ 4,25**		**≤ 4,00**		-		
	Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD)	*Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar*	*(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %*	*93*	*88,61*	*93*	-	*30,63*	*94*	*0*	*112,00*	*93*	*92,6*	*115,00*	-	-	-	-	-	-	-	*257,63*	
	Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan Anak (PD)	*Angka kematian balita per 1.000*	*Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu*	*2,77*	*299,09*	*2,51*	*24*	*247,71*	*2,35*	*27,1*	*394,30*	*2,17*	*22,6*	*52,91*	-	-	-	-	-	-	-	*694,92*	
		Jumlah kematian ibu	*Jumlah kematian ibu dalam periode satu tahun*	*0*			*0*		*0*	*3*		*0*	*2*		-	-	-	-	-	-	-		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	*Persentase UKBM yang aktif*	*Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar*	*72*	*589,58*	*75*	*75*	*329,45*	*78*	*100*	*311,31*	*81*	*85*	*32,50*	-	-	-	-	-	-	-	*673,26*	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	*Angka kematian balita per 1000*	*Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah balita pada satu tahun tertentu dikali seribu*			*2,51*	-	*2,35*	*766,8*		*562,20*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*564,55*	
3	**Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan**	**Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar**	**(Jumlah tenaga Kesehatan dan tenaga medis yang sesuai standar / jumlah tenaga kesehatan dan medis) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**165,87**	**91**	**80,00**	**92**	**137,50**	**92**	**383,37**	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	*Keluarga Sehat (%)*	*Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga*	*25*	*42,75*	*75*	*92*	*20,20*	*77*	*0*	*33,08*	*78*	*0*	*84,00*	-	-	-	-	-	-	-	*137,28*	
	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	*Persentase UKBM yang aktif*	*Jumlah UKBM yang melaksanakan kegiatan sesuai standar dibagi dengan Jumlah UKBM yang terdaftar*	*72*	*589,58*	*75*		*323,17*	*78*		*367,58*	*81*			-	-	-	-	-	-	-	*690,75*	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	*Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar*	*(Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jumlah Balita yang menjadi Target Pelayanan) x 100 %*	-	*203,00*	*70*	*75,5*	*213,73*	*74,00*	*48*	*167,17*	*76*	*31*	*9,00*	-	-	-	-	-	-	-	*389,90*	
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Keluarga Sehat (%)**	**Jumlah Keluarga Sehat dengan indek >0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**33**	**583,49**	**35**	**195,00**	**37**	**349,52**	**37**	**1.128,01**	
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	*Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan*	*(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang diperiksa) x 100 %*	-	*15,73*	*90*	*94,44*	*8,08*	*90*	*100*	*7,46*	*91*	*88,1*	*8,70*	-	-	-	-	-	-	-	*24,24*	
	Program Peningkatan Kualitas Air	*Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)*	*(Jumlah sarana air minum yang diawasi/ jumlah sarana air minum yang ada) x 100 %*	*89*	*122,16*	*70*	*88*	*51,86*	*72*	*100*	*119,69*	*74*	*99*	*114,92*	-	-	-	-	-	-	-	*286,47*	
5	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan**	**(Jumlah tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan / Jumlah Tempat pengolahan makanan yang diperiksa) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76**	**185,25**	**77**	**80,00**	**78**	**107,25**	**78**	**372,50**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					**626.597,08**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran(Bulan)*	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran(Bulan)*			*12*	*12*	*2.191,22*	*12*	*12*	*5.952,41*	*12*	*12*	*5.935,98*	-	-	-	-	-	-	-	*14.079,62*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*			*12*	*12*	*395,24*	*12*	*12*	*691,79*	*12*	*12*	*347,64*	-	-	-	-	-	-	-	*1.434,67*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*			*12*	*12*	*39,22*	*12*	*12*	*142,38*	*12*	*12*	*19,81*	-	-	-	-	-	-	-	*201,41*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**14.152,27**	**12**	**9.793,22**	**12**	**11.397,00**	**12**	**35.342,49**	
	Program Pemeliharaan /rehabilitasi jalan dan jembatan (PD)	*Persentase Jalan dalam kondisi mantap*	*(Panjang Jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan) x 100 %*	*65.98*	*2.777,32*	*66.98*	*66,82*	*4.356,90*	*67*	*66,38*	*9.553,42*	*68*	*66,50*	*17.684,25*	-	-	-	-	-	-	-	*31.594,57*	
		Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	*(Panjang Jembatan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang Jembatan) x 100 %*	*76*	*1.579,60*	*78*	*78*	*1.238,84*	*80*	*77,03*	*1.166,21*	*82*	*78,00*	*321,79*	-	-	-	-	-	-	-	*2.726,84*	
	Program Pembangunan/ Peningkatan jalan dan jembatan	*Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)*	*Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)*			*911,09*	*11,59*	*23.181,53*	*11,987*	*11,00*	*19.291,17*	*9,318*	*4,55*	*2.545,53*	-	-	-	-	-	-	-	*45.018,24*	
		Persentase Jalan dalam kondisi terpelihara (%)	**(Panjang Jalan yang ditingkatkan +panjang jalan yang terpelihara)/total panjang jalan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**68,75**		**70,01**		**72,21**		**72,21**		
	Program Penyelenggaraan																						

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
2	**Jalan**	**Persentase jembatan dalam kondisi terpelihara (%)**	**(Panjang jembatan yang ditingkatkan+panjang jembatan yang terpelihara)/total panjang jembatan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**78**	**37.306,58**	**78,5**	**47.458,55**	**79**	**43.400,00**	**79**	**128.165,13**	POPR
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD)	*Persentase Drainase dalam Kondisi Baik*	*panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %*	*51,98*	-	*51,98*	*56,00*	*1.213,67*	*71,19*	*43,96*	*3.223,54*	*72,78*	*43,98*	*181.000,00*	-	-	-	-	-	-	-	*185.437,21*	
3	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase**	**Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)**	**panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**46,75**	**1.990,00**	**50,37**	**3.670,00**	**52,34**	**2.050,00**	**52,34**	**7.710,00**	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD)	*Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik*	*Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen*	*75.7*	-	*77.85*	*40,51*	*2.135,96*	*80*	*42,38*	*3.847,97*	*82*	*44,6*	*2.453,20*	-	-	-	-	-	-	-	*8.437,13*	
4	**Program Pengelolaan Sumber Daya AirR (SDA)**	**Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)**	**Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**48,14**	**6.910,93**	**49,35**	**9.386,96**	**50,35**	**6.550,00**	**50,35**	**22.847,89**	
	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD)	*Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik*	*(Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar : jumlah bangunan pemerintah yang ada) x 100%*	*52*	-	*60*	*68*	*3.400,60*	*65.12*	*84,69*	*3.302,96*	*66.98*	*86,16*	*2.780,39*	-	-	-	-	-	-	-	*9.483,95*	
	Program Pengembangan Perumahan	*persentase luas permukiman yang tertata*	*(luas permukiman yang tertata/ luas permukiman) x 100 %*	*83*	*2,04*	*84*	*95,02*	*15.303,89*	*86*	*90,77*	*10.452,93*	*87*	*76,48*	*474,52*	-	-	-	-	-	-	-	*26.231,34*	
5	**Program Pengembangan Permukiman**	**Persentase luas permukiman yang tertata (%)**	**(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**77,34**	**7.737,90**	**78,34**	**13.466,89**	**79,34**	**7.500,00**	**79,34**	**28.704,79**	
6	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**Jumlaha bangunan pemerintah yang sesuai standar: jumlah bangunan pemerintah yang ada**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**87**	**9.745,91**	**88**	**15.506,74**	**89**	**15.695,29**	**89**	**40.947,94**	
		Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	**(jumlah bangunan yang direkomendasi / jumlah bangunan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**64**		**65**		**66**		**66**		
	Program lingkungan sehat perumahan (PD)	*Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)*	*(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak / Jumlah RT) x 100 %*	*83*	*2,04*	*84*	*84*	*2.009,37*	*86*	*86*	*2.267,13*	*87*	*87*	*2.122,14*	-	-	-	-	-	-	-	*6.398,64*	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	*(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak / Jumlah RT) x 100 %*	*76*		*77*	*77*		*78*	*78*		*81*	*81*		-	-	-	-	-	-	-		
7	**Program pengembangan dan Pengelolaaan Sistem Air Limbah**	**Persentase Air limbah yang terlayani**	**(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak / Jumlah RT) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89**	**1.526,43**	**90**	**800,00**	**88**	**2.000,00**	**88**	**4.326,43**	
8	**Program pengembangan dan pengelolaaan sistem penyediaaan air minum**	**Persentase air minum yang terlayani (%)**	**(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap Sanitasi layak / Jumlah RT) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**89**	**4.376,77**	**91**	**4.030,00**	**91**	**6.050,00**	**91**	**14.456,77**	
	Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	*Jumlah Alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik*	*Jumlah Alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik*			*69*						*69*			-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	*Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)*	*Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)*			*600*	*0*	*4.407,12*	*600*	*97,1*	*1.370,64*	*650*	*590*	*599,55*	-	-	-	-	-	-	-	*6.377,31*	
		Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)	*Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)*			*2.736*	*0*		*2861*			*3011*	*2972*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)(PD)	*Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota*	*(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %*	*15,86*	*1.052,25*	*16*	*1*	*1,00*	*17*	*17*	*244,71*	*18*	*18*	*361,56*	-	-	-	-	-	-	-	*607,27*	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD)	*Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*	*61,28*		*61,56*	*61,56*	*130,47*	*62*	*61,88*	*449,16*	*63*	*62,12*	*47,58*	-	-	-	-	-	-	-	*627,21*	
	Program perencanaan Tata Ruang	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang*	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang*						*80*	-	-	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program pemanfaatan ruang	*Persentase bangunan ber IMB*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*			*61,56*	*61,56*	*28,29*	*62*	*61,87*	*415,93*	*63*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*444,22*	
9	**Program Penyelenggaraan penataan Ruang**	**Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang**	**(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan penataan ruang) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**11,15**	**818,02**	**22,22**	**1.803,01**	**22,22**	**2.335,00**	**55,59**	**4.956,03**	
		Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota	*(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*19*		*20*		*21*		*21*		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Persentase bangunan ber IMB	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*64*		*65*		*66*		*66*		
10	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**															40,00		-				40,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					**79.725,32**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*			*12*	*12*		*12*	*12*	*4.594,15*	*12*	*12*	*5.667,52*	-	-	-	-	-	-	-	*10.261,67*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*			*12*	*12*		*12*	*12*	*734,37*	*12*	*12*	*577,90*	-	-	-	-	-	-	-	*1.312,27*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*			*12*	*12*		*12*	*12*	*61,65*	*12*	*12*	*75,00*	-	-	-	-	-	-	-	*136,65*	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*	*Terwujudnya Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran*		-	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*4.594,15*	*12*	*12*	*5.667,52*	-	-	-	-	-	-	-	*10.261,67*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*		-	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*734,37*	*12*	*12*	*577,90*	-	-	-	-	-	-	-	*1.312,27*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensinya (orang)*		-	*12*	*12*	*0*	*12*	*12*	*61,65*	*12*	*12*	*75,00*	-	-	-	-	-	-	-	*136,65*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)**	**Urusan Pemerintah daerah berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)**	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	**12**	**8.507,93**	**12**	**8.884,88**	**12**	**7.996,16**	**12**	**25.388,97**	DKP2LH
	Program Pengembangan Perumahan (PD)	*persentase luas permukiman yang tertata*	*(luas permukiman yang tertata/ luas permukiman) x 100 %*	*56*		*60*	-	-	*65*	*65*	*7.687,70*	*70*	*82,21*	*1.541,75*	-	-	-	-	-	-	-	*9.229,46*	
2	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)**	**Luas kawasan permukiman kumuh yang sesuai SK Walikota (Ha)**	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	**83,54**	**1.837,50**	**72,93**	**140,00**	**19,08**	**155,00**	**80**	**2.132,50**	
3	**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)**	**(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %**	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	**75**	**602,50**	**80**	**1.900,00**	**85**	**830,00**	**85**	**3.332,50**	
4	**Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase PSU yang tertata (%)**	**Jumlah PSU yang tertata/ jumlah PSU x 100%**	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	**75**	**5.659,70**	**80**	**1.630,00**	**85**	**5.000,00**	**85**	**12.289,70**	
	Program Pemeliharaan Rumah Susun Meliputi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama	*Persentase Tingkat Keterhunian Rumah Susun (%)*	*(Jumlah Kamar di di Rusunawa yang dihuni/ jumlah kamar di Rusunawa) x 100 %*	*88*	*140.98*	*85*	*85*	*120,94*	*96*	*77,31*	*554,88*	*97*	*89,71*	*527,00*	-	-	-	-	-	-	-	*1.202,81*	
	Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial	*Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)*	*Jumlah Rumah yang direhabilitasi / Jumlah yang terkena bencana)*						*100*	*100*	*150,00*	*100*	*100*	*194,66*	-	-	-	-	-	-	-	*344,66*	
5	**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)**	**Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/ Jumlah yang terkena bencana)x 100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**1.185,45**	**85,00**	**948,10**	**90,00**	**250,00**	**90,00**	**2.383,55**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																					**78.787,39**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*12*	*908,59*	*12*	*12*	*1412,83*	*12*	*12*	*1352,34*	*12*	*12*	*1211,58*	-	-	-	-	-	-	-	*3.976,75*	*Kesbang*
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*12*	*328,10*	*12*	*12*	*311,58*	*12*	*12*	*337,07*	*12*	*12*	*276,13*	-	-	-	-	-	-	-	*924,79*	*Kesbang*
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*12*	*9,90*	*12*	*12*	*9,90*	*12*	*12*	*9,85*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*19,75*	*Kesbang*
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ Jumlah aparatur) x 100%*	*12*	*177,11*	*12*	*12*	*107,38*	*12*	*12*	*119,55*	*12*	*12*	*37,09*	-	-	-	-	-	-	-	*264,01*	*Kesbang*

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pengembangan Data/Informasi	*Tersedianya data dan informasi OPD (dokumen/bulan)*	*Jumlah data tersedia di OPD*	*12*	*7,26*	*12*	*12*	*5,12*	*12*	*12*	*5,12*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*10,23*	*Kesbang*
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*12*	*2323,27*	*12*	*12*	*2251,42*	*12*	*12*	*2470,42*	*12*	*12*	*2408,71*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7.130,55*	*Satpol PP*
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*12*	*717,136*	*12*	*12*	*670,90*	*12*	*12*	*796,70*	*12*	*12*	*483,81*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.951,41*	*Satpol PP*
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*12*	*123,48*	*12*	*12*	*197,21*	*12*	*12*	*185,56*	*-*	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*382,76*	*Satpol PP*
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ Jumlah aparatur) x 100%*	*12*	*48,72*	*12*	*12*	*52,44*	*12*	*12*	*90,74*	*12*	*12*	*10,49*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*153,67*	*Satpol PP*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)**	**Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**2768,49**	**12**	**3716,65**	**12**	**3709,54**	**12**	**10.194,67**	**Kesbang**
															12	**6754,57**	**12**	**8408,70**	**12**	**8829,13**	**12**	**23.992,41**	**Satpol PP**
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	*Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu*	*(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)*	*100*	*754,70*	*100*	*100*	*958,72*	*100*	*100*	*766,47*	*100*	*100*	*723,58*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2.448,77*	*Badan Kesbangpol dan PHD*
					220,76	*100*	*100*	*46,98*	*100*	*100*	*28,69*	*100*	*100*	*29,39*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*105,05*	*Satpol PP, Damkar dan Keamanan*
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*		*0*		*490,00*	*43,69*	*250,00*	*250,00*	*26,12*	*250,00*	*-*	*-*								
		Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	*Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)*		*98,58*	*85,00*	*67,00*	*9,02*	*85,00*	*-*	*-*	*75,00*	*50,00*	*4,57*									
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD)	*Persentase penegakan perda (%)*	*(jumlah penyelesaian penegakan Perda/ jumlah pelanggaran Perda) x 100%*		*577,23*		*100*	*149,81*		*100*	*123,63*		*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*273,44*	*Satpol PP*
2	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase penegakan perda (%)**	**(jumlah penyelesaian penegakan Perda/ jumlah pelanggaran Perda) x 100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100**	**1.446,94**	**100**	**468,61**	**100**	**492,05**	**100**	**2.407,60**	**Satpol PP**
	Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD)	*Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun*	*Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun*	*3*	*3,00*	*3*	*-*	*-*	*3*	*0*	*-*	*3*	*3*	*44,22*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*44,22*	*Kesbangpol*
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD)	*Persentase bencana yang tertangani sesuai standar*	*(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %*	*-*		*50*	*50*	*420,06*	*65*	*65,0*	*374,16*	*70*	*70*	*299,19*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.093,41*	*Kesbangpol*
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD)	*Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar*	*(Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar / Jumlah Sarana Prasarana) x 100 %*	*-*		*35*	*35*	*45,00*	*45*	*45,0*	*8,60*	*50*	*50*	*171,24*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*224,84*	*Kesbangpol*
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB	*Persentase ketersediaan aparatur kesiagaan Bencana*	*(Jumlah ketersediaan aparatur Kesiapsiagaan Bencana/Jumlah Aparatur kesiapsiagaan bencana) x 100 %*			*23*	*-*	*-*	*50*	*-*	*-*	*48*	*0*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Kesbangpol*
		Persentase Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya	*(Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya (sertifikat)/Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana) x 100 %*				*-*	*-*	*10*	*-*	*-*	*12*	*0*		*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	
	Program Penanganan tanggap Darurat	*Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani*	*(Jumlah kejadian Tanggap Darurat Tertangani/jumlah kejadian) x 100 %*				*-*	*-*		*-*	*-*		*0*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*Kesbangpol*
	Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana	*Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana*	*(Jumlah perencanaan rehabilitasi yang terlaksana Jumlah Perencanaan Rehabilitasi) x 100 %*		*6.135,54*	*30*	*-*	*-*	*30*	*25,0*	*6,75*	*35*	*35*	*38,63*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*45,38*	*Kesbangpol*
	Program Rekonstruksi Pasca Bencana	*Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani*	*Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani*		*-*	*-*	*-*	*56,47*	*-*	*-*	*115,61*	*-*	*30*	*481,23*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*653,31*	*Kesbangpol*
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	*Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani*			*-*	*-*	*-*	*56,48*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*38,63*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*95,11*	*Kesbangpol*

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	*Jumlah keluarga terdampak*			*1.129,06*	*-*	*-*	*592,13*	*-*	*-*	*1.569,87*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2.162,01*	*Kebencanaan*
3	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase bencana yang tertangani sesuai standar**	***(Jumlah Bencana yang tertangani / jumlah bencana yang terjadi) x 100 %***												100	14604,4498	100	1668,025	100	2.593,50	100	18.865,97	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	*Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/ Total Jumlah kebakaran x 100 %*	*Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/ Total Jumlah kebakaran x 100 %*		*214,34*	*100*	*100*	*16,85*	*100*	*100*	*14,18*	*100*	*100*	*102,32*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*133,35*	*Satpol pp*
	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	*Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)*	*Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)*			*100*	*100*	*20,41*	*100*	*100*	*43,83*	*100*	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*64,24*	
4	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase penanganan kebakaran (%)**	***Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 %***												100	906,26	100	128,50	100	134,92642		1169,69	**Satpol pp**
		Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)	***Jumlah kasus pencegahankebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kasus yang dilaporkan x 100 %***												100		100		100				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																					**28.901,35**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*700,67*	*12*	*12*	*1.149,85*	*12*	*12*	*1.108,46*	*12*	*12*	*1.219,21*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*3.477,52*	DINAS SOSIAL
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase Tersedianya pakaian dinas untuk Aparatur Sipil*	*Jumlah tersedianya pakaian dinas / jumlah aparatur X 100 %*	*0*	*-*	*34*	*-*	*-*	*34*	*32*	*9,90*	*31*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*9,90*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*173,95*	*12*	*12*	*240,89*	*12*	*12*	*204,42*	*12*	*12*	*144,21*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*589,52*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	**100**	**5.111,34**	**100**	**5.408,78**	**100**	**5.640,71**	**100**	**16.160,83**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	*Persentase masyarakat miskin yangterfasilitasi*	*Jumlah masyarakat miskin yang terfasilitasi /jumlah total masyarakat miskin x 100%*	*60*	*517,53*	*64*	*63*	*731,49*	*69*	*65*	*416,68*	*74*	*70*	*185,08*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.333,24*	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	*Persentase penyandang sosial yangterfasilitasi*	*Jumlah penyandang sosial yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang sosial x 100%*	*15*	*75,34*	*20*	*10*	*51,49*	*25*	*15*	*33,77*	*25*	*5*	*2,02*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*87,29*	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Para Penyandang Cacat dan Trauma	*Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi*	*Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) x 100%*	*18,64*	*78,16*	*13,7*	*7,9*	*60,37*	*59,76*	*24,1*	*563,77*	*84,89*	*12,24*	*114,99*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*739,12*	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dibina*	*Jumlah anak terlantar yang dibina/ jumlah anak terlantar x 100%*	*0*	*-*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*-*	*100*	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	
2	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi**	**Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi / Jumlah total penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) x 100%**	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	**89,84**	**1.220,69**	**100**	**620,64**	**100**	**702,50**	**100**	**2.543,83**	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	*Persentase masyarakat miskin yangterfasilitasi*	*Jumlah masyarakat miskin yang terfasilitasi /jumlah total masyarakat miskin x 100%*	*60*	*517,53*	*64*	*63*	*731,49*	*69*	*65*	*416,68*	*74*	*70*	*185,08*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*1.333,24*	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Panti Asuhan/ Panti Jompo	*Persentase panti asuhan/ jompo yangterfasilitasi*	*Jumlah panti asuhan-jompo yang terfasilitasi / jumlah total panti asuhan-jompo x 100%*	*100*	*314,50*	*100*	*100*	*185,42*	*100*	*100*	*144,50*	*100*	*100*	*98,51*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*428,43*	
	Program Pembinaan Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dibina*	*Jumlah anak terlantar yang dibina/ jumlah anak terlantar x 100%*	*0*	*-*	*0*	*0*	*-*	*0*	*0*	*-*	*100*	*100*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
3	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial /jumlah total PMKS x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	33,89	100	50,00	100	72,50	100	156,39	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	*Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif*	*Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang aktif / jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ada x 100%*	*75*	*241,09*	*80*	*0*	*140,99*	*85*	*0*	*201,44*	*87*	*0*	*73,61*	-	-	-	-	-	-	-	*416,04*	
4	**Program Pemberdayaan Sosial**	**Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan**	**Jumlah PSM & TKSK yang diberdayakan /jumlah total PSM & TKSK x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	307,12	25	534,36	100	437,50	100	1.278,98	
5	**Program Penanganan Bencana**	**Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi**	**Jumlah penanganan bencana alam yang terfasilitasi/ jumlah bencana alam x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	39,96	100	64,00	100	103,96	
6	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**Persentase taman makam pahlawan (TMP) yang terfasilitasi**	**Jumlah TMP yang terfasilitasi / jumlah TMP x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	83,86	100	31,19	100	128,00	100	243,05	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																					**26.813,32**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*		-	*12*	*12*	*360,62*	*12*	*12*	*752,58*	*12*	*12*	*825,91*	-	-	-	-	-	-	-	*1.939,11*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*		-	*12*	*12*	*262,25*	-	-	*183,69*	-	-	*259,52*	-	-	-	-	-	-	-	*705,45*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	*Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %*		-	-	-	*87,13*	-	-	*119,95*	-	-	*97,89*	-	-	-	-	-	-	-	*304,98*	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*		-	-	-	*5,80*	-	-	*4,35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10,14*	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.748,37	12	6.072,07	12	5.772,08	36	18.592,52	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PD)	*Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)*	*(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / jumlah peserta pelatihan) x 100%*	-	*283,68*	-	-	*70,46*	*0*	*42,95*	*440,63*	*60*	*41,25*	*664,15*	-	-	-	-	-	-	-	*1.175,24*	
2	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)**	**(Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang Tersedia / Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	46,18	100	80,00	100	90,00	100	216,18	PTSP
3	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)**	**(Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi / jumlah peserta pelatihan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	859,10	60	1.035,11	90	870,11	90	2.764,32	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)*	*(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%*	*70,44*	*77,85*	*71,24*	*72,63*	*146,57*	*72,04*	*69,2*	*153,28*	*72,86*	*70,57*	*41,66*	-	-	-	-	-	-	-	*341,50*	
4	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)**	**(Jumlah Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia Kerja) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.68	307,92	74,51	36,77	75,35	40,00	75,35	384,69	
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	*Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)*	*Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)*	*0*	*141,43*	*1*	*1*	*82,00*	*5*	*3*	*62,01*	*5*	*4*	*89,29*	-	-	-	-	-	-	-	*233,31*	
5	**Program Hubungan Industrial**	**Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)**	**Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerjasama Bipartid (Perusahaan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	47,94	8	47,94	10	50,00	10	145,88	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					**4.559,49**	
	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	*Indek Pemberdayaan Gender (IDG)*	*Nilai indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik*	*65,86*	*579,42*	*65,6*	*65,33*	*485,22*	*65,61*	*66,18*	-	*65,62*	*65,86*	*159,55*	-	-	-	-	-	-	-	*644,77*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	*Anugerah Parahita Ekapraya (APE)*	*Anugerah bagi daerah yang sukses melakukan pemerataan dan keadilan pembangunan dari segi gender dari KemenPPPA*	-	*175,04*	*0*	-	*216,69*	*0*	*0*	-	*pratama*	*pratama*	*181,98*	-	-	-	-	-	-	-	*398,67*	DINAS SOSIAL
1	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	**Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Nilai indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65,63**	**400,01**	**66**	**71,67**	**65,65**	**346,00**	**100**	**817,68**	
	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	*Persentase kasus perempuan yang tertangani*	*Kasus pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan atau tidak*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	*801,57*	*100*	*100*	-									
2	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase perlindungan perempuan dari kekerasan (%)**	**(Jumlah kasus kekerasan perempuan yang ditangani/jumlah kasus**												**100**	**145,07**	**100**	**160,80**	**100**	**170,20**	**100**	**476,07**	
	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	*Persentase kasus perempuan yang tertangani*	*Kasus pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan atau tidak*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	*801,57*	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-	*801,57*	
3	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan**	**Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas keluarga**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**523,98**	**100**	**88,59**	**100**	**236,50**	**100**	**849,07**	
	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	*Tingkat capaian Kota layak Anak*	*Anugerah yang diberikan kepada daerah yang berhasil dalam pembinaan layak anak*	*Nindya*	-	*Nindya*	*Nindya*	-	*Nindya*	*Nindya*	*232,69*	*Utama*	*Nindya*	-	-	-	-	-	-	-	-	*232,69*	
4	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak anak**	**Pencapaian hasil penilaian Kota Layak Anak**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Nindya**	**101,56**	**utama**	**14,09**	**utama**	**82,78**	**utama**	**198,43**	
5	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase perlindungan khusus bagi anak**	**Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus /jumlah kasus pada anak x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**122,21**	**100**	**8,85**	**100**	**9,50**	**100**	**140,56**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																					**48.485,87**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	-	-	*12*	*12*	*1.888,29*	*12*	*12*	*1.417,07*	*12*	*12*	*1.610,25*	-	-	-	-	-	-	-	*4.915,61*	DKP3
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	*Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	-	-	*12*	*12*	*414,10*	*12*	*12*	*458,02*	*12*	*12*	*240,76*	-	-	-	-	-	-	-	*1.112,88*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDMnya*	*(jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ jumlah aparatur) x 100%*	-	-	*23*	*23*	*96,80*	*12*	*12*	*123,51*	*34*	*34*	*4,00*	-	-	-	-	-	-	-	*224,30*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*(Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap/jumlah ASN) x 100%*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD*	*(jumlah program di RKPDdengan nomenklatur dan indikator yang asama/jumlah program di RPJMD) x 100%*	-	*151,17*	*100*	*100*	*10,54*	*100*	*100*	*7,98*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*18,52*	
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen)	*(jumlah DokumenPerencanaan yang tersusun)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**12.311,90**	**12**	**13.459,62**	**12**	**14.396,02**	**36**	**40.167,55**	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	*Tingkat Keamanan Produk pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/ berbahaya dan residu pestisida(%)*	*Perbandingan Produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan*	-	*531,00*	-	-	*97,23*	*95,5*	*90,01*	*310,65*	*96*	*96,33*	*67,92*	-	-	-	-	-	-	-	*475,80*	
		Tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)	*Tingkat keamanan bahan pangan dari cemaran pestisida, mikroba dan bahan kimia (%)*	*94*	-	*95,2*	*95,2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		konsumsi bahan pangan pokok perkapita per tahun (kg)	*konsumsi bahan pangan pokok perkapita per tahun (kg)*	*91,98*	-	*91,6*	*91,6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	**Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)**	**Jumlah kecukupan kebutuhan pangan pokok dari bahan pangan lokal/jumlaj kecukupan kebutuhan bahan pangan pokok**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,00**	**32,25**	**73,00**	**86,00**	**75,00**	**115,00**	**75,00**	**233,25**	
3	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Skor PPH**	**Survei indeks rata-rata konsumsi pengan masyarakat terhadap 9 kelompok pangan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84,00**	**348,69**	**85,00**	**340,90**	**86,00**	**440,60**	**86,00**	**1.130,19**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
4	**Program Penanganan kerawanan pangan**	**Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan**	**(Jumlah penurunan penduduk rawan pangan/jumlah penduduk)x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**	**10,28**	**6**	**10,00**	**6**	**21,00**	**16,00**	**41,28**	
5	**Program Pengawasan Keamanan pangan**	**Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)**	**Perbandingan produk pangan segar dan produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba / total bahan pangan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90,14**	**45,00**	**90,3**	**45,00**	**91**	**76,50**	**91,00**	**166,50**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																					**1.428,55**	
	Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	*Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)*	*Jumlah Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum dibagi dengan tanah budidaya x 100%*		-	-	-	-	*2*	*2*	*307,50*	*2*	*2*	*63,27*	-	-	-	-	-	-	-	*370,77*	DKPLH
1	**Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan (%)**	**(Jumlah rekomendasi izin membuka tanah yang diterbitkan/jumlah permohonan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**200,00**	**100**	**15,00**	**100**	**16,00**	**100**	**231,00**	
2	**Program Pendatagunaan Tanah**	**Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)**	**(Luas Tanah budidaya yang memiliki aspek hukum / luas tanah budidaya) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**	**90,00**	**75**	**11,00**	**80**	**12,50**	**80**	**113,50**	
3	**Program pengelolaan izin lokasi**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan (%)**	**(Jumlah rekomendasi izin lokasi yang diterbitkan/ jumlah permohonan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**80**	**25,00**			**85**	**25,00**	
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	*Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)*	*Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%*		-	*80*	*70*	*7,32*	*80*	*72,88*	*9,83*	*100*	*100*	*17,43*	-	-	-	-	-	-	-	*34,58*	
4	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)**	**Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**21,00**	**100**	**50,00**	**100**	**56,50**	**100**	**127,50**	
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	*Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilakukan (%)*			-	-	-	-	*80*	-	-	*80*	*56,25*	*64,78*	-	-	-	-	-	-	-	*64,78*	
5	**Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)**	**(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**117,28**	**100**	**115,98**	**100**	**130,50**	**100**	**363,75**	
6	**Program Penetapan Tanah Ulayat**	**Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota (%)**	**Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan dibagi jumlah tanah ulayat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**50,00**	**100**	**22,67**	**100**	**25,00**	**100**	**97,67**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					**22.655,11**	
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD)	*Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)*	*(Jumlah Luas yang direklamasi / Luas Kewajiban Reklamasi) x 100 %*	*30*	-	*32*	*32*	*1,00*	*35*	*35*	*683,02*	*37*	*37*	*248,18*	-	-	-	-	-	-	-	*932,20*	
1	**Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)**	**Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**100,35**	**100**	**90,00**	**100**	**95,00**	**100**	**285,35**	
2	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh**	**Jumlah penghargaan bidang LH yang diperoleh**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	**100,00**	**1**	**50,00**	**1**	**55,00**	**3**	**205,00**	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD)	*Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)*	*(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %*	*66.9*	*2,361.57*	*73,00*	*100,00*	*1.180,46*	*80,00*	*68,26*	*1.031,66*	*75,00*	*100,00*	*1.148,65*	-	-	-	-	-	-	-	*3.360,77*	
		Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	*(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %*	*17,00*	-	*18,00*	*18,00*		*20,00*	*20,00*		*22,00*	*22,00*		-	-	-	-	-	-	-		
3	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)**	**(Jumlah Sampah Tertangani /Timbulan Sampah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,10**	**4.830,89**	**76,00**	**2.767,76**	**77,00**	**825,00**	**77,00**	**8.423,66**	
		Persentase Sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	**(Jumlah Sampah Terkurangi / Timbulan Sampah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20,00**		**21,00**		**22,00**		**22,00**		
	Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD)	*Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan*	*(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %*	*65,00*	*220.43*	*70,00*	*81,25*	*110,28*	*72,00*	*81,36*	*304,52*	*75,00*	*82,61*	*802,78*	-	-	-	-	-	-	-	*1.217,57*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
4	**Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan**	**(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**472,55**	**75,00**	**410,00**	**75,00**	**493,50**	**75,00**	**1.376,05**	
5	**Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	**Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)**	**jumlah Kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan Usahax 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**16,00**		-	**75,00**	**33,00**	**75,00**	**49,00**	
6	**Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**	**jumlah usaha yang taat lingkungan/seluruh usaha yang berizin x 100**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**128,78**	**75,00**	**40,00**	**75,00**	**44,00**	**75,00**	**212,78**	
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	*persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup*	*persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup*	*30,00*	*29,00*	*50,00*	*50,00*	*29,88*	*60,00*	*60,00*	*201,02*	*62,00*	*62,00*	*393,62*	-	-	-	-	-	-	-	*624,52*	
	Program Peningkatan pengendalian polusi	*Indeks Kualitas Air*	*Indeks Kualitas Air*	*56.25*		*56.25*	-	-	*56.25*	-	-	*56.40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Indeks Kualitas Udara	*Indeks Kualitas Udara*	*84.56*		*84.56*	-	-	*84.56*	-	-	*84.56*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	*Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	*36.85*		*36.85*	-	-	*36.85*	-	-	*36.95*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	*Persentase masyarakat yang perduli terhadap lingkungan*	*(Jumlah masyarakat yang peduli lingkungan / jumlah masyarakat kota) x 100 %*	*25,00*	*219.99*	*25,00*	*25,00*	*89,43*	*28,00*	*27,00*	*421,56*	*29,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*510,99*	
	Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD)	*Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota*	*(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %*	*15.86*	*1.052,25*	*16,00*	*16,00*	*244,71*	*17,00*	*17,00*	*244,71*	*18,00*	*18,00*	*354,76*	-	-	-	-	-	-	-	*844,17*	
7	**Program pengelolaaan Kenanekaragaman hayati (KEHATI)**	**Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)**	**(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**1.586,98**	**100,00**	**1.184,58**	**100,00**	**1.193,50**	**100,00**	**3.965,05**	
8	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)**	**Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup / Jumlah Dokumen Perencanaan yangmembutuhkan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**80,00**	**100,00**	-	**100,00**	**330,00**	**100,00**	**410,00**	
9	**Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)**	**Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	**100,00**	**33,00**	**100,00**	**33,00**	
10	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**														**1,00**	**100,00**	**1,00**	**50,00**	**1,00**	**55,00**	**3,00**	**205,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					**30.167,12**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.990,48*	*12*	*12*	*2.687,03*	*12*	*12*	*3.292,07*	*12*	*12*	*1.195,76*	-	-	-	-	-	-	-	*7.174,86*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.810,43*	*12*	*12*	*1.481,88*	*12*	*12*	*1.629,77*	*12*	*12*	*386,71*	-	-	-	-	-	-	-	*3.498,36*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*319,52*	*100*	*155*	*359,71*	*100*	*141*	*380,83*	*100*	*10*	*42,99*	-	-	-	-	-	-	-	*783,54*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**3.678,74**	**100**	**4.414,39**	**100**	**5.171,50**	**100**	**13.264,64**	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan*	*Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%*	*98,26*	*701,60*	*98,44*	*99,50*	*815,76*	*100*	*99,14*	*867,94*	*100*	*98,77*	*551,08*	-	-	-	-	-	-	-	*2.234,78*	
		Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)	*(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %*		-	-	-	-	-	-	-	*97.5*	*97,5*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penguatan Kelembagaan	*Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015*	*Jumlah Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015*		-	*1*	*1*	*52,21*	*1*	*1*	*492,00*	*1*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*544,21*	

DISDUKCAPIL

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
2	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase validasi data kependudukan**	**Jumlah data penduduk yang telah melakukan validasi (update data) / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97,00**	**118,96**	**100**	**90,27**	**100**	**136,68**	**100**	**345,91**	
	Program pelayanan pencatatan sipil	*Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun & penerbitan akte kematian*	*Persentase realisasi kepemilikan akte kelahiran & akte kematian x bobot*	*97,37*	*54,73*	*85,00*	*85*	*123,48*	*85,00*	*93*	*101,51*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*224,99*	
3	**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil**	**Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**239,95**	**97,5**	**213,02**	**100**	**346,00**	**100**	**798,97**	
4	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan**	**Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan / Jumlah penduduk x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**97,00**	**64,00**	**100**	**520,57**	**100**	**712,28**	**100**	**1.296,85**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					**8.251,68**	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Persentase Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya*	*Jumlah Aparatur Desa yang meningkat kapasitasnya / Jumlah Aparatur Desa x 100%*	*80*	-	*85*	*85*	-	*90*	*88*	-	*92*	*92,59*	*136,00*	-	-	-	-	-	-	-	*136,00*	DINAS SOSIAL
	Program peningkatan kapasitas pemerintahan terdepan	*Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan terdepan*	*Persentase masyarakat yang merasa puas terhadap layanan*	*85*	*242,76*	*90*	*88*	*5,27*	*95*	*90*	*495,36*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*500,63*	
	Program peningkatan SDM aparatur terdepan	*Indeks kepuasan layanan*	*Persentase aparatur desa terhadap peningkatan SDM*	*75*	*417,47*	*78,94*	*80*	*244,29*	*80*	*80*	-	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*244,29*	
1	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase administrasi desa yang dibina**	**Jumlah administrasi desa yang dibina/ jumlah desa x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**1.302,22**	**95**	**611,14**	**100**	**950,75**	**100**	**2.864,11**	
2	**Program Penataan Desa**	**Persentase Desa yang ditata**	**Jumlah desa yang ditata/ jumlah total desax 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**329,79**		-			**100**	**329,79**	
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa/ kel	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif*	*Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif/ Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada x 100%*	*80*	*346,30*	*85*	*85*	*193,12*	*85*	*85*	*157,64*	*87*	*87*	*25,50*	-	-	-	-	-	-	-	*376,26*	
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kel	*Persentase masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa/kel*	*Jumlah masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa-kel / jumlah masyarakat yang hadir x 100%*	*80*	*608,42*	*85*	*85*	*695,60*	*90*	*90*	*652,25*	*87*	*87*	*8,20*	-	-	-	-	-	-	-	*1.356,05*	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/kel	*Persentase PKK yang aktif*	*Jumlah PKK yang aktif / jumlah kelompok PKK x 100%*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	*143,40*	-	-	-	-	-	-	-	*143,40*	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	*Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif*	*Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif / jumlahLembaga Ekonomi Desa x 100%*	*75*	-	*80*	*80*	-	*85*	*85*	-	*90*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina/ jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**642,11**	**95**	**763,55**	**100**	**895,50**	**100**	**2.301,16**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					**6.854,47**	
	Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	*Pasangan Usia Subur Yang Terputus/ Terhenti Menggunakan Kontrasepsi*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*85*	*185,74*	*64*	*70*	*262,93*	*65*		*407,52*	*67*		*248,12*	-	-	-	-	-	-	-	*918,57*	
	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	*Persentase Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%)*	*(Jumlah Balita yang terpantau tumbuh kembangnya / Jumlah Balita yang menjadi target) x 100 %*	*9385,11*		*63*	-	*250,96*	*64*	-	*86,58*	*83*	*90*	-	-	-	-	-	-	-	-	*337,54*	
	Program peningkatan pelayanan KB	*Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi*	*Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi*	*85*	*86,55*	*62*	*62*	*785,49*	*71,29*	*10,02*	*313,17*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1.098,66*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pelayanan Kontrasepsi	*Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)*	*(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/ jumlah pasangan usia Subur) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	66	63,3	1.019,57	-	-	-	-	-	-	-	1.019,57	DINAS KESEHATAN
1	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)**	**(Jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi/jumlah pasangan usia Subur) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**67,78**	**1.788,63**	**68,55**	**62,50**	**69,21**	**129,41**	**69,21**	**1.980,54**	
	Program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*96*	*63,47*	*32*	*0*	*95,10*	*30,4*	*30,4*	*145,31*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*240,41*	
	Program kesehatan reproduksi remaja	*Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun*	*Jumlah perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun / Jumlah Ibu melahirkan*	*0*	-		-		*0*	*0*		*29,73*	*2,3*	*24,73*	-	-	-	-	-	-	-	*24,73*	
	program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif*	*93*	*85,11*	*63*	*95,8*	*156,20*	*64*	*64*	*86,58*	*65*	*0*	*81,95*	-	-	-	-	-	-	-	*324,73*	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif**	**Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**235**	**280,50**	**235**	**97,00**	**235**	**177,25**	**705**	**554,75**	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase pengendalian penduduk**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2,29**	**93,47**	**2,25**	**113,00**	**2,22**	**148,50**	**6,76**	**354,97**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																					**38.086,24**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*	*12*	*780,71*	*12*	*12*	*1054,07*	*12*	*12*	*1028,56*	*12*	*12*	*1020,41*	-	-	-	-	-	-	-	*3.103,04*	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)*	*12*	*180,02*	*12*	*12*	*409,62*	*12*	*12*	*266,54*	*12*	*12*	*126,09*	-	-	-	-	-	-	-	*802,25*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*Peningkatan Disiplin Aparatur (bulan)*	*12*	*66,49*	*12*	*12*	*93,66*	*12*	*12*	*103,06*				-	-	-	-	-	-	-	*196,72*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ Jumlah aparatur) x 100%*	*12*	*118,97*	*12*	*12*	*86,99*	*12*	*12*	*140,87*	*12*	*12*	*49,90*	-	-	-	-	-	-	-	*277,76*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)**	**Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (bulan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**3668,61**	**12**	**8389,30**	**12**	**8744,5**	**12**	**20.802,41**	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	*Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (dokumen)*	*(Jumlah sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia / Jumlah Sarana yang dibutuhkan) x 100 %*				*0*	-		*0*	-	*100*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	*Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)*	*(Jumlah sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik/ Jumlah Sarana prasarana perhubungan yang adaj x 100 %*		*37,69*	*80*	*80*	*14,97*	*80*	*60*	*124,62*	*80*	*60*	*99,03*	-	-	-	-	-	-	-	*238,62*	
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	*Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)*	*angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan x 100 %*		*212,79*	*1*	*1*	*42,55*	*1*	*0*	*96,84*	*1*	*1*	*22,30*	-	-	-	-	-	-	-	*161,69*	
	Program peningkatan pelayanan angkutan	*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%)*	*Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum*		*4,70*	*30*	*30*	*6,49*	*30*	*25*	*8,10*	*35*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*14,59*	
		Persentase tingkat pelayanan angkutan umum (%)	*Persentase tingkat pelayanan angkutan umum*			*30*	*30*		*30*	*30*			*0*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor	*persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)*	*(Jumlah Kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor/ jumlah kendaraan bermotor) x 100%*		*71,87*	*80*	*80*	*115,70*	*80*	*80*	*346,70*	*80*	*36*	*818,61*	-	-	-	-	-	-	-	*1.281,01*	
2	**Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)**	**Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-1 - jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n/ jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n-1 x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**35**	**5.158,15**	**40**	**2.948,51**	**45**	**2.591,50**	**45**	**10.698,16**	
3	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**persentase sarana prasarana perkeretaapian yang diaktifkan (%)**	**jumlah sarana yang daiktifkan/jumlah sarana prasarana yang ada**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**200,00**	**45**	**145,00**	**65**	**165,00**	**65**	**510,00**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																					**22.567,99**	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD)	*Persentase OPD yang menggunakan Sistem informasi Pemerintahan yang berbasis TIK*	*(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %*	*10*	*1.800,00*	*15*	*10*	*1007,28*	*30*	*10*	*1.072,96*	*45*	*26*	*902,14*	-	-	-	-	-	-	-	*2.982,38*	SEKDAKO
		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	*(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %*	-		*10*	*0*		*30*	*0*		*60*	*0*		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	*Jumlah media massa yang bekerjasama*	*Jumlah media massa yang bekerjasama*	*12*	*111,00*	*12*	*11*	*511,81*	*11*	*11*	*554,65*	*11*	*20*	*331,46*	-	-	-	-	-	-	-	*1.397,92*	
	Program Peningkatan Konektifitas Intra dan Antar SKPD	*Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain*	*Terwujudnya jaringan konektifitas jaringan informasi dan komunikasi*						*26*	*13*	*691,79*	*26*	*26*	*1.902,22*	-	-	-	-	-	-	-	*2.594,01*	
	Program kerjasama informasi dengan media massa	*Jumlah media massa yang bekerjasama*	*Jumlah media massa yang bekerjasama (media)*	*12*	*111,00*	*12*	*12*	*250,00*	*12*	*11*	*642,86*	*11*	*11*	*663,48*	-	-	-	-	-	-	-	*1.556,34*	
	Program pengembangan komunikasi, informasi dengan media massa	*Persentase OPD yang menggunakan sistem informasi pemerintahan yang berbasis TIK*	*(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %*	*10*	*1.800,00*	*15*	*15*	*1.500,00*	*30*	*30*	*1.600,00*	*50*	*50*	*1.650,00*	-	-	-	-	-	-	-	*4.750,00*	
1	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK (%)**	**(Jumlah OPD yang sudah meggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**	**559,87**	**85**	**450,00**	**95**	**500,00**	**95**	**1.509,87**	
		Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)	**Jumlah publikasi kegiatan DPRD dalam masa sidang (masa sidang)**												**3**	**377,94**					**3**	**377,94**	
2	**Program Aplikasi Informatika**	**Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)**	**(Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75**	**2.043,86**	**85**	**3155,68**	**95**	**2.200,00**	**95**	**7.399,54**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																					**31.017,69**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	-	-	*12*	*12*	*1.870,83*	*12*	*12*	*1.744,04*	*12*	*12*	*1.521,36*	-	-	-	-	-	-	-	*5.136,23*	
	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	*Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	*Peningkatan sarana dan prasarana aparatur*	-	-	*12*	*12*	*201,85*	*12*	*12*	*142,87*	*12*	*12*	*231,59*	-	-	-	-	-	-	-	*576,32*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDMnya*	*(jumlah aparatur yang meningkat SDM nya/ jumlah aparatur) x 100%*	-	-	*12*	*12*	*96,04*	*12*	*12*	*198,65*	*12*	*12*	*61,57*	-	-	-	-	-	-	-	*356,26*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*(Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap/jumlah ASN) x 100%*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD*	*(jumlah program di RKPDdengan nomenklatur dan indikator yang asama/jumlah program di RPJMD) x 100%*	-	*151,17*	*100*	*100*	*5,27*	*100*	*100*	*3,61*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*8,88*	
		Persentase Ketersediaan Dokumen perencanaan Pembangunan daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen)	*(jumlah DokumenPerencanaan yang tersusun)*	-		*1*	*1*		*1*	*1*		*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**4.872,80**	**12**	**6.166,24**	**12**	**7.007,00**	**36**	**18.046,04**	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	*25,45*	*68*	*94*	*364,36*	*71*	*81*	*371,92*	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/jumlah UKM x100%*	-		-			*41*			*44*	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	*33*	*60,64*	*33*	*29*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	*Persentase Koperasi sehat (%)*	*Jumlah Koperasi yang sehat/Jumlah koperasi x 100%*	-	*205,85*	-	-	*160,08*	*74*	*74*	*81,40*	*77*	*23*	*32,53*	-	-	-	-	-	-	-	*274,00*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai (unit)	*Jumlah koperasi yang berkualitas yang dinilai (unit)*	*24*		*54*	*30*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	KOPERINDAG
		bertambahnya koperasi yang aktif(koperasi)	*bertambahnya koperasi yang aktif(koperasi)*	*2*		*2*	*0*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		berkurangnya kredit macet (%)	*berkurangnya kredit macet (%)*	*5*		*5*	*5*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.**	**Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21**	**94,00**	**23,53**	**375,00**	**26,47**	**284,90**	**26,47**	**753,90**	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	*Persentase Koperasi sehat (%)*	*Jumlah Koperasi yang sehat/Jumlah koperasi x 100%*	-	*205,85*	-	-	*160,08*	*74*	*74*	*81,40*	*77*	*23*	*32,53*	-	-	-	-	-	-	-	*274,00*	
		Jumlah Koperasi berkualitas yang dinilai (unit)	*Jumlah koperasi yang berkualitas yang dinilai (unit)*	*24*	-	*54*	*30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		bertambahnya koperasi yang aktif(koperasi)	*bertambahnya koperasi yang aktif(koperasi)*	*2*	-	*2*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		berkurangnya kredit macet (%)	*berkurangnya kredit macet (%)*	*5*	-	*5*	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**Persentase Koperasi sehat (%)**	**Jumlah Koperasi sehat / jumlah koperasi x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**22**	**122,72**	**24**	**303,00**	**26**	**295,00**	**26**	**720,72**	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/ jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	*25,45*	*68*	*94*	*364,36*	*71*	*81*	*371,92*	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/ jumlah UKM x100%*	-	-	-	-	-	*41*	*0*	-	*44*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	*33*	*60,64*	*33*	*29*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	**Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)**	**jumlah koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60%/jumlah koperasi x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**145,42**	**45**	-	**60**	**150,00**	**60**	**295,42**	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/ jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	*25,45*	*68*	*94*	*364,36*	*71*	*81*	*371,92*	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/ jumlah UKM x100%*	-	-	-	-	-	*41*	*0*	-	*44*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	*33*	*60,64*	*33*	*29*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	*Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)*	*Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)*	-	*221,04*	*75*		*138,15*	*50*	*50*	*86,95*	*50*	*35*	*143,18*	-	-	-	-	-	-	-	*368,28*	
		Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	*Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)*	-	-	-	-	-	*5*	*5*	-	*5*	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)	*Jumlah kelompok yang menjadi koperasi (koperasi)*	*1*	-	*3*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)	*Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan (orang)*	*250*	-	*1.330*	*290*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)	*Jumlah penerima fasilitasi modal yang mampu mengembangkan usaha (orang)*	*50*	-	*285*	*85*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)**	**Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha / jumlah UMkM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**47**	**338,00**	**50**	**262,97**	**53**	**270,00**	**53**	**870,97**	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	*Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)*	*Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu/jumlah koperasi x 100%*	-	*30,58*	-	-	*25,45*	*68*	*94*	*364,36*	*71*	*81*	*371,92*	-	-	-	-	-	-	-	*761,72*	
		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	*Jumlah UKM yang memiliki ijin usaha/ jumlah UKM x100%*	-	-	-	-	-	*41*	*0*	-	*44*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)	*Jumlah Koperasi dan UMKM yang meningkat Skala usahanya (Koperasi dan UMKM)*	*33*	*60,64*	*33*	*29*		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
6	**Program Pengembangan UMKM**	**Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)**	**jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/ / jumlah UMKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,8**	**89,80**	**0,9**	-	**1,5**	**200,00**	**1,5**	**289,80**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					**3.101,61**	
	Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan (PD)	*Jumlah Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)*	*Jumlah Perizinan yang Diterbitkan*	*1.093*	*205,66*	*1.232*	*1.901*	*228,60*	*509*	*1.567*	*167,06*	*560*	*272*	*105,60*	-	-	-	-	-	-	-	*501,26*	
		Jumlah Non Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)	*Jumlah Non Perizinan yang Diterbitkan*	*0*	-	*0*	*0*	-	*491*		-	*540*	*680*		-	-	-	-	-	-	-		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**511,29**	**B**	**188,96**	**B**	**218,96**	**B**	**919,22**	DPMPTSP
2	**Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal**	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP**	**Nilai Rata-rata Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**243,93**	**B**	**267,93**	**B**	**511,87**	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (PD)	*Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)*	*Jumlah Investasi PMDN Lokal*	-		-	-	-	*20*	*200,44*	*31,78*	*20*	*28,28*	*99,46*	-	-	-	-	-	-	-	*131,25*	
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	*Jumlah Investasi PMDN Nasional*	-		-	*86,38*	-	*5*	*0*	-	*5*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	*Jumlah Investasi PMA*	-		-	*0*	-	*1*	*0*	-	*1*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)**	**(Nilai Investasi Tahun N - Nilai Investasi (N-1)) x 100% / Nilai Investasi N-1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**	**110,62**	**20**	**110,66**	**25**	**121,66**	**25**	**342,95**	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (PD)	*Jumlah Investor yang Berinvestasi (Perusahaan)*	*Jumlah Investor yang Berinvestasi (Perusahaan)*	-	*193,26*	*4*	*158*	*145,55*	*8*	*19*	*152,36*	*12*	*11*	*6,48*	-	-	-	-	-	-	-	*304,40*	
4	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)**	**Jumlah Investasi PMDN Lokal**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25**		**25**		**30**		**215**		
		Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	***Jumlah Investasi PMDN Nasional***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***10***	**162,63**	***10***	**58,20**	***10***	**64,20**	***40***	**285,02**	
		Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	***Jumlah Investasi PMA***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***1***		***1***		***1***		***5***		
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)**	**(Jumlah Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal / Jumlah Total Perusahaan) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**45,65**	**100**	-	**100**	**60,00**	**100**	**105,65**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					**48.823,78**	
	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya pelayanan ADM perkantoran (buah)*			-	*12*	*12*	*1.433,65*	*12*	*12*	*1.428,95*	*12*	*12*	*1.459,52*	-	-	-	-	-	-	-	*4.322,12*	
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*Jumlah sarana prasaran yang disediakan (buah)*			-	*12*	*12*	*292,41*	*12*	*12*	*169,39*	*12*	*12*	*104,08*	-	-	-	-	-	-	-	*565,88*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas (orang)*			-	*12*	*12*	*80,99*	*12*	*12*	*86,85*	*12*	*12*	*22,10*	-	-	-	-	-	-	-	*189,94*	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Tersedianya Sumber daya Aparatur yang berkualitas (orang)*			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**													**4.640,15**		**6.480,85**		**7.317,00**		**18.438,00**	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	*Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)*	*organisasi yang memiliki kepengurusan dan program serta kegiatan yang jelas*	*12*	*1.548,70*	*12*	-	*573,96*	*13*	-	*908,10*	*15*	-	*1.121,03*	-	-	-	-	-	-	-	*2.603,09*	DISPARBUDORA
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)**	**Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15**	**1.468,37**	**15**	**933,10**	**15**	**1.644,06**	**45**	**4.045,53**	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	*Jumlah organisasi olahraga yang aktif (organisasi)*	*Organisasi yang memiliki kepengurusan dan program serta kegiatan yang jelas*		*2.031,80*		-	*812,10*	-	-	-	*15*	-	*120,00*	-	-	-	-	-	-	-	*932,10*	
		Jumlah Cabang olah raga masal yang berkembang di masyarakat (cabang)	*Jumlah Cabang olah raga masal yang berkembang di masyarakat (cabang)*	*12*	-	*14*	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	*Jumlah atlet berprestasi (atlet)*	*Atlet beprestasi tingkat Provinsi/ Regional/ Nasional/ Internasional*		-	-	-	-	*135*	-	*1.479,00*	*143*	-	*1.668,40*	-	-	-	-	-	-	-	*3.147,40*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah)*	*Sarana dan prasarana yang memiliki fasilitas sesuai dgn peraturan*	*2*	*48,90*	*2*	-	*1.172,00*		-	-	*3*	-	*1.900,00*	-	-	-	-	-	-	-	*3.072,00*	
3	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	**Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)**	**Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**148**	**2.003,28**	**153**	**5.414,16**	**160**	**2.045,21**	**160**	**9.462,64**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
4	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)**	**Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	490,00	75	500,00	75	1.055,09	75	2.045,09	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																					**818,27**	
	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	*Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)*	*Ketersediaan data Statistik daerah dan OPD (termasuk kerjasama BPS)*	*85*	*282*	*85*	*85*	*13,99*	*86*	*86*	*125,29*	*87*	*87*	*8,99*	-	-	-	-	-	-	-	*148,27*	SETDAKO
	Program Pengembangan Data dan Informasi	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)*	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)*	*28*	*500*	*28*	*Tidak digunakan*	-	*28*	*0*	*0*	*28*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-		
1	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah (%)**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	75,50	88	469,50	90	125,00	90	670,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																					**259,95**	
	Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	*Terwujudnya pengamanan informasi pemerintah daerah*		-	-	*12*	*12*	*22,35*	*12*	*12*	*21,41*	*12*	*12*	*14,1*	-	-	-	-	-	-	-	*57,86*	SETDAKO
1	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah yang terfasilitasi (Bulan)**	**Pengelolaan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	63,55	12	63,55	12	75,00	36	202,09	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																					**51.000,11**	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	*Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)*			-	*12*	*12*	*1.437,37*	*12*	*12*	*1.389,78*	*12*	*12*	*1.456,21*	-	-	-	-	-	-	-	*4.283,37*	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	*Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan (bulan)*			-	*12*	*12*	*299,74*	*12*	*12*	*231,37*	*12*	*12*	*109,17*	-	-	-	-	-	-	-	*640,28*	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya (%)*			-	*12*	*12*	*97,60*	*12*	*12*	*138,36*	*12*	*12*	*29,75*	-	-	-	-	-	-	-	*265,71*	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.538,58	12	5.886,23	12	6.474,85	36	16.899,66	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD	*Persentase budaya tak benda yang lestari*	*(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah objek pemajuan kebuadayaan) X100%*		*60,45*	-	-	*328,45*	*13,3*	*6,2*	*1.268,06*	*17,8*	*6,05*	*15,70*	-	-	-	-	-	-	-	*1.612,21*	
		Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah (Jenis)	*(Jumlah Ragam seni pertunjukan budaya daerah)*	*14*	-	*14*	*14*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)**	**(Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/Total jumlah objek pemajuan kebuadayaan) X100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	874,51	26,7	800,00	31,1	880,00	31,1	2.554,51	
	Program Pengembangan Nilai Budaya (PD)	*Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)*	*Jumlah Kelompok Seni yang mandiri/ Jumlah Kelompok seni yang ada (%)*	*0,25*	*192,08*	*4,4*	*45*	*176,27*	*8,9*	*8,9*	*250,28*	*13,3*	*7,9*	*208,01*	-	-	-	-	-	-	*7,9*		
		Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	*Jumlah Kelompok Budaya yang mandiri/ Jumlah Kelompok Budaya yang ada (%)*	*40*	-	*40*	*40*	-	*56*	*52,2*	-	*64*	*20*	-	-	-	-	-	-	-	*20*		
		Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)	*Jumlah Grup kesenian yang aktif (Kelompok)*	*43*	-	*45*	*45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*634,56*	
		Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)	*Jumlah Kebudayaan dan kesenian yang ada (Jenis)*	*43*	-	*44*	*44*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)	*Jumlah Tempat (indoor dan outdoor) pertunjukan kesenian yang tersedia (unit)*	*18*	-	*19*	*19*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)**	**(Jumlah kelompok seni yang mandiri/Jumlah kelompok seni yang ada) X 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	617,93	13.3	650,00	13.3	750,00	13.3	2.017,93	SETDAKO

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
4	**Program Pembinaan Sejarah**	**Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)**	**(Jumlah kelompok masyarakat yang mengetahui sejarah lokal/Jumlah kelompok masyarakat yang ada) X 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	140,64	50	500,00	60	550,00	60	1.190,64	DIMA
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD)	*Persentase budaya benda yang lestari*	*(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100*		*2.390,25*	-	-	*4.492,68*	*61,34*	*56,16*	*2.316,89*	*63,02*	*53,81*	*1.958,58*	-	-	-	-	-	-	-	*8.768,15*	
		Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan	*Jumlah Dokumentasi sejarah dan budaya yang dipublikasikan*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Buku (Buah)	*- Buku (Buah)*	*2*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Film (Buah)	*- Film (Buah)*	*0*	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Museum dikelola (buah)	*Jumlah Museum dikelola (buah)*	*6*	-	*6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Kunjungan Museum (buah)	*Angka Kunjungan Museum (buah)*	*31.839*	-	*31.062*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)	*Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi (Bangunan/kawasan)*	*1*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)	*Jumlah Perencanaan Revitalisasi (Bangunan/Kawasan)*	*4*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)	*Hasil Penelitian Sejarah dan Budaya (dokumen)*	*2*	-	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)	*Jumlah Pengunjung Infobox (Orang)*	*10.653*	-	*8.549*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)	*Jumlah Pengunjung Iptek Center (Orang)*	-	-	*1.878*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)	*Jumlah Cagar Budaya yang terpelihara (Buah)*	*3*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	*Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif*	*Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif*		-	-	-	-	*10*	*11*	*777,24*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*777,24*	
5	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Presentase budaya benda yang lestari (%)**	**(Jumlah cagar budaya yang lestari/Total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) X 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,18	1.589,68	60,55	1.600,00	63,92	1.700,00	63,92	4.889,68	
6	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Jumlah kunjungan museum (orang)**	**(Jumlah kunjungan museum (tiket terjual)(orang)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.000	2.024,18	32.000	1.020,00	33.000	3.422,00	33.000	6.466,18	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					**16.027,70**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*487,33*	*12*	*12*	*653,35*	*12*	*12*	*714,56*	*12*	*12*	*546,45*	-	-	-	-	-	-	-	*1.914,37*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*255,21*	*12*	*12*	*273,98*	*12*	*12*	*205,78*	*12*	*12*	*298,62*	-	-	-	-	-	-	-	*778,37*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*81,93*	*100*	*100*	*74,16*	*100*	*100*	*129,83*	*100*	*100*	*50,57*	-	-	-	-	-	-	-	*254,56*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.016,65	100	3.288,36	100	3.683,00	100	9.988,01	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	*Angka kunjungan (orang)*	*jumlah orang yang berkunjung ke pustaka daerah*	*61922*	*189,87*	*61000*	*61314*	*114,12*	*63000*	*64500*	*1.284,33*	*65000*	*26860*	*97,44*	-	-	-	-	-	-	-	*1.495,89*	
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Terkelolanya perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan pustaka**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	481,00	12	377,00	12	709,50	12	1.567,50	
3	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Naskah kuno milik daerah kabupaten/kotayang**	**Jumlah naskah kuno yang dilestarikan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10,00	4	8,00	4	11,00	12	29,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																					**1.573,42**	
	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	*Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%)*	*(OPD yang mengelola arsip secara baku / jumlah OPD) x 100 %*	*27*	*15,11*	*30*	*40*	*14,50*	*40*	*45*	*13,06*	*45*	*50*	*13,25*	-	-	-	-	-	-	-	*40,81*	AM DAN KEARSIPAN
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	*Persentase pengelola kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (%)*	*(jumlah pengelola kearsipan dan perpustakaan yang memperoleh sertifikat / jumlah pengelola yang ada) x 100 %*	*30*	*56,13*	*40*	*45*	*62,98*	*45*	*50*	*68,98*	*50*	*60*	*26,46*	-	-	-	-	-	-	-	*158,41*	
1	**Program Pengelolaan Arsip**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan pengelolaan arsip (bulan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	114,83	12	275,00	12	385,48	12	775,30	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program penyelamatan dan pelestarian dokume'-rsip daerah	*Jumlah arsip Statis yang terselamatkan (Lembar)*	*Jumlah arsip Statis yang tersimpan di depo arsip*	*1700*	*123,44*	*1725*	*865*	*27,08*	*2500*	*1956*	*46,03*	*4000*	*4422*	*44,91*	-	-	-	-	-	-	-	*118,02*	DINAS PERPUSTAKA
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	*Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%)*	*(Jumlah sarana dan prasana sesuai standar / jumlah sarana prasarana yang ada) x 100 %*	*20*	-	*20*	*0*	-	*20*	*0*	-	*30*	*40*	*15,88*	-	-	-	-	-	-	-	*15,88*	
2	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Terlaksananya perlindungan & penyelamatan arsip (bulan)**	**Jumlah bulan pelaksanaan perlindungan & penyelamatan arsip**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**70,00**	**12**	**160,00**	**12**	**235,00**	**12**	**465,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																					**2.075,13**	
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	*Jumlah Produksi Ikan (ton)*	*Jumlah produksi perairan umum dan budidaya*	*214,98*	*124,00*	*216,05*	-	-	*216*	*217,24*	-	*216,5*	*206,28*	*84,33*	-	-	-	-	-	-	-	*84,33*	DKP3
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	*Jumlah Produksi Ikan (ton)*	*Jumlah produksi perairan umum dan budidaya*	*214,98*	*124,00*	*216,05*	*216,05*	*247,06*	*216*	*217,24*	*126,28*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*373,34*	
1	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah Produksi Ikan (ton)**	**Jumlah produksi perairan umum dan budidaya**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**217**	**487,46**	**217,50**	**470,00**	**218,00**	**460,00**	**218,00**	**1.417,46**	
2	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)**	**jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun dalam bantuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**23,2**	**50,00**	**36,67**	**60,00**	**36,00**	**90,00**	**36,00**	**200,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																					**54.703,46**	
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	*Persentase Objek Wisata Unggulan (%)*	*(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %*		*4.491,60*	-	-	*3.706,70*	*32,35*		*3.211,82*	*38,24*		*3.943,94*	-	-	-	-	-	-	-	*10.862,46*	Parpora
		Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)	*Jumlah Destinasi wisata yang dikembangkan (Objek)*	*8*	-	*6*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)	*Jumlah Destinasi baru yang dibangun (objek)*	*2*	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)**	**(Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75**	**9.457,00**	**80**	**4.804,68**	**90**	**12.000,00**	**90**	**26.261,68**	
		Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	***(Jumlah objek wisata unggulan tipe A/Total jumlah objek wisata yang adaj X100%***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***50***		***55,88***		***61,76***		***61,76***		
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	*Jumlah Wisatawan (orang)*	*Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)*	*331.484*	*2.523,00*	*354.611*	*858.335*	*2.322,90*	*379.351*	*245.396*	*1.736,09*	*405.817*	*95.995*	*1.736,09*	-	-	-	-	-	-	-	*5.795,07*	
2	**Program Pemasaran Pariwisata**	**Jumlah Wisatawan (orang)**	**(Jumlah pengunjung objek wisata(tiket masuk)**	-	**331.483,00**	**354.610**	-	-	**379.350**	**236.776**	-	**405.816**	-	-	**434.128**	**1.407,24**	**1.000.000**	**1.866,61**	**1.300.000**	**4.110,29**	**1.300.000**	**7.384,13**	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD)	*Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)*	*(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri/Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif) x 100 %*		-		-	*35,05*	*15*		*268,34*	*17*		*272,61*	-	-	-	-	-	-	-	*576,00*	
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)	*Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya (jenis)*	-	-	*21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)	*Jumlah Pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK (jenis)*	-	-	*16*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	*Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)*	*Jumlah MoU Kemitraan aktif dibagi dengan jumlah MoU Kemitraan dikali seratus persen*	-	*76,10*	*33*	-	*42,90*	*50*	-	*1.023,46*	*70*	-	*405,00*	-	-	-	-	-	-	-	*1.471,36*	
		Jumlah Rumah Makan (buah)	*Jumlah Rumah Makan (buah)*	*46*	-	*46*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Home Stay (Buah)	*Jumlah Home Stay (Buah)*	*45*	-	*37*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pramuwisata (orang)	*Jumlah Pramuwisata (orang)*	*19*	-	*10*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)**	**(Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri/Jumlah pelaku ekonomi kreatif) X100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**18**	**1.109,20**	**19**	**253,61**	**20**	**696,19**	**20**	**2.059,01**	
		persentase MoU kemitraan aktif (%)	***(Jumlah MOU kemitraan aktif/jumlah MOU kemitraan) X 100%***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***75***		***80***		***90***		***90***		
5	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual**	**Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)**	**(Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HAKI/Jumlah produk ekonomi kreatif) X 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,50**	**144,93**	**0,50**	**68,82**	**0,50**	**80,00**	**0,50**	**293,75**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					**34.824,31**	
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	*Jumlah Produksi Padi (ton GKG)*	*Produktivitas x luas panen*		-	-	-	-	-	-	-	*14.600,00*	*17.874,46*	*929,46*	-	-	-	-	-	-	-	*929,46*	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	*Jumlah Produksi karet (ton)*	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*		-	-	-	-	-	-	-	*1.255,00*	*2.012,86*	*162,55*	-	-	-	-	-	-	-	*162,55*	
		Jumlah Produksi kakao (ton)	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*		-	-	-	-	-	-	-	*535,00*	*566,12*		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	*Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)*	*(pemotongan tercatat + 5 % (Pemotongan tercatat) x 173,5*		-	-	-	-	*351,68*	*336,99*	*957,23*	*352,68*	*334,53*	*541,70*	-	-	-	-	-	-	-	*1.498,93*	
		Jumlah Produksi Telur (ton)	*Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6 kg*		-	-	-	-	*133,86*	*139,17*	-	*134,36*	*228,92*	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	*Daging Ayam Buras :*		-	-	-	-	*897,06*	*901,62*		*897,86*	*885,6*		-	-	-	-	-	-	-	-	
			(150% x populasi) x 0,715 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Daging Ayam Ras Pedaging		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			(60% x 97% x populasi) x 0,825 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Daging Ayam Petelur :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			(50% x populasi) x 0,825 kg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi ternak sapi (ekor)	*Jumlah Populasi ternak sapi(ekor)*	*6.051*	*208,31*	*6.464*	*6.464*	*48,69*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*48,69*	
		Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Kerbau (ekor)*	*1.261*		*1.363*	*1.363*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Kambing (ekor)*	*2.941*		*2.943*	*2.943*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Ayam Pedaging (ekor)*	*175.649*		*176.600*	*176.600*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (ekor)	*Jumlah Populasi Ternak Ayam Petelur (ekor)*	*54.154*		*54.770*	*54.770*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	*Persentase penambahan sawah beririgasi (%)*	*Penambahan sawah berigasi / sawah beririgasi data awal*	-		-	-	-	-	-	-	*15*	*0*	*42,97*	-	-	-	-	-	-	-	*42,97*	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	*Jumlah produksi padi (GKG) (ton/luas panen)*	*Jumlah produksi Padi saat panen*	*14.274,00*	*2.181,38*	*16.108,00*	*4,69*	*1.723,09*	*14.500,00*	*17.926,78*	*3.609,06*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5.332,15*	
		Jumlah luas penanaman palawija (Ha)	*Jumlah luas penanaman palawija (Ha)*	*175,75*	-	*194,80*	*194,8*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Luas penanaman sayuran (Ha)	*Jumlah Luas penanaman sayuran (Ha)*	*140,00*	-	*199,19*	*199,19*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan (batang)	*Jumlah Populasi Tanaman Buah-buahan (batang)*	*370,08*	-	*385,27*	*385,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Produktivitas Karet Kering (Kg/ Ha)		*1.248,23*	-	*1.250,23*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Produktivitas Kakao Kering (Kg/ Ha)		*1.024,68*	-	*1.055,56*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi karet (ton)		-	-	-	-	-	*1.250,00*	*1.540,17*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Produksi kakao (ton)		-	-	-	-	-	*530,00*	*565,73*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perikanan (PD)	*Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian*	*Perbandingan luas sawah dengan handtraktor*	-	-	-	-	-	*01:18*	*01:16*	*336,83*	*01:16*	*01:15,1*	*640,66*	-	-	-	-	-	-	-	*977,49*	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	*Dipromosikan nya produk pertanian Sawahlunto ditingkat Kota Provinsi dan Nasional (kali/ Tahun)*	*Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (kali/ Tahun)*	*4*	*81,11*	*5*	*5*	*130,21*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*130,21*	
	Program Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang	*Tersedianya kawasan Agrowisata (lokasi)*	*Tersedianya kawasan agrowisata (lokasi)*	*1*	*637,28*	*1*	*3,1*	*341,83*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*341,83*	
1	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian**	**(Perbandingan luas sawah dengan handtraktor)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1:14**		**1:12**		**1:10**		**1:10**		DKP3
		Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	**Produktivitas x luas panen**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14.700**		**15.593**		**15.747**		**46.040**		
		Jumlah Produksi Karet (ton)	**Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.260**		**1.729**		**1.730**		**4.719**		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	**Produktivitas x luas panen tanaman yang menghasilkan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**540**		**568**		**569**		**1.677**		
		Jumlah Produksi :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		Daging Sapi (ton)	**pemotongan tercatat + 5%(pemotongan tercatat) x 173,5**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**353,68**		**354,68**		**355,68**		**1.064**		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	***Daging Ayam Buras :***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**3.659,08**		**2.624,64**		**3.730,60**		**10.014,32**	
			(150% x populasi) x 0,715 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			Daging Ayam Ras Pedaging																				
			(60% x 97% x populasi) x 0,825 kg												**898,66**		**899,46**		**900,26**		**2698,38**		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
			Daging Ayam Petelur :																				
			(50% x populasi) x 0,825 kg																				
		Jumlah Produksi Telur (ton)	***Telur Ayam Ras: 60% x populasi x 10,6 kg***																				
			Telur Itik 60% x populasi x 7,6 kg												***134,86***		***135,36***		***135,86***		***406,08***		
			telur ayam buras : 30% x populasi x 1,4 kg																				
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	*Persentase penambahan sawah beririgasi (%)*	*Penambahan sawah berigasi / sawah beririgasi data awal*	-	-	-	-	-	-	-	-	*15*	*0*	*42,97*	-	-	-	-	-	-	-	*42,97*	
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase Penambahan Sawah Berirgasi (%)**	**Penambahan sawah beririgasi / sawah berigasi data awal**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**3.739,17**	**5**	**2.453,00**	**2,5**	**3.370,00**	**12,5**	**9.562,17**	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	*Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan zoonosis (%)*	*(Ternak yang tidak terserang penyakit / total ternak dilayani) x 100%*	-	*399,38*	-	-	*182,64*	*90*	*89,72*	*876,13*	*91*	*100*	*157,74*	-	-	-	-	-	-	-	*1.216,50*	
		Penanggulangan Penyakit ternak / hewan (jenis layanan pertahun	*Penanggulangan Penyakit ternak/ hewan (jenis layanan pertahun)*	*7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis (%)**	**(jumlah kejadian penyakit tahun lalu-jumlah kejadian penyakit tahun ini/jumlah kejadian penyakit tahun lalu)x100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**20**	**425,26**	**20**	**429,00**	**10**	**544,93**	**10**	**1.399,19**	
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	*Jumlah Produksi karet (ton)*	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*	-	-	-	-	-	-	-	-	*1.255*	*2.012,86*	*162,55*	-	-	-	-	-	-	-	*162,55*	
		Jumlah Produksi kakao (ton)	*produktivitas x luas panen tanaman menghasilkan*	-	-	-	-	-	-	-	-	*535*	*566,12*		-	-	-	-	-	-	-		
4	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)**	**(Luas serangan OPT/luas tanam) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10**	**186,29**	**10**	**105,00**	**10**	**370,80**	**10**	**662,09**	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	*Jumlah Kelompok tani yang naik skor sesuai Permentan (kelompok/ Wilayah Binaan)*	*Hasil Penilaian Kelompok Tani sesuai Kriteria Permentan*	-	*138,73*	-	-	*115,18*	*5*	*5*	*155,95*	*5*	*5*	*51,53*	-	-	-	-	-	-	-	*322,65*	
		Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang studi banding (orang/ tahun)	*Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (orang / tahun)*	*956*	-	*362*	*362*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	*Persentase Penyuluh yang naik jenjang jabatan (%)*	*(Penyuluh naik jenjang Jabatan/Total Penyuluh) x 100 %*	-	*385,00*	-	-	*152,58*	*5,55*	*16,67*	*165,46*	*5,55*	*5,55*	*26,89*	-	-	-	-	-	-	-	*344,93*	
		Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten dibidangnya	*Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten dibidangnya*	*571,00*	-	*176*	*176*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)**	**(Penyuluh naik jenjang jabatan / Total penyuluh) X 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5,55**		**5,55**		**5,55**		**5,55**		
		Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)	***Hasil penilaian kelompok tani sesuai kriteria Permentan***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***5***	**582,65**	***5***	**395,00**	***5***	**655,00**	***5***	**1.632,65**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																					**14.559,70**	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (Juta)*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun*	*22.767*	*1.235,00*	*23.635,41*	*23.635,41*	*479,27*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*1.807,03*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*	-	*49*	*7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan asongan	*Jumlah Pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)*	*Jumlah Pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)*	*300*	*34,00*	*322*	-	*17,66*	*342*	-	-	*362*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*17,66*	
		Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam menempati tempat berjualan (%)	*Tingkat Kepatuhan Pedagang Kaki Lima dalam menempati tempat berjualan (%)*	*100*	-	*95*	*95*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)**	**jumlah pasar rakyat dengan minimal tipe C / jumlah pasar rakyat x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14**		**50**		**50**		**50**		
		Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	***Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***382***	**1.024,33**	***402***	**28,21**	***422***	**150,00**	***422***	**1.202,54**	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur (pasar)*	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur dari timbangan, harga, dan kualitas produk*	-	*54,76*	-	-	*106,17*	*1*	*1*	*1.972,62*	*2*	*1*	*34,06*	-	-	-	-	-	-	-		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
		Ketersediaan sembako di pasar (%)	*Ketersediaan sembako di pasar (%)*	*100*	-	*95*	*95*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.112,85*	KOPERINDAG
		Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)	*Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)*	*0*	-	*750*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pasar terkelola (buah)	*Jumlah Pasar terkelola (buah)*	*9*	-	*9*	*9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto**	**jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**25.837,33**	**189,26**	**26.785,71**	**220,00**	**27.015,91**	**150,00**	**27.015,91**	**559,26**	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun (Milyar)*	*22.767*	-	*23.635,41*	-	*1.630,76*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*2.958,52*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*	-	*49*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	**Program Pengembangan Ekspor**	**Persentase produk unggulan yang diekspor (%)**	**Jumlah produk unggulanyang diekspor / jumlah produk unggulan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**50**	**310,00**	**55**	**337,50**	**60**	**250,00**	**60**	**897,50**	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur (pasar)*	*Jumlah Pasar tradisional tertib ukur dari timbangan, harga, dan kualitas produk*		-	-	-	*106,17*	*1*	*1*	*1.972,62*	*2*	*1*	*34,06*	-	-	-	-	-	-	-		
		Ketersediaan sembako di pasar (%)	*Ketersediaan sembako di pasar (%)*	*100*	-	*95*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.112,85*	
		Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)	*Alat Ukur yang ditera ulang (timbangan)*	*0*	-	*750*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Pasar terkelola (buah)	*Jumlah Pasar terkelola (buah)*	*9*	-	*9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**persentase pasar tradisional tertib ukur (%)**	**Jumlah pasar tradisional yang tertib ukur / jumlah pasar tradisional x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**	**169,56**	**30**	**171,20**	**30**	**120,00**	**30**	**460,76**	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	*Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto*	*jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun (Milyar)*	*22.767*	-	*23.635,41*	*23.635,41*	*479,27*	*23.946,52*	*23.900,00*	*544,80*	*25.106,79*	*22.764,00*	*782,96*	-	-	-	-	-	-	-	*1.807,03*	
		Jumlah peluang untuk promosi (event)	*Jumlah peluang untuk promosi (event)*	*40*	-	*49*	*7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)**	**Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75,00**	**253,70**	**100,00**	**250,00**	**125,00**	**120,00**	**300,00**	**623,70**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																					**9.571,26**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-	-	-	-	*497,65*	*50*	*50*	*836,56*	*50*	*50*	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-	-	-	-	-	*1*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*	-	*56*	*56*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*	-	*912*	*912*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*	-	*35*	*35*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	*Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 pengrajin (sentra industri)*	*Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 pengrajin (sentra industri)*	-	*164,00*	-	-	*213,19*	*1*	*1*	-	*1*	*1*	*22,74*	-	-	-	-	-	-	-	*235,93*	
		Jumlah sentra industri potensial (sentra)	*Jumlah sentra industri potensial (sentra)*	*14*	-	*14*	*14*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah pengrajin cendera mata dan souvenir (IKM)	*Jumlah pengrajin cendera mata dan souvenir (IKM)*	*19*	-	*24*	*24*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Penataan Struktur Industri	*Jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)*	*jumlah produk hasil IKM yang memenuhi standar*	*35*	-	*38*	-		*40*	*38*	*67,57*	*42*	*3*	*4,99*	-	-	-	-	-	-	-	*72,55*	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	-	-	-	-		*10*	-		*45*	*64*	*141,70*	-	-	-	-	-	-	-	*141,70*	
1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)**	**jumlah IKM yang meningkat skala usaha nya / jumlah IKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,8**	**1.400,54**	**1,9**	**1.059,00**	**2**	**470,00**	**5,7**	**2.929,54**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-	-	-	-	*497,65*	*50*	*50*	*836,56*	*50*	*50*		-	-	-	-	-	-	-		DISKOPERINDAG
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-	-	-	-	-	*1*	*1*		*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*	-	*56*	*56*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*	-	*912*	*912*	-	-	-	-	-	-	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*	-	*35*	*35*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	*Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)*	-	-	-	-	-	*10*	-	-	*45*	-		-	-	-	-	-	-	-		
2	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)**	**jumlah industri kecil menengah yang mempunyai izin / jumlah industri kecil dan menengah x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**457,16**	**15**	**142,00**	**30**	**100,00**	**30**	**699,16**	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)*	-	-	-	-	*497,65*	*50*	*50*	*836,56*	*50*	*50*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	*Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)*	-	-	-	-	-	*1*	*1*		*1*	*1*		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)	*Jumlah IKM yang menerima bantuan kemasan produk dan mampu meningkatkan asetnya (IKM)*	*47*	-	*56*	*56*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)	*Jumlah sentra penjualan hasil IKM dan kerajinan (sentra)*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)	*Jumlah petenun songket yang meningkat keterampilan (orang)*	*877*	-	*912*	*912*	-	-	-	-	-	-	*439,92*	-	-	-	-	-	-	-	*1.774,13*	
		Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)	*Jumlah IKM Pangan difasilitasi sertifikat halal dan AKG (IKM)*	*32*	-	*35*	*35*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)	*Jumlah Perajin songket menggunakan bahan baku berpewarna alami (kelompok)*	*6*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)	*Penerapan gugus kendali mutu (kelompok)*	*12*	-	*12*	*12*	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
3	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase IKM yang terpublis (%)**	**jumlah IKM yang terpublish / jumlah IKM x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**	**60,00**	**90**	**90,00**	**100**	**20,00**	**100**	**170,00**	
	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH																					**165.641,59**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	-	-	-	*12*	*7909,66*	*12*	*12*	*8.902,95*	*12*	*12*	*6.642,84*	-	-	-	-	-	-	-	*23.455,45*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	-	-	-	*12*	*4920,02*	*12*	*12*	*3.405,99*	*12*	*12*	*3.361,65*	-	-	-	-	-	-	-	*11.687,66*	
	Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/ Jumlah Aparatur) x 100 %*	*22*	*5.821,00*	*26*	*22*	*250,37*	*30*	*28*	*305,10*	*34*	*19*	*84,02*	-	-	-	-	-	-	-	*639,49*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	-	-	-	*0*	*127,92*	*100*	*0*	*179,86*	*100*	*0*	*117,49*	-	-	-	-	-	-	-	*425,27*	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	*Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur*	*Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur*	*2000*	*945,43*	*2000*	*Tidak digunakan*	*0*	*2000*	*2111*	*8,55*	*2020*	*2111*	*41,74*	-	-	-	-	-	-	-	*50,29*	
	Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	*Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP*	*Predikat hasil penilaian SAKIP oleh KEMENPAN RB*	-	-	-	-	*0*	*B*	*B*	*7,01*	*B*	*B*	*9,87*	-	-	-	-	-	-	-	*16,88*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**22889,85**	**12**	**27732,00**	**12**	**29.592,60**	**36**	**80.214,44**	
	Program Pembinaan Keagamaan (PD)	*Persentase santri Rumah/ Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)*	*jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %*	-	-	*20*	*0*	*4451,28*	*25*	*0*	*6.536,51*	*28*	*29,49*	*4.489,79*	-	-	-	-	-	-	-	*15.477,58*	
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas (%)	*(Jumlah Imam tetap dimasjid yang berijazah Lc atau setara/ Jumlah Imam Tetap Masjid) x 100 %*	-	-	-	-	-	*0*	-	-	*10*	*10*	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	*Tersedianya Laporan Kepala Daerah*	*Jumlah Laporan Kepala Daerah*	*3*	*265*	*5*	*3*	*393,95*	*3*	*3*	*140,66*	*3*	*3*	*119,54*	-	-	-	-	-	-	-	*654,15*	SETDAKO
	Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	*Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya*	*Jumlah Dokumen Kerjasama antar Daera, Pihak Ketiga dan Lainnya*	-	-	*3*	*3*	*0*	*3*	*11*	*25,00*	*3*	*17*	*25,00*	-	-	-	-	-	-	-	*50,00*	
	Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	*Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/kelurahan dlm mengelola pelayanan administrasi (%)*	*Jumlah kecamatan, kelurahan/ desa yang melaksanakan monev*	-	-	*41*	*41*	*42,81*	*41*	*22*	*40,74*	*41*	*0*	*0,90*	-	-	-	-	-	-	-	*84,45*	
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun (%)**	**jumlah santri yang hafidz 1 juz / jumlah santri rumah tahfidz) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**30**		**40**		**50**		**50**		
		Peningkatan Jumlah Rumah Tahfiz di Kota Sawahlunto (Pondok Tahfiz)	**Jumlah pondok tahfidz tahun n 1 - jumlah pondok tahfiz tahun n**												**36**	**8.480,35**	**50**	**10.274,92**	**60**	**10.507,80**	**60**	**29.263,08**	
		Persentase Imam Masjid yang berkualitas (%)	***(Jumlah Imam tetap dimasjid yang berfjazah Lc atau setara/Jumlah imam Tetap Masjid) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	*Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan (Dok)*	*Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan*	-	-	-	*1*	*344,2*	*1*	*1*	*269,77*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*613,97*	
	Program Pengembangan SDM Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa*	*Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa*	-	-	-	-	-	*175*	*0*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa*	*Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa*		-	-	-	*0*	-	-	*0*	*250*	*103*	*7,45*	-	-	-	-	-	-	-	*7,45*	
	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik*	*Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik*		-	-	-	*0*	-	-	*0*	*350*	*103*	*70,25*	-	-	-	-	-	-	-	*70,25*	
	Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	*Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa*	*Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa*		-	-	-	*0*	-	-	*0*	*175*	*32*	*4,7*	-	-	-	-	-	-	-	*4,70*	
3	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	***Terlaksananya kegiatan bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa (bulan)***	***Jumlah bulan pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**803,27**	**12**	**988,39**	**12**	**1.134,83**	**36**	**2.926,49**	
	UNSUR SEKRETARIAT DPRD																					**118.008,23**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*	*terpenuhinya pelayanan administrasi peekantoran (bulan)*	*12*	*3.663,55*	*12*	*12*	*2.186,84*	*12*	*12*	*2.442,85*	*12*	*12*	*3.055,30*	-	-	-	-	-	-	-	*7.684,99*	SETDPRD
	Program peningkatan sarana dan prasrana aparatur	*Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur*	*Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (bulan)*	*12*	*4.451,17*	*12*	*12*	*1.271,67*	*12*	*12*	*1.815,83*	*12*	*12*	*2.467,96*	-	-	-	-	-	-	-	*5.555,46*	
	Program peningkatan disiplin aparatur	*Meningkatnya disiplian aparatur*	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap (%)*	*100*	*249,53*	*100*	*26*	*19,80*	*34*	*40*	*490,00*	*24*	*24*	*149,58*	-	-	-	-	-	-	-	*659,38*	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	*Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur*	*persentase aparatur yang meningkat sdmnya*	*100*	*3.292,66*	*100*	*100*	*1.611,40*	*100*	*24*	*1.745,28*	*24*	*8*	*51,38*	-	-	-	-	-	-	-	*3.408,06*	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**terlaksananya urusan pemerintah daerah yang tertrib dan lancar**	**terlaksananya urusan pemerintah daerah yang tertrib dan lancar (bulan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**15.856,22**	**12**	**14.720,74**	**12**	**16.159,35**	**12**	**46.736,30**	
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	*Persentase jumlah perda ditetapkan tepat waktu*	*(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %*	-	*66,00*	*50*	*50*	*8.818,31*	*75*	*75*	*7.065,00*	*80*	*80*	*4.250,70*	-	-	-	-	-	-	-	*20.134,01*	
2	**Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Persentase terlaksananya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (%)**	***(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah propemperda) x 100 %***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100%**	**11.485,86**	**100%**	**10.646,25**	**100%**	**11.697,92**	**100%**	**33.830,03**	
	UNSUR PERENCANAAN																					**30.399,67**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*		-	*12*	*12*	*700,90*	*12*	*12*	*789,31*	*12*	*12*	*774,74*	-	-	-	-	-	-	-	*2.264,95*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*		-	*12*	*12*	*151,63*	*12*	*12*	*669,29*	*12*	*12*	*168,70*	-	-	-	-	-	-	-	*989,62*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	*Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %*		-	-	-	*135,80*	-	-	*170,08*	-	-	*100,24*	-	-	-	-	-	-	-	*406,12*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**5.494,36**	**12**	**4.609,60**	**12**	**5.079,50**	**36**	**15.183,46**	BAPPEDA/LITBANGDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*	*0*	*1.051,17*	*0*	*100*	*1.321,14*	*100*	*100*	*912,81*	*100*	*100*	*321,84*	-	-	-	-	-	-	-	*2.555,80*	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)	*Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun)*	*5*	-	*7*	*7*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)**	**(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.163,00**	**100**	**960,00**	**100**	**1.135,00**	**100**	**3.258,00**	
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sosial Budaya kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*		*26,30*	-	-	*40,73*	*100*	*100*	*75,70*	*100*	*100*	*18,98*	-	-	-	-	-	-	-	*135,42*	
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya (Dokumen)*	*3*	-	*4*	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*		*100,00*	-	-	*303,00*	*100*	*100*	*201,13*	*100*	*100*	*39,91*	-	-	-	-	-	-	-	*544,04*	
		Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)	*Ketersediaan Dokumen Perencanaan Ekonomi (Dok)*	*2*	-	*2*	*2*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA (PD)	*Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Fisik kedalam RKPD (%)*	*(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%*	*100*	*500,00*	*100*	*100*		*100*	*100*	*9,31*	*100*	*100*	*49,43*	-	-	-	-	-	-	-	*58,73*	
		Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	*Kesesuaian Perencanaan Lokasi pada Kegiatan di RKPD dengan Peruntukan di RTRW*	*100*	-	*100*	*100*		*100*	*100*		*100*	*100*		-	-	-	-	-	-	-		
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok)*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok)*	*8*	*212,62*	*8*	*3*	*177,51*	*3*	*2*	*592,78*	*3*	*1*		-	-	-	-	-	-	-	*770,28*	
3	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)**	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**		**100**		**100**		**100**		
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.152,83**	**100**	**1.050,15**	**100**	**1.155,74**	**100**	**3.358,72**	
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)	**(Jumlah Program di RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama / Jumlah Program di RPJMD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**		**100**		**100**		**100**		
	Program perencanaan Tata Ruang	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang (%)*	*Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang*	-	-	-	-	-	*80*		*105,90*	*5*	*5*		-	-	-	-	-	-	-	*105,90*	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD	*Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)*	*(Jumlah Bangunan Ber IMB / Jumlah Bangunan) x 100 %*	*61.28*	-	*61.56*	*86,5*	*420,16*	*62*	*61,58*	-	*63*	*84,15*	*33,29*	-	-	-	-	-	-	-	*453,45*	
	Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah	*Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)*	*Ketersediaan data Statistik daerah dan OPD (termasuk kerjasama BPS)*	*85*	*282,00*	*85*	*85*	-	*86*	*86*	*187,74*	*87*	*87*	*78,57*	-	-	-	-	-	-	-	*266,31*	
		Persentase Data PNS yang diperbaharui dan di Diverifikasi (%)	*(Jumlah data PNS yang diperbaharui dan di verifikasi/Jumlah seluruh data PNS) x 100 %*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	*100*	*100*	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Data dan Informasi	*Persentase Ketersediaan Informasi Data Profil Daerah (%)*	*Ketersediaan Data Profil Daerah dan OPD*	*28*	*500,00*	*28*	*28*	*48,87*	*28*	*28*	-	*28*	*28*	-	-	-	-	-	-	-	-	*48,87*	
	UNSUR KEUANGAN																					**275.886,30**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*	*Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)*		-	*12*	*12*	*1.608,11*	*12*	*12*	*1.557,46*	*12*	*12*	*1.536,39*	-	-	-	-	-	-	-	*4.701,96*	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)*		-	*12*	*12*	*1.292,71*	*12*	*12*	*477,19*	*12*	*12*	*763,82*	-	-	-	-	-	-	-	*2.533,72*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	*Persentase Aparatur yang Meningkat SDM nya (%)*	*(Jumlah Aparatur yang Meningkat SDM nya / Jumlah Aparatur) x 100 %*		-	-	-	*457,11*	-	-	*167,15*	-	-	*90,00*	-	-	-	-	-	-	-	*714,26*	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**8.295,96**	**12**	**8.791,19**	**12**	**9.683,00**	**36**	**26.770,15**	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PD)	*Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*	*Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*		*1.893,46*		*WTP*	*716,53*	*WTP*	*WTP*	*1.420,69*	*WTP*	*WTP*	*770,04*	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)	*Pengelolaan keuangan sesuai aturan (%)*	*100*	-	*100*	*98*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi Belanja Daerah (%)	*Realisasi Belanja Daerah thd APBD*	*94*	-	*94*	*87,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi Penerimaan Daerah (%)	*Realisasi Penerimaan Daerah terhadap Target*	*100*	-	*100*	*94,36*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Realisasi PAD (%)	*Realisasi PAD terhadap Target*	*100*	-	*100*	*81,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2.907,26*	
		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)	*Jumalh SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar (%)*	*95*	-	*95*	*95*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)	*Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIMDA Online (SKPD)*	*30*	-	*30*	*30*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	*Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah (%)*	*100*	-	*100*	*98*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	*Penetapan APBD*	*Kesesuaian Tanggal Penetapan APBD dengan Aturan Permendagri*		*1.365,91*	-	-	*1.461,16*	*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*	*1.466,31*	*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*	*1.465,60*	-	-	-	-	-	-	-	*4.393,06*	BPKAD
		Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)	*Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)*	*Tepat Waktu*	-	*Tepat Waktu*	*Tepat Waktu*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik (%)*	*Jumlah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Berpredikat Baik / Jumlah Desa x 100%*	-	-	-	-	-	*20*	*20*	*7,21*	*40*	*20*	-	-	-	-	-	-	-	-	*7,21*	
	Program Pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan	*Penerimaan PBB (Rupiah Juta)*	*Penerimaan PBB (Rupiah Juta)*	*975.82*	*585,61*	*937.39*	*937,789*	*219,84*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*219,84*	
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	*Penerimaan PAD (Rupiah Milyar)*	*Penerimaan PAD (Rupiah Milyar)*	*20.72*	*977,50*	*19.8*	*54,454*	*311,07*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*311,07*	
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**	**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
		Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)	**(Jumlah Realisasi Belanja / APBD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**90**	**79.126,48**	**90**	**73.664,39**	**90**	**75.805,20**	**90**	**228.596,07**	
		Maksimal Defisit APBD (%)	**Jumlah Pendapatan Daerah dikurangi dengan Belanja Daerah pada tahun yang sama**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4,1**		**4,1**		**4,1**		**4,1**		
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)**	**(Jumlah OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel / Jumlah Total OPD) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**93**	**594,62**	**94**	**960,50**	**95**	**1.025,50**	**95**	**2.580,62**	
4	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)**	**(Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah / Target Pendapatan Asli Daerah) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.002,38**	**100**	**547,00**	**100**	**601,70**	**100**	**2.151,08**	
	UNSUR KEPEGAWAIAN																					**38.716,30**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*1.719,09*	*12*	*12*	*1.735,74*	*12*	*12*	*2.018,72*	*12*	*12*	*2.265,94*	-	-	-	-	-	-	-	*6.020,40*	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase Tersedianya pakaian dinas untuk Aparatur Sipil*	*Jumlah tersedianya pakaian dinas / jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*8,27*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Sarana dan Prasarana aparatur tersedia dengan baik (bulan)*	*Jumlah bulan pelaksanaan program*	*12*	*271,48*	*12*	*12*	*218,39*	*12*	*12*	*156,07*	*12*	*12*	*97,07*	-	-	-	-	-	-	-	*471,54*	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*Jumlah aparatur yg mengikuti pelatihan / total jumlah aparatur X 100 %*	*100*	*1.050,92*	*100*	*100*	*1.138,29*	*100*	*100*	*384,49*	*100*	*100*	*2,40*	-	-	-	-	-	-	-	*1.525,18*	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	*Fasilitasi Advokasi Bantuan Hukum*	*Jumlah Lembaga Bantuan Hukum Untuk ASN yang difasilitasi*	*24*	*24,16*	*24*	*24*	*24,00*	*24*	*24*	*24,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*48,00*	BKPSDM
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	9.178,04	100	6.965,59	100	6.000,00	100	22.143,63	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	*Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar*	*(JumlahASN yang diberi Izin dan Tugas Belajar / Jumlah ASN) x 100%*	*2.50*	*768,63*	*5.60*	*1,5*	*754,45*	*5.60*	*2,5*	*1.702,17*	*5.70*	*3,8*	*717,44*	-	-	-	-	-	-	-	*3.174,06*	
		Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	*(Jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat / Jumlah ASN) x 100%*	*11.48*	-	*24.10*	*24,3*	-	*20.40*	*20,5*	-	*20.70*	*17,9*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase ASN yang mendapat pelayanan**	**Jumlah ASN yang terlayani / Jumlah seluruh ASN yang mengajukan permohonan pelayanan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.595,72	100	1.737,76	100	2.000,00	100	5.333,49	
	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																					**770,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**													50,00		120,00				170,00	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi ASN (paket)**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi**															-	2	600		600,00	
	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					**931,46**	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	*Jumlah Dokumen yang Disusun (Dok)*	*Jumlah Dokumen yang Disusun (Dok)*	*0*		*0*	*0*	-	*1*	*1*	*88,81*	*1*	*1*	*18,64*	-	-	-	-	-	-	-	*107,46*	BAPELITBANGDA
	Program Penelitian, Pengembangan dan Kajian Daerah	*Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi (Kegiatan)*	*Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi*	-	-	-	-	-	16	0	-	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)**	**Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan dalam Perencanaan/ Pembangunan (Proposal)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	199,00	35	235,00	40	390,00	40	824,00	
	UNSUR PENGAWASAN																					**20.796,04**	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran (Bulan)*	*administrasi perkantoran yang terpenuhi (Bulan)*	*12*	*353,06*	*12*	*12*	*419,58*	*12*	*12*	*484,49*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*350,19*	-	-	-	-	-	-	*12*	*1.254,26*	INSPEKTORAT
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur	*Terpenuhinya Sarana dan Prasarana aparatur (Bulan)*	*12*	*195,11*	*12*	*12*	*203,77*	*12*	*12*	*237,99*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*171,53*	-	-	-	-	-	-	*12*	*613,29*	
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur	*Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi teorangi*	*12*	*156,21*	*12*	*12*	*188,42*	*12*	*12*	*174,74*	*12 Bulan*	*12 Bulan*	*109,96*	-	-	-	-	-	-	*12*	*473,12*	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5.237,49	12	5.932,97	12	1.996,69	12	13.167,14	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)	*Persentase tindak lanjut temuan*	*Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/ jumlah temuan (100 %)*	*100*	*794,33*	*100*	*100*	*319,22*	*100*	*100*	*585,61*	*100*	*100*	*409,59*	-	-	-	-	-	-	*100*	*1.314,42*	
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	*Nilai SAKIP*	*Penilaian terhadap SAKIP Kota Sawahlunto*	-	-	*CC*	*CC*	*108,95*	*B*	*B*	*41,53*	*Tidak digunakan*	-	-	-	-	-	-	-	-	*BB*	*150,48*	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)**	**Persentase tindaklanjut LHP (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	654,15	100	685,41	100	826,79	100	2.166,34	
	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (PD)	*Nilai APIP*	*Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)*	*Level 2*	*22,64*	*Level 2*	*Level 2*	*5,81*	*Level 3*	*Level 3*	*212,00*	*Level 3*	*Level 3*	*333,20*	-	-	-	-	-	-	*Level 3*	*551,01*	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai APIP (Level)**	**Penilaian Target BPKP terhadap APIP Kota Sawahlunto (Level)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Level 3	345,50	level 3	345,35	level 4	415,12	level 4	1.105,97	
	UNSUR KEWILAYAHAN																					**118.693,39**	

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran*		*12*	*461,85*	-	*12*	*552,54*	-	*12*	*494,46*	-	*12*	*487,40*	-	-	-	-	-	-	-	*1.534,40*	*Barangin*
				12	*320,48*	-	*12*	*375,69*	-	*12*	*329,66*	-	*12*	*351,84*	-	-	-	-	-	-	-	*1.057,19*	*L. Segar*
				12	*430,65*	-	*12*	*497,49*	-	*12*	*412,36*	-	*12*	*363,85*	-	-	-	-	-	-	-	*1.273,70*	*Silungkang*
				12	*420,50*	-	*12*	*499,19*	-	*12*	*452,00*	-	*12*	*403,70*	-	-	-	-	-	-	-	*1.354,89*	*Talawi*
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*		*60*	*130,07*	-	*65*	*138,33*	-	*70*	*139,52*	-	*75*	*53,50*	-	-	-	-	-	-	-	*331,35*	*Barangin*
				100	*183,59*	-	*100*	*138,31*	-	*12*	*89,35*	-	*12*	*60,39*	-	-	-	-	-	-	-	*288,05*	*L. Segar*
				100	*88,32*	-	*100*	*93,44*	-	*12*	*81,59*	-	*12*	*54,71*	-	-	-	-	-	-	-	*229,73*	*Silungkang*
				100	*207,00*	-	*75*	*116,96*	-	*100*	*52,50*	-	*100*	*56,20*	-	-	-	-	-	-	-	*225,66*	*Talawi*
	Program Peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Aparatur (PD)	*Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya*	*(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/ Jumlah Aparatur) x 100 %*	*60*	*32,24*	-	*65*	*71,40*	-	*70*	*53,96*	-	*75*	*17,90*	-	-	-	-	-	-	-	*143,26*	*Kec Barangin*
				100	*54,88*	-	*10.00*	*29,45*	-	*97,8*	*44,01*	-	*94,72*	*11,84*	-	-	-	-	-	-	-	*85,30*	*L. Segar*
				39	*46,40*	-	*14,29*	*25,74*	-	*25*	*33,28*	-			-	-	-	-	-	-	-	*59,02*	*Silungkang*
				100	*46,00*	-	*100*	*43,10*	-	*100*	*7,50*	-	*100*	*7,50*	-	-	-	-	-	-	-	*58,10*	*Talawi*
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap*	*Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan*	*100*	*1,70*	-	-	*0*	-		-	-	*100*	*2,80*	-	-	-	-	-	-	-	*2,80*	*Barangin*
				100	*3,21*	-	-	*0*	-	*100*	*2,46*	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	*2,46*	*L. Segar*
						-	-	*0*	-		-	-	*3,57*	*2,93*	-	-	-	-	-	-	-	*2,93*	*Silungkang*
						-	-	*0*	-	*100*	*2,30*	-	*100*	*2,30*	-	-	-	-	-	-	-	*4,60*	*Talawi*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Urusan Pemerintah Daerah yang Berjalan Tertib dan Lancar**	**Jumlah bulan pelaksanaan program**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**4.761,00**	**12**	**4.833,00**	**12**	**5.665,00**	**36**	**15.259,00**	**Barangin**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**6.273,00**	**12**	**6.377,00**	**12**	**6.377,00**	**36**	**19.027,00**	**L. Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**2.394,00**	**12**	**2.513,00**	**12**	**3.004,00**	**36**	**7.911,00**	**Silungkang**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**2.496,00**	**12**	**2.970,00**	**12**	**2.898,10**	**36**	**8.364,10**	**Talawi**
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**82,40**	**12**	**148,00**	**12**	**163,00**	**12**	**393,40**	**Barangin**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**124,91**	**12**	**130,00**	**12**	**135,00**	**12**	**389,91**	**L. Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**220,60**	**12**	**97,60**	**12**	**127,60**	**12**	**445,80**	**Silungkang**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	**133,20**	**12**	**31,00**	**12**	**35,00**	**12**	**199,20**	**Talawi**
		Persentase Aparatur yang meningkat SDM nya	**(Jumlah Aparatur yang meningkat SDM nya/Jumlah Aparatur) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**44,20**	**100**	**60,00**	**100**	**60,00**	**100**	**164,20**	**Barangin**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**26,00**	**100**	**30,00**	**100**	**50,00**	**100**	**106,00**	**L. Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**45,00**	**100**	**45,00**	**100**	**45,00**	**100**	**135,00**	**Silungkang**

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13,80	100	14,80	100	15,50	100	44,10	Talawi
		Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,50	100	3,50	100	3,50	100	10,50	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,50	100	3,50	100	3,50	`100	10,50	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,50	100	3,50	100	3,50	100	10,50	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3,30	100	3,30	100	3,30	100	9,90	Talawi
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)		-	-	-	-	-	-	-	-	85	12,14	-	-	-	-	-	-	-	*12,14*	Barangin
					-	-	-	-	-	-	-	-	100	14,44	-	-	-	-	-	-	-	*14,44*	L. Segar
					-	-	-	-	-	100,00	13,20		40	22,00	-	-	-	-	-	-	-	*35,20*	Talawi
2	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu**	**(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	117,46	100	59,71	100	25,00	100	202,17	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	16,71	100	19,00	100	19,00	100	54,71	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,00	100	8,00	100	8,80	100	24,80	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	56,00	100	15,00	100	17,50	100	88,50	Talawi
		Persentase fasilitasi penanganan kasus covid	**Operasional penanganan kasus Covid**												100	455,12					100	455,12	Kesbang pol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Persentase Desa/ Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)*	*Persentase Desa/ Kel yang memiliki wawasan kebangsaan*	*100*	*9,80*	-	*100*	*10,85*	-	*100*	*17,85*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*28,70*	Barangin
				98,53	*23,97*	-	*97,57*	*23,91*	-	*100*	*22,92*	-	*100*	*19,65*	-	-	-	-	-	-	-	*66,48*	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Silungkang
				100	*199,00*		*100*	*210,93*	-	-	*0*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*210,93*	Talawi
3	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)**	**Persentase Desa/Kel yang memiliki wawasan kebangsaan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	134,55	100	30,00	100	164,55	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	25,00	100	0	100	25,00	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30,00	100	30,00	100	48,00	100	108,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	7,10	100	2,40	100	34,00	100	43,50	Talawi
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*	-	*100*	*179,16*		*100*	*151,42*		*100*	*75,18*	-	-	-	-	-	-	-	*405,76*	Barangin
				100	*265,57*	-	*100*	*193,80*		*100*	*216,88*		*100*	*37,69*	-	-	-	-	-	-	-	*448,37*	L. Segar
				100	*232,47*	-	*100*	*143,97*		*100*	*98,92*		*100*	*58,68*	-	-	-	-	-	-	-	*301,57*	Silungkang
				100	*181,98*	-	*100*	*148,30*		*100*	*81,69*		*100*	*22,50*	-	-	-	-	-	-	-	*252,49*	Talawi
	Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD)	*Indek Pemberdayaan Gender (IDG)*	*Indeks Peran Perempuan dalam Ekonomi dan politik*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Silungkang

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/ Kel	*Presentase PKK yang aktif (%)*	*(Jumlah Kelompok PKK Desa/ Kel yang aktif/ Jumlah Kelompok PKK) x 100 %*	*100*	*22,28*	-	*65,38*	*20,17*	-	*100*	*14,69*	-	*100*	*13,29*	-	-	-	-	-	-	-	*48,15*	*L. Segar*
				100	*26,29*	-	*100*	*24,32*	-	*100*	*29,24*	-	*100*	*31,88*	-	-	-	-	-	-	-	*85,44*	*Silungkang*
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/ Kel	*Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)*	*(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %*	*100*	*171,46*	-	*85*	*301,12*	-	*85*	*822,09*	-	*87*	*8,66*	-	-	-	-	-	-	-	*1.131,87*	*Barangin*
				100	*100,00*	-	*71,16*	*264,11*	-	*100*	*579,98*	-	*100*	*8,11*	-	-	-	-	-	-	-	*852,20*	*L. Segar*
				100	*8,00*	-	*100*	*8,16*	-	*100*	-	-	*100*	*15,87*	-	-	-	-	-	-	-	*24,04*	*Silungkang*
				100	*7,90*	-	*95*	*11,00*	-	*100*	*31,40*	-	*85*	*7,40*	-	-	-	-	-	-	-	*49,80*	*Talawi*
	Program pembangunan infrastruktur Kelurahan	*Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan)*	*Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara*	*4*	*800,00*	-	*4*	*1.497,13*	-	*4*	*1.141,98*	-	*4*	*1.451,79*	-	-	-	-	-	-	-	*4.090,90*	*Barangin*
				6	*1.185,27*	-	*6*	*1.656,20*	-	*6*	*1.490,75*	-	*6*	*2.065,47*	-	-	-	-	-	-	-	*5.212,42*	*L. Segar*
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)**	**(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif/Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**2.313,00**	**100**	**1.601,00**	**100**	**103,08**	**100**	**4.017,08**	**L.Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**110,00**	**100**	**100,00**	**100**	**114,00**	**100**	**324,00**	**Silungkang**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**1.570,00**	**100**	**894,00**	**100**	**910,00**	**100**	**3.374,00**	**Barangin**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**97,00**	**100**	**250,00**	**100**	**105,00**	**100**	**452,00**	**Talawi**
		Presentase PKK yang aktif (%)	**(Jumlah Kelompok PKK Desa/Kel yang aktif/ Jumlah Kelompok PKK) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**47,48**	**100**	**50,00**	**100**	**50,00**	**100**	**147,48**	**L. Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**32,00**	**100**	**32,00**	**100**	**32,00**	**100**	**96,00**	**Silungkang**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**32,00**	**100**	**32,00**	**100**	**32,00**	**100**	**96,00**	**Barangin**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100**	**36,00**	**100**	**37,50**	**100**	**40,00**	**100**	**113,50**	**Talawi**
		Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan)	**Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6**	**1.309,08**	**6**	**1.500,00**	**6**	**1.500,00**	**6**	**4.309,08**	**L. Segar**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**4**	**600,00**	**4**	**600,00**	**4**	**600,00**	**4**	**1.800,00**	**Barangin**
	Program Penataan Administrasi Kependudukan(PD)	*Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)*	*(Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah penduduk) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Barangin*
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang dilaksankan (%)		*100*	*9,47*	-	*100*	*6,89*	-	*100*	*0*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	*6,89*	*Barangin*
				100	*5,94*	-	*100*	*1,55*	-	*100*	*3,40*			-	-	-	-	-	-	-	-	*4,95*	*L. Segar*
				100	*6,30*		*96*	*5,00*	-	*100*	*2,60*		*100*	*2,50*	-	-	-	-	-	-	-	*10,10*	*Talawi*
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (Dokumen)*	*(Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*L. Segar*
				100	*14,50*		*100*	*14,97*		*100*	*14,96*		*100*	*14,90*	-	-	-	-	-	-	-	*44,83*	*Talawi*

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (PD)	*Persentase tindak lanjut temuan*	*(Jumlah temuan yang ditindaklanjuti/ jumlah temuan) x 100 %*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Inspektorat dan Kecamatan*
				100	*892,24*	-	*100*	*1.149,58*	-	*100*	*1.193,29*	-	*100*	*2.085,08*	-	-	-	-	-	-	-	*4.427,95*	*Barangin*
				100	*1.527,26*	-	*100*	*1.195,71*	-	*100*	*1.719,78*	-	*100*	*2.609,34*	-	-	-	-	-	-	-	*5.524,83*	*L. Segar*
	Program Pembinaan Agama dan Adat	*Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)*		*100*	*256,67*	-	*100*	*226,38*	-	*100*	*234,39*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*460,77*	*Barangin*
				100	*242,29*	-	*100*	*152,94*	-	*100*	*180,48*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*333,42*	*L. Segar*
				100	*206,30*	-	*100*	*637,10*	-	*100*	*218,82*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*855,92*	*Silungkang*
				100	*151,00*	-	*100*	*189,00*	-	*100*	*99,40*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*288,40*	*Talawi*
	Program Pembinaan Keagamaan (PD)	*Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)*		-	-	-	-	*0*	-	-	*0*	-	*100*	*2,32*	-	-	-	-	-	-	-	*2,32*	*Barangin*
				100	*242,29*	-	*100*	*152,94*	-	*100*	*180,48*	-	*100*	*15,17*	-	-	-	-	-	-	-	*348,59*	*L. Segar*
				0	-	-	*0*	-	-	*0*	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Silungkang*
				100	*17,90*	-	*100*	*128,80*	-	*100*	*75,90*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*204,70*	*Talawi*
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*	-	*100*	*179,16*	-	*100*	*151,42*	-	*100*	*75,18*	-	-	-	-	-	-	-	*405,76*	*Barangin*
				100	*265,57*	-	*100*	*193,80*	-	*100*	*216,88*	-	*100*	*37,69*	-	-	-	-	-	-	-	*448,37*	*L. Segar*
				100	*232,47*	-	*100*	*143,97*	-	*100*	*98,92*	-	*100*	*58,68*	-	-	-	-	-	-	-	*301,57*	*Silungkang*
				100	*181,98*	-	*97*	*148,30*	-	*95*	*81,69*	-	*95*	*22,50*	-	-	-	-	-	-	-	*252,49*	*Talawi*
	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	*Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*(Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan/ jumlah yang diusulkan) x 100 %*	*100*	*81,45*	*100*	*100*	*27,31*	*100*	*100*	*42,40*	*100*	*100*	*14,77*	-	-	-	-	-	-	-	*84,48*	*Barangin*
				100	*71,77*	-	-	*0*	-	-	*0*	*100*	*100*	*18,65*	-	-	-	-	-	-	-	*18,65*	*L. Segar*
				100	*63,49*	-	*100*	*10,49*	-	*0*	*0*	-	*100*	*5,00*	-	-	-	-	-	-	-	*15,49*	*Silungkang*
				87	*99,30*	-	*91*	*19,90*	-		*0*	-	*100*	*19,10*	-	-	-	-	-	-	-	*39,00*	*Talawi*
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	*Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang dioptimalisasi (%)*	*(Jumlah jaringan Informasi Publik yang dioptimalisasi/ jumlah jaringan informasi di Kecamatan) x 100 %*	-	-	-	-	*0*	*50*	*50*	*19,45*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*19,45*	*Barangin*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*L. Segar*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Silungkang*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Talawi*
	Program Pengembangan Data dan Informasi	*Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)*	*Ketersediaan data profil daerah dan OPD*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*L. Segar*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Talawi*
5	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%)**	**(Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan /jumlah yang diusulkan) x 100 %**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**100,00**	**2.781,00**	**100,00**	**2.626,00**	**100,00**	**2.661,00**	**100,00**	**8.068,00**	**Barangin**

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	168,28	100,00	185,10	100,00	203,62	100,00	557,00	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	168,00	100,00	176,00	100,00	332,00	100,00	676,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	597,19	100,00	172,50	100,00	220,00	100,00	989,69	Talawi
		Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)	Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	111,00	100	120,00	100	120,00	100	351,00	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	246,01	100	247,01	100	262,01	100	755,02	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	219,88	100	220,88	100	228,38	100	669,14	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									Talawi
		Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	31,80	100	250,00	100	250,00	100	531,80	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	201,40	100	204,35	100	204,35	100	610,10	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	280,00	100	280,00	100	280,00	100	840,00	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	34,90	100	97,20	100	105,00	100	237,10	Talawi
	Program Operasional Kecamatan	*Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)*	*Jumlah Operasional Kecamatan yang dilaksanakan selama satu tahun*	*100*	*194,65*	*-*	*100*	*179,16*	*-*	*100*	*151,42*	*-*	*100*	*75,18*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*405,76*	*Barangin*
				100	*265,57*	*-*	*100*	*193,80*	*-*	*100*	*216,88*	*-*	*100*	*37,69*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*448,37*	*L. Segar*
				100	*232,47*	*-*	*100*	*143,97*	*-*	*100*	*98,92*	*-*	*100*	*58,68*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*301,57*	*Silungkang*
				100	*181,98*	*-*	*97*	*148,30*	*-*	*95*	*81,69*	*-*	*95*	*22,50*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*252,49*	*Talawi*
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Jumlah Desa yang dibina/total jumlah desa x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	151,55	100	162,80	100	20,00	100	334,35	Barangin
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	13,25	100	14,00	100	15,00	100	42,25	L. Segar
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	42,00	100	42,00	100	46,20	100	130,20	Silungkang
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	46,00	100	23,70	100	25,00	100	94,70	Talawi
	URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					7.926,68	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					7.926,68	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	*Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu*	*(Jumlah Gangguan yang ditangani secara terpadu / total jumlah gangguan)*	*100*	*754,70*	*100*	*100*	*958,72*	*100*	*100*	*766,47*	*100*	*100*	*723,58*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*2.448,77*	*Badan Kesbangpol dan PBD*
					220,76	*100*	*100*	*46,98*	*100*	*100*	*28,69*	*100*	*100*	*29,39*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*105,05*	*Satpol PP Damkar dan Kecamatan*
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Mayarakat	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat*		*0*		*490*	*43,69*	*250*	*250*	*26,12*	*250*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*69,81*	*Badan Kesbangpol dan PBD*
		Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	*Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)*		*98,58*	*85*	*75*	*3,17*	*85*	*0*	*-*	*75*	*65*	*4,57*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7,74*	*Satpol PP Damkar*

No	Urusan/ Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2017		REALISASI									TARGET						Kondisi Akhir RPJMD		OPD Penanggung Jawab
						2018			2019			2020			2021		2022		2023				
							Realisasi			Realisasi			Realisasi										
				Realisasi Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Kinerja	Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp. (Juta)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan Terpadu Melalu Forum Strategis (%)**	***(Jumlah laporan Pembinaan yang di tindaklanjuti /jumlah laporanj x 100%***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65**	**1.232,06**	**100**	**450,00**	**100**	**680,50**	**100**	**2.362,56**	**Kesbangpol**
2	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti (%)**	**(Jumlahrekomendasi yang ditindaklanjuti /jumlah rekomendasi rapat) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**100**	**75,00**	**100**	**346,50**	**100**	**421,50**	**Kesbangpol**
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang*	*Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang*		*131,09*	*69*	*51,79*	*131,09*	*610*	-	*141,30*	*610*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	*Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)*				-	-	*4*	-	-	*4*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Forum-forum strategis daerah	*Jumlah Forum-forum strategis daerah*				-	-	*3*	-	-	*4*	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*272,39*	
		Persentase Desa/ Kel yang memiliki wawasan kebangsaan (%)					-	-	-	-	-	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Bumagri*
3	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Penurunan Angka Krimilatitas(%)**	**(Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) - Jumlah Angka Kriminalitas Tahun N) / Jumlah Angka Kriminalitas Tahun (N-1) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5**	**311,11**	**10**	**134,57**	**15**	**275,00**	**15**	**720,68**	**Kesbangpol**
	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	*Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)*			-		*3*	*68,07*	-	*3*	*86,20*	-	*3*	*65,73*	-	-	-	-	-	-	-	-	*220,00*	*Kesbangpol*
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	*Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik*			-		-	*30,03*	-	*100*	*58,50*	-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Kesbangpol*
		Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*88,52*	
4	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)**	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**		**82,56**		**85**		**85**		**Kesbangpol**
		Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	-	**78,62**	**584,66**	**80**	**600,00**	**80**	**1.184,66**	**Kesbangpol**
		Tingkat Partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur	**Jumlah pemilih yang datang ke TPS/Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100%**												**0**		**54,27**		**65**		**65**		**Kesbangpol**
5	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%)**	**Jumlah organisasi masyarakat yang diawasi/jumlah organisasi kemasyarakatan x 100%**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	**0**	-	**100**	**25,00**	**100**	**25,00**	**Kesbangpol**
					522.380,94			**518.069,93**			**551.743,88**			**576.857,86**		**647.207,57**		**612.458,58**		**596.894,44**			



BAB VIII
KINERJA PEMELIHARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO

Tujuan pembangunan Kota sawahlunto secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dari pendapatan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan merata, penurunan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan sejumlah indikator ekonomi makro dan indikator kesejahteraan sosial, yaitu :

Tabel 8.1 Indikator Makro Kota Sawahlunto 2018-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Realisasi Capaian			Target Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52	5,31	-1,27	2,9	3,24	4,23	4,23
2	Gini Ratio	%	0,310	0,270	0,286	0,281	0,280	0,278	0,278
3	PDRB Perkapita	Juta/Jiwa	55,01	58,88	58,02	59,99	62,93	66,03	66,03
4	Tingkat kemiskinan	%	2,39	2,17	2,16	2,10	2,05	2,01	2,01
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75	6,82	8,2	7,55	6,81	6,43	6,43
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor	71,72	72,39	72,64	73,17	73,63	74,09	74,09
	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	9.765,00	10.348,00	10.183,00	10.307,58	10.632,26	11.024,59	11.024,59

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Realisasi Capaian			Target Capaian			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,94	9,97	10,17	10,75	11,01	11,30	11,30
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Tahun	13,15	13,16	13,17	13,18	13,19	13,20	13,20
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,59	69,87	70,00	70,14	70,28	70,42	70,42

Sumber: Barenlitbangda, Hasil analisis 2021

8.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam pencapaian sasaran strategis dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Sebelum Perubahan

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
				T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah Masjid dan mUshola 2017 adalah 221	65	65	65	100	75	80,18	106,91	83	62,93	75,82
2	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	52	100	60	62,5	104,17	68	52,38	77,03
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,75	5,78	5,5	95,156	5,8	5,31	91,55	5,83	-1,27	-21,78
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,3	71,72	99,2	73,71	72,39	98,21	75,33	72,64	96,43
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	n/a	57,64	52,22	90,6	63,41	52,61	82,97	69,18	52,77	76,28
6	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
				T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	71,13	72,3	71,72	99,2	73,71	72,39	98,21	75,33	72,64	96,43
8	PDRB sektor Pariwisata-SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	60.733,09	71.119,37	73.951,36	103,98	77.373,30	82.406,43	106,5	83.627,23	75.255,42	89,99
9	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	74,83	75,94	74,83	98,53	77,33	74,83	96,76	79	80,82	102,3
10	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang difasilitasi / Total Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial) dikali 100 %	18,64	13,17	13,17	100	59,76	63,6	106,43	84,89	84,89	100
11	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	-	-	86,377	70,9	26	200,44	769,23	26	28,28	108,77

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 Setelah Perubahan

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN TUJUAN											
1.	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZNAS Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZNAS Tahun n - Jumlah zakat pada BAZNAS tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	-	-	-	-	0,037	-	1,23	1,43	1,77	1,77
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	5,78	5,52	5,8	5,31	5,83	-1,27	2,9	3,24	4,53	4,53
3.	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	55,81	55,01	58,24	58,88	61,02	58,02	59,99	62,93	66,03	66,03
4.	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,39	2,39	2,27	2,17	2,21	2,16	2,10	2,05	2,01	2,01

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
5.	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	-	0,310	-	0,270	-	0,286	0,281	0,280	0,278	0,278
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	72,30	71,72	73,71	72,39	75,33	72,64	73,17	73,63	74,09	74,09
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB	57,64	52,22	63,41	52,61	69,18	52,77	52,93	60,05	61,54	61,54 (B)
8.	Persentase penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)-jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0,044	0,046	0,049	0,139

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
		perda tahun (n) x 100 %										
9.	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	75,94	74,83	77,33	74,33	79,00	78,30	79,69	81,71	83,57	83,57
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100	95,53	95,68	95,54	95,51	95,55	95,48	95,50	95,51	95,52	95,52
	INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN SASARAN											
1.	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	52	52	60	62,5	68	52,38	76	84	88	88
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,15	5,75	6,03	6,82	5,65	8,2	7,55	6,81	6,43	6,43

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
3.	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	466.255,15	415.867,46	513.346,92	392.312,53	565.194,95	395.495,23	401.862,74	409.417,45	418.106,23	418.106,23
4.	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9.522,39	9.765,00	9.746,16	10.348,00	10.008,33	10.183,00	10.307,58	10.632,26	11.024,59	11.024,59
5.	PDRB Sektor Perdagangan (SDGs) (Jutaan Rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor Perdagangan		510.433,17		553.593,38		547.822,20	556.832,20	582.684,76	615.823,20	615.823,20
6.	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	321.300,27	312.007,01	335.758,78	325.354,30	350.867,92	326.224,79	329.730,34	336.849,19	344.355,30	344.355,30
7.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	-	64,17	-	65,89	-	67,36	68,91	70,56	72,33	72,33
8.	Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan	n/a	n/a	26	200,44	26	28,276	36	36	41	41

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
		Asing										
9.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,36	13,15	13,62	13,16	13,92	13,17	13,18	13,19	13,20	13,20
10.	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,09	9,94	10,29	9,97	10,52	10,17	10,75	11,01	11,30	11,30
11.	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	4	4	10	7,34	20	10,94	20	25	30	30
12.	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	B	B	B	B	B	B (61,03)	B (64,57)	B (68,22)	BB (72,83)	BB (72,83)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
13	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	-	-	-	-	-	-	4,04	4,19	4,45	12,68
15.	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	-	-	-	-	-	61	66	70	75	75
16	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola	69,49	69,59	69,83	69,87	70,47	70,00	70,14	70,28	70,42	70,42

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
		mortalitas menurut umur										
17.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	-	18,5	-	11,1	-	8,00	6,10	6,00	5,90	5,90
18.	PDRB sektor Pariwisata-(juta rupiah) SDGs	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	71.119,37	73.951,36	77.373,30	82.406,43	83.627,23	75.255,42	80.359,32	87.536,71	95.714,10	95.714,10
19.	Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	(Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata /Total PAD) x 100 %	2,76	2,58	2,95	2,48	3,16	1,75	1,86	1,98	2,13	2,13
20	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	75,94	74,83	77,33	74,33	79,00	78,30	79,69	81,71	83,57	83,57
21.	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	54,96	54,96	72,66	59,45	74,35	62,34	63,42	65,07	66,73	66,73

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
22	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45.35	45,35	46.35	46,72	47.35	46,72	47,72	49,22	51,22	51,22
23.	Indeks Ketahanan Daerah	upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0.47	0,47	0,49	0,49	0,51	0,44	0,53	0,55	0,57	0,57
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56,79	56,79	58	58,01	60	62,74	-	-	-	-
		Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 %	-	-	-	-	-	-	65,18	65,7	66,22	66,22

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
		IKU, 21,9 % IKL)										
25.	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	86	86	87	87,5	88	84,15	88	89	90	90
26.	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6,4	6,4	5,4	5,4	4,4	11,29	10,08	8,9	7,5	7,5
27.	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	22,81	42,58	15	9,96	10	133,21	83,54	72,93	19,08	19,08
28.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	84	83	86	86	87	87	88,01	89,05	90,1	90,1

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja								Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
29.	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfaslitasi (%)	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	13,17	13,17	59,76	63,6	84,89	-	89,84	94,78	100	100
30	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,3	1,87	2,7	2,45	3	2,88	2,92	2,96	3,10	3,10
31	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas	B	B	B	B	B	80 (B)	83,34 (B)	86,55 (B)	89,87 (A)	89,87 (A)

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target Capaian Kinerja									Kondisi Akhir
			2018		2019		2020		2021	2022	2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
		pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik										

8.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah akan dijabarkan secara rinci setelah perumusan indikator kinerja OPD pada seluruh aspek pelayanan. Berikut disajikan rumusan awal Indikator Kinerja Daerah berdasarkan indikator sasaran sebelum dan sesudah perubahan.

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Sebelum Perubahan

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional (rumus)	Kondisi Awal 2017	2018			2019			2020		
				T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)	T	R	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Masjid dan Mushola yang aktif (%)	(Jumlah masjid dan mushola aktif minimal sholat 5 waktu/ total masjid dan mushola) x 100 %, Total Jumlah	65	65	65	100	75	80,18	106,91	83	62,93	75,82

		Masjid dan mUshola 2017 adalah 221										
2	Persentase Rumah Ibadah agama lain yang aktif (%)	(Jumlah rumah ibadah agama lain yang aktif / total rumah ibadah agama lain) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase sarana peribadatan yang memadai	Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Masjid dan mushola yang terdaftar di Kemenag	70	75	75	100	80	75,2	94	85	76,29	89,75
4	Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (TPQ, TPSQ, MDA, Rumah Tahfidz) dengan fasum yang lengkap dibagi total Jumlah Lembaga Pendidikan Agama yang terdaftar di Kemenag	10	15	15	100	20	16	80	25	20	80
5	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	44	52	52	100	60	62,5	104,17	68	52,38	77,03
6	Persentase budaya benda yang lestari	(jumlah cagar budaya yang lestari / total jumlah cagar budaya yang ditetapkan) x 100 %	57,98	59,66	59,66	100	61,34	63,02	102,74	63,02	63,85	101,32
7	Persentase budaya tak benda yang lestari	(jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan/ total	n/a	10,7	10,7	100	13,3	17,8	133,83	17,8	6,05	33,99

		jumlah jenis objek pemajuan kebudayaan) x 100 %										
8	Produktivitas tenaga kerja	PDRB ADHB /Tenaga Kerja(Juta/jiwa/tahun)	86,44	88,05	87,59	99,48	89,68	96,04	107,09	91,35	91,09	99,72
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	6,19	6,15	5,75	93,5	6,03	6,82	113,1	5,65	8,2	145,13
10	PDRB Sektor industri pengolahan (SDGs) (jutaan rupiah)	Jumlah PDRB ADHB dari sektor industri	423.483,33	466.255,15	41.587,00	8,92	513.346,92	392.312,53	76,42	565.194,95	395.495,23	69,98
11	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	9.343	9.522,39	9.765,00	102,55	9.746,16	10.348,00	106,18	10.008,33	10.182,00	101,74
12	Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu setahun	22.767	23.635,41	23.635,41	100	23.946,52	23.900,00	99,81	25.106,79	22.885,00	91,15
13	PDRB ADHB Sektor Pertanian dan perikanan (jutaan rupiah)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	309.537,83	321.300,27	321.300,00	100	335.758,78	325.354,30	96,9	350.867,92	326.224,79	92,98
14	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,14	13,36	13,15	98,46	13,62	13,16	96,65	13,92	13,17	94,64

15	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	9,93	10,09	9,94	98,49	10,29	9,97	96,89	10,52	10,17	96,71
16	Rata-rata nilai UN SMP Kota Sawahlunto	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	53,9	54,9	54,9	100	55	54,9	99,82	55,1	78	141,56
17	Kasus Kenakalan Remaja menurun	rata-rata nilai yang dihasilkan dari ujian nasional yang diselenggarakan secara nasional pada tingkat SMP di Kota Sawahlunto	7	9	9	100	8	6,9	86,25	7	5	71,43
18	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan) x 100 %	n/a	4	4	100	10	10,38	103,8	20	10,94	54,7
19	Peringkat Nilai LPPD tingkat Provinsi	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	5	3	7	20	2	11	11,1	1	7	16,7
20	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
21	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	-	-	-	-	-	-	4,04	4,19	4,45	12,68

22	Nilai Sakip	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	CC	B	B	100	B	B	100	B	B	100
23	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian Pengendalian Internal Pemerintah oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 3	100	Level 3	Level 3	100	Level 3	Level 3	100
24	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	(Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	n/a	80	80	100	85	83,33	98,04	90	26,31	29,23
25	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	B	B	B	100	B	B	100	B	B	100
26	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	n/a	17	19,25	113,24	20	34,91	174,55	23	46,24	201,04
27	Persentase penegakan perda (%)	(jumlah penyelesaian penegakan perda / jumlah pelanggaran perda) x 100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada	69,39	69,49	69,59	100,14	69,83	69,87	100,06	70,47	70	99,33

		perubahan pola mortalitas menurut umur										
29	Persentase Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dengan Indeks > 0,8 dibagi dengan seluruh kepala keluarga dikali seratur persen	25	27	24	88,89	29	24,6	84,83	31	24	77,42
30	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Jumlah Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100 %	68,01	95	95	100	95	97,1	102,21	96	96,07	100,07
31	Tingkat Kepuasan Pasien (Pengunjung)	(Gambaran kepuasan dari pasien/masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit + Puskesmas yang diukur melalui kuesioner) / 2	94,26	94,46	81,5	86,28	94,66	81,5	86,1	94,86	80,6	84,97
32	Persentase Rujukan yang dikeluarkan RSUD	(Jumlah Rujukan IGD dan Rawat Inap / Jumlah kunjungan IGD dan Rawat Inap) x 100 %	1,91	≤ 2,51	2,4	95,62	≤ 2,40	2,38	99,17	≤ 2,35	3,37	143,4
33	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	n/a	-	-	-	65	65	100	70	-	-
34	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	32,35	32,35	32,35	100	38,24	32,25	84,34	44,12	44,12	100

35	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	60,55	60,55	60,55	100	61,76	61,76	100	63	63	100
36	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	331.483	354.610	461.960	130,27	379.350	237.490	62,6	405.816	101.649	25,05
37	% persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	13,22	13,22	13,22	100	13,88	13,88	100	14,58	14,58	100
38	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	53,93	54,96	54,96	100	72,66	59,45	81,82	74,35	62,34	83,85
39	Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	(luas lahan sawah yang terairi dari irigasi / total luas sawah) x 100 %	45,35	45,35	45,35	100	46,35	46,72	100,8	47,35	46,72	98,67
40	Indek Ketahanan Daerah		n/a	0,47	0,47	100	0,49	0,49	100	0,51	0,44	86,27
41	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	56,79	56,79	55,5	97,73	58	58,01	114,95	60	62,74	133,33
42	Persentase Ketaatan terhadap tataruang	perbandingan antara realisasi RTRW	86	86	86	100	87	87,5	100,57	88	87,5	99,43

		dengan rencana peruntukan RTRW										
43	Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	6,4	6,4	16,57	258,91	5,4	33,79	625,74	4,4	48,36	1099,09
44	Luas kawasan permukiman kumuh (hektar) (SDGs)	Luas kawasan permukiman kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	42,58	22,81	42,58	186,67	15	9,96	66,4	10	133,21	1332,1
45	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak / total jumlah rumah tangga) x 100 %	83	84	83	98,81	86	86	100	87	87	100
46	Persentase lansia yang terfasilitasi	(Jumlah lansia yang terfasilitasi / Total Jumlah lansia kurang mampu) dikali 100 %	19,74	19,25	19,25	100	19,25	56,85	295,32	100	87,24	87,24
47	Persentase ABK yang terfasilitasi	(Jumlah ABK yang terfasilitasi / Total Jumlah ABK) dikali 100 %	44,74	22,87	22,87	100	100	64,02	64,02	100	100	100
48	Persentase penyandang disabilitas yang terfasilitasi	(Jumlah penyandang disabilitas yang terfasilitasi / Total Jumlah penyandang disabilitas) dikali 100 %	4,64	7,47	7,47	100	19,79	13,95	70,49	39,57	15,02	37,96
49	Persentase penderita gangguan jiwa yang terfasilitasi	(Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar yang terfasilitasi / Total Jumlah penderita gangguan jiwa terlantar) dikali 100 %	5,43	3,09	3,09	100	100	100	100	100	100	100

50	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	65,59	65,6	65,86	100,4	65,61	65,33	99,57	65,62	66,18	100,85
51	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,52	95,53	95,68	100,16	95,54	95,51	99,97	95,55	95,54	99,99
52	Predikat Kota Layak Anak	Predikat bagi Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Nindya	Nindya	Nindya	100	Nindya	Nindya	100	Utama	Nindya	50
53	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,02	2,3	1,87	81,3	2,7	2,45	90,74	3	2,88	96

Tabel 8. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Setelah Perubahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	**KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**									
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	%	5,52	5,31	-1,27	2,9	3,24	4,23	4,23
1.2	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	%	0,310	0,270	0,286	0,281	0,280	0,278	0,278
1.3	PDRB Perkapita	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	Juta/Jiwa	55,01	58,88	58,02	59,99	62,93	66,03	66,03

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	**KESEJAHTERAAN SOSIAL**									
2.1	Tingkat kemiskinan	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	%	2,39	2,17	2,16	2,10	2,05	2,01	2,01
2.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	Skor	71,72	72,39	72,64	73,17	73,63	74,09	74,09
2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(IPM Perempuan / IPM Laki-laki) x 100 %	Skor	95,68	95,51	95,48	95,50	95,51	95,52	95,52
2.4	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	Tahun	9,94	9,97	10,17	10,75	11,01	11,30	11,30
2.5	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	Tahun	13,15	13,16	13,17	13,18	13,19	13,20	13,20
2.6	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	69,59	69,87	70,00	70,14	70,28	70,42	70,42
2.7	Tingkat Pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	%	5,75	6,82	8,2	7,55	6,81	6,43	6,43

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.8	Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30 (%)	(Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30/total jumlah lulusan SD) x 100 %	%	4	7,34	10,94	20	25	30	30
2.9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah kasus stunting pada balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	%	18,5	11,1	8,00	6,10	6,00	5,90	5,90
2.10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	Ribu Rupiah	9.765,00	10.348,00	10.183,00	10.307,58	10.632,26	11.024,59	11.024,59
2.11	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto	((Jumlah Zakat Pada BAZ Tahun n - Jumlah zakat pada BAZ tahun n-1) X 100 %) / Jumlah zakat pada BAZ n-1)	&	n/a	0,036	-0,002	1,23	1,43	1,77	1,77
ASPEK PELAYANAN UMUM										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
1	**PENDIDIKAN**									
1.1	Angka Harapan lama sekolah (AHLS)	lama sekolah dalam tahun yang diharapakan yang akan dilaksanakan oleh anak pada umur tertentu	Tahun	13,16	13,17	13,18	13,19	13,2	13,2	13,2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (ARLS)	Jumlah tahun belajar penduduk umur 15 keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal tidak termasuk tahun mengulang	Tahun	9,97	10,17	10,75	11,01	11,3	11,3	11,3
1.3	Persentase lulusan SD Hafiz Alquran	lulusan SD Hafiz Alquran Minimal jus 30 / total lulusan SD x 100 %	%	10	10,94	20	25	30	30	30
1.4	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Literasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	%	-	-	-	100	100	100	100
1.5	Persentase Siswa dengan Nilai Assesment kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum	(Jumlah Siswa dengan Nilai Assesment Kompetensi (Numerasi) memenuhi Kompetensi Minimum/ Jumlah Siswa yang mengikuti ujian) x 100 %	%	-	-	-	100	100	100	100
1.6	Angka Partisipasi Kasar									
1.6.1	APK PAUD	(Jumlah Siswa PAUD /Jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	99,4	60,52	61,24	59,35	60	61	62	76,3
1.6.2	APK SD/MI/Paket A	(Jumlah Siswa SD /Jumlah seluruh anak yang berusia 7- 12 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	103,7	108,96	107,13	100	101	102	103	115,4
1.6.3	APK SMP/MTs/Paket B	(Jumlah Siswa SMP /Jumlah seluruh anak yang berusia 13-15 tahun di Kota Sawahlunto) x 100 %	93,8	92,57	91,47	91,5	91,9	91,99	91,99	142,05
1.7	Angka Partisipasi Murni									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Murni SD	%	100	96,86	92	100	100	100	100
1.7.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka Partisipasi Murni SMP	%	83,73	79,3	79,39	100	100	100	100
1.7.3	Rasio Siswa SD/MI Perkelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI tidak melebihi 32 orang siswa	Siswa Perkelas	18:19,1	18,11:1	17,45:1	17,50:1	17,55:1	17,65:1	17,65:1
1.7.4	Rasio Siswa SMP/MTS Perkelas	Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan SMP tidak melebihi 32 orang siswa	Siswa Perkelas	22,04:!	22,04 :1	22,53:1	22,60:1	22,65:1	22,70:1	22,70:1
1.7.5	Persentase sekolah yang berakreditasi A	sekolah yang memenuhi 8 standar nasional pendidikan	%	44	67	24	25	29	30	30
1.7.6	Persentase Lembaga PAUD yang terakreditasi	Jumlah Lembaga PAUD/PAUD yang terdaftar di BAN PAUD	%	21,14	21,95	21,95	22	23	24	24
1.7.7	Angka kelulusan	(jumlah anak yang mengikuti ujian/ jumlah anak yang lulus)x100 %	%	100	100	100	100	100	100	100
1.8	Rata-rata nilai ujian sekolah SD	Jumlah Nilai Rata-Rata SD/Jumlah SD se-Kota Sawahlunto	Nilai	77,9	78	78,1	78,2	78,4	78,6	78,6
1.9	Rata-rata Nilai ujian SMP	Jumlah Nilai Rata-Rata SMP/Jumlah SMp se-Kota Sawahlunto	Nilai	54,9	65,68	78,89	78,2	78,4	78,6	78,6
1.10	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar di satuan PUD / anak usia5-6 Kota Sawahlunto	%	12,68	12,68	17	18	19	20	20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.11	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-12 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia7-12 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-12 Kota Sawahlunto	%	24	50,04	48	49	50	52	52
1.12	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia13-15 tahun yang berpatisipasi dalam Pendidikan Pertama	Jumlah anak usia13-15 tahun yang sudah tanat atau sedang belajar Sekolah Menengah Pertama / anak usia13-15 Kota Sawahlunto	%	22,92	23	20	25	29	30	35
1.13	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia7-18 tahun yang yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	Jumlah anak usia7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar pada kesetaraan sedang belajar sekolah Dasar / anak usia7-18 Kota Sawahlunto	%	0,66	0,11	0,2	0	0	0	0
2	**KESEHATAN**									
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perobahan moralitas menurut umur	69,49	69,59	69,83	70	70,14	70,28	70,42	70,42
2.2	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Jumlah	18	22	19	19	18	18	18
2.3	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	Jumlah	0	3	2	0	0	0	0
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	jumlah Balita Gizi buruk/Jumlah Bayi di Kota Sawahlunto x 100	%	0,5	0,3	0,1	7,8	7,5	7,3	7,3
2.5	Jumlah kasus Kematian Balita	Jumlah kasus Kematian Balita	Jumlah	24	27	21	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar		%	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan		%	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk		0,0023	0,0022	0,0016	0,0015	0,0014	0,0014	0,0014
2.9	Porsentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terkredetasi	Jumlah RS Rujukan yang terkreditasi/jumlah RS Kota Sawahlunto x100	%	utama	utama	utama	utama	utama	utama	utama
2.10	Posetase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu hamil di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Posetase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalinl yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah ibu bersalin di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Posetase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Bayi baru lahir di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai Standar	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan /jumlah Balita di Kota Sawahlunto x100	%	70	74	76	77	78	79	79

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	Porsenase Anak usia Pendidikan dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlahanak usia Pendidikan dasar di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Porsenase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar	Jumlah anak usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /jumlah anak usia 15-59 di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.16	Porsenase warga Negara usia 60 tahun mendapatkan skring Kesehatan sesuai Standar	Jumlah warga usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar /jumlah warga usia 60 di Kota Sawahlunto x100	%	70	38,1	0	70	71	72	73
2.17	Porsenase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita Hipertensi di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.18	Porsenase penderita DM mendapatkan mendapat pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita DM di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.19	Porsenase penderita ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaODGJ berat di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2.20	Porsenase terduga TBC mendapatkan pelayan TBC sesuai Standar	Jumlah penderitaTBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah PenderitaTBC di Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2.21	Porsenase orang dengan resiko terinveksi HIV mendapatkan pelayan deteksi dini HIV sesuai Standar	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar /jumlah Penderita HIVdi Kota Sawahlunto x100	%	100	100	100	100	100	100	100
2,22	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Jumlah Kasus stunting pada Balita dalam suatu populasi tertentu pada suatu waktu	%	18,5	11,1	8	6,1	3,78	2,65	2,65
3	**PEKERJAAN UMUM**									
3.1	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	%	66,82	77,03	92,5	78,00	78,50	79,0	79,0
3.2	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	%	56,00	43,96	43,98	46,75	50,37	52,34	52,34
3.3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Jumlah bangunan pemerintah yang sesuai standar: jumlah bangunan pemerintah yang ada kali 100 %	%	68	84,69	79,27	66,98	64	65	80,28
3.4	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	%	40,51	42,38	47,35	48,35	49,35	50,35	50,35

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	%	-	-	-	11,11	22,22	22,22	55,55
3.6	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	Persentasi air limbah yang ditangani (%)	%	77,00	78,00	81,00	89	90	91	91
3.7	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian bajir di WS kewenangan kab/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian bajir di WS kewenangan kab/kota / luas kawasan permukiman rawan banjir x 100 %	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
3.8	Rasio Luas daerah Irigasi yang dilayani jaringan irigai	Luas Irigasi yang dibangun,ditingkatkan,direhab, dioperasi dan dipelihara dibagi Luas Daerah Irtigasi dikali 100 %	%							
3.9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah tangga lumpur tinjanya telah diolah PLT + jumlah rumah tangga yang memiliki sambungan rumah dan airlimbahnya diolah di IPALD / jumlah rumah dikabupaten	%							
3.10	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB sesuai peruntukannya/jumlah IMB yang berlaku x 100 %	%	88,00	93,69	95,24	96,30	97,70	98,30	98,30

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
3.11	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	%	66,82	66,38	66,5	68,75	70,01	72,21	72,21
3.12	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator diwilayah kabupaten/kota/ jumlah kebutuhan/analisis diwilayah kabupaten/kota x 100 %	%	-	-	-	10,00	30,00	30,00	70,00
3.13	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumla proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi / jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	-	-	-	0	0	0	0
3.14	Ineks pembangunan infrastruktur wilayah	Jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan,air minum,sanitasi) dalam kondisi baik/tiga	%	74,83	74,83	78,3	79,69	81,71	83,57	83,57
3.15	Persentase infra struktur dasar dalam kondisi baik (%)	(Jumlah persentase kondisi jalan ,jembatan,irigasi,gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik/5	%	54,96	59,45	62,34	63,42	65,07	66,73	66,73
3.16	Persentase luas sawah yang terairi dengan irigasi (%)	(Luas lahan sawah yang terairi dari irigasi/total luas sawah) x 100 %	%	45,35	46,72	46,72	47,72	49 22	51,22	51,22
3.17	Persentase kesesuaian pemanfatan ruang dengan rencana tata ruang (%)	Perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan ruang	%	86,00	87,50	84,15	88,00	89,00	90,00	90,00
3.18	Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	%	84,00	86,00	85,26	89,00	91,00	93,00	93,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	**PERUMAHAN RAKYAT**									
4.1	Penyedian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah lorban bencana yang ditangani / Jumlah rencana yang akan dibangun x 100 %	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasiprogram pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas pengendalian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100 %	%	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di kabupaten/kota yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (Ha) / luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha x100 %	%	60,00	65,00	70,00	85,00	87,00	90,00	90,00
4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (kumuh tidak layak huni)	Jumlah unit RTLH / jumlah total unit rumah x 100 %	%	6,40	5,40	11,29	10 08	8,90	7,50	7,50
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	%	-	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
4.6	Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH / Jumlah rumah x 100 %	%	-	65,00	82,21	75,00	80,00	85,00	85,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.7	Luas Pengurangan kawasan kumuh (hektar) (Sdgs)	Luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota (Ha)	Ha	42,58	9,96	133,21	83 54	72,93	19,08	19,08
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
5.1	Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda (%)	(jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n-1)- jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n))/jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100 %	%	-	-	-	0,046	0,046	0,049	0,139
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	(Jumlah pengaduan yang ditagani/ jumlah pendaguan pelanggaran yang masuk) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.4	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	(Jumlah kasus diselesaikan/jumlah laporan kasus masuk) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	%	122	123	310	100	100	100	100
5.6	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	Jumlah Linmas per desa/kelurahan	Orang	370	370	370	370	370	370	370

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.7	Angka kriminalitas	(jumlah kasus kriminal/jumlah penduduk) x 100%	%	0,121	0,075	0,059	0,049	0,040	0,035	0,035
5.8	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	(Jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.9	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk	%	100	100	100	100	100	100	100
5.10	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	30	30	30	20	20	20	25
5.11	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	(Jumlah aparatur pemadam yang mempunyai sertifikat keahlian/jumlah aparatur pemadam) x 100%	%	40	30	30	40	50	60	60
5.12	Indeks Ketahanan Daerah	Upaya untuk mengukur kapsitas penanggulangan bencana daerah		0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,46

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5.13	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.14	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.15	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(Jumlah Masyarakat yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
5.16	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	(Jumlah Fassum yang tertangani/Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
6	**SOSIAL**									
6.1	Angka Kemiskinan	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	%	**2,39**	**2,17**	**2,16**	**2,1**	**2,05**	**2,01**	**2,01**
6.2	Persentase TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PMKS	(Jumlah TKSK yang berpatispasi dalam penanganan PMKS/ Jumlah TKSK) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti : populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%	%	15,5	38,57	53,28	89,84	94,78	100	100
6.4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR										
7	**TENAGA KERJA**									
7.1	Tingkat Pengangguran	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	%	5,75	6,82	8,2	7,55	6,81	6,43	6,43

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dunia usaha formal	Orang	109	109	4	10	15	25	25
7.3	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha	Jumlah tenaga kerja yang berwirausaha non formal	Orang	5	10	15	28	30	35	35
7.4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	%	60	88	64	80	85	90	90
7.5	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	%	5,66	5,06	10,9	15	20	25	25
7.6	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan / jumlah tenaga kerja x 100%	%	87,586	96,044	91,089	93,14	95,12	98,77	98,77
7.7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / jumlah perusahaan x 100%	%	51,16	59,3	71,25	73,75	77,38	82,56	82,56
7.8	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Keerja dalam wilayah kebupaten/kota)	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker terdaftar x 100%	%	11,57	23,75	0,99	3,97	4,97	7,1	7,1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
8.1	Indeks Pemberdayaan gender / IDG (IKU OPD)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik	%	95,68	95,51	95,48	95,5	95,51	95,52	95,52
8.2	Persentase Penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak (IKU OPD)	Jumlah penanganan & penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak/ Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
8.3	Persentase PKK Aktif	Jumlah PKK aktif/jumlah total PKK x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
8.4	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD)	Jumlah anggota DRPD perempuan/ jumlah total anggota DPRD x 100%	%	20	20	20	20	20	20	20
8.5	Rasio KDRT		Rasio	0,03	0,03	0,02	0	0	0	0
8.6	Persentase Kelurahan ramah anak	Jumlah kelurahan ramah anak/ jumlah kelurahan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
8.7	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai	(Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memproleh layanan sesuai/Jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus)x1000	Per 1000 anak (Per mil)							
8.8	Persentase sekolah ramah anak	Jumlah sekolah ramah anak/ jumlah sekolah x 100%	%							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
8.9	Total fertility rate	Jumlah rata-rata kelahiran anak per seorang wanita sepanjang usia produktifnya	Rata-rata anak lahir hidup	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
8.10	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%	%							
8.11	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) korban kekerasan yg ditangani instansi tingkat kab/kota yg didampingi : jumlah anak (penduduk usia kurang 18 th) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
8.12	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yg mengalami kekerasan : jumlah penduduk perempuan x 100.000								
9	**PANGAN**									
9.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah	Indeks	64,17	65,89	67,36	68,91	70,56	72,33	72,33
9.2	Konsumsi keragaman pangan									
9.2.1	padi-padian	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan padi perkapita perhari	kkal/kapita/hari	907,70	870,20	858,40	944,00	942,50	943,00	943,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9.2.2	Umbi-umbian	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan umbi-umbian perkapita perhari	kkal/kapita/hari	66,20	35,90	38,60	32,20	113,10	113,20	113,20
9.2.3	Pangan Hewani	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan pangan hewani perkapita perhari	kkal/kapita/hari	290,00	231,10	238,30	236,30	226,20	226,30	226,30
9.2.4	Minyak dan Lemak	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan minyak dan lemak perkapita perhari	kkal/kapita/hari	279,90	350,80	310,50	348,30	275,00	250,00	250,00
9.2.5	Buah/Biji Berminyak	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan buah/bij berminyak perkapita perhari	kkal/kapita/hari	36,30	49,60	45,70	39,90	56,60	56,60	56,60
9.2.6	Kacang-kacangan	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan kacang-kacangan perkapita perhari	kkal/kapita/hari	98,50	80,60	64,20	71,80	94,30	94,30	94,30
9.2.7	Gula	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan gula perkapita perhari	kkal/kapita/hari	24,10	39,40	33,20	21,30	94,30	94,30	94,30
9.2.8	Sayur dan buah	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan sayur dan buah perkapita perhari	kkal/kapita/hari	90,30	126,80	112,30	106,70	113,20	113,20	113,20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
9.2.9	lain-lain	Besarnya Konsumsi Keragaman Pangan lainnya perkapita perhari	kkal/kapita/hari	9,30	9,60	10,60	9,50	56,60	56,60	56,60
9.2.10	Persentase keamanan pangan segar yang dikonsumsi	(Jumlah Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi/Jumlah Pangan Segar) x 100 %	%	95,2	90,1	96,33	90,14	90,3	91	91
9.2.11	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	%	10.148,25	11.148,87	11.261,41	11.366,00	11.475,89	11.584,46	11.584,46
9.2.12	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya	skor	87,30	86,50	83,70	84,00	85,00	86,00	86,00
10	**PERTANAHAN**									
10.1	Persentase permanfaat tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingakan dengan luas izin yang diterbit kan	(Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi) x 100 %	%	-	-	-	100	100	100	100
10.2	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	Jumlah Penetapan tanah pembangunan / jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100 %	%		100,00	0	0	100,00	100,00	100,00
10.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya diatas izin lokasi/luas izin lokasi yang diterbitkan x 100 %	%							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
10.4	Tersedianya tanah obyek landreform9TOL) yang siap diredistribusikan tang berasal dari tanah kelebiahan maksimum dan tanah absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar dengan 0,5 Ha/jumlah penerima tanah obyek landreform x 100 %	%							
10.5	Tesedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah/luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100 %	%							
10.6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Kasus pertanahan yang terfasilitasi dibagi dengan jumlah kasus pertanahan x 100%	%	70,00	72,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.7	Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan (%)	(Jumlah usulan ganti rugi tanah yang ditetapkan/ usulan ganti rugi dari OPD) x 100%	%	-	-	56.25	100,00	100,00	100,00	100,00
11	**LINGKUNGAN HIDUP**									
11.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKL)	%	56,79	58,01	62,74	65,18	65,70	66,22	66,22
11.2	Terlakasanaya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	%	67	68,26	70	75,1	76	77	77

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sampah terkurangi dengan timbulan sampah (%)	%	18	20	20	20	21	22	22
11.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	(jumlah penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang melanggarterhadap izin lingkungan dan izin PPLh yang diterbitkan pemerintah kab/kota / usaha dan/kegiatandilakukan pemeriksaan Kegiatan Usaha) x 100 %	%	81,25	81,36	75	80	82	84	84
11.4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Gambaran indikasi standar kinerja pengelolaan sampah dinilai dari indeks pengelolaan/pemerintahan(Govarnance) dan indeks efektifitasdan efisiensi terkait pengelolaan sampah	%	-	-	-	67,95	68,11	68,27	68,27
12	**KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**									
12.1	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	(Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan / jumlah KK) x 100 %	%	19,25	20	46,24	55	65	70,00	70,00
12.2	Cakupan KTP	Banyaknya kepemilikan KTP	%	99,50	99,14	106,36	98,00	98,02	99,00	99,00
12.3	Cakupan Akte kelahiran	Banyaknya kepemilikan akte kelahiran	%	52,37	56,05	56,06	60,00	62,00	62,00	62,00
12.4	Cakupan KK	Banyaknya kepemilikan KK	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
12.5	Cakupan akte kematian	Banyaknya kepemilikan akte kematian	%	100	100	100	100	100	100	100
12.6	Validitas database kependudukan	Pelaksanaan validasi data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
12.7	Perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 th keatas yg memiliki KTP : jumlah penduduk 17 th keatas x 100%	%	99,62	98,05	106,64	99,00	99,00	99,20	99,20
12.8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA : Jumlah anak usia 0-17 th x 100%	%	0,00	38,44	57,55	63,00	65,00	66,00	66,00
12.9	Kepemilikan akta kelahiran (anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir)	Jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akta lahir : Jumlah anak usia 0-18 th x 100%	%	95,93	97,24	98,13	99,00	99,20	99,50	99,50
12.10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%	%	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
13.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yg memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%	%	62,96	62,96	51,85	100	100	100	100
13.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun : Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x100%	%	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**									
14.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persentase jumlah rata-rata anak yang dilahirkan wanita selama usia subur	%	2,1	2,38	2,33	2,29	2,25	2,22	2,22
14.2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate/mCPR)	(Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100 %	%	62,00	64,00	63,00	67,78	68,55	69,21	69,21
14.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100 %	%	23,51	19,31	17,58	15,97	14,60	13,40	13,40
15	**PERHUBUNGAN**									
15.1	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	Jumlah ketersediaan terminal angkutan penumpang	unit	2	2	2	2	2	2	2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
15.2	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	%	0,425	0,425	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
15.3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	%	45	45	56	65	65	65	65
15.4	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
15.5	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	Jumlah kendaraan laik jalan/jumlah kendaraan	%	44	67	25	40	60	70	70
15.6	Persentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas tahun n- tahun n-1/ jumlah angka kecelakaan tahun n-1 x 100%	%	25	32	26	35	30	25	25
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
16.1	Persentasse OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	Jumlah OPD yang sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang berbasiskan TIK / Jumlah OPD) x 100 %	%	70	70	70	70	85	95	95
16.2	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan kota (%)	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yangterintegrasidalamjaringan Kota/ Jumlah Aplikasi layanan yang ada di Seluruh OPD) x 100%	%	75	75	75	75	85	95	95
16.3	Persentase organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas	jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	kominfo									
	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	Nilai	1,87	2,45	2,88	2,92	2,96	3,1	3,1
16.4	Persentase layanan publik yang telah dilaksanakan secara online dan terintegrasi	jumlah layanan publik yang diselenggarkan secara online/ jumlah layanan publik x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
16.5	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/Jumlah Penduduk) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**									
17.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ jumlah seluruh koperasi) x 100%	%	82,35	77,94	77,94	78	79	80	80
17.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi Wirausaha	(jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha/jumlah usaha mikro keseluruhan) x 100%	%	0,00	0,22	1,12	2,03	3,07	4,09	4,09

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
17.3	Persentase Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015)	(Jumlah Koperasi sehat/ jumlah total koperasi) x 100%	%	23,53	11,76	14,71	22	24	26	26
17.4	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya	(Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya/Jumlah UMKM) x 100%	%	0,00	0,22	1,12	0,8	0,9	1,5	1,5
18	**PENANAMAN MODAL**									
18.1	Persentase Kenaikan jumlah nilai investasi	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	%	-85,31	132,05	-85,89	55,79	56,38	83,77	83,77
18.2	Persentase Kenaikan jumlah investor	(jumlah investor tahun n dikurangi jumlah investor tahun n-1) / jumlah investor tahun n-1 x 100%	%	-5,95	-87,97	-42,11	-9,09	20,00	25,00	25,00
18.3	Nilai Realisasi Investasi	Jumlah Investasi Lokal, Nasional dan Asing	milyar	86	200	28	36	36	41	41
18.4	Persentase masyarakat yang menggunakan aplikasi	(Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan melalui Aplikasui x 100%/Jumlah Masyarakat yang mengurus perizinan)	%	15	55	75	95	100	100	100
18.5	Persentase layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP	(Jumlah layanan PTSP yang memenuhi standar waktu layanan sesuai SOP x 100 %/ Jumlah Layanan PTSP)	%	90	90	95	98	100	100	100
18.6	Nilai Survey kepuasaan masyarakat	Nilai Survey kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Nilai	82,67	87,47	83,59	86,29	90	95	95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
18.7	Persentase penurunan pengaduan masyarakat	(Jumlah Pengaduan Tahun (n-1)-Jumlah Pengaduan n)/Jumlah Pengaduan Tahun n) x 100 %	%	60	50	30	40	30	20	20
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kota/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	%	13	15	15	16	16	17	17
19.2	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	60	70	77	148	153	160	160
19.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi/jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota X 100%	%	1	1	1	1	1,1	1,25	1,25
20	**STATISTIK**									
20.1	Jumlah dokumen statistik yang tersedia	Ketersediaan dokumen statistik daerah dan OPD	Buah	2	2	2	2	2	2	2
20.2	Ketersediaan Informasi Data Statistik Daerah	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
20.3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
20.4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah/ jumlah OPD x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
21	**PERSANDIAN**									
21.1	Terselenggaranya pengamanan informasi Pemda (bulan)	Pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah	bulan	12	12	12	12	12	12	12
21.2	Tingkat keamanan informasi pemerintah		%	100	100	100	100	100	100	100
22	**KEBUDAYAAN**									
22.1	Terlestarikannya cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/Jumlah cagar budaya yang terdata X 100%	%	59,66	56,16	53,81	57,18	60,55	63,92	63,92
22.2	Persentase Komunitas Budaya yang aktif	(Jumlah Komunitas budaya yang aktif / total komunita budaya) x 100 %	%	52	63	64	76	84	88	88

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
22.3	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya	Jumlah kelompok Seni Budaya Yang Meningkat Manajemennya/ Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	%	40,28	40,28	40,28	40,28	62,50	69,44	69,44
22.4	Persentase Penampilan kelompok seni budaya	Jumlah Penampilan Kelompok Seni Budaya / Jumlah Kelompok Seni Budaya x 100	%	22,36	23,41	25,58	27,78	37,50	55,56	55,56
22.5	Persentase Budaya Benda yang Lestari	Jumlah Budaya Benda Yang Lestari / Jumlah Cagar Budaya x 100	%	59,66	63,02	63,85	66,37	68,46	70,56	70,56
22.6	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Jumlah Kunjungan Museum (Orang)	Orang	30.269	30.304	13.187	18.598	20.458	22.504	22.504
22.7	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif	Jumlah lingkungan seni dan budaya yang aktif	Grup	45	47	38	48	53	53	53
23	**PERPUSTAKAAN**									
23.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan	(Jumlah Pengunjung Tahun n - jumlah pengunjung tahun n-1)*100%/Jumlah Pengunjung Tahun n-1	%	82,48	87,63	70,96	89,64	89,47	91,65	91,65
23.2	Persentase perpustakaan aktif	Jumlah pustaka aktif/ jumlah total pustaka x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
23.3	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai kebiasaan masyarakat memperoleh pengetahuan /informasi	%	-	-	50,2	51	52	53	53
23.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai kondisi semua jenis perpustakaan	%	-	-	72,13	75	77	80	80

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
24	**KEARSIPAN**									
24.1	Persentase peningkatan arsip statis yang diakuisisi	(Jumlah arsip statis yang diakuisisi/Jumlah Arsip Statis) x 100 %	%	86,70	49,53	63,17	65,00	70,00	75,00	75,00
24.2	Persentase OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah OPD dan kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku/ jumlah total OPD & kelurahan x 100%	%	38,46	42,31	49,39	50,00	65,00	65,00	65,00
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sbg bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yg sah & pertanggungjawaban nasional (pasal 40 & pasal 59 UU no 43/2009 ttg kearsipan)	T=(a+i+s+j)/4 T = tingkat kearsipan, a = % arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip, i = % arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, s = % arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = % jumlah arsip	%	70	80	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
24.4	Tingkat keberadaan & keutuhan arsip sbg bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa & bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat	T = (m+b+g+a+c+i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban, m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan & penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD Prov yg digabung dan/atau dibubarkan & pemekaran daerah kab/kota dg NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis & arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yg bersifat tertutup dg NSPK	%	50,00	50,28	49,64	50,30	50,42	50,46	50,46
24.5	Indeks Kearsipan (ANRI)	Jumlah berkas arsip yg berhasil di buat daftar & tersimpan di depo arsip	Nilai			B	B	B+	A	A
URUSAN PILIHAN										
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
25.1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	216,05	217,26	206,27	207,00	207,50	208,00	622,50

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
25.2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	(jumlah produksi ikan tahun ini-jumlah produksi ikan tahun lalu/ jumlah produksi ikan tahun lalu) x 100%	%	-0,49	0,56	-5,06	0,3	0,5	0,97	0,97
26	**PARIWISATA**									
26.1	PDRB sektor Pariwisata	PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	Juta rupiah	73.951,36	82.406,43	75.255,42	80.359,32	87.536,71	95.714,10	95.714,10
26.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,17	2,24	2,06	2,12	2,19	2,28	2,28
26.3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,58	2,48	1,75	1,86	1,98	2,13	2,13
26.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaaan	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	%	1,37	0,12	-0,98	2	2,5	3	3
26.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / jumlah wisatawan tahun n-1 X 100%	%	-0,22	-0,09	-0,59	14,59	18,18	15,38	15,38
26.6	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual / jumlah kamar yang tersedia X 100%	%	23,81	14,74	15,84	19,27	22,36	25,81	25,81
26.7	Persentase pengunjung yang mengantakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)	Persepsi kepuasan pengunjung terhadap objek wisata	%	60	65	65	75	80	90	90

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
26.8	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)	(jumlah objek wisata unggulan tipe A / total jumlah objek wisata yang ada) x 100 %	%	32,25	32,25	38,24	50	55,88	61,76	61,76
26.9	Persentase Industri Pariwisata yang berdaya saing (Unit)	Jumlah Industri pariwisata dengan omset minimal 250 juta setahun / Jumlah total industri pariwisata) x 100 %	%	60,55	60,55	60,55	64,26	65,54	66,85	66,85
26.10	Jumlah Wisatawan (orang)	Jumlah pengunjung objek wisata (Tiket Masuk)	Orang	461.960	237.490	95.995	110.000	130.000	150.000	150.000
26.11	Persentase kelembagaan kepariwisataan yang profesional	(Jumlah Kelembagaan pariwisata yang memiliki perizinan / total kelembagaan pariwisata yang ada) x 100 %	%	13,22	13,22	13,22	15,30	16,07	16,87	16,87
27	**PERTANIAN**									
27.1	PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan	juta rupiah	312.007,01	325.354,30	326.224,79	329.730,34	336.849,19	344.355,30	344.355,30
27.2	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan	(Nilai PDRB ADHB sektor Pertanian dan perikanan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	9,16	8,84	8,92	8,70	8,44	8,21	8,21
27.3	Produksi padi	jumlah produksi padi	Ton	16.108,00	17.926,00	17.874,45	14.700,00	15.593,00	15.747,00	46.040,00
27.4	Produksi Kakao	jumlah produksi kakao	Ton	542,01	565,73	566,11	540,00	568,00	569,00	1677,00
27.5	Produksi karet	jumlah produksi karet	Ton	1262,63	1540,16	2012,87	1260,00	1729,00	1730,00	4719,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
27.6	Jumlah produksi ikan konsumsi	jumlah produksi ikan	Ton	216,05	217,26	206,27	207,00	207,50	208,00	622,50
27.7	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	(jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun/luas panen) x 100%	%	4,69	5,16	4,80	4,85	5,18	5,19	5,19
27.8	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan(t)- jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) / jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	10,00
27.9	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	(Jumlah produksi tanaman padi tahun ini -jumlah produksi tanaman padi tahun lalu/jumlah produksi tahun lalu) x 100 %	%	12,85	11,29	-0,29	0,3	0,45	0,97	0,97
27.10	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Kakao	(Jumlah produksi tanaman kakao tahun ini -jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu/jumlah produksi tanaman kakao tahun lalu) x 100 %	%	4,28	4,38	0,07	0,15	0,17	0,17	0,17
27.11	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Karet	(Jumlah produksi tanaman karet tahun ini -jumlah produksi tanaman karet tahun lalu/jumlah produksi tanaman karet tahun lalu) x 100 %	%	1,76	21,98	23,48	0,04	0,05	0,057	0,057
27.12	Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi	(Jumlah produksi Daging Sapi tahun ini -jumlah produksi Daging Sapi tahun lalu/jumlah produksi Daging sapi tahun lalu) x 100 %	%	5,41	-3,91	-0,73	0,32	0,9	1,18	1,18

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
27.13	Persentase Peningkatan Produksi Daging Ayam	(Jumlah produksi Daging Ayam tahun ini -jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu/jumlah produksi Daging Ayam tahun lalu) x 100 %	%	-	-	-2,59	5,5	7,7	7,14	7,14
27.14	Indeks Penanaman (IP)	Perbandingan antara julan luas pertanaman dalam pola tanam setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami		2,23	2,14	2,07	2,08	2,09	2,1	2,1
28	**PERDAGANGAN**									
28.1	PDRB sektor perdagangan	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	juta rupiah	510.433,17	553.593,38	547.822,20	556.832,20	582.684,76	615.823,20	615.823,20
28.2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB(2010=100)	(Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	14,99	15,05	14,98	14,70	14,61	14,67	14,67
28.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko swalayan)	(jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan/jumlah pelaku usaha diwilayah kab/kota) x 100%	%	10	10	10	5	15	30	30
28.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	realisasi/RDKK x 100%	%	80	80	80	80	80	80	80
28.5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan/jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota x 100%	%	0	40	0	70	70	70	70

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
28.6	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	rupiah	23.635,41	23.900,00	22.885,00	25.837,33	25.837,33	25.837,33	77.511,99
29	**PERINDUSTRIAN**									
29.1	Nilai PDRB sektor Industri	Nilai PDRB ADHB sektor Perdagangan	juta rupiah	415.867,46	392.312,53	395.492,23	401.862,74	409.417,45	418.106,23	418.106,23
29.2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(2010=100)	(Nilai PDRB ADHB sektor Industri / Nilai PDRB ADHB total) x 100%	%	12,22	10,66	10,82	10,61	10,26	9,96	9,96
29.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/Kota	(jumlah industri kecil dan menengah tahun n jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100%	%	10,62	10,62	10,62	12,06	14,38	16,04	16,04
29.4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP/Jumlah Seluruh Indikator Pembangunan Industri yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0	0	50	70	70
29.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
29.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
29.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
29.8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Informasi produksi dan kapasitas produksi	%	100	100	100	100	100	100	100
		Informasi bahan baku dan bahan penolong	%	100	100	100	100	100	100	100
		informasi bahan bakar/energy	%	100	100	100	100	100	100	100
		informasi tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		informasi investasi	%	100	100	100	100	100	100	100
29.9	Persentase Produk IKM yang mempunyai standar mutu	(Jumlah produk IKM yang mempunyai standar mutu/jumlah produk IKM)x 100%	%	0	0	0	0,001	0,001	0,001	0,001
29.10	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri	(jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri/jumlah IKM)x 100%	%	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
30	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**									
30.1	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	Peringkat PPD tingkat Provinsi				4	3	3	2	2
30.2	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Program Pada RKPD x 100 % /Jumlah Program pada RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100
30.3	Persentase OPD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	Jumlah OPD Yang memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras x 100 %/ Jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100
30.4	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah Usulan Desa/Kel yang disampaikan/Jumlah Usulan yang diakomodir)x100	%	19,22	21,43	26,55	28,3	29	30	30

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
30.5	Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	(Jumlah Peserta yang hadir/Jumlah Undangan)x100%	%	100	100	100	100	100	100	100
30.6	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian terhadap SPIP Kota Sawahlunto	Level	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3 (3.0)	-	-	Level 3
30.7	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penilaian SPIP Terintegrasi Kota Sawahlunto	Level	-	-	-	-	Level 2 (2.5)	Level 2 (2.7)	Level 2 (2.7)
30.8	Persentase OPD SPIP Level 3	(Jumlah OPD SPIP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	%	38.46	50	50	-	-	-	-
30.9	Persentase OPD SPIP RTP Level 3	(Jumlah OPD SPIP RTP level 3/OPD SPIP level 2) x 100	%	-	-	-	52	60	72	72
30.10	Persentase OPD Nilai SAKIP B	Penilaian terhadap SAKIP OPD	%	100	96.15	100	-	-	-	100
30.11	Persentase OPD Nilai SAKIP A	Penilaian terhadap SAKIP OPD	%	-	-	-	4 %	8 %	12 %	12 %
30.12	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
30.13	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.14	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Penetapan Perda APBD tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
30.15	Persentase peningkatan PAD (%)	(PAD tahun n - PAD tahun (n-1)/ PAD tahun (n-1)) x 100%	%	-	-	-	4,04	4,19	4,45	12,68
30.16	Persentase realisasi belanja terhadap anggaran belanja	(realisasi belanja/anggaran belanja)x100%	%	90,95	89,04	89,58	90	92,00	95,00	95,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
30.17	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	(Total Belanja Pegawai/Total Belanja)x100%	%	38,81	37,40	50,50	49,99	49,99	49,99	49,99
30.18	Persentase belanja modal terhadap total belanja	(Total Belanja Modal/Total Belanja)x100%	%	13,31	15,16	11,70	20,00	20,00	20,00	20,00
30.19	Laporan keuangan berbasis akrual	Laporan keuangan berbasis akrual	Ada/tida k ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
30.20	Kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah	(Total PAD/Total Pendapatan)x100%	%	8,05	8,96	10,32	11,38	12,51	13,65	13,65
30.21	Persentase realisasi Penerimaan Pajak Daerah	(Realisasi Penerimaan Pajak daerah/Target Penerimaan Pajak)x100%	%	100,33	92,12	98,88	100	100	100	100
30.22	Persentase realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	(Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah/Target Penerimaan Retribusi Daerah)x100%	%	90,85	88,56	89,70	91	92	93	93
30.23	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	buah	20	19	19	19	19	19	19
30.24	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD x 100%	%	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
30.25	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah APBD Non Migas x 100%	%	1,49	1,68	1,74	1,86	2,18	2,34	2,34
30.26	Rasio belanja urusan pemerintahan umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100%	%	68,21	68,21	60,02	60,02	60,02	60,02	60,02
30.27	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD dikurangi satu x 100%	%	90,95	89,04	89,58	90	92,00	95,00	95,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
30.28	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD dikurangi satu x 100%	%	94,36	94,98	98,19	99,00	99	99	99
30.29	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA / total belanja anggaran tahun sebelumnya x 100%	%	0,75	2,09	6,30	4,50	4,50	4,50	4,50
30.30	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	Indeks	-	-	-	75,00	77,00	80,00	80,00
30.31	Apakah ada daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
30.32	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
30.33	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
30.34	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
32	**KEPEGAWAIAN**									
32.1	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Ijazah/Sertifikat Terakhir/Jumlah Jabatan) x 100 %	%	90	91	92	93	94	95	95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
32.2	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis kompetensi/Jumlah Pegawai yang membutuhkan sertifikat diklat teknis kompetensi) x 100 %	%	80	80	80	100	100	100	100
32.3	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat struktural peningkatan kompetensi	(Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Struktural Peningkatan kompetensi/Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100
32.4	Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi	(Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan izin belajar sesuai kebutuhan formasi/Jumlah Pegawai yang mengikti Tugas dan Izin Belajar) x 100 %	%	90	90	90	100	100	100	100
32.5	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik	Jumlah aparatur dg nilai SKP min baik/jumlah aparatur yg memiliki nilai SKP	%	100	100	99,99	100	100	100	100
32.6	Persentase penanganan kasus kepegawaian	Jumlah kasus yg ditangani/ jumlah kasusx 100%	%	90	600	120	100	100	100	100
32.7	Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Ukuran Kepuasan terhadap pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100
32.8	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Indeks	-	-	61	66	70	75	75

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
32.9	Indeks Merit Sistem ASN	Ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah	Indeks	-	-	-	0,75	0,775	0,825	0,825
32.10	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah x 100%	%	2,48	2,66	2,29	2,51	2,51	2,51	2,51
32.11	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	0,03	0,03	0,09	0,03	0,03	0,03	0,03
32.12	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	0,64	0,64	0,64	0,7	0,75	0,8	0,8
33	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**									
33.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite Pemda/Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses diwebsite pemda)x100%	%	-	-	-	95	96	97	97
33.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	(Jumlah Dokumen yang dipublikasi diwebsite pemda/Total Jumlah dokumen yang dirinci)x100%	%	-	-	-	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
34	**KESEKRETARIATAN DAERAH**									
34.1	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	Nilai	CC	B	B	B	B	BB	BB
34.2	Peringkat LPPD	Penilaian kemendagri terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	Peringkat	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB
34.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	B	n/a	80 (B)	83,34 (B)	86,55 (B)	89,87 (A)	89,87 (A)
31.1	**PENGADAAN**									
31.1	Persentase Jumlah Total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	(Jumlah Kontrak Infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n/jumlah kontrak keseluruhan tahun n) x 100 %	%	0	0	0	0	0	0	0
31.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif	%	-	-	-	55	57	60	60
31.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(Jumlah Nilai Belanja Langsung yang melalui pengadaan/Total belanja langsung)x100%	%	-	-	-	60	63	65	65

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Definisi Operasional / Rumus Penghitungan	SATUAN	TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Capaian			Target Capaian			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
31.4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Pengukuran pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ	%	-	-	100	100	100	100	100
35	**KESEKRETARIATAN DPRD**									
35.1	Jumlah perda yang dibahas dan tersedianya kebutuhan rapat pembahasan	Jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu / jumlah ranperda yang diusulkan) x 100 %	buah	100	100	100	100	100	100	100
36	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
36.1	Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder	(jumlah penelitian yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh penelitian dikali 100%)	%	-	-	-	-	75%	75%	75%
36.2	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	-	-	-	Sangat inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
37	**KEWILAYAHAN**									
37.1	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	(Jumlah LPM,PKK, RT/RW yang Aktif/Jumlah Total LPM,PKK, RT/RW) x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB IX
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota – Wakil Walikota terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto 2005 – 2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 telah disusun berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus dilaksanakan secara konsisten. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 disajikan pada subbab dibawah ini.

9.1 PEDOMAN TRANSISI

Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan tahun 2023. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB I Perubahan RPJMD ini, alasan utama yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 yaitu penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 dan terjadinya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi kebijakan yang berdampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan baik ditingkat pusat hingga ke daerah. Dari dampak tersebut perlu segera dilakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

9.1.1 Masa Transisi Tahun 2020

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021, yang mana telah memuat penyesuaian target indikator makro pembangunan dan target indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2021 sebagai dampak dari pandemic Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahuan 2021 yang didalamnya mengatur proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara RPJMD Tahun 2018 - 2023 dan RKPD tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir

dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah mulai pada Tahun 2021, sehingga pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan APBD Tahun 2021 sudah memuat klasifikasi, nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 tahun 2020.

9.1.2 Masa Transisi Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)

Untuk mensinergikan antar dokumen perencanaan, maka perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 ini memuat 5 (lima) tahun periode RPJMD, yaitu dimulai dengan realisasi tahun 2018, 2019, 2020 dan rencana target tahun 2021, 2022 dan 2023 yang mana disesuaikan dengan perubahan target pembangunan yang termuat dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan Tahun 2023 merupakan tahun terakhir RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dan RPJMD periode berikutnya belum tersusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan RKPD Tahun 2024 akan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005 – 2025, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, program strategis nasional, RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Adapun agenda penyusunan RKPD Tahun 2024 Kota Sawahlunto yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan sampai tahun 2023, menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional tahun 2024 dan hal-hal yang dianggap penting lainnya.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kondisi pandemi covid-19 yang merupakan bencana nasional sangat berpengaruh terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan aspek lainnya. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait dengan penanganan pandemic covid-19 dan upaya untuk pemulihannya. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan setelah ditetapkannya RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 ini.

Dalam mewujudkan sukses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RPJMD sebagai berikut:

1. Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Tahun 2021, serta penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan RKPD dan Perubahan RKPD Tahun 2023;
2. Prioritas Pembangunan Kota Sawahlunto dilaksanakan setiap tahun dan menambahkan prioritas *recovery* pasca pandemic covid-19 terkait disegala bidang;
3. Untuk menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya;

4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto berkewajiban menyempurnakan Perubahan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5. Kepala Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah secara peroidik;
6. Walikota dalam hal ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Perubahan RPJMD dan RKPD secara periodik.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Tahun 2018 – 2023 sangat tergantung kepada peran dari selurui pemangku kepentingan, untuk itu Pemerintah Kota Sawahlunto mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya **“ DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA “**

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA, SH.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI DAN NASIONAL

No	Indikator Pembangunan	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI					RPJMD KABUPATEN/KOTA					RPJMD KABUPATEN/KOTA				
		TARGET NASIONAL DALAM RPJMN					TARGET PROVINSI DALAM RPJMD PROVINSI					TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD PROVINSI					TARGET KABUPATEN/KOTA DALAM RPJMD KAB/KOTA				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	-1,60	3,44	3,40	4,57	4,60	-1,27	2,90	3,24	4,53	4,88	5,83	2,90	3,24	4,53	-
2	Tingkat Kemiskinan (%)	-	-	-	-	6,0-7,0	6,56	6,40	6,28	6,16	6,03	2,26	2,10	2,05	2,01	1,98	2,21	2,10	2,05	2,01	-
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	-	-	-	3,6-4,3	6,88	6,70	6,60	6,45	6,31	8,20	8,12	8,01	7,87	7,72	5,65	7,55	6,81	6,43	-
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	-	-	-	75,54	72,38	72,56	72,74	73,18	73,62	72,64	73,01	73,37	73,89	74,41	75,33	73,17	73,63	74,09	-
5	Rasio Gini	-	-	-	-	0,360-0,370	0,301	0,299	0,298	0,296	0,293	0,286	0,281	0,280	0,278	0,274	0,286	0,281	0,280	0,278	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	-	-	-	-	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN II

Target Program Prioritas yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1		**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**													
		Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)			15,7									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)			68,8									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US$/m³)			4,7									
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))			92,8			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/berbahaya dan rrsidu pestisida (%)	96,33				
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)			2.100,00			Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)		70	73	75	
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)			57			Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH		86,5	86,6	86,7	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/PoU)			5,5			Program Penanganan Kerawanan pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)		16	16	16	
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)			4,5			Program Pengawasan Keamanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)		90,14	97	97,5	
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)			25,1			Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Ikan (ton)	206,28				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)			<72			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan (ton)		217	217,5	218	
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)		23,2	36,67	36	
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)			3,8			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)	81				
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)			63			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)	23				
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)			5,3			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (unit)	35				
										Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya (unit)	5				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian(%)		21	23,53	26,47	
									Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)		80	83	85	
									Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)		30	45	60	
									Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)		47	50	53	
									Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)		1,7	1,8	1,9	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)			3,9			Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Padi (ton GKG)	17.874,46				
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)			7,2			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi karet (ton)	2.012,86				
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (Persen)			7,2				Jumlah Produksi kakao (ton)	566,12				
			Kontribusi PDB pariwisata (Persen)			5,2			Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	334,53				
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)			1.439 - 1.452				Jumlah Produksi Telur (ton)	228,92				
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)			6,9				Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	885,6				
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)			2,7-3,0			Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan sawah beririgasi (%)	0				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)			3,2-3,7			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perikanan (PD)	Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian	01:15,1				
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)			15			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Ternak yang aman dari penyakit PHMS dan zoonosis (%)	100				
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)			20,9				Penanggulangan Penyakit ternak / hewan (jenis layanan pertahun	-				
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)			14			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok tani yang naik skor sesuai Permentan (kelompok/Wilayah Binaan)	5				
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang			20				Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang studi banding (orang/ tahun)	-				
									Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/	Persentase Penyuluh yang naik jenjang jabatan (%)	5,55				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Perkebunan Lapangan	Jumlah Aparatur/ Penyuluh yang kompeten dibidangnya	-				
									Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rasio Ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian		01:14	01:12	1:10	
										Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)		14.700 (18.000)	14.800 (18.100)	14.900 (18.200)	
										Jumlah Produksi Karet (ton)		1.260 (2.050)	1.265 (2.100)	1.270 (2.150)	
										Jumlah Produksi Kakao (ton)		540 (567)	545 (568)	550 (570)	
										Jumlah Produksi :					
										Daging Sapi (ton)		353,68	354,68	355.68	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Daging Ayam (ton)		898,66	899,46	900,26	
										Telur (ton)		134,86	135,36	135,86	
									Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)		5	5	5	
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH (%)		90	93	95	
									Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)		10	8	8	
									Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)		5,55	5,55	5,55	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Jumlah kelompok tani yang Naik Skor sesuai Permentan (kelompok / Wilayah Binaan)		5	5	5	
									Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)	50				
										Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	1				
									Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial	Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 pengrajin (sentra industri)	1				
									Program Penataan Struktur Industri	Jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)	3				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)	64				
									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)		1,8	1,9	2	
									Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)		5	15	30	
									Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis (%)		80	90	100	
									Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)					
									Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	Jumlah Wisatawan (orang)					

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)					
									Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)					
									Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pengunjung yang mengatakan puas dan sangat puas terhadap objek wisata (%)		75	80	90	
										Persentase Objek Wisata Unggulan (%)		50	55,88	61,76	
									Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan (orang)		434.130	464.418	496.819	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)		18	19	20	
										persentase MoU kemitraan aktif (%)		75	80	90	
									Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)		0,5	0,5	0,5	
									Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan (PD)	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)	952				
										Jumlah Non Perizinan yang Diterbitkan (Dokumen)					

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (PD)	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)	28,28				
										Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)	0				
										Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)	0				
									Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (PD)	Jumlah Investor yang Berinvestasi (Perusahaan)	11				
									Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPTSPNaker		B	B	B	
									Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan MPP		0	B	B	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)		20	20	20	
									Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Lokal (milyar rupiah)		25	25	30	
										Nilai Investasi Nasional (milyar rupiah)		10	10	10	
										Nilai Investasi Asing (milyar rupiah)		1	1	1	
									Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)		100	100	100	
									Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (PD)	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	41,25				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,57				
									Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	4				
									Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kebutuhan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Yang Tersedia (%)		100	100	100	
									Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)		70	80	90	
									Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		73,68	74,51	75,35	
									Program Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)		10	15	20	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)			4,8			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Omset di pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (Juta)	22.764,00				
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)			3			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Pasar tradisional tertib ukur (pasar)	1				
									Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)		14	50	50	
										Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)		382	402	422	
									Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto		25.837,33	26.785,71	27.015,91	
									Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)		50	55	60	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)		30	30	30	
									Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)		75	100	125	
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)			4,3			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PD)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP				
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)			21,1			Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	Penetapan APBD	Tepat Waktu				
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)			N.A.				Penyusunan APBD Tepat Waktu (tanggal Penetapan APBD)					
									Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		WTP	0	0	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Persentase Capaian Realisasi Belanja (Quality Of Budget Planning) (%)		90	90	90	
										Maksimal Defisit APBD (%)		3	3	3	
									Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)		90	94	96,15	
									Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)		100	100	100	
2		**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**													
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah													

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang													
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif													
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah													
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.													
3		**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**													
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan							PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100%				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun & penerbitan akte kematian	0				
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan		100%	100%	100%	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumenpencatatan sipil		98%	98%	100%	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validasi data kependudukan		100%	100%	100%	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial						Program Pemberdayaan Fakir Miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase masyarakat miskin yang terfasilitasi	74%				
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%				
									Program Pembinaan dan Fasilitasi Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi	84,89%				
									Program Pembinaan dan Fasilitasi Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan/ jompo yang terfasilitasi	100%				
									Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	87%				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina	100%				
									PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%)		100%	100%	100%	
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%)		100%	100%	100%	
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat kurang mampu yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)		100%	100%	100%	
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)			205			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin Indikator (%)	100%				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)			18,6			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluarga sehat (%)	31%				
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)			11,6			Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai dengan standar (%)	78 &				
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)			62,5			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase UKBM yang aktif	81%				
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			8			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi Buruk mendapat perawatan	100 %				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)			21			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	94%				
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)			18,4			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standar	100%				
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)			7,5				Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai standar	100%				
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)			0,19				Penderita HIV/Aids yang mendapat pelayanan HIV/Aids sesuai standar	100%				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			231			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peresentase puskesmas yang terakreditasi	1				
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			365			Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Sarana prasarana puskesmas, puskesmas pembantu sesuai standar	75%				
			Insidensi hepatitis B (persen)			1,39			Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (%)	100%				
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun			8,9			Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	76%				
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)			21,8			Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Posyandu Lansia (unit)	75 unit				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase tekanan darah tinggi			34,1			Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	91%				
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi			80			Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	0				
			Persentase rumah sakit terakreditasi			90				Angka Kematian Balita per 1000	2,17				
									Pelaksanaan kegiatan operasional rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Operasional rutin puskesmas (puskesmas)	6 puskesmas				
									Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%				
										Persentase pasien gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%				
									Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya profesionalisme aparatur yang mengikuti pelatihan/ pertemuan (%)	100%				
									Program Peningkatan Kualitas Air	Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)	90				
									PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah kasus kehamilan pada usia remaja (kasus)	0				
									Program pelayanan kontrasepsi	pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)	66%				
									Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi	67				
										Pasangan usia subur yang menggunakan KB KR Mandiri (%)					
									Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase anak yang terpantau tumbuh kembangnya (%)	83				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	100%	100%	
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100%	100%	100%	
									PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	100%	100%	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		98%	98%	100%	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE PENGENDALIAN PENDUDUK		67%	68%	80%	
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		80%	90%	100%	
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100%	100%	100%	
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains			1. NA, 2. NA, 3. NA			Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK TK	99,7				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains			1. NA, 2. NA, 3. NA			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	109,65 %				
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)			8,95				Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	104,60%				
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)			13,79			Program Pendidikan Non Formal	Persentase Anak Putus Sekolah Yang Melanjutkan Pendidikan Disekolah Non Formal	89 %				
									Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Bersertifikat Pendidik (%)	84,2 %				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Persentase Guru yang berkualifikasi S1 Kependidikan	94.95 %				
									Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A	60,56 %				
									Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	Persentase SD Yang Memiliki Sarana Prasarana sesuai Standar (%)	83 %				
										Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	85%				
										APM SD	96.7				
										APM SMP	79.39				
									Program Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Menerima Reward	482 orang				
										Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	550 orang				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pendidikan Berkarakter	Kasus kenakalan remaja	7 kasus				
										Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	20%				
										Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	85%				
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100%	100%	100%	
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		97%	100%	100%	
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			69,87			Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65,62				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)			Menurun			Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	pratama				
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,27			Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase kasus perempuan yang tertangani	100%				
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			73,74			Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat capaian Kota layak Anak	Utama				
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan			53,75			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan PUG dan PP (%)		100%	100%	100%	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir			Menu run			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan dari Kekerasan (%)		100%	100%	100%	
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan (%)		100%	100%	100%	
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan khusus bagi anak (persen)		100%	100%	100%	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			56,5			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)					
									Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)		15	15	15	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)													
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha													
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)			1850 000										
			Bidang tanah yang diredistribusi													
			Bidang tanah yang dilegalisasi													

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas			48,4									
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500			1. 0; 2. 1; 3. 2.									
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)			47									
4		**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**													
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter							**Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah**	**Ketersediaan data bidang Kesbangpol dan PBD (%)**	100				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Presentase Penurunan Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto (%)**		100	100	100	
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD	Persentase budaya tak benda yang lestari	6,05				
									rogram Pengembangan Nilai Budaya (PD)	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	7,9				
										Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	20				
									Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase budaya benda yang lestari	53,81				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif					
									Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)		22,2	26,7	31,1	
									Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)		13,3	13,3	13,3	
									Program Pembinaan Sejarah	Presentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)		39	50	60	
									Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase budaya benda yang lestari (%)		57,18	60,55	63,92	
									Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan museum (orang)		31.000	32.000	33.000	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama						Program Pembinaan Keagamaan	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam se tahun	28				
										Persentase Imam Masjid yang berkualitas	10				
									PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase santri rumah/pondok tahfizdz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (persen)		30	40	50	
										Persentase imam masjid yang berkualitas (persen)		15	25	30	
									Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, dan Budaya	**Persentase Tindak Lanjut Permasalahan (%)**		65	70	75	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter													
5		**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**													
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)			94			**Program kawasan permukiman serta Permukiman Kumuh**	**Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)**	70				
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Persentase Luas Permukiman yang tertata (%)**	70	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)			84,8									
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)			58,23			**Program Penataan Penguasaan, Pemilikian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**	**Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum (%)**	100				
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)			3,3			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)**		100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
									Program Lingkungan Sehat Perumahan (PD)	persentase lingkungan sehat perumahan yang tertangani (%)	80				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)			82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase air limbah yang ditangani (%)**		84	85	86	
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)			2,98			**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**Persentase air limbah yang ditangani (%)**	80				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)			75.28% penanganan; 9.13% penguranggan			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)**	75	100	100	100	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)			95.9 % (JP: 27.1 % BJP: 68.7 %)			**Program Lingkungan Sehat Perumahan (PD)**	persentase lingkungan sehat perumahan yang tertangani (%)	87				
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)			10			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak SDGs (%)**	87	89,00	90,00	91,00	
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)			57,05998			**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainya (PD)**	**Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik (%)**	47.35				
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi			3			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)**		48,35	49,35	50,35	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)			116142,71									
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana			20			**Program Peningkatan Mitigasi Bencana**	**Persentase Dokumen Mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana**	0,51				
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)			11,4325			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase bencana yang tertangani (%)**		0,53	0,55	0,57	
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)			57			**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)**	0				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						**Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)**		80	84	87	
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)												
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)												
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)						**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**persentase panjang jalur rel kereta api yang digunakan (%)**	0				
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**persentase panjang jalur rel kereta api yang digunakan (%)**		80	85	90	

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)			100									
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)			1268									
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)			5,36									
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)			8,8									
			Persentase pengguna internet (Persentase)			79,2			Program Peningkatan Konektifitas Intra dan Antar SKPD	Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain	26				

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
										Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	60				
									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Publik yang terintegrasi		55	60	65	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis TIK		80	85	90	
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%			98,5									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)			73									
6		**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**													
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)			84,3			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup**	60				
			Indeks Kualitas Air (IKA)			55,3			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup**		64	67	70	
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			59,5									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)			63,5									
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)			0,1			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase bencana yang tertangani (%)**	0,51				
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)			0,81			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase bencana yang tertangani (%)**	0,51	0,53	0,55	0,57	
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)			4									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)			12,8			**Program Perlindungan dan Koservasi Sumber Daya Alam (PD)**	**Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)**	100				
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)			53,1			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup	100	100	100	100	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)			9,3									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)			2,5									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA						
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)			6,8									
7		**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**													
		Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)			75,4			**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, dan Budaya**	**Persentase Tindak Lanjut Permasalahan (%)**	-	65	70	75	
		Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional			95,47									

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas			80			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
			PersentaseInstansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks RB Baik Keatas			70										
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas			45										
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index			0,24										
			Global Terorism Index			4.34										

No	KODE (PN/PP)		INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD KABUPATEN/KOTA							
				TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian			>55%									
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional			3,2									

LAMPIRAN III

LOGICAL FRAMEWORKS PERUMUSAN PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto	Penyediaan sarana dan Prasarana pendidikan yang belum merata dan sesuai standar	Masih rendahnya Kualitas dan kwantitas sarana dan prasarana penunjang Pendidikan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Penyediaan Pelayanan, sarana dan Prasarana pendidikan yang merata dan terjangkau disetiap jenjang pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan
			Masih rendahnya Kualitas Pendidikan Usia Dini				Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia dini
			Kemampuan orang tua dalam menyediakan sarana dan perlengkapan sekolah bagi anakanya masih terbatas				Memberikan reward dan penghargaan terhadap siswa dan Mahasiswa berprestasi
							Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dengan konsep millenial, nyaman dan menyenangkan secara merata
							Memberikan bantuan sarana dan perlengkapan sekolah bagi siswa baru SD dan SMP
		Masih rendahnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	SDM tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum merata			Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan merata	Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
			Belum Optimalanya Pelaksanaan Pelatihan untuk peningkatan SDM guru				Meningkatkan Kualitas Guru sebagai Role model dengan memberi ketelananan sikap dan perilaku bagi peserta Didik sertaa Pemerataan Guru di setiap Satuan Pendidikan
			Terbatasnya kemapuan guru dalam penggunaan IT				Melakukan Kerja Sama dengan guru di Daerah lain dengan bentuk Magang guru dan studi Banding
		Belum Optimalanya Pengembangan Kurikulum berbasis Kopetensi siswa dan Karakter	Masih rendahnya SDM guru dalam pengembangan Kurikulum berbasis Karakter			Pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi siswa dan karakter	Peningkatan dan Pengembangan Kurikulum Penididkan
			Pelaksanaan Penididikan yang berkarakter yang belum Optimal				Menumbuhkan pendidikan yang berkarakter dengan peningkatan pembelajaran agama, etika dan moral diseluruh jenjang pendidikan dengan melibatkan tokoh agama, adat dan MUI
		Belum Optimalanya Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah	Masih rendahnya Kualiatas pendidikan luar sekolah			Optimalisasi Pendidikan Luar Sekolah dan kerjasama dengan lembaga pendidkan lainnya	Meningkatkan Kualitas Pendidikan luar sekolah dan Mengoptimalkan fungsi SKB
			Belum Optimalnya fungsi SKB dalam mendukung pendidikan Luar sekolah				Meningkatkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi/Universitas Favorit untuk mempermudah akses lulusan untuk melanjutkan Pendidikan termasuk Pendirian Kampus Dikota sawahlunto
			Belum Tersedianya Perguruan Tinggi dan Universitas di Kota Sawahluntountuk mempermudah Akses bagi anak-anak Sawahlunto yamg tamatan SMA dan SMK				Mempermudah Perizinan di bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	Masih rendahnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Masi rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	Belum terpenuhinya Kualitas dan Kwantitas tenaga kesehatan yang memenuhi standar	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	Melakukan Pengekrutan dan Penyebaran tenaga Kesehatan termasuk pengembangan sistim Karir dan penjenjangan serta insentif finansial dan non finansial untuk pemenuhan tenaga Kesehatan
		Masih rendahnya kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	Masih terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat			Peningkatan kualitas dan ketersediaan, sarana prasarana pelayanan kesehatan yang merata	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
			Belum optimalnya standar standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya				Menyusun, Menetapkan dan melaksanakan berbagai standar guideline Pelayanan Kesehatan yang diikuti dengan pengembangan sistim monitoring dan evaluasinya
			Masih kurangnya pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan				Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan
			Belum tercapainya jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak				Mengupayakan jaminan kesehatan masyarakat melalui jaminan kesehatan 100 % dan kerjasama para pihak
			Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan				Meningkatkan Kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran obat dan makanan
			Masih kurangnya Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar				Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar
		Masih rendahnya kesadaraan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	Masih Kuranganya kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik			Peningkatan kesadaraan dan peran serta masyarakat dalam penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan badan, kesehatan lingkungan, gizi, sanitasi yang baik, hygiene, dan pola asuh anak yang baik
			Masih rendahnya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia				Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia
			Masih kurangnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan				
			Masih kurangnya sarana dan Prasarana penanganan pasien Covid-19				Meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19
			Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19				Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan untuk pemutusan rantai penularan Covid-19

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Masih Rendahnya Konvergensi terhadap penanganan stunting	Masih rendahnya konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan			Konvergensi penanganan stunting	Meningkatkan konvergensi terhadap penurunan stunting di setiap kecamatan
							Meningkatkan kualitas Gizi ibu hamil dan menyusui
			Masih Kuranganya peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak				Meningkatkan peran dan upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita anak
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	masih rendahnya kualitas infrastruktur kota	Topografi yang curam di Kota Sawahlunto.	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota	Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Tingginya Pembiayaan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil				Meningkatkan kualitas Sistem Jaringan Drainase kota
			Status lahan yang sebagian masih dikuasai oleh PT. KAI, PT.BA dan Tanah Ulayat				Menyediakan infrastruktur Jalan dan jembatan yang mantap dalam menunjang peningkatan ekonomi daerah
			SDM yang masih terbatas (tenaga terampil atau tenaga Ahli)				Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fungsi utilitas kota
			Belum maksimalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat				Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial
			Banyaknya daerah yang rawan bencana di kota sawahlunto				mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum				Meningkatkan dan memelihara Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat dilakukan lebih luas
			Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tenang pembangunan teruta pembukaan jalan baru dan pelebaran jalan				Membangun Jalan ke Sentra Produksi pertanian dan ekonomi kerakyatan lainnya
							Menyelesaikan Pembangunan Jalan yang Berkualitas dari Pondok Kapur-Muaro Kalaban
							Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan di dalam Kota Sawahlunto
							Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
							Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana
							Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan prioritas
							Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum
		Belum tercapinya Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	Kurangnya sumber air bersih yang ada dikota Sawahlunto			Peningkatan Kualitas Pelayanan air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak				Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi layak
			Topografi yang curam di Kota Sawahlunto.				
			Tingginya Pembiayaan terhadap Pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto akibat kondisi tanah yang kurang stabil				
		Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang yang masih rendah	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian ruang	meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman kota untuk mendukung pariwisata
			Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang				Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang
			Belum terwujudnya penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota				Mewujudkan penataan bangunan dan perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Pencapaian Universal Akses 100-0-100	Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Belum tercapainya Universal Akses 100-0-100	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman
			Kualitas permukiman pada kawasan kumuh yang ada masih rendah				Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh
			Masih banyaknya kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh				Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
	Masih rendahnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana	masih rendahnya kesiagaan masyarakat dalam mitigasi bencana	belum optimalnya kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kesiapsiagaan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
							Meningkatkan ketangguhan kota terhadap bencana
							Menyediakan informasi tentang daerah rawan bencana
			meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana				meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana				Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana
			Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana				Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana
			Belum optimalnya Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Masih minimnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana				Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana
			Belum optimalnya penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana				Meningkatkan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Belum optimalnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana				Mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana akibat bencana
			Belum optimalnya pelayanan dasar perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana				Menyediakan pelayanan dasar perlindungan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
			Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				Meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
			Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran				Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	Belum terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pelayanan pemerintah terhadap masyarakat lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya belum maksimal.	Adanya lansia, penyandang disabilitas, penyandang gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya dengan kondisi ekonomi terbatas.	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Peningkatan pelayanan pemerintah terhadap mayarakat yang lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Memberikan bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
			Masih terbatasnya tingkat pendidikan dan keahlian lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya				Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang ramah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
			Masih minimnya bantuan dan fasilitasi permakanan, sandang, pendidikan dan kesehatan bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota
			Terbatasnya penyediakan sarana prasarana dan infrastruktur yang ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal
			Belum semua masyarakat penyadang masalah sosial terdata dalam DTKS				Melaksanakan pemeliharaan TMP
			Keterbatasan ketersediaan anggaran dalam penanganan masalah sosial				Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Belum maksimalnya pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	Belum semua OPD/ lembaga dan masyarakat memahami konsep Pengarusutamaan Gender		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
			Belum semua perempuan memiliki kesempatan & pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan & informasi				Meningkatkan kualitas keluarga
			Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan				Menerapkan anggaran berbasis gender
			Masih adanya pernikahan anak/ usia dini				
		Belum optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak			Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan
			Kurang waspadanya orang tua mengawasi pergaulan anak & dalam pemanfaatan teknologi				Meningkatkan perlindungan terhadap anak
			Masih adanya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan				Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak				
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	Tingginya angka pengangguran terbuka	Kualitas angkatan kerja yang masih rendah	Tersedianya lembaga pelatihan yang belum sesuai standar	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
			Kurangnya Instruktur yang bersertifikasi				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
			Masih mininnya sarana dan prasarana untuk pelatihan dan belum sesuai standar				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK
		Perluasan kesempatan kerja masih rendah	Lowongan kerja dan perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto terbatas.			Peningkatan kerjasama dengan perusahaan dan daerah lain untuk perluasan kesempatan kerja	Melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan
			Kurangnya minat dan motivasi para pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah				Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri
			Ketidak sesuaian antara kualifikasi angkatan kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri				Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi
							Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi kurikulum pendidikan dalam mengarahkan minat bakat siswa
		Ketersediaan informasi dan bursa Tenaga kerja masih kurang	Belum tersedianya data dan informasi yang update terkait bursa tenaga kerja			Peningkatan akses tenaga kerja terhadap informasi dan bursa kerja	Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi
							Menyediakan data dan informasi yang up to date terkait tenaga kerja secara online
			Belum tersedianya aparatur BKOL				meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
			Masih minimnya sarana dan prasarana BKOL				meningkatkan kualitas pengelolaan bursa kerja online
			Belum adanya fungsional pengantar kerja				
		Pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja belum optimal	Masih minimnya perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama			Peningkatan koordinasi dengan pengawas tenaga kerja untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
			Masih minimnya perusahaan yang mempunyai LKS bipartit, tripartit				Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
			Monitoring dan evaluasi tenaga kerja belum optimal				Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Belum terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Belum maksimalnya pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	Belum semua OPD/ lembaga dan masyarakat memahami konsep Pengarusutamaan Gender		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelaksanaan Pembangunan yang responsif Gender dan berkeadilan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
			Belum semua perempuan memiliki kesempatan & pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan & informasi				Meningkatkan kualitas keluarga
			Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan				Menerapkan anggaran berbasis gender
			Masih adanya pernikahan anak/ usia dini				
		Belum optimalnya Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak			Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan hak anak dalam pembangunan	Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan
			Kurang waspadanya orang tua mengawasi pergaulan anak & dalam pemanfaatan teknologi				Meningkatkan perlindungan terhadap anak
			Masih adanya anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan				Perluasan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender
			Meningkatnya kasus kriminal yang dilakukan oleh anak				
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	Kemandirian daerah dalam memenuhi ketersediaan pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih kurang	Ketersedian pangan yang belum merata	Produksi beberapa bahan pangan tidak merata	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi pangan berbasis lokal	Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
			Fluktuasi harga pangan yang menyebabkan aksesbilitas masyarakat terganggu				Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan
			Masih adanya daerah yang rawan pangan				Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan
			rendahnya kemauan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga yang aman dan bebas bahan kimia				Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan
		Penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal	Masih bergantungnya masyarakat pada beras (nasi)			Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman pangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan
			Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang B2SA (Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman)				Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan
			Belum keseluruhan masyarakat tersosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal alternatif non beras				Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Lambatnya kejelasan status hukum kepemilikan tanah	Belum jelasnya status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Percepatan kejelasan status hukum kepemilikan tanah	Memperjelas status hukum kepemilikan tanah garapan di Kota Sawahlunto
			Masih rendahnya kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah				Meningkatkan kualitas validasi subjek dan objek redistribusi serta ganti rugi tanah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Belum terselesaikannya kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto				Mempercepat proses penyelesaian kepemilikan tanah PT. BA, PT. KAI, Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kota Sawahlunto
			Kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan belum maksimal				Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah sesuai peruntukkan
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	Sarana dan Prasarana kota yang belum merata dan memadai	Masih rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Kurangnya Kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah
			Kurangnya SDM tentang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai				Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup
			Minimnya Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan				Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang untuk pengendallian, pencemaran dan kerusakan serta kebersihan lingkungan
			Belum berjalannya sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup				Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang lingkungan hidup
			Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan masihb rendah				Meningkatkan Kualitas SDM dan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan
			Kurangnya partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup				Meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap lingkungan Hidup
			Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan				Menumbuhkan kesadaran masyarakat, pengendalian dan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan lingkungan
			Kurangnya pengendalian pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan				Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
			Belum optimalnya pemulihan lahan bekas tambang				Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang,
		Rendahnya kualitas pengelolaan persampahan	Belum optimalnya penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah			Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan	Menerapkan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah
			Kualitas pengelolaan persampahan belum optimal				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
			Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah				Meningkatkan kesadaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah				
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Belum terlaksananya secara maksimal kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik	Belum semua masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city
			Belum semua PD memanfaatkan data kependudukan dalam proses perencanaan / pelaksanaan kegiatan				Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
							Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
							Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi
							Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
						Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
			Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya				Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
			Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN				Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
			Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan				Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
			Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani				Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
			Belum terlaksananya penerapan standar pelayanan				meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	Masih rendahnya kualitas Kesehatan Masyarakat	Masi rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga medik dan tenaga kesehatan	Masih Rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga	Memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga	meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga
			Belum adanya grand design pembangunan kependudukan (GDPK)				menyusun grand design pembangunan kependudukan (GDPK)
			Kurangnya Sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat				Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian penduduk bagi masyarakat
			Belum adanya regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat				Menyusun regulasi dan pencapaian indikator Indeks Keluarga Sehat
			Kurangnya akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran				Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran
			Masih Kuranganya ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga				meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sesuai siklus hidup serta menguatkan karakter di keluarga
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Belum tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	Masih kurangnya kualitas dan pemeliharaan infrastruktur kota	Masih rendahnya pelayanan moda transpotasi Kota	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai	Peningkatan kualitas dan pemeliharaan Infrastruktur Kota	Meningkatkan pelayanan moda transpotasi Kota
			Belum terpenuhinya pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api				Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api
			Masih minimnya Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata				Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata
			Masih rendahnya Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum				Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
			Belum optimalnya pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor				Mengoptimalkan pelayanan dan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor
			Masih minimnya penyediaan perlengkapan jalan kota				Meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan kota
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Belum adanya regulasi tentang tata kelola smart city	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city
			Belum terintegrasinya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah				Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
			Belum tersedianya Kompetensi SDM bidang teknologi informasi				Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
			Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City				Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
		Belum Optimalnya Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	Belum Optimalnya kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi			Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	Masih rendahnya kualitas koperasi	Masih rendahnya kualitas pengurus koperasi	Terbatasnya kegiatan pelatihan berbasis kopetensi dan bersertifikat		Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pengurus koperasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
			Pengangtian pengurus koperasi yang tidak memperhatikan kualifikasi penggantinya				Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi
		Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi	Belum optimalnya tugas dan fungsi pengurus dalam kelembangaan koperasi				Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi
			Masih rendahnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT				Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi
			Kurang optimanya pengawasan terhadap koperasi				Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan koperasi
		Menurunnya Volume usaha koperasi	Tidak berkembangnya Usaha koperasi selain simpan pinjam			Peningkata daya saing usaha k	Meningkatkan daya saing usaha koperasi
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
	Rendahnya realisasi investasi	Masih rendahnya kualitas promosi dan informasi investasi	Belum tersedianya peta potensi investasi		tersedianya iklim investasi yang kondusif	Peningkatan kualitas promosi dan informasi investasi	Meningkatkan kualitas promosi investasi
			Belum tersedianya dokumen informasi dan dokumen perencananaa pendukung investasi (Masterplan, FS, DED, BUSINESS PLAN)				Meningkatkan kualitas promosi investasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Belum optimalnya perumusan Desain promosi strategis potensi dan peluang investasi daerah				Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal (P)
		Iklim Investasi yang belum kondusif	Belum optimalnya proses perizinan penanaman modal			Penjaminan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
			Kebijakan terhadap pemberian insentif penanaman modal belum ada				Memberikan kemudahan bagi investor
			Permasalah kepemilikan lahan/ tanah ulayat				Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto
			masih minimnya kualitas SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal				Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto
			masih rendahnya kualitas Sarana dan prasaran perizinan				Optimalisasi MPP dalam meningkatkan investasi di Kota Sawahlunto
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan olahraga di Kota Sawahlunto	Masih rendahnya daya saing kepemudaan	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan.			Meningkatkan daya saing pemuda dan keolahragaan	Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan
							Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan
		Masih rendahnya daya saing olahraga	Belum tersedianya sarana dan prasana olah raga yang berkualitas				Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan
			Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga antara propinsi dan daerah, belum tertatanya sistem pembibitan				
			Kurangnya Pelatih yang bersertifikasi				
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Belum terintegrasinya ketersediaan informasi data statistik daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Meningkatkan ketersediaan informasi data statistik daerah yang terintegrasi
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
	Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Belum Optimalnya penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya informasi pemerintah daerah berbasis teknologi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
	Belum Optimalnya Status Warisan Tambang Batubara Ombilin sebagai Situs Warisan UNESCO utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Beberapa bangunan atau benda cagar budaya belum terpelihara dan dilestarikan degan baik	Kesadaran masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian warisan budaya dunia yang perlu ditingkatkan	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Peningkatan pelestarian cagar budaya melalui koordinasi pihak-pihak terkait untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
			Tingginya biaya pemeliharaan dan pelestarian bangunan atau benda cagar budaya				Melakukan revitalisasi cagar budaya dan penataan museum
			Sebagian besar bangunan/benda cagar budaya yag terdaftar sebagai warisan dunia dimiliki oleh perusahan tambang/pihak ketiga sehingga dalam pengelolaan mengalami masalah				Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WTBOS
							Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Masih rendahnya kualitas SDM situs warisan dunia				Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran cagar budaya dan revitalisasi Rumah Adat
			Belum di tetapkannya badan pengelola WTBOS				Pemandirian kelembagaan pengelola cagar budaya
							Optimalisasi status OCMHS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
			Sebagian besar situs/cagar budaya belum dilestarikan dengan baik				Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum
		Belum optimalnya pemanfaatan Potensi budaya lokal	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pembangunan kebudayaan	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	Mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai karakter daerah	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto
							Mengintegrasikan pendidikan budaya daerah kedalam kurikulum Muatan Lokal dalam pendidikan
			kurang optimalnya kelembagaan budaya				Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas
							Meningkatkan SDM pelaku seni dan budaya daerah
23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
		Belum maksimalnya Kualitas Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan	Peningkatan Kualitas Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	Peningkatan pengelolaan dan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
			Masih terbatasnya Kualitas SDM Pengelola perpustakaan dan kearsipan				Peningkatan layanan arsip dan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
			Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat				Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						
		Belum maksimalnya Kualitas Pengelolaan perpustakaan	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pengelolaan perpustakaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan perpustakaan	Peningkatan pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
			Masih terbatasnya Kualitas SDM Pengelola perpustakaan				Peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
			Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat				Meningkatkan SDM Penyelenggara dan pengelola perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
	URUSAN PILIHAN						
25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
	Masih Rendahnya Konsumsi Ikan	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan	Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi ikan			Peningkatan kualitas budidaya peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
			Kurangnya promosi tentang produk olahan-olahan ikan				Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan
		Sarana prasarana produksi dan pemasaran/distribusi masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Belum memadainya sarana dan prasarar				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan
			Kondisi infrastruktur yang belum mema				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perikanan
		Belum optimalnya pengelolaan budidaya ikan	Ketersediaan dan distribusi induk dan b				Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat
			Kualitas dan keterampilan SDM peternal				Meningkatkan SDM Peternak dan Pembudidaya ikan
26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhdap perekonomian Kota Sawahlunto	Belum optimalnya pengelolaan Destinasi Pariwisata di Kota sawahlunto	Beberapa objek wisata strategis belum mempunyai dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Peningkatan kualitas dan Daya Tarik Destinasi Wisata	Menyusun perencanaan teknis pengembangan pariwisata sesuai RIPARDA

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Kualitas sarana pendukung objek wisata belum memadai				Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah
							Mengembangkan kawasan Geopark Kota Sawahlunto sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark
							Menyediakan fasilitas umum dan taman bermain bagi anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya di objek wisata
			Kurang optimalnya pemeliharaan objek wisata				Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus
			Akses dan konektivitas menuju destinasi wisata belum memadai				
			kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata				Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto
		Kurangnya Atraksi pada setiap objek wisata	Sarana dan prasarana atraksi tidak memadai			Peningkatan kualitas event dan atraksi wisata yang berskala nasional dan internasional	Melaksanakan event-event kepariwisataan yang berskala nasional dan internasional
			SDM pelaku atraksi belum mendukung				Menyediakan atraksi wisata yang berkualitas dan aman bagi pengunjung
		Kualitas Promosi masih rendah	SDM pelaku promosi pariwisata belum mendukung			Peningkatan kualitas promosi wisata yang tepat sasaran	Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran
			Kemitraan / kerjasama biro perjalanan belum aktif				Meningkatkan Pengembangan bauran pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan konektivitas
			Sarana dan prasarana promosi pariwisata belum memadai				Meningkatan kualitas SDM promosi Pariwisata
			Promosi pariwisata dilakukan secara manual				
		Industri Pariwisata belum berkembang	Kurangnya sarana dan presarana penginapan dan Akomodasi yang representatif			Pembinaan terhadap pelaku industri pariwisata	Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata
			Belum tersedianya rumah makan yang representatif				Melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri pariwisata
			Sarana dan prasarana transportasi belum memadai				
			Belum tersedianya Biro perjalanan yang propesional				
		Kelembagaan Pariwisata yang belum profesional	Belum tepatnya pembagian tupoksi dalam kelembagaan			Penguatan kelembagaan pengelola pariwisata di tingkat desa	Meningkatkan Kualitas serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata
			Belum meratanya penguatan organisasi kelompok sadar wisata yang ada				Meningkatkan Koordinasi Pemerintah, Pemerintah terdepan dengan lebaga pariwisata
			Kurangnya koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah				
			Kurangnya SDM dari pokdarwis				
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi Kreatif	SDM pelaku ekonomi kreatif belum memadai			Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekonomi kreatif	Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto
			Sarana dan prasarana pendukung ekonomi kratif belum ada				Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap peningkatan kualitas SDM pelaku ekonomi kratif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Akses pelaku ekonomi kreaatif terhadap sumber pendanaan belum luas				
27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
	Rendahnya pertumbuhan PDRB lap	Masih rendahnya pertumbuhan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Lahan terbatas dan alih fungsi lahan per	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya ketahanan pangan serta produksi sektor pertanian dan perikanan	Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian dan Perkebunan	Menyiapkan regulasi dan komitmen daerah terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			Topografi wilayah dan volume air kurang mencukupi untuk pertanian utama padi.				Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
			Serangan hama dan penyebaran penyakit terhadap tanaman pertanian yang relatif tinggi.				Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
			Rendahnya kemauan petani untuk meningkatkan produktifitas pertaniannya.				Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan
			Ketersediaan kuantitas dan kualitas sara				Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi
			Belum optimalnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi				Melakukan Revitalisasi tanaman pertanian dan peningkatan jumlah, dan kapasitas penyuluh serta meningkatkan sumberdaya petani dan peternak
							Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat
							Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman
			Kualitas pembinaan dari Penyuluh yang				Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian
		Pengembangan potensi pertanian dan peternakan pasca panen belum optimal	Belum berkembangnya kelembagaan petani dan usaha tani pada sektor pertanian			Mendorong Hilirisasi Industri hasil Pertanian, Peternakan dan perikanan	Menguatkan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran
			Belum optimalnya sanitasi dan higiene pada unit usaha produsen/ distributor produk asal hewan				Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat
			Belum optimalnya mutu dan kesehatan produk asal hewan				Mengembangkan dan meningkatkan agroindustri dan agrowisata didaerah-daerah potensial
			Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk berusaha disektor pertanian				Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan melalui penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian dan perikanan
28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
	Menurunnya PDRB sektor perdagan	Rendahnya produktivitas, daya saing	Banyaknya UKM yang tidak berkembang	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
			Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.				Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							Memfasilitasi pembiayaan UMK di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai lembaga badan usaha seperti BUMD maupun BUMDes di Kota Sawahlunto
							Pembentukan dan pengembangan BLUD dana bergulir
							Melakukan Validasi dan update data dasar disektor ekonomi kerakyatan
			Masih rendahnya kemampuan UMKM u				Mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam penggunaan Teknologi dalam pemasaran dan peningkatan usaha
			Terbatasnya jaringan perdagangan antar				Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah
							Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat
		Belum optimalnya fungsi pasar	Masih kurangnya sarana dan prasarana			Peningkatan kualitas dan fungsi pasar dalam aktivitas ekonomi masyarakat	Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif
			Masih adanya pelaku usaha yang kuran				Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur
							Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto
			PKL dilingkungan pasar dapat mengakib				Menciptakan ruang-ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
	Rendahnya pertumbuhan PDRB un	Masih rendahnya daya saing produk	Besarnya potensi komoditi unggulan yang belum dikembangkan secara optimal	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan	Peningkatan kualitas produk unggulan daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
			Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
							Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan
			Minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha indistri kecil dan menengah				Memfasilitasi sarana dan prasarana teknologi industri
							Meningkatkan kualitas dan daya saing produk IKM kota Sawahlunto dalam menghadapi revolusi industri 4.1
			Minimnya standarisasi produk industri				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
			Masih lemahnya SDM pelaku industri				Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan pelaku industri dengan instruktur yang handal dan profesional
			Belum optimalnya fasilitas yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitas kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan				Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
							Memfasilitasi bantuan permodalan dan bantuan pendampingan management usaha mulai dari hilir sampai hulu (pemasaran) bagi pelaku industri
							Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update
							Melakukan pendataan dan updating data terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
							Meningkatkan koordinasi terhadap upaya recovery ekonomi terhadap pelaku IKM dan UMKM yang terdampak covid 19
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
30	**UNSUR SEKRETARIT DAERAH**						
	Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas rumah Tahfidz dan Taman Bacaan Alquran	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz	Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas rumah Tahfidz dan Taman Bacaan Alquran	Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz
	Belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya ketersediaan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Belum optimalnya fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat	Pembentukan Pusat layanan usaha terhadap pengembangan usaha masyarakat	Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM
		Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, veritikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri	Masih terbatasnya informasi dan jejaring kerjasama pemerintah kota dengan pihak lain		Meniingkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, veritikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri	Perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah	Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, veritikal, perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan pihak swasta baik di dalam maupun di luar negeri
	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur	Belum optimalnya kualitas ASN yang bersih dan inovatif		Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
32	**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**						
	Belum optimalnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Belum optimalnya sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan	Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Perbaikan sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah dan DPRD
33	**UNSUR PERENCANAAN**						
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Masih rendahnya kualitas dokumen p	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara konsisten dan berkelanjutan	Peningkatkan kualitas SDM perencana ditingkat Kota, perangkat daerah dan desa
			Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan				Pengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
							Peningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
			Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan				Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan
34	**UNSUR KEUANGAN**						
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan	Terbatasnya potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah	Terbatasnya potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Penerapan standar akuntansi akuntasi pemerintah berbasis	Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	akuntabel		Kesadaran dan Tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak, membayar pajak dan retribusi daerah relatif masih rendah	dan inovatif		accrual	Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan
			Kualitas pengelolaan keuangan daerah y				Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT
35	**UNSUR KEPEGAWAIAN**						
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	Belum semua ASN memberikan pelayanan maksimal sesuai tupoksinya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
			Penempatan pegawai masih ada yang belum sesuai dengan kompetensi dan keahliannya				Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
			Masih rendahnya kemampuan inovasi ASN				Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
			Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan				Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
			Belum maksimalnya upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/ budaya melayani				Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
			Belum terlaksananya penerapan standar pelayanan				meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
36	**UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
	Belum terwujudnya secara optimal aparatur pemerintah daerah yang berkualitas	Masih terbatasnya kualitas SDM aparatur	Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan ASN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas SDM aparatur	Meningkatkan kualitas ASN yang bersih dan inovatif
			Pelaksanaan diklat belum terorganisir antar PD				Meningkatkan kualitas pelayanan pada pemerintahan terdepan
							Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparatur dalam upaya peningkatan pelayanan, kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani, serta mempercepat penerapan standar pelayanan
							Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan keahliannya
							Mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan BUMD
							meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
37	**UNSUR PENELITRIAN DAN PENGEMBANGAN**						
	belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	belum optimalnya fungsi kelitbangan	Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Meningkatkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian	Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian
			Belum adanya kerjasama pengembangar				Meningkatkan komitmen daerah terhadap pemanfaatan hasil penelitian
			Inovasi yang sudah terbentukmenjadi S				
			Implementasi terhadap hasil kajian belu				
38	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
	Belum optimalnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Belum optimalnya komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Terwujudnya birokrasi yang besih dan akuntabel	Perbaikan sistem dan Tata kelola penyelenggaraan dan pengawasan Pemerintahan	Meningkatkan komitmen daerah dalam pencapaian kinerja dan pengendalian internal pemerintah
39	**UNSUR KEWILAYAHAN**						

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Masih Rendahnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	belum optimalnya regulasi tentang tata kelola smart city	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	meningkatnya kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi informasi	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi	Menyiapkan regulasi tentang tata kelola smart city
			belum tersedianya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi				Menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi
			masih rendahnya Kompetensi SDM bidang teknologi informasi				Menyediakan dan meningkatan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi
			masih rendahnya kan keamanan informasi pemerintah daerah				Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah
			belum optimlanya kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City				Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan terkait Smart City
		Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik yang belum memadai	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi			Penerapan teknologi dalam pelayanan Publik	Memperkuat kelembagaan dan manajemen pelayanan yang teritegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi
38	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Masih minimnya Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Masih kurangnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto	Peningkatan Moral, Etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
			Masih minimnya ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
			Masih minimnya pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat				Meningkatkan pendidikan politik, etika dan budaya politik ditengah masyarakat
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				Meningkatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
			Masih adanya gejala dan konflik sosial di masyarakat				Mengatasi gejala dan konflik sosial di masyarakat
			Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan				Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan
			Masih kurangnya pelaksanaan patroli dalam upaya Penegakan Perda				Melaksanakan patroli keamanan sebagai upaya dalam penegakan Perda
			Masih kurangnya kapasitas dan SDM PPNS				Meningkatkan kapasitas SDM PPNS

BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN
RPJMD
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2018 - 2023

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta No. 3 Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424
(0754) 61009, Fax (0754) 62200
barenlitbangda.sawahluntokota.go.id
bappedaswl@gmail.com